



KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



LAPORAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026





GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini dapat terselesaikan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KLHS – RPJMD dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam Dokumen RPJMD.

Sehingga dengan tuntasnya Dokumen KLHS - RPJMD ini dapat dimanfaatkan dalam mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) kedalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 untuk capaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan mengakomodir isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama melakukan yang terbaik bagi Provinsi Kalimantan Tengah guna terwujudnya Kalimantan Tengah Makin **BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis**”

Palangka Raya, Oktober 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul	
Kata Pengantar	i
Daftas Isi	ii
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1-1
1.2. Maksud dan Tujuan	1-3
1.3. Dasar Hukum.....	1-3
1.4. Ruang Lingkup	1-4
1.5. Kerangka Berpikir	1-5
1.6. Metode.....	1-5
1.7. Sistematika Pembuatan KLHS RPJMD	1-6
BAB 2 DASAR TEORI	
2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	2-1
2.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	2-2
2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	2-3
2.4. Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup	2-3
2.5. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem.....	2-5
2.6. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	2-9
2.7. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim.....	2-10
2.8. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati	2-11
2.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.....	2-11
2.9.1. Daya Dukung Permukiman.....	2-11
2.9.2. Daya Dukung Lahan Pertanian.....	2-12
2.9.3. Daya Dukung Air.....	2-13
BAB 3 GAMBARAN UMUM WILAYAH	
3.1. Kondisi Geografis Wilayah Kalimantan Tengah.....	3-3
3.1.1. Wilayah Administrasi	3-3
3.1.2. Ekoregion.	3-4
3.1.3. Geologi dan Tanah.....	3-13
3.1.4. Hidrologi	3-13
3.1.5. Daerah Aliran Sungai (DAS).....	3-14
3.1.6. Klimatologi	3-16
3.1.7. Tutupan Lahan	3-17
3.1.8. Deforestasi	3-17
3.1.9. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kerusakan Lahan Gambut.....	3-20
3.1.10. Kawasan Hutan	3-24
3.1.11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	3-24
3.1.12. Kawasan Rawan Bencana.....	3-26



3.1.12.1. Kawasan Rawan Tanah Longsor.....	3-27
3.1.12.2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang	3-27
3.1.12.3. Kawasan Rawan Banjir	3-27
3.1.12.4. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan	3-27
3.2. Kondisi Demografi Provinsi Kalimantan Tengah.....	3-28
3.2.1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan	3-28
3.2.1.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	3-28
3.2.1.2. Sex Ratio Penduduk.....	3-30
3.2.1.3. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur	3-30
3.2.1.4. Ketenagakerjaan	3-31
3.2.2. Kemiskinan	3-35
3.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	3-39
3.3. Kondisi Umum Muatan KLHS.....	3-42
3.3.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	3-42
3.3.1.1. Status Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air	3-42
3.3.1.2. Status Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	3-46
3.3.1.3. Status Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Lahan Permukiman	3-48
3.3.2. Jasa Lingkungan	3-49
3.3.2.1. Jasa Lingkungan Fungsi Penyedia (Provisioning).....	3-49
A. Penyedia (Provisioning) Air	3-49
B. Penyedia (Provisioning) Pangan	3-51
C. Penyedia Serat, Bahan Bakar dan Material Lain.....	3-53
D. Penyedia Sumberdaya Genetik.....	3-54
3.3.2.2. Jasa Lingkungan Fungsi Pengatur (Regulating).....	3-56
A. Pengaturan Kualitas Udara	3-56
B. Pengaturan Iklim	3-57
C. Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir.....	3-59
D. Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor	3-62
E. Pencegahan dan Perlindungan Bencana: Kebakaran Hutan dan Lahan.....	3-64
F. Pengaturan Air	3-65
G. Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah.....	3-67
H. Pengaturan Penyerbukan Alami.....	3-69
I. Pengendalian Hama.....	3-70
3.3.2.3. Jasa Lingkungan Fungsi Pendukung (Supporting).....	3-72
A. Pendukung Habitat dan Kehati.....	3-72
B. Pembentukan dan Regenerasi Tanah.....	3-73
C. Produksi Primer/Biomassa	3-75
D. Siklus Hara.....	3-77
3.3.2.4. Fungsi Budaya (Cultural).....	3-78
A. Estetika (Apresiasi Pemandangan Alam).....	3-78
B. Rekreasi (Peluang Kegiatan Pariwisata dan Rekreasi).....	3-80
3.3.3. Resiko Dampak Lingkungan.....	3-81
3.3.3.1. Banjir	3-82
3.3.3.2. Kekeringan	3-83
3.3.3.3. Cuaca Ekstrim	3-85
3.3.3.4. Tanah Longsor	3-87
3.3.3.5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi	3-88
3.3.3.6. Resiko Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan.....	3-90



3.3.4.	Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam	3-91
3.3.5.	Kerentanan Perubahan Iklim	3-95
3.3.6.	Keanekaragaman Hayati	3-97
3.4.	Kondisi Keuangan Daerah	3-101
3.4.1.	Kinerja Pelaksanaan APBD	3-103
3.4.2.	Perkembangan Pendapatan Daerah	3-104
3.4.3.	Perkembangan Belanja Daerah.....	3-110
3.4.4.	Perkembangan Pembiayaan Daerah.....	3-114
3.4.5.	Neraca Daerah	3-116
3.4.6.	Anggaran Dalam Pencapaian TPB.....	3-122
3.4.7.	Persentase Pertumbuhan Anggaran OPD.....	3-124

BAB 4 PROFIL PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

4.1.	Pelaksanaan TPB di Provinsi Kalimantan Tengah	4-3
4.2.	Capaian TPB Berdasarkan Indikator	4-4
4.2.1.	Capaian Indikator Kategori A Berdasarkan TPB.....	4-4
4.2.2.	Capaian Indikator Kategori B Berdasarkan TPB.....	4-6
4.2.3.	Capaian Indikator Kategori C Berdasarkan TPB	4-7
4.2.4.	Capaian Indikator Kategori D Berdasarkan TPB	4-9
4.3.	Capaian TPB Berdasarkan Pilar	4-10
4.3.1.	Capaian Indikator Kategori A Berdasarkan Pilar	4-11
4.3.2.	Capaian Indikator Kategori B Berdasarkan Pilar	4-12
4.3.3.	Capaian Indikator Kategori C Berdasarkan Pilar	4-12
4.3.4.	Capaian Indikator Kategori D Berdasarkan Pilar	4-13
4.4.	Capaian TPB Berdasarkan Perangkat Daerah	4-13
4.4.1.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.....	4-23
4.4.2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4-23
4.4.3.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	4-23
4.4.4.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	4-23
4.4.5.	Badan Pendapatan Daerah	4-24
4.4.6.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	4-24
4.4.7.	Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah.....	4-24
4.4.8.	Balai Konservasi Sumber Daya Alam	4-24
4.4.9.	Biro Administrasi Pembangunan	4-25
4.4.10.	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA	4-25
4.4.11.	Biro Hukum.....	4-25
4.4.12.	Biro Organisasi	4-26
4.4.13.	BPDASHL Kahayan.....	4-26
4.4.14.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4-26
4.4.15.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	4-26
4.4.16.	Dinas Kehutanan	4-27
4.4.17.	Dinas Kelautan dan Perikanan	4-27
4.4.18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	4-27
4.4.19.	Dinas Kesehatan	4-28
4.4.20.	Dinas Ketahanan Pangan.....	4-28
4.4.21.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.....	4-28
4.4.22.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4-29
4.4.23.	Dinas Lingkungan Hidup.....	4-29
4.4.24.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	4-29



4.4.25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	4-30
4.4.26.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	4-30
4.4.27.	Dinas Pendidikan.....	4-30
4.4.28.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	4-31
4.4.29.	Dinas Perhubungan.....	4-31
4.4.30.	Dinas Perkebunan	4-31
4.4.31.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	4-32
4.4.32.	Dinas Sosial.....	4-32
4.4.33.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4-32

BAB 5 PERUMUSAN ISU STRATEGIS, TUJUAN TPB DAN SASARAN PRIORITAS

5.1.	Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas	5-1
5.2.	Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas TPB	5-2
5.3.	Isu Strategis Lingkungan Hidup.....	5-18
5.3.1.	Isu Strategis Terkait Lahan dan Hutan	5-18
5.3.2.	Isu Strategis Terkait Air	5-18
5.3.3.	Isu Strategis Terkait Udara dan Perubahan Iklim	5-18
5.3.4.	Isu Strategis Terkait Pesisir dan Lautan.....	5-18
5.3.5.	Isu Strategis Terkait Kebencanaan.....	5-18
5.4.	Isu Prioritas.....	5-19

BAB 6 PERUMUSAN SKENARIO, ALTERNATIF DAN REKOMENDASI

6.1.	Kriteria Penyusunan Alternatif Program	6-1
6.2.	Alternatif Skenario dan Rekomendasi Terkait Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup	6-1
6.2.1.	Indikator Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.....	6-2
6.2.2.	Indikator Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.....	6-4
6.2.3.	Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan.....	6-6
6.2.4.	Indikator Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku.....	6-8
6.2.5.	Indikator Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.....	6-10
6.3.	Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan	6-12
6.3.1.	Indikator Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan.....	6-12
6.3.2.	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat.....	6-14
6.3.3.	Indikator Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.....	6-15
6.3.4.	Indikator Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita.....	6-17
6.3.5.	Indikator Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe.....	6-19
6.3.6.	Indikator Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil.....	6-20



6.3.7.	Indikator Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Mencapai; dan Tingkat Konsumsi Ikan.	6-21
6.3.8.	Indikator Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	6-23
6.3.9.	Indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	6-24
6.3.10.	Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun. ..	6-26
6.3.11.	Indikator Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	6-27
6.3.12.	Indikator Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	6-29
6.3.13.	Indikator Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	6-31
6.3.14.	Indikator Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	6-32
6.3.15.	Indikator Laju pertumbuhan PDB per kapita.	6-34
6.3.16.	Indikator Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	6-36
6.3.17.	Indikator Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian.	6-38
6.3.18.	Indikator Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	6-40
6.3.19.	Indikator Jumlah Dermaga Penyeberangan.	6-42
6.3.20.	Indikator Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB Dan Per Kapita.	6-43
6.3.21.	Indikator Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur.	6-45
6.3.22.	Indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha.	6-47
6.3.23.	Indikator Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	6-49
6.3.24.	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	6-51
6.3.25.	Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	6-52
6.4.	Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan.	6-54
6.5.	Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Indikator TPB Belum dilaksanakan dan Tidak Ada Data.	6-54

BAB 7 KESIMPULAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2-1	Penggolongan Jasa Ekosistem	2-6
Tabel 3-1	Kabupaten/Kota, Luas, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa	3-3
Tabel 3-2	Ekoregion Darat dan Luasnya di Kalimantan Tengah	3-5
Tabel 3-3	Karakteristik Satuan Ekoregion Dataran Fluvial Kalimantan	3-6
Tabel 3-4	Karakteristik Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas- Mahakam.....	3-7
Tabel 3-5	Karakteristik Pegunungan Struktural Kompleks Meratus	3-9
Tabel 3-6	Karateristik Perbukitan Denudasional Kalimantan.....	3-10
Tabel 3-7	Karateristik Perbukitan Struktural Kompleks Meratus	3-12
Tabel 3-8	Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman	3-14
Tabel 3-9	Klimatologi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	3-16
Tabel 3-10	Luas Deforestasi per Kabupaten/Kota.....	3-20
Tabel 3-11	Fungsi Ekosistem Gambut pada KHG di Provinsi Kalimantan Tengah	3-21
Tabel 3-12	Tabel Indikatif Kerusakan Lahan Gambut Kabupaten/Kota	3-23
Tabel 3-13	Komposisi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah.....	3-24
Tabel 3-14	Jumlah dan Jenis Bencana Alam di Kalimantan Tengah	3-26
Tabel 3-15	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	3-28
Tabel 3-16	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020	3-30
Tabel 3-17	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020	3-31
Tabel 3-18	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota ...	3-32
Tabel 3-19	Tingkat Pengangguran di Kalimantan Tengah	3-34
Tabel 3-20	Garis Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota	3-36
Tabel 3-21	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2020	3-39
Tabel 3-22	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	3-41
Tabel 3-23	Luas area dengan Status ketersediaan air	3-43
Tabel 3-24	Hasil Analisis Selisih Antara Ketersediaan Dan Kebutuhan Air.....	3-44
Tabel 3-25	Produksi Sektor Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan	3-46
Tabel 3-26	Luas Area Dengan Status Ketersediaan Pangan	3-47
Tabel 3-27	Daya Dukung Lahan Permukiman di Kalimantan Tengah Tahun 2020 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah	3-48
Tabel 3-28	Prediksi Daya Dukung Lahan Permukiman di Kalimantan Tengah Tahun 2030 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah	3-49
Tabel 3-29	Distribusi luasan Jasa Lingkungan Penyedia Air	3-50



Tabel 3-30	Distribusi luasan Jasa Lingkungan Penyedia Air.....	3-51
Tabel 3-31	Distribusi luasan Jasa Lingkungan Penyedia Serat, Bahan Bakar dan Material Lain	3-53
Tabel 3-32	Distribusi luasan Jasa Lingkungan Penyedia Sumberdaya Genetik.....	3-55
Tabel 3-33	Distribusi luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara	3-56
Tabel 3-34	Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan (Regulating) Iklim.....	3-58
Tabel 3-35	Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir	3-60
Tabel 3-36	Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor	3-62
Tabel 3-37	Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	3-64
Tabel 3-38	Distribusi luasan Jasa Lingkungan Pengaturan (Regulating) Air.....	3-66
Tabel 3-39	Distribusi luasan Jasa Lingkungan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah	3-67
Tabel 3-40	Distribusi luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami	3-69
Tabel 3-41	Distribusi luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama.....	3-70
Tabel 3-42	Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati	3-72
Tabel 3-43	Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Dan Regenerasi Tanah	3-74
Tabel 3-44	Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer/Biomassa	3-75
Tabel 3-45	Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara	3-77
Tabel 3-46	Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika	3-78
Tabel 3-47	Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Fungsi Rekreasi	3-80
Tabel 3-48	Luas Area dan Tingkat Resiko Banjir	3-82
Tabel 3-49	Luas Area dan Tingkat Resiko Banjir	3-84
Tabel 3-50	Luas Area dan Tingkat Resiko Banjir	3-85
Tabel 3-51	Luas Area dan Tingkat Resiko Longsor	3-87
Tabel 3-52	Luas Area dan Tingkat Resiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi	3-89
Tabel 3-53	Luas Area dan Tingkat Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan....	3-90
Tabel 3-54	Perubahan Tutupan Lahan 2018-2019.....	3-95
Tabel 3-55	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	3-107
Tabel 3-56	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	3-112
Tabel 3-57	Kemampuan Keuangan Daerah tahun Anggaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	3-113
Tabel 3-58	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	3-115
Tabel 3-59	Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	3-118



Tabel 3-60	Analisis Rasio Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	3-121
Tabel 4-1	Jumlah Indikator (Kategori Indikator) Berdasarkan Tujuan TPB Yang Relevan di Kalimantan Tengah	4-1
Tabel 4-2	Pelaksanaan TPB di Provinsi Kalimantan Tengah	4-3
Tabel 4-3	Kategori A Berdasarkan Tujuan TPB	4-4
Tabel 4-4	Kategori B Berdasarkan Tujuan TPB	4-6
Tabel 4-5	Kategori C Berdasarkan Tujuan TPB	4-8
Tabel 4-6	Kategori D Berdasarkan Tujuan TPB	4-9
Tabel 4-7	Pencapaian TPB Berdasarkan Pilar	4-10
Tabel 4-8	Pencapaian TPB Tiap OPD	4-15
Tabel 4-9	Indikator TPB Yang Sudah di Laksanakan dan Mencapai Target (Kategori A)	4-33
Tabel 4-10	Indikator TPB Yang Sudah di Laksanakan dan Belum Mencapai Target (Kategori B)	4-40
Tabel 4-11	Indikator TPB Yang Belum di Laksanakan dan Belum Mencapai Target (Kategori C)	4-45
Tabel 4-12	Indikator TPB Yang Tidak Memiliki Data (Kategori D)	4-48
Tabel 4-13	Capaian Target Indikator TPB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2019	4-50
Tabel 5-1	Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial	5-3
Tabel 5-2	Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi	5-9
Tabel 5-3	Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan	5-13
Tabel 5-4	Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola	5-17
Tabel 5-5	Indikator TPB Di Kalimantan Tengah yang Sudah di Laksanakan dan Belum Mencapai Target	5-21
Tabel 5-6	Isu Strategis Lingkungan Hidup	5-29
Tabel 6-1	Rekomendasi Indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan	6-55
Tabel 6-2	Rekomendasi Indikator TPB Yang Belum di Laksanakan dan Belum Tercapai	6-58
Tabel 6-3	Rekomendasi Indikator TPB Yang Belum Ada Data	6-60
Tabel 6-4	Target dan Indikator	6-62
Tabel 6-5	Program Dan Kegiatan Serta Indikatif Pendanaan	6-72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1	Kerangka Pikir KLHS-RPJMD	1-5
Gambar 3-1	Peta Administrasi Wilayah Kalimantan Tengah	3-4
Gambar 3-2	Peta Ekoregion Kalimantan Tengah.....	3-5
Gambar 3-3	Peta Jenis Tanah di Kalimantan Tengah	3-15
Gambar 3-4	Peta Geologi di Kalimantan Tengah	3-15
Gambar 3-5	Peta Klasifikasi Daerah Aliran Sungai.....	3-16
Gambar 3-6	Kondisi Tutupan Lahan Tahun 2019	3-17
Gambar 3-7	Luas Deforestasi di Kalimantan Tengah selama 5 Tahun...	3-18
Gambar 3-8	Peta Tutupan Lahan Tahun 2019	3-18
Gambar 3-9	Peta Deforestasi Kalimantan Tengah 2013-2020	3-19
Gambar 3-10	Luas Deforestasi per Kabupaten/Kota selama 5 Tahun.....	3-19
Gambar 3-11	Proporsi Distribusi Luasan Kabupaten/Kota.....	3-21
Gambar 3-12	Peta Status Kerusakan Lahan Gambut.....	3-24
Gambar 3-13	IKLH Provinsi Kalimantan Tengah	3-26
Gambar 3-14	Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020.....	3-29
Gambar 3-15	TPAK Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020	3-32
Gambar 3-16	Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)	3-33
Gambar 3-17	Jumlah Pengangguran di Kalimantan Tengah	3-35
Gambar 3-18	Tingkat Kemiskinan di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)	3-37
Gambar 3-19	Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 (Persen).....	3-38
Gambar 3-20	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 (Persen).....	3-38
Gambar 3-21	Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2016-2020.....	3-40
Gambar 3-22	Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	3-42
Gambar 3-23	Status Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air.....	3-43
Gambar 3-24	Sebaran Status Daya Dukung Penyedia Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah	3-47
Gambar 3-25	Peta Jasa Lingkungan Penyedia (Provisioning) Air	3-50
Gambar 3-26	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air.....	3-51
Gambar 3-27	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Pangan.....	3-52
Gambar 3-28	Peta Jasa Lingkungan Penyedia (Provisioning) Pangan	3-52
Gambar 3-29	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Serat, Bahan Bakar dan Material Lain	3-53
Gambar 3-30	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Serat, Bahan Bakar dan Material Lain	3-54
Gambar 3-31	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Sumberdaya Genetik	3-55
Gambar 3-32	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Sumberdaya Genetik	3-56
Gambar 3-33	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara.....	3-57



Gambar 3-33	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara	3-57
Gambar 3-35	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim	3-58
Gambar 3-36	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan (Regulating) Iklim	3-59
Gambar 3-37	Peta Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir.....	3-60
Gambar 3-38	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir.....	3-61
Gambar 3-39	Bencana Banjir di Kalteng.....	3-61
Gambar 3-40	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor.....	3-62
Gambar 3-34	Peta Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor.....	3-63
Gambar 3-42	Bencana Longsorg di Kalteng (Dijalan dan Lokasi Penambangan Masyarakat).....	3-63
Gambar 3-39	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	3-64
Gambar 3-44	Peta Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	3-65
Gambar 3-45	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Air	3-66
Gambar 3-46	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan (Regulating) Air	3-67
Gambar 3-47	Peta Jasa Lingkungan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah	3-68
Gambar 3-48	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah.....	3-68
Gambar 3-49	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami	3-69
Gambar 3-50	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Penyerbukan Alami.....	3-70
Gambar 3-51	Peta Jasa Lingkungan Pengendalian hama.....	3-71
Gambar 3-52	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pengendalian Hama	3-71
Gambar 3-53	Peta Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Kehati	3-72
Gambar 3-54	Distribusi dan Persentase Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati.....	3-73
Gambar 3-55	Peta Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Dan Regenerasi Tanah	3-74
Gambar 3-56	Distribusi dan Persentase Pendukung Pembentukan Dan Regenerasi Tanah.....	3-75
Gambar 3-57	Distribusi dan Persentase Pendukung Produksi Primer/ Biomassa	3-76
Gambar 3-58	Peta Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer/ Biomassa	3-76
Gambar 3-59	Distribusi dan Persentase Pendukung Siklus Hara	3-77
Gambar 3-60	Peta Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara	3-78
Gambar 3-61	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Estetika	3-79
Gambar 3-62	Peta Jasa Lingkungan Fungsi Budaya-Eстетika.....	3-79
Gambar 3-63	Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Rekreasi	3-80



Gambar 3-64	Peta Jasa Lingkungan Fungsi Budaya-Rekreasi	3-81
Gambar 3-65	Distribusi dan Persentase Resiko Banjir	3-83
Gambar 3-66	Peta Resiko Bencana Banjir di Kalimantan Tengah.....	3-83
Gambar 3-67	Distribusi dan Persentase Resiko Kekeringan	3-84
Gambar 3-68	Kekeringan di Sungai Kahayan dan Tambak Ikan di Seruyan.....	3-84
Gambar 3-69	Peta Resiko Bencana Kekeringan di Kalimantan Tengah.....	3-85
Gambar 3-70	Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kalimantan Tengah.....	3-86
Gambar 3-71	Distribusi dan Persentase Resiko Cuaca Ekstrim	3-86
Gambar 3-72	Cuaca Ekstrim di Sungai Kahayan dan Bencana Angin Puting Beliung di Sampit.....	3-87
Gambar 3-73	Peta Resiko Bencana Longsor di Kalimantan Tengah.....	3-88
Gambar 3-74	Distribusi dan Persentase Resiko Longsor	3-88
Gambar 3-75	Distribusi dan Persentase Resiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi.....	3-89
Gambar 3-76	Gambar Abrasi di Ujung Pandaran (Kotim) dan Gelombang Ekstrim	3-89
Gambar 3-77	Distribusi dan Persentase Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan	3-90
Gambar 3-78	Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.....	3-91
Gambar 3-79	PDRB Prov. Kalteng 2010-2020	3-92
Gambar 3-80	Peta Pemanfaatan Sumber Daya Alam	3-92
Gambar 3-81	Jumlah Perusahaan Berstatus CnC (data diolah).....	3-94
Gambar 3-82	Kerentanan Perubahan Iklim.....	3-96
Gambar 3-83	Peta Kerentanan Perubahan Iklim	3-97
Gambar 3-60	Peta Sebaran Orang Utan (<i>Pongo pygmaeus</i>)	3-99
Gambar 3-85	Peta Sebaran Bekantan (<i>Nasalis Larvatus</i>)	3-101
Gambar 3-86	Rata-Rata Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020.....	3-108
Gambar 3-87	Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020	3-109
Gambar 3-88	Komposisi Dana Perimbangan Tahun 2016-2020	3-109
Gambar 3-89	Komposisi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	3-110
Gambar 3-90	Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria B Dengan 1 (Satu) Indikator Capaian	3-122
Gambar 3-91	Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria B Dengan 2 (Dua) Indikator Capaian	3-122
Gambar 3-92	Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria B Dengan 3 (Tiga) Indikator Capaian	3-123
Gambar 3-93	Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria B Dengan 5 (Lima) Indikator Capaian.....	3-123
Gambar 3-94	Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria C	3-124
Gambar 4-1	Jumlah Indikator berdasarkan Tujuan TPB	4-2
Gambar 4-2	Persentase Capaian TPB terhadap Target Nasional	4-3
Gambar 4-3	Jumlah Capaian Indikator TPB dalam Kategori A	4-5
Gambar 4-4	Jumlah Capaian Indikator TPB dalam Kategori B	4-7
Gambar 4-5	Jumlah Capaian Indikator TPB dalam Kategori C	4-8



Gambar 4-6	Jumlah Capaian Indikator TPB dalam Kategori D	4-10
Gambar 4-7	Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar	4-11
Gambar 4-8	Capaian Indikator Kategori A Berdasarkan Pilar	4-11
Gambar 4-9	Capaian Indikator Kategori B Berdasarkan Pilar	4-12
Gambar 4-10	Capaian Indikator Kategori C Berdasarkan Pilar.....	4-12
Gambar 4-11	Capaian Indikator Kategori D Berdasarkan Pilar.....	4-13
Gambar 4-12	Capaian Indikator TPB Tiap OPD	4-14

Matriks Integrasi Muatan KLHS RPJMD ke dalam Dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah

NO	MUATAN KLHS RPJMD	BAB II	BAB IV		BAB V			STRATEGI	BAB VI			BAB VII
		KONDISI UMUM DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	ISU STRATEGIS	VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN		ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PEMBANGUNAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN
1	Tujuan TPB		Pada BAB IV (Point 4.1) Permasalahan pembangunan akan didasarkan pada indikator TPB yang belum mencapai target	Pada BAB IV, (Point 4.2.A) Terkait Isu Strategis. TPB yang belum mencapai target akan ditambahkan sebagai isu strategis Global (SDGs)	BAB V. (Point 5.1, 5.2, dan 5.3) Pejabaran Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran telah menjawab tujuan TPB perioritas, khususnya tujuan mengakhiri kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menjamin kehidupan sehat, menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih.			BAB VI.(Point 6.1 dan 6.2) Strategi dan arah kebijakan diarahkan untuk mencapai tujuan TPB khususnya tujuan perioritas berdasarkan hasil kajian KLHS RPJMD				
	Indikator TPB		BAB IV (Point 4.2) Capaian indikator TPB yang belum mencapai target dijadikan dasar pertimbangan dalam permasalahan pembangunan daerah				BAB V (Point 5.3) Sebagian indikator TPB yang di proyeksikan capaiannya dalam dokumen KLHS menjadi indikator sasaran seperti angka Gini Ratio, Kemiskinan, APK			BAB VI (Point 6.3) Usulan rekomendasi program yang terdapat pada BAB VII Rekomendasi dan alternatif KLHS akan dijadikan dasar penyusunan program RPJMD	BAB VIII. (Point 8.2) Rencana program perangkat daerah yang mengakomodir rekomendasi program yang terdapat pada BAB VII KLHS RPJMD	BAB VIII (Point 8.1) Indikator TPB yang belum mencapai target dijadikan salah satu indikator pembangunan daerah atau IKU daerah, berdasarkan hasil proyeksi dalam BAB VII dokumen KLHS
	Permasalahan		Permasalahan utama yang digali dari Indikator TPB yang belum mencapai target, terkait SPM dan Daya Dukung dan Daya Tampung di jadikan permasalahan utama dalam dokumen RPJMD				BAB V. (Point 5.1 dan 5.2) 3 Permasalahan utama berdasarkan hasil kajian KLHS, yaitu terkait pemanfaatan SDA, penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan perbaikan tata kelola telah sesuai dengan visi dan misi RPJMD					
	Isu Strategis			BAB IV. (Point 4.2.D) Isu strategis KLHS terkait infrastruktur dan tata kelola yang lebih baik telah sejalan dengan isu strategis pada RPJMD, serta akan ditambahkan isu terkait pemanfaatan sumber daya alam.			BAB V. (Point 5.1 dan 5.2) isu strategis berdasarkan hasil kajian KLHS, yaitu terkait pemanfaatan SDA, penyediaan dan pengembangan infrastruktur dan perbaikan tata kelola telah sesuai dengan visi dan misi RPJMD					
	Rekomendasi KLHS							BAB VI (Point 6.1 dan 6.2) Akan ditambahkan sub bab khusus pada rumusan strategi dan arah kebijakan yang mengakomodir rumusan rekomendasi keberlanjutan lainnya dari			BAB VIII. Rekomendasi KLHS menjadi dasar penyusunan program	

NO	MUATAN KLHS RPJMD	BAB II	BAB IV		BAB V			STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	BAB VI		BAB VII
		KONDISI UMUM DAERAH	PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	ISU STRATEGIS	VISI DAN MISI	TUJUAN	SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN			PROGRAM PEMBANGUNAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN
								KLHS pada rekomendasi utama yaitu optimalisasi capaian TPB untuk yang masih belum tercapai, melalui skenario capaian dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan			perangkat daerah yang diarahkan dalam rangka mencapai target indikator TPB	
	Daya Dukung dan Daya Tampung	BAB.II (Point 2.5) Kajian daya dukung dan daya tampung ketersediaan air dan pangan akan ditambahkan dalam gambaran umum wilayah dalam Dokumen RPJMD										Dasar dalam penentuan target indikator program pembangunan



BAB-1

PENDAHULUAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, segala bentuk perencanaan dan kebijakan tata ruang diharuskan memiliki tujuan dan sasaran yang jelas sebagai wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya pada pasal 11.

Pemerintah daerah mempunyai kewenangan penting dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah baik dalam bentuk pembangunan jangka panjang, menengah, maupun pembangunan yang sifatnya jangka pendek. Disisi lain, pemerintah juga dituntut untuk menghadirkan produk tata ruang yang bersifat berkelanjutan dan menjamin ketersediaan ruang dimasa mendatang.

Pembangunan wilayah pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah dipertegas pada tujuan Bangsa Indonesia yang tertera dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Seiring dengan perkembangannya yang pesat serta dengan semakin kompleksnya persoalan dan tantangan yang dihadapi, beberapa daerah di Indonesia mulai melakukan upaya dalam mengantisipasi hal tersebut, tidak **terkecuali pada tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (TPB) atau SDGs.**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk di dalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut dengan capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030.

Diperlukan kajian mengenai pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan metode ilmiah untuk mengetahui capaian serta isu strategis pembangunan berkelanjutan di suatu wilayah yang digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembangunan selanjutnya. Analisis kajian lingkungan hidup yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan arahan bahwa dalam pembangunan



daerah seharusnya memperhatikan kondisi lingkungan hidup sehingga tercipta keselarasan antara pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dengan penggunaannya. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan adanya kajian daya dukung dan daya tampung wilayah agar pembangunan berkelanjutan dari aspek lingkungan hidup dapat direalisasikan dengan baik oleh masing-masing daerah perencanaan. Pengkajian pembangunan berkelanjutan yang mengacu pada TPB mencakup pada kondisi umum daerah (daya dukung, daya tampung, geografis, demografi, keuangan daerah), capaian indikator TPB yang relevan dengan pembagian urusan, kewenangan, dan karakteristik daerah, serta pembagian peran antara Pemerintah Daerah serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya. Seluruh indikator ini berkaitan dengan urusan pemerintah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam hal ini Pemerintah Kalimantan Tengah. Penerapan analisis pembangunan berkelanjutan ini diharapkan dapat diterapkan pada seluruh daerah di Indonesia, termasuk daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Bentuk analisis pembangunan berkelanjutan tersebut disusun dalam sebuah laporan yaitu KLHS RPJMD (Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Dalam proses penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari sebuah kebijakan dan rencana pembangunan harus diyakinkan tidak merusak lingkungan sekaligus menjamin keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Dan untuk menjawab tuntutan itu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengarahkan segala bentuk rencana penataan ruang wilayah di setiap daerah agar menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Disamping itu, pada tahapan sebelumnya dalam menjamin pembangunan berkelanjutan, juga telah hadir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS pada pasal 2 ayat 1 yang mengamanatkan bahwa KLHS sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah, serta kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan, maka pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah ini dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs untuk isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB yang termuat dalam Rancangan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan KLHS RPJMD untuk memastikan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun periode pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 telah menjalankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dimaksud adalah 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang memiliki 4 pilar yaitu (1) peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, (2) keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, (3) kualitas lingkungan hidup, dan (4) pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang baik. Sedangkan tujuannya adalah selain menjadi dasar untuk penyelarasan keempat Pilar TPB, ditujukan juga terutama untuk mencapai Visi RPJPD 2005-2025 Kalimantan Tengah yang Maju, Mandiri, dan Adil, sesuai tema RPJMD keempat (2020-2025) Kalimantan Tengah sesuai Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2005 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2006-2025, yaitu: “Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Tengah Yang Mandiri, Maju, Dan Adil Melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang Dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian Yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif Di Berbagai Wilayah Yang Didukung Oleh SDM Berkualitas dan Berdaya Saing”.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk



- Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6634);
 - j. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - k. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 - l. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - p. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - q. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025.

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah ini meliputi;

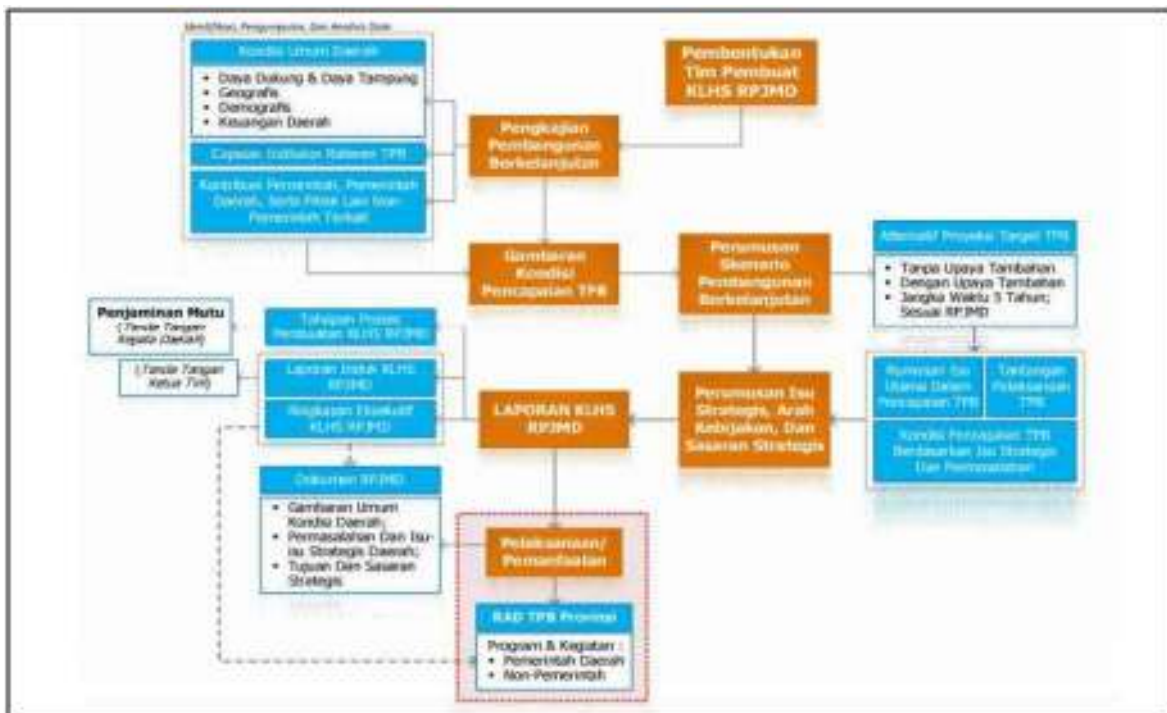
- a. Kondisi Umum Daerah
Kondisi umum daerah memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografis dan keuangan daerah.



- b. Capaian Indikator TPB
Capaian indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
- c. Pembagian Peran
Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari Pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.
- d. Perumusan Skenario Pembangunan
Perumusan skenario dilakukan melalui alternatif skenario dan rekomendasi daerah dengan upaya tambahan dan tanpa upaya tambahan dilihat dari daya dukung dan daya tampung serta tingkat ketercapaian terhadap TPB.

1.5. Kerangka Berpikir

Pembuatan KLHS RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD dengan mekanisme pembentukan tim, pengkajian pembangunan berkelanjutan, perumusan skenario pembangunan, perumusan isu strategis, arah strategi kebijakan. Isu strategis, arah strategi kebijakan menjadi muatan di dalam rancangan teknokratik RPJMD. Kerangka pikir pembuatan KLHS RPJMD dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 1-1 Kerangka Pikir KLHS-RPJMD

1.6. Metode

KLHS RPJMD Kalimantan Selatan tahun 2021-2026 dibuat dengan pendekatan deskriptif – kuantitatif, berangkat dari kerangka pikir, teori dan pemahaman tentang



pembangunan berkelanjutan dan daya dukung daya tampung lingkungan, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta alternatif pemecahannya yang didukung data di lapangan. Data dikumpulkan melalui kuesioner, pengisian matriks dan fokus grup diskusi, kemudian dianalisa dengan melakukan perhitungan tren historis rencana pembangunan, dan diperbandingkan terhadap sasaran target/indikator TPB dengan metode statistik. Data yang digunakan dalam pembuatan KLHS ini adalah data sekunder yang berasal dari organisasi perangkat daerah, instansi vertikal dan Badan Pusat Statistik.

1.7. Sistematika Pembuatan KLHS RPJMD

Proses penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dilakukan melalui beberapa tahapan dan pendekatan. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan untuk memperoleh hasil kajian tertentu melalui metodologi tertentu agar diperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Tahapan, hasil yang diharapkan, dan metodologi masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD
 - Pemerintah daerah membentuk tim pembuat KLHS RPJMD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Bappeda dan dengan Dinas Lingkungan Hidup.
 - Tim pembuat KLHS RPJMD beranggotakan perangkat daerah terkait sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan dalam pembuatan KLHS RPJMD.
 - Dalam melaksanakan tugasnya tim pembuat KLHS RPJMD melibatkan organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- b. Pengkajian pembangunan berkelanjutan Dilakukan oleh tim mencakup:
 - Kondisi umum daerah memuat kondisi daya dukung dan daya tampung, geografis, demografi dan keuangan daerah
 - Capaian indikator TPB berupa analisis kondisi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
 - Pembagian peran berupa analisis kontribusi dari pemerintah, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat, filantropi, pelaku usaha, akademisi dan pihak terkaitlainnya sesuai ketentuan perundang-undangan dalam pembangunan daerah.
- c. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan
Perumusan skenario mengacu pada analisa perkembangan pencapaian indikator TPB di daerah, proyeksi capaian indikator TPB tahun 2030, analisis gap antara target TPB dengan proyeksi capaian TPB di daerah, menentukan isu strategis berdasarkan indikator TPB, analisis permasalahan dalam pencapaian indikator TPB serta menentukan sasaran pencapaian.
- d. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD
Penjaminan kualitas KLHS RPJMD dilakukan oleh kepala daerah dan ditandatangani oleh kepala daerah tersebut. Laporan KLHS RPJMD bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik. Validasi KLHS RPJMD dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



BAB-2

DASAR TEORI

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026





BAB 2

DASAR TEORI

Bab ini akan menjelaskan mengenai dasar teori yang memuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, Ekoregion dan Jasa Ekosistem, Bencana Alam, serta Teori Perkembangan Wilayah. Kelima muatan ini digunakan dalam pembuatan dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menjelaskan gambaran kondisi umum daerah pada saat ini dan dapat digunakan untuk menentukan proyeksi target skenario sampai tahun akhir perencanaan

2.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan Kepala Daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Tata cara penyusunan RPJMD lebih detail diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Ranperda RPJPD, RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam Permendagri tersebut, dijelaskan bahwa tujuan perencanaan daerah adalah untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah dengan prinsip-prinsip;

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun dengan berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif dan spasial, serta berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas bawah, dan bawah atas, dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa penyusunan RPJMD telah



memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan dan potensi dampak pembangunan, disusunlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang memberikan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program kegiatan.

2.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan bahwa KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, dan atau kebijakan, rencana dan atau program. Tata cara Penyelenggaraan KLHS diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 dan Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017.

Pasal 23 Permen LHK Nomor 69 Tahun 2017 menyebutkan bahwa hasil identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan kemudian dianalisa sedikitnya dengan kajian :

- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b. perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
- d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Pembuatan KLHS untuk penyusunan RPJMD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam RPJMD. Dalam Permendagri ini disebutkan bahwa tujuan KLHS RPJMD adalah untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Perumusan Dokumen KLHS RPJMD memiliki filosofi kemanfaatan, di antaranya:

- a. Terbangunnya instrumen yang menyinkronkan berbagai kebijakan dan regulasi baik pusat maupun daerah;
- b. Tersusunnya instrumen kajian pembangunan yang terukur, partisipatif, transparan, responsif, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan bagi kepentingan pembangunan daerah;
- c. Sebagai instrumen yang dapat melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di daerah melalui Integrasi Rekomendasi KLHS RPJMD;
- d. Sebagai instrumen untuk pemenuhan kualitas penyusunan teknokratik RPJMD;
- e. Membuka ruang partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses permusyawaratan perumusan kebijakan pembangunan daerah;
- f. Sebagai instrumen yang dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario proyeksi TPB sebagai pertimbangan dalam merumuskan arah kebijakan rencana pembangunan daerah dalam dokumen



- RPJMD, karena KLHS RPJMD telah dapat memberikan gambaran isu Pembangunan Berkelanjutan bagi daerah;
- g. KLHS RPJMD dapat memberikan gambaran tentang arah perkembangan.

2.3. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau dalam bahasa Inggris *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan skema pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

TPB/SDGs yang dikenal juga sebagai agenda 2030, ditetapkan pada bulan September 2015, di dalam Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 tujuan dan 169 target untuk periode pelaksanaan 2015 - 2030, mulai berlaku per 1 Januari 2016 atau pasca berakhirnya Millenium Development Goals (MDGs). Agenda pembangunan TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari MDGs yang lebih komprehensif dan melibatkan banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif, dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.

TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu: (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2.4. Perkiraan Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Dampak dan risiko lingkungan hidup yang sering terjadi adalah bencana. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.



Bencana digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Berikut uraian dari penggolongan tersebut:

- a. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain:
- Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhannya batuan aktif.
 - Tsunami berasal dari bahasa Jepang yang berarti gelombang ombak lautan ("tsu" berarti lautan, "nami" berarti gelombang ombak). Tsunami adalah serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.
 - Gunung meletus merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun, tsunami dan banjir lahar.
 - Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar yang disebabkan terbenyungnya aliran sungai pada alur sungai.
 - Kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Adapun yang dimaksud kekeringan di bidang pertanian adalah kekeringan yang terjadi di lahan pertanian yang ada tanaman (padi, jagung, kedelai, dan lain-lain) yang sedang dibudidayakan.
 - Angin puting beliung adalah angin kencang yang datang secara tiba-tiba, mempunyai pusat, bergerak melingkar menyerupai spiral dengan kecepatan 40-50 KM/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).
 - Tanah Longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut yaitu air yang meresap ke dalam tanah akan menambah bobot tanah.
 - Kebakaran adalah situasi di mana bangunan pada suatu tempat seperti rumah/pemukiman, pabrik, pasar, gedung dan lain-lain dilanda api yang menimbulkan korban dan/atau kerugian. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api, sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomis dan atau nilai lingkungan. Kebakaran hutan dan lahan sering kali menyebabkan bencana asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat sekitar.
 - Gelombang pasang atau badai adalah gelombang tinggi yang ditimbulkan karena efek terjadinya siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia dan berpotensi kuat menimbulkan bencana alam. Indonesia bukan daerah lintasan siklon tropis tetapi keberadaan siklon tropis akan memberikan pengaruh kuat terjadinya angin kencang, gelombang tinggi disertai hujan deras.



- Abrasi adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Abrasi biasanya disebut juga erosi pantai. Kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh gejala alami, namun manusia sering disebut sebagai penyebab utama abrasi.
- b. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain:
- Gagal teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri.
 - Kecelakaan transportasi adalah kecelakaan moda transportasi yang terjadi di darat, laut dan udara.
 - Kecelakaan industri adalah kecelakaan yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu perilaku kerja yang berbahaya (*unsafe human act*) dan kondisi yang berbahaya (*unsafe conditions*). Adapun jenis kecelakaan yang terjadi sangat bergantung pada macam industrinya, misalnya bahan dan peralatan kerja yang dipergunakan, proses kerja, kondisi tempat kerja, bahkan pekerja yang terlibat di dalamnya.
 - Kejadian Luar Biasa (KLB) adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Status Kejadian Luar Biasa diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MENKES/ SK/VII/2004.
- c. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi:
- Konflik Sosial atau kerusuhan sosial atau huru-hara adalah suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang biasanya dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, ras (SARA).
 - Aksi Teror adalah aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.
 - Sabotase adalah tindakan yang dilakukan untuk melemahkan musuh melalui subversi, penghambatan, pengacauan dan/atau penghancuran. Dalam perang, istilah ini digunakan untuk mendeskripsikan aktivitas individu atau grup yang tidak berhubungan dengan militer, tetapi dengan spionase. Sabotase dapat dilakukan terhadap beberapa struktur penting, seperti infrastruktur, struktur ekonomi, dan lain-lain.



2.5. Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

Jasa ekosistem merupakan produk yang dihasilkan oleh ekosistem untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Dalam setiap ekoregion yang terdiri dari beberapa tipe ekosistem, terdapat satu atau lebih jasa ekosistem yang dihasilkan. Berdasarkan fungsinya terdapat empat kelompok jasa ekosistem yaitu : jasa penyedia, jasa pengatur, jasa sosial budaya dan jasa pendukung. Berikut penjelasan mengenai keempat jasa lingkungan.

- Jasa penyedia (*provisioning services*).** Ekosistem berfungsi untuk menyediakan produk-produknya yang secara langsung dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk hidup lainnya. Jenis layanan atau jasa penyediaan dikategorikan berdasarkan jenis produk alam yang dihasilkan oleh ekosistem.
- Jasa pengaturan (*regulating services*).** Ekosistem berfungsi membentuk dan memelihara keseimbangannya sendiri melalui sistem pengaturan dan pengendalian atas proses-proses alamnya, dimana manusia dan makhluk hidup mendapatkan manfaatnya.
- Jasa sosial budaya (*cultural services*).** Ekosistem berfungsi menyediakan manfaat yang bersifat non material bagi manusia yaitu berupa manfaat sosial budaya.
- Jasa pendukung (*supporting services*).** Adalah hasil dan proses ekosistem yang menentukan keberadaan fungsi-fungsi layanan ekosistem lainnya, Berdasarkan kelompok di atas, maka beberapa jasa ekosistem penting yang terkait dengan muatan dalam KLHS adalah jasa ekosistem terkait dengan air, pangan, iklim dan keanekaragaman hayati dituangkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 2-1 Penggolongan Jasa Ekosistem

No	Klasifikasi Layanan Ekosistem	Definisi Operasional
Fungsi Penyediaan (<i>Provisioning</i>)		
	Pangan	Hasil laut, pangan dari hutan (tanaman dan hewan), hasil pertanian dan perkebunan untuk pangan, hasil peternakan. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan
	Air Bersih	Penyediaan air dari tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), penyediaan air dari sumber permukaan. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti penutup lahan



No	Klasifikasi Layanan Ekosistem	Definisi Operasional
	Serat (fiber)	Hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan untuk material. Serat (fiber) adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan/serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan carbon. Serat alami hasil hutan, hasil laut, hasil pertanian dan perkebunan menjadi material dasar dalam proses produksi dan industri serta bio-chemical
	Bahan bakar (fuel)	Penyediaan kayu bakar dan bahan bakar dari fosil. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan energi, baik yang berasal dari fosil seperti minyak bumi dan batubara serta sumber energi alternatif dari alam seperti tenaga air mikro hidro, tenaga matahari dan tenaga angin serta panas bumi. Selain itu ekosistem juga menyediakan energi yang berasal dari bio massa minyak tanaman seperti minyak sawit, minyak buah biji jarak. Hutan dan berbagai macam tanaman kayu-kayuan juga memberikan sumbangan terhadap sumber energi. Sumber energi fosil dan tenaga alam dapat diduga berdasarkan struktur geologi dan bentuklahannya, sedangkan untuk sumberenergi biomassa dan tanaman kayu-kayuan dapat dilihat dari pola penutup lahan ataupun penutup lahan.
Fungsi Pengaturan (<i>Regulating</i>)		
	Pengaturan iklim	Pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, pengendalian gas rumah kaca dan karbon. Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi carbon diokasida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas
	Pengaturan tata aliran air dan Banjir	Siklus hidrologi, serta infrastruktur alam untuk penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan air. Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan
	Pencegahan dan perlindungan dari bencana	Infrastruktur alam pencegahan dan perlindungan dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami. Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai



No	Klasifikasi Layanan Ekosistem	Definisi Operasional
		dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuklahan. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuklahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan
	Pemurnian Air	Kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar. Ekosistem memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (self purification) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat
	Pengolahan dan penguraian limbah	Kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Jasa ekosistem meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam prosesmenetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang
	Pemeliharaan kualitas udara	Kapasitas mengatur sistem kimia udara adalah Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara . sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor –faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi
	Pengaturan penyerbukan alami (pollination)	Distribusi habitat spesies pembantu proses penyerbukan alami. Penyerbukan alami (pollination) adalah proses penyerbukan (berpindahnya serbuk dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat pembantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah
	Pengendalian hama dan penyakit	Distribusi habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit. Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organism pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotis yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit.



No	Klasifikasi Layanan Ekosistem	Definisi Operasional
Fungsi Budaya (Cultura)		
	Spiritual dan warisan leluhur	Ruang dan tempat suci, peninggalan sejarah, peninggalan leluhur
	Tempat tinggal dan ruang hidup (sense of place)	Ruang untuk tinggal dan hidup sejahtera, jangkar “kampung halaman” yang punya nilai sentimental
	Rekreasi dan ecotourism	Fitur lanskap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata
	Ikatan budaya, adat, pola hidup	Keterikatan komunitas dan hubungan sosial, pelestarian keragaman budaya (misalnya komunitas nelayan, komunitas adat, masyarakat pedalaman, dll.)
	Estetika	Keindahan alam yang memiliki nilai jual
	Pendidikan dan pengetahuan	Memiliki potensi untuk pengembangan pendidikan dan pengetahuan
Fungsi Pendukung (Supporting)		
	Pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan	Kesuburan tanah
	Siklus hara (nutrient)	Kesuburan tanah, tingkat produksi pertanian
	Produksi primer	Produksi oksigen, penyediaan habitat spesies

2.6. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan **sumber daya alam**. Kita mengenal prinsip Ekoefisiensi, yang artinya memanfaatkan **sumber daya alam** secara optimal dengan memperhatikan besarnya biaya dan usaha, untuk memperoleh hasil yang semaksimal mungkin dengan tetap berorientasi pada kondisi lingkungan sekitar. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) harus sesuai dengan prinsip ekoefisiensi. Artinya, prinsip yang mengefisienkan energi dan bahan yang tidak tergunakan menjadi lebih tergunakan di dalam proses produksi. Sehingga, hal ini dapat menekan bahkan meminimalkan tingkat energi yang terbuang.

Penerapan prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan lingkungan hidup kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan agar sumber daya alam tetap terjaga dengan baik dapat dilakukan dalam pemanfaatan hutan, lahan pertanian, tambang, air, industri hingga dalam pemenuhan kebutuhan sumber energi.

Prinsip ekoefisiensi dalam pemanfaatan lingkungan hidup kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan agar sumber daya alam tetap terjaga dengan baik merupakan semua bentuk pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan harus dengan meminimalkan resiko.

Berikut merupakan beberapa penerapan prinsip efisiensi dalam pemanfaatan lingkungan :

1. Prinsip Ekoefisiensi dalam Pemanfaatan Hutan dimana melaksanakan pembibitan, sistem tebang pilih, dan reboisasi agar penebangan hutan secara liar (illegal logging) harus dihentikan. Pun, dalam melakukan penebangan hutan harus menerapkan prinsip ekofisiensi itu sendiri. Tujuan dari reboisasi dan rehabilitasi hutan adalah untuk meningkatkan kelestarian hutan, tanah dan air, memperluas persediaan sumber bahan baku yang berharga bagi masyarakat serta menyelamatkan hasil usaha pembangunan di bidang pengairan. Selain itu, usaha pelestarian hutan diantaranya adalah melakukan penebangan pohon bersifat selektif serta mengganti pohon dengan pohon yang mempunyai



- peranan penting bagi lingkungan hidup dan ekonomi, mengusahakan keseimbangan antara penebangan dan penghijauan kembali serta penebangan fungsi hutan sebagai pengawet sumber air, tanah, dan tempat rekreasi perlu digalakkan.
2. Prinsip Ekoefisiensi dalam Pemanfaatan Lahan Pertanian dapat diterapkan dengan cara antara lain melakukan pemupukan, rotasi tanaman dan pengolahan lahan lainnya.
 3. Prinsip Ekoefisiensi dalam Pemanfaatan Tambang dengan pemanfaatan tambang dapat dilakukan dengan langkah-langkah penghematan dalam pemakaian dengan selalu mengingat generasi penerus, melakukan ekspor bahan tambang sebagai barang jadi atau setengah jadi, mengadakan penyelidikan dan penelitian untuk menemukan daerah penambangan baru serta mengusahakan adanya bahan pengganti, seperti pemakaian BBM diganti dengan tenaga surya, gas atau alkohol.
 4. Prinsip Ekoefisiensi dalam Pemanfaatan Air dapat diterapkan dengan melakukan usaha pelestarian air, seperti mempertahankan keberadaan hutan agar mata air tidak kering, terutama hutan di daerah hulu sungai, menjaga air sungai agar tidak tercemar dimana pembuangan limbah industri ke sungai harus dinetralkan terlebih dahulu, mengusahakan air sumur agar tetap bersih dimana menjaga jarak antara sumur dan tempat pembuangan kotoran minimal 10 meter serta mencegah pembuangan limbah nuklir atau limbah cair industri secara langsung ke laut, menghindari kebocoran pada kapal tanker pengangkut minyak dan menghindari kecerobohan laut, seperti tabrakan antar kapal tanker dan tidak membuang limbah dan sampah ke laut.
 5. Prinsip Ekoefisiensi dalam Industri dimana diterapkan guna mencegah bahan dan energi yang tidak termanfaatkan dalam suatu sistem proses produksi terbuang menjadi limbah dan menyebabkan meningkatnya social cost untuk proses lanjutannya. Pun, penerapan prinsip prinsip ekoefisiensi dalam industri antara lain adalah meminimalkan penggunaan bahan baku dan energi, meminimalkan pelepasan limbah beracun ke lingkungan, menghasilkan produk yang dapat didaur ulang dan memanfaatkan SDA yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) serta mampu menghasilkan produk yang tahan lama.
 6. Prinsip Ekoefisiensi dalam Memenuhi Kebutuhan Sumber Energi dimana berbagai aktivitas manusia membutuhkan energi seperti batu bara, minyak bumi, geothermal, hidro karbon, air, sinar matahari, angin, dan ombak. Permasalahan global saat ini adalah semakin berkurangnya cadangan minyak bumi dunia, sementara kebutuhan bahan bakar harus selalu tersedia. Penerapan prinsip ekoefisiensi dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar antara lain adalah penggunaan sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui seperti tenaga angin, sinar matahari, air, biomassa, dan bahan-bahan organik.

2.7. Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Kajian iklim oleh BAPPENAS pada 2012 memprakirakan bahwa pada masa yang akan datang secara umum curah hujan akan naik pada bulan basah dan turun pada bulan kering. Dengan demikian ancaman terhadap hujan lebat dan banjir semakin bertambah di samping faktor kapasitas lingkungan dalam menghadapi situasi curah hujan tinggi. Sementara pada musim kemarau beberapa daerah yang jauh dari



akses air akan mengalami ancaman kekeringan. Selain curah hujan, dalam kajian BAPPENAS menunjukkan bahwa kenaikan suhu akan terus terjadi baik secara global yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. Suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu suhu udara dan permukaan laut.

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi Iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim.

2.8. Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati penting bagi keberlanjutan kehidupan alam, sehingga baik langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara luas keanekaragaman hayati merupakan lanskap penting yang berperan terhadap berbagai jasa ekosistem seperti air bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, meremediasi polutan, dan juga menjaga stabilitas iklim baik makro maupun mikro. Selain itu sumber daya hayati juga memberikan manfaat besar bagi ketersediaan makanan dan obat-obatan, sedangkan sosial budaya sumber daya hayati memberikan manfaat bagi pendidikan dan wisata. Jasa ekosistem keanekaragaman hayati sebagai penyedia sumber daya genetik ditujukan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman flora dan fauna. Prioritas utama kawasan yang berfungsi sangat tinggi sebagai konservasi keanekaragaman hayati adalah kawasan hutan. Upaya yang dilakukan dalam memberikan perlindungan keanekaragaman hayati adalah pengelolaan kawasan hutan lindung maupun cagar alam, agar bisa terjaga dari campur tangan manusia yang cenderung merusak.

2.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung merupakan indikasi kemampuan mendukung penggunaan tertentu, sedangkan daya tampung adalah indikasi toleransi mendukung perubahan penggunaan tertentu (atau pengelolaan tertentu) pada unit spasial tertentu. Sebagaimana yang tertuang dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:



- Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
- Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

2.9.1. Daya Dukung Permukiman

Daya dukung lahan bangunan (pendekatan permukiman) dihitung untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan permukiman. Berdasarkan Pedoman Penentuan DDDTLH (KLHK, 2014), penentuan daya dukung permukiman berdasarkan luas lahan permukiman terhadap jumlah penduduk dan koefisien luas kebutuhan ruang. Jika $DDP > 1$, mampu menampung penduduk untuk bermukim, $DDP = 1$, terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas wilayah yang ada dan $DDP < 1$, tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut.

2.9.2. Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan lahan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pertanian pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung lahan pertanian adalah untuk mengetahui apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit.

Penghitungan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Perhitungan Ketersediaan (Supply) Lahan:

$$Sl = \frac{\sum(Pi \times Hi)}{Hb} \times \frac{1}{Ptvb}$$

Keterangan:

SL = Ketersediaan lahan (ha)

Pi = Produksi aktual tiap jenis komoditi (satuan tergantung kepada jenis komoditas)
Komoditas yang diperhitungkan meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan.

Hi = Harga satuan tiap jenis komoditas (Rp/satuan) di tingkat produsen

Hb = Harga satuan beras (Rp/kg) di tingkat produsen

$Ptvb$ = Produktivitas beras (kg/ha)

Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang dihunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga.

b. Perhitungan Kebutuhan (*Demand*) Lahan:

$$DL = N \times KHL$$



Keterangan:

DL = Total kebutuhan lahan setara beras (ha)

N = Jumlah penduduk (orang)

KHLL = Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk

Kondisi daya dukung lahan yang defisit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut sedangkan kondisi daya dukung lahan pertanian surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

2.9.3. Daya Dukung Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan RPJMD atau revisi rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (*water supply*) dan kebutuhan air (*water demand*) terdapat perhitungan melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik. Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) (Permen LH No. 17/2009).

a. Perhitungan ketersediaan (*Supply*) Air

Perhitungan dengan menggunakan Metode Koefisien Limpasan yang dimodifikasi dari metode rasional.

Rumus:

$$C = \sum (c_i \times A_i) / \sum A_i$$

$$R = \sum R_i / m$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

SA = Ketersediaan Air (m/tahun)

C = Koefisien limpasan terimbang

C_i = Koefisien limpasan penggunaan lahan i

A_i = Luasan Penggunaan lahan i (ha) dari data BPS atau Daerah Dalam Angka, atau dari data Badan Pertanahan Nasional (BPN)

R = Rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm/tahunan) dari data BPS atau BMKG atau dinas terkait setempat

R_i = Curah hujan tahunan pada stasiun i

m = Jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A = Luas wilayah (ha)

10 = Faktor konversi dari mm.ha menjadi m³

b. Perhitungan Kebutuhan (*Demand*) Air

$$DA = N \times KHLA$$



Keterangan:

DA = Total kebutuhan air (m^3 /tahun)

N = Jumlah penduduk (orang)

$KHLA$ = Kebutuhan Air untuk Hidup Layak

Bila $S_A > D_A$, daya dukung air dinyatakan surplus.

Bila $S_A < D_A$, daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Sedangkan menurut Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016), membagi menjadi:

- $DDA < 1$: Daya dukung air terlampaui atau buruk
- $DDA 1-3$: Daya dukung air bersyarat atau sedang
- $DDA > 3$: Daya dukung air aman atau baik



BAB-3

KONDISI UMUM DAERAH

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026





BAB 3

GAMBARAN UMUM WILAYAH

Kalimantan Tengah merupakan salah satu provinsi dengan beraneka ragam potensi sumber daya alam (SDA) sebagai modal dasar pembangunan. Potensi utama dari Kalimantan Tengah adalah sekitar 80% dari luas lahan yang tertutup hutan hujan tropis (124.118,49 km²). Hutan menyediakan berbagai jenis pohon antara lain terkenal dengan kayu besi (*eusideroxylon zwageri*), lanan (*shorea leprosula*), meranti (*shorea spp.*), ramin (*gonystyllus bancanus sp.*), dan agathis (*Agathis sp.*). Dengan berbagai macam vegetasi tropis dan kondisi geografis yang strategis, merupakan potensi bagi daerah-daerah di Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi yang dibentuk sebagai respon terhadap suara yang menghendaki dibentuknya Provinsi Kalimantan Tengah yang muncul dari kalangan Rakyat Dayak dalam 3 Kabupaten yakni Kabupaten Kapuas, Barito dan Kabupaten Kotawaringin, yang mana pada saat itu ketiga kabupaten tersebut masih merupakan bagian dari Provinsi Administratif Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Keinginan, hasrat dan pernyataan Rakyat Dayak tersebut telah disampaikan dan disalurkan baik melalui organisasi massa (ormas) maupun melalui saluran partai politik (parpol) semenjak tahun 1952, baik berupa pernyataan, mosi, resolusi dan lain-lain dari partai politik dan organisasi sosial kemasyarakatan atau ormas yang mendukung dan mendesak dengan pokok tuntutan adalah menuntut terbentuknya Provinsi Otonomi Kalimantan Tengah.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri RI mengeluarkan Keputusan pada tanggal 28 Desember 1956 Nomor U.P.34/41/24 antara lain menetapkan terhitung mulai 1 Januari 1957 membentuk Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan langsung di bawah Kementerian Dalam Negeri dan sementara ditempatkan di Banjarmasin. Sebelumnya, Mendagri dengan Surat Keputusan Nomor Des.52/19/10/50 tanggal 12 Desember 1956 tentang Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1957.

Untuk pelaksanaan Surat Keputusan Mendagri tersebut, pada tanggal 9 Januari 1957 dilakukan serah terima kekuasaan pemerintah antara Gubernur Kalimantan R.T.A. Milono dengan para acting / pejabat Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di Banjarmasin di hadapan Menteri Dalam Negeri, dan pada hari itu pula Menteri Dalam Negeri meresmikan Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur R.T.A. Milono selanjutnya ditugaskan pada Kementerian Dalam Negeri, kemudian ditunjuk sebagai Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara Tjilik Riwut, Bupati Kepala Daerah Kotawaringin diangkat/naik pangkat menjadi Residen pada Kementerian Dalam Negeri, ditugaskan membantu Gubernur Pembentuk Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan George Obos, Bupati Kepala Daerah Kapuas kemudian ditempatkan pada kantor Gubernur Kalimantan di Banjarmasin, dan diangkat/ diperbantukan pada Gubernur Pembentuk Kalimantan Tengah di



Banjarmasin, dan sebagai Sekretaris Kantor Persiapan Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah ditunjuk Drs.F.A.D. Patianom.

Selanjutnya pada tanggal 23 Mei 1957 diterbitkan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1957, dan Tambahan Lembaran Negara No. 1284 Tahun 1957). Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622), sehingga berdasarkan hal tersebut maka sampai saat ini, tanggal 23 Mei di peringati sebagai Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Kalimantan Tengah.

Sejak berdirinya Provinsi Kalimantan Tengah, tahapan demi tahapan pelaksanaan pembangunan daerah telah direncanakan, dicanangkan, dan direalisasikan hingga periode saat ini sebagai upaya pencapaian target pembangunan daerah (khususnya) maupun pembangunan nasional pada umumnya. Namun, setiap pelaksanaan pembangunan daerah selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan, hambatan, maupun tantangan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi dan meminimalisir setiap efek negatif dari permasalahan yang timbul, diperlukan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan yang matang.

Berkenaan dengan hal tersebut dan untuk lebih meningkatkan hasil pembangunan, evaluasi kebijakan maupun capaian kinerja pemerintah daerah harus dilaksanakan seoptimal mungkin sebagai syarat mutlak penentuan keberhasilan perencanaan pembangunan yang telah disusun utamanya pada pelaksanaan perencanaan pembangunan ke depannya. Evaluasi pembangunan daerah harus memiliki integrasi antar dokumen perencanaan sebagai poin penting dalam menyempurnakan setiap kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode ke depannya.

Pada perkembangannya, perlu dilakukan pula analisis singkat terkait capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, hingga permasalahan pembangunan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja aparatur kelembagaan keperintahan yang akan datang sebagai masukan dalam merumuskan setiap detail sasaran hingga program kegiatan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.



3.1. Kondisi Geografis Wilayah Kalimantan Tengah

3.1.1. Wilayah Administrasi

Berdasarkan lokasinya, Provinsi Kalimantan Tengah terletak antara 0°45' Lintang Utara hingga 3°30' Lintang Selatan dan 110°45' Bujur Timur hingga 115°51' Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki batas-batas wilayah dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan yakni sebagai berikut:

- Batas utara : Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur;
- Batas timur : Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
- Batas selatan : Laut Jawa; serta
- Batas barat : Kalimantan Barat.

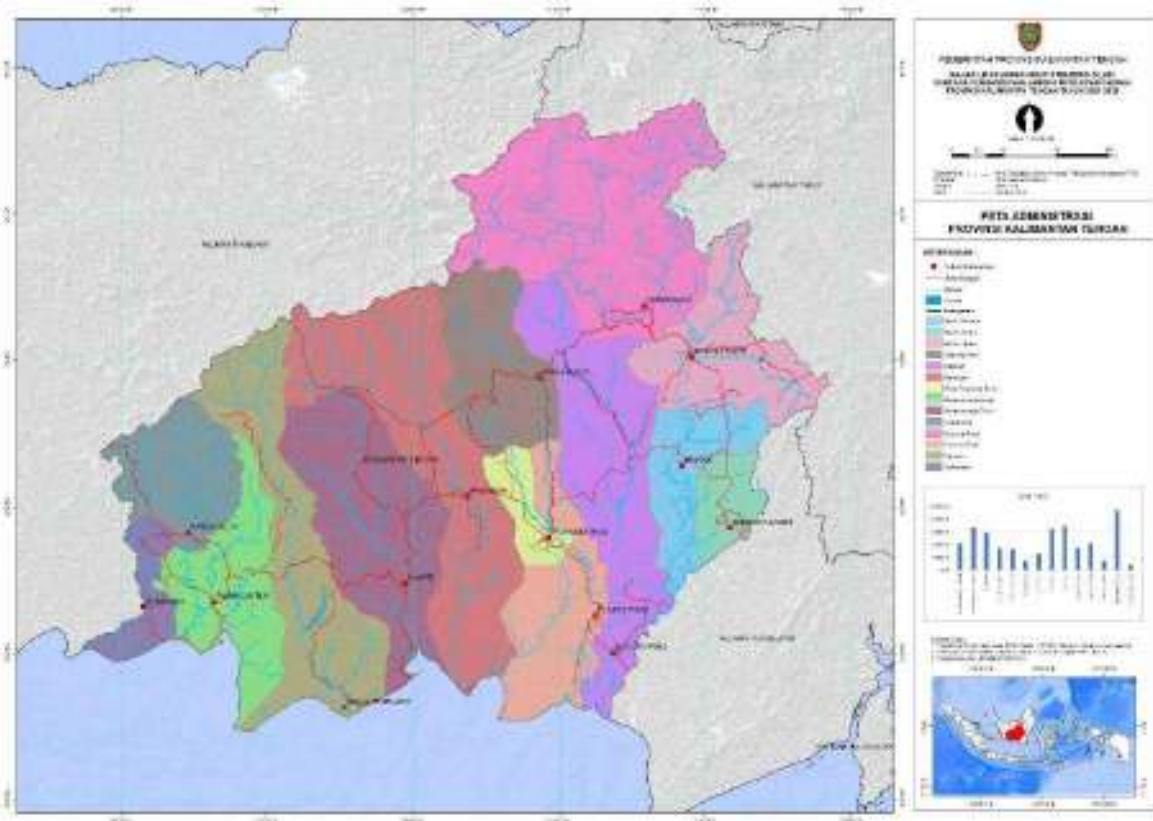
Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Provinsi Papua, dengan luas wilayah mencapai 153.564,5 km². Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 39 tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020, wilayah administrasi di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-1 Kabupaten/Kota, Luas, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa

No	Nama Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas (km ²)	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1.	Kotawaringin Barat	Pangkalan Bun	10.759,0	6	94
2.	Kotawaringin Timur	Sampit	16.796,0	17	185
3.	Kapuas	Kuala Kapuas	14.999,0	17	233
4.	Barito Selatan	Buntok	8.830,0	6	95
5.	Barito Utara	Muara Teweh	8.300,0	9	103
6.	Sukamara	Sukamara	3.827,0	5	32
7.	Lamandau	Nanga Bulik	6.414,0	8	83
8.	Seruyan	Kuala Pembuang	16.404,0	10	100
9.	Katingan	Kasongan	17.500,0	13	161
10.	Pulang Pisau	Pulang Pisau	8.997,0	8	99
11.	Gunung Mas	Kuala Kurun	10.805,0	12	127
12.	Barito Timur	Tamiang Layang	3.834,0	10	103
13.	Murung Raya	Puruk Cahu	23.700,0	10	124
14.	Palangka Raya	Palangka Raya	2.399,5	5	30
Jumlah			153.564,5	136	1.569

Sumber : Lampiran Kemendagri Nomor 146.1- 4717 Tahun 2020 dan Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Kalteng

Berdasarkan analisis spasial menggunakan batas administrasi dari Badan Informasi Geospasial terdapat perbedaan luasan 15.361,14 km². Perbedaan ini disebabkan batas antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat belum selesai tata batas. Dalam analisis spasial selanjutnya akan digunakan luasan yang mangacu dari peta RBI dari Badan Informasi Geospasial.



Gambar 3-1 Peta Administrasi Wilayah Kalimantan Tengah

3.1.2. Ekoregion.

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Bentang alam daratan wilayah Kalimantan Tengah memiliki bentuk geomorfologi yang sangat bervariasi, di bagian utara terdapat pegunungan dan perbukitan yang termasyur sejak zaman kolonial seperti Pegunungan Schwaner, Pegunungan Muller. Pegunungan-pegunungan ini pula yang menjadi hulu dari hampir semua sungai-sungai besar di Kalimantan Tengah sehingga disebut sebagai jantungnya Kalimantan dan dikenal sebagai *Heart of Borneo*. Di bagian bawah pegunungan-pegunungan tersebut terbentang dataran rendah yang sangat luas dengan berbagai macam karakteristik, yang ang paling terkenal adalah dataran gambut, yang kerap mengalami kebakaran hutan yang menyebabkan bencana kabut asap.

Berdasarkan analisis spasial ekoregion darat yang bersumber dari <http://dbgis.menlhk.go.id/arcgis/rest/services/KLHK> dengan batas wilayah Administrasi Kalimantan Tengah skala 1:50.000 Tahun 2016 dari Badan Informasi Geospasial (BIG), jenis ekoregion di wilayah Kalimantan Tengah dan luasannya dapat dilihat pada tabel berikut:

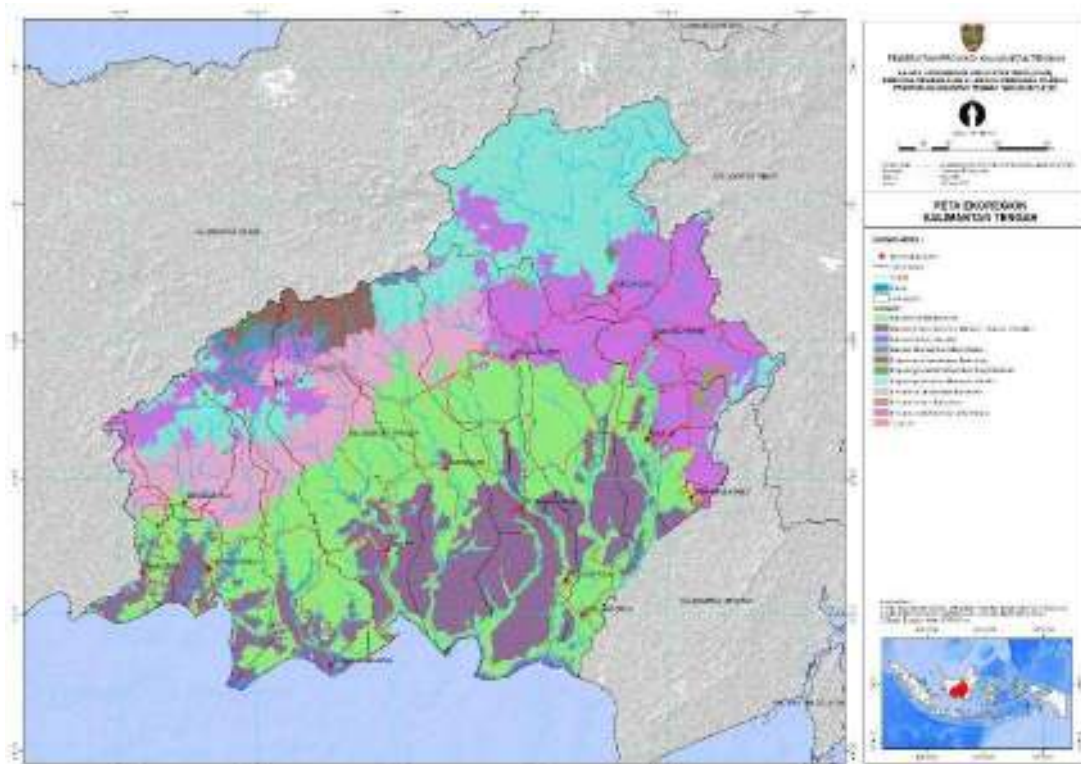


Tabel 3-2 Ekoregion Darat dan Luasnya di Kalimantan Tengah

No	Ekoregion	Luas (Ha)	%
1.	Dataran Fluvial Kalimantan	4.831.448,88	31,45
2.	Dataran Gambut Kompleks Kahayan - Kapuas - Mahakam	2.630.411,08	17,12
3.	Dataran Pantai Kalimantan	142.213,14	0,93
4.	Dataran Struktural Kompleks Meratus	226.847,64	1,48
5.	Pegunungan Denudasional Kalimantan	308.631,38	2,01
6.	Pegunungan Intrusif Batuan Beku Tua Kalimantan	18.693,06	0,12
7.	Pegunungan Struktural Kompleks Meratus	2.610.084,15	16,99
8.	Perbukitan Denudasional Kalimantan	1.632.128,37	10,63
9.	Perbukitan Karst Kalimantan	57.038,55	0,37
10.	Perbukitan Struktural Kompleks Meratus	2.854.140,69	18,58
11.	Tubuh Air	49.506,70	0,32
Luas		15.361.143,65	100

Sumber : Analisis Spasial, Tahun 2021 (Luasan wilayah Kalimantan Tengah menggunakan data hitungan luas dari peta RBI Skala 1:50.000)

Dari data di atas menunjukkan bahwa tipe ekoregion Dataran Fluvial Kalimantan mendominasi wilayah Kalimantan Tengah 4.831.448,88 Ha (31,45%), tipe Perbukitan Struktural Kompleks Meratus mencapai luasan 2.854.140,69 Ha (18,58%), tipe Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam mencakup areal seluas 2.630.411,08 Ha (17,12%) dan tipe pegunungan Pegunungan Struktural Kompleks Meratus mencakup areal seluas 2.610.084 Ha (16,99 %). Peta Ekoregion Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3-2 Peta Ekoregion Kalimantan Tengah



Karakteristik masing-masing ekoregion yang dominan di Provinsi Kalimantan Tengah, dijelaskan sebagai berikut:

a. Karakteristik Ekoregion Dataran Fluvial Kalimantan

Tanah yang berkembang pada satuan ekoregion dataran fluvial Kalimantan adalah tanah alluvial yang relatif subur, sehingga satuan ini banyak dimanfaatkan untuk lahan-lahan pertanian irigasi. Permukiman dan perkotaan memungkinkan untuk berkembang, karena didukung oleh ketersediaan air tanah sebagai sumber air bersih (sumur-sumur gali) relatif baik, dengan muka air tanah dangkal, seperti Kota Palangkaraya. Tidak terdapat potensi sumberdaya mineral yang berarti pada satuan ini, sehingga aktivitas penambangan relatif kecil. Ancaman bahaya yang mungkin muncul berupa ancaman banjir dan genangan, pada saat curah hujan maksimum dengan intensitas yang tinggi durasi hujan yang lama, yang menyebabkan luapan aliran sungai tidak normal (ekstrim). Secara detail, karakteristik satuan ekoregion dataran fluvial Kalimantan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3-3 Karakteristik Satuan Ekoregion Dataran Fluvial Kalimantan

Satuan Ekoregion	Karakteristik Satuan Ekoregion	
	Parameter	Deskripsi Satuan
Dataran Fluvial Kalimantan (F)	Lokasi dan Area	Terletak di kanan – kiri sungai, banyak terdapat di bagian tengah, selatan wilayah Kalimantan Tengah
	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata – rata 24 – 28 °C. Curah hujan tahunan 2.000 – 3.000 mm.
	Geologi	Endapan alluvium dan gambut
	Geomorfologi	Topografi datar, proses sedimentasi dan transportasi muatan sedimen
	Hidrologi	Air tanah dangkal – agak dalam (<30m), air tawar hingga payau, pola aliran sungai meandering
	Tanah dan Penggunaan lahan	Tanah dominan alluvial (Fluvaquents, Epiaquepts) dan Gambut (Luvihemist). Penggunaan lahan permukiman, lahan sawah, hutan riparian, semak belukar, perkebunan kelapa sawit, kelapa, dan karet
	Hayati (Flora dan Fauna)	Berbagai flora: nipah, rumput rawa, Vegetasi Munson Rawa Air Tawar, Vegetasi Rawa Air Tawar Pamah
	Kultural (Sosial Budaya)	Berpola hidup petani lahan sawah
	Kerawanan Lingkungan	Banjir dan pendangkalan sungai
	Jasa Ekosistem	Penyedia Makanan, air, dan serat
	Pengaturan Kualitas udara, iklim, air	
	Budaya Estetika dan Pendidikan	



Satuan Ekoregion	Karakteristik Satuan Ekoregion	
	Parameter	Deskripsi Satuan
	Pendukung	Habitat berkembang biak dan perlindungan plasma nutfah

Sumber: Deskripsi Peta Ekoregion Pulau Kepulauan, Kementerian LH, 2013

b. Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam

Satuan ekoregion dataran organik/gambut (organik plain) merupakan satuan ekoregion yang mirip dengan dataran aluvial, tetapi tersusun atas material hasil pembusukan bahan---bahan organik, yang berasosiasi dengan daerah rawa---rawa atau cekungan---cekungan kecil dengan topografi berombak hingga bergelombang. Satuan ini hampir tersebar meluas di Pulau Kalimantan, yang merupakan salah satu ciri khas ekoregion Kalimantan, yang jarang dijumpai pada wilayah lain di Indonesia. Keberadaannya secara umum dipengaruhi oleh proses pembusukan tumbuhan rawa dan sisa---sisa organik masa lampau, yang membentuk lapisan gambut cukup tebal.

Ciri khas satuan ini ditandai oleh keterdapatannya lapisan tanah gambut (hidromorf) dengan pH yang rendah (<5), berasa masam, relatif kurang subur, dan relatif menjadi kendala untuk pengembangan lahan pertanian tanaman semusim. Menurut penjelasan dari BP3 Departemen Pertanian R.I. (2006), tanah Histosols lebih populer dikenal dengan "tanah gambut" atau "gleisol" atau "hidromorf" merupakan tanah yang berkembang dari bahan organik dengan ketebalan >40 cm. Sebagian tanah gambut tercampur dengan bahan tanah mineral yang berasal dari endapan sungai maupun laut, sehingga tanah jenis ini lebih banyak dijumpai pada satuan ekoregion dataran organik dan aluvial rawa. Akibatnya pemanfaatan lahan relatif terbatas, kecuali semak belukar, hutan rawa, dan pada beberapa tempat untuk permukiman perdesaan. Masyarakat seringkali melakukan pembukaan ladang dengan cara membakar semak belukar, kemudian ditinggalkan dalam waktu beberapa bulan (± 3 bulan), kemudian dilakukan pengolahan tanah untuk penanaman tanaman palawija. Ancaman bahaya yang seringkali terjadi berupa penggenangan pada topografi yang cekung, kebakaran pada saat kemarau panjang, yang menyebabkan pembentukan kabut asap tebal di udara.

Tabel 3-4 Karakteristik Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam

Satuan Ekoregion	Karakteristik Satuan Ekoregion	
	Parameter	Deskripsi Satuan
Dataran Gambut Kompleks Kahayan-Kapuas-Mahakam (O1)	Lokasi dan Area	Terletak di kanan – kiri sungai, banyak terdapat di Selatan Kalimantan Tengah
	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata – rata 24 – 28 °C. Curah hujan tahunan 2.000 – 3.000 mm.
	Geologi	Endapan aluvium berupa bahan organik hasil dekomposisi vegetasi
	Geomorfologi	Topografi datar. Proses yang aktif adalah sedimentasi dan dekomposisi vegetasi serta



Satuan Ekoregion	Karakteristik Satuan Ekoregion								
	Parameter	Deskripsi Satuan							
		transportasi muatan sedimen dari aliran air sungai.							
	Hidrologi	Air tanah medium---dalam (< 30 m), air tawar, berwarna coklat kehitaman, drainase sangat buruk							
	Tanah dan Penggunaan lahan	Didominasi tanah gambut (Haplofibris). Substratum umumnya pasir kuarsa. Penggunaan lahan untuk permukiman, pertanian lahan sawah dan perkebunan kelapa sawit.							
	Hayati (Flora dan Fauna)	Vegetasi rawa gambut; Vegetasi Monsun Rawa Air Gambut Pamah, Vegetasi Rawa Air Gambut Pamah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini. Beberapa jenis merupakan fauna endemik baik dalam level anak jenis maupun jenis							
	Kultural (Sosial Budaya)	Berpola hidup pertanian lahan basah							
	Kerawanan Lingkungan	Kebakaran dan subsiden							
	Jasa Ekosistem	<table border="1"> <tr> <td>Penyedia</td> <td>Makanan, air</td> </tr> <tr> <td>Pengaturan</td> <td>Cadangan air, pencegahan bencana banjir, pengaturan kualitas udara, dan iklim.</td> </tr> <tr> <td>Budaya</td> <td>Pendidikan</td> </tr> <tr> <td>Pendukung</td> <td>Habitan berkembang biak, perlindungan plasma nutfah</td> </tr> </table>	Penyedia	Makanan, air	Pengaturan	Cadangan air, pencegahan bencana banjir, pengaturan kualitas udara, dan iklim.	Budaya	Pendidikan	Pendukung
Penyedia	Makanan, air								
Pengaturan	Cadangan air, pencegahan bencana banjir, pengaturan kualitas udara, dan iklim.								
Budaya	Pendidikan								
Pendukung	Habitan berkembang biak, perlindungan plasma nutfah								

Sumber: Deskripsi Peta Ekoregion Pulau Kepulauan, Kementerian LH, 2013

c. Pegunungan Struktural Kompleks Meratus

Satuan ekoregion pegunungan struktural lipatan (folded mountain) mempunyai kemiripan karakteristik dengan perbukitan struktural lipatan, hanya berbeda pada morfometrinya saja. Satuan ekoregion ini merupakan jalur punggung atau igir tertinggi di bagian tengah Kalimantan sebagai puncak lipatan Pegunungan Meratus. Satuan ini dicirikan oleh morfologi bergunung dengan lereng sangat terjal (kemiringan >40%). Material penyusun didominasi oleh kelompok batuan ultramafik dan batuan malihan. Satuan ini juga kaya akan sumberdaya mineral batubara, bijih besi, dan emas, sehingga dapat menjadi ancaman kerusakan lingkungan pada masa yang akan datang, jika aktivitas penambangan semakin tinggi dan tidak terkendali.



Tabel 3-5 Karakteristik Pegunungan Struktural Kompleks Meratus

Satuan Ekoregion	Karakteristik Satuan Ekoregion								
	Parameter	Deskripsi Satuan							
Pegunungan Struktural Kompleks Meratus (S1)	Lokasi dan Area	Terletak di bagian utara Kalimantan Tengah, terbesar di Murung Raya, Kuala Kurun dan Lamandau							
	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 18-22°C. Curah hujan tahunan 3.000-4.500 mm.							
	Geologi	Batuan metamorfik (Basal, schist, quartzite)							
	Geomorfologi	Topografi bergunung, lereng sangat curam (> 40%), proses tektonik tidak aktif.							
	Hidrologi	Kedalaman air tanah dalam (> 30m), air tawar, sungai parenial, pola aliran rektangular.							
	Tanah dan Penggunaan lahan	Tanah dominan Latosol (Dystrudepts). Solum tanah dalam (> 100 cm), Penggunaan lahan: Hutan submontane							
	Hayati (Flora dan Fauna)	Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah, Vegetasi Pegunungan Atas, Vegetasi Pegunungan Bawah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini, beberapa jenis dan anak jenis merupakan fauna endemik.							
	Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup berladang							
	Kerawanan Lingkungan	Degradasi lahan karena penambangan							
	Jasa Ekosistem	<table border="1"> <tr> <td>Penyedia</td> <td>Makanan, air, serat, bahan bakar</td> </tr> <tr> <td>Pengaturan</td> <td>Kualitas udara, iklim, air, perlindungan erosi</td> </tr> <tr> <td>Budaya</td> <td>Estetika, rekreasi, pendidikan</td> </tr> <tr> <td>Pendukung</td> <td>Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah</td> </tr> </table>	Penyedia	Makanan, air, serat, bahan bakar	Pengaturan	Kualitas udara, iklim, air, perlindungan erosi	Budaya	Estetika, rekreasi, pendidikan	Pendukung
Penyedia	Makanan, air, serat, bahan bakar								
Pengaturan	Kualitas udara, iklim, air, perlindungan erosi								
Budaya	Estetika, rekreasi, pendidikan								
Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah								

Sumber: Deskripsi Peta Ekoregion Pulau Kepulauan, Kementerian LH, 2013

d. Perbukitan Denudasional Kalimantan

Karakteristik dasar satuan ekoregion ini serupa dengan ekoregion perbukitan Denudasional Kalimantan, yang terbentuk karena proses denudasi intensif, yang mengakibatkan struktur batuan tidak dapat dikenali lagi. Kondisi iklimnya adalah tropika basah dengan variasi curah hujan tahunan sedang--- hingga tinggi. Material



dominan adalah sedimen batu pasir bercampur shale, mudstone dan napal. Morfologi bergunung dengan lereng sangat curam (> 40%), dengan proses utama berupa denudasional yang dicirikan oleh tingkat pelapukan batuan yang telah lanjut, erosi lereng dan gerakan massa batuan sangat potensial. Proses ini menyebabkan morfologi pegunungan tidak teratur, banyak alur-alur dan parit-parit erosi (terdiseksi) dan degradasi lahan cenderung meningkat.

Akibat proses denudasi yang intensif, maka pola aliran sungai seperti cabang-cabang pohon (dendritik), dengan alur rapat sejajar menuruni lereng, dan bertemu di lembah pegunungan menyatu menjadi sungai yang lebih besar. Kondisi aliran sungai umumnya bersifat perenial (mengalir sepanjang tahun). Air tanah relatif sulit didapatkan, kecuali pada lembah-lembah sempit yang ada, itupun dalam jumlah yang sangat terbatas. Umumnya air tanah dijumpai dalam bentuk rembesan (seepage) di antara lapisan batuan yang telah lapuk di bagian atas dan lapisan batuan yang masih padu di bagian bawah, atau dalam bentuk mata air kontak dan terpotong lereng pada tekuk-tekuk lereng atau lerengkaki, dengan debit aliran yang umumnya relatif kecil.

Jenis tanah yang dominan adalah Podsolik (Hapludults, Plintudults) dan Spodosol (Haplorthods). Bahan induk tanah dari batupasir ini miskin hara karena mineral primernya banyak yang tercuci. Solum tanah umumnya dalam (> 100 cm), kecuali pada daerah-daerah berlereng curam, banyak ditemukan tanah Litosol (kedalaman solum < 20 cm). Penggunaan lahan yang terdapat pada satuan ini adalah hutan primer dataran rendah, ladang, dan permukiman. Sementara tanah Litosol adalah tanah tipis yang miskin hara, sehingga umumnya hanya tumbuh semak belukar atau savana. Lahan di lereng bawah banyak digunakan untuk pertanian lahan kering (ladang). Kerawanan lingkungan yang potensial adalah bahaya erosi dan longsor lahan, yang seringkali terjadi selama musim penghujan.

Daerah-daerah yang masih berhutan pada ekoregion ini digunakan sebagai habitat berbagai satwa langka seperti orang utan dan berbagai jenis burung. Selain itu, karena posisinya terletak di lereng atas, keberadaan hutan di pegunungan denudasional berperan sebagai perlindungan erosi dan longsor. Karena proses erosi sangat aktif, lahan terbuka yang ada perlu segera direhabilitasi dengan melakukan penghijauan (penghutan kembali). Membiarkan proses erosi yang terjadi akan berimplikasi pada timbulnya bencana sosial seperti kemiskinan dan gizi buruk masyarakat yang hidup di kawasan ekoregion pegunungan denudasional ini. Kondisi ini dimungkinkan terjadi karena erosi lahan pertanian menjadi tandus dan kekurangan air.

Tabel 3-6 Karakteristik Perbukitan Denudasional Kalimantan

Satuan Ekoregion	Karakteristik Satuan Ekoregion	
	Parameter	Deskripsi Satuan
Perbukitan Denudasional Kalimantan (D1)	Lokasi dan Area	Terletak di bagian tengah ke arah utara, di Kabupaten Lamandau, Kotawaringin Timur, Katingan dan seruyan
	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 20-24°C. Curah hujan tahunan 3.000-3.500 mm.



Satuan Ekoregion	Karakteristik Satuan Ekoregion		
	Parameter	Deskripsi Satuan	
	Geologi	Batuan sedimen batupasir	
	Geomorfologi	Topografi bergunung, lereng sangat curam (> 40%). Banyak dijumpai lahan tererosi dan longsor.	
	Hidrologi	Air tanah umumnya relatif dalam (> 30 m), pola drainase dendritik, sungai parenial	
	Tanah dan Penggunaan lahan	Tanah dominan Podsolik dan Spodosol (Plintudults dan Haplorhods), Penggunaan lahan: Hutan, semak belukar, dan pertanian lahan kering	
	Hayati (Flora dan Fauna)	Berbagai flora dan fauna, seperti mahoni, babi hutan, orang utan, dan berbagai jenis burung. Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Pegunungan Atas, Vegetasi Pegunungan Bawah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini. Fauna-fauna tersebut sangat spesifik untuk dataran pegunungan.	
	Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup berladang	
	Kerawanan Lingkungan	Erosi dan gerakan tanah (longsor).	
	Jasa Ekosistem	Penyedia	Makanan dan air, serat serta fiber
		Pengaturan	Kualitas udara, air, iklim, dan perlindungan erosi
		Budaya	Estetika, rekreasi, dan inspirasi
Pendukung		Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah	

Sumber: Deskripsi Peta Ekoregion Pulau Kepulauan, Kementerian LH, 2013

e. Perbukitan Struktural Kompleks Meratus

Satuan ekoregion perbukitan struktural yang ada di Pulau Kalimantan lebih didominasi oleh perbukitan lipatan (*folded hill*) yang terpatahkan pada beberapa tempat. Satuan ekoregion yang membentuk punggung atau igir di bagian tengah pulau, sebagai bagian tengah dari rangkaian Perbukitan-Pegunungan Lipatan Meratus. Satuan ini dicirikan oleh morfologi perbukitan (lereng agak curam hingga curam dengan kemiringan 15-30% atau 30-40%), dengan material penyusun didominasi oleh kelompok batuan ultramafik dan batuan malihan, yang pada beberapa tempat diterobos oleh bukit-bukit intrusif berbatuan vulkanik gabro, diorit, dan diabas. Satuan ekoregion ini kaya akan sumberdaya mineral batubara, sehingga morfologinya telah banyak yang rusak akibat aktivitas penambangan rakyat maupun penambangan perusahaan-perusahaan besar.



Tanah yang berkembang pada satuan ini berupa Oxisols yang sering disebut sebagai tanah "Latosol". Tanah ini merupakan tanah yang telah mengalami perkembangan lanjut (tanah-tanah tua), yang dicirikan oleh adanya horison oksik (KTK lempung <16 cmol/kg). Warna tanah lebih tua dari podsolik, umumnya coklat kemerahan hingga merah tua. Tanah agak masam hingga masam, kandungan bahan organik sedang hingga rendah, drainase baik hingga sedang. Tanah ini berkembang dari batuan induk batulempung, basalt, ultrabasa, dan batugamping. Penyebarannya mulai dari lerengkaki hingga perbukitan dan pegunungan lipatan

Tabel 3-7 Karakteristik Perbukitan Struktural Kompleks Meratus

Satuan Ekoregion	Karakteristik Satuan Ekoregion	
	Parameter	Deskripsi Satuan
Perbukitan Struktural Kompleks Meratus (S2)	Lokasi dan Area	Terletak di bagian tengah dan utara, terbesar di Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara
	Klimatologi	Beriklim tropika basah, suhu udara rata-rata 24-26°C. Curah hujan tahunan 2.000-3.000 mm.
	Geologi	Batuan ultramafik dan malihan
	Geomorfologi	Topografi berbukit dengan igir paralel, lereng curam (26-40%). Proses tektonik tidak aktif. Proses degradasi karena penambangan batubara.
	Hidrologi	Air tanah dalam (> 30 m), air tawar, sungai parenial, pola aliran rektangular
	Tanah dan Penggunaan lahan	Jenis tanah dominan Latosol (Plinthaquoxs, Haplaquoxs)). Solum tanah agak dalam (50-75 cm). Penggunaan lahan: hutan dataran rendah, semak belukar, dan ladang
	Hayati (Flora dan Fauna)	Vegetasi Lahan Kering Pamah, Vegetasi Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Lahan Pamah, Vegetasi Monsun Pegunungan Bawah, dan Vegetasi Pegunungan Bawah. Fauna yang ada seperti dijumpai pembatas berdasarkan sungai besar yang ada di ekoregion ini. Dijumpai beberapa jenis fauna endemik di sekitar kawasan ini pada level anak jenis dan jenis.
	Kultural (Sosial Budaya)	Pola hidup berladang
	Kerawanan Lingkungan	Erosi dan gerakan tanah (longsor).
	Jasa Ekosistem	Penyedia Makanan dan air, serat serta fiber



Satuan Ekoregion	Karakteristik Satuan Ekoregion	
	Parameter	Deskripsi Satuan
	Pengaturan	Kualitas udara, air, iklim, dan perlindungan erosi
	Budaya	Estetika, rekreasi, dan inspirasi
	Pendukung	Habitat berkembang biak, perlindungan plasma nutfah

Sumber: Deskripsi Peta Ekoregion Pulau Kepulauan, Kementerian LH, 2013

3.1.3. Geologi dan Tanah

Dalam rangka pengembangan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, berbagai data dan informasi dasar terkait dengan potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung, dan kerawanan fisik berbagai daerah di Provinsi Kalimantan Tengah sangat dibutuhkan. Terkait dengan potensi kesuburan tanah, wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah tergolong memiliki potensi kesuburan rendah. Menurut tingkat kesuburannya, tanah di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam kelas IV, V, dan III dengan jenis tanah terdiri dari Organosol, Aluvial, Regosol, PMK, Podsol, Latosol, Litosol, dan Laterit

Terkait dengan sumber daya mineral, bumi Kalimantan Tengah mengandung:

- a. Mineral logam, berupa: emas primer, emas sekunder dan bijih besi. Ditinjau dari kelayakan ekonomisnya, mineral logam yang layak ditambang adalah emas. Selanjutnya, mengingat adanya peningkatan kebutuhan terhadap baja di pasar dunia, maka nilai kelayakan ekonomis cadangan bijih besi di Kalimantan Tengah juga mengalami kenaikan.
- b. Mineral non logam, berupa: pasir kuarsa, bentonit, kaolin, mika dan batu gamping.
 - a. Mineral logam yang memiliki prospek dan cukup luas penyebarannya adalah pasir kuarsa dan kaolin.
- c. Batu permata, berupa intan dan kecubung. Batu permata jenis intan terdapat di aluvium pada aliran sungai Barito yang terletak di Puruk Cahu, sedangkan jenis kecubung banyak dijumpai di bagian utara Pangkalan Bun.
- d. Mineral energi, berupa batubara. Cadangan batubara terdapat di sektor timur laut, menerus ke selatan dan ke barat

3.1.4. Hidrologi

Saat ini Kalimantan Tengah memiliki dan mengalir sebelas sungai besar dan 33 sungai kecil yang bermula dari utara dan mengalir ke Laut Jawa. Sungai Barito merupakan sungai terpanjang dengan panjang mencapai 900 km dengan kedalaman berkisar antara 6 hingga 14 meter. Sungai merupakan lokasi utama pemukiman dan moda transportasi yang penting di wilayah Kalteng (BPS Kalteng, 2019). Sungai-sungai yang berperan penting dalam proses pembentukan satuan ekoregion di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain: Sungai Barito, dan Seruyan beserta anak-anak sungainya. Satuan ekoregion ini dicirikan oleh relief datar dengan kemiringan lereng 0-3%, material berupa endapan aluvium, berstruktur



horizontal dengan pelapisan yang teratur (endapan material kasar di bagian bawah yang semakin ke atas semakin halus)

Tabel 3-8 Nama Sungai, Panjang, Lebar dan Kedalaman

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Dapat Dilayari (km)	Kedalaman (m)	Lebar (m)
1	Jelai	200	150	8	150
2	Arut	250	190	4	100
3	Lamandau	300	250	6	150
4	Kumai	175	100	6-9	250
5	Seruyan	350	300	5	250
6	Mentaya	400	270	6	350
7	Katingan	650	520	3-6	250
8	Sebangau	200	150	5	100
9	Kahayan	600	500	7	450
10	Kapuas	600	420	6	450
11	Barito	950	700	6-14	350-500

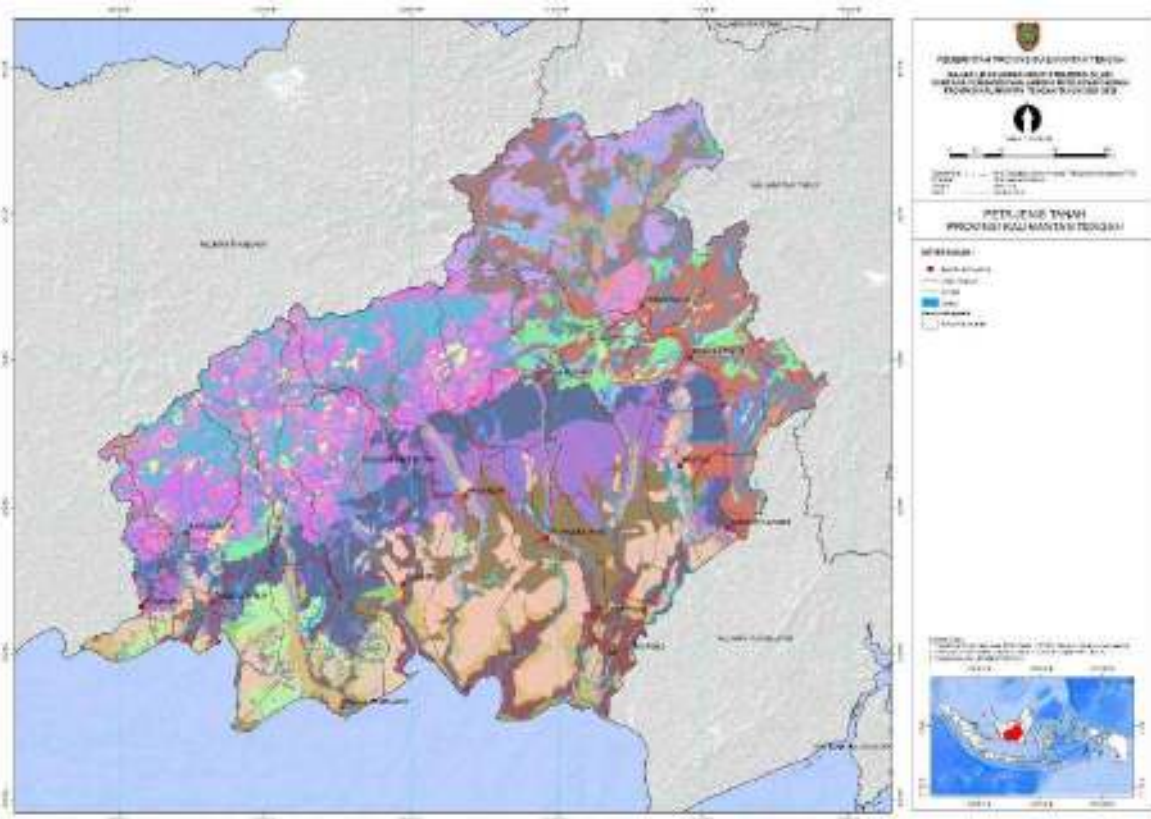
Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2020

Sungai- sungai utama mempunyai kemiringan yang rendah hingga ke sektor tengah sehingga jangkauan pengaruh pasang air laut (khususnya pada musim kemarau) relatif jauh. Sebaliknya di musim hujan, air sungai sering meluap ke wilayah dataran yang dilintasinya. Selain itu, rawa gambut terdapat hingga ke sektor tengah dan pada bagian yang lebih hilir terdapat rawa pasang surut. Sedangkan wilayah bagian hulu dialiri anak-anak sungai berpola dendritik dengan kemiringan tinggi bahkan beriam.

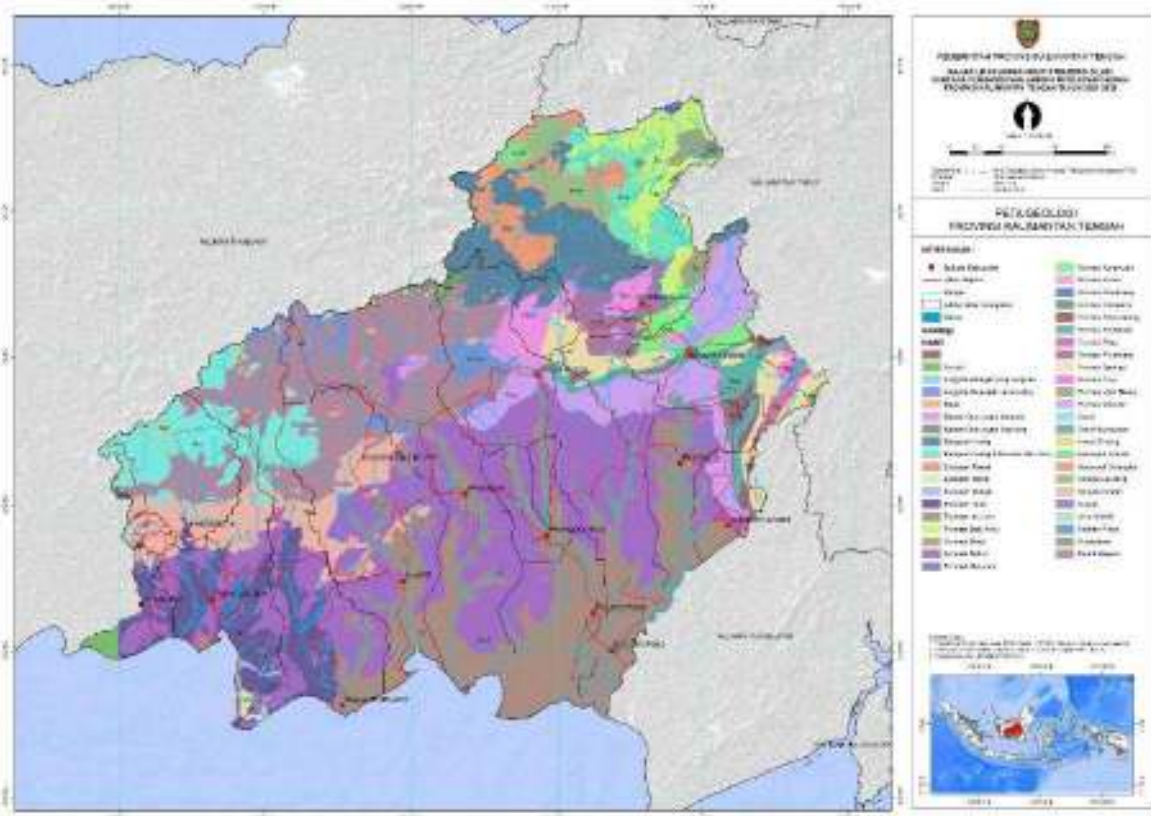
3.1.5. Daerah Aliran Sungai (DAS)

Diprovinsi Kalimantan Tengah terdapat 2 (dua) Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) yaitu BPDASHL Barito dan BPDASHL Kahayan. BPDASHL Kahayan melakukan pengelolaan pengelolaan untuk DAS yang berada di Kabupaten Kapuas, Kota Palangka Raya, Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara serta beberapa DAS yang masuk berada di lintas provinsi dengan Provinsi Kalimantan Barat. BPDASHL Barito melakukan pengelolaan DAS yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan dan Barito Timur serta beberapa DAS yang berada di lintas provinsi dengan Provinsi Kalimantan Selatan.

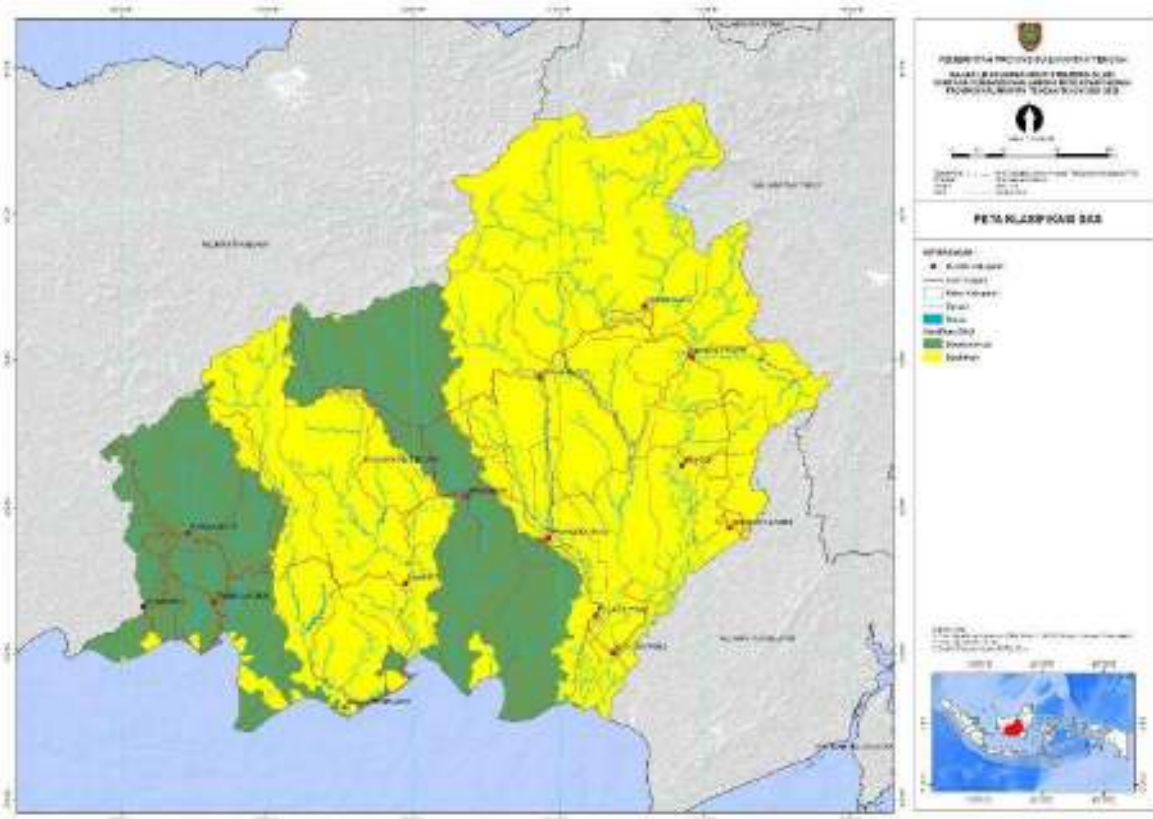
Berdasarkan overlay Batas DAS dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan batas wilayah dari Badan Informasi Geospasial (BIG) terdapat 157 DAS yang masuk di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dengan status ada yang di pertahankan dan ada yang harus dipulihkan. DAS dengan luasan besar yang diklasifikasikan harus dipulihkan adalah DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Seruyan dan DAS Mentaya, sementara DAS Lainnya diklasifikasikan harus dipertahankan.



Gambar 3-3 Peta Jenis Tanah di Kalimantan Tengah



Gambar 3-4 Peta Geologi di Kalimantan Tengah



Gambar 3-5 Peta Klasifikasi Daerah Aliran Sungai

3.1.6. Klimatologi

Iklm di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam tipe A dengan iklim tropis yang lembab dan panas. Pengukuran iklim di Provinsi Kalimantan Tengah hanya berada pada titik-titik tertentu. Berdasarkan pengamatan klimatologi dan geofisika (BMKG), suhu udara maksimum dan rata-rata suhu udara tertinggi tahun 2020 mencapai 35,15 derajat celcius berada Muara Teweh dan Buntok dan mencapai 34.53 derajat celcius berada di Pangkalan Bun. Selain itu, persentase penyinaran matahari tertinggi berada di Pangkalan Bun sebesar 66,5% , namun curah hujan bulanan tertinggi berada di Muara Teweh dengan jumlah curah hujan sebesar 3035,1 mm.

Tabel 3-9 Klimatologi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

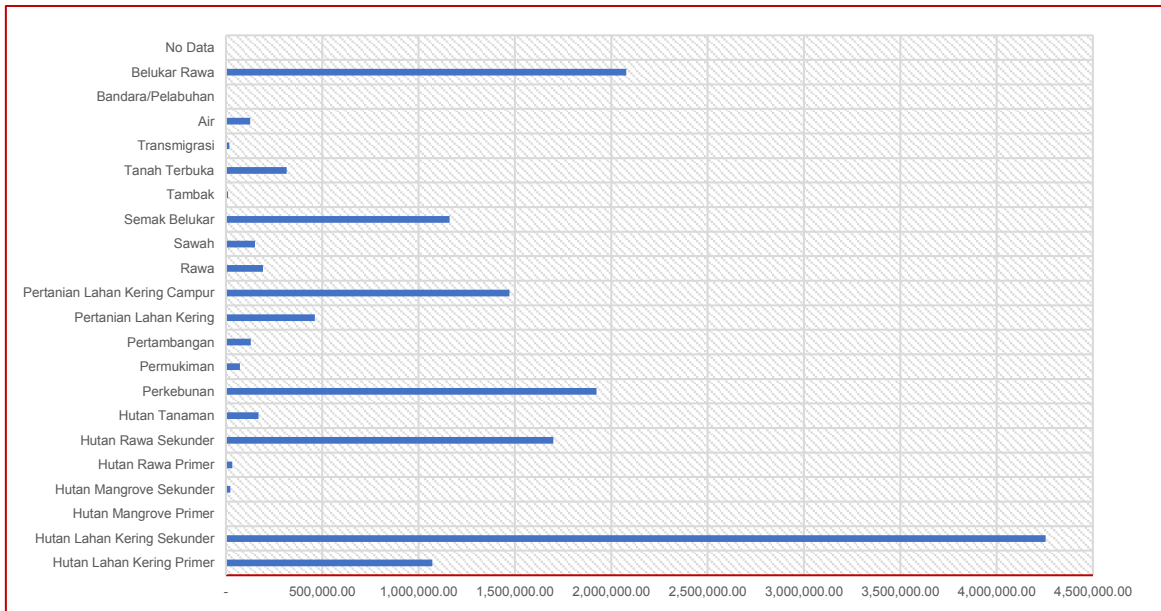
No.	Indikator	Stasiun				
		Pangkalan Bun	Sampit	Buntok	Muara Teweh	Palangka Raya
1.	Suhu Udara					
	• Maksimum	34,53	34,73	35,15	35,15	34,75
	• Minimum	22,39	21,81	21,20	21,36	22,40
2.	Rata-rata Kelembaban Udara (%)	83	84	84	84	81
3.	Rata-rata Tekanan Udara (MB)	1010,7	1011,5	1016,2	1012,3	1013,6
4.	Rata-rata Kecepatan	2	2	2	1	4



	Angin (knot)					
5.	Curah Hujan Bulanan (mm)	2670	2448,9	1525,5	3035,1	2326,4
6.	Penyinaran Matahari (%)	66,5	53,7	58	65,4	60,3

Sumber: Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021

3.1.7. Tutupan Lahan

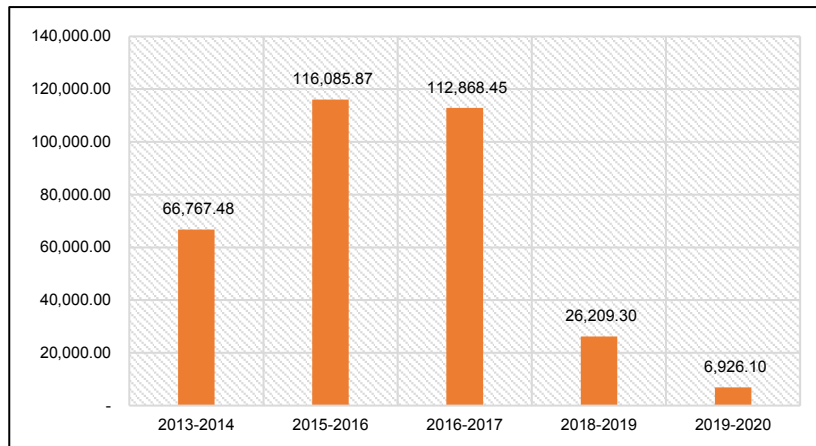


Gambar 3-6 Kondisi Tutupan Lahan Tahun 2019

Kondisi penutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah pada pada Tahun 2019 di dominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder seluas 4.254.371,03 Ha (27,69%), belukar rawa 2.078.203,87 Ha (13,53 %), perkebunan seluas 1.923.571,80 Ha (12,52%) serta hutan rawa sekunder seluas 1.699.132,52 ha (11,06%). Belukar rawa didominasi di daerah-daerah selatan, terutama di areal TN Sabangau dan TN Tanjung Puting serta wilayah lainnya dibagian selatan, sedangkan untuk tutupan lahan perkebunan di dominiasi oleh perkebunan kelapa sawit oleh Perusahaan Besar Perkebunan (PBS) serta masyarakat yang membuka lahan untuk tanaman kelapa sawit.

3.1.8. Deforestasi

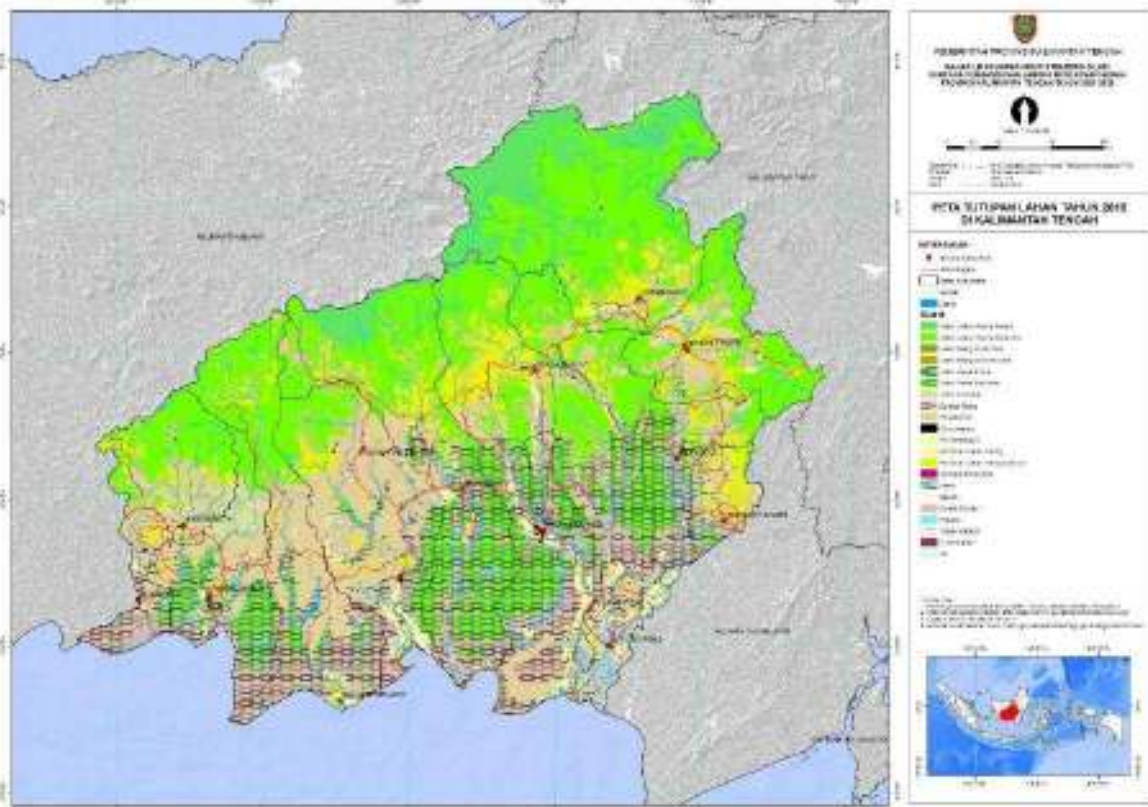
Deforestasi diartikan sebagai pengubahan area hutan menjadi lahan tidak berurutan secara permanen untuk aktivitas manusia. Proses penggundulan hutan akan mengubah fungsi utama dari hutan yang awalnya untuk melestarikan lingkungan menjadi lahan untuk kebutuhan manusia khususnya produksi.



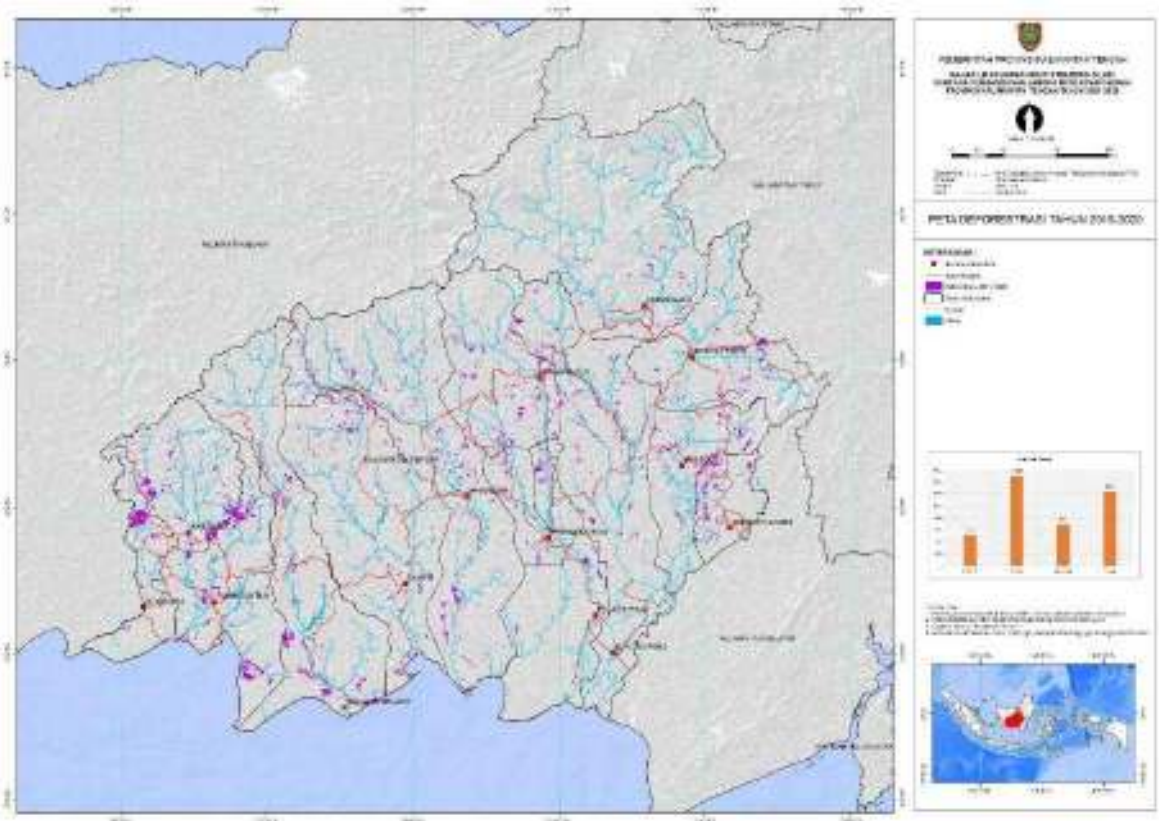
Gambar 3-7 Luas Deforestasi di Kalimantan Tengah selama 5 Tahun

Berdasarkan analisis spasial deforestasi di Kalimantan Tengah dari data KLHK selama kurun periode 5 tahun, luas total deforestasi mencapai 328.857,20 Ha. Laju deforestasi tertinggi terjadi pada Tahun 2015-2016 mencapai luas 116.085,87 Ha sedangkan pada tahun 2016-2017 mencapai luas 112.868,45 Ha. Pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan deforestasi yaitu hanya sebesar 6.926,10 Ha.

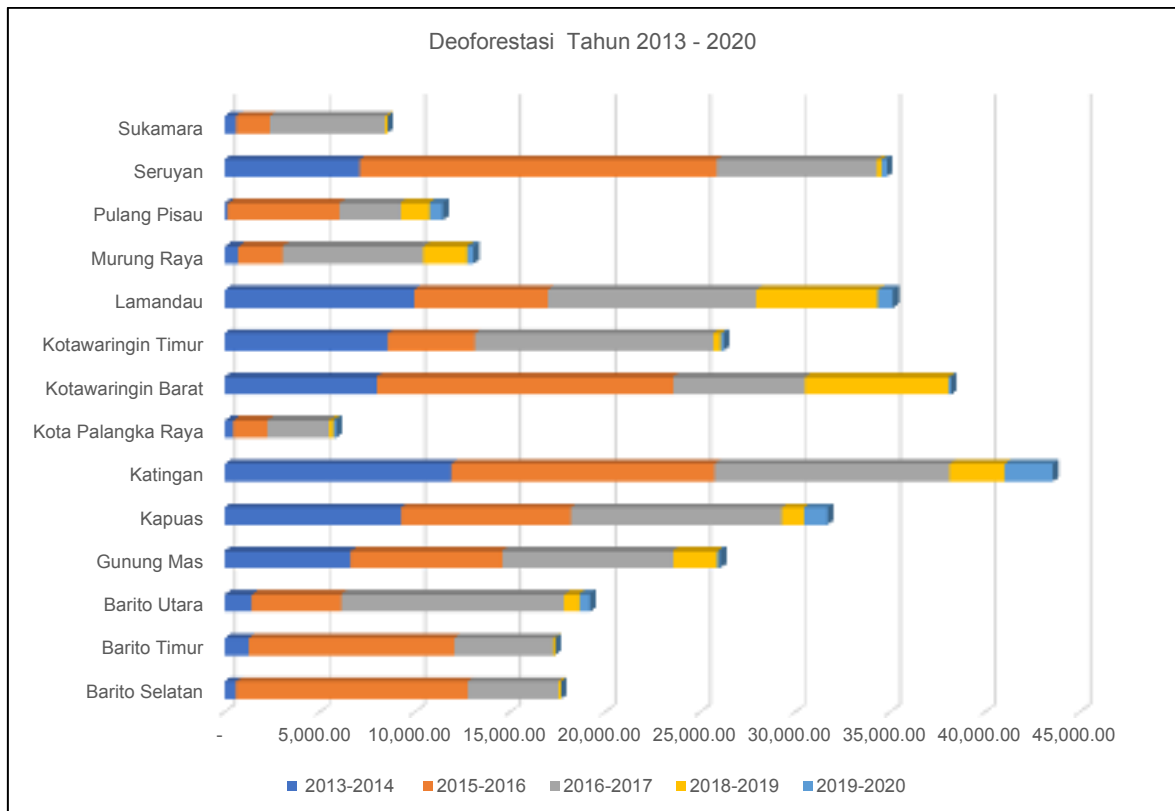
Dari analisis berdasarkan Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Serutan merupakan Kabupaten yang cukup tinggi luasan deforestasi. Sedangkan Kabupaten/Kota terendah adalah Kota Palangka Raya, Murung Raya, Pulang Pisau dan Sukamara.



Gambar 3-8 Peta Tutupan Lahan Tahun 2019



Gambar 3-9 Peta Deforestasi Kalimantan Tengah 2013-2020



Gambar 3-10 Luas Deforestasi per Kabupaten/Kota selama 5 Tahun



Rincian luasan deforestasi per kabupaten/kota selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-10 Luas Deforestasi per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Tahun					Jumlah Per Kab/Kota
	2013-2014	2015-2016	2016-2017	2018-2019	2019-2020	
Barito Selatan	615,04	12.166,68	4.728,20	167,44	-	17.677,37
Barito Timur	1.267,43	10.800,85	5.173,39	110,97	-	17.352,64
Barito Utara	1.443,55	4.681,81	11.719,08	776,18	554,6	19.175,23
Gunung Mas	6.630,41	7.950,86	8.992,09	2.332,75	132,6	26.038,72
Kapuas	9.295,48	8.894,72	11.099,53	1.194,08	1.213,4	31.697,16
Katingan	11.893,69	13.873,07	12.374,31	2.920,21	2.518,4	43.579,69
Kota Palangka Raya	468,46	1.768,24	3.231,20	239,19	138,7	5.845,79
Kotawaringin Barat	7.983,75	15.596,05	6.949,97	7.564,69	117,4	38.211,85
Kotawaringin Timur	8.587,05	4.556,93	12.556,29	361,62	160,5	26.222,36
Lamandau	9.954,88	7.031,84	10.992,62	6.367,79	824,0	35.171,13
Murung Raya	719,62	2.323,04	7.413,37	2.281,33	348,3	13.085,62
Pulang Pisau	193,81	5.854,43	3.190,01	1.525,20	682,2	11.445,61
Seruyan	7.096,53	18.796,00	8.428,02	249,25	236,1	34.805,93
Sukamara	617,78	1.791,32	6.020,38	118,60	-	8.548,08
Jumlah	66.767,48	116.085,87	112.868,45	26.209,30	6.926,10	328.857,20

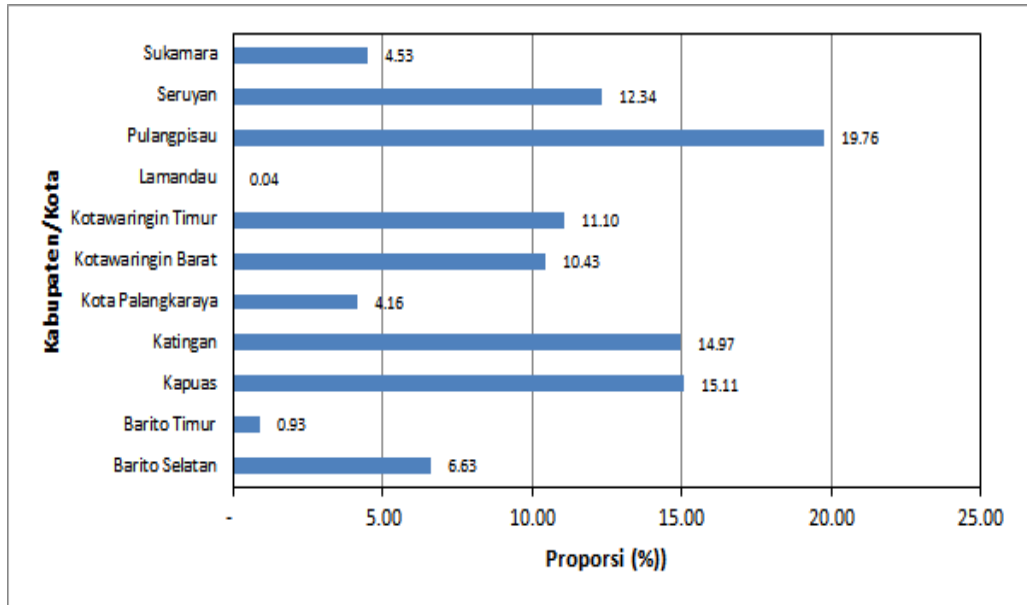
Sumber: Analisis Spasial, Tahun 2021, (Acuan luasan kabupaten/kota mengacu pada peta dari BIG)

Penyebab deforestasi di Kalimantan Tengah disebabkan oleh pembukaan lahan oleh perkebunan skala besar dan perkebunan skala kecil, aktifitas tebang habis permudaan buatan (THPB) dari kegiatan HTI, penambangan rakyat, pembangunan jalan tambang, jalan koridor dan kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

3.1.9. Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan Kerusakan Lahan Gambut

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 35 unit KHG dengan luas 4.733.540 ha sesuai SK Menteri LHK No. SK.130/MenLHK/Setjen/PKL.0/2/2017. KHG tersebar di 11 kabupaten/kota dan KHG terluas berada di KHG S.Katingan-S.Sebangau, yaitu 862.240 ha (18,21%). Sedangkan kabupaten yang memiliki dataran gambut terluas adalah Kabupaten Pulang Pisau seluas 933.815 ha atau 19,75% dari total luas gambut di Kalteng.

Kondisi ekosistem gambut di Provinsi Kalimantan Tengah juga di pengaruhi oleh luasan fungsi ekosistem gambut (FEG) pada masing-masing KHG. Pada 35 KHG di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 4.684.085 ha terdiri dari indikator fungsi Budidaya Ekosistem Gambut (FBEG) 2.125.372 ha (45,37%) dan indikator Fungsi Lindung ekosistem gambut 2.558.712 ha (54,63%) (Tabel II-3). Berdasarkan luasan fungsi ekosistem gambut pada masing-masing KHG (Gambar II-6) menunjukkan luasan yang bervariasi. FBEG terluas terdapat di KHG Sungai Katingan-Sungai Mentaya 231.466 ha (10,89%). Sedangkan pada FLEG terluas terdapat di KHG Sungai Katingan -Sungai Sebangau 601.482 ha (23,51%).



Gambar 3-11 Proporsi Distribusi Luasan Kabupaten/Kota

Secara umum 35 unit KHG memiliki tutupan lahan yang didominasi oleh hutan rawa sekunder/bekas tebangan seluas 1.193.158 ha, semak belukar rawa seluas 851.134 ha, semak belukar seluas 774.730 ha, dan hutan mangrove primer seluas 297.315 ha. Berdasarkan Kondisi lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagian besar mengalami kerusakan dengan rincian Tidak Rusak seluas 16.957,86 Ha (0,36%), Rusak Ringan seluas 4.316.134,67 Ha (92.39%), Rusak Sedang seluas 286.248,44 Ha (6,13%), Rusak Berat seluas 46.561,86 Ha (1,00%), dan Rusak Sangat Berat seluas 5.781,66 Ha (0,12%). Kerusakan dengan kategori berat hingga sangat berat disebabkan adanya pembangunan kanal-kanal sehingga gambut mengalami kekeringan dan saat musim kemarau rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pembangunan kanal juga dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang membuka lahan di areal bergambut, dengan tujuan untuk mengeringkan lahan sehingga dapat ditanami.

Tabel 3-11 Fungsi Ekosistem Gambut pada KHG di Provinsi Kalimantan Tengah

No	KHG/(Kabupaten/Kota)	Fungsi Budidaya E.G. (ha)	Fungsi Lindung E.G. (ha)	Jumlah (ha)
1	KHG Sungai Arut	10.153	4.363	14.516
	▪ Kotawaringin Barat	10.153	4.363	14.516
2	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	28.926	8.322	37.248
	▪ Barito Selatan	28.926	8.322	37.248
3	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	7.590	2.370	9.960
	▪ Barito Selatan	7.510	2.370	9.880
	▪ Barito Timur	80		80
4	KHG Sungai Bila - Sungai Rasaw	18.625	5.905	24.530
	▪ Kotawaringin Barat	3.808	169	3.977
	▪ Sukamara	14.817	5.736	20.553



No	KHG/(Kabupaten/Kota)	Fungsi Budidaya E.G. (ha)	Fungsi Lindung E.G. (ha)	Jumlah (ha)
5	KHG Sungai Buluh Besar	9.048	126.156	135.204
	▪ Kotawaringin Barat	5.988	87.523	93.511
	▪ Seruyan	3.060	38.633	41.693
6	KHG Sungai Buluh Besar - Sungai Seruyan	91.185	252.842	344.027
	▪ Kotawaringin Barat	4.864	135.035	139.899
	▪ Seruyan	86.321	117.807	204.128
7	KHG Sungai Jelai - Sungai Bila	15.994	4.420	20.415
	▪ Kotawaringin Barat	0		0
	▪ Sukamara	15.994	4.420	20.414
8	KHG Sungai Kahayan - Sungai Kapuas	166.328	233.873	400.202
	▪ Kapuas	78.298	117.299	195.597
	▪ Kota Palangkaraya	7.142	6.346	13.489
	▪ Pulangpisau	80.888	110.228	191.116
9	KHG Sungai Kahayan - Sungai Sebangau	188.309	262.526	450.836
	▪ Katingan	0		0
	▪ Kota Palangkaraya	9.838	8.761	18.599
	▪ Pulangpisau	178.471	253.765	432.237
10	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	180.692	377.201	557.893
	▪ Barito Selatan	54.448	174.400	228.848
	▪ Kapuas	126.244	202.801	329.045
11	KHG Sungai Kapuas - Sungai Mangkutup	29.927	47.815	77.742
	▪ Kapuas	29.927	47.815	77.742
12	KHG Sungai Kapuas - Sungai Murui	21.822	46.360	68.182
	▪ Kapuas	21.822	46.360	68.182
13	KHG Sungai Katingan - Sungai Klaru	17.900	10.524	28.424
	▪ Katingan	17.900	10.524	28.424
14	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	231.466	130.297	361.763
	▪ Katingan	95.870	75.863	171.733
	▪ Kotawaringin Timur	135.596	54.434	190.030
15	KHG Sungai Katingan - Sungai Sebangau	222.065	601.482	823.546
	▪ Katingan	125.101	344.713	469.814
	▪ Kota Palangkaraya	29.582	77.837	107.419
	▪ Pulangpisau	67.381	178.931	246.313
16	KHG Sungai Kumai - Sungai Sekonyer	8.689	5.694	14.383
	▪ Kotawaringin Barat	8.689	5.694	14.383
17	KHG Sungai Lamandau - Sungai Arut	28.849	15.475	44.324
	▪ Kotawaringin Barat	28.849	15.475	44.324
18	KHG Sungai Lamandau - Sungai Jelai	105.087	112.682	217.769
	▪ Kotawaringin Barat	12.952	33.475	46.427
	▪ Sukamara	92.135	79.207	171.342
19	KHG Sungai Lamandau - Sungai Kumai	62.481	28.484	90.965
	▪ Kotawaringin Barat	62.481	28.484	90.965
20	KHG Sungai Lamandau - Sungai Sematu	2.995	1.193	4.189
	▪ Kotawaringin Barat	1.602	787	2.388
	▪ Lamandau	1.394	407	1.801
21	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	27.302	5.879	33.181
	▪ Barito Selatan	444		444
	▪ Kapuas	26.858	5.879	32.738
22	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	16.247	2.203	18.450
	▪ Barito Selatan	16.247	2.203	18.450
23	KHG Sungai Mentaya - Sungai Cempaga	36.249	17.286	53.535
	▪ Kotawaringin Timur	36.249	17.286	53.535
24	KHG Sungai Mentaya - Sungai Seranau Kiri	14.884	7.349	22.232
	▪ Kotawaringin Timur	14.884	7.349	22.232
25	KHG Sungai Mentaya - Sungai Tualan	11.389		11.389
	▪ Kotawaringin Timur	11.389		11.389



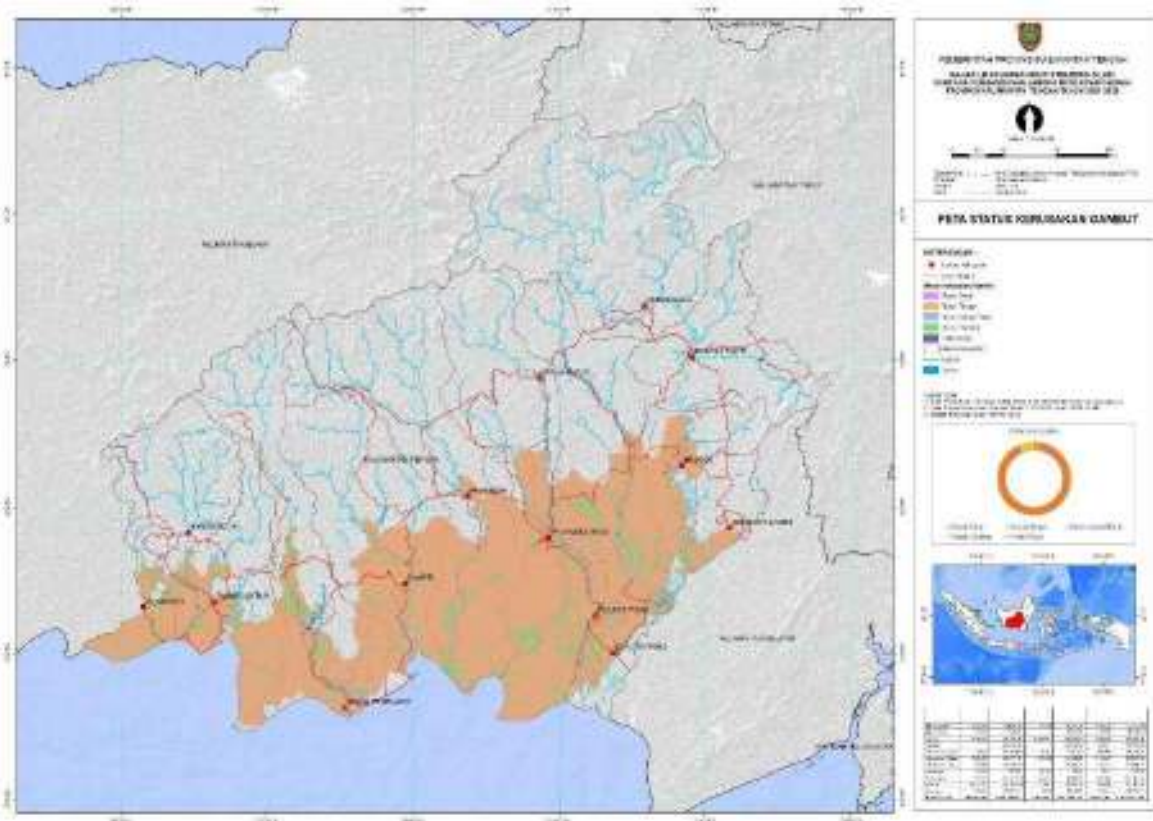
No	KHG/(Kabupaten/Kota)	Fungsi Budidaya E.G. (ha)	Fungsi Lindung E.G. (ha)	Jumlah (ha)
26	KHG Sungai Pukun - Sungai Kelua Besar	52.533	20.300	72.833
	▪ Seruyan	52.533	20.300	72.833
27	KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya	218.716	85.752	304.469
	▪ Kotawaringin Timur	162.139	79.528	241.667
	▪ Seruyan	56.577	6.224	62.801
28	KHG Sungai Pukun - Sungai Seruyan	70.016	27.580	97.595
	▪ Kotawaringin Timur	900		900
	▪ Seruyan	69.116	27.580	96.695
29	KHG Sungai Rasaw - Sungai Lamandau	22.804	15.466	38.270
	▪ Kotawaringin Barat	22.804	15.466	38.270
30	KHG Sungai Rungan - Sungai Kahayan	71.223	40.071	111.294
	▪ Kota Palangkaraya	39.524	15.974	55.498
	▪ Pulangpisau	31.700	24.096	55.796
31	KHG Sungai Sampang - Sungai Kala	20.329	11.011	31.340
	▪ Katingan	20.329	11.011	31.340
32	KHG Sungai Seruyan - Sungai Kelua Besar	46.892	10.765	57.657
	▪ Seruyan	46.892	10.765	57.657
33	KHG Sungai Seruyan - Sungai Sembuluh	32.066	10.353	42.419
	▪ Seruyan	32.066	10.353	42.419
34	KHG Sungai Terusanraya - Sungai Kapuasmurung	3.288	954	4.241
	▪ Kapuas	3.288	954	4.241
35	KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	33.303	25.757	59.060
	▪ Barito Selatan	11.775	3.907	15.682
	▪ Barito Timur	21.528	21.850	43.378
Luas (ha)		2.125.372	2.558.712	4.684.085
Proporsi(%)		45.37	54.63	100.00

Sumber: SK MenLHK 130/2017 terkoreksi, BIG dengan Analisis

Tabel 3-12 Tabel Indikatif Kerusakan Lahan Gambut Kabupaten/Kota

Kabupaten	Rusak Berat	Rusak Ringan	Rusak Sangat Berat	Rusak Sedang	Tidak Rusak	Jumlah
Barito Selatan	3.479,42	291.853,82	137,31	13.991,67	3.457,30	312.919,51
Barito Timur	172,23	41.941,28		1.826,86	67,99	44.008,37
Kapuas	14.742,09	628.168,94	4.729,44	58.829,47	1.683,96	708.153,90
Katingan		690.121,00		22.634,37	236,61	712.991,98
Kota Palangkaraya	570,91	187.804,17	3,80	5.927,27	663,64	194.969,78
Kotawaringin Barat	6.564,56	431.774,76	393,21	34.918,59	2.164,27	475.815,39
Kotawaringin Timur	236,98	513.276,69		19.463,70	841,85	533.819,22
Lamandau	69,24	1.018,59	151,75	120,53	31,77	1.391,88
Pulangpisau	2.748,63	843.324,41	237,73	59.189,93	1.382,90	906.883,60
Seruyan	16.530,87	497.693,61	120,56	51.398,28	6.199,11	571.942,43
Sukamara	1.446,92	189.157,42	7,85	17.947,78	228,45	208.788,42
Jumlah	46.561,86	4.316.134,67	5.781,66	286.248,44	16.957,86	4.671.684,48

Sumber: Dirjen PPKL 2018, dan Analisis Spasial, Tahun 2021, (Acuan luasan kabupaten/kota mengacu pada peta dari BIG)



Gambar 3-12 Peta Status Kerusakan Lahan Gambut

3.1.10. Kawasan Hutan

Provinsi Kalimantan Tengah yang sebagian besar wilayahnya adalah Kawasan hutan, menjadikan sub sektor kehutanan memiliki peran penting dalam pembangunan Kalimantan Tengah. Luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini adalah 12.279.803,62 hektar (80,10 % dari luas daratan provinsi)

Tabel 3-13 Komposisi Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah

No	Status Kawasan	Luas (ha)	%
1	Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA)	1.599.505	0,45
2	Hutan Lindung	1.353.337	8,84
3	Hutan Produksi Tetap (HP)	3.814.499	24,92
4	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	3.328.392	21,74
5	Hutan Produksi Konversi (HPK)	2.164.135	14,14
	Jumlah	12.259.868	80,10

Sumber: Data Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Hasil Pengolahan SK MenLHK No. SK.8108/MENLHKPTL/KUH/PLA.2/11/2018)

3.1.11. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai



kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional, yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO₂ dan NO; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

a. Indeks Kualitas Air

Indeks pencemaran air digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas dikarenakan kehadiran senyawa pencemar.

Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain :

- Penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air
- Ketersediaan dan faktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta factor cuaca lokal, iklim regional dan global
- Penggunaan air
- Tingkat erosi dan sedimentasi.

Nilai IKA Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 61,15 (cukup baik) dan Tahun 2019 sebesar 56,80 (kurang baik) sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 53,61 (kurang baik)

b. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan indeks kualitas udara menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.

Nilai IKU Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 87,07 (sangat baik) dan Tahun 2019 sebesar 88,83 (sangat baik), sedangkan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 89,84 (sangat baik).

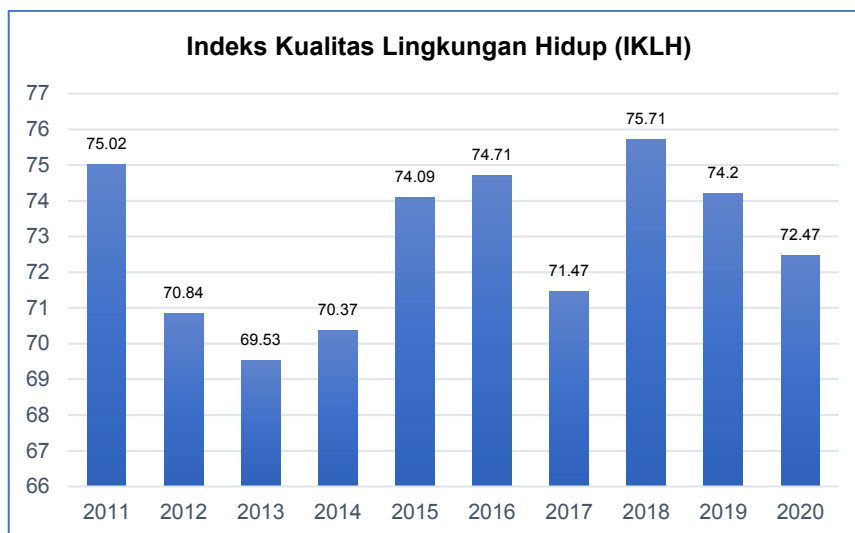
c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Metode perhitungan IKTL mengkolaborasikan beberapa parameter kunci yang menggambarkan adanya aspek konservasi, aspek rehabilitasi dan karakteristik wilayah secara spasial, namun dapat disajikan secara sederhana dan mudah dipahami. I. Nilai IKTL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 78,12



(baik) dan Tahun 2019 sebesar 76,27 (baik), sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75,11 (baik)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah selama kurun waktu dari Tahun 2011 Hingga Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3-13 IKLH Provinsi Kalimantan Tengah

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan sejak Tahun 2018. Pada tahun 2018 IKLH sebesar 75,71 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar 72,47. Penyumbang turunnya IKLH adalah dari rendahnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang semakin menurun akibat meningkatkan pencemaran sungai. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan akibat deforestasi dan alih fungsi kawasan sehingga berdampak terhadap perubahan tutupan lahan.

3.1.12. Kawasan Rawan Bencana

Secara umum Provinsi Kalimantan Tengah tidak lepas dari kemungkinan terkena bencana alam, baik yang dipicu oleh faktor geografis dan kondisi wilayahnya maupun yang disebabkan oleh ulah manusia. Secara lengkap jumlah kejadian bencana di Provinsi Kalimantan Tengah tersaji dalam tabel dibawah ini

Tabel 3-14 Jumlah dan Jenis Bencana Alam di Kalimantan Tengah

Tahun	Jenis Bencana					Jumlah
	Tanah Longsor	Banjir	*Kebakaran Hutan	Angin Kencang/ Puting Beling	Gelombang Pasang / Abrasi	
2018	11	129	935	10	6	1.091
2019	8	100	2.633	13	-	2.754
2020	1	57	850	-	-	908

Sumber:
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Prov. Kalimantan Tengah, 2020 (data diolah)
*) Sumber data dari Pusdalops PB Prov. Kalteng



Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, secara umum dalam 3 (tiga) tahun terakhir jenis bencana yang paling banyak terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu kebakaran hutan dan lahan serta banjir. Bencana karhutla seolah menjadi bencana langganan di musim kemarau karena kontur tanah gambut yang dominan di Provinsi Kalimantan Tengah sangat mudah terbakar baik secara alami maupun karena ulah manusia jika kondisinya kering. Oleh karena itu tanah gambut ini harus dijaga kondisinya agar tetap selalu basah. Pada tahun 2019 karhutla meningkat pesat bersamaan dengan musim kemarau yang panjang dimana hampir tidak pernah turun hujan yang mengakibatkan kondisi gambut menjadi sangat kering dan memunculkan banyak titik panas (hotspot). Karhutla yang mengakibatkan bencana kabut asap ini mengakibatkan terganggunya aktifitas perekonomian dan masyarakat, dimana akses penerbangan di Kalimantan Tengah menjadi terganggu dan masyarakat enggan beraktifitas di luar rumah.

Pada tahun 2020 kejadian karhutla menurun drastis. Hal ini dikarenakan curah hujan yang lebih tinggi dibanding tahun 2019. Disamping itu dari segi faktor manusia, karena adanya pandemi covid-19 banyak warga yang mengurangi aktivitasnya di luar rumah, sehingga mengurangi tingkat pembakaran lahan oleh warga.

3.1.12.1. Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan rawan tanah longsor mencakup daerah yang membentang dari barat-timur wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dengan kondisi topografi berupa perbukitan-pegunungan, yaitu: di kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Seruyan, Lamandau, Gunung Mas, Katingan, Murung Raya, Barito Selatan, dan Barito Utara.

3.1.12.2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan rawan gelombang pasang meliputi kawasan yang berada di daerah pantai, yaitu: di Kabupaten Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, dan Kapuas.

3.1.12.3. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan banjir di Provinsi Kalimantan Tengah terpusat pada daerah- daerah di sekitar sungai besar, meliputi: Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Sungai Sebangau, Sungai Mentaya, Sungai Seruyan, Sungai Kumai, Sungai Lamandau, Sungai Arut, dan Sungai Jelai. Pada tahun 2015 menurut data BPBD Provinsi Kalimantan Tengah tercatat sebanyak 14 (empat belas) kejadian banjir, yaitu di kabupaten Murung Raya sebanyak 4 (empat) kejadian, kabupaten Katingan 3 (tiga) kejadian, kabupaten Kotawaringin Timur dan kota Palangka Raya masing- masing 2 (dua) kejadian, serta kabupaten Kapuas, Barito Utara, dan Gunung Mas masing-masing 1 (satu) kejadian.

3.1.12.4. Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki sebaran lahan gambut yang besar dengan luas mencapai 2.556.283 ha, dengan kedalaman 0-2 m seluas 1.129.246 ha dan



kedalaman di atas 2 m seluas 1.427.037 ha. Lahan gambut di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan area yang rawan terbakar. Berdasarkan data dari Posko PDB Karhutla KLHK Palangka Raya per tanggal 30 Oktober 2019 terdapat 38.371 hotspot dengan luasan area terbakar berdasarkan laporan lapangan kabupaten/kota ke Posko PDB Provinsi Kalimantan Tengah seluas 12.880 Ha sedangkan berdasarkan citra satelit Landsat 8 OLI/TIRS yang di overlay dengan data sebaran HS Hasil *Groundcheck* dan Pemadaman oleh Manggala Agni (KLHK) luasan area terbakar mencakup 134.229 Ha dengan total 2.566 kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 mengakibatkan banyaknya aktivitas dan kesehatan masyarakat terganggu, dari data yang ada terdapat 90.504 kasus masyarakat terkena ISPA dan 29.932 kasus masyarakat terkena Diare. Terjadi penurunan Areal terbakar dari Tahun 2019 ke Tahun 2020 dimana luas tanah gambut yang terbakar turun sebesar 95% dari luas 133.912 pada tahun 2019 menjadi 6.135 di tahun 2020 areal yang terbakar dan luas tanah mineral yang terbakar turun sebesar 99% dari data 183.35 areal ditahun 2019 menjadi 1.547 areal yang terbakar di tahun 2020. Oleh karena itu, musibah kabut asap yang disebabkan karena kebakaran hutan dan lahan gambut ini harus diantisipasi dikemudian hari dengan menelaah faktor-faktor penyebab kebakaran apa saja yang mendominasi terjadinya bencana ini, sehingga dibutuhkan kerjasama antar sektor dan lapisan masyarakat untuk dapat menghindari kejadian kebakaran hutan dan lahan di kemudian hari.

3.2. Kondisi Demografi Provinsi Kalimantan Tengah

3.2.1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

3.2.1.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2021, BPS Kalimantan Tengah jumlah penduduk Kalimantan Tengah pada tahun 2020 sebanyak 2.669.969 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.385.705 jiwa dan perempuan sebanyak 1.284.268 jiwa.

Tabel 3-15 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kotawaringin Barat	140.537	129.851	270.388
2	Kotawaringin Timur	222.617	206.278	428.895
3	Kapuas	211.973	198.473	410.446
4	Barito Selatan	67.113	64.027	131.140
5	Barito Utara	80.473	74.339	154.812
6	Sukamara	33.387	30.077	63.464
7	Lamandau	52.143	45.468	97.611
8	Seruyan	86.211	76.695	162.906
9	Katingan	84.278	77.944	162.222



10	Pulang Pisau	70.180	64.319	134.499
11	Gunung Mas	71.378	63.995	135.373
12	Barito Timur	58.112	55.117	113.229
13	Murung Raya	57.948	53.579	111.527
14	Palangka Raya	149.355	144.102	293.457
Kalimantan Tengah		1.385.705	1.284.264	2.669.969

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2021

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan Kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Kalimantan Tengah mencapai 410.446 jiwa, hal ini disebabkan kabupaten ini merupakan kabupaten tertua di Kalimantan Tengah dan banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit di wilayah ini, termasuk juga Kabupaten Kapuas (419,446 jiwa) dan Kotawaringin Barat (270.388 jiwa), sedangkan untuk Kota Palangka Raya yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah memiliki penduduk sebanyak 293.457 jiwa.

Jumlah penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Sukamara yaitu sebanyak 63.464 jiwa, disusul Kabupaten Lamandau sebanyak 97.611 jiwa. Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau merupakan kabupaten paling barat di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 3-14 Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah Proyeksi Penduduk (Proyeksi Penduduk)

Perkembangan jumlah penduduk di Kalimantan Tengah tertinggi terjadi pada Tahun 2019 mencapai 2.714.850 jiwa dan kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 2.669.969 jiwa.



3.2.1.2. Sex Ratio Penduduk

Berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Tengah diketahui bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan, hal ini dilihat dari besarnya *sex ratio* yaitu sebesar 109,81 pada tahun 2020.

Tabel 3-16 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Tahun	Penduduk (Jiwa)				Jumlah	Sex Ratio
	Laki-Laki	%	Perempuan	%		
2015	1.302.796	52,22	1.192.239	47,78	2.495.035	109
2016	1.332.274	52,24	1.217.918	47,76	2.550.192	109,39
2017	1.361.715	52,27	1.243.559	47,73	2.605.274	109,50
2018	1.391.078	52,29	1.269.131	47,70	2.660.209	109,61
2019	1.420.291	52,31	1.294.568	47,68	2.714.850	109,71
2020	1.385.700	51,90	1.284.300	48,10	2.670.000	109,81

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Berdasarkan data *time series* diatas, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin terlihat cenderung semakin meningkat di tiap tahunnya dengan rasio perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 1:109 di tahun 2015 dan meningkat menjadi 109,81 di tahun 2020. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan di Tahun 2020 terdapat 110 penduduk laki-laki, dengan kata lain bahwa pertumbuhan penduduk laki-laki lebih tinggi sebesar 51,90 persen dari jumlah penduduk dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk perempuan sebesar 48,10 persen dari jumlah penduduk.

3.2.1.3. Distribusi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Persebaran penduduk di Kalimantan Tengah tahun 2020 secara umum cukup merata dengan basis kependudukan terpusat di Kotawaringin Timur (16,06 persen), Kapuas (15,37 persen), dan Kotawaringin Barat (10,13 persen). Kota Palangka Raya sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah persentase kependudukannya sebesar 10,99 persen dengan jumlah penduduk 293.457 jiwa.

Persebaran penduduk di Kalimantan Tengah sebagian besar terpusat di kabupaten induk, yaitu Kotawaringin Timur, Kapuas, dan Kotawaringin Barat serta ibukota provinsi yaitu Kota Palangka Raya. Sedangkan sebagian penduduk lainnya tersebar cukup merata di kabupaten lainnya. Banyaknya penduduk yang berpusat di 3 (tiga) kabupaten dan 1 (satu) kota tersebut bisa diakibatkan karena kondisi geografisnya, dimana Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat merupakan kabupaten yang telah lama memiliki pelabuhan besar yang menjadi pusat distribusi barang, Kapuas yang posisi geografisnya paling dekat dengan Kota Banjarmasin yang merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, serta Kota Palangka Raya yang merupakan ibukota provinsi. Sehingga kondisi tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang bisa membuat penduduk berkumpul.

Berdasarkan pada kelompok umur diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64) tahun sebanyak 1.874.200 jiwa atau sebesar 70,2 persen pada tahun 2020.



Penduduk usia produktif pada tahun 2020 mengalami penurunan 0,007 persen dari tahun 2019. Sedangkan komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3-17 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020

No	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1	0 - 4	220.400	8,25
2	5 - 9	221.500	8,30
3	10 - 14	234.700	8,79
4	15 - 19	237.900	8,91
5	20 - 24	240.500	9,01
6	25 - 29	236.400	8,85
7	30 - 34	232.200	8,70
8	35 - 39	217.900	8,16
9	40 - 44	202.400	7,58
10	45 - 49	175.500	6,57
11	50 - 54	141.700	5,31
12	55 - 59	111.100	4,16
13	60 - 64	78.600	2,94
14	65 - 69	53.300	2,00
15	70 - 74	33.800	1,27
16	75+	32.100	1,20
Jumlah		2.670.000	100

Sumber: BRS BPS Kalimantan Tengah 2020 (Proyeksi Penduduk)

Memperhatikan komposisi persentase penduduk usia produktif Provinsi Kalimantan Tengah yang memperlihatkan usia produktif lebih banyak dari pada usia non produktif merupakan potensi demografi bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Bila dilihat berdasarkan sudut pandang pembangunan, struktur penduduk yang demikian sangat menguntungkan masyarakat karena beban ketergantungan usia non produktif semakin berkurang atau mengecil.

Dengan banyaknya jumlah penduduk usia produktif tersebut perlu didukung dan diimbangi adanya ketersediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja pada tahun 2020 adalah sebanyak 1.381.442 orang, berkurang sebanyak 3.233 orang dibanding tahun 2019 dengan komponen pembentuk Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran, dimana penduduk yang bekerja pada tahun 2020 sebanyak 1.318.133 orang, turun 9.752 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 63.309 orang mengalami peningkatan sebanyak 6.519 orang dibanding setahun yang lalu.

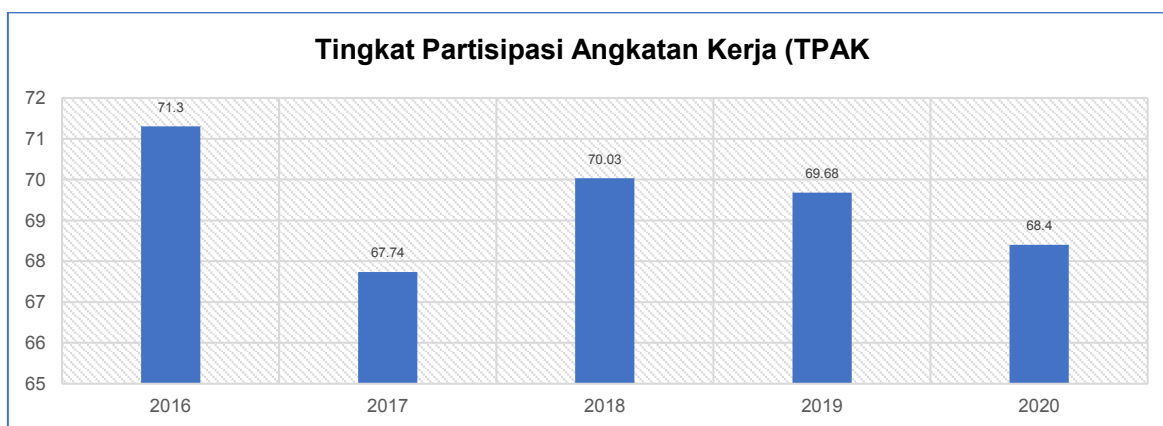
3.2.1.4. Ketenagakerjaan

A. Tingkat Parsipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Tahun 2016 tercatat TPAK



Kalimantan Tengah mencapai 71,3 turun menjadi 68,4 pada tahun 2020. Walau demikian, pada tahun 2018 sempat mengalami peningkatan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada Agustus 2020 tercatat sebesar 68,4 persen, menurun sebesar 1,28 poin dibanding setahun yang lalu. Berdasarkan jenis kelamin, terdapat perbedaan TPAK antara laki-laki dan perempuan. Pada Agustus 2019, TPAK laki-laki sebesar 85,84 persen sementara TPAK perempuan hanya 51,60 persen. Perkembangan TPAK Kalimantan Tengah periode 2016-2020 disajikan pada gambar di bawah:



Gambar 3-15 TPAK Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Tabel 3-18 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019
Kalimantan Tengah	71,11	67,74	70,03	69,68
Kotawaringin Barat	71,96	68,44	72,28	73,43
Kotawaringin Timur	67,96	63,21	68,51	67,45
Kapuas	70,62	67,6	69,55	67,37
Barito Selatan	67,99	61,71	62,28	69,68
Barito Utara	74,29	69,05	73,97	69,79
Sukamara	71,6	73,61	74,18	73,37
Lamandau	71,76	73	67,93	68,65
Seruyan	74,23	72,86	74,9	71,66
Katingan	72,2	65,97	69,49	70,79
Pulang Pisau	74,48	74,72	70,98	75,31
Gunung Mas	77,44	74,87	75,76	73,78
Barito Timur	80,43	74,11	79,09	74,89
Murung Raya	71,73	68,83	69,58	66,49
Palangka Raya	65,72	62,4	62,99	64,45

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

B. Tingkat Pengangguran Terbuka

Memperhatikan angka TPT Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir, perlu mendapat perhatian khusus oleh stakeholders ketenagakerjaan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan ketenagakerjaan, utamanya dalam mengatasi jumlah pengangguran. Adanya penurunan angka TPT pada tahun 2017



dan 2018, hal itu berarti terdapat banyak lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah, swasta dan pihak lainnya. Namun berdasarkan data BPS, Agustus 2019 TPT meningkat 0,09% dari Agustus 2018. Peningkatan ini bisa mengindikasikan bahwa terdapat penambahan jumlah angkatan kerja yang belum dapat terserap oleh lapangan pekerjaan. Jumlah angkatan kerja Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2020 sebanyak 1.381.442 jiwa, naik 7015 orang dibanding Agustus 2019. Komponen pembentuk Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2020 sebanyak 1.318.133 orang, turun 821 orang dibanding keadaan setahun yang lalu. Sementara itu, jumlah pengangguran sebanyak 63.309 orang, mengalami peningkatan sebanyak 7836 orang dibanding tahun sebelumnya.

Dilihat dari wilayah tempat tinggalnya, TPT di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi dibanding TPT di wilayah perdesaan. Pada Agustus 2020, TPT di wilayah perkotaan sebesar 5,13 persen, sedangkan TPT di wilayah perdesaan hanya 4,20 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka seluruh provinsi di Pulau Kalimantan pada periode tahun 2016-2020 berfluktuasi dengan cenderung menurun sebagaimana ditunjukkan pada grafik diatas, dimana seluruh provinsi regional Kalimantan pada akhir periode tahun 2020 menurun dari angka tahun 2016. Tingkat pengangguran terbuka Kalimantan Tengah mengalami persentase terendah diantara provinsi lainnya di Pulau Kalimantan yaitu pada angka 4,82 persen di tahun 2020 menurun 0,24 persen di tahun 2020 menjadi 4,58 persen. Sedangkan TPT tertinggi ada di Kalimantan Timur pada angka 7,95 persen di tahun 2016 dan 6,87 persen di tahun 2020 atau menurun 1,08 persen. Namun angka TPT seluruh provinsi di Pulau Kalimantan pada periode tahun 2016-2020 berada dibawah angka nasional.



Gambar 3-16 Tingkat Pengangguran Terbuka Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Jika dibandingkan dengan nasional, TPT di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2020 selalu dibawah TPT nasional. Pada tahun 2016, TPT Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 4,82 persen turun ke 4,58 persen pada tahun 2020, sementara TPT nasional tahun 2015 mencapai 5,61 persen naik menjadi 7,07 persen pada tahun 2020.



Tabel 3-19 Tingkat Pengangguran di Kalimantan Tengah

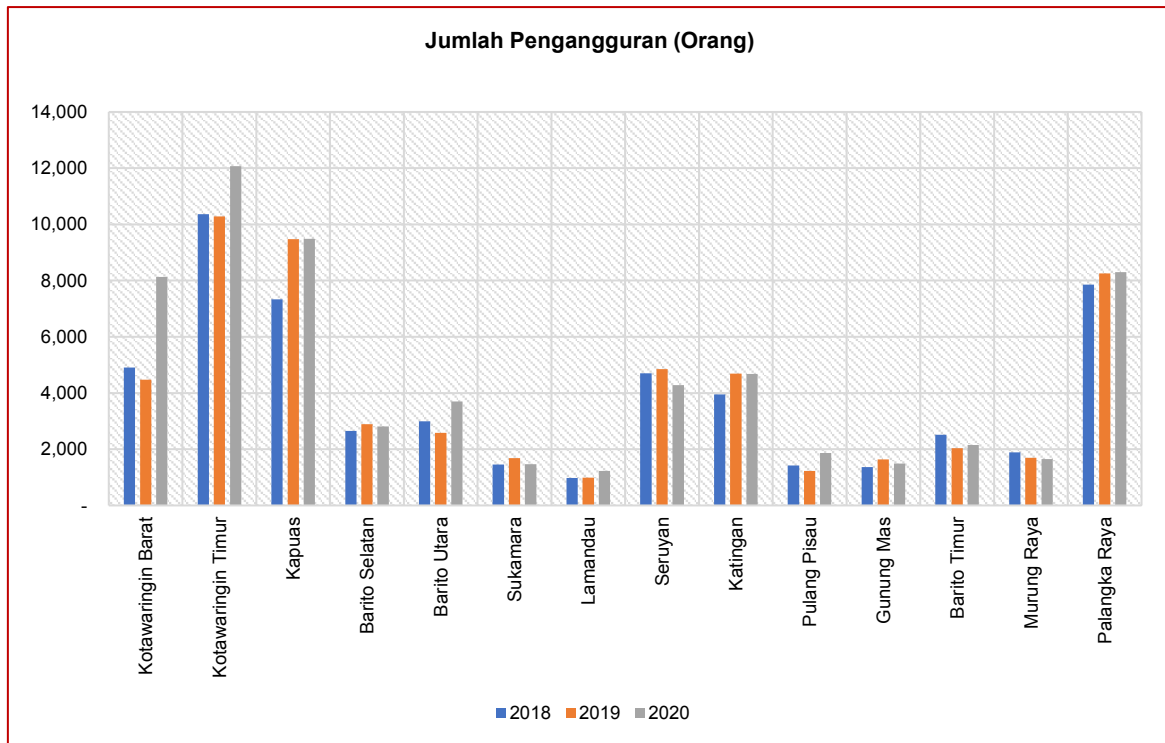
No	Kabupaten/Kota	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Kotawaringin Barat	2,17	3,01	2,62
2	Kotawaringin Timur	4,92	4,55	4,47
3	Kapuas	5,42	4,08	5,37
4	Barito Selatan	4,09	4,33	4,18
5	Barito Utara	5,19	4,34	3,92
6	Sukamara	4,83	4,39	4,90
7	Lamandau	1,35	2,42	2,34
8	Seruyan	4,79	4,40	4,49
9	Katingan	3,81	4,78	5,45
10	Pulang Pisau	1,62	2,15	1,74
11	Gunung Mas	1,17	2,19	2,64
12	Barito Timur	4,68	3,50	2,89
13	Murung Raya	2,78	3,37	3,07
14	Palangka Raya	7,28	5,81	5,78
	Rata-Rata	4,23	4,01	4,10

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

Badan Pusat Statistik mencatat pengangguran di Provinsi Kalimantan Tengah selama pandemi COVID-19 mencapai 9.330 orang, terdiri dari 5.050 laki-laki dan 4.280 perempuan. Sebaran pengangguran 9.330 orang akibat pandemi itu di perkotaan sekitar 4.240 orang dan di pedesaan 5.090 orang.

Secara umum, pada semua kategori tersebut, jumlah laki-laki yang terdampak lebih banyak dibandingkan perempuan. Begitu juga jika dilihat menurut daerah tempat tinggal, penduduk usia kerja di daerah perkotaan lebih banyak dibandingkan dengan di pedesaan. Dalam setahun terakhir ini memang persentase pekerja setengah penganggur mengalami kenaikan sebesar 2,00 persen poin, sedangkan pekerja paruh waktu naik sebesar 3,59 persen poin,".

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Tengah pada Agustus 2020 mengalami peningkatan sebesar 7 ribu orang dibandingkan Agustus 2019. Hanya, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami penurunan menjadi 68,40 persen pada Agustus 2020 dibandingkan Agustus 2019 yang berkisar 69,29 persen.



Gambar 3-17 Jumlah Pengangguran di Kalimantan Tengah

Lapangan usaha yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terjadi pada lapangan pekerjaan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil (1,78 persen poin), Pertambangan dan Penggalan (0,63 persen poin), Jasa Lainnya (0,36 persen poin), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0,26 persen poin).

Sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan adalah Jasa Pendidikan (0,88 persen poin), Pertanian (0,54 persen poin), Konstruksi (0,45 persen poin), Industri Pengolahan (0,26 persen poin), Administrasi Pemerintahan (0,23 persen poin), Transportasi & Pergudangan (0,23 persen poin), Pengadaan Listrik, Air, Gas (0,19 persen poin), Akomodasi dan penyediaan Makan/Minum (0,14 persen poin), dan Jasa Perusahaan Keuangan dan Informasi (0,12 persen poin).

3.2.2. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan klasik dalam wilayah administrasi pemerintahan dimana fenomena tersebut dikatakan akan selalu ada selama suatu regional berdiri. Oleh karenanya, dalam setiap rumusan perencanaan pembangunan daerah selalu tercantum kebijakan terkait pengentasan kemiskinan sebagai bentuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Untuk mengentaskan kemiskinan dibutuhkan pemulihan kondisi ekonomi, dengan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang membaik, diharapkan akan terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat miskin, selain itu dapat tercipta.

Secara umum, angka kemiskinan (persentase penduduk di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan secara bertahap



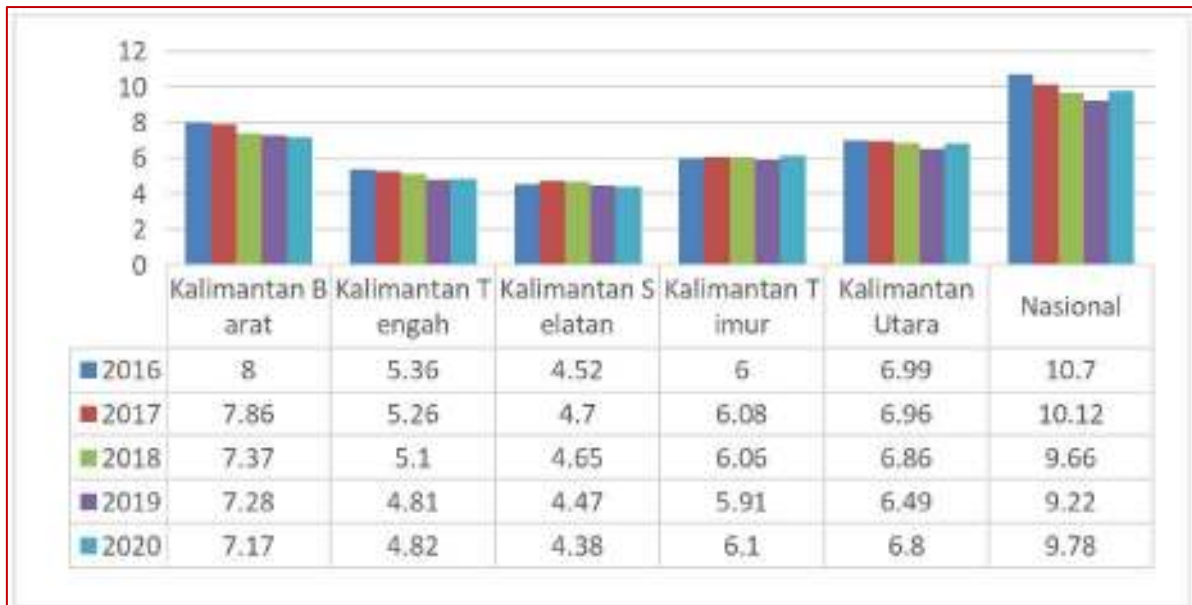
namun konsisten. Berdasarkan kondisi tingkat kemiskinan bulan september dari tahun ke tahun, pada tahun 2014, tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 6,07 persen secara konsisten menurun landai hingga akhirnya pada periode september tahun 2019 mencapai 4,81 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, berdasarkan angka kemiskinan tahun 2019, tingkat kemiskinan tertinggi berada di wilayah Kabupaten Seruyan sebesar 7,19 persen. Namun, jika dilihat angka absolut jumlah penduduk miskin, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yakni sebanyak 27,38 ribu jiwa. Dengan Adanya Penurunan angka kemiskinan menandakan sudah mulai berjalannya program-program yang mendukung pengentasan kemiskinan. Semakin tinggi angka penurunannya maka indikator keberhasilan program-program yang ada dikatakan berhasil.

Tabel 3-20 Garis Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)		Tingkat Kemiskinan		Jumlah Penduduk Miskin (x 000)	
		2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Kotawaringin Barat	360.942	397.883	4,11	3,59	12,76	11,46
2	Kotawaringin Timur	416.777	446.039	5,90	5,62	27,38	26,64
3	Kapuas	305.809	332.999	5,09	5,04	18,23	18,17
4	Barito Selatan	408.072	433.787	4,39	4,45	5,99	6,12
5	Barito Utara	472.552	504.430	4,95	5,17	6,46	6,78
6	Sukamara	469.353	522.601	3,16	3,23	2,01	2,13
7	Lamandau	430.656	479.514	3,01	3,09	2,47	2,61
8	Seruyan	454.971	504.264	7,19	6,85	14,66	14,53
9	Katingan	434.609	474.056	5,02	4,79	8,51	8,23
10	Pulang Pisau	365.674	395.989	4,24	4,09	5,39	5,21
11	Gunung Mas	430.045	438.881	4,91	4,75	5,86	5,78
12	Barito Timur	487.185	517.183	6,32	6,09	7,97	7,88
13	Murung Raya	462.334	492.693	6	5,85	7,21	7,18
14	Palangka Raya	379.420	435.008	3,35	3,44	9,69	0,23
Kalimantan Tengah		438.248	485.635	4,98	4,82	34,594	132,94
Indonesia						25.144,72	

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

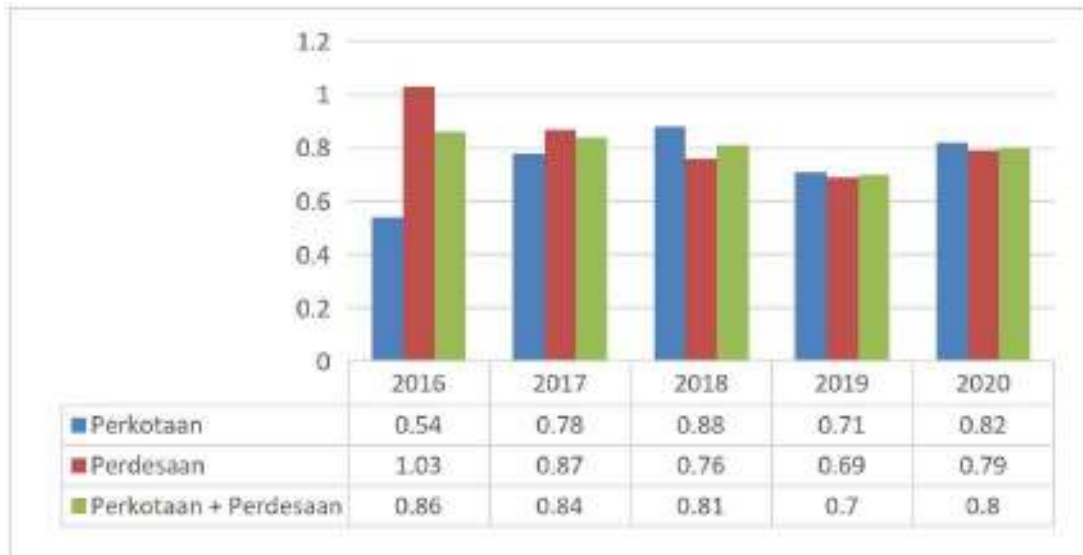
Berikut ini disajikan gambar perkembangan tingkat kemiskinan seluruh provinsi di Kalimantan periode 2015-2020



Gambar 3-18 Tingkat Kemiskinan di Pulau Kalimantan dan Nasional Tahun 2016-2020 (%)

Tingkat kemiskinan seluruh provinsi di Pulau Kalimantan pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan perbaikan dengan persentase angka yang menurun landau hingga akhir periode kecuali Provinsi Kalimantan Utara. Tingkat Kemiskinan Kalimantan Barat mengalami persentase tertinggi, sedangkan Kalimantan Selatan mengalami persentase terendah di regional Kalimantan. Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah.

Apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional pada periode tahun 2016-2020 selalu dibawah tingkat kemiskinan nasional. Pada Tahun 2016 tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 5,36 persen dan nasional 11,13 persen, sedangkan pada tahun 2020 tingkat kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah menurun menjadi 4,82 persen dan nasional sebesar 9,78 persen. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, berdasarkan angka kemiskinan tahun 2020, tingkat kemiskinan tertinggi berada di wilayah Kabupaten Seruyan sebesar 6,85 persen. Namun, jika dilihat angka absolut jumlah penduduk miskin, sebagian besar penduduk miskin berada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yakni sebanyak 26,64 ribu jiwa. Indikator kemiskinan lainnya yaitu indeks kedalaman kemiskinan (P1) pada perkotaan dan perdesaan Kalimantan Tengah mengalami kenaikan dari tahun 2016–2020 dimana pada angka 0,86 di tahun 2016 dan mengalami penurunan di tiap tahunnya sampai di angka 0,8 di tahun 2020



Gambar 3-19 Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 (Persen)

Dari gambar di atas terlihat pada indeks keparahan kemiskinan di perkotaan mengalami penurunan dari tahun 2014 dengan indeks 0,19, namun pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan indeks 0,1 di tahun 2016 menjadi 0,22 di tahun 2017. Namun selang waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2017 ke tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan perkotaan mengalami penurunan dari yang semula 0,27 menjadi 0,15. Sedangkan indeks keparahan kemiskinan pada pedesaan juga sempat mengalami peningkatan pada tahun 2016 ke tahun 2017 dimana pada tahun 2016 indeks keparahan kemiskinan mencapai angka 0,20 meningkat menjadi 0,21 di tahun 2017. Pada 2 (dua) tahun terakhir di tahun 2018 indeks tersebut mengalami penurunan dari angka 0,21 menjadi angka 0,17 di tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 indeks keparahan kemiskinan kembali mengalami kenaikan menjadi 0,22.

Dari data indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tersebut dapat diindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin masih melebar karena kembali mengalami kenaikan di tahun 2020.



Gambar 3-20 Tingkat Keparahannya Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020 (Persen)



Dari data indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tersebut dapat diindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk semakin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin masih melebar namun sudah menurun meskipun tidak terlihat secara signifikan.

Tabel 3-21 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Tengah 2015-2020

No	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp/Perkapita/Bln)					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kotawaringin Barat	293.436	319.064	338.230	334.337	360.942	397.883
2	Kotawaringin Timur	325.234	353.640	381.776	393.474	416.777	446.039
3	Kapuas	252.866	266.943	283.222	291.820	305.809	332.999
4	Barito Selatan	333.917	355.341	377.932	389.405	408.072	433.787
5	Barito Utara	408.241	420.100	446.807	450.936	472.552	504.430
6	Sukamara	384.739	418.026	427.101	442.086	469.353	522.601
7	Lamandau	350.294	380.888	409.912	411.088	430.656	479.514
8	Seruyan	357.090	387.592	415.798	428.539	454.971	504.264
9	Katingan	356.695	387.848	412.113	420.418	434.609	474.056
10	Pulang Pisau	314.673	335.165	347.878	349.978	365.674	395.989
11	Gunung Mas	356.866	365.198	388.415	388.964	403.045	438.881
12	Barito Timur	415.710	442.068	467.091	478.510	487.185	517.183
13	Murung Raya	378.062	402.682	421.903	442.639	462.334	492.693
14	Palangka Raya	307.796	324.082	345.417	353.853	379.420	435.008
	Kalimantan Tengah	349.727	373.484	401.537	413.529	438.248	485.635

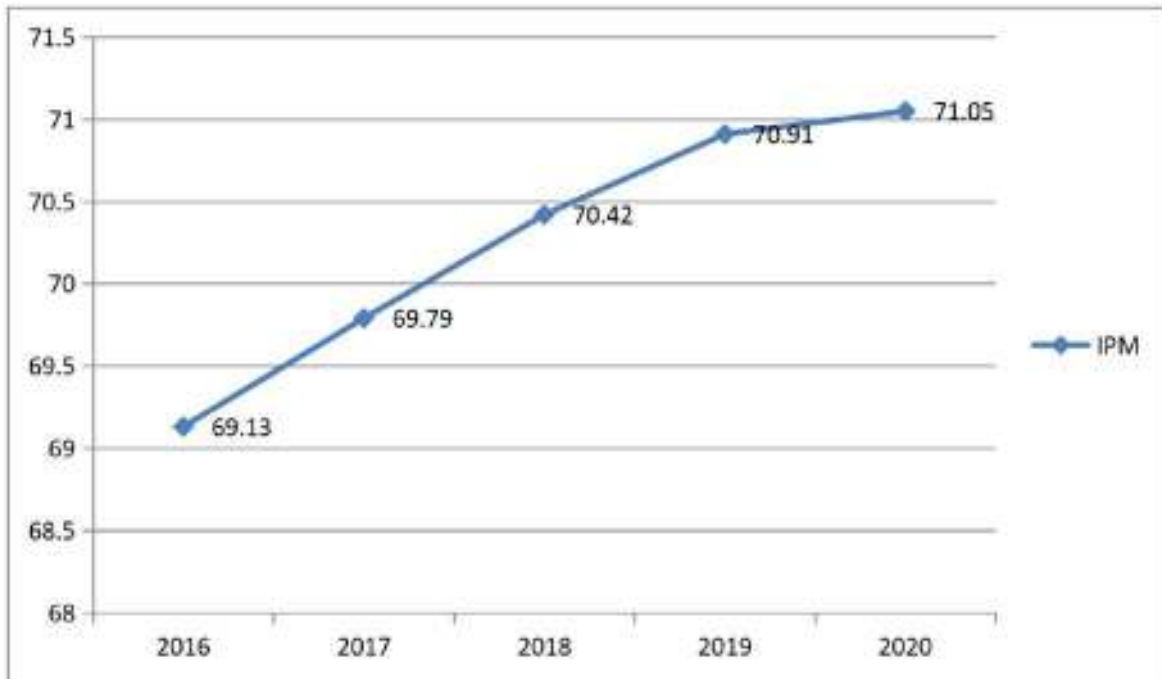
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

3.2.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan, manusia wajib memiliki persyaratan untuk memenuhi standar minimal kualitas sumber daya agar pencapaian pembangunan daerah lebih efektif dan efisien. Dalam rangka pemenuhan persyaratan tersebut, diperlukan sebuah usaha pembangunan manusia oleh pemerintah daerah.

Sebagai alat evaluasi pembangunan manusia digunakan indeks komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terdiri dari komponen kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka harapan lama sekolah) serta ekonomi masyarakat (pengeluaran per kapita yang disesuaikan).

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Kalimantan Tengah mengalami kenaikan yang konsisten. Pada tahun 2016, IPM Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 69,13 dan seiring berjalannya waktu IPM terus mengalami kenaikan hingga tahun 2020 mencapai 71,05. Nilai IPM 71,05 berarti masuk kategori Tinggi. Peningkatan IPM yang konsisten setiap tahunnya berbanding lurus dengan peningkatan komponen-komponen pembentuknya.



Gambar 3-21 Indeks Pembangunan Manusia Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seluruh provinsi di Pulau Kalimantan pada periode tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang positif, dimana seluruh provinsi pada regional Kalimantan pada akhir periode tahun 2020 meningkat dari angka tahun 2016.

IPM Kalimantan Barat mengalami persentase terendah diantara provinsi lainnya di Pulau Kalimantan yaitu 65,88 di tahun 2016 meningkat 1,78 poin di tahun 2020 menjadi 67,66. Sedangkan IPM tertinggi ada di Kalimantan Timur pada angka 74,59 di tahun 2016 dan 76,24 di tahun 2020 atau meningkat 1,65 poin. Jika dibandingkan dengan IPM nasional, hanya Provinsi Kalimantan Timur dalam kurun waktu tahun 2016-2020 yang masih diatas angka nasional. IPM di Provinsi Kalimantan Tengah juga selalu dibawah IPM nasional. Pada tahun 2016, IPM Provinsi Kalimantan Tengah berada pada angka 69,13 persen meningkat ke 1,78 persen pada tahun 2020 menjadi 70,05 persen, sementara IPM nasional tahun 2016 mencapai 70,18 persen meningkat menjadi 1,76 persen pada tahun 2019 menjadi 71,94 persen.

Berdasarkan data tahun 2020, dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah yang masuk kategori IPM tinggi sebanyak 7 kabupaten dan Kota Palangka Raya masuk kategori Sangat Tinggi. Sisanya termasuk pada kategori IPM Sedang. Secara rinci capaian IPM dan komponen pembentuknya menurut kabupaten/kota pada tahun 2020 disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 3-22 Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	IPM	Angka Harapan Hidup (tahun)	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang)
1	Kotawaringin Barat	72,87	70,59	12,72	8,42	13.109
2	Kotawaringin Timur	71,31	69,85	12,84	8,13	11.854
3	Kapuas	69,48	68,74	12,92	7,59	11.015
4	Barito Selatan	70,22	67,09	12,55	8,82	11.486
5	Barito Utara	70,59	71,3	12,49	8,71	9.936
6	Sukamara	68,03	71,53	12,12	8,01	8.674
7	Lamandau	70,51	69,36	12,48	8,42	11.190
8	Seruyan	67,58	69,26	11,99	7,94	9.370
9	Katingan	68,68	65,78	12,67	8,67	10.548
10	Pulang Pisau	68,45	68,04	12,41	8,18	10.047
11	Gunung Mas	70,81	70,4	11,78	9,14	10.793
12	Barito Timur	71,39	68,22	12,83	9,21	11.319
13	Murung Raya	67,89	69,51	11,75	7,54	10.419
14	Kota Palangka Raya	80,77	73,21	14,95	11,52	14.055
Kalimantan Tengah		71,05	69,74	12,66	8,59	11.154

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah, 2021

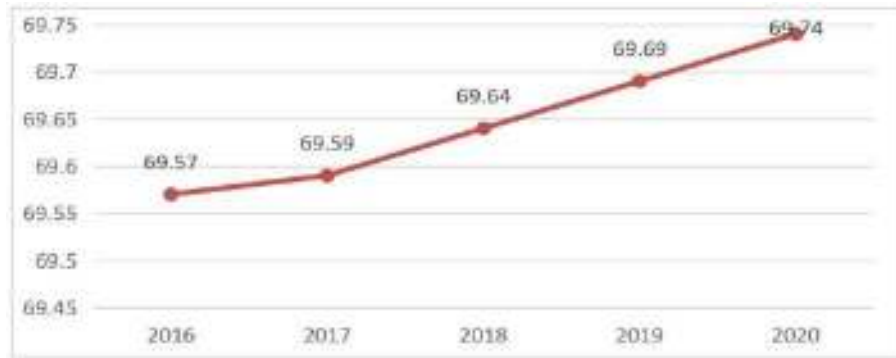
A. Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah

Secara umum, pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami perkembangan yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Sampai dengan tahun 2020, Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 12,66 tahun. Ini berarti penduduk Kalimantan Tengah usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,66 tahun atau setara dengan Diploma I.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan. Pada tahun 2016, rata-rata lama sekolah selama 8,13 tahun dan setelah lima tahun berselang angka tersebut beranjak naik hingga 8,59 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat usia 15 tahun ke atas memiliki rata-rata lama sekolah hingga jenjang pendidikan SMP kelas 3 semester kedua.

B. Angka Harapan Hidup

Capaian di bidang kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan karena perbaikan-perbaikan sarana prasarana fasilitas kesehatan diiringi dengan penambahan kuantitas maupun kualitas sumber daya kesehatan baik dokter, tenaga medis, dan lainnya sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pencapaian positif di bidang kesehatan ini dapat dilihat dari trend kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin meningkat pada 5 (lima) tahun terakhir. Tahun 2016, angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 69,57 tahun dan terus mengalami peningkatan hingga di tahun 2020 mencapai 69,74 tahun. Hal tersebut berarti bayi yang baru dilahirkan mencapai usia hidup 69-70 tahun. Dengan demikian Angka harapan hidup rata-rata Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka 69-70 tahun dari setiap bayi yang baru dilahirkan. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah yang menggambarkan kenaikan angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun ke tahun periode 2016-2020



Gambar 3-22 Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

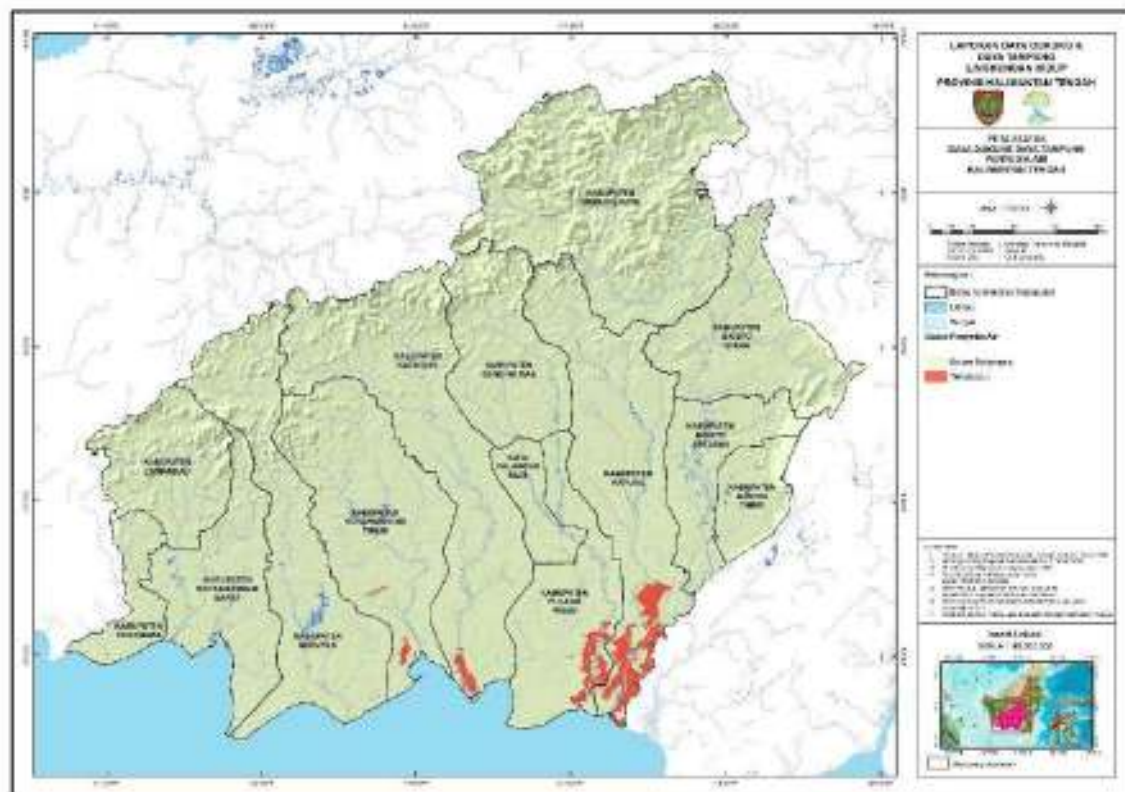
3.3. Kondisi Umum Muatan KLHS

3.3.1. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

3.3.1.1. Status Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air

Perkembangan wilayah pada suatu daerah akan menyebabkan kebutuhan air terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan penduduk. Hampir semua aktivitas penduduk dalam memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan pangan, selalu erat kaitannya dengan kebutuhan akan air. Pemanfaatan air menjadi penting untuk direncanakan agar tercapai keseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan air. Namun sayang, kecenderungan yang terjadi adalah terus meningkatnya kebutuhan akan air dibarengi dengan semakin berkurangnya ketersediaan air. Dalam rangka mencapai keseimbangan antara kebutuhan air dan ketersediaan air di masa mendatang, diperlukan upaya pengkajian komponen-komponen kebutuhan air, serta efisiensi penggunaan air. Komponen yang paling berpengaruh untuk menghitung neraca air adalah kebutuhan air irigasi dan kebutuhan air domestik. Dengan demikian hendaknya dilakukan suatu perencanaan yang tepat agar kebutuhan air dapat terpenuhi. Khusus kebutuhan air untuk irigasi diperlukan pengkajian dan perencanaan unit kebutuhan airnya secara cermat dan teliti. Hal ini penting dilakukan karena kebutuhan air untuk irigasi merupakan komponen yang paling tinggi kebutuhan airnya.

Perhitungan dan analisis terhadap status jasa ekosistem penyediaan air diawali dengan menghitung ketersediaan jasa ekosistem penyediaan air, lalu dilanjutkan dengan perhitungan kebutuhan air domestik dan non-domestik. Kebutuhan air domestik dihitung berdasarkan Permen LH No. 17 tahun 2009 yang menetapkan bahwa total kebutuhan air minum dan rumah tangga adalah 120 l/ha perkapita. Sedangkan kebutuhan air non-domestik dihitung dengan pemberian bobot terhadap kegiatan pengelolaan lahan yang terdapat di Kalimantan Tengah, seperti perkebunan sawit, kebun campuran, perladangan, dan sawah. Pembobotan dilakukan dengan pertimbangan kebutuhan air dari masing-masing pengelolaan lahan. Seperti halnya sawah yang diberikan bobot 5 dari 5 karena dalam pengelolaannya membutuhkan air dalam jumlah besar. Berkebalikan dengan perladangan yang diberi bobot 1 dari 5 karena hanya membutuhkan air dalam jumlah kecil dalam pengelolaannya.



Gambar 3-23 Status Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Air

Sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3-23, sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki kebutuhan air yang belum melampaui ketersediaan air di wilayah tersebut (area berwarna hijau). Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki area dengan ketersediaan air yang telah terlampaui. Adapun beberapa kabupaten dengan luas wilayah yang ketersediaannya terlampaui yaitu Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, dengan persentase luas area berturut-turut seluas 0,1%, 0,19%, 0,02%, 8,29%, 0,92%, 0,11%, 0,70%, 0,06%, 5,65% dan 0,03% dari luas masing-masing kabupaten (Tabel 5.1). Berdasarkan tutupan lahan yang digunakan dalam analisis, tutupan lahan di lokasi yang telah melampaui ketersediaan air, sebagian besar merupakan perkebunan sawit. Hal ini sejalan dengan hasil temuan Taufiq et al (2013), bahwa perkebunan sawit dapat mengurangi kemampuan lahan dalam menyediakan air hingga mencapai 30% - 40%.

Tabel 3-23 Luas area dengan Status ketersediaan air

Kabupaten/Kota	Status Ketersediaan Air (Ha)				Grand Total
	Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%	
Barito Selatan	651.458	99,90%	683	0,10%	652.141
Barito Timur	359.083	99,81%	670	0,19%	359.753
Barito Utara	1.048.373	99,98%	259	0,02%	1.048.631
Gunung Mas	959.070	100,00%		0,00%	959.070
Kapuas	1.548.176	91,71%	139.859	8,29%	1.688.035



Katingan	2.027.466	99,08%	18.891	0,92%	2.046.358
Kotawaringin Barat	983.802	99,89%	1.113	0,11%	984.915
Kotawaringin Timur	1.533.864	99,30%	10.879	0,70%	1.544.743
Lamandau	766.146	99,94%	428	0,06%	766.574
Murung Raya	2.359.380	100,00%		0,00%	2.359.380
Pulang Pisau	900.770	94,35%	53.973	5,65%	954.743
Seruyan	1.488.458	100,00%		0,00%	1.488.458
Sukamara	326.445	100,00%		0,00%	326.445
Kota Palangka Raya	268.845	99,97%	86	0,03%	268.931
Grand Total	15.221.333	98,85%	226.842	1,15%	15.448.175

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketersediaan air di Provinsi Kalimantan Tengah masih cukup untuk memenuhi kebutuhan air, dengan potensi kelebihan ketersediaan air mencapai 162.451.139.206 m³/tahun (Tabel 2-22). Seluruh kabupaten yang memiliki ketersediaan air yang melebihi kebutuhan. Selisih yang paling besar berada di Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Katingan sebesar 34.750.391.047 m³/tahun dan 23.058.921.956 m³/tahun.

Tabel 3-24 Hasil Analisis Selisih Antara Ketersediaan Dan Kebutuhan Air

Kabupaten/Kota	Status Ketersediaan Air (m ³ /Tahun)		Selisih	Jumlah Populasi Yang Bisa Ditampung (Jiwa)
	Ketersediaan	Kebutuhan		
Barito Selatan	7.538.353.576	638.702.892	6.899.650.684	8.624.563
Barito Timur	4.072.132.226	945.611.842	3.126.520.383	3.908.150
Barito Utara	13.786.526.826	1.221.972.964	12.564.553.862	15.705.692
Gunung Mas	11.800.542.527	1.867.809.821	9.932.732.707	12.415.916
Kapuas	20.139.307.775	4.672.120.827	15.467.186.949	19.333.984
Katingan	25.107.443.778	2.048.521.822	23.058.921.956	28.823.652
Kotawaringin Barat	10.794.774.010	2.312.424.486	8.482.349.524	10.602.937
Kotawaringin Timur	16.901.893.567	5.675.409.868	11.226.483.700	14.033.105
Lamandau	9.576.333.336	1.676.146.878	7.900.186.457	9.875.233
Murung Raya	35.840.724.246	1.090.333.200	34.750.391.047	43.437.989
Pulang Pisau	10.650.560.826	2.172.406.584	8.478.154.242	10.597.693
Seruyan	18.124.427.826	3.132.701.720	14.991.726.106	18.739.658
Sukamara	3.731.838.253	696.028.972	3.035.809.281	3.794.762
Kota Palangka Raya	2.765.619.462	229.147.152	2.536.472.310	3.170.590
Grand Total	190.830.478.235	28.379.339.028	162.451.139.206	203.063.924

Jumlah populasi yang dapat ditampung juga dapat dianalisis dengan melihat ketersediaan air. Dengan membagi standar kebutuhan air untuk hidup layak sebesar 800 m³/kapita/tahun maka dapat diketahui populasi yang dapat ditampung. Secara keseluruhan, Provinsi Kalimantan Tengah masih dapat menampung populasi sebesar 203.063.924 Jiwa. Ketersediaan air dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tutupan lahan, jenis tanah dan iklim. Dalam kajian ini, faktor dominan dalam perhitungan adalah tutupan lahan, karena tutupan lahan memiliki



peran penting dalam siklus hidrologi. Menurut ICRAF (2017), perubahan lahan pada suatu wilayah akan perubahan terhadap kondisi hidrologis wilayah tersebut, seperti perubahan besaran aliran permukaan dan infiltrasi. Lebih jauh, ICRAF menjelaskan bahwa perubahan lahan hutan menjadi perkebunan sawit, maupun pertanian lahan kering dan sawah, dapat memicu kenaikan aliran permukaan di masa mendatang. Hal ini akan mengurangi kemampuan infiltrasi lahan sehingga ketersediaan air menjadi berkurang. Pada tahun kajian, tidak keseluruhan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kebutuhan air yang melampaui ketersediaan airnya. Masih terdapat 40% dari seluruh area perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah yang kebutuhan airnya tidak melampaui ketersediaan air di areanya. Namun jika tidak dilakukan intervensi ke arah perbaikan lingkungan, maka pada masa yang akan datang ketersediaan air akan semakin berkurang.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga ketersediaan air dalam area pengelolaan lahan seperti perkebunan kelapa sawit adalah melalui penerapan teknik konservasi air. Prinsip konservasi air adalah penggunaan air yang jatuh ke tanah seefisien mungkin dan pengaturan waktu aliran yang tepat, sehingga tidak terjadi banjir pada musim hujan dan terdapat cukup air pada musim kemarau (Arsyad 2000). Agus dan Ruijter (2004) menambahkan, penerapan teknik konservasi baik dilakukan pada daerah yang memiliki; (1) daya serap atau infiltrasi rendah, (2) bulan kering lebih dari tiga bulan berturut-turut, (3) curah hujan sangat tinggi pada musim dan (4) memiliki kemiringan lahan yang besar. Disamping itu, penelitian berbeda oleh Julianto (2011), menunjukkan bahwa Teknik konservasi air pada lahan perkebunan kelapa sawit tidak hanya memberikan pengaruh dalam meningkatkan ketersediaan air, namun juga mampu meningkatkan kemampuan tanah dalam menyimpan air lebih lama, sehingga tidak terjadi kekurangan air pada musim kemarau.

Kalimantan Tengah pada khususnya memiliki ketersediaan sumber daya alam yang dapat dikatakan masih cukup tinggi namun ketersediaannya mulai terbatas. Nilai komoditas sumber daya alam yang berasal dari beberapa sektor, diantaranya hasil hutan, tambang, pertanian dan perikanan yang mendatangkan nilai ekonomi wilayah. Namun belakangan ini potensi sumber daya alam tersebut mengalami pemborosan dalam pemanfaatan, sehingga terjadi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan hidup yang ditandai dengan pencemaran sungai serta banjir. Disamping itu wilayah perbatasan Kalimantan ($4^{\circ}24'$ LU - $4^{\circ}10'$ LS dan $108^{\circ}30'$ BT - $119^{\circ}00'$ BT) seluas wilayah lebih kurang 535.834 km^2 berbatasan dengan Negara Malaysia terletak dibagian utara yang panjangnya mencapai 3.000 km. Pengelolaan wilayah perbatasan yang masih belum intensif maka menimbulkan pula persoalan yang terkait dengan illegal logging, konversi kawasan hutan dan illegal trading. Kondisi fisik wilayah Kalimantan yang masih menyimpan potensi sumber daya alam sebagian besar di wilayah pegunungan, yang meliputi kawasan taman nasional yang berfungsi sebagai konservasi flora dan fauna, hutan di pegunungan Muller dan Schawaner, serta kawasan hutan dan hutan lindung lainnya yang ditetapkan sebagai "world heritage forest". Kawasan hutan tersebut merupakan hulu-hulu sungai yang menyimpan cadangan air untuk seluruh Kalimantan, yaitu sebanyak 35 % yang tidak akan habis, tetapi dengan syarat tidak terganggu dan tercemar serta perlu dikelola sebagai suatu kawasan bioregion (DLH-Kalteng, 2017).



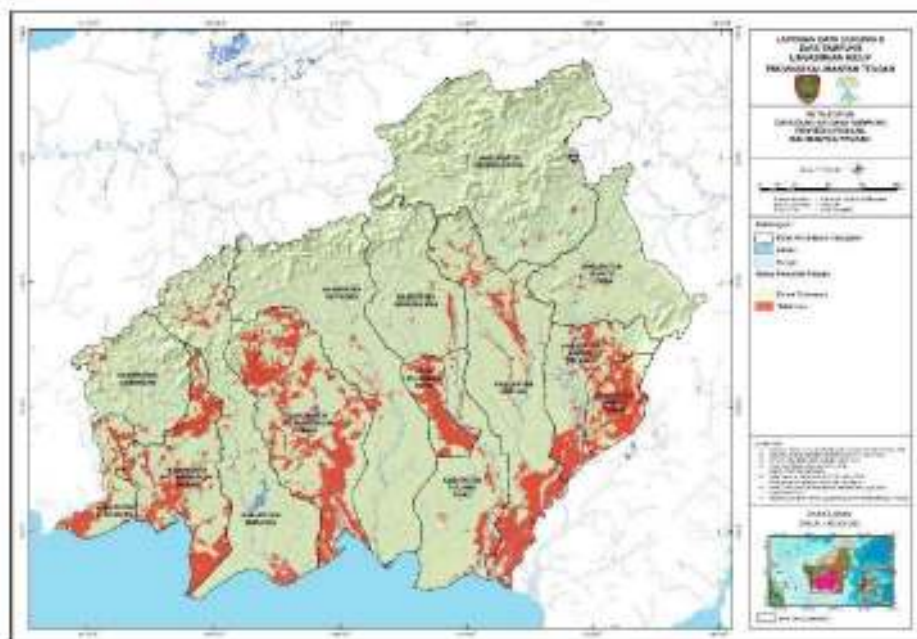
3.3.1.2. Status Daya Dukung Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan

Kebutuhan terhadap pangan merupakan salah satu keutuhan pokok masyarakat yang harus terpenuhi untuk mencapai kesejahteraan. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang – Undang No.7 Tahun 1996 tentang pangan, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan dan menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup, bermutu dan bergizi layak, aman dan merata serta terjangkau oleh setiap rumah tangga. Pembangunan ekonomi dan sektor lain tidak akan dapat tercapai jika tidak didahului dengan penyelesaian permasalahan pangan. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan menjadi syarat mutlak bagi mewujudkan pembangunan dan ketahanan di Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam hal ini, tantangan pembangunan di masa depan adalah jumlah penduduk yang terus meningkat. Penduduk merupakan komponen terpenting dalam suatu ruang. Dikatakan ruang karena memiliki tiga unsur utama yaitu wilayah (tanah, udara, air), manusia, dan tata kehidupan. Manusia merupakan komponen yang bersifat dinamis, senantiasa bertambah jumlahnya, dan merupakan makhluk hidup paling kompleks, terutama masalah kebutuhan hidupnya. Manusia membutuhkan pangan untuk dapat berkembang dan beraktivitas. Sementara dalam pemenuhan kebutuhan pangan, ketersediaan pangan menjadi hal yang tidak terpisahkan demi mencapai kecukupan pangan. Dalam kajian ini, ketersediaan pangan dihitung dengan pendekatan produksi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan. Berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah tahun 2018, diketahui bahwa dari sektor – sektor tersebut terdapat beberapa komoditi utama yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan energi dan pangan masyarakat (Tabel 3-3). Di sisi lain, nilai kebutuhan energi dan pangan diperoleh dari Angka Kecukupan Energi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Keputusan No 332 tahun 1994, yaitu sebesar 2150 Kkal/orang/hari.

Tabel 3-25 Produksi Sektor Pertanian, Peternakan, Dan Perikanan Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan

No	Nama Komoditi	Total produksi tahun 2017	
		Ton	Kkal
Sektor Pertanian			
1	Padi sawah + ladang	893,202	3,215,527,200,000
2	Jagung Kuning	8,189	29,971,740,000
3	Kacang kedelai	1,262	4,808,220,000
4	Kacang tanah	523	2,747,850,000
5	Ubi Kayu/singkong	45,712	66,739,520,000
6	Ubi Jalar	9,640	11,857,200,000
Sektor Perikanan			
7	Ikan	113,194.5	127,909,807,600
Sektor Peternakan			
8	Daging Sapi	4,947.5	10,241,334,495
9	Daging Kambing	220.6	339,701,606
10	Daging Ayam	22,857.5	69,029,547,285
11	Daging Bebek (itik)	197.7	644,521,274
12	Telur Ayam	5,196.3	8,417,972,659
13	Telur Bebek (itik)	1,801.6	3,405,063,644
Total		1,106,944.08	3,551,639,678,563

Sumber: Hasil analisis data BPS, Provinsi Kalimantan Tengah dalam Angka 2018



Gambar 3-24 Sebaran Status Daya Dukung Penyedia Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 3-26 Luas Area Dengan Status Ketersediaan Pangan

Kabupaten/Kota	Status Ketersediaan Pangan (Ha)				Grand Total
	Belum Terlampaui	%	Terlampaui	%	
Barito Selatan	475.589	72,93%	176.552	27,07%	652.141
Barito Timur	150.691	41,89%	209.062	58,11%	359.753
Barito Utara	1.036.314	98,83%	12.317	1,17%	1.048.631
Gunung Mas	935.461	97,54%	23.609	2,46%	959.070
Kapuas	1.327.724	78,65%	360.312	21,35%	1.688.035
Katingan	2.015.482	98,49%	30.876	1,51%	2.046.358
Kotawaringin Barat	606.307	61,56%	378.608	38,44%	984.915
Kotawaringin Timur	956.500	61,92%	588.243	38,08%	1.544.743
Lamandau	750.160	97,86%	16.414	2,14%	766.574
Murung Raya	2.348.177	99,53%	11.203	0,47%	2.359.380
Pulang Pisau	881.216	92,30%	73.527	7,70%	954.743
Seruyan	1.406.682	94,51%	81.776	5,49%	1.488.458
Sukamara	231.655	70,96%	94.790	29,04%	326.445
Kota Palangka Raya	113.480	42,20%	155.451	57,80%	268.931
Grand Total	13.235.436	79,23%	2.212.739	20,77%	15.448.175

Berdasarkan Gambar dan Tabel di atas terlihat bahwa secara keseluruhan kebutuhan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah belum melampaui ketersediaannya (warna hijau). Namun demikian, terdapat area yang kebutuhan pangannya telah melampaui ketersediaannya. Kabupaten/ kota dengan persentase luas wilayah yang telah melampaui ketersediaan pangan cukup besar adalah



Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangka Raya, Adapun persentase luas per-kabupaten/ kota tersebut secara berturut – turut mencapai 58,11% dan 57,80% dari luas masing – masing kabupaten/ kota. Jika diamati penggunaan lahannya, area yang kebutuhan pangannya telah melampaui ketersediaan pangan cenderung terletak di area permukiman yang padat penduduk. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu wilayah, kebutuhan pangan akan semakin besar, sehingga cenderung memiliki kebutuhan pangan yang melampaui ketersediaan pangannya.

Tingkat pertumbuhan penduduk dan ketersediaan pangan memiliki hubungan yang sangat erat. Pertumbuhan penduduk dalam suatu wilayah harus diimbangi dengan meningkatnya jumlah ketersediaan pangan bagi para penduduknya. Lebih luas, Thomas Robert Malthus sejak tahun 1798 telah memprediksi bahwa dunia akan menghadapi ancaman karena ketidakmampuan penyediaan pangan yang memadai bagi penduduknya. Malthus dalam teorinya mengungkapkan bahwa peningkatan produksi pangan mengikuti deret hitung dan pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sehingga manusia pada masa depan akan mengalami ancaman kekurangan pangan. Hasil analisis status ketersediaan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di beberapa kabupaten/ kota masih mampu memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya masing – masing, dengan total kelebihan ketersediaan kalori total mencapai 1,512,436,983,073 Kkal/tahun (Tabel 5.5). Namun demikian, ketersediaan pangan di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Barito Timur telah melampaui ketersediaannya, dengan kekurangan kalori per tahun mencapai -161.500.453.263 Kkal/tahun, -33.366.089.608 Kkal/tahun, -22.715.824.546 Kkal/tahun dan -13.878.966.087 Kkal/tahun. Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Palangka Raya mengalami defisit kalori per tahun terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sejalan dengan kepadatan penduduk di Kota Palangka Raya, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2018), merupakan yang paling besar di Provinsi Kalimantan Tengah, mencapai 115 per km².

3.3.1.3. Status Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Lahan Permukiman

Daya Dukung Daya Tampung (DDDT) Lahan Permukiman di Kalimantan Tengah secara umum dapat dikatakan baik/tercukupi sampai dengan Tahun 2030, Daya dukung permukiman terendah ada di Kabupaten Seruyan dengan nilai DDT 2,76. Sebaliknya nilai tertinggi ada pada Kabupaten Pulang Pisau dengan nilai DDDT 10,77. Distribusi Daya Dukung Lahan Permukiman di Kalimantan Tengah Tahun 2020 berdasarkan Kabupaten/Kota ditampilkan pada Tabe 3-27 dan Distribusi Daya Dukung Lahan Permukiman di Kalimantan Tengah Tahun 2030 pada Tabel 3-28.

Tabel 3-27 Daya Dukung Lahan Permukiman di Kalimantan Tengah Tahun 2020 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota	Luas Permukiman (m ²)	Jumlah penduduk (orang)	Luas Permukiman/ JP	DDDT Permukiman	Keterangan DDDT
Seruyan	14.751.336	205.880	71,7	2,76	Tercukupi
Murung Raya	10.604.505	120.785	87,8	3,38	Tercukupi
Palangka Raya	28.207.953	291.667	96,7	3,72	Tercukupi



Kabupaten/Kota	Luas Permukiman (m ²)	Jumlah penduduk (orang)	Luas Permukiman/JP	DDDT Permukiman	Keterangan DDDT
Gunung Mas	14.439.257	119.910	120,4	4,63	Tercukupi
Barito Timur	15.694.798	126.874	123,7	4,76	Tercukupi
Barito Utara	18.220.179	130.713	139,4	5,36	Tercukupi
Kapuas	51.487.363	358.820	143,5	5,52	Tercukupi
Sukamara	9.797.070	64.342	152,3	5,86	Tercukupi
Kotawaringin Timur	76.845.616	466.366	164,8	6,34	Tercukupi
Katingan	29.388.186	169.997	172,9	6,65	Tercukupi
Lamandau	15.625.327	82.680	189	7,27	Tercukupi
Barito Selatan	29.258.066	136.796	213,9	8,23	Tercukupi
Kotawaringin Barat	69.418.488	312.911	221,8	8,53	Tercukupi
Pulang Pisau	35.599.327	127.118	280	10,77	Tercukupi

Tabel 3-28 Prediksi Daya Dukung Lahan Permukiman di Kalimantan Tengah Tahun 2030 Berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah

Kabupaten/Kota	Luas Permukiman (m ²)	Jumlah penduduk (orang)	Luas Permukiman/JP	DDDT Permukiman	Keterangan DDDT
Seruyan	14.751.336	262.261	56,2	2,2	Tercukupi
Murung Raya	10.604.505	153.862	68,9	2,7	Tercukupi
Palangka Raya	28.207.953	371.541	75,9	2,9	Tercukupi
Gunung Mas	14.439.257	152.748	94,5	3,6	Tercukupi
Barito Timur	15.694.798	161.619	97,1	3,7	Tercukupi
Barito Utara	18.220.179	166.509	109,4	4,2	Tercukupi
Kapuas	51.487.363	457.084	112,6	4,3	Tercukupi
Sukamara	9.797.070	81.962	119,5	4,6	Tercukupi
Kotawaringin Timur	76.845.616	594.082	129,4	5,0	Tercukupi
Katingan	29.388.186	216.551	135,7	5,2	Tercukupi
Lamandau	15.625.327	105.322	148,4	5,7	Tercukupi
Barito Selatan	29.258.066	174.258	167,9	6,5	Tercukupi
Kotawaringin Barat	69.418.488	398.603	174,2	6,7	Tercukupi
Pulang Pisau	35.599.327	161.930	219,8	8,5	Tercukupi

3.3.2. Jasa Lingkungan

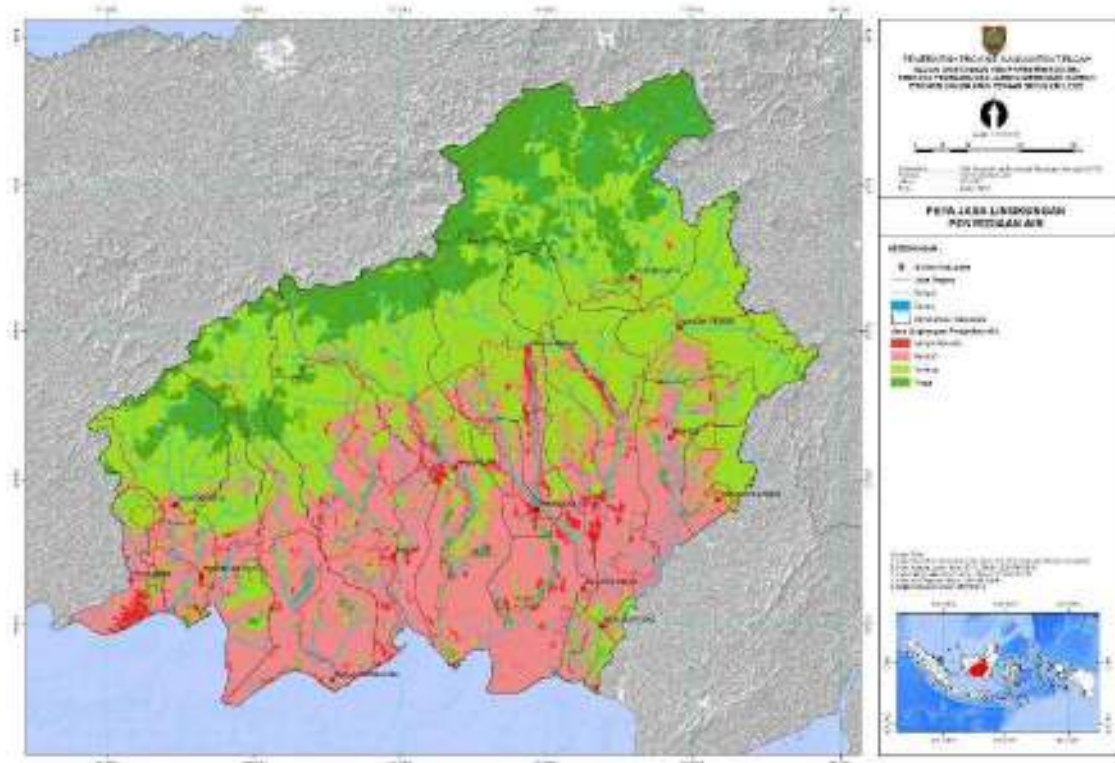
3.3.2.1. Jasa Lingkungan Fungsi Penyedia (*Provisioning*)

A. Penyedia (*Provisioning*) Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air yaitu ketersediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi



oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentang lahan. Layanan jasa lingkungan penyedia (*provisioning*) air di Kalimantan Tengah pada tahun 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3-25 Peta Jasa Lingkungan Penyedia (Provisioning) Air

Tabel 3-29 Distribusi luasan Jasa Lingkungan Penyedia Air

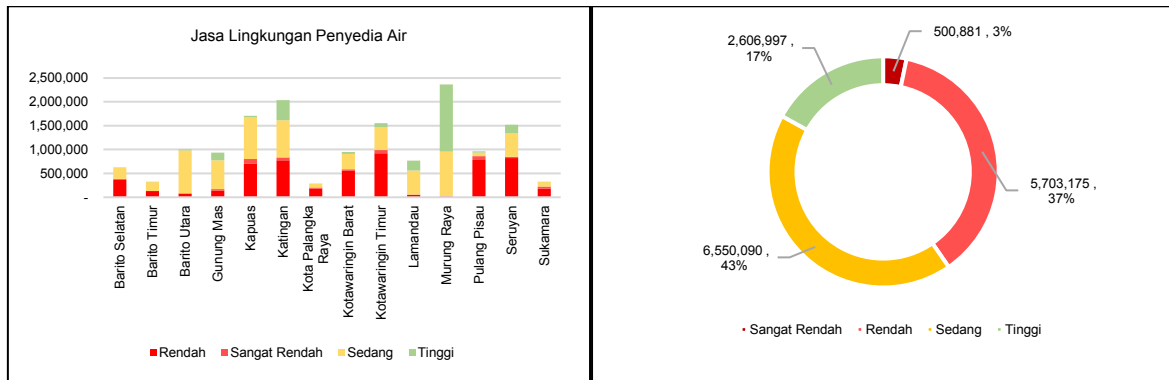
Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	21.254	367.335	230.876	7.837	627.302
Barito Timur	6.215	127.245	184.689	3.113	321.261
Barito Utara	4.151	76.725	903.920	18.106	1.002.901
Gunung Mas	30.856	137.320	604.477	161.632	934.284
Kapuas	103.439	699.426	872.242	32.770	1.707.877
Katingan	60.763	771.572	781.105	425.755	2.039.195
Kota Palangka Raya	22.743	182.164	71.526	8.880	285.312
Kotawaringin Barat	34.363	554.279	322.091	36.481	947.214
Kotawaringin Timur	68.257	921.754	481.407	82.908	1.554.327
Lamandau	3.463	53.018	500.655	209.651	766.787
Murung Raya	1.293	18.981	938.025	1.405.196	2.363.496
Pulang Pisau	78.682	782.962	76.261	26.269	964.174
Seruyan	24.495	824.609	490.806	180.526	1.520.436
Sukamara	40.907	185.787	92.009	7.874	326.577
Grand Total	500.881	5.703.175	6.550.090	2.606.997	15.361.144

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)

Dari data diatas menunjukkan bahwa persentase jasa lingkungan penyedia air kategori kelas sangat rendah mencapai 3%, rendah 27%, sedang 17% dan tinggi mencapai 43%. Kabupaten Murung Raya (1.405.196 Ha) dan Kabupaten Katingan (425.755 Ha) merupakan kabupaten yang memiliki luas areal terbesar dalam untuk jasa lingkungan



penyedia air yang tinggi, terutama pada bagian hulu yang memiliki tutupan hutan yang relative masuk baik. Di Bagian Selatan Kabupaten Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau dan Seruyan di bagian selatan umumnya memiliki jasa lingkungan penyedia air yang rendah. Hal ini disebabkan Sebagian besar wilayah tersebut telah terbuka dan dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa sawit oleh Perusahaan Besar Swasta (PBS).



Gambar 3-26 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air

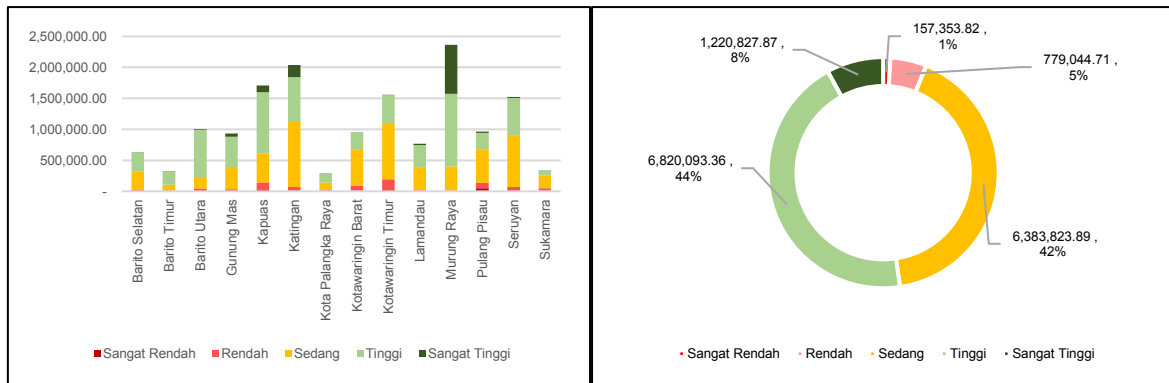
B. Penyedia (*Provisioning*) Pangan

Kebutuhan dasar atau pokok bagi setiap makhluk hidup adalah berupa pangan yang digunakan sebagai nutrisi dalam mempertahankan hidup. Sebagian besar kebutuhan bahan pokok berupa pangan sudah disediakan oleh alam dalam bentuk yang beraneka ragam yang satu kesatuan ekosistem. Bahan pangan tersebut yang dapat dikonsumsi oleh manusia berupa sumber pangan hayati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan sumber pangan hewani yang berasal dari hewan. Oleh sebab itu manusia dituntut secara hukum atau menurut undang-undang yang berlaku untuk dapat bersikap adil dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya tersebut agar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama dengan makhluk hidup lainnya secara berkesinambungan. Tinggi rendahnya suatu ekosistem menyediakan jasa ditentukan oleh tipe atau jenis ekoregion dan penutupan lahan.

Tabel 3-30 Distribusi luasan Jasa Lingkungan Penyedia Air

Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	3.584,12	26.126,15	293.262,87	301.342,93	2.986,01	627.302,08
Barito Timur	653,11	13.119,42	94.832,32	210.743,88	1.912,38	321.261,11
Barito Utara		43.032,14	185.288,86	765.186,74	9.393,72	1.002.901,45
Gunung Mas	661,34	35.429,19	337.819,47	507.728,34	52.645,61	934.283,95
Kapuas	26.651,84	115.715,81	465.831,00	991.458,37	108.220,40	1.707.877,42
Katingan	15.842,46	56.607,96	1.047.840,76	721.435,78	197.468,35	2.039.195,32
Kota Palangka Raya	13.347,42	9.792,51	118.378,84	142.873,82	919,84	285.312,43
Kotawaringin Barat	11.158,73	77.784,41	593.351,48	262.385,57	2.533,43	947.213,63
Kotawaringin Timur	21.262,96	171.101,50	912.399,48	447.920,27	1.642,53	1.554.326,74
Lamandau	485,21	20.558,17	369.098,28	357.305,56	19.339,38	766.786,60
Murung Raya		15.585,66	386.546,57	1.172.998,26	788.365,09	2.363.495,58
Pulang Pisau	50.945,46	87.209,82	539.342,10	265.218,18	21.458,47	964.174,02
Seruyan	4.565,99	66.679,19	837.826,43	597.773,48	13.591,39	1.520.436,49
Sukamara	8.195,18	40.302,77	202.005,43	75.722,17	351,27	326.576,82
Grand Total	157.353,82	779.044,71	6.383.823,89	6.820.093,36	1.220.827,87	15.361.143,65

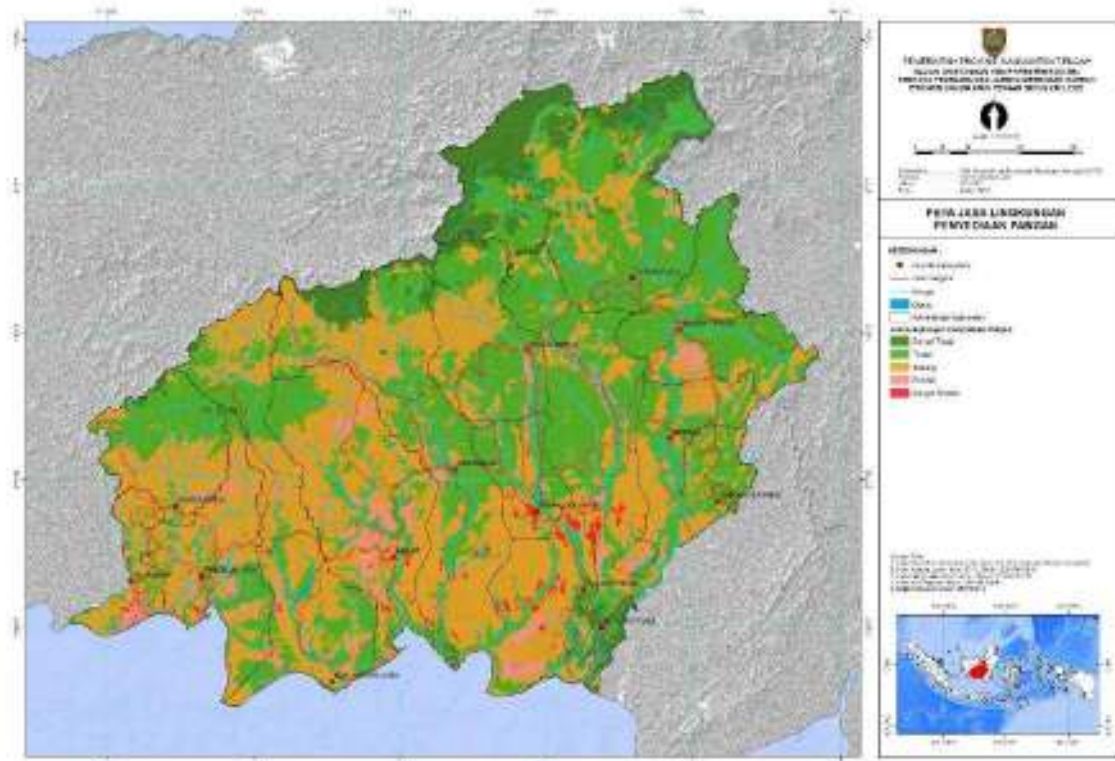
Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-27 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Berdasarkan data diatas menunjukkan wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 8% memiliki jasa penyedia pangan sangat tinggi, 44% tinggi dan 42% masuk kategori sedang, sedangkan sisanya sebesar 5% rendah dan 1 % masuk dalam kategori sangat rendah. Kabupaten Murung Raya dan Katingan merupakan Kabupaten yang luas dalam untuk Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan.

Kabupaten yang memiliki jasa lingkungan dengan kategori sangat rendah terluas adalah Kabupaten Pulang Pisau (50.945,46 Ha), Kabupaten Kapuas (26.651,84 Ha) dan Kabupaten Kotawaringin Timur (21.262,96 Ha). Lokasi jasa lingkungan dengan kategori rendah ini tersebar merata di bagian selatan dan tengah. Peta Jasa Lingkungan Penyedia Pangan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3-28 Peta Jasa Lingkungan Penyedia (*Provisioning*) Pangan



C. Penyedia Serat, Bahan Bakar dan Material Lain

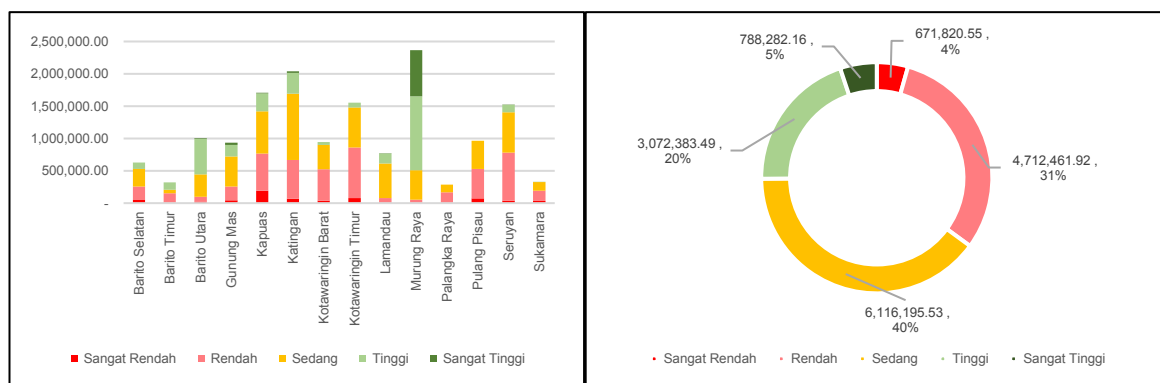
Ekosistem memberikan manfaat bagi manusia dalam menyediakan serat (fiber). Serat yang dimaksud adalah suatu jenis bahan berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh. Ekosistem menyediakan serat alami yang meliputi serat yang diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis. Serat jenis ini bersifat dapat mengalami pelapukan. Serat alami dapat digolongkan ke dalam (1) serat tumbuhan /serat pangan, (2) serat kayu, (3) serat hewan, dan (3) serat mineral seperti logam dan carbon. Dalam kajian ini hanya berfokus pada jenis serat kayu.

Kelas dengan jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi menunjukkan kemampuan wilayah tersebut untuk menyediakan serat untuk penggunaan oleh mahluk hidup, hal ini juga dapat diartikan bahwa area dengan kelas jasa ekosistem penyedia serat tinggi mempunyai daya dukung tinggi untuk memenuhi kebutuhan serat.

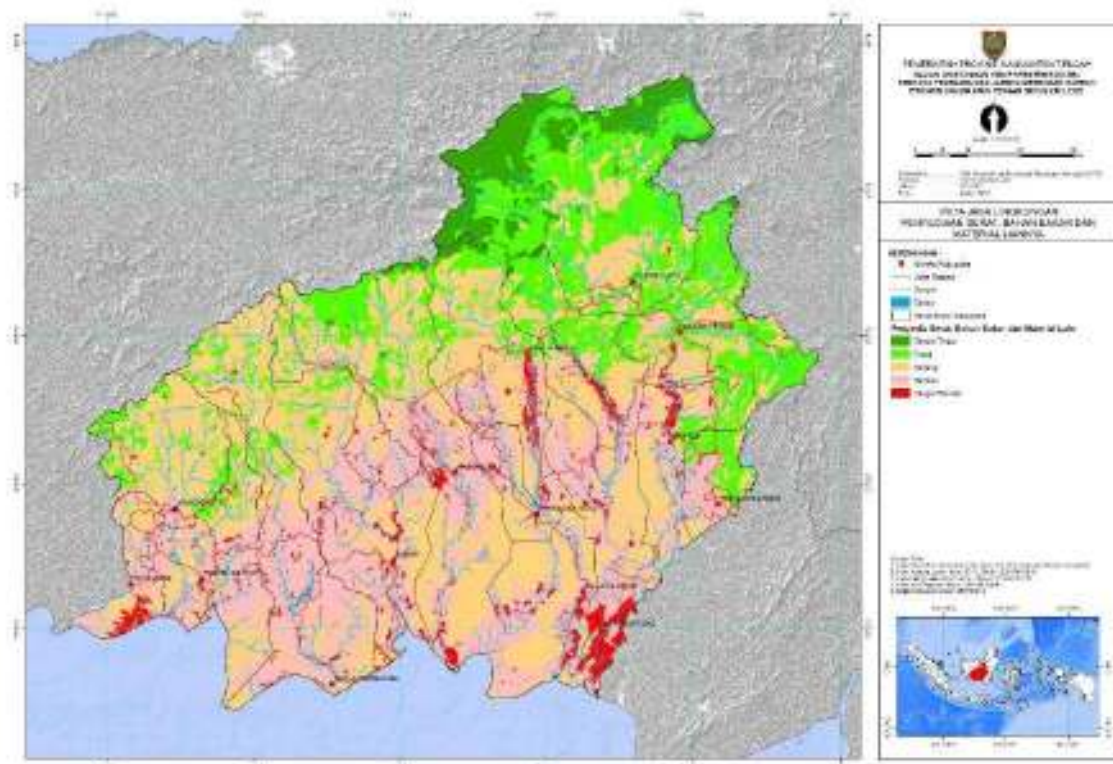
Tabel 3-31 Distribusi luasan Jasa Lingkungan Penyedia Serat, Bahan Bakar dan Material Lain

Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	50.784,37	206.162,44	269.856,47	100.498,79		627.302,08
Barito Timur	10.405,83	140.293,69	56.702,23	113.859,37		321.261,11
Barito Utara	19.081,41	80.524,71	345.844,56	549.700,51	7.750,26	1.002.901,45
Gunung Mas	43.455,49	211.177,89	466.717,18	180.098,84	32.834,55	934.283,95
Kapuas	192.067,47	573.005,60	655.526,77	278.970,68	8.306,91	1.707.877,42
Katingan	69.894,47	597.211,75	1.024.407,01	322.252,07	25.430,02	2.039.195,32
Kotawaringin Barat	36.439,07	487.851,54	375.394,05	47.528,97		947.213,63
Kotawaringin Timur	77.974,55	783.126,31	619.078,27	74.147,62		1.554.326,74
Lamandau	8.490,75	72.022,76	534.327,26	149.450,74	2.495,09	766.786,60
Murung Raya	6.861,80	46.259,74	457.689,38	1.141.582,37	711.102,30	2.363.495,58
Palangka Raya	11.450,88	155.910,47	117.951,07			285.312,43
Pulang Pisau	72.405,65	457.167,57	434.600,80			964.174,02
Seruyan	37.231,30	744.771,40	623.830,71	114.240,05	363,03	1.520.436,49
Sukamara	35.277,51	156.976,04	134.269,79	53,49		326.576,82
Grand Total	671.820,55	4.712.461,92	6.116.195,53	3.072.383,49	788.282,16	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-29 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Serat, Bahan Bakar dan Material Lain



Gambar 3-30 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Serat, Bahan Bakar dan Material Lain

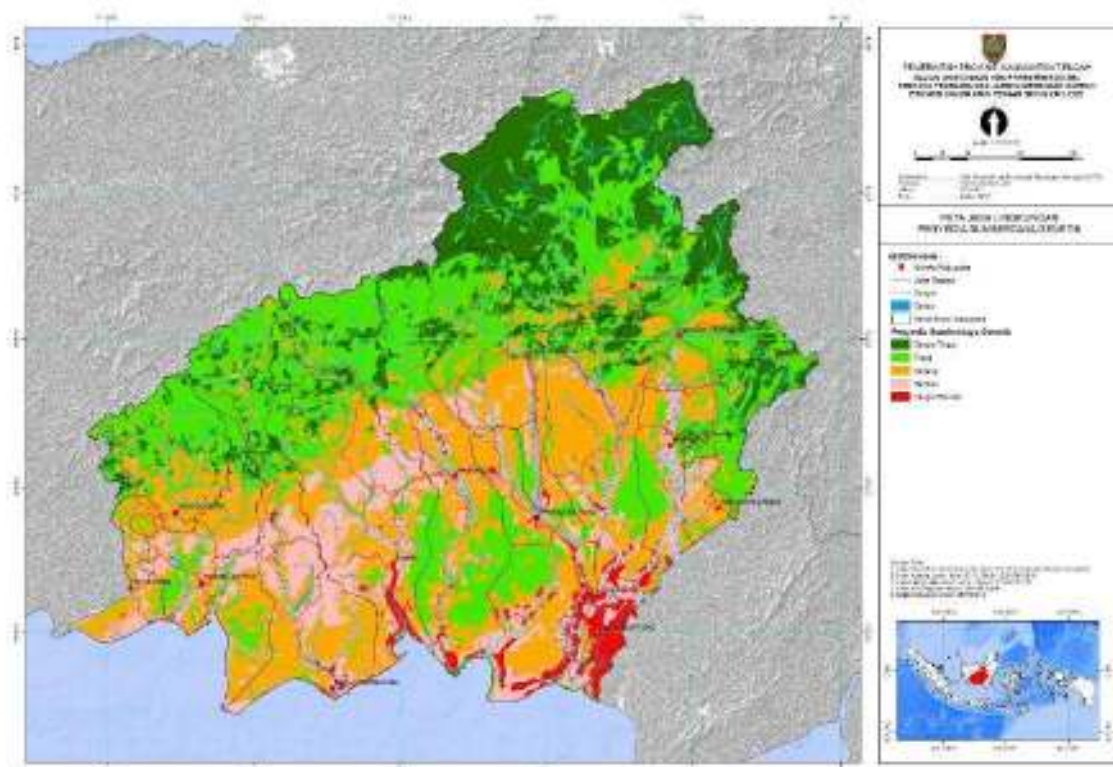
Secara umum jasa lingkungan penyedia serat, bahan bakar dan material lain dengan kelas sangat tinggi di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 788.282,16 Ha (5%) dan kelas tinggi seluas 3.072.383,49 Ha (20%). Kabupaten Murung Raya dan Katingan merupakan kabupaten yang paling luas dalam penyediaan penyedia serat, bahan bakar dan material lain kelas tinggi terutama di wilayah utara kabupaten tersebut.

D. Penyedia Sumberdaya Genetik

Ekosistem menyediakan beragam sumber daya genetik yang melimpah dan bernilai ekonomis dan bermanfaat bagi kesejahteraan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Sumber daya genetik yang terlihat dari keanekaragaman hayati adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk didalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lebih luas yaitu berperan dalam pengaturan kondisi lingkungan seperti kesuburan tanah, hidrologi, suhu, kelembaban dan pengendalian pencemaran udara. Ketersediaan



dan distribusi sumberdaya genetik salah satunya ditentukan oleh tipe ekosistem, yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi.



Gambar 3-31 Peta Jasa Lingkungan Penyedia Sumberdaya Genetik

Tabel 3-32 Distribusi luasan Jasa Lingkungan Penyedia Sumberdaya Genetik

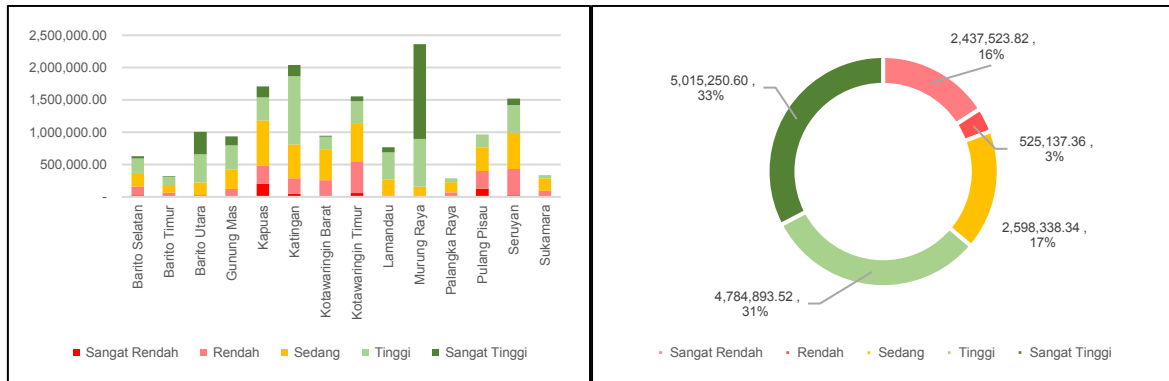
Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	25.390,39	131.583,59	214.467,14	222.552,06	33.308,90	627.302,08
Barito Timur	4.353,12	61.683,78	103.776,76	143.136,33	8.311,12	321.261,11
Barito Utara	4.533,22	25.932,76	191.902,79	434.702,39	345.830,28	1.002.901,45
Gunung Mas	8.010,29	114.188,97	296.595,83	377.718,46	137.770,39	934.283,95
Kapuas	203.305,52	280.964,44	701.417,33	354.723,82	167.466,31	1.707.877,42
Katingan	49.747,74	235.716,13	525.797,00	1.057.716,89	170.217,55	2.039.195,32
Kotawaringin Barat	9.196,44	249.301,21	477.970,65	193.734,75	17.010,59	947.213,63
Kotawaringin Timur	60.525,16	476.953,62	593.467,95	350.199,91	73.180,10	1.554.326,74
Lamandau	104,13	11.643,20	257.526,69	417.581,04	79.931,54	766.786,60
Murung Raya		10.923,99	146.719,98	739.030,00	1.466.821,61	2.363.495,58
Palangka Raya	6.701,25	63.084,22	156.706,66	58.820,30		285.312,43
Pulang Pisau	124.472,05	275.102,77	370.447,04	194.152,17		964.174,02
Seruyan	26.046,59	406.643,51	556.064,23	433.212,95	98.469,21	1.520.436,49
Sukamara	2.751,45	93.801,63	192.033,47	37.969,54	20,73	326.576,82
Grand Total	2.437.523,82	525.137,36	2.598.338,34	4.784.893,52	5.015.250,60	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)

Kelas jasa lingkungan penyedia sumberdaya genetik sangat tinggi mencapai luasan 5.015.250,60 Ha (33%), kelas tinggi seluas 4.784.893,52 Ha (31%). Dari luasan ini menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jasa lingkungan penyedia



sumber genetik yang masih sangat tinggi. Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara merupakan kabupaten dengan luasan terbesar dalam penyediaan sumber daya genetik dengan kelas sangat tinggi dan tinggi



Gambar 3-32 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Sumberdaya Genetik

3.3.2.2. Jasa Lingkungan Fungsi Pengatur (*Regulating*)

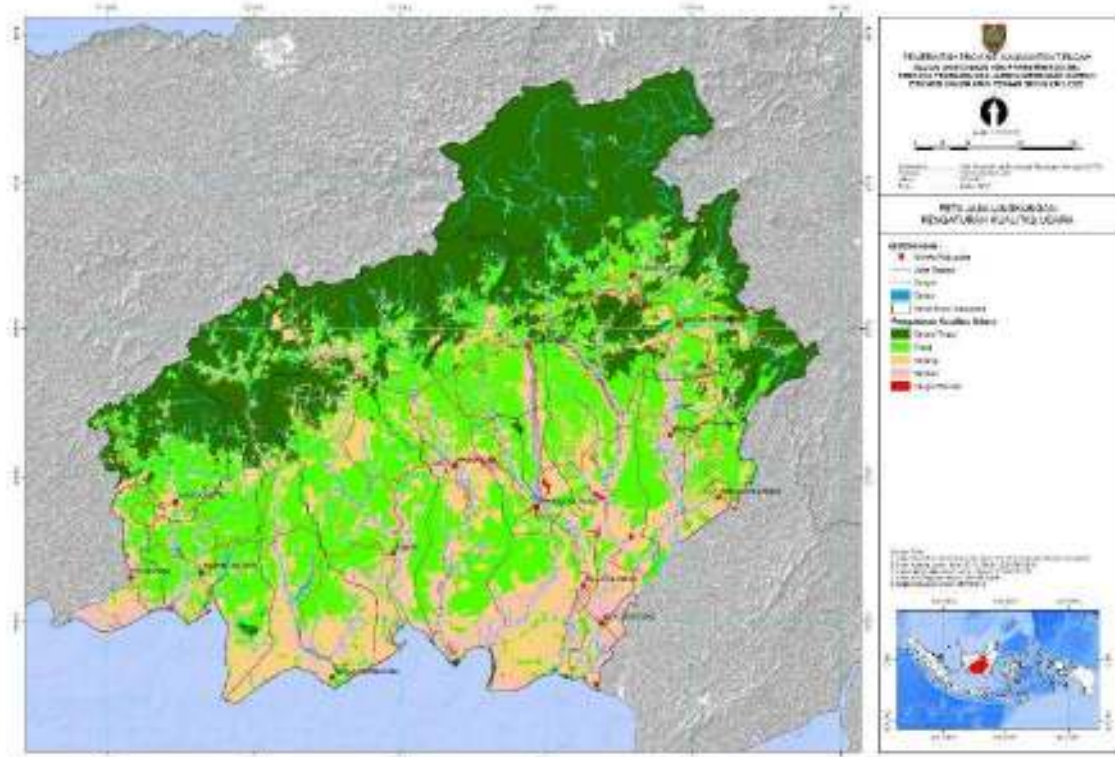
A. Pengaturan Kualitas Udara

Ekosistem memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat berupa pengaturan terhadap kualitas udara yang baik. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Kelas pada jasa ekosistem pengaturan kualitas udara dibagi lima yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah

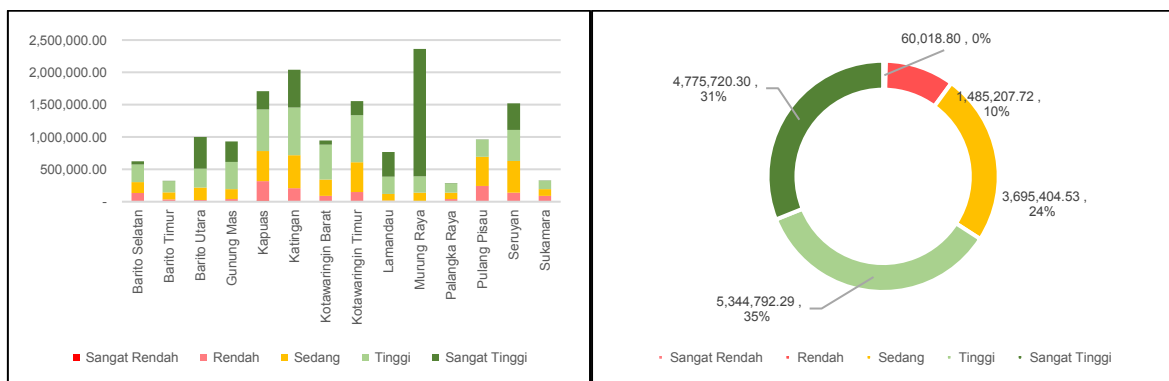
Tabel 3-33 Distribusi luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara

Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	2.938,79	132.238,60	167.448,73	273.255,83	51.420,12	627.302,08
Barito Timur	1.524,26	35.204,92	107.241,18	173.394,73	3.896,02	321.261,11
Barito Utara	514,83	24.209,34	194.140,92	291.904,55	492.131,82	1.002.901,45
Gunung Mas	4.940,37	38.067,95	152.448,20	422.105,51	316.721,91	934.283,95
Kapuas	20.618,11	299.214,82	463.623,10	644.323,34	280.098,06	1.707.877,42
Katingan	11.536,73	195.251,26	511.335,71	741.163,32	579.908,30	2.039.195,32
Kotawaringin Barat	1.634,38	86.399,18	255.441,40	539.871,26	63.867,41	947.213,63
Kotawaringin Timur	2.078,43	147.296,44	462.318,86	727.947,98	214.685,04	1.554.326,74
Lamandau	3,07	14.082,52	105.882,16	265.372,82	381.446,02	766.786,60
Murung Raya		11.855,78	130.303,50	252.234,40	1.969.101,90	2.363.495,58
Palangka Raya	3.200,74	38.380,71	99.468,19	140.972,30	3.290,49	285.312,43
Pulang Pisau	8.545,26	235.553,75	448.722,97	262.832,06	8.519,98	964.174,02
Seruyan	1.683,29	137.860,95	491.677,51	480.314,41	408.900,33	1.520.436,49
Sukamara	800,52	89.591,50	105.352,10	129.099,80	1.732,89	326.576,82
Grand Total	1.485.207,72	60.018,80	4.775.720,30	3.695.404,53	5.344.792,29	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-33 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara



Gambar 3-34 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Kualitas Udara

Secara umum wilayah Kalimantan Tengah memiliki jasa lingkungan pengaturan kualitas udara yang baik, hal ini ditunjukkan dari luasan kelas sangat tinggi untuk jasa ini mencapai 5.344.792,29 Ha (31%) dan kelas tinggi seluas 3.695.404,53 Ha (35%). Jasa lingkungan kelas tinggi-sangat tinggi umumnya didominasi di wilayah utara wilayah Kalimantan dan pada areal dengan vegetasi hutan yang masih baik.

B. Pengaturan Iklim

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur iklim memiliki definisi pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses yang



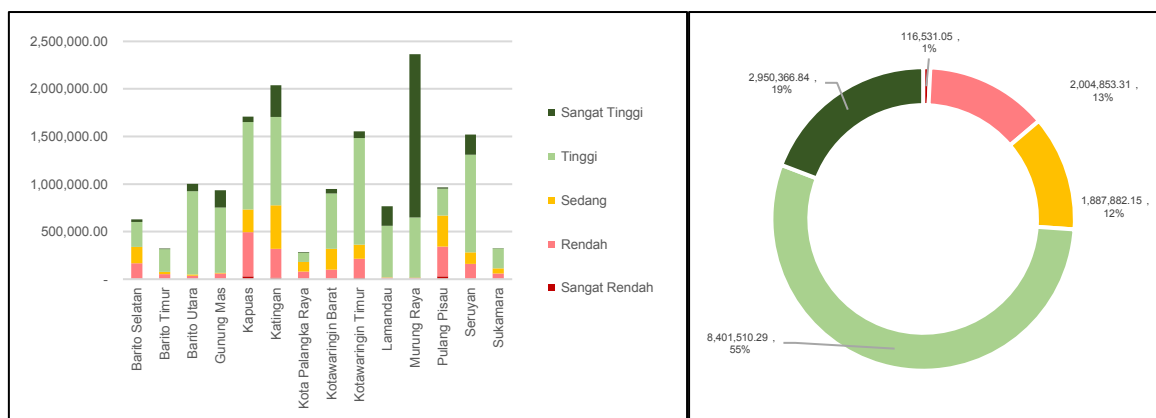
dimediasi secara biologis. Indikator keadaannya adalah tutupan lahan yang bervegetasi, sedangkan indikator kinerjanya adalah luas tutupan lahan yang bervegetasi.

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

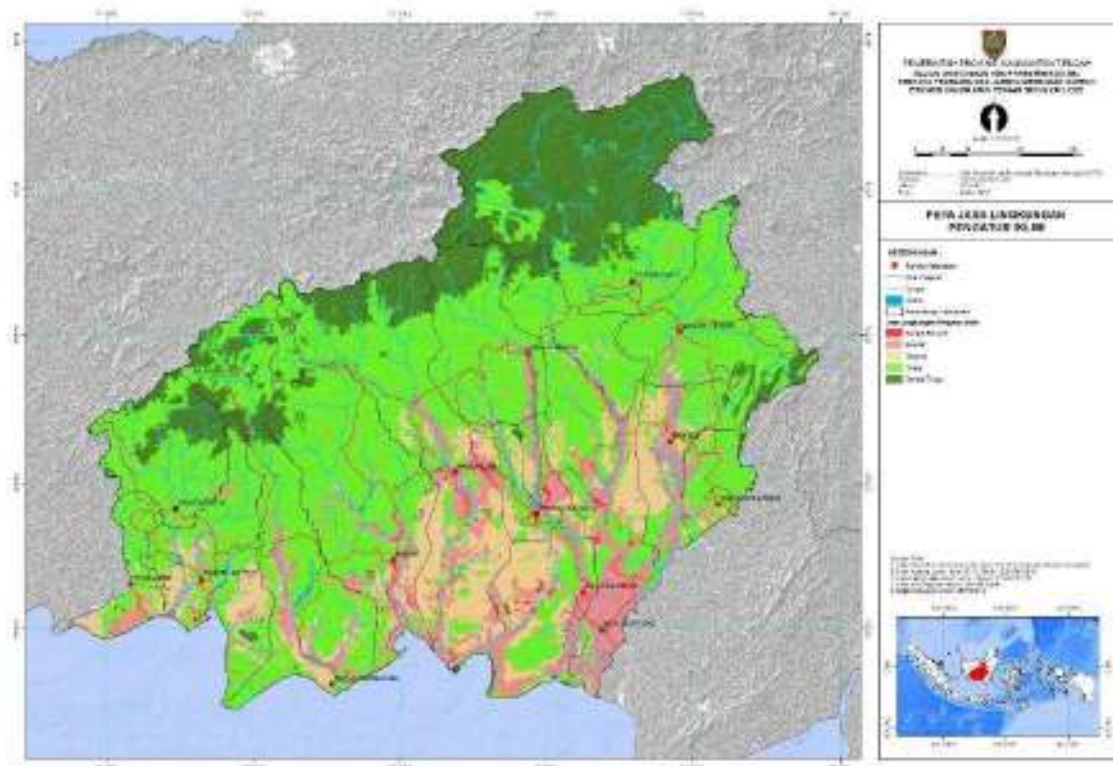
Tabel 3-34 Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pengaturan (*Regulating*) Iklim

Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	5.114,43	162.467,09	171.907,57	262.796,03	25.016,96	627.302,08
Barito Timur	2.871,42	50.510,78	24.423,08	238.248,42	5.207,42	321.261,11
Barito Utara	694,80	34.418,03	14.657,56	874.980,44	78.150,62	1.002.901,45
Gunung Mas	5.771,26	52.890,51	9.527,98	685.674,77	180.419,44	934.283,95
Kapuas	29.396,17	465.342,68	239.056,66	916.299,77	57.782,14	1.707.877,42
Katingan	16.485,09	301.161,61	459.357,08	927.928,87	334.262,67	2.039.195,32
Kotawaringin Barat	4.223,53	75.925,02	99.655,24	100.204,64	5.303,99	285.312,43
Kotawaringin Timur	4.642,15	95.884,41	217.357,44	582.259,39	47.070,25	947.213,63
Lamandau	12.865,53	202.055,09	148.660,51	1.119.064,31	71.681,30	1.554.326,74
Murung Raya	3,07	17.962,38	950,21	542.217,20	205.653,74	766.786,60
Palangka Raya		15.585,66	25,10	634.981,69	1.712.903,13	2.363.495,58
Pulang Pisau	28.565,21	315.397,42	326.492,93	281.874,19	11.844,27	964.174,02
Seruyan	3.953,33	156.478,37	122.673,60	1.026.159,68	211.171,51	1.520.436,49
Sukamara	1.945,05	58.774,26	53.137,20	208.820,89	3.899,41	326.576,82
Grand Total	116.531,05	2.004.853,31	1.887.882,15	8.401.510,29	2.950.366,84	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-35 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim



Gambar 3-36 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan (*Regulating*) Iklim

Dari gambar dan tabel di atas, Jasa lingkungan pengaturan iklim menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih masuk dalam kategori sangat tinggi 19% (2.950.366,84 ha) dan 55% (8.401.510,29 Ha) kategori Tinggi serta sedang 12 % (1.887.882,15 ha). Untuk kategori rendah hingga sangat rendah sebesar 13% (2.004.853,31 ha) dan dan sangat rendah 1% (116.531,05 ha). Sebaran jasa ekosistem pengaturan iklim kategori sangat tinggi-tinggi terutama berada di bagian utara wilayah Kalimantan Tengah dengan kondisi tutupan hutan yang relatif masih bagus sedangkan kategori rendah-sangat rendah umumnya didominasi pada areal dengan kondisi tutupan lahan tanah terbuka, pemukiman dan perkebunan.

C. Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir

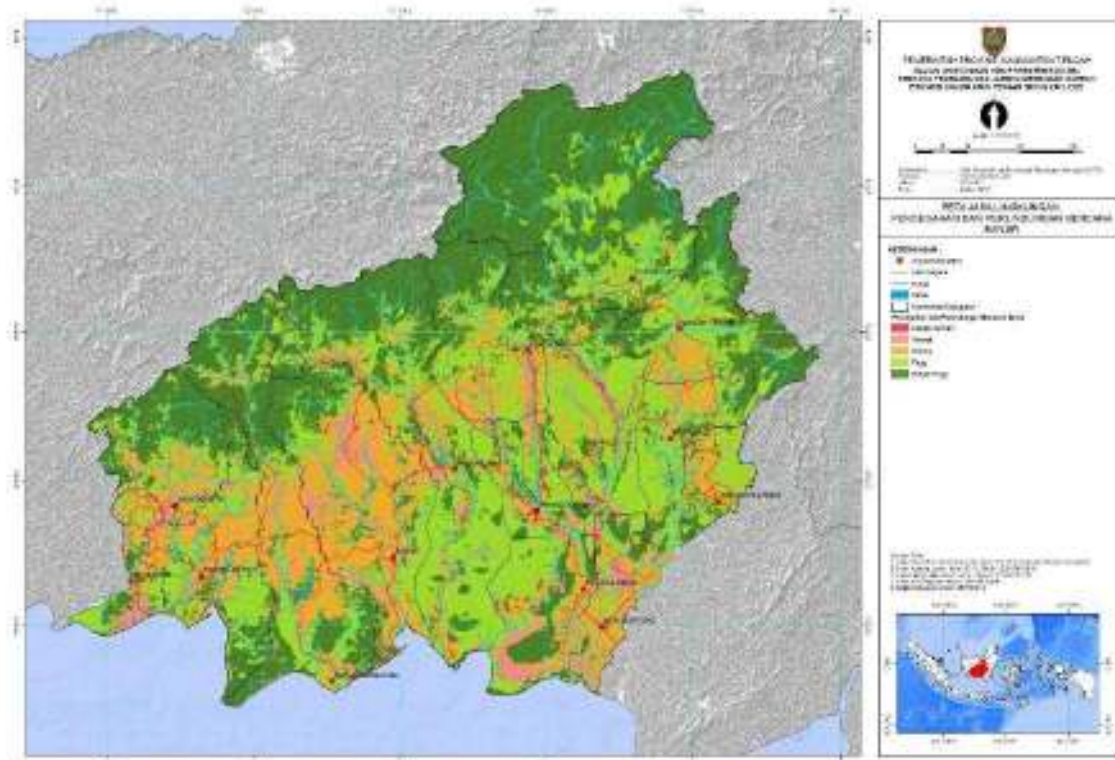
Kinerja jasa ekosistem sebagai pengatur mitigasi bencana banjir memiliki definisi bahwa struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari banjir. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan banjir.



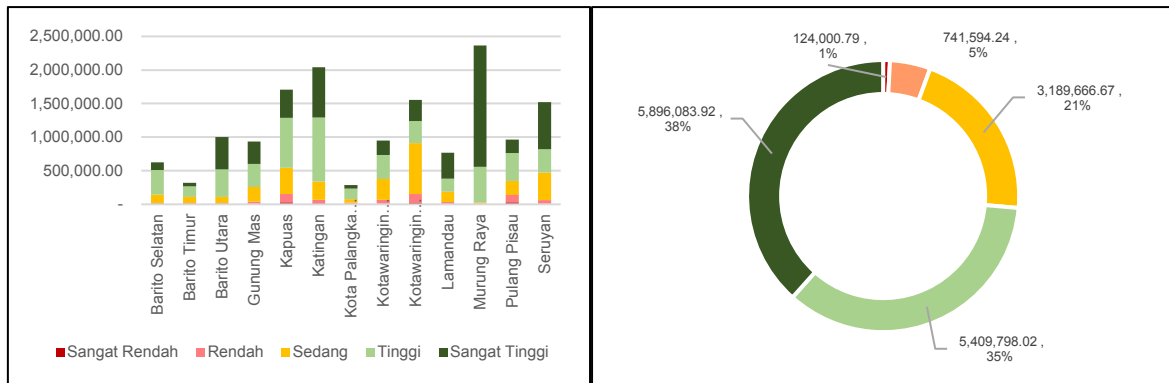
Tabel 3-35 Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir

Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	4.790,06	13.601,02	126.013,79	363.963,22	118.933,99	627.302,08
Barito Timur	2.919,14	16.551,95	90.035,58	160.368,97	51.385,48	321.261,11
Barito Utara	694,80	17.074,02	93.670,87	408.753,16	482.708,60	1.002.901,45
Gunung Mas	6.432,60	30.921,50	218.742,91	347.362,84	330.824,11	934.283,95
Kapuas	28.625,19	122.570,01	392.177,84	742.094,78	422.409,60	1.707.877,42
Katingan	16.356,95	51.333,25	272.887,61	951.970,44	746.647,07	2.039.195,32
Kota Palangka Raya	3.792,56	18.852,30	53.185,41	157.481,92	52.000,24	285.312,43
Kotawaringin Barat	5.669,51	60.018,35	311.584,89	356.036,34	213.904,55	947.213,63
Kotawaringin Timur	17.525,45	137.994,57	756.081,14	327.670,02	315.055,56	1.554.326,74
Lamandau	3.197,17	33.083,68	151.727,03	194.377,11	384.401,61	766.786,60
Murung Raya	62,91	15.522,74	14.165,11	527.205,52	1.806.539,30	2.363.495,58
Pulang Pisau	27.809,86	110.911,57	208.610,40	416.165,02	200.677,17	964.174,02
Seruyan	4.148,44	60.044,41	409.885,79	346.608,73	699.749,12	1.520.436,49
Sukamara	1.976,14	53.114,88	90.898,30	109.739,97	70.847,53	326.576,82
Grand Total	124.000,79	741.594,24	3.189.666,67	5.409.798,02	5.896.083,92	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-37 Peta Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir



Gambar 3-38 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Banjir

Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 memiliki jasa lingkungan untuk pencegahan dan perlindungan bencana dengan kategori sangat tinggi mencapai luasan 38% (5.896.083,92 Ha) dan kategori baik seluas 35% (5.409.798,02 Ha), dan sedang seluas 21% (3.189.666,67 Ha). Areal dengan jasa lingkungan ini umumnya tersebar dan didominasi dengan tutupan lahan berhutan. Seluas 5% (741.594,24 Ha) dan 1% (124.000,79 Ha) wilayah di Kalimantan Tengah memiliki jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori rendah dan sangat rendah. Daerah dengan jasa lingkungan rendah dan sangat rendah umumnya didominasi pada areal dengan tutupan lahan permukiman, tanah terbuka dan semak belukar. Lokasi yang terkena bencana banjir umumnya berada di pemukiman penduduk yang berada di pinggir sungai.



Gambar 3-39 Bencana Banjir di Kalteng

sumber foto <https://kumparan.com>



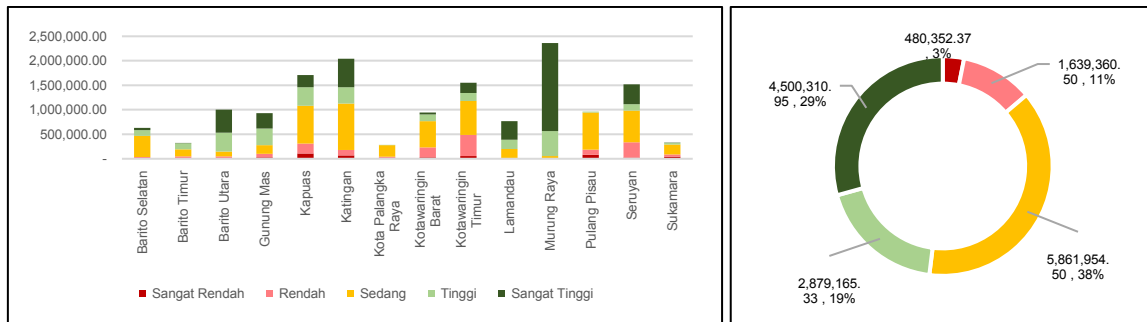
D. Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur mitigasi bencana tanah longsor didefinisikan sebagai struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari tanah longsor. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap tanah longsor.

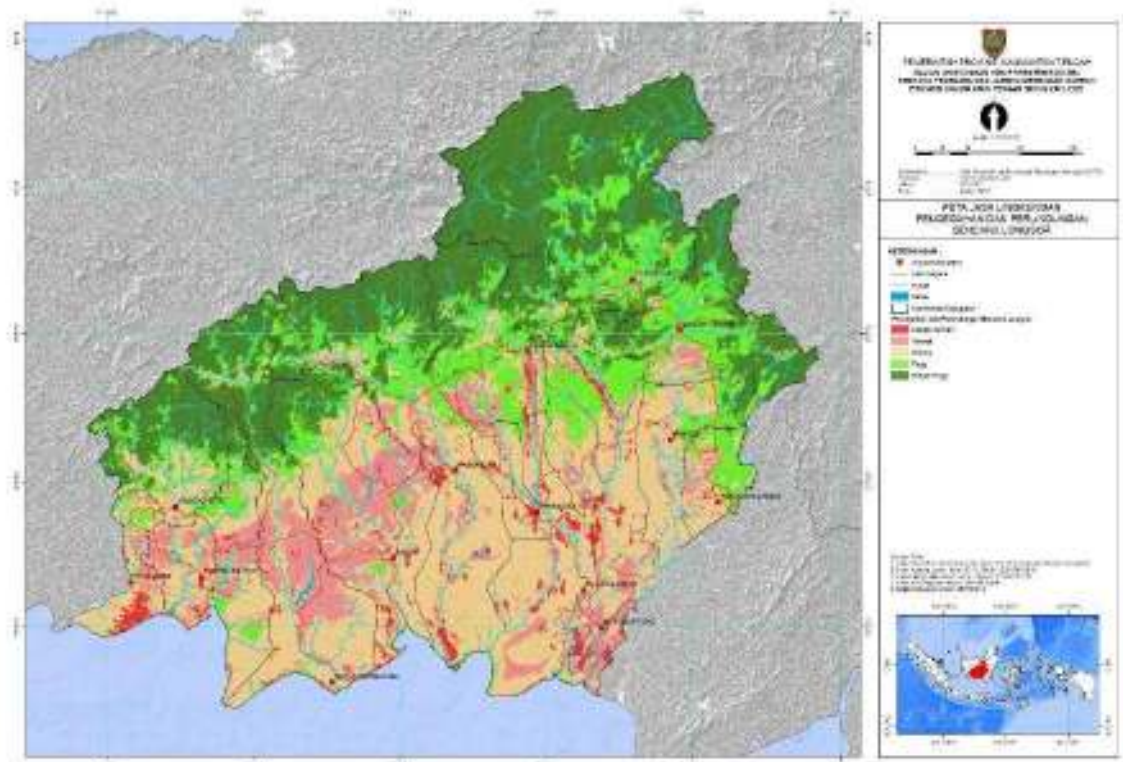
Tabel 3-36 Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor

Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	16.543,02	22.527,21	429.713,23	116.409,50	42.109,11	16.543,02
Barito Timur	6.773,00	41.643,91	141.659,17	127.607,42	3.577,62	6.773,00
Barito Utara	1.710,43	46.828,88	96.895,03	385.249,14	472.217,97	1.710,43
Gunung Mas	28.129,29	70.178,63	177.530,53	343.142,85	315.302,63	28.129,29
Kapuas	109.933,22	198.329,22	776.035,10	378.408,39	245.171,50	109.933,22
Katingan	66.575,41	109.862,04	948.764,47	338.024,87	575.968,52	66.575,41
Kota Palangka Raya	22.362,64	17.207,46	237.522,70	8.219,63		22.362,64
Kotawaringin Barat	28.993,39	202.096,85	534.655,71	136.309,31	45.158,37	28.993,39
Kotawaringin Timur	57.572,35	429.259,49	692.162,04	161.645,64	213.687,23	57.572,35
Lamandau	269,05	18.490,66	178.787,34	191.131,03	378.108,51	269,05
Murung Raya		18.613,73	36.619,07	507.809,92	1.800.452,87	
Pulang Pisau	80.648,59	106.310,05	757.580,82	19.634,56		80.648,59
Seruyan	20.822,02	313.121,10	647.768,58	131.703,73	407.021,06	20.822,02
Sukamara	40.019,96	44.891,27	206.260,71	33.869,34	1.535,55	40.019,96
Grand Total	16.543,02	22.527,21	429.713,23	116.409,50	42.109,11	16.543,02

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-40 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor



Gambar 3-41 Peta Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Longsor

Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana longsor di Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 secara umum masih dalam rentang sedang (38%)-baik (19%) hingga sangat baik (29%), kecuali di beberapa wilayah masuk kategori rendah (11%) hingga sangat rendah (3%). Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan bencana longsor kategori sangat rendah dan rendah umumnya didominasi pada areal dengan tutupan lahan lahan tanah terbuka, semak belukar, pemukiman dan perkebunan serta pertambangan.



Gambar 3-42 Bencana Longsor di Kalteng (Dijalan dan Lokasi Penambangan Masyarakat)

(sumber foto : <https://www.gerakkalteng.com> dan <https://www.medcom.id>)



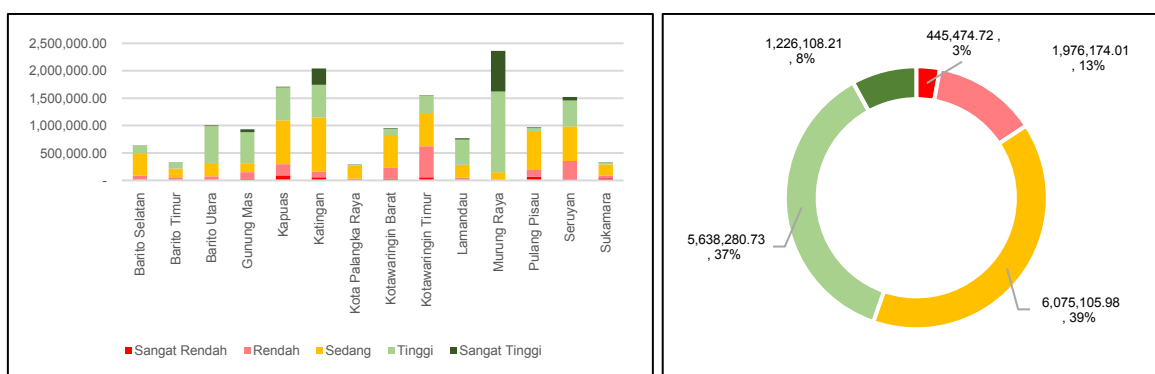
E. Pencegahan dan Perlindungan Bencana: Kebakaran Hutan dan Lahan

Kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengatur mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai struktur alam yang berfungsi untuk pencegahan dan perlindungan dari kebakaran hutan dan lahan. Indikator keadaannya berupa karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan, sedangkan indikator kinerjanya adalah luasan karakteristik bentang alam, vegetasi dan penutupan lahan yang berfungsi sebagai pencegahan dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 3-37 Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

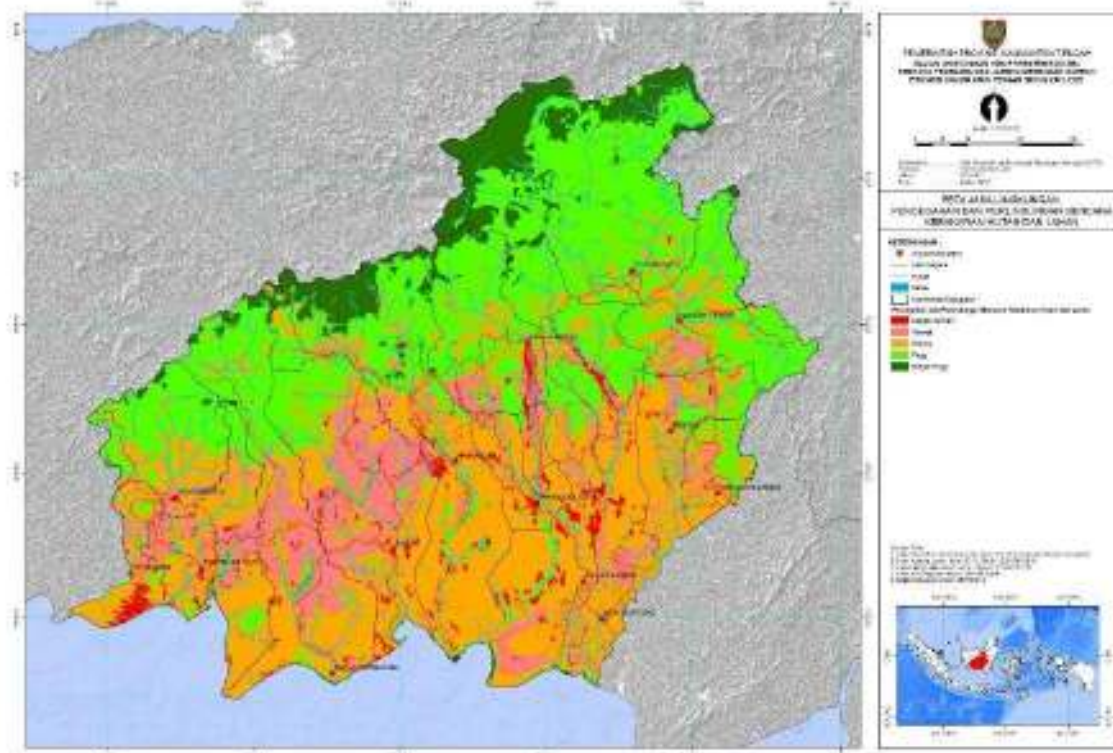
Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	13.811,26	68.976,06	409.650,08	134.855,99	8,68	627.302,08
Barito Timur	6.263,33	53.026,85	157.585,31	104.067,23	318,40	321.261,11
Barito Utara	3.970,77	68.844,84	246.968,93	671.043,54	12.073,37	1.002.901,45
Gunung Mas	30.839,86	118.781,79	164.245,38	566.222,27	54.194,64	934.283,95
Kapuas	89.182,29	207.804,19	795.950,82	601.205,92	13.734,21	1.707.877,42
Katingan	54.967,99	108.002,41	985.108,95	592.680,43	298.435,54	2.039.195,32
Kota Palangka Raya	21.500,25	13.084,60	230.422,53	20.302,19	2,85	285.312,43
Kotawaringin Barat	32.268,45	207.468,99	570.270,38	126.262,74	10.943,07	947.213,63
Kotawaringin Timur	58.056,83	564.488,65	607.348,77	323.111,74	1.320,74	1.554.326,74
Lamandau	3.463,15	44.878,72	233.250,66	461.240,63	23.953,43	766.786,60
Murung Raya	1.951,90	17.481,55	128.610,60	1.474.983,56	740.467,97	2.363.495,58
Pulang Pisau	67.670,35	124.919,27	710.443,34	53.667,30	7.473,77	964.174,02
Seruyan	21.559,28	330.420,32	634.854,03	470.882,93	62.719,94	1.520.436,49
Sukamara	39.968,99	47.995,76	200.396,19	37.754,27	461,61	326.576,82
Grand Total	445.474,72	1.976.174,01	6.075.105,98	5.638.280,73	1.226.108,21	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-43 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah masuk kategori tinggi hingga sangat tinggi umumnya berada di sebelah utara dengan kondisi tutupan hutan yang relatif masih baik. Luas areal dengan jasa lingkungan tinggi mencapai 37% (5.638.280,73 Ha) dan sangat tinggi mencapai 8% (1.226.108,21 Ha). Untuk kategori sedang umumnya berada di bagian tengah ke selatan wilayah Kalimantan Tengah.



Gambar 3-44 Peta Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

Jasa lingkungan untuk pencegahan dan perlindungan bencana kebakaran hutan dan lahan yang masuk kategori rendah dan sangat rendah umumnya adalah diareal dengan tutupan lahan perkebunan, dan semak belukar. Luas areal jasa lingkungan kategori rendah di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai 13% (1.976.174,01 Ha) dan sangat rendah mencapai 8% (445.474,72 Ha).

F. Pengaturan Air

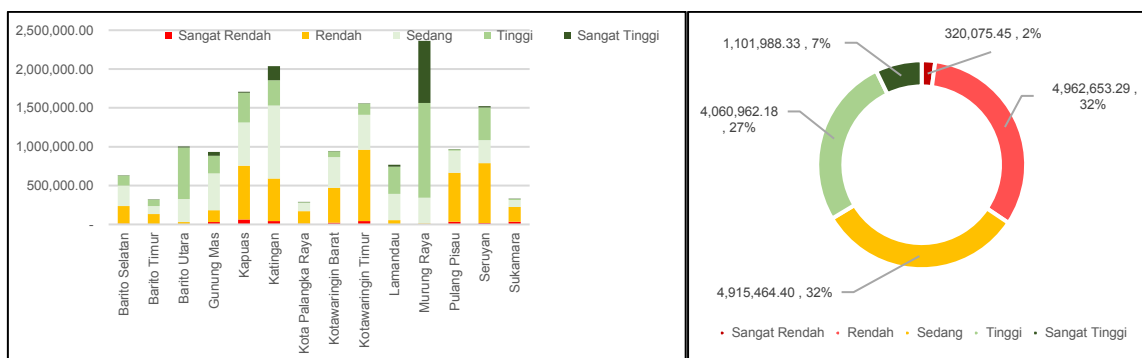
Jasa lingkungan pengatur air memiliki definisi peran bentang alam dan penutupan lahan dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala, dengan indikator keadaannya adalah kapasitas infiltrasi dan retensi air serta pengaruhnya terhadap wilayah hidrologis. Hutan berperan sebagai pengatur tata air, dimana sebagian curah hujan yang jatuh di atasnya akan disimpan sebagai air tanah dan akan dikeluarkan saat musim kemarau. Areal dengan tutupan hutan yang baik akan mampu menyimpan air lebih banyak dibandingkan dengan areal yang tidak memiliki tutupan hutan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peningkatan luas area yang memiliki jasa ekosistem pengatur tata air sedang dan rendah bisa terjadi akibat adanya penurunan luas hutan di Provinsi Kalimantan Tengah.



Tabel 3-38 Distribusi luasan Jasa Lingkungan Pengaturan (*Regulating*) Air

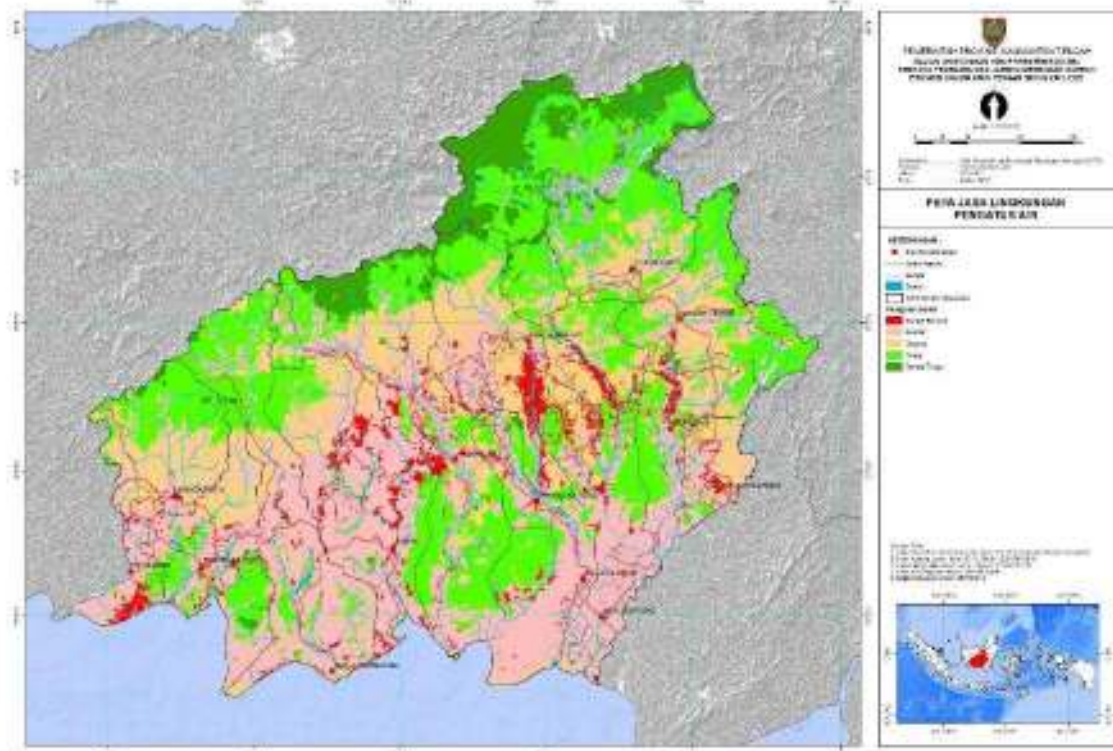
Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	8.256,91	229.147,51	263.704,41	126.055,22	138,02	627.302,08
Barito Timur	6.071,76	126.083,48	104.759,14	83.958,47	388,27	321.261,11
Barito Utara	1.865,63	28.590,79	295.139,79	664.991,80	12.313,46	1.002.901,45
Gunung Mas	29.019,59	153.436,07	473.104,65	227.035,60	51.688,05	934.283,95
Kapuas	62.712,94	693.100,90	554.877,08	384.295,44	12.891,06	1.707.877,42
Katingan	44.101,08	545.215,65	939.728,10	326.653,49	183.496,99	2.039.195,32
Kota Palangka Raya	8.733,51	163.895,57	105.193,36	7.429,05	60,93	285.312,43
Kotawaringin Barat	24.214,43	448.141,09	395.918,26	72.538,74	6.401,12	947.213,63
Kotawaringin Timur	44.940,02	917.365,37	446.799,62	144.514,44	707,28	1.554.326,74
Lamandau	2.651,82	52.268,19	337.578,23	351.712,52	22.575,84	766.786,60
Murung Raya		15.748,15	326.901,13	1.222.431,59	798.414,71	2.363.495,58
Pulang Pisau	34.262,83	630.795,29	283.759,04	15.259,01	97,85	964.174,02
Seruyan	18.650,39	769.700,20	297.349,98	422.118,52	12.617,40	1.520.436,49
Sukamara	34.594,55	189.165,03	90.651,61	11.968,30	197,34	326.576,82
Grand Total	320.075,45	4.962.653,29	4.915.464,40	4.060.962,18	1.101.988,33	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-45 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pengaturan Air

Secara umum jasa lingkungan pengaturan air di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 seluas 7% (1.101.988,33 ha) masih kategori sangat tinggi, dan 27% (4.060.962,18 ha) masuk dalam kategori baik. Areal yang masih memiliki jasa pengaturan air sebagian besar berada di bagian utara, Kabupaten Murung Raya, Katingan, dan Gunung Mas.



Gambar 3-46 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan (*Regulating*) Air

G. Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

Jasa ekosistem pengolahan dan penguraian limbah meliputi kapasitas lokasi dalam menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah. Dalam kapasitas yang terbatas, ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralsir zat organik yang ada dalam air limbah. Alam menyediakan berbagai macam mikroba (aerob) yang mampu menguraikan zat organik yang terdapat dalam limbah dan sampah menjadi zat anorganik yang stabil dan tidak memberikan dampak pencemaran bagi lingkungan. Mikroba aerob yang disediakan ekosistem dan berperan dalam proses menetralsir, mengurai dan menyerap limbah dan sampah diantaranya bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Provinsi Kalimantan Tengah memiliki jasa lingkungan pemurnian air dan pengolahan limbah kelas sangat tinggi mencapai luasan 4.373.331,58 Ha (29%) dan kelas tinggi seluas 3.283.990,80 Ha (21%). Kabupaten Murung Raya, Katingan, Lamandau, Barito Utara merupakan kabupaten yang memiliki luasan besar dalam penyediaan jasa lingkungan ini, terutama dibagian utara

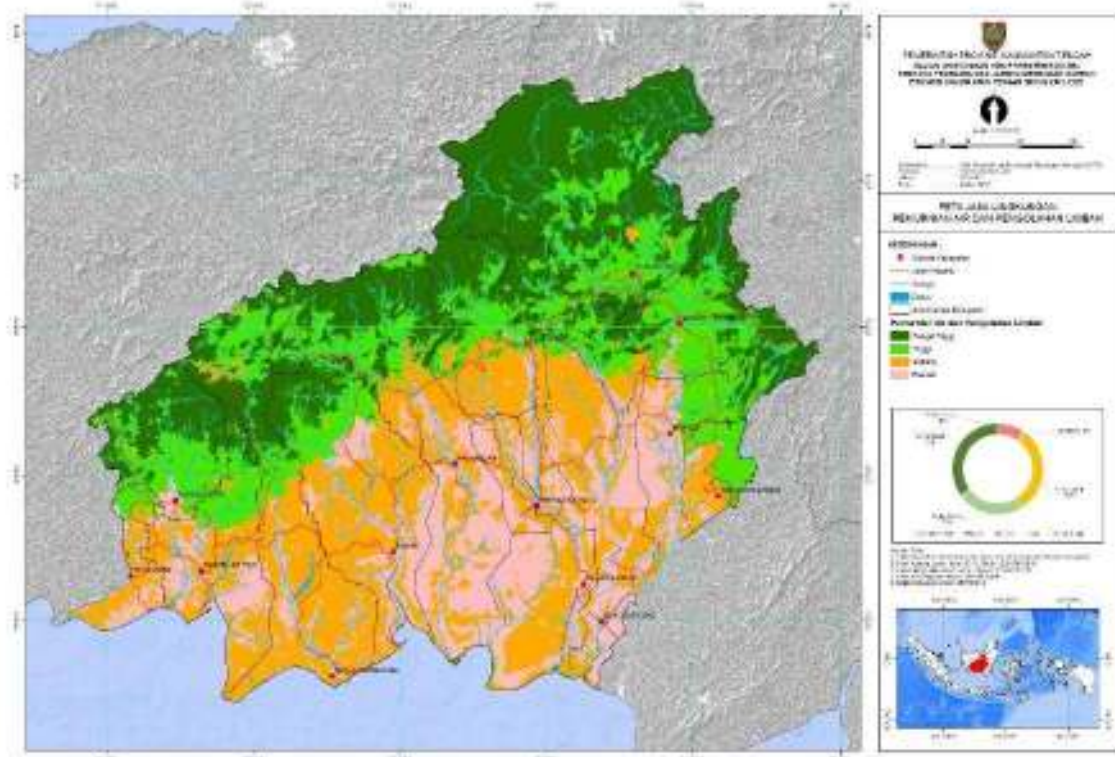
Tabel 3-39 Distribusi luasan Jasa Lingkungan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

Kabupaten	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	288.517,17	124.826,20	179.195,12	34.763,58	627.302,08
Barito Timur	42.832,66	124.885,27	149.577,29	3.965,89	321.261,11
Barito Utara	20.286,04	34.403,54	485.314,36	462.897,51	1.002.901,45
Gunung Mas	55.593,57	331.045,34	232.124,19	315.520,84	934.283,95
Kapuas	604.972,05	605.610,89	248.888,90	248.405,58	1.707.877,42

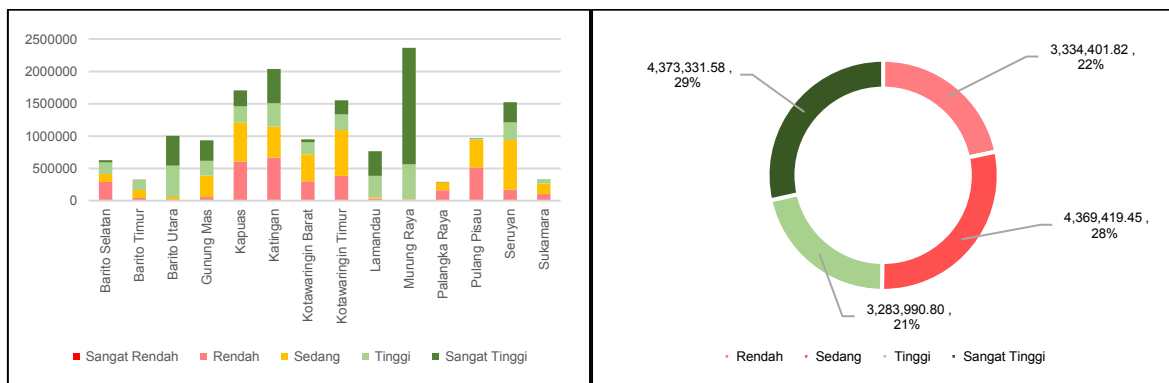


Katingan	664.187,78	483.062,78	359.008,14	532.936,62	2.039.195,32
Kotawaringin Barat	298.760,68	419.150,96	184.326,83	44.975,16	947.213,63
Kotawaringin Timur	382.787,47	711.520,95	238.650,40	221.367,91	1.554.326,74
Lamandau	33.975,58	19.694,72	332.152,90	380.963,39	766.786,60
Murung Raya		23.771,81	537.365,77	1.802.358,00	2.363.495,58
Palangka Raya	159.621,79	123.980,27	458,56	1.251,82	285.312,43
Pulang Pisau	512.307,19	433.538,44	8.111,01	10.217,38	964.174,02
Seruyan	169.268,35	769.748,32	269.613,71	311.806,10	1.520.436,49
Sukamara	101.291,47	164.179,96	59.203,62	1.901,77	326.576,82
Grand Total	3.334.401,82	4.369.419,45	3.283.990,80	4.373.331,58	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-47 Peta Jasa Lingkungan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

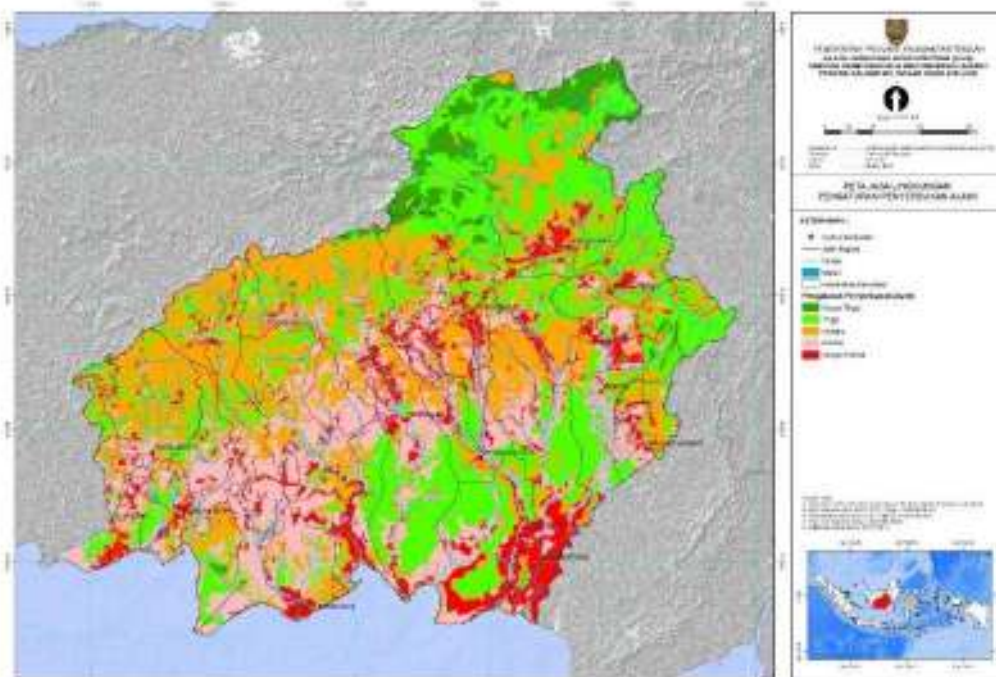


Gambar 3-48 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah



H. Pengaturan Penyerbukan Alami

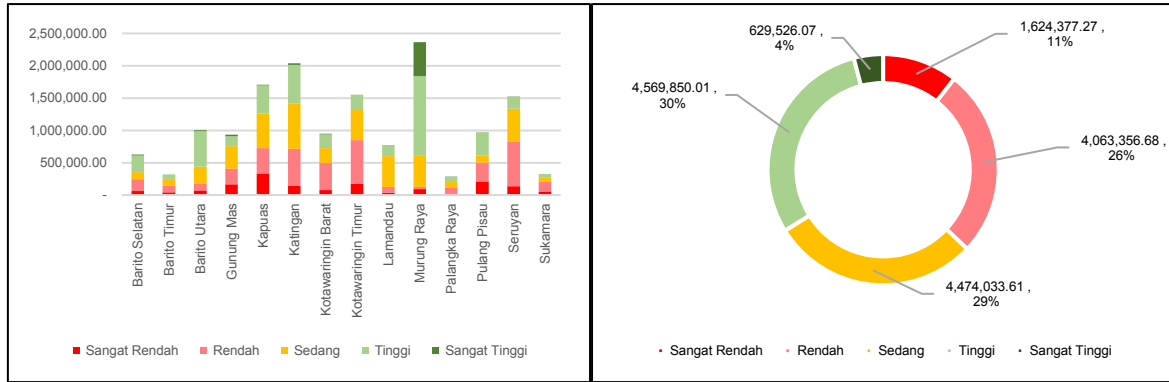
Penyerbukan alami (*pollination*) adalah proses penyerbukan (berpindahnya serbuk sari dari kepala sari ke kepala putik) yang secara khusus terjadi pada bunga yang sama atau antar bunga yang berbeda tetapi dalam satu tanaman atau di antara bunga pada klon tanaman yang sama. Ekosistem menyediakan jasa pengaturan penyerbukan alami khususnya lewat tersedianya habitat spesies yang dapat pembantu proses penyerbukan alami. Habitat alami seperti hutan dan areal bervegetasi umumnya menyediakan media spesies pengatur penyerbukan yang lebih melimpah.



Gambar 3-49 Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami
Tabel 3-40 Distribusi luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Penyerbukan Alami

Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	63.715,50	181.482,98	108.355,87	259.059,88	14.687,85	627.302,08
Barito Timur	43.038,16	104.417,24	105.165,03	68.640,68		321.261,11
Barito Utara	70.937,15	111.938,25	257.565,60	546.797,89	15.662,57	1.002.901,45
Gunung Mas	164.477,52	244.651,89	344.166,95	157.193,29	23.794,31	934.283,95
Kapuas	332.588,50	391.220,94	534.973,32	436.106,94	12.987,72	1.707.877,42
Katingan	145.464,89	572.294,75	703.107,54	594.510,95	23.817,18	2.039.195,32
Kotawaringin Barat	77.999,72	419.671,25	228.385,79	210.910,78	10.246,09	947.213,63
Kotawaringin Timur	176.718,48	670.479,40	469.611,01	237.517,86		1.554.326,74
Lamandau	37.801,54	89.445,71	475.974,73	161.845,92	1.718,69	766.786,60
Murung Raya	91.971,19	36.331,34	488.607,87	1.224.961,47	521.623,71	2.363.495,58
Palangka Raya	24.472,28	91.999,89	82.077,06	83.545,10	3.218,10	285.312,43
Pulang Pisau	210.798,68	293.924,19	107.293,23	350.751,10	1.406,83	964.174,02
Seruyan	137.361,74	691.782,62	505.965,65	184.963,45	363,03	1.520.436,49
Sukamara	47.031,94	163.716,22	62.783,95	53.044,70		326.576,82
Grand Total	1.624.377,27	4.063.356,68	4.474.033,61	4.569.850,01	629.526,07	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-50 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Penyerbukan Alami

Jasa lingkungan penyerbukan alami kelas sangat tinggi di Kalimantan Tengah hanya mencapai luasan 629.526,07 Ha (4%), sedangkan kelas tinggi mencapai 4.569.850,01 Ha (30%). Kabupaten Barito Utara merupakan kabupaten yang memiliki jasa lingkungan penyerbukan alami dengan kelas sangat tinggi yang luas, hingga mencapai 521.623,71 Ha.

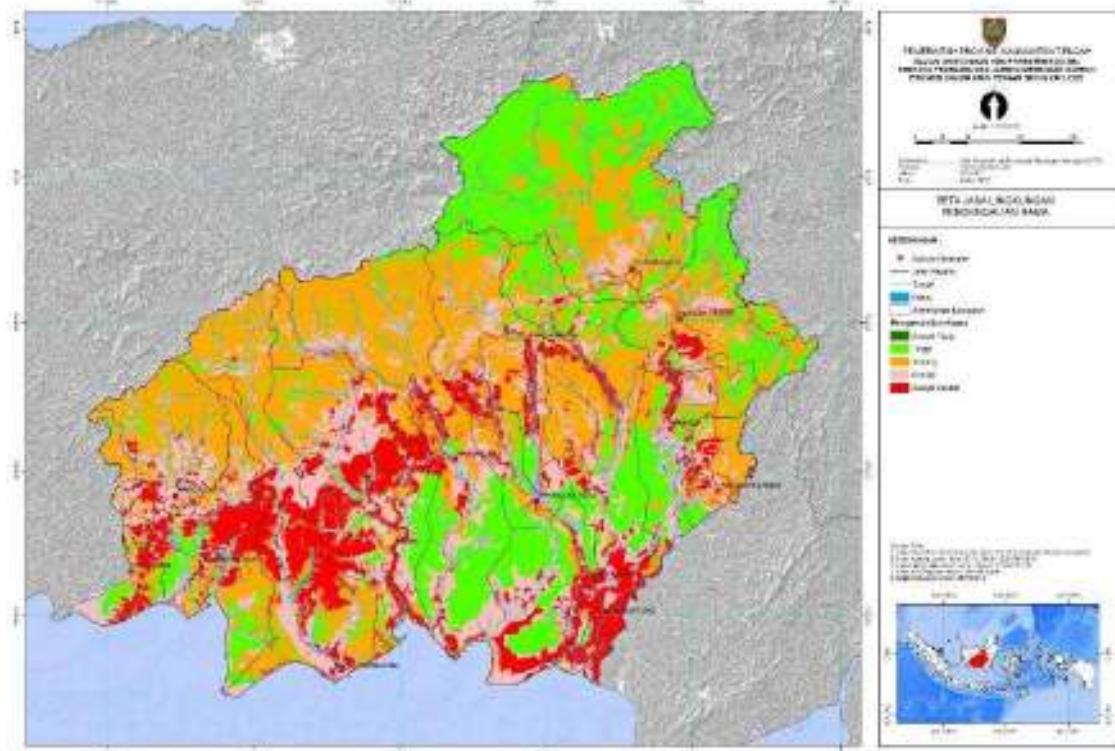
I. Pengendalian Hama

Pengendalian hama adalah pengaturan makhluk-makhluk atau organisme pengganggu yang disebut hama karena dianggap mengganggu kesehatan manusia, ekologi, atau ekonomi. Hama dan penyakit merupakan ancaman biotik yang dapat mengurangi hasil dan bahkan dapat menyebabkan gagal panen. Ekosistem secara alami menyediakan sistem pengendalian hama dan penyakit melalui keberadaan habitat spesies trigger dan pengendali hama dan penyakit.

Tabel 3-41 Distribusi luasan Jasa Lingkungan Pengaturan Pengendalian Hama

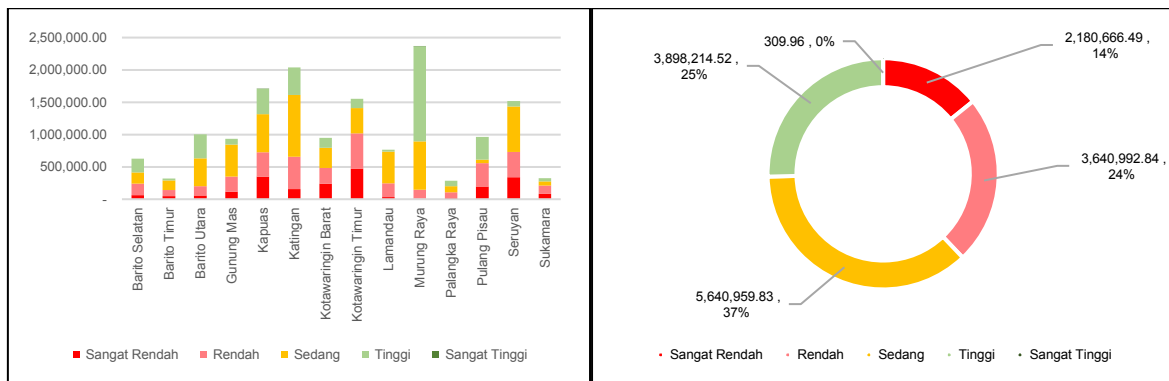
Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	63.927,03	177.092,55	171.567,64	214.714,86		627.302,08
Barito Timur	48.694,57	95.256,05	144.377,25	32.933,25		321.261,11
Barito Utara	55.836,05	145.253,47	430.779,95	371.031,99		1.002.901,45
Gunung Mas	116.714,87	234.170,42	491.696,29	91.702,36		934.283,95
Kapuas	350.471,18	377.350,05	586.663,38	393.329,35	63,46	1.707.877,42
Katingan	157.192,24	499.098,57	955.921,19	426.983,32		2.039.195,32
Kotawaringin Barat	241.676,54	244.226,29	308.753,93	152.556,87		947.213,63
Kotawaringin Timur	472.573,54	547.264,74	387.888,33	146.600,13		1.554.326,74
Lamandau	31.881,23	212.668,90	490.591,84	31.644,62		766.786,60
Murung Raya	6.742,20	138.887,55	750.176,58	1.467.442,75	246,51	2.363.495,58
Palangka Raya	20.006,76	89.381,04	90.679,90	85.244,74		285.312,43
Pulang Pisau	195.041,38	360.867,97	57.248,84	351.015,83		964.174,02
Seruyan	337.791,51	391.981,12	706.401,17	84.262,69		1.520.436,49
Sukamara	82.117,39	127.494,12	68.213,54	48.751,77		326.576,82
Grand Total	2.180.666,49	3.640.992,84	5.640.959,83	3.898.214,52	309,96	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-51 Peta Jasa Lingkungan Pengendalian hama

Sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah tengah memiliki jasa lingkungan pengaturan dalam pengendalian hama dengan kelas sedang hingga tinggi. Untuk kelas sedang mencapai luasan 5.640.959,83 Ha (37%) dan kelas tinggi seluas 3.898.214,52 Ha (25%). Kabupaten Murung Raya merupakan kabupaten terluas yang memiliki jasa pengaturan pengendalian hama yaitu seluas 1.467.442,75 Ha, dengan kelas jasa tinggi.



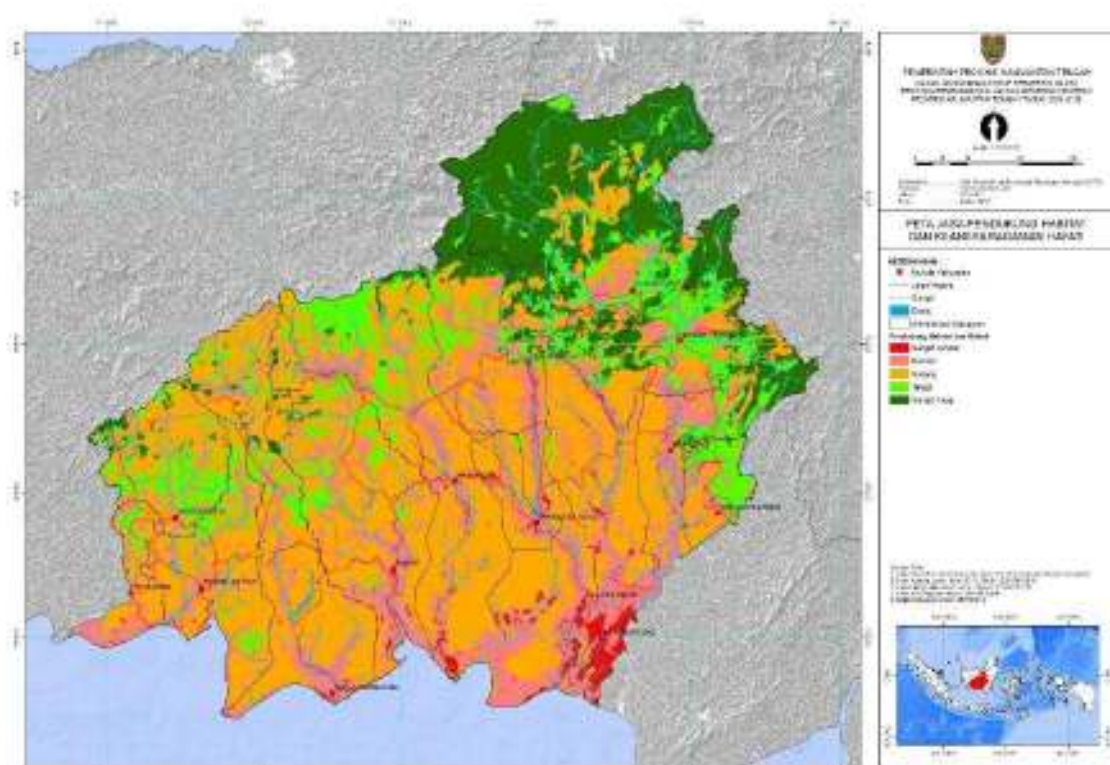
Gambar 3-52 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Pengendalian Hama



3.3.2.3. Jasa Lingkungan Fungsi Pendukung (*Supporting*)

A. Pendukung Habitat dan Kehati

Jasa lingkungan untuk mendukung habitat dan keanekaragaman hayati di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa seluas 2.498.798,41 Ha (16%) masuk dalam kategori sangat tinggi, 2.010.874,40 Ha (13%) kategori tinggi, 7.205.228,17 Ha (47%) kategori sedang, 3.313.937,87 Ha (22%) kategori rendah dan seluas 332.304,80 Ha (2%) masuk dalam kategori sangat rendah. Sebaran jasa pendukung pendukung habitat dan keanekaragaman hayati dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3-53 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Kehati

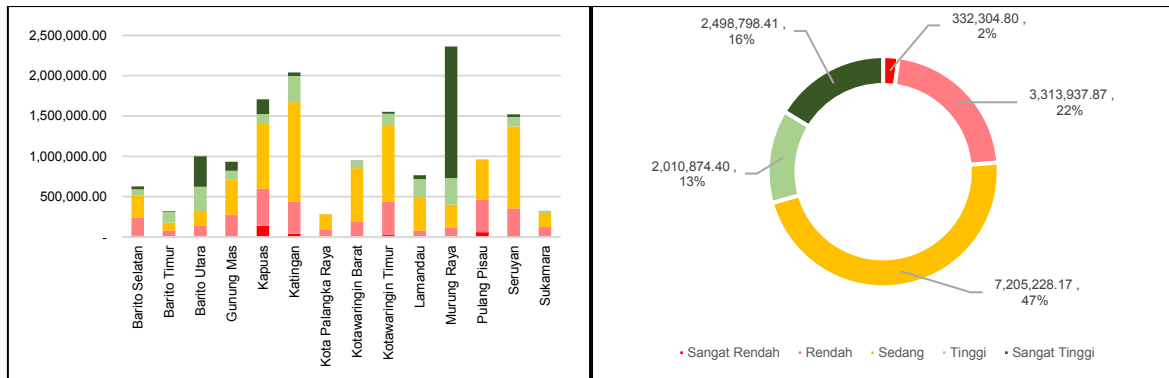
Tabel 3-42 Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati

Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	18.741,99	220.915,57	277.531,96	77.392,22	32.720,34	627.302,08
Barito Timur	4.353,12	75.758,78	99.785,46	133.052,64	8.311,12	321.261,11
Barito Utara	4.096,37	136.993,10	181.226,48	300.566,27	380.019,24	1.002.901,45
Gunung Mas	8.010,29	270.897,99	434.964,29	107.293,57	113.117,81	934.283,95
Kapuas	140.633,89	458.922,07	803.745,70	120.964,52	183.611,24	1.707.877,42
Katingan	40.511,90	397.379,04	1.232.824,88	326.910,03	41.569,48	2.039.195,32
Kota Palangka Raya	6.592,00	90.148,82	184.903,13	3.668,48		285.312,43
Kotawaringin Barat	8.414,76	178.501,76	667.158,86	92.302,44	835,81	947.213,63
Kotawaringin Timur	24.620,91	415.436,85	938.958,25	150.251,21	25.059,52	1.554.326,74
Lamandau	104,13	81.944,09	416.133,49	221.249,56	47.355,33	766.786,60
Murung Raya		118.759,72	284.273,51	327.157,01	1.633.305,35	2.363.495,58



Pulang Pisau	60.775,42	406.746,02	492.250,17	4.402,41		964.174,02
Seruyan	12.567,55	340.762,84	1.015.948,86	118.264,06	32.893,18	1.520.436,49
Sukamara	2.882,48	120.771,23	175.523,12	27.400,00		326.576,82
Grand Total	332.304,80	3.313.937,87	7.205.228,17	2.010.874,40	2.498.798,41	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)

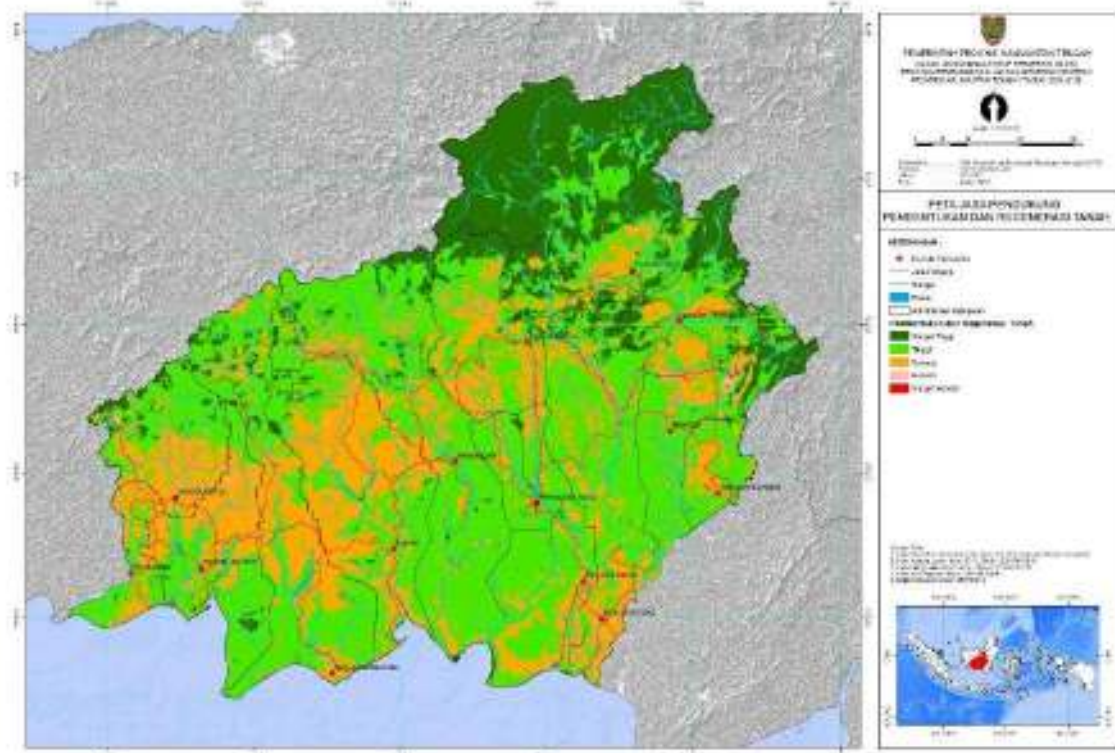


Gambar 3-54 Distribusi dan Persentase Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati

Kabupaten Murung Raya, Barito Utara dan Kapuas merupakan kabupaten yang memiliki jasa lingkungan pendukung habitat dan keanekaragaman hayati yang tinggi hingga sangat tinggi, sedangkan Kabupaten Kapuas terutama di bagian selatan merupakan daerah yang memiliki jasa pendukung yang sangat rendah. Hal ini disebabkan di daerah tersebut telah terbuka oleh pemukiman dan sawah masyarakat.

B. Pembentukan dan Regenerasi Tanah

Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi, serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah menyebabkan proses pembentukan tanah semakin cepat. Sebaran jasa pendukung pembentukan dan regenerasi tanah dapat dilihat pada gambar berikut:



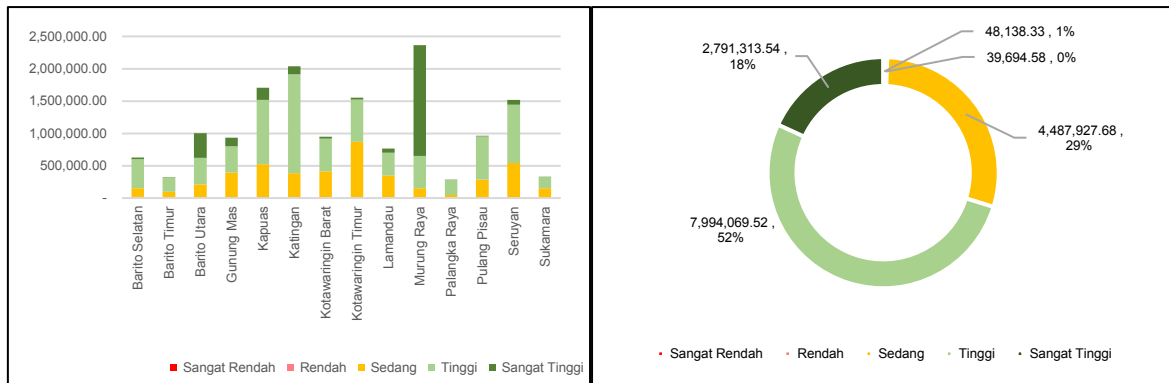
Gambar 3-55 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Dan Regenerasi Tanah

Tabel 3-43 Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Dan Regenerasi Tanah

Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	8.257,79	9.696,91	135.262,08	449.984,72	24.100,58	627.302,08
Barito Timur		255,31	98.052,69	218.987,71	3.965,40	321.261,11
Barito Utara	1.627,52	4.320,60	204.216,06	410.483,52	382.253,75	1.002.901,45
Gunung Mas	24,43	1.787,70	391.184,05	407.643,13	133.644,64	934.283,95
Kapuas	12.531,68	852,91	508.063,18	996.832,13	189.597,52	1.707.877,42
Katingan	5.046,74	3.038,85	375.990,58	1.531.141,35	123.977,80	2.039.195,32
Kotawaringin Barat	574,93	6.588,49	408.549,60	504.217,64	27.282,97	947.213,63
Kotawaringin Timur	7.754,99	3.841,32	859.677,88	649.337,91	33.714,65	1.554.326,74
Lamandau	110,37	5.073,49	346.226,93	351.277,25	64.098,56	766.786,60
Murung Raya		821,50	152.623,26	497.855,29	1.712.195,53	2.363.495,58
Palangka Raya	1.267,25	440,27	46.342,81	232.019,03	5.243,06	285.312,43
Pulang Pisau	10.480,72	786,33	271.561,60	669.952,54	11.392,84	964.174,02
Seruyan	65,81	1.213,33	539.571,99	903.544,24	76.041,12	1.520.436,49
Sukamara	396,11	977,57	150.604,98	170.793,05	3.805,12	326.576,82
Grand Total	48.138,33	39.694,58	4.487.927,68	7.994.069,52	2.791.313,54	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih memiliki jasa lingkungan dalam mendukung pembentukan dan regenerasi tanah dengan kelas tinggi seluas 7.994.069,52 Ha (52%) sangat tinggi mencapai 2.791.313,54 Ha (18%) dengan areal tersebar di seluruh wilayah.



Gambar 3-56 Distribusi dan Persentase Pendukung Pembentukan Dan Regenerasi Tanah

Kabupaten Murung Raya dan Barito Utara merupakan kabupaten yang memiliki areal cukup luas jasa lingkungan Pendukung Pembentukan dan Regenerasi Tanah dengan kelas sangat tinggi. Kabupaten Murung Raya seluas 1.712.195,53 Ha dan Kabupaten Barito Utara mencapai 382.253,75 Ha.

C. Produksi Primer/Biomassa

Ekosistem memberikan jasa produksi primer berupa produksi oksigen dan penyediaan habitat spesies. Produksi oksigen memberikan dukungan bagi seluruh kehidupan makhluk. Tanpa adanya oksigen maka tidak akan ada kehidupan. Ekosistem memberikan jasa penghasil oksigen sekaligus mengurangi kadar karbondioksida dan populasi udara di bumi. Keberadaan vegetasi seperti hutan yang menyerap karbondioksida untuk pembentukan oksigen dan karbon dalam bentuk glukosa melalui proses fotosintesis menjadi aspek penting dalam kehidupan manusia. Hasil dari fotosintesis adalah oksigen dan glukosa, oksigen dan glukosa inilah yang menjadi kebutuhan utama yang diperlukan makhluk hidup di bumi untuk bertahan hidup, sehingga fotosintesis menjadi salah satu proses produksi primer bagi kelangsungan hidup manusia. Ekosistem telah menyediakan komponen-komponen yang dapat mendukung keberlanjutan produksi primer tersebut seperti ketersediaan air hingga zat hara dalam tanah. Jasa ekosistem produksi primer tersebut akan bervariasi antar lokasi dan berhubungan erat dengan keberadaan vegetasi dan hutan sebagai lokasi utama terjadinya fotosintesis.

Seluas 2.008.562,94 Ha (13%) wilayah Kalimantan Tengah memiliki jasa lingkungan Pendukung Produksi Primer/Biomassa dengan kelas sangat tinggi, dan seluas 5.531.002,38 Ha (36%) kelas tinggi.

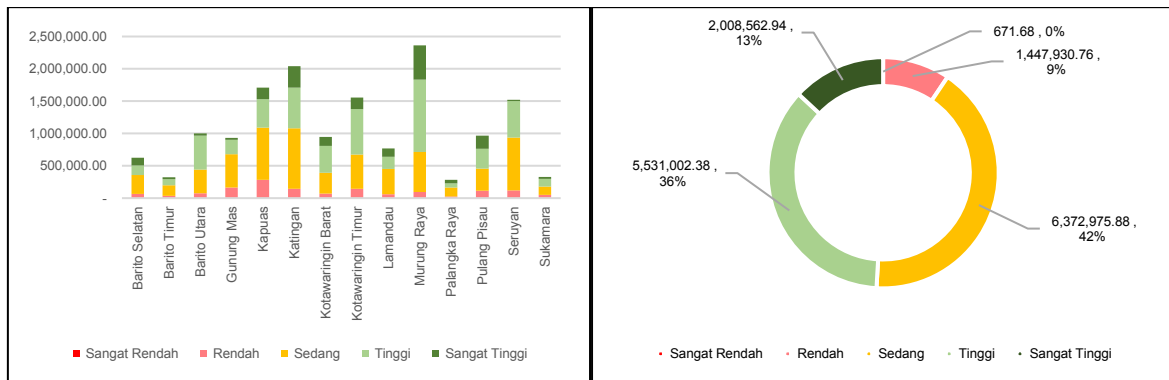
Tabel 3-44 Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer/Biomassa

Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	61,97	66.182,36	289.828,45	150.839,61	120.389,69	627.302,08
Barito Timur		38.129,51	161.482,14	91.727,73	29.921,75	321.261,11
Barito Utara		75.747,99	366.049,71	522.574,31	38.529,44	1.002.901,45
Gunung Mas		165.295,19	516.495,55	218.565,85	33.927,35	934.283,95
Kapuas	260,13	282.719,45	805.714,90	444.283,71	174.899,23	1.707.877,42

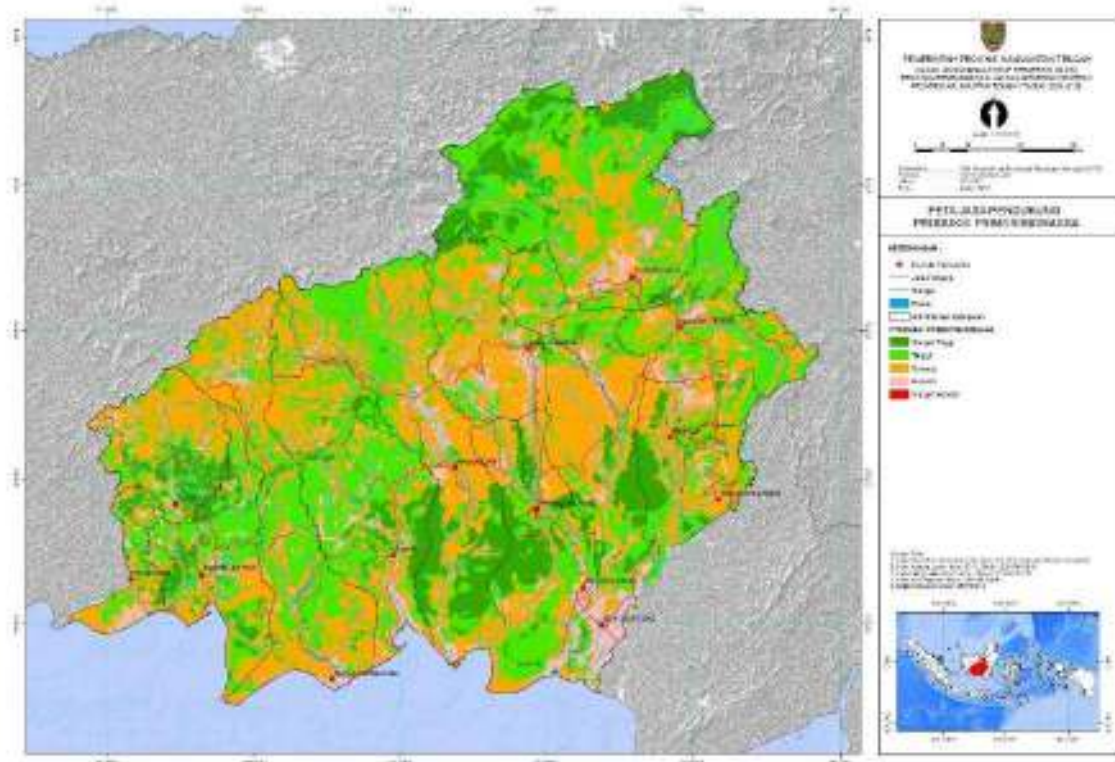


Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Katingan	55,06	145.499,56	937.053,46	627.855,16	328.732,07	2.039.195,32
Kotawaringin Barat	17,67	68.873,22	324.833,01	414.030,74	139.458,99	947.213,63
Kotawaringin Timur	107,98	146.305,34	529.182,10	699.519,04	179.212,27	1.554.326,74
Lamandau		58.508,78	391.001,95	190.342,17	126.933,70	766.786,60
Murung Raya		95.770,53	617.501,49	120.977,23	529.246,34	2.363.495,58
Palangka Raya	14,65	23.582,63	142.365,24	62.702,57	56.647,34	285.312,43
Pulang Pisau	97,73	113.145,95	343.984,06	307.309,04	199.637,25	964.174,02
Seruyan	55,09	117.830,21	816.889,52	565.111,18	20.550,49	1.520.436,49
Sukamara	1,40	50.340,06	130.594,28	115.164,04	30.477,05	326.576,82
Grand Total	671,68	1.447.930,76	6.372.975,88	5.531.002,38	2.008.562,94	671,68

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-57 Distribusi dan Persentase Pendukung Produksi Primer/Biomassa



Gambar 3-58 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer/Biomassa



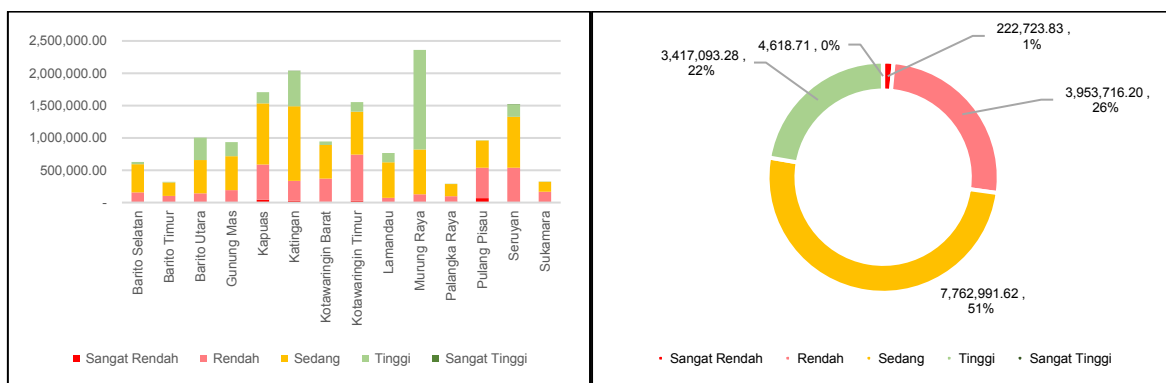
D. Siklus Hara

Ekosistem memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan kepada proses siklus hara, siklus hara sendiri diartikan sebagai pergerakan atau perpindahan materi berupa unsur-unsur hara/organik penting bagi metabolisme tumbuhan secara alami di alam. Siklus hara ini merupakan proses penting bagi suplai dan penyerapan dari senyawa kimia yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan metabolisme tanaman yang pemanfaatannya dapat dirasakan langsung oleh manusia. Siklus hara dalam suatu ekosistem merupakan proses yang terintegrasi dari pergerakan/pemindahan energi dan hara didalam ekosistem itu sendiri dan juga interaksinya dengan atmosfer, biosfir, geosfir dan hidrosfir.

Tabel 3-45 Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara

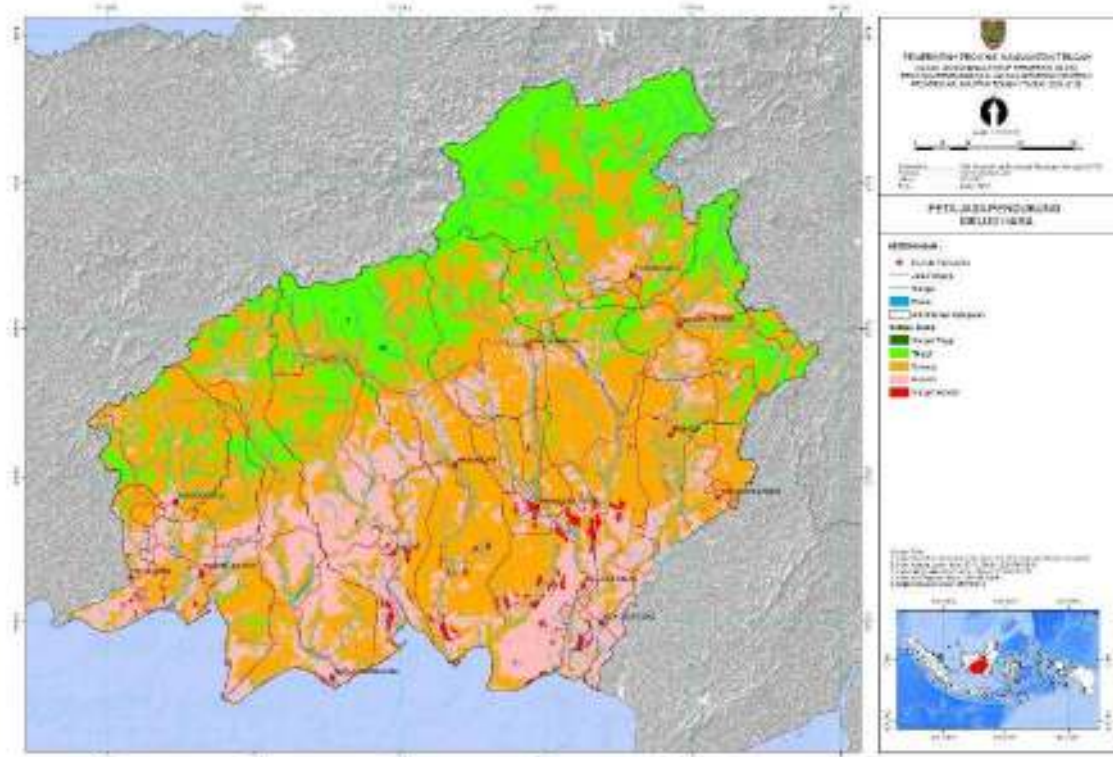
Kabupaten	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	10.405,09	145.670,29	438.559,67	32.667,03		627.302,08
Barito Timur	661,77	101.326,60	211.031,50	8.241,25		321.261,11
Barito Utara		142.552,63	516.259,98	344.088,84		1.002.901,45
Gunung Mas		192.866,79	524.019,77	217.397,27	0,11	934.283,95
Kapuas	43.523,13	546.134,12	944.408,05	173.812,12		1.707.877,42
Katingan	26.880,45	307.370,35	1.154.642,19	545.695,87	4.606,46	2.039.195,32
Kotawaringin Barat	12.514,05	360.424,44	519.494,57	54.780,58		947.213,63
Kotawaringin Timur	31.173,41	710.359,38	661.518,54	151.275,41		1.554.326,74
Lamandau		72.350,76	551.222,96	143.212,87		766.786,60
Murung Raya		128.911,40	693.603,28	1.540.980,90		2.363.495,58
Palangka Raya	14.384,66	84.496,92	186.064,03	366,82		285.312,43
Pulang Pisau	68.273,04	468.660,55	424.244,86	2.995,58		964.174,02
Seruyan	7.059,19	530.531,19	787.134,22	195.699,75	12,14	1.520.436,49
Sukamara	7.849,05	162.060,78	150.788,01	5.878,98		326.576,82
Grand Total	222.723,83	3.953.716,20	7.762.991,62	3.417.093,28	4.618,71	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-59 Distribusi dan Persentase Pendukung Siklus Hara

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar jasa pendukung siklus hara di Kalimantan Tengah di dominasi dengan kelas sedang seluas 7.762.991,62 Ha (51%) dan kelas rendah seluas 3.953.716,20 Ha (26%). Beberapa areal lainnya memiliki kelas tinggi seluas 3.417.093,28 (22%). Sebaran jasa pendukung siklus hara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3-60 Peta Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara

3.3.2.4. Fungsi Budaya (*Cultural*)

A. Estetika (Apresiasi Pemandangan Alam)

Estetika keindahan alam terbentuk dari perpaduan berbagai bentangalam yang masing-masing memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Penyediaan estetika keindahan alam ini bergantung pada kondisi saat ini apakah masih dalam keadaan baik ataukah sudah mengalami banyak kerusakan. Ekosistem memiliki fungsi budaya berupa esteik alam seperti laut, pegunungan, lembah, pantai dan lain sebagainya telah memberikan nuansa keindahan alam dan nilai-nilai estetika yang mengagumkan dan memiliki nilai jual. Paduan bentang alam dan bentang budaya semakin memperkuat nilai keindahan dan estetika yang telah diberikan oleh ekosistem.

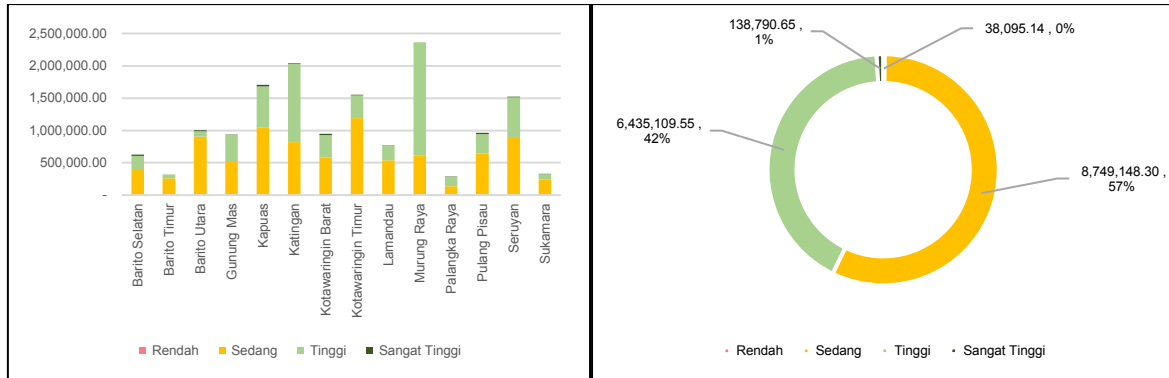
Tabel 3-46 Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Fungsi Budaya Estetika

Kabupaten	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	3.026,29	400.499,03	201.037,29	22.739,46	627.302,08
Barito Timur	223,75	258.904,94	62.132,42		321.261,11
Barito Utara	6.801,47	896.408,81	85.866,31	13.824,86	1.002.901,45
Gunung Mas	4.315,19	524.200,17	405.744,61	23,97	934.283,95
Kapuas	4.272,04	1.044.652,92	633.184,30	25.768,16	1.707.877,42
Katingan	911,05	820.251,51	1.205.086,77	12.945,99	2.039.195,32
Kotawaringin Barat	6.279,00	576.303,04	343.862,59	20.768,99	947.213,63
Kotawaringin Timur	2.656,43	1.187.284,77	354.692,89	9.692,65	1.554.326,74
Lamandau	2.745,59	536.304,50	227.463,13	273,38	766.786,60
Murung Raya	5.156,02	608.164,42	1.750.175,15		2.363.495,58



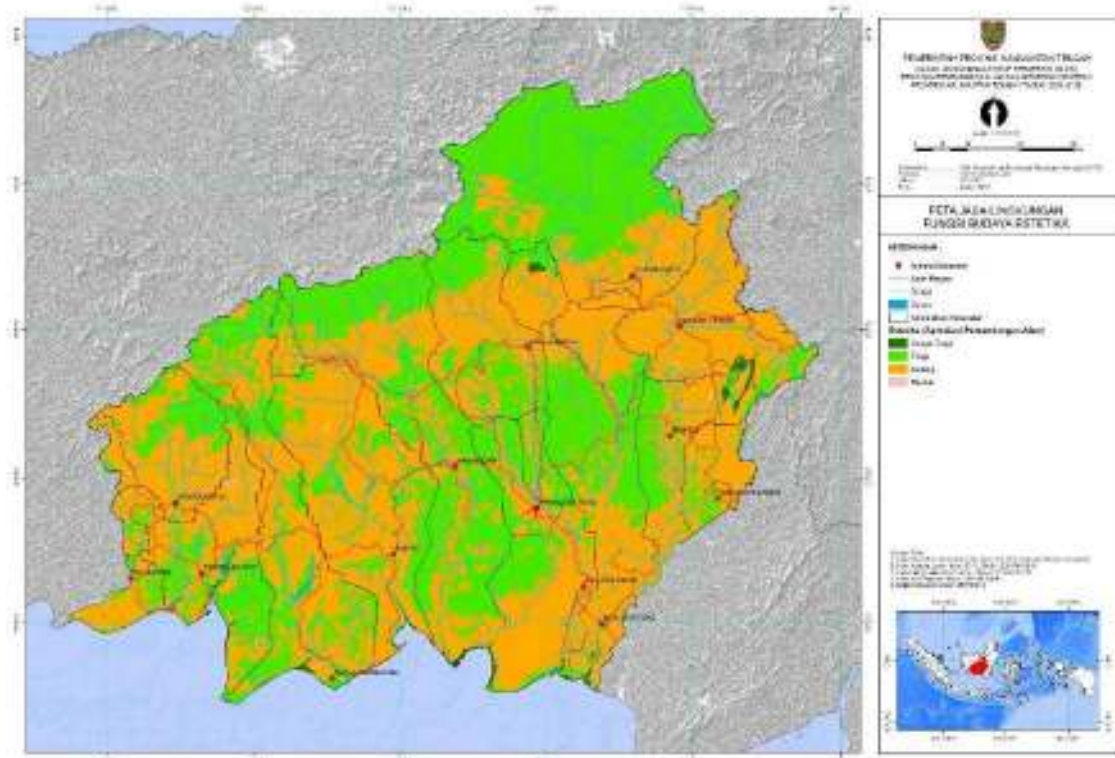
Kabupaten	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Palangka Raya		134.124,30	149.945,61	1.242,52	285.312,43
Pulang Pisau		643.348,29	300.576,39	20.249,35	964.174,02
Seruyan	833,27	880.647,39	631.855,71	7.100,12	1.520.436,49
Sukamara	875,02	238.054,21	83.486,36	4.161,22	326.576,82
Grand Total	38.095,14	8.749.148,30	6.435.109,55	138.790,65	5.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-61 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Estetika

Jasa lingkungan fungsi budaya khususnya estetika keindahan alam di Kalimantan Tengah seluas 138.790,65 ha (1%) masuk kelas sangat tinggi dan seluas 6.435.109,55 Ha (42%). Estetika terluas dengan kelas tinggi terluas berada di Kabupaten Murung Raya. Hal ini disebabkan daerah tersebut masih memiliki tutupan hutan relatif baik dengan daerah berbukit.



Gambar 3-62 Peta Jasa Lingkungan Fungsi Budaya-Eстетika



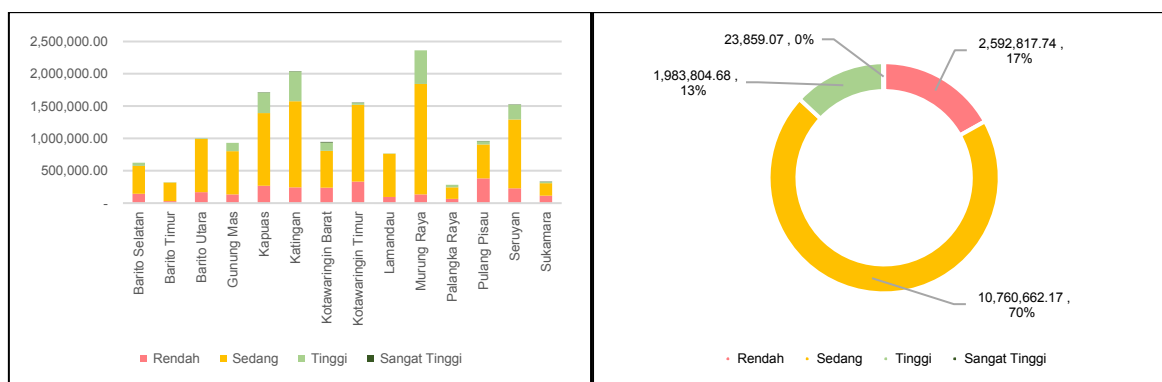
B. Rekreasi (Peluang Kegiatan Pariwisata dan Rekreasi)

Ekosistem menyediakan fitur lansekap, keunikan alam, atau nilai tertentu yang menjadi daya tarik wisata. Berbagai macam bentuk bentang alam dan keunikan flora dan fauna serta keanekaragaman hayati yang terdapat dalam ekosistem memberi ciri dan keindahan bagi para wisatawan. Dari sisi ekonomi, akan diperoleh banyak keuntungan bahkan menjadi sumber devisa negara yang besar. Variasi bentangalam berpengaruh besar terhadap nilai jasa budaya rekreasi dan ekowisata.

Tabel 3-47 Distribusi Luasan Jasa Lingkungan Fungsi Rekreasi

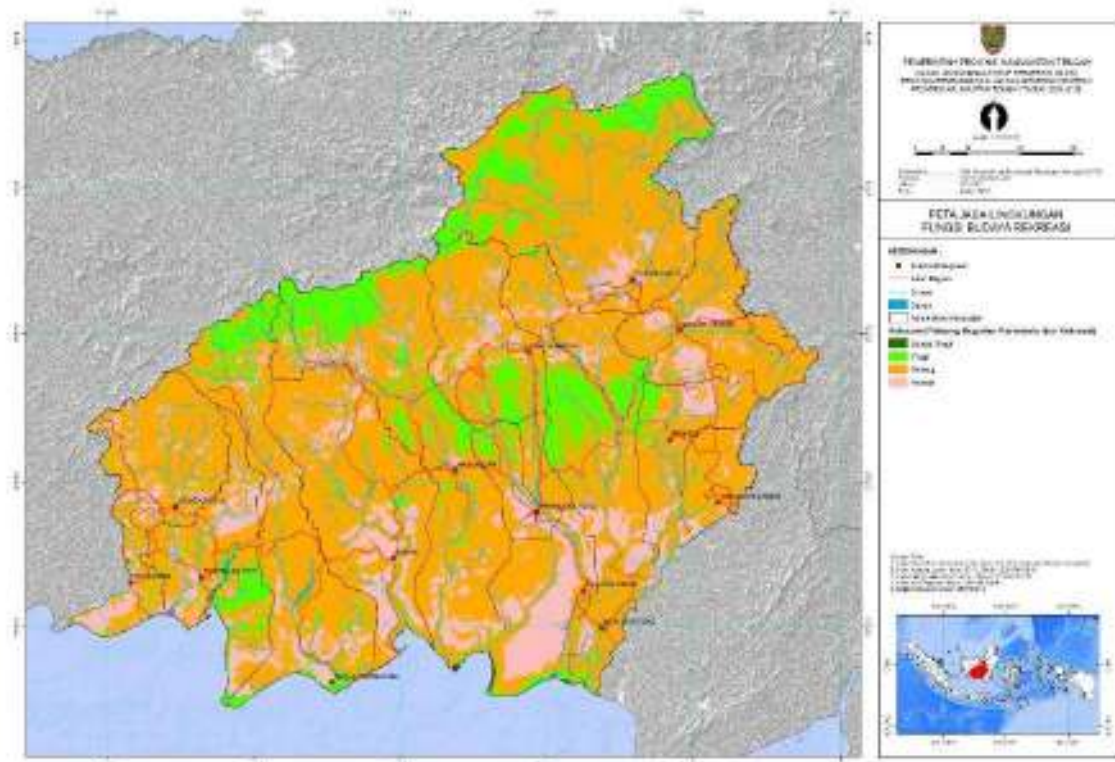
Kabupaten	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	Grand Total
Barito Selatan	143.754,56	434.268,17	49.279,34		627.302,08
Barito Timur	30.649,19	286.297,88	4.314,05		321.261,11
Barito Utara	172.038,88	821.596,80	9.265,77		1.002.901,45
Gunung Mas	133.505,67	669.783,46	130.994,82		934.283,95
Kapuas	267.673,96	1.127.585,76	312.021,48	596,22	1.707.877,42
Katingan	245.256,71	1.332.614,37	459.827,07	1.497,16	2.039.195,32
Kotawaringin Barat	237.639,99	572.157,89	125.029,93	12.385,82	947.213,63
Kotawaringin Timur	334.811,35	1.186.201,77	32.393,50	920,13	1.554.326,74
Lamandau	97.859,69	664.176,78	4.750,12		766.786,60
Murung Raya	135.874,63	1.706.262,57	521.358,38		2.363.495,58
Palangka Raya	66.815,78	175.251,65	43.245,00		285.312,43
Pulang Pisau	383.101,37	523.892,39	49.643,34	7.536,92	964.174,02
Seruyan	226.878,38	1.068.868,68	224.052,87	636,56	1.520.436,49
Sukamara	116.957,57	191.703,99	17.629,01	286,26	326.576,82
Grand Total	2.592.817,74	10.760.662,17	1.983.804,68	23.859,07	15.361.143,65

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021 (Basis Tutupan Lahan Tahun 2019)



Gambar 3-63 Distribusi dan Persentase Jasa Lingkungan Rekreasi

Jasa lingkungan fungsi budaya untuk rekreasi di Kalimantan Tengah sebagian besar berada pada kelas sedang dengan luasan 10.760.662,17 Ha (70%) dan sebagian lagi berada di kelas tinggi seluas 1.983.804,68 Ha (13%). Seberang jasa lingkungan fungsi budaya untuk rekreasi dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3-64 Peta Jasa Lingkungan Fungsi Budaya-Rekreasi

3.3.3. Resiko Dampak Lingkungan

Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Namun sebelum dampak dapat terjadi, makhluk hidup dapat mengenali risiko yang merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi/dampak dari sebuah aksi. Pada konteks lingkungan hidup, dampak terhadap lingkungan hidup dari kegiatan manusia pada umumnya seringkali bersifat negatif. Lalu sebagai bentuk dari dampak tersebut, maka akan terbentuk risiko-risiko yang akan membahayakan tidak hanya lingkungan itu saja, namun juga manusia. Oleh sebab itu, penting adanya kajian tentang risiko guna mencegah atau memperkecil dampak.

Risiko yang terjadi kepada lingkungan disebut sebagai risiko ekologis. Beragam permasalahan dalam lingkup sistem sosial, proses sosial, dan relasi sosial telah memunculkan tiga macam risiko ekologis, yaitu:

- a. Risiko fisik-ekologis (physical-ecological risk), yaitu aneka risiko kerusakan fisik pada manusia dan lingkungannya.
- b. Risiko mental (mental risk), yaitu aneka risiko kerusakan mental akibat perlakuan buruk pada tatanan psikis.
- c. Risiko sosial (social risk), yaitu aneka risiko yang menggiring pada rusaknya bangunan dan lingkungan sosial (social-ecological).

Risiko fisik-ekologis dapat disebabkan oleh proses alam atau oleh kegiatan manusia (*man made risk*). Salah satu contohnya adalah banjir yang paling sering



menimbulkan kerusakan fisik-ekologis. Risiko mental dapat meliputi kerusakan psikis yang disebabkan oleh faktor eksternal maupun internal.

Kerusakan parah ekosistem mental disebabkan oleh pembiaran aneka risiko mental dari berbagai tindakan sosial, misalnya pembiaran kekerasan dan korupsi. Risiko sosial adalah kerusakan bangunan sosial sebagai akibat dari faktor-faktor eksternal kondisi alam, teknologi, dan industri. Pada umumnya risiko yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan terhadap komunitas sosial adalah risiko kesehatan dan kesejahteraan. Tiga macam risiko ekologis tersebut jika dibiarkan secara terus menerus maka akan menimbulkan efek yang negatif untuk sistem biosfer dimana manusia dan lingkungan hidup secara berdampingan. Berdasarkan data dari BNPB, bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah:

- a. Banjir
- b. Kekeringan
- c. Cuaca Ekstrim
- d. Tanah Longsor
- e. Gelombang Ekstrim dan Abrasi Pantai
- f. Kebakaran Hutan dan Lahan

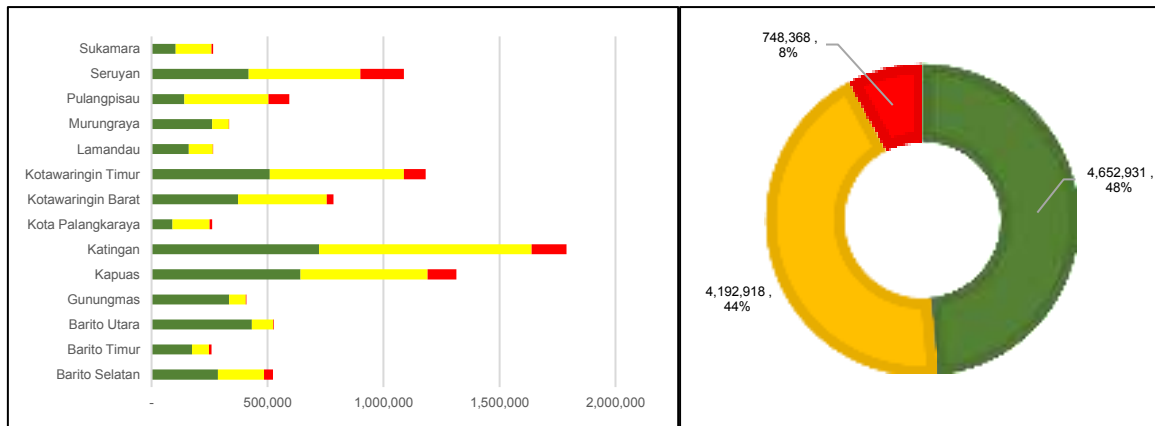
Dampak resiko lingkungan didalam dokumen KLHS RPJMD Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini seluruhnya menggunakan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Indeks Resiko terbagi 3 yaitu Rendah, Sedang dan Tinggi dengan indeks resiko 0-0,3 (Rendah) 0,3-0,6 (Sedang) dan diatas 0,6 masuk dalam resiko tinggi.

3.3.3.1. Banjir

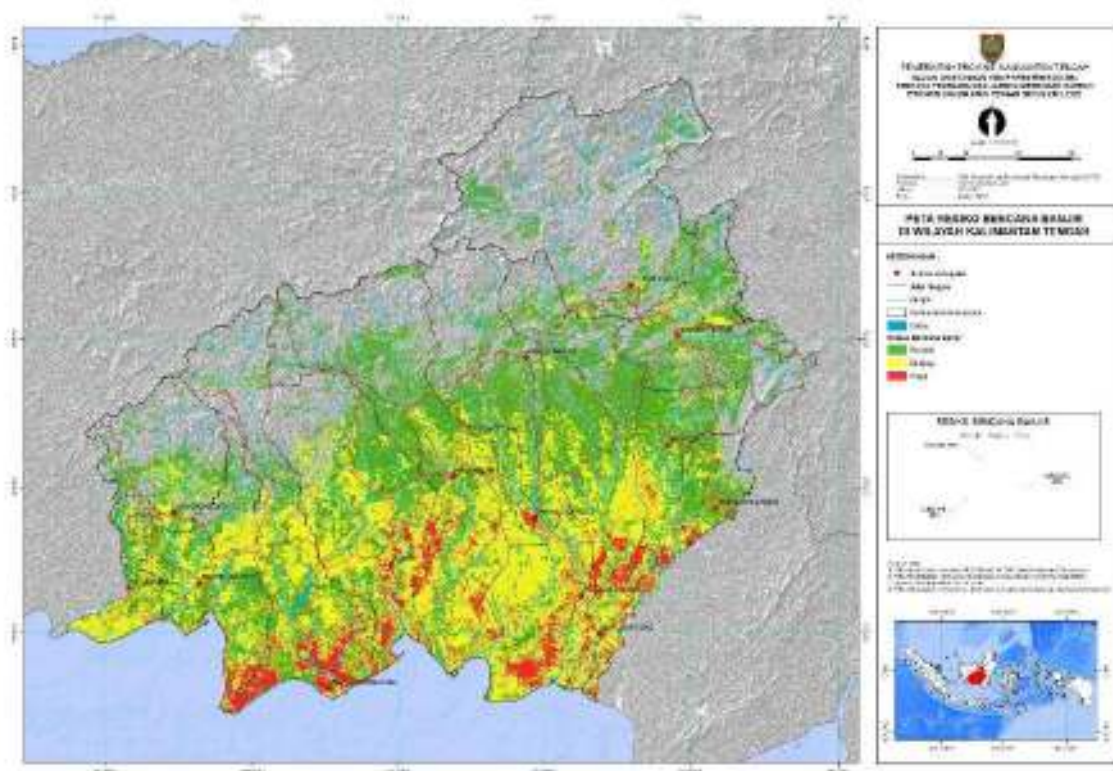
Wilayah Kalimantan Tengah yang memiliki resiko banjir mencapai luasan 9.594,217 Ha yang terbagi menjadi resiko tinggi seluas 748.368 Ha, sedang seluas 4.192.918 Ha dan resiko rendah seluas 4.652.931 Ha. Areal yang memiliki resiko banjir tertinggi sebagian besar di wilayah selatan yaitu di Kabupaten Seruyan, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Katingan dan Kapuas serta Barito Selatan.

Tabel 3-48 Luas Area dan Tingkat Resiko Banjir

Kabupaten	Luas Resiko Banjir (Ha)			Jumlah
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Barito Selatan	286.595	198.555	38.461	523.611
Barito Timur	174.942	72.810	10.643	258.395
Barito Utara	432.875	92.456	2.095	527.426
Gunungmas	335.064	70.741	2.847	408.652
Kapuas	641.640	548.251	124.329	1.314.220
Katingan	722.616	916.503	150.159	1.789.278
Kota Palangka Raya	90.300	159.487	10.865	260.652
Kotawaringin Barat	372.878	382.077	29.633	784.589
Kotawaringin Timur	509.020	579.359	93.865	1.182.244
Lamandau	160.965	103.014	176	264.156
Murungraya	261.845	70.916	1.624	334.385
Pulangpisau	140.799	363.800	89.340	593.938
Seruyan	418.754	481.351	187.092	1.087.197
Sukamara	104.637	153.599	7.240	265.475
Grand Total	4.652.931	4.192.918	748.368	9.594.217



Gambar 3-65 Distribusi dan Persentase Resiko Banjir



Gambar 3-66 Peta Resiko Bencana Banjir di Kalimantan Tengah

3.3.3.2. Kekeringan

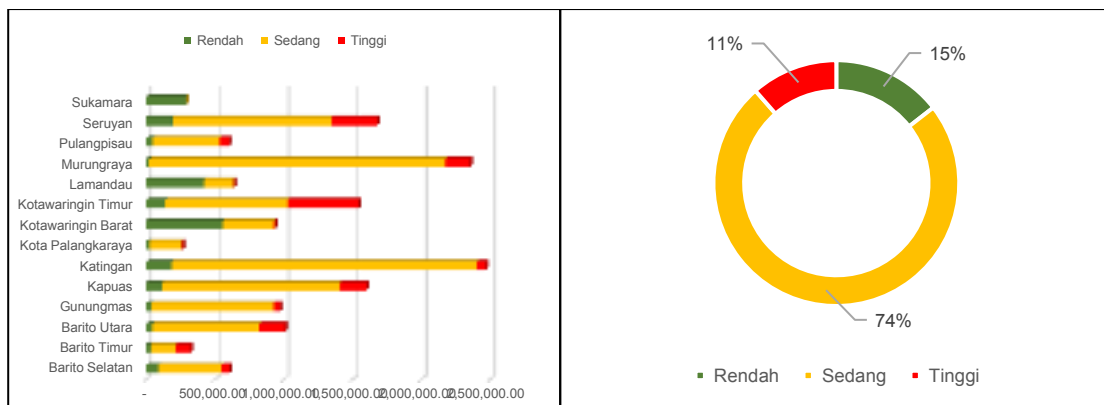
Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air berada jauh di bawah kebutuhan untuk mencukupi keperluan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi dan lingkungan. Di Kalimantan Tengah kekeringan merupakan salah satu bencana yang sering terjadi pada musim kemarau. Kekeringan yang terjadi menyebabkan gagal panen serta mengganggu transportasi kapal melalui Sungai. Cakupan resiko kekeringan dengan tingkat sedang di Provinsi Kalimantan Tengah sangat luas mencapai 74% (11.316.002,02 Ha) tersebar merata diseluruh wilayah Kalimantan Tengah, sedangkan resiko kekeringan dengan kategori tinggi mencapai 11% (1.748.649,54 Ha). Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan kabupaten dengan



resiko kekeringan terluas, disusul Kabupaten Seruyan dengan tutupan lahan umumnya berupa perkebunan kelapa sawit. Potensi kekeringan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau umumnya didominasi pada tutupan lahan persawahan, sehingga sangat berpotensi menyebabkan kegagalan panen.

Tabel 3-49 Luas Area dan Tingkat Resiko Banjir

Kabupaten	Luas Resiko Kekeringan (Ha)			Jumlah
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Barito Selatan	89.399,20	460.201,91	57.811,89	607.412,99
Barito Timur	31.663,58	186.091,18	104.929,21	322.683,96
Barito Utara	47.651,72	773.231,14	185.969,18	1.006.852,04
Gunungmas	37.758,49	889.091,57	43.087,61	969.937,67
Kapuas	119.160,05	1.291.996,82	188.386,46	1.599.543,32
Katingan	184.961,67	2.216.195,79	68.482,62	2.469.640,07
Kota Palangka Raya	27.765,98	232.392,30	4.226,23	264.384,51
Kotawaringin Barat	556.617,99	371.517,29	7.975,00	936.110,27
Kotawaringin Timur	139.833,02	886.860,74	517.549,12	1.544.242,88
Lamandau	420.724,79	214.334,70	1.856,67	636.916,16
Murungraya	24.354,75	2.150.596,46	178.456,39	2.353.407,59
Pulangpisau	48.667,31	486.344,64	63.822,68	598.834,63
Seruyan	193.302,14	1.156.753,82	326.096,50	1.676.152,46
Sukamara	288.585,40	393,68		288.979,08
Grand Total	2.210.446,08	11.316.002,02	1.748.649,54	15.275.097,64

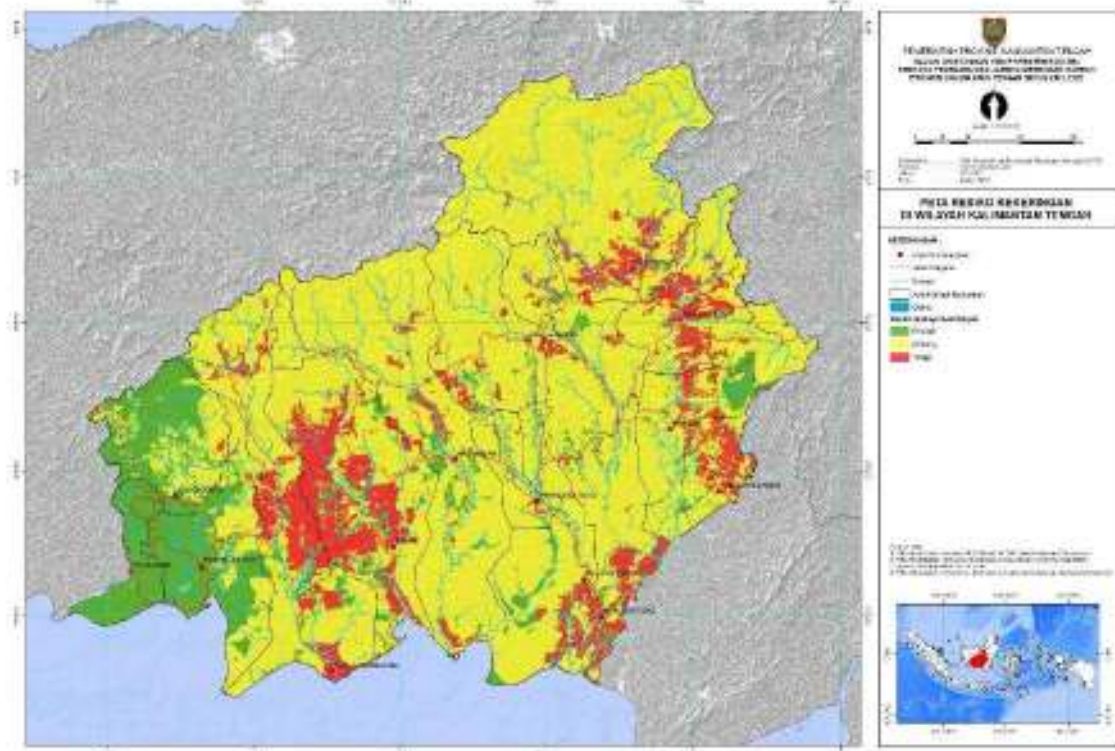


Gambar 3-67 Distribusi dan Persentase Resiko Kekeringan



Gambar 3-68 Kekeringan di Sungai Kahayan dan Tambak Ikan di Seruyan

(Sumber Foto : www.antara.com dan www.banjarmasin.tribunnews.com)



Gambar 3-69 Peta Resiko Bencana Kekeringan di Kalimantan Tengah

3.3.3.3. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem adalah kondisi cuaca dimana pengamatan unsur-unsur cuaca yang teramati melebihi ambang batas tertentu, yang pada umumnya dapat menimbulkan bencana hidromete nilai batasan cuaca ekstrem adalah curah hujan terukur 150 mm/ 24jam; angin kencang >25 knot/ 45 km/ jam; suhu udara terukur >3 derajat dari normal maksimum dan minimum wilayah tersebut; hingga visibility atau jarak pandang mendatar (BMKG, 2021)

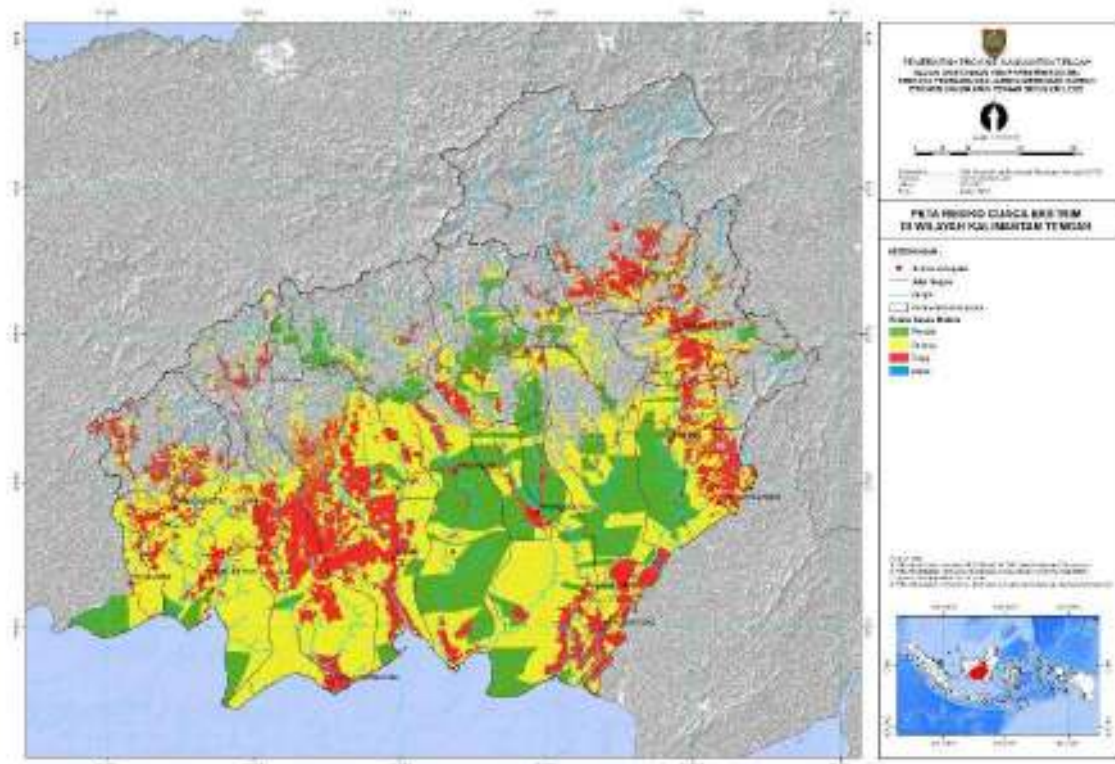
Cuaca ekstrem cenderung terjadi pada periode musim hujan dan musim transisi. Sebab, pada periode tersebut terjadi ketidakstabilan atmosfer yang menunjang proses konvektif kuat. Cuaca ekstrem terkadang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor. Cuaca ekstrem di periode puncak musim hujan pun dimana ditandai dengan intensitas hujan yang tinggi, durasi hujan yang cukup panjang, dan frekuensi hujan yang lebih sering. (BMKG, 2021)

Tabel 3-50 Luas Area dan Tingkat Resiko Banjir

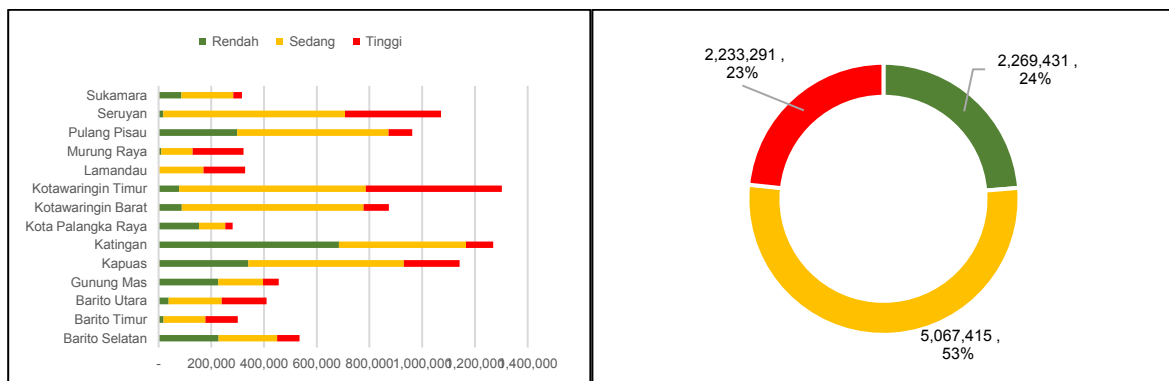
Kabupaten	Luas Resiko Cuaca Ekstrem (Ha)			Jumlah
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Barito Selatan	226.907	222.381	85.314	534.603
Barito Timur	19.024	158.247	122.549	299.819
Barito Utara	38.453	200.920	170.549	409.921
Gunung Mas	226.463	169.424	59.962	455.849



Kapuas	340.622	589.637	211.536	1.141.796
Katingan	684.618	481.462	103.482	1.269.562
Kota Palangka Raya	154.026	99.524	27.766	281.316
Kotawaringin Barat	88.186	689.004	96.891	874.082
Kotawaringin Timur	78.599	707.902	516.030	1.302.530
Lamandau		170.198	158.273	328.471
Murung Raya	10.592	117.987	193.967	322.545
Pulang Pisau	298.042	574.082	89.459	961.582
Seruyan	17.705	689.243	364.542	1.071.490
Sukamara	86.194	197.405	32.972	316.570
Grand Total	2.269.431	5.067.415	2.233.291	9.570.137



Gambar 3-70 Peta Resiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kalimantan Tengah



Gambar 3-71 Distribusi dan Persentase Resiko Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim di Kalimantan Tengah dengan tingkat Tinggi mencapai 23% (2.233.291 Ha), sedang seluas 53% (5.067.415 Ha). Cuaca ekstrim yang sering



melanda sebagian wilayah Kalimantan Tengah adalah angin puting beliung, curah hujan ekstrim disertai petir. Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan merupakan kabupaten terluas yang memiliki resiko cuaca ekstrim tinggi.



Gambar 3-72 Cuca Ekstrim di Sungai Kahayan dan Bencana Angin Putting Beliung di Sampit.

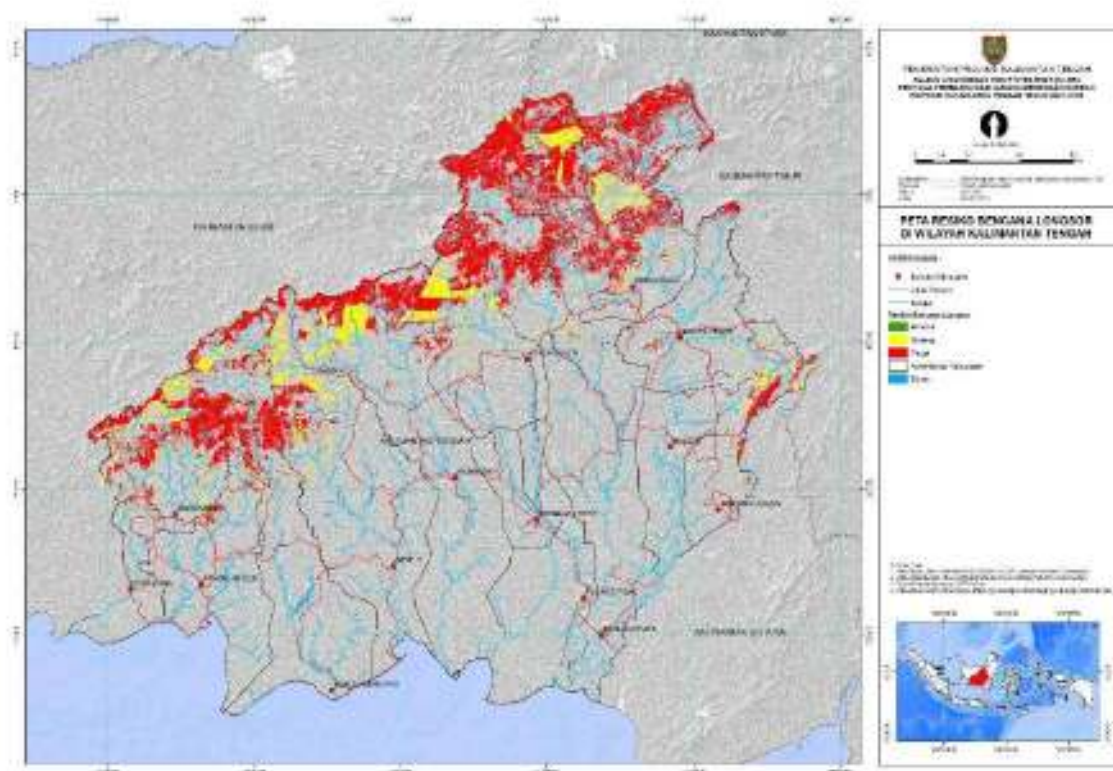
(Sumber Foto : www.antaraneews.com)

3.3.3.4. Tanah Longsor

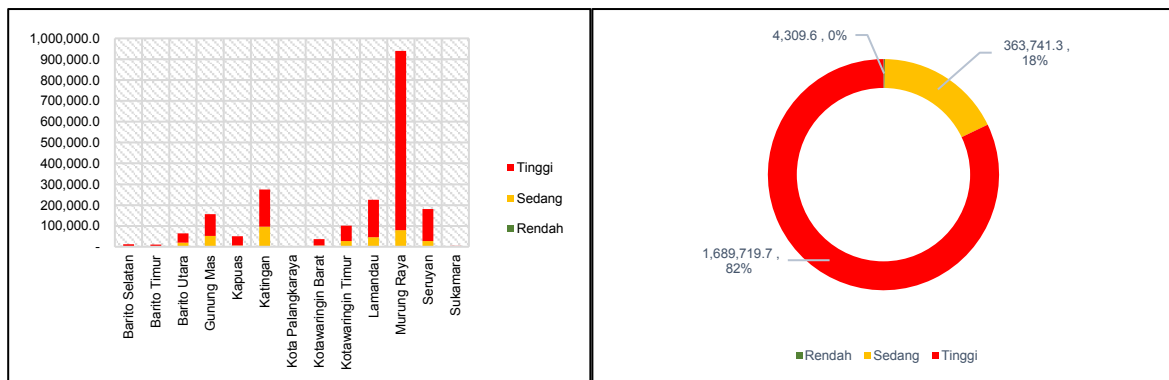
Bencana tanah longsor di Provinsi Kalimantan Tengah yang sering terjadi adalah longsor di beberapa ruas jalan yang memiliki kontur perbukitan di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas bagian utara, Murung Raya dan Muara Teweh. Longsor juga sering terjadi di lokasi-lokasi penambangan rakyat di Kabupaten Murung Raya, Gunung Mas dan Kotawaringin Barat. Bencana tanah longsor di ruas jalan mengakibatkan akses jalan terputus dan beban pembiayaan untuk perbaikan ruas jalan yang rusak, sedangkan longsor di areal-areal penambangan rakyat sering memakan korban jiwa para penambang. Berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah tercatat pada Tahun 2018 tercatat sebanyak 57 kali terjadi bencana longsor di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah.

Tabel 3-51 Luas Area dan Tingkat Resiko Longsor

Kabupaten	Luas Resiko Bencana Longsor (Ha)			Jumlah
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Barito Selatan	4,1	2.537,8	8.978,6	11.520,4
Barito Timur	7,5	3.304,6	6.573,4	9.885,5
Barito Utara	90,3	19.188,0	45.299,5	64.577,7
Gunung Mas	421,9	51.673,9	104.164,3	156.260,1
Kapuas	933,7	5.759,3	44.394,0	51.086,9
Katingan	580,6	95.524,5	179.116,6	275.221,7
Kota Palangka Raya	9,1	159,2		168,2
Kotawaringin Barat	36,0	5.234,7	31.869,8	37.140,5
Kotawaringin Timur	91,5	26.948,7	74.168,4	101.208,6
Lamandau	125,1	46.135,5	179.030,1	225.290,7
Murung Raya	1.508,1	78.136,8	859.747,0	939.392,0
Seruyan	476,9	27.047,1	153.339,8	180.863,8
Sukamara	25,1	2.091,3	3.038,1	5.154,5
Grand Total	4.309,6	363.741,3	1.689.719,7	2.057.770,6



Gambar 3-73 Peta Resiko Bencana Longsor di Kalimantan Tengah



Gambar 3-74 Distribusi dan Persentase Resiko Longsor

Wilayah Kalimantan Tengah memiliki areal resiko bencana longsor dengan kategori tinggi yang sangat luas hingga mencapai 1.689.719,7 ha (82%) sebagian besar berada di bagian utara wilayah Kalimantan Tengah, sementara untuk wilayah selatan umumnya tidak memiliki resiko terjadinya longsor. Hal ini disebabkan kontur di wilayah utara Kalimantan Tengah sebagian besar berbukit dengan kategori curam hingga sangat curam.

3.3.3.5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

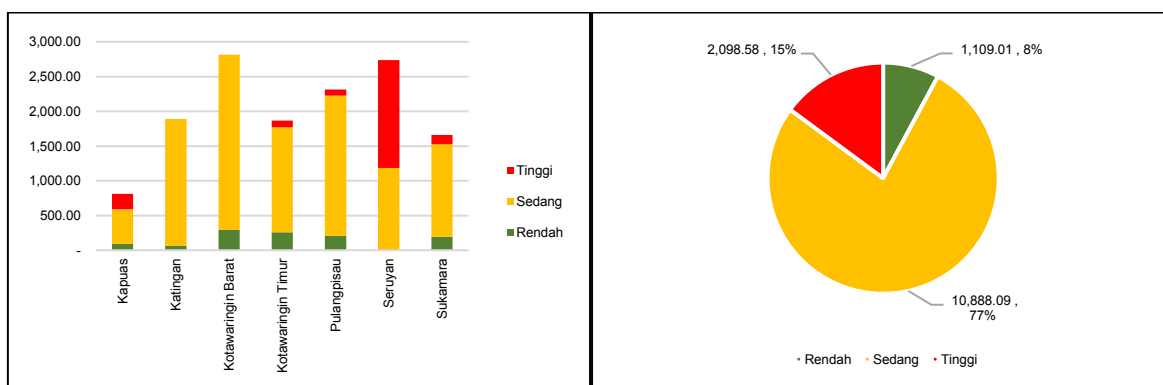
Beberapa wilayah Kalimantan Tengah yang berada di pinggir laut jawa berpotensi terkena dampak dari gelombang tinggi dan abrasi. Berdasarkan data dari BNPB seluas 1.689.719,7 Ha (15%) memiliki resiko tinggi terjadinya gelombang tinggi dan



abrasi. Kabupaten Seruyan merupakan salah satu kabupaten yang sangat luas berpotensi terkena gelombang dan abrasi dengan resiko tinggi. Berdasarkan data dari BPS Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa pada Tahun 2018 terjadi 19 kasus gelombang pasang laut dan abrasi.

Tabel 3-52 Luas Area dan Tingkat Resiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Kabupaten	Luas Resiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi (Ha)			Jumlah
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Kapuas	92,98	495,50	223,35	811,83
Katingan	63,35	1.825,47		1.888,82
Kotawaringin Barat	297,42	2.520,43		2.817,85
Kotawaringin Timur	256,56	1.513,02	96,59	1.866,17
Pulang Pisau	206,86	2.018,94	88,52	2.314,33
Seruyan		1.182,71	1.553,86	2.736,58
Sukamara	191,83	1.332,01	136,26	1.660,11
Grand Total	1.109,01	10.888,09	2.098,58	14.095,69



Gambar 3-75 Distribusi dan Persentase Resiko Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Seluas 10.888,09 Ha (77%) wilayah pesisir Kalimantan Tengah memiliki resiko sedang terhadap gelombang ekstrim dan abrasi. Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki luas terbesar 2.520,43 Ha.



Gambar 3-76 Gambar Abrasi di Ujung Pandaran (Kotim) dan Gelombang Ekstrim (Sumber Foto : www.antaraneews.com)



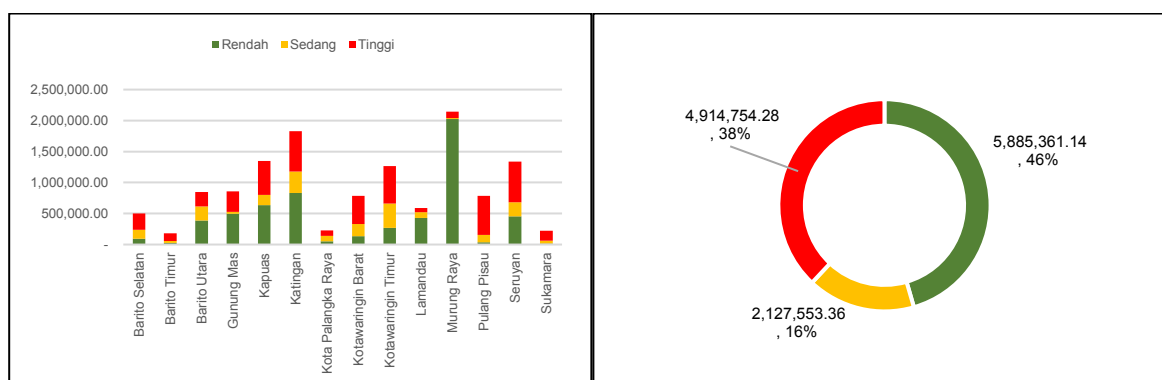
Abrasi yang menghantam Pantai Ujung Pandaran, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dalam beberapa tahun terakhir telah menghancurkan satu per satu fasilitas di kawasan wisata, bahkan rumah betang yang menjadi ikon kini juga terancam tergerus. Beberapa desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat juga terancam dengan adanya abrasi.

3.3.3.6. Resiko Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah hampir selalu terjadi setiap tahun terutama di lahan gambut, daerah semak belukar. Seluas 4.914.754,28 Ha (38%) wilayah Kalimantan Tengah memiliki resiko tinggi dan seluas 2.127.553,36 Ha (16%) memiliki resiko sedang terjadinya bahaya kebakaran hutan dan lahan. Resiko tinggi sebagian besar diwilayah selatan Kalimantan Tengah terutama pada lahan. Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Seruyan dan Kapuas merupakan kabupaten dengan resiko tinggi bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 3-53 Luas Area dan Tingkat Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan

Kabupaten	Luas Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)			Jumlah
	Rendah	Sedang	Tinggi	
Barito Selatan	92.625,80	143.626,17	264.844,57	501.096,53
Barito Timur	27.176,37	30.342,71	123.643,20	181.162,28
Barito Utara	385.244,91	228.684,27	232.301,46	846.230,65
Gunung Mas	496.681,42	30.335,03	330.734,99	857.751,44
Kapuas	634.531,03	167.876,91	547.032,00	1.349.439,94
Katingan	829.937,64	349.164,53	647.634,16	1.826.736,32
Kota Palangka Raya	53.503,74	86.957,55	89.133,76	229.595,04
Kotawaringin Barat	134.095,79	196.811,25	455.665,74	786.572,78
Kotawaringin Timur	269.072,29	394.899,53	602.911,62	1.266.883,44
Lamandau	431.440,33	90.285,32	66.252,63	587.978,28
Murung Raya	2.023.828,94	18.494,30	100.595,74	2.142.918,98
Pulang Pisau	37.029,51	116.681,81	633.304,97	787.016,29
Seruyan	455.476,02	224.673,56	660.708,20	1.340.857,79
Sukamara	14.717,37	48.720,40	159.991,23	223.429,00
Grand Total	5.885.361,14	2.127.553,36	4.914.754,28	12.927.668,78

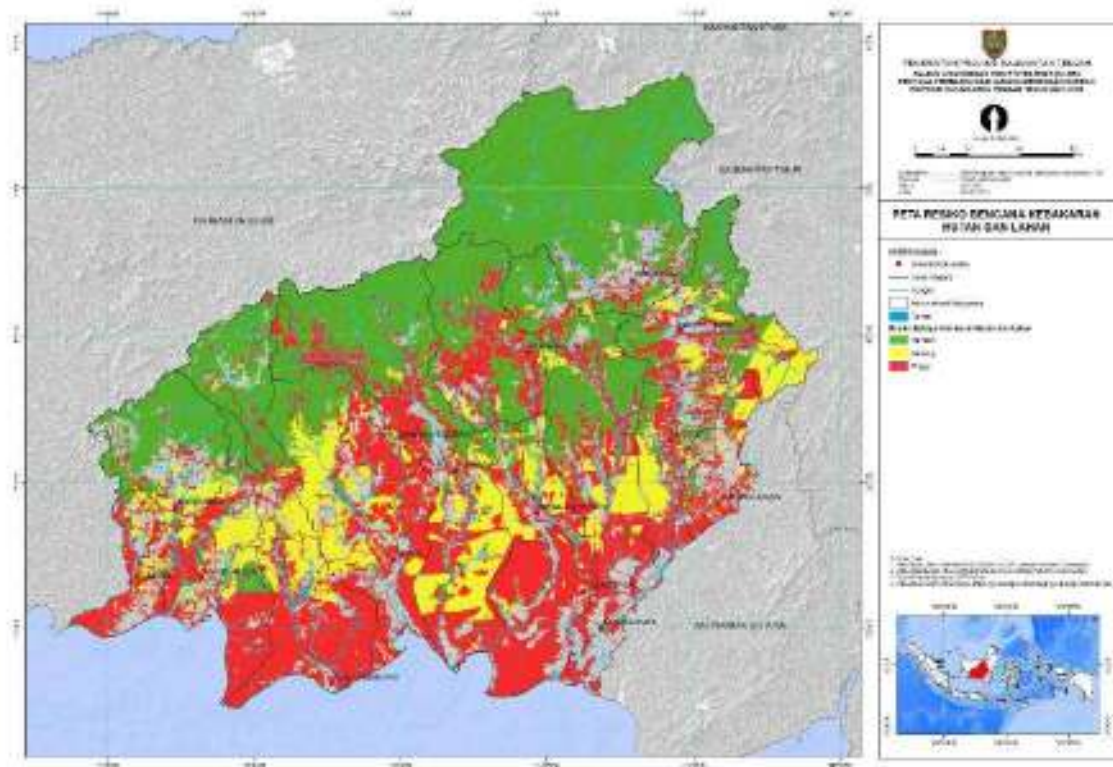


Gambar 3-77 Distribusi dan Persentase Resiko Kebakaran Hutan dan Lahan

Berdasarkan data dari KLHK (<http://sipongi.menlhk.go.id/>) luas areal terbakar di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015 seluas 583.833,44 Ha, tahun 2016 seluas



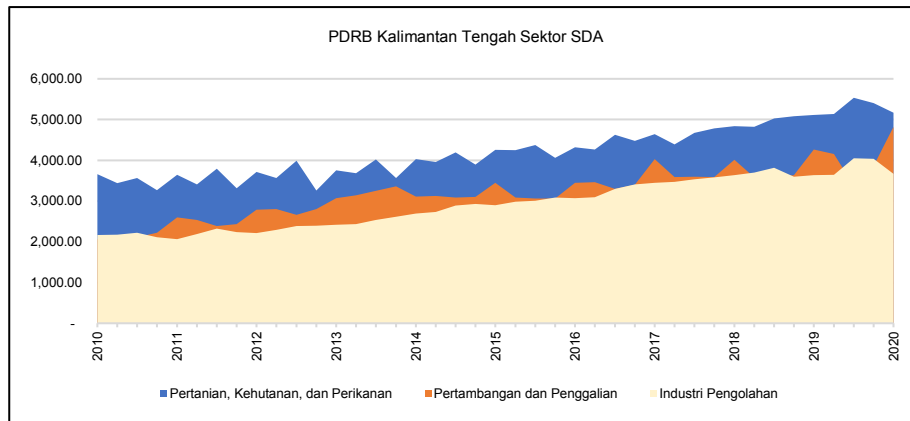
6.148,42, tahun 2017 seluas 1.743,82 Ha, tahun 2018 seluas 47.32,57 Ha, tahun 2019 seluas 317.749 Ha dan Tahun 2020 seluas 1.564,00 Ha.



Gambar 3-78 Peta Resiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan

3.3.4. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

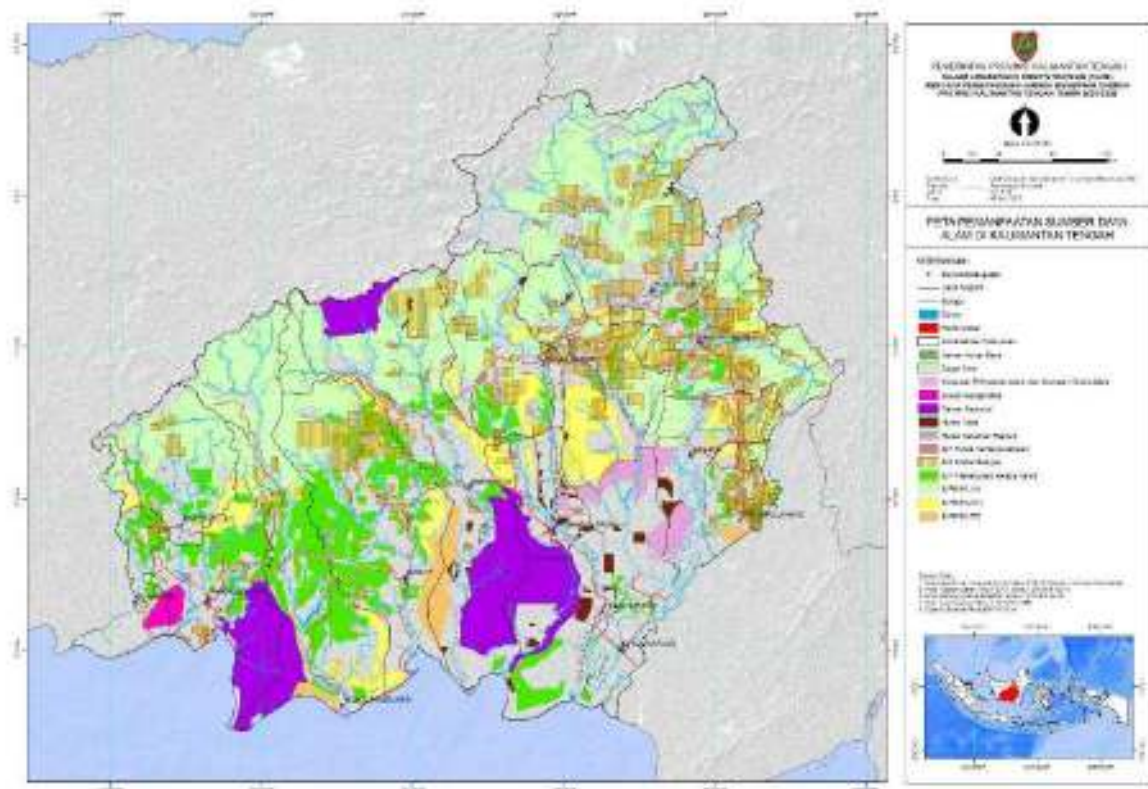
Lahan merupakan bagian dari bentang lahan (landscape) yang meliputi lingkungan fisik, termasuk di dalamnya iklim, topografi/relief, hidrologi tanah dan keadaan vegetasi alami yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Secara garis besar penggunaan lahan dapat dikelompokkan menjadi: ladang, tegalan, sawah, perkebunan, sarana perhubungan, hutan, industri, permukiman dan penggunaan lainnya. Pada umumnya, penetapan penggunaan lahan didasarkan pada karakteristik lahan dan daya dukung lingkungannya. Bentuk penggunaan lahan yang ada dapat dikaji melalui proses evaluasi sumber daya lahan, sehingga dapat diketahui potensi sumber daya lahan untuk berbagai penggunaannya. Pengelolaan lahan yang ramah lingkungan dan penyusunan tata ruang yang tepat, dapat mengurangi. Faktor pemicu pemanfaatan SDA yang cukup besar di Kalimantan Tengah karena masih tingginya ketergantungan PDRB pada sektor SDA.



Gambar 3-79 PDRB Prov. Kalteng 2010-2020

Penelaahan lebih jauh menunjukkan bahwa lapangan usaha dominan yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah adalah pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; pertambangan dan penggalian. Faktor pemicu lain adalah pembangunan akses infrastruktur jalan baik oleh pemerintah maupun usaha perkebunan, pertambangan dan kehutanan. Sebagai daerah yang sedang berkembang, maka kebutuhan infrastruktur jalan merupakan hal yang paling utama.

Terbukanya akses jalan akan mempercepat perubahan tutupan lahan di kiri dan kanan jalan. Penguasaan lahan oleh masyarakat semakin meningkat. Penguasaan lahan oleh masyarakat di kiri dan kanan jalan umumnya diperuntukkan sebagai lahan pertanian/kebun untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.



Gambar 3-80 Peta Pemanfaatan Sumber Daya Alam



Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 833/KPTS/SR.020/M/12/2019 Tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan luas tutupan kelapa sawit Indonesia Tahun 2019, luas lahan sawit di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.778.702 Ha, atau 10,86 % dari total tutupan kelapa sawit Nasional.

Berdasarkan data terdapat 259 Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah beroperasi maupun yang baru mendapat izin lokasi. Saat ini masih terdapat permasalahan di sektor perkebunan, yaitu mengenai status kawasan. Masih banyak perusahaan beroperasi di kawasan Hutan dan belum melakukan proses pelepasan kawasan hutan maupun tukar menukar kawasan hutan. Hal ini disebabkan dasar perizinan yang diterbitkan pada waktu itu mengacu pada RTRWP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2003. RTRWP ini dikemudian hari dibatalkan oleh Kementerian Kehutanan dan untuk status kawasan hutan mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 292/Menhut-II/2011 Tanggal 31 Mei 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.168.656 (Satu Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Enam) Hektar, Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 689.666 (Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Enam) Hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 29.672 (Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Dua) Hektar di Provinsi Kalimantan Tengah. SK ini kemudian mengalami beberapa perubahan terakhir diperbaharui dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.8108/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah Sampai Dengan Tahun 2017.

Sampai dengan tahun 2019, luas total pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit yang telah diberikan oleh KLHK di wilayah Kalimantan Tengah seluas 1.214.747,33 Ha. Terkait hal tersebut di atas, maka saat ini masih banyak kegiatan perkebunan berada di Kawasan Hutan Produksi, dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi.

Seiring dengan pertumbuhan perkebunan kelapa sawit, maka industri pengolahan atau PKS di Provinsi Kalimantan Tengah semakin meningkat. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit yang mengolah tandan buah segar menjadi Crude Palm Oil (CPO) pada umumnya paralel dengan tumbuhnya perkebunan besar swasta.

Hingga tahun 2019, telah terbangun 104 pabrik pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) yang tersebar di 10 kabupaten di Kalimantan Tengah. Total kapasitas terpasang dari seluruh pabrik pengolahan CPO tersebut adalah 6.488 ton TBS per jam. Disamping itu telah beroperasi 2 unit pengolahan CPO (Minyak goreng/CPO refinery) yang berada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur dengan kapasitas terpasang 3.000 ton CPO per jam.

Selain sektor perkebunan, kegiatan lain yang memberikan tekanan terhadap perubahan tata guna lahan adalah kegiatan pertambangan. Berdasarkan data dari <https://modi.minerba.esdm.go.id/>, jumlah usaha pertambangan dengan status Clear and Clean (Cn) di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

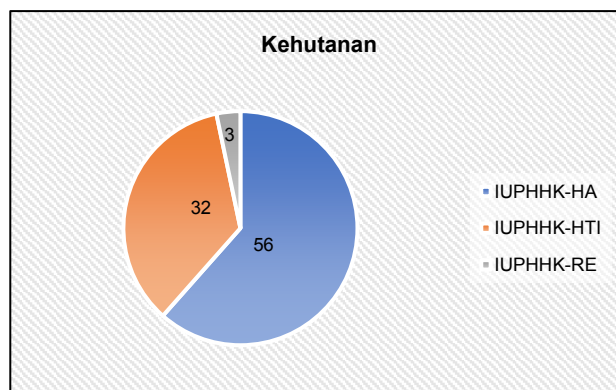


Gambar 3-81 Jumlah Perusahaan Berstatus CnC (data diolah)

Total luas IUP untuk seluruh perusahaan di atas, adalah 2.637.391,98 Ha. Lokasi kegiatan umumnya berada di bagian utara wilayah Kalimantan Tengah.

Untuk mendukung kegiatan pertambangan ini sebagian besar membangun jalan koridor untuk pengangkutan batubara dari lokasi tambang ke lokasi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) atau Terminal Khusus (Tersus) yang sebagian besar berada di pinggir Sungai Barito. Keberadaan jalan ini menyebabkan penguasaan lahan oleh masyarakat di kiri dan kanan jalan semakin tidak terkendali.

Tekanan lain terhadap perubahan tata guna lahan adalah kegiatan di sektor Kehutanan terutama IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI. Berdasarkan data dari KLHK Tahun 2019 jumlah IUPHHK-HA di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 56 perusahaan aktif dengan total luas areal yang diberikan seluas 3.976.219,67 Ha, IUPHHK-HTI sebanyak 32 perusahaan dengan luasan total 865.035,00 Ha dan IUPHHK-RE sebanyak 3 perusahaan dengan total 164.926,00 Ha. Khusus untuk kegiatan IUPHHK-RE berdampak positif terhadap kondisi tutupan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, karena sifatnya non eksploitasi. Sebagian besar kegiatan IUPHHK-HA berada di bagian utara wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagian besar kegiatan disektor kehutanan tumpang tindih dengan kegiatan pertambangan.





Berbagai kegiatan investasi di Sektor Perkebunan, Pertambangan dan Kehutanan serta aktifitas masyarakat menyebabkan tekanan terhadap laju perubahan tutupan lahan di Kalimantan Tengah. Hasil analisis spasial terhadap perubahan tutupan lahan dari Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3-54 Perubahan Tutupan Lahan 2018-2019

No	Kode	Tutupan Lahan	Luas (Ha) Tahun 2018	Luas (Ha) Tahun 2019	Selisih
1	2001	Hutan Lahan Kering Primer	1.076.598,77	1.071.096,60	(5.502,17)
2	2002	Hutan Lahan Kering Sekunder	4.397.265,72	4.253.598,22	(143.667,50)
3	2004	Hutan Mangrove Primer	1.649,49	1.735,77	86,29
4	2005	Hutan Rawa Primer	33.238,09	32.373,63	(864,45)
5	2006	Hutan Tanaman Industri (HTI)	125.509,05	169.868,90	44.359,85
6	2007	Semak/Belukar	1.181.696,19	1.161.323,02	(20.373,17)
7	2010	Perkebunan	1.777.341,56	1.923.753,12	146.411,56
8	2012	Permukiman	70.179,35	73.039,66	2.860,31
9	2014	Tanah Terbuka	367.797,33	310.604,38	(57.192,95)
10	20041	Hutan Mangrove Sekunder	24.489,25	22.679,20	(1.810,05)
11	20051	Hutan Rawa Sekunder	1.706.773,44	1.699.040,74	(7.732,70)
12	20071	Semak/Belukar Rawa	2.041.422,21	2.078.762,70	37.340,49
13	20091	Pertanian Lahan Kering	383.163,78	461.020,61	77.856,83
14	20092	Pertanian Lahan Kering Bercampur dgn Semak	1.442.748,13	1.472.516,78	29.768,65
15	20093	Sawah	228.672,23	150.757,64	(77.914,60)
16	20094	Tambak	8.654,58	11.409,29	2.754,71
17	20121	Bandara/Pelabuhan	0,0008036	0	(0,00)
18	20122	Transmigrasi	27.336,55	17.528,87	(9.807,67)
19	20141	Pertambangan	125.643,20	128.666,71	3.023,51
20	50011	Tubuh Air	191.948,98	191.948,98	-
21		Awan	19.596,93	-	(19.596,93)

Sumber : Analisis Spasial Tutupan Lahan Tahun 2018 dan Tahun 2019

3.3.5. Kerentanan Perubahan Iklim

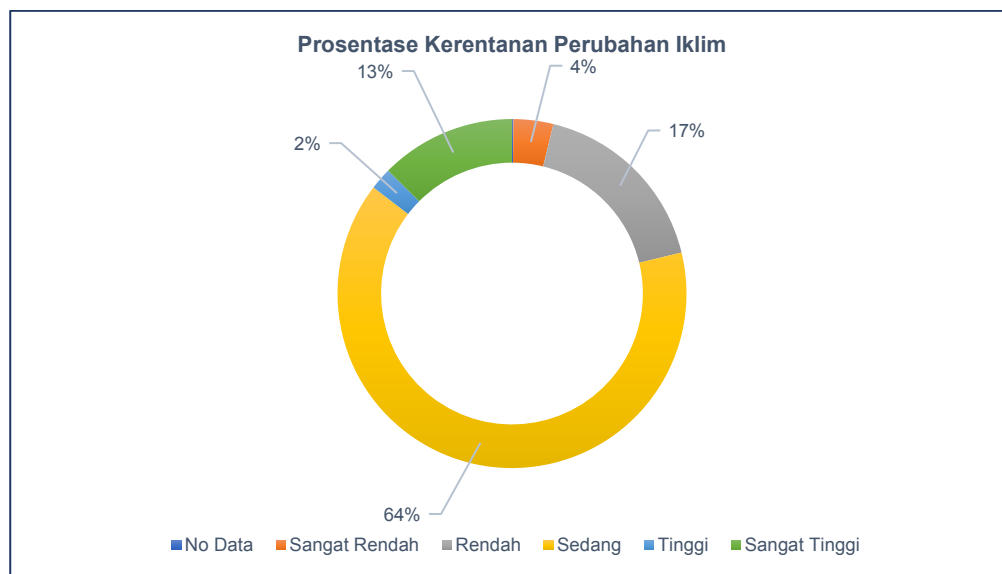
Kerentanan adalah keadaan atau kondisi yang dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi bahaya atau ancaman bencana. Kerentanan (*vulnerability*) juga didefinisikan sebagai derajat atau tingkat kemudahan terkena atau ketidakmampuan untuk menghadapi dampak buruk dari perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan iklim ekstrim (Klijk, 2016). Tinggi rendahnya tingkat kerentanan ini ditentukan oleh tingkat sensitivitas, tingkat keterpaparan dan kemampuan adaptasi. Tingkat kerentanan suatu wilayah akan menentukan tingkat risiko bencana wilayah tersebut sehingga dalam proses perencanaan suatu wilayah dibutuhkan suatu kajian terkait risiko bencana yang ditentukan oleh tingkat kerentanannya.

Dampak terhadap pemanasan global adalah terjadinya perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kondisi ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS). Degradasi DAS menyebabkan ekosistem tidak dapat optimal menyediakan fungsi dan jasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kondisi ini menyebabkan penurunan



tingkat kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan tingkat kerentanan masyarakat

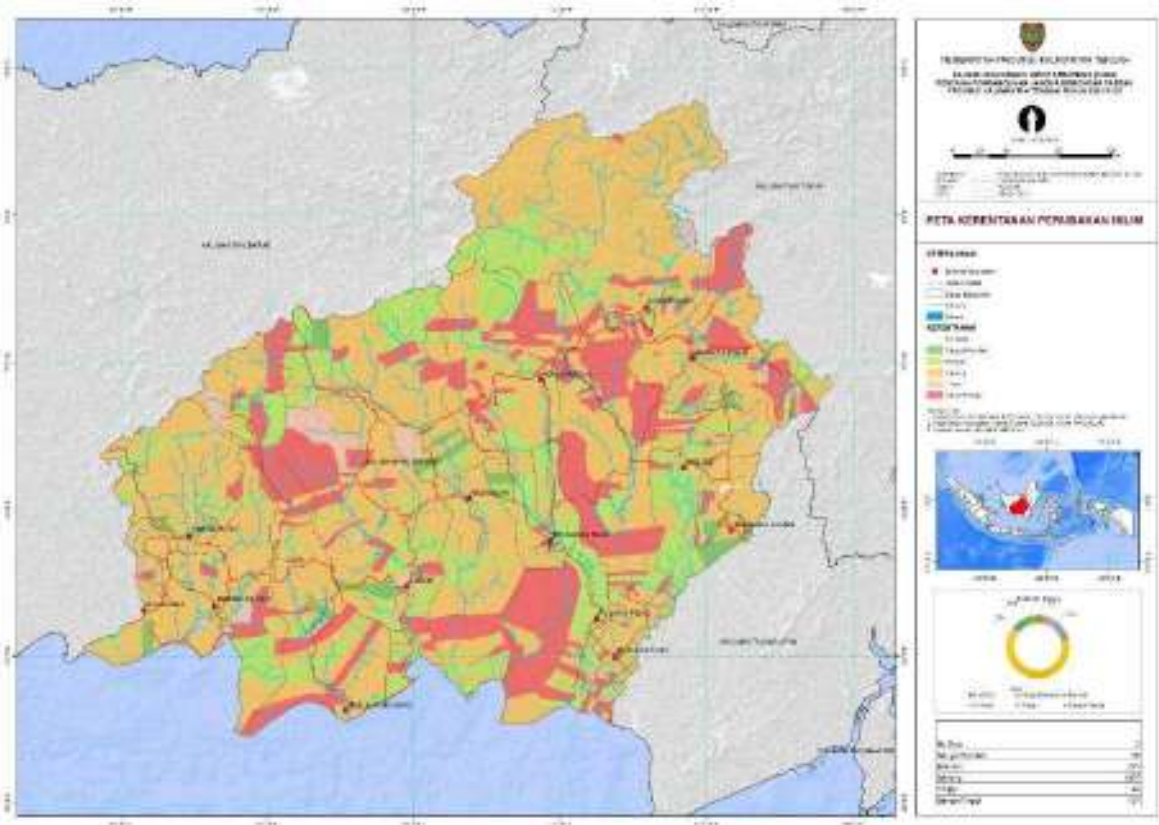
Dalam adaptasi perubahan iklim, tahap analisis dan identifikasi tingkat kerentanan merupakan langkah penting dalam menentukan prioritas lokasi dan jenis tindakan adaptasi. Menyadari pentingnya tahapan tersebut, Kementerian LHK telah mengembangkan suatu sistem yang dapat mengeluarkan informasi berupa indeks tingkat kerentanan dengan satuan analisis terkecil desa. Sistem tersebut dinamakan SIDIK (Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan). SIDIK dikembangkan agar konsep kerentanan dapat digunakan secara praktis dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 3-82 Kerentanan Perubahan Iklim

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa 64% Desa di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tingkat kerentanan Sedang, sebanyak 2% Desa memiliki tingkat kerentanan Tinggi, serta sebanyak 13% memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi. Cukup banyaknya desa yang memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim yang tinggi dan sangat tinggi, maka diperlukan perhatian khusus dalam upaya mitigasi dan adaptasi, sehingga dampak dari perubahan iklim tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya melalui program kampung iklim.

Guna mengantisipasi hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 36 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Program Kampung Iklim.



Gambar 3-83 Peta Kerentanan Perubahan Iklim

3.3.6. Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati dapat diterjemahkan sebagai semua makhluk yang hidup di bumi, termasuk semua spesies tumbuhan, binatang dan mikroba. spesies-spesies didalam keanekaragaman hayati saling berhubungan dan membutuhkan satu dengan yang lainnya untuk tumbuh dan berkembang sehingga membentuk suatu sistem kehidupan. Para ilmuwan sepakat mengelompokkan keanekaragaman hayati menjadi tiga kategori, yaitu keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetika. keanekaragaman hayati merupakan komponen penting dalam keberlangsungan bumi dan isinya, termasuk eksistensi manusia. berbagai jasa dan layanan keanekaragaman hayati sudah dimanfaatkan sejak manusia ada, mulai dari sebagai sumber pangan, obat-obatan, energi dan sandang, jasa penyedia air dan udara bersih, perlindungan dari bencana alam, hingga regulasi iklim. keanekaragaman hayati juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk perkembangan sosial, budaya dan ekonomi.

Kalimantan Tengah memiliki kekayaan keanekaragaman hayati hutan rawa gambut yang mempunyai peranan penting bagi gudang plasma nutfah dan beberapa di antaranya bersifat endemik (Hastuti et al., 2014). Spesies tumbuhan yang tumbuh di areal rawa gambut sangat spesifik dan beberapa spesies di antaranya mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, baik dari hasil kayunya maupun hasil non kayu seperti tumbuhan berkhasiat obat. Beberapa jenis tumbuhan berguna yang mendominasi kawasan tersebut seperti kempas (*Koompassia malaccensis* Benth.),



medang (*Neoscortechinia kingii* [Hook.f.] Pax & K. Hoffm.), meranti rawa (*Shorea teysmanniana* Dyer ex Brandis), kedondong (*Santiria apiculata* A.W. Benn.), nyatoh (*Palaquium leiocarpum* Boerl.), bintangur (*Calophyllum* spp.), dan pasir-pasir (*Stemonurus scorpioides* Becc). Selain itu, juga terdapat 310 spesies tumbuhan obat di Taman Nasional Tanjung Puting dan Sungai Sebangau yang digunakan oleh masyarakat setempat (Zainuddin, 2009). Kemudian juga, ditemukan 74 spesies tumbuhan berkhasiat obat yang digunakan oleh etnis Dayak Kaharingan di hutan rawa gambut Riam Durian Kalimantan Tengah dan 56 jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan etnis Dayak Manyan Kalimantan Tengah (Noorcahyati et al., 2012; Purwaningsih, 2011).

Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan obat, bumbu, minuman, dan kosmetik guna menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup sudah sejak lama dilakukan oleh masyarakat. Pemanfaatan tersebut karena tumbuhan banyak mengandung berbagai zat alami yang dapat meningkatkan kesehatan dan mencegah berbagai macam penyakit (Pratap et al., 2013). Menurut Zuhud (2009), setiap individu dari populasi tumbuhan yang tumbuh secara alami di masing-masing tipe ekosistem hutan merupakan suatu unit terkecil dari pabrik alami yang melakukan proses metabolisme sekunder yang menghasilkan beragam bahan bioaktif yang khas dan berpotensi sebagai obat, sehingga pemanfaatan tumbuhan untuk pengobatan dan pencegahan penyakit semakin meningkat. Di sisi lain, jumlah spesies tumbuhan berkhasiat obat yang ada di Indonesia sampai saat ini belum diketahui secara pasti, maka diperlukan pendokumentasian secara menyeluruh terhadap penggunaan tumbuhan sebagai bahan baku pengobatan (Hidayat dan Hardiansyah, 2012). Kecenderungan pengobatan dengan menggunakan bahan baku dari alam atau pengobatan herbal sedang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Namun, pemanfaatan tersebut harus sesuai dengan daya dukung, karakteristik, dan fungsinya serta harus diimbangi dengan kesadaran akan potensi tumbuhan obat yang ada di kawasan hutan rawa gambut. Banyaknya spesies tumbuhan berkhasiat obat yang digunakan perlu mendapat perhatian, karena populasinya di alam mengalami penurunan drastis akibat eksploitasi yang tidak mengutamakan kelestarian (Galingging, 2007). Dari tahun ke tahun keanekaragaman jenis tumbuhan obat yang dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan rawa gambut Kalimantan Tengah mengalami penurunan drastis (Purwaningsih, 2011). Pada dasarnya bagian tumbuhan yang paling banyak digunakan oleh etnis dayak Kalimantan Tengah dalam pengobatan adalah bagian akar (Noorcahyati et al., 2012). Hal inilah yang menyebabkan tekanan dan ancaman terhadap keberadaan tumbuhan obat semakin besar, maka perlu diketahui status konservasi spesies-spesies tumbuhan tersebut, agar dalam pemanfaatannya dapat diimbangi dengan upaya konservasi. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menemukan spesies tumbuhan yang memiliki potensi sebagai bahan baku obat yang dapat dikembangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status konservasi spesies tumbuhan obat, khususnya yang berhubungan dengan struktur, komposisi, dan keanekaragaman

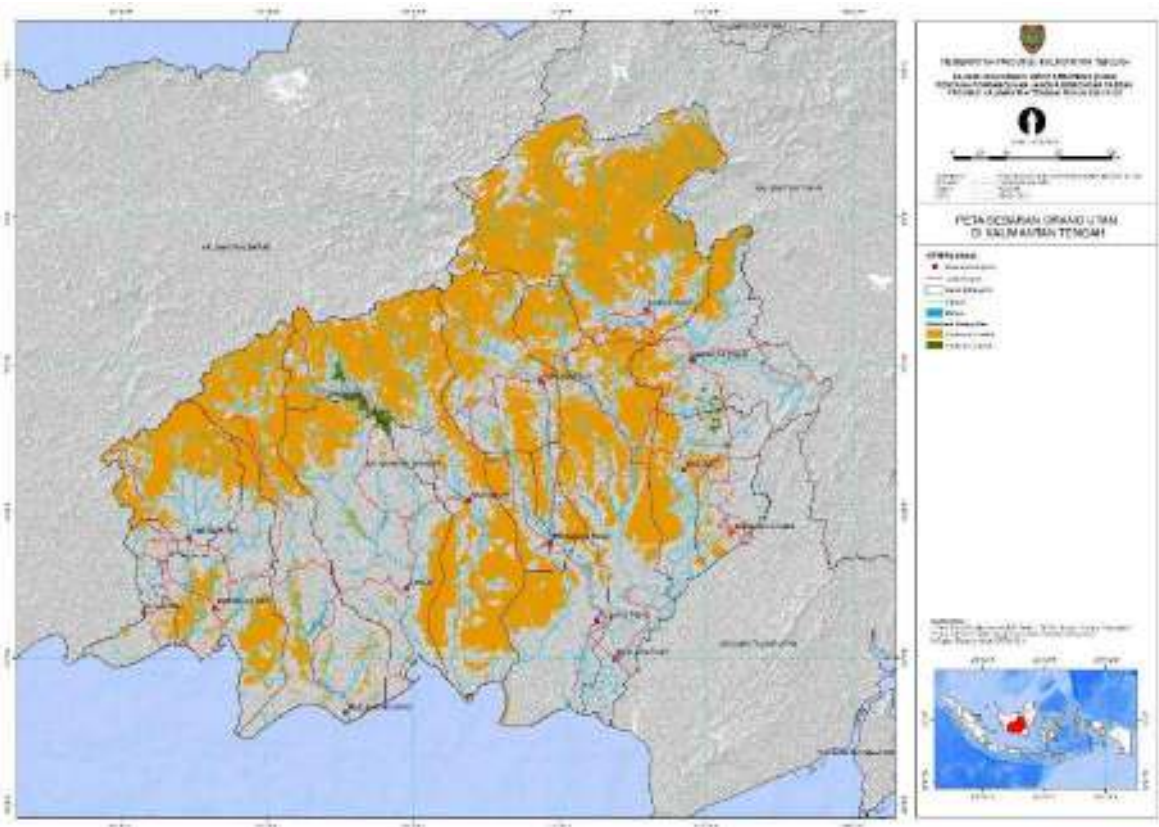
Hasil penelitian di Taman nasional terdapat beberapa mamalia endemik yang dilindungi. Mamalia merupakan salah satu kelas dalam kerajaan Animalia yang memiliki beberapa keistimewaan baik dalam hal fisiologi maupun susunan saraf dan tingkat intelegensianya sehingga taksa ini memiliki sebaran hidup yang luas. Salah satu sebaran mamalia terbanyak di dunia terdapat di Indonesia. Kekayaan jenis



mamalia di Indonesia mencapai 515 jenis dan 36% diantaranya endemik Indonesia. Dari bangsa primata, terdapat 36 jenis dan 18% diantaranya endemik Indonesia. Kekayaan jenis mamalia di pulau-pulau besar seperti Kalimantan lebih besar daripada pulau-pulau kecil lainnya. Hal ini sejalan dengan teori biogeografi pulau yang menyatakan bahwa jumlah spesies yang terdapat di suatu pulau akan ditentukan oleh luas pulau dan angka imbang antara kepunahan lokal dan migrasi. Saat ini Kalimantan memiliki 222 jenis mamalia dan 44 jenis diantaranya endemik. Jenis primata endemik diantaranya adalah orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*), owa-owa (*Hylobates agilis*), dan bekantan (*Nasalis larvatus*). Salah satu lokasi yang masih mendukung keberadaan primata tersebut adalah Taman Nasional Sebangau.

Berdasarkan data dari wwf terhadap keberadaan orang utan (*Pongo pygmaeus*) tersebar di TN Sebangau dan TN Tanung Puting serta dibagian utara wilayah Kalimantan Tengah. Keberadaannya hampir tersebar di 14 Kabupaten Kota, dengan sebaran terluas berada di Kabupaten Murung Raya, Katingan , Gunung Mas, Seruyan dan Lamandau.

UCN Redlist memasukkan orangutan kalimantan dalam status endangered (terancam) sejak tahun 1994. Sedangkan CITES memasukkannya dalam daftar Apendiks I yang berarti tidak boleh diperdagangkan. Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan spesies ini sebagai satwa yang dilindungi. Hal ini disebabkan populasi orangutan kalimantan yang semakin hari mengalami penurunan akibat dari rusaknya habitat (kerusakan hutan), kebakaran hutan, pembalakan hutan, menciutnya luas hutan, serta perburuan dan perdagangan liar.



Gambar 3-84 Peta Sebaran Orang Utan (*Pongo pygmaeus*)

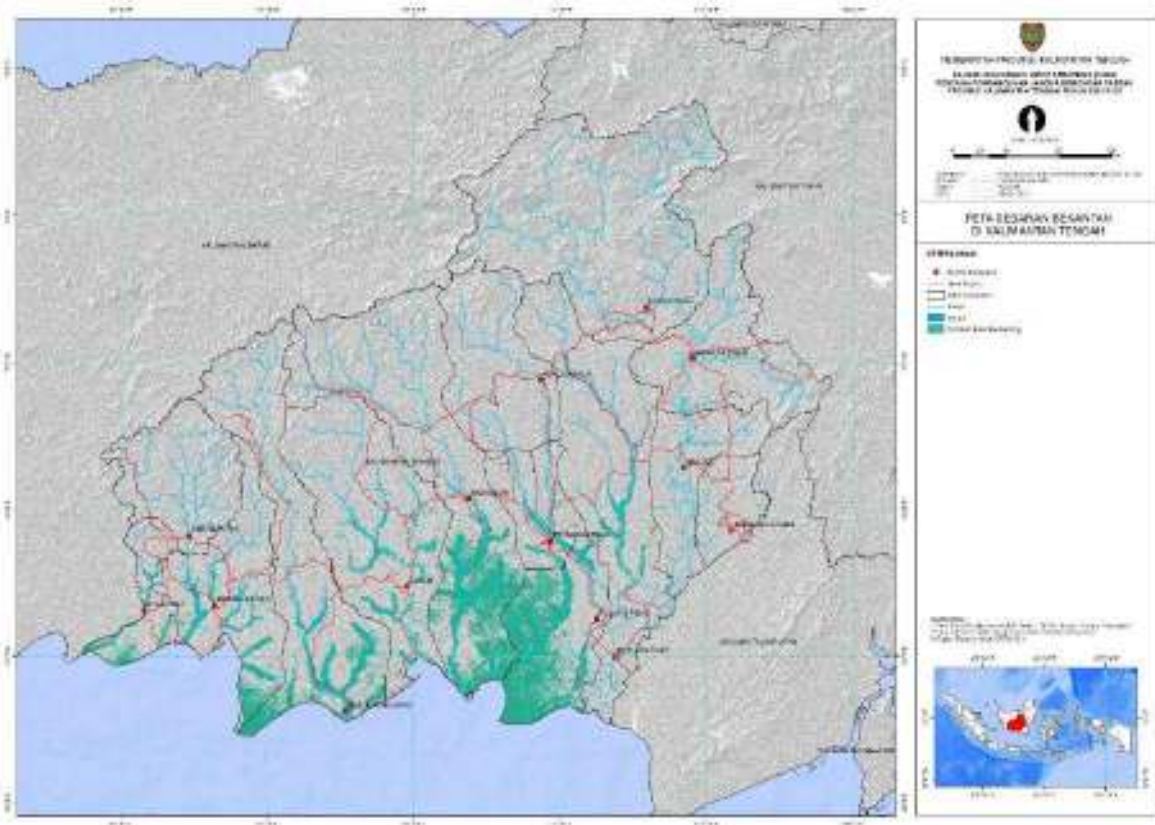


Selain orang utan terdapat lagi satwa endemik yang langka yaitu Bekantan (*Nasalis larvatus*). Habitat bekantana bervariasi, yaitu di hutan mangrove, rawa gambut, hutan tepi sungai (Salter et al. 1985, Matsuda et al. 2010), hutan Dipterocarpaceae, hutan kerangas (Salter et al. 1985, hutan rawa gelam, hutan karet dan hutan bukit kapur/karst (Soendjoto 2005, Soendjoto et al. 2006). Namun demikian, populasi bekantana dinyatakan terancam punah karena wilayah sebarannya yang terbatas, hanya di Borneo.

Bekantan (*Nasalis larvatus*) merupakan salah satu primata endemik Kalimantan yang dilindungi di Indonesia berdasarkan UU Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam No. 5 tahun 1990. Bahkan secara internasional bekantana termasuk dalam CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) Appendix I, yaitu satwa yang secara internasional tidak boleh diperdagangkan (Gron, 2009 dalam Atmoko, 2010). Spesies ini terdaftar sebagai satwa terancam punah karena telah mengalami penurunan populasi di seluruh lokasi sebarannya akibat dari perburuan yang berkelanjutan dan perusakan habitat terus menerus. Angka penurunannya lebih dari 50% (tapi kurang dari 80%), selama 3 generasi terakhir, sehingga sejak tahun 2000 statusnya dalam daftar Red Book of Endangered Species IUCN (International Union for the Conservation of Nature and Nature Resources) meningkat dari vulnerable menjadi endangered, yaitu jenis yang terancam punah (Meijaard et al., 2008 dalam Atmoko, 2010). Siapa yang tidak mengenal mascot dunia fantasi, dengan hidung mancung dan bulu keemasannya spesies yang dikenal dengan sebutan "Monyet Belanda" ini memang selalu memamerkan keeksotisannya ketika kita memasuki kawasan TN Sebangau.

Pada umumnya bekantana satwa endemik Kalimantan menyukai habitat hutan lahan basah yaitu di hutan mangrove, hutan rawa gambut. Bekantana hidup secara berkelompok dimana satu kelompok terdiri dari 5-22 individu tergantung ketersediaan pakan pada habitat bekantana tersebut. Sebagai salah satu kawasan pelestarian alam di Kalimantan Tengah, Taman Nasional Sebangau yang diapit oleh dua sungai besar yaitu Sungai Katingan dan Sungai Sebangau, merupakan salah satu habitat bekantana yang terdapat di Kalimantan selain di TN Tanjung Puting. Keberadaan spesies ini di kawasan TN Sebangau hanya dapat dijumpai di beberapa titik yaitu di Sungai Bulan dan sungai Musang. Sedangkan di sungai Sebangau keberadaan dari bekantana jarang dijumpai.

Hasil inventarisasi bekantana yang dilakukan oleh Tenaga Fungsional Balai TN Sebangau di Sungai Bulan dan Sungai Musang pada tahun 2013 di peroleh jumlah populasi bekantana ± 116 ekor bekantana (BTNS, 2010) dengan luas plot sampel 40 ha. Distribusi dan sebarannya bekantana di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar 3-39.



Gambar 3-85 Peta Sebaran Bekantan (*Nasalis Larvatus*)

3.4. Kondisi Keuangan Daerah

Gambaran keuangan daerah mencakup kinerja keuangan daerah serta kinerja keuangan daerah dalam pencapaian indikator TPB. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 disebutkan bahwa KLHS RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) ke dalam dokumen RPJMD. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs).

Tujuan adanya TPB, untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Pemetaan Indikator Capaian Rencana Pembangunan terhadap Target TPB, dilakukan dengan membandingkan Target dan Indikator TPB terhadap realisasi capaian, target, gap/kesenjangan, dan penjelasan kesenjangan selama periode 5



tahun tahun $n-4$ s/d tahun n . Dengan melakukan analisis data dalam bentuk pemetaan indikator rencana pembangunan terhadap indikator TPB, maka dapat dilakukan kajian rencana pembangunan daerah terhadap target dan indikator TPB.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi titik tolak penyelenggaraan otonomi daerah Provinsi dan kabupaten/kota. Daerah memiliki kewenangan yang didasarkan pada asas otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, serta asas tugas pembantuan yang merupakan penugasan daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan.

Salah satu pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah peningkatan kemandirian pemerintahan daerah yang mempunyai implikasi langsung terhadap kemampuan keuangan daerah, sumber daya manusia, dan sumber daya alam dalam menjalankan roda pemerintahan dan kelanjutan pembangunan. Pemerintah Daerah adalah ujung tombak pelaksanaan pembangunan daerah karena lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya. Hasil dari pelaksanaan pembangunan berbasis otonomi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan local accountability pemerintah pusat terhadap rakyatnya melalui pemerintah daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap system pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*). Salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah tersebut adalah dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Terkait dengan hal tersebut, pengelolaan keuangan daerah yang merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah adalah hal yang sangat penting dalam proses perencanaan suatu daerah secara keseluruhan. Tahapan-tahap dalam pengelolaan keuangan daerah sangat krusial dalam memulai roda pemerintahan dan pembangunan setiap tahunnya. Oleh karena itu, perwujudan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat dari pengelolaan keuangan daerah harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang terstruktur dengan baik.

Pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan, telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Perubahan ini terkait dengan paket undang-undang keuangan negara yang dimulai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan sampai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dari paket undang-undang keuangan negara tersebut, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan



Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam tataran teknis, telah terbit Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Selama kurun waktu tahun 2010 sampai dengan 2015, proses perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah telah mengalami kemajuan yang cukup berarti setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah maupun program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada periode di setiap tahun tersebut. Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap total pendapatan daerah. Kesenambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.

3.4.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai ketentuan pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah. Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016-2020 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020.



3.4.2. Perkembangan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 50 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan pendapatan yang merupakan otoritas daerah dimana pelaksanaannya diorientasikan dan berbasis kepada potensi daerah, oleh karenanya PAD sering dijadikan parameter kemandirian fiskal suatu daerah dalam aspek kemampuan keuangan daerahnya. Peningkatan PAD pada dasarnya adalah merupakan upaya internal suatu daerah untuk memperkecil celah fiskal (fiscal gap). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya menjadikan komponen PAD sebagai sumber dana yang terus ditingkatkan penerimaannya guna lebih memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta menciptakan kemandirian daerah dalam pembiayaannya. Oleh karena itu pemerintah daerah selalu dan terus meningkatkan hasil PAD setiap tahunnya dalam rangka mendukung sektor belanja APBD untuk memenuhi berbagai kebutuhan pemerintah dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan diluar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Reformasi peraturan perundang-undangan sudah memberikan perubahan yang mendasar, hal ini dapat kita cermati pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Di dalam Undang-Undang tersebut mengubah sistem yang semulanya *open list* menjadi *close list*. Pemerintah Daerah hanya dapat melakukan



pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut. Kebijakan Pemerintah Pusat melalui Undang-Undang memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dengan memperluas *coverage* Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam hal kewenangan penetapan tarif. Dalam hal pengawasan pungutan daerah telah diubah dari represif menjadi preventif yaitu setiap Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan pungutan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Terhadap pungutan tersebut sesuai amanat Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat kewajiban Pemerintah Provinsi untuk membagikan sebagian perolehan pungutan Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Di sisi lain, Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sedangkan jenis pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, milik pemerintah/BUMN dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan multiplier effect yang besar. Pendapatan dari jenis ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup antara lain: Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMD, Laba Atas Penyertaan Modal pada BUMN dan Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini antara lain: Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir termasuk



didalamnya Pendapatan atas layanan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).

Selanjutnya, Dana perimbangan sesuai ketentuan pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dana Bagi Hasil menurut Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Umum menurut Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus menurut Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Alokasi target pendapatan Dana Perimbangan baik Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum serta Dana Alokasi Khusus setiap tahun mempedomani Peraturan Presiden tentang Rincian APBN. Sedangkan terkait pelaksanaannya mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kelompok Pendapatan Daerah yang terakhir adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sesuai ketentuan pada Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Analisa kinerja pendapatan daerah guna menyajikan kemampuan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, serta sebagai salah satu dasar dalam merencanakan dalam peningkatan pendapatan daerah diperiode mendatang. Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2016-2020 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3-55 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

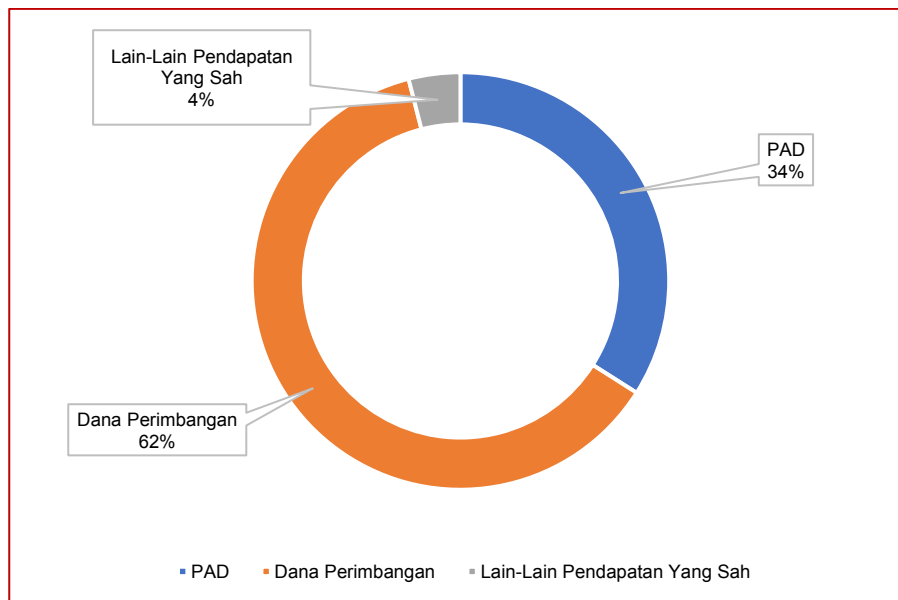
No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	PENDAPATAN DAERAH	3.548.504.778.636	4.098.485.315.188	4.678.157.675.828	4.990.195.455.012	4.767.014.514.749,24	8
	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.158.303.928.014	1.342.330.618.783	1.616.521.660.227	1.776.231.952.739	1.570.137.570.176,27	9
	Hasil Pajak Daerah	941.491.437.531	1.091.749.859.254	1.354.700.323.529	1.438.977.522.676	1.243.223.219.389,33	8
	Hasil Retribusi Daerah	10.680.537.670	11.521.593.491	12.549.086.070	41.568.852.809	14.374.692.453	46
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	44.908.111.542	54.057.990.742	64.096.645.397	78.920.997.801	79.366.317.748	16
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	161.223.841.271	185.001.175.296	185.175.605.231	216.764.579.453	233.173.340.585,94	10
2	DANA PERIMBANGAN	1.878.977.521.255	2.588.405.454.988	2.904.070.685.822	3.173.404.284.485	3.103.450.065.809	14
	Bagi Hasil Pajak	200.298.531.200	123.267.890.609	142.143.740.862	121.270.799.919	143.899.478.029	-5
	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	142.581.088.930	249.170.061.881	440.616.398.456	486.695.632.798	441.819.113.594	38
	Dana Alokasi Umum	1.294.850.243.000	1.574.382.856.000	1.574.382.856.000	1.603.623.745.000	1.439.305.729.000	3
	Dana Alokasi Khusus	241.247.658.125	641.584.646.498	746.927.690.504	961.814.106.768	1.078.425.745.186	56
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	511.223.329.367	167.749.241.417	157.565.329.779	40.559.217.788	26.529.493.763,97	-40
	Pendapatan Hibah	5.054.725.000	22.135.323.587	7.473.822.000	7.911.643.179	5.608.344.996,00	62
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	-	-	-	-	-	-
	Penyesuaian dan Otonomi Khusus	470.760.472.454	137.389.915.250	130.921.617.400	13.636.005.000	63.222.385.000,00	50
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	35.408.131.913	8.224.002.580	19.169.890.379	19.011.569.609	-	18

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Berdasarkan tabel 3-34 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat ditahun 2016-2019, akan tetapi mengalami penurunan dalam tahun 2020 dikarenakan terdampak oleh pandemi covid 19. Adapun rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2016-2020 ialah sebesar 8% dengan kontribusi rata-rata pertumbuhan yang paling besar dari Hasil Retribusi Daerah yaitu sebesar 46%. Adapun pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan juga sama halnya dengan realisasi pendapatan daerah. Dimana cenderung meningkat ditahun 2016-2019, akan tetapi mengalami penurunan dalam tahun 2020 dikarenakan terdampak oleh pandemi covid 19 yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 14% pada tahun 2016-2020, dimana tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 38% dan Dana Alokasi Khusus sebesar 56%.

Pertumbuhan Bagi Hasil Bukan Pajak yang paling signifikan pada tahun 2018 yaitu terjadi kenaikan sebesar Rp191.446.336.575 dari tahun 2017, komponen yang mengalami peningkatan tersebut diantaranya Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari luran Hak Pengusahaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, dan luran Eksploitasi (royalti). Untuk Dana Alokasi Khusus terjadi peningkatan sebesar 56% atau sebesar Rp 1.078425.745.186 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 241.247.658.125 hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kegiatan kesehatan, reboisasi hutan dan lahan, pendidikan dan infrastruktur daerah. Selain dari PAD dan Pendapatan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Namun Lain-Lain Pendapatan yang Sah tahun 2016-2020 rata-rata juga mengalami penurunan yang terkontraksi sebesar -46%. Penurunan tersebut terjadi pada tahun 2020, yaitu adanya penurunan pada dana insentif dikarenakan terjadinya dampak realokasi covid 19. Berikut ini disajikan gambar rata-rata proporsi realisasi pendapatan daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020:



Gambar 3-86 Rata-Rata Komposisi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

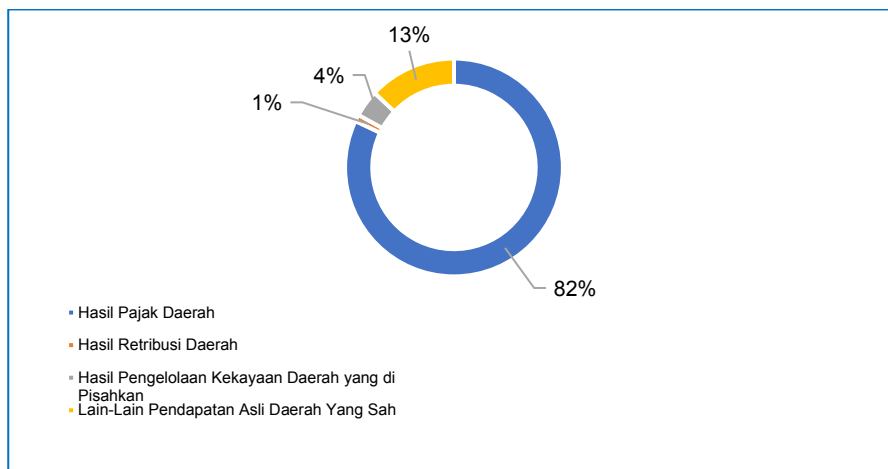
Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari



dana perimbangan yaitu sebesar 62%. Hal ini dengan proporsi PAD sebesar 34% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4% dari seluruh total pendapatan. Rincian dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

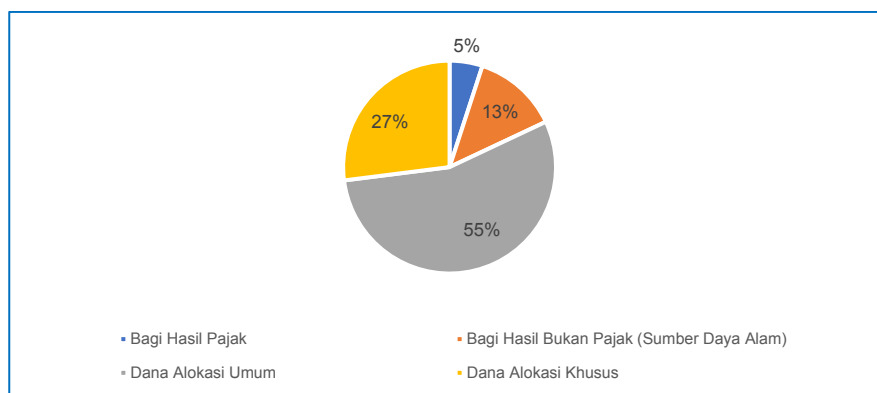
Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari Hasil Pajak Daerah yaitu sebesar 82%. Sisanya terdiri dari Hasil Retribusi Daerah sebesar 1%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar 4%, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar 13%.



Gambar 3-87 Komposisi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2016-2020

b. Dana Perimbangan

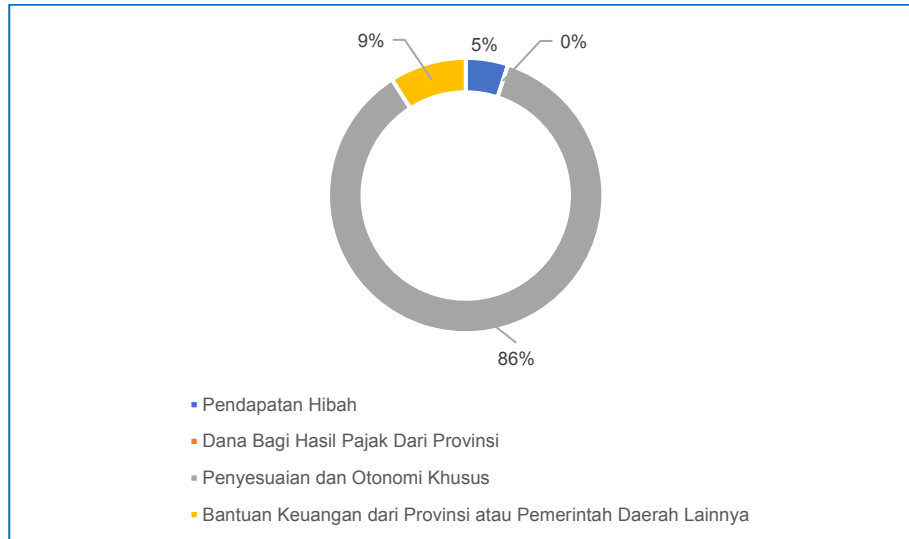
Komposisi dana perimbangan selama Tahun 2016-2020 berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 27% dan Dana Alokasi Umum sebesar 55%, sedangkan sisanya sebesar 18% merupakan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.



Gambar 3-88 Komposisi Dana Perimbangan Tahun 2016-2020

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyumbang terbesar dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar 86%. Sisanya sebesar 59% berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi/Pemerintah Daerah lainnya dan 9% adalah Pendapatan Hibah.



Gambar 3-89 Komposisi Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2016-2020

3.4.3. Perkembangan Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundangundangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada kabupaten/kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja



suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besardialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel 3-56:

Berdasarkan Tabel 3-56 diperoleh gambaran periode Tahun 2016-2020 bahwa pertumbuhan belanja mengalami pertumbuhan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10%. Peningkatan tersebut diantaranya terjadi pada komponen belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung pada periode tahun 2016-2020 mengalami kenaikan sebesar 10%. Yang mana hal ini didominasi oleh peningkatan belanja pegawai sebesar 33% dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar 106%. Adanya peningkatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa ini terlampau tinggi pada tahun 2020 dikarenakan adanya intruksi dari pemerintah pusat terkait realokasi anggaran bantuan untuk pemerintah baik kabupaten/kota dalam pemulihan dampak pandemi covid 19.

Belanja langsung pada periode tahun 2016-2020 rata-rata pertumbuhannya sebesar 12%. Dengan rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 15%. Selain itu, Belanja barang dan jasa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9% per tahun. Selanjutnya Belanja modal terjadi pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 17% per tahun, belanja modal pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp 495.148.829.664 dibandingkan dengan tahun 2017. Beberapa komponen belanja modal pada tahun 2017 mengakibatkan peningkatan akibat adanya peningkatan pada belanja modal bangunan gedung serta jalan dan irigasi. Akan tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 185.272.911.191 dibandingkan pada tahun 2019.

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, kemampuan keuangan daerah dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara. Pengkategorian kemampuan keuangan daerah terbagi atas:

- a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Kemampuan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 3-46.



Tabel 3-56 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	BELANJA DAERAH	3.174.705.762.281	3.686.889.215.700	4.547.699.750.660	5.064.142.623.784	4.466.805.961.013	10
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.755.341.628.075	2.405.798.908.042	2.608.805.218.228	2.694.405.782.457	2.487.564.246.700	10
	Belanja Pegawai	502.777.468.573	1.115.423.441.290	1.168.696.271.285	1.172.914.197.451	1.236.919.219.443	33
	Belanja Bunga	102.500.000	-	-	-	-	
	Dana Subsidi	1.163.230.000	1.161.023.500	1.151.976.000	1.122.859.000	0	-26
	Belanja Hibah	704.035.182.614	684.235.048.521	679.353.706.741	746.052.446.211	1.028.723.379.193	11
	Belanja Bantuan Sosial	33.651.796.492	38.591.643.750	60.532.774.050	18.745.781.594	19.463.170.207	2
	Belanja bagi hasil kepada Propinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	510.062.773.526	556.674.084.24	665.060.564.912	714.590.110.368	8480.000.000	-16%
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.548.676.870	6.723.702.489	34.009.925.240	36.597.547.98	7.580.000.000	106
	Belanja Tidak Terduga	0	2.989.964.245	0	4.382.839.850	186.398.477.856	-
2	BELANJA LANGSUNG	1.419.364.134.206	1.281.090.307.658	1.938.894.532.432	2.369.736.841.327	1.995.301.714.314	12
	Belanja Pegawai	164.699.321.305	179.626.364.079	191.970.400.810	268.093.272.550	282.722.915.403	15
	Belanja Barang dan Jasa	470.800.020.131	536.218.679.910	686.530.038.289	808.068.776.442	604.276.917.768	9
	Belanja Modal	783.864.792.770	565.245.263.66	1.060.394.093.333	1.293.574.792.335	1.108.301.881.144	17

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Tabel 3-57 Kemampuan Keuangan Daerah tahun Anggaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pendapatan Umum Daerah					
1	Pendapatan asli daerah	1.158.303.928.014	1.342.330.618.785	1.616.521.660.227	1.776.231.952.739	1.570.137.570.176
2	Dana Bagi Hasil	200.298.531.200	123.267.890.609	142.143.740.862	121.270.799.919	143.899.478.029
3	Dana alokasi umum	1.294.850.243.000	1.574.382.856.000	1.574.382.856.000	1.603.623.745.000	1.439.305.729.000
Jumlah A		2.653.452.702.214	3.039.981.365.394	3.333.048.257.089	3.501.126.497.658	3.153.342.777.205
B	Belanja Daerah					
1	Belanja gaji dan tunjangan	1.294.850.243.000	649.294.581.298	649.495.472.919	666.930.218.735	675.804.063.903
2	Tambahan Penghasilan PNS	182.651.684.329	414.151.874.483	480.034.205.940	464.723.880.340	496.281.445.247
Jumlah B		2.653.452.702.214	3.039.981.365.394	3.333.048.257.089	3.501.126.497.658	3.153.342.777.205
Kemampuan keuangan daerah		1.175.950.774.885	1.976.534.909.613	2.203.518.578.230	2.369.472.398.583	1.981.257.268.055

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2016 memiliki kemampuan keuangan daerah sebesar Rp 1.175.950.774.885 Nilai tersebut termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi. Pada Tahun 2017 sebesar Rp 1.976.534.909.613 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah Tinggi. Pada Tahun 2018 sebesar Rp 2.203.518.578.230 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah Tinggi. Tahun 2019 sebesar Rp 2.369.472.398.583 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah Tinggi. Sedangkan pada Tahun 2020 sebesar Rp 1.981.257.268.055 yang berarti nilai tersebut juga termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah Tinggi.

3.4.4. Perkembangan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

- a. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
- b. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
- c. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan

Kinerja pembiayaan dilakukan dengan menganalisis komponen pembiayaan daerah, analisis tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa yang akan datang. Pada periode 2016-2020, realisasi pembiayaan daerah Provinsi Kalimantan Tengah cenderung mengalami penurunan dengan rata-rata penurunan sebesar 20%. Penurunan tersebut paling banyak disumbang pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2016 terjadi pembiayaan netto minus sebesar Rp 62.160.363.916 hal tersebut dikarenakan nilai Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran pembiayaan yang cukup besar diantaranya penyertaan modal sebesar Rp 40.009.989.866 serta adanya pembayaran pokok utang sebesar Rp 61.500.000.000.

Penerimaan pembiayaan daerah mengalami kenaikan yang signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 196%. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebelumnya yang memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 196%. Hal tersebut terjadi dikarenakan pada tahun 2018 diantaranya terjadi pelampauan pendapatan sebesar Rp 263.840.528.340, realisasi belanja dibawah pagu sebesar Rp 382.949.474.702, realisasi transfer dibawah pagu sebesar Rp 46.912.674.052 dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan dibawah pagu sebesar Rp 5.000.000.000.



Tabel 3-58 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	PEMBIAYAAN	-62.160.363.916	156.648.652.438	568.244.751.927	690.274.149.360	610.945.412.699,44	-20
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	39.349.625.950	311.638.652.438	568.244.751.927	690.274.149.360	610.945.412.699,44	196
	Sisa lebih Prerhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	39.349.625.950	311.638.652.438	568.244.751.927	690.274.149.360	610.945.412.699,44	196
	Penerimaan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-
	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	101.509.989.866	154.990.000.000	-	-	-	-
	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
	Penyertaan Modal (investasi) Daerah	40.009.989.866	154.990.000.000	-	-	-	-
	Pembayaran Pokok Utang	61.500.000.000	-	-	-	-	-
	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Berdasarkan data realisasi pada tabel 3-58, pengeluaran pembiayaan daerah tercatat pada tahun 2016-2017. Pada tahun 2017 terdapat realisasi berupa penyertaan modal (investasi) sebesar Rp154.990.000.000,00 pada PT Bank Kalimantan Tengah. Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada tabel dibawah ini yang menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

3.4.5. Neraca Daerah

Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yaitu neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas Neraca daerah menjadi salah satu laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Laporan ini memberikan informasi kepada para pemangku kebijakan daerah, tentang posisi atau keadaan aset kewajiban serta equitas.

Aset pada periode tahun 2016-2020 mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4%. Pertumbuhan aset tersebut diantaranya Komponen Aset lancar mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4%. Pertumbuhan aset lancar diantaranya disebabkan rata-rata pertumbuhan posisi kas daerah sebesar 13%, hal tersebut terjadi karena pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan pada SiLPA tahun berjalan tahun 2018 sebesar Rp 568.244.751.927 serta pada tahun 2019 sebesar Rp690.274.149.360. Akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan SiLPA yakni sebesar Rp 610.945.412.699. Komponen Piutang pendapatan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 18%. Hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2019 terjadi kenaikan yang signifikan pada komponen Piutang Lain-Lain PAD yang sah serta Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya. Pada piutang lainnya terjadi rata-rata pertumbuhannya sebesar 99% hal tersebut dikarenakan pada periode tahun 2017 terdapat koreksi nilai piutang lainnya sebesar Rp 236.976.401.453. Aset tetap Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 3%. Terdapat beberapa komponen aset yang mengalami penurunan dalam hal ini yang diantaranya tanah serta jalan, irigasi dan jaringan. Tanah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -1%, penurunan tersebut pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 terjadi pengurangan diantaranya Hibah Keluar sebesar Rp 428.874.000, Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal Tahun Berjalan sebesar Rp 407.252.800, Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Perubahan Kebijakan/Status Ditahun Berjalan sebesar Rp 184.906.400.000, dan Pengalihan Status Penggunaan sebesar Rp 400.000.000.

Jalan, irigasi dan jaringan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 2%, hal tersebut dikarenakan tahun 2019 terjadi pengurangan sebesar Rp 2.207.468.906.053



dengan rincian Hibah sebesar Rp 2.200.708.463. Reklas antar rekening pada aset tetap sebesar Rp443.150.740.971 Reklas dari aset tetap ke aset lainnya sebesar Rp5.651.436.737 Reklas ke Beban sebesar Rp 96.684.000 koreksi/penyesuaian sebesar Rp1.616.163.519.380 Reklas ke BM Tidak Menambah Aset Rp 358.052.950 dan Reklas ke Persediaan sebesar Rp 139.847.763.552. Kewajiban pada periode Tahun 2016-2020 mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi kenaikan pada utang beban sebesar Rp 317.760.447.726 serta utang jangka pendek lainnya sebesar Rp 67.702.314. Ekuitas dana pada periode tahunan 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 4%, Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 10.715.920.803.773. Nilai ekuitas akhir didapat dari penghitungan ekuitas awal ditambah atau dikurangi surplus/defisit dan dampak kumulatif perubahan. Gambaran mengenai neraca Provinsi Kalimantan Tengah disajikan dalam tabel berikut ini:



Tabel 3-59 Neraca Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
ASET						
ASET LANCAR						
Kas Di Kas Daerah	273.589.394.043	536.439.973.055	666.128.391.376	538.378.995.565	276.735.299.340	13
Kas Di Bendahara Penerimaan						
Kas Di Bendahara Pengeluaran				590.256.332		
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	38.049.258.394	31.804.778.872	18.659.002.131	33.930.446.733	60.362.374.642	26
Kas Di Bendahara FKTP						
Kas Di Bendahara BOS			706.089.068	32.863.217.775	3.844.736.884	-
Kas Yang Dibatasi Penggunaannya		2.472.440.000	4.312.840.000	5.294.437.427	5.188.883.779	-
Kas Lainnya			1.647.273	108.984.109	804.681.906	-
Setara Kas						
Piutang Pendapatan	32.470.056.963	38.258.364.453	50.605.724.445	81.077.842.806	50.255.029.479	18
Piutang Lainnya	244.459.739.835	7.141.484.392	52.052.165.059	764.274.818	466.166.718	99
Penyisihan Piutang		-5.724.572.477	-22.333.152.882	-18.666.526.190	-10.573.621.951	-
Beban Dibayar Dimuka	349.013.976	224.488.361	237.257.904	402.231.803	401.209.837	10
Persediaan	279.273.257.113	346.297.256.271	573.076.497.491	417.502.039.998	524.130.339.990	22
Jumlah Aset Lancar	865.363.816.649	956.914.212.928	1.343.446.461.865	1.092.246.201.178	911.615.100.626	4
INVESTASI JANGKA PANJANG						
ASET LANCAR						
Investasi Jangka Panjang Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	469.191.061.905	771.955.283.500	701.408.572.025	730.815.719.069	740.853.312.655	15
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen			701.408.572.025	730.815.719.069	740.853.312.655	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	469.191.061.905	771.955.283.500	701.408.572.025	730.815.719.069	740.853.312.655	15
ASET TETAP						
Tanah	2.021.255.773.392	2.021.290.873.392	2.125.041.988.492	1.944.646.878.890	1.942.707.809.590	-1
Peralatan Dan Mesin	509.910.969.084	636.116.207.664	977.218.872.264	1.182.638.189.144	1.421.474.858.048	30
Gedung Dan Bangunan	1.033.598.255.504	1.126.936.424.822	1.976.103.496.522	2.167.446.753.821	2.299.087.026.371	25



Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	6.846.162.200.80	6.846.162.200.80	7.341.939.579.833	6.053.598.799.821	727.890.147.1182	2
Aset Tetap Lainnya	21.146.254.702	55.372.259.119	93.076.441.456	144.706.303.647	167.691.287.045	75
Konstruksi Dalam Pengerjaan	200.076.972.006	236.864.786.399	520.556.678.675	930.414.053.053	353.261.624.986	39
Akumulasi Penyusutan	-2.688.407.861.243	-3.182.221.447.376	-4.302.106.313.803	-3.911.266.369.697	-4.623.320.573.409	16
Jumlah Aset Tetap	7.943.742.564.247	7.999.255.845.776	8.731.830.743.441	8.512.184.608.681	8.839.803.503.816	3
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang	2.540.180.486	1.405.710.949	131.098.189	4.563.389	10.135.189	-27
Tagihan TGR	137.238.535	137.238.535	626.107.524	626.107.524	546.107.524	86
Aset Tidak Berwujud	48.593.203.850	72.728.349.714	-	-	116.884.630.811	
Aset Lain-Lain	275.781.752.553	219.991.796.301	326.554.251.947	1.296.845.962.541	484.374.550.329	66
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-26.936.220.182	-179.092.985.478	-1.197.049.821.096	-	-
Jumlah Aset Lainnya	310.678.369.961	267.326.875.318	373.504.816.417	1.362.699.044.248	541.544.399.678	58
JUMLAH ASET	9.588.975.812.763	9.995.452.217.524	11.150.190.593.749	11.697.945.573.177	1.1033.816.316.776	4
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (Pfk)	51.658.535	53.840.353	51.658.535	160.642.644	846.162	28
Pendapatan Diterima Dimuka	115.518.108.771	-	-	124.196.800	67.516.800	-
Utang Beban	224.168.055.089	159.531.087.846	260.305.865.882	284.282.689.154	317.760.447.726	14
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-	22.245.372	37.289.152	66.702.314	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	339.737.822.396	159.584.928.199	260.379.769.789	284.604.817.751	317.895.513.003	8
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-	-	-	-	-
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-	-	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	339.737.822.396	159.584.928.199	260.379.769.789	284.604.817.751	317.895.513.003	8
EKUITAS DANA	9.249.237.990.367	9.835.867.289.325	10.889.810.823.960	11.413.340.755.426	10.715.920.803.773	4
Jumlah Ekuitas Dana	9.249.237.990.367	9.835.867.289.325	10.889.810.823.960	11.413.340.755.426	10.715.920.803.773	4



Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	9.588.975.812.763	9.995.452.217.524	11.150.190.593.749	11.697.945.573.177	11.033.816.316.776	4

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026



Pada Tabel 2-26 menyajikan laporan posisi keuangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dari laporan posisi keuangan tersebut dapat dilakukan analisa rasio keuangan. Analisa tersebut dapat mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah, analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut seperti pada tabel berikut:

Tabel 3-60 Analisis Rasio Keuangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Rasio Likuiditas					
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	2,55	6,00	5,16	3,84	2,87
2	Rasio quick (<i>quick ratio</i>)	1,73	3,83	2,96	2,37	1,22
B	Rasio Solvabilitas					
1	Rasio total utang terhadap total asset	3,54	1,60	2,34	2,43	2,88
2	Rasio utang terhadap moda	3,67	1,62	2,39	2,49	2,96

Sumber : Ranwal RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah 2021-2026

a. Rasio Lancar

Rasio yang mengukur kinerja keuangan secara likuiditas. Rasio Lancar menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya pada dua belas bulan ke depan. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan Tabel 3.6, rasio lancar pada tahun 2016 adalah sebesar 2,55 dan tahun 2020 sebesar 2,87 Nilai tersebut berarti menunjukkan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kemampuan membayar utang Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 0,88 kali.

b. Quick Rasio

Rasio yang mengukur kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling likuid Yang termasuk sebagai Aset Cepat (Quick Asset) adalah Aktiva Lancar atau Aset lancar yang dapat dengan cepat dikonversi menjadi uang tunai dan mendekati nilai bukunya. Quick rasio pada tahun 2016 sebesar 1,73 dan tahun 2020 sebesar 1,22. Nilai tersebut berarti menunjukkan kemampuan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya cukup baik.

c. Rasio Total Utang Terhadap Total Aset

Rasio yang mengukur seberapa besar aset dapat menanggung utang yang dimiliki. Besar rasio total utang terhadap total aset pada tahun 2016 sebesar 3,54 dan pada tahun 2020 sebesar 2,88 Dengan perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh utang terhadap aktiva sangat kecil.

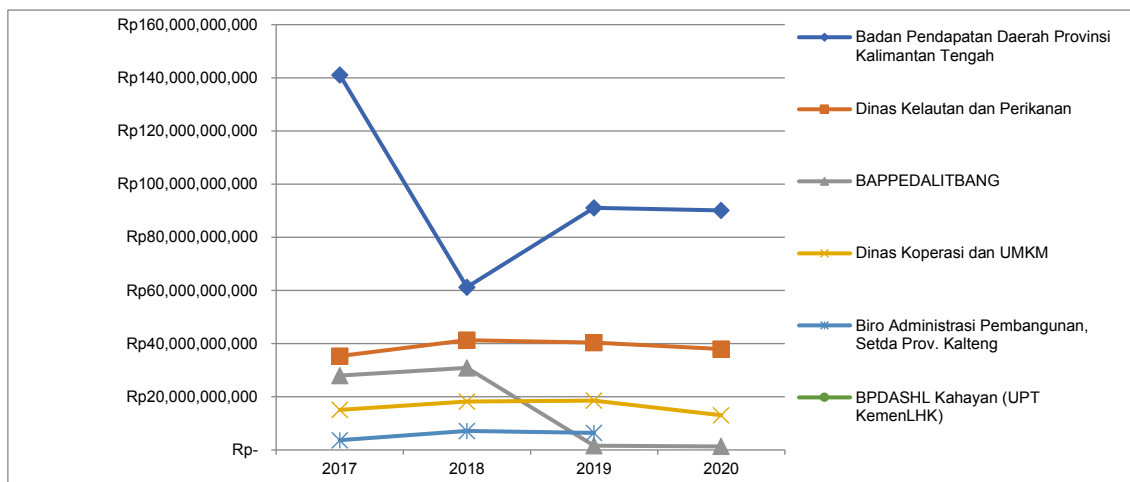


d. Rasio Utang Terhadap Moda

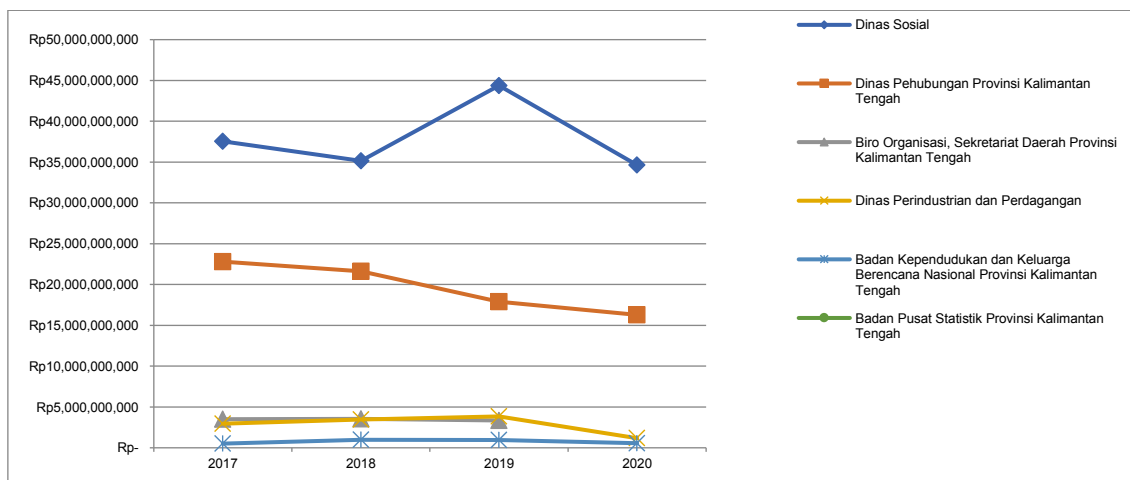
Rasio keuangan yang menunjukkan proporsi relatif antara ekuitas dan utang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Pada tahun 2016 rasio Utang terhadap modal pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3,67 dan pada tahun 2020 menjadi 2,96. Dari nilai perhitungan rasio tersebut disimpulkan bahwa nilai total utang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Provinsi Kalimantan Tengah.

3.4.6. Anggaran Dalam Pencapaian TPB

Untuk pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diperlukan anggaran yang memadai. Berdasarkan ketersediaan anggaran tahun 2017-2020 diperoleh bahwa OPD yang belum mencapai target (1 indikator) dengan anggaran tertinggi adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, disusul Dinas Kelautan dan Perikanan dan Bapedalitbang



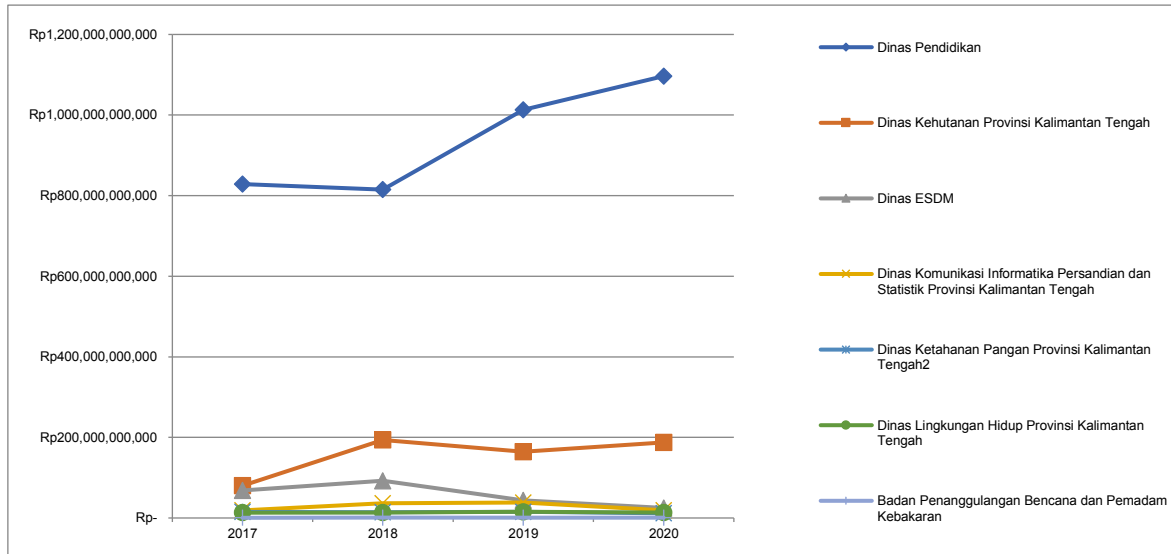
Gambar 3-90 Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria B Dengan 1 (Satu) Indikator Capaian



Gambar 3-91 Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria B Dengan 2 (Dua) Indikator Capaian

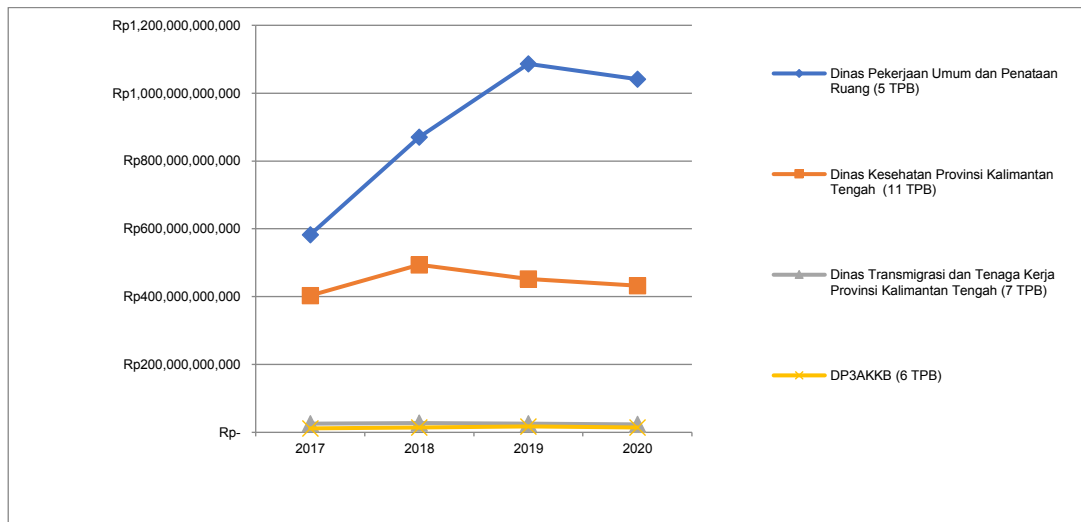


Untuk Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria B Dengan 2 (Dua) Indikator Capaian, Dinas Sosial merupakan instansi dengan anggaran terbesar sedangkan yang terendah adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah.



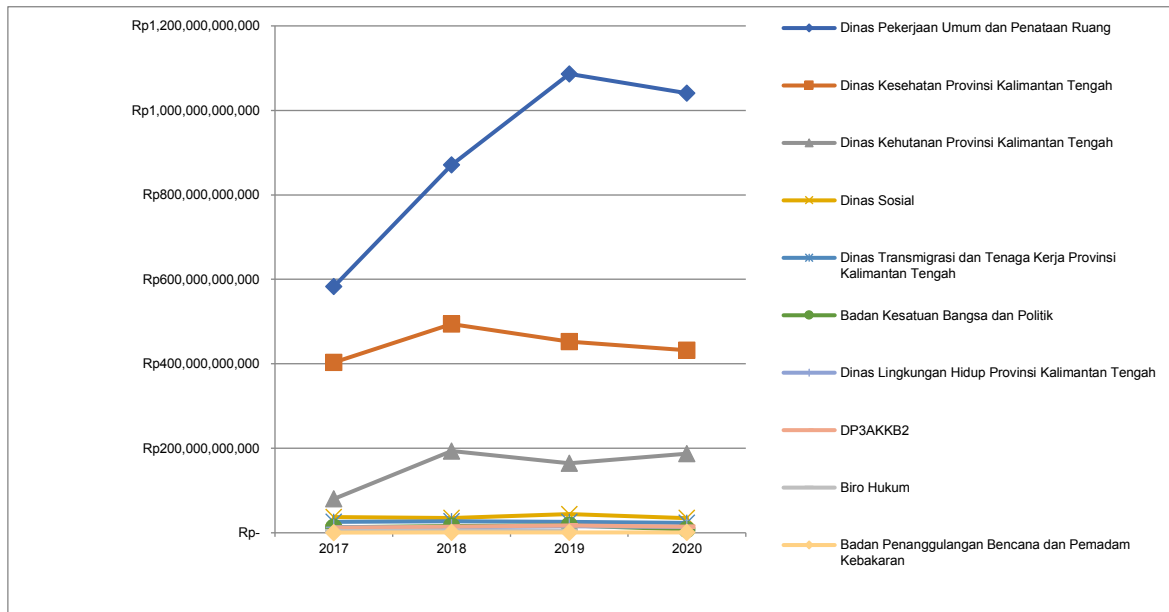
Gambar 3-92 Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria B Dengan 3 (Tiga) Indikator Capaian

Untuk Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria B Dengan 3 (tiga) Indikator Capaian, Dinas pendidikan merupakan instansi dengan anggaran tertinggi sedangkan yang terendah adalah Dinas Lingkungan Hidup.



Gambar 3-93 Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria B Dengan 5 (Lima) Indikator Capaian

Dinas PUPR merupakan instansi dengan anggaran tertinggi untuk Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria B Dengan 5 (Lima) Indikator Capaian, sedangkan terendah adalah DP3AKKB.



Gambar 3-94 Realisasi Anggaran Belanja OPD Pelaksana TPB Kriteria C

Beberapa OPD yang masuk dalam kategori belum melaksanakan program dan belum mencapai target dapat dilihat pada gambar 3-94. Dari data diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan OPD dengan anggaran tertinggi Disusul Dinas Kesehatan dan Dinas Kehutanan.

Dengan adanya anggaran yang cukup tinggi ini, maka hanya perlu dilakukan refocusing pada beberapa program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target indikator TPB.

3.4.7. Persentase Pertumbuhan Anggaran OPD

Hasil analisis persentase pertumbuhan anggaran pada OPD Kriteria B menunjukkan bahwa sebagian besar OPD mengalami pertumbuhan negatif dengan fluktuasi pertumbuhan yang cukup tajam (tidak linier) dari tahun ke tahunnya. Gambaran fluktuasi pertumbuhan anggaran yang tidak linier ini menunjukkan bahwa secara global kapasitas capaian prioritas masing-masing OPD belum terencana dengan konsisten pula.

Pertumbuhan positif tertinggi terjadi pada Dinas Kehutanan sebesar 46,74% kemudian diikuti oleh Biro Administrasi Pembangunan, Setda Prov. Kalteng sebesar 42,75% serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 23,33%.

Pertumbuhan negatif tertinggi terjadi pada BAPPEDALITBANG sebesar (33,9%), kemudian diikuti oleh Dinas ESDM sebesar (20,39%) serta Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar (13,54%).



Tabel 3-61 Analisis Persentase Pertumbuhan Anggaran OPD TPB Kriteria B Tahun 2017-2020

No	Analisis OPD TPB Kriteria B (Jumlah Indikator)	Persentase Pertumbuhan Anggaran (Tahun)				Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	
1	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (1)		(56,59)	48,62	(0,96)	(2,97)
2	Dinas Kelautan Dan Perikanan (1)		(16,86)	(2,33)	(5,85)	(8,34)
3	BAPPEDALITBANG (1)		10,51	(94,8)	(17,41)	(33,9)
4	Dinas Koperasi dan UMKM (1)		20,78	1,79	(29,58)	(2,33)
5	Biro Administrasi Pembangunan, Setda Prov. Kalteng (1)		94,9	(9,4)	0	42,75
6	BPDASHL Kahayan (UPT KemenLHK) (1)		0	0	0	0
7	Dinas Sosial (2)		(6,34)	26,26	(21,94)	(0,67)
8	Dinas Pehubungan (2)		(5,27)	(17,18)	(8,98)	(10,47)
9	Biro Organisasi, Setda Prov. Kalteng (2)		1,44	(5,64)	0	(2,09)
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan (2)		17,91	10,87	(69,41)	(13,54)
11	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2)		91,28	(4,38)	(39,32)	15,85
12	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (2)		0	0	0	0
13	Dinas Pendidikan (3)		(1,67)	24,28	8,27	10,29
14	Dinas Kehutanan (3)		141,45	(15,15)	13,94	46,74
15	Dinas ESDM (3)		34,46	(52,43)	(43,21)	(20,39)
16	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (3)		93,23	5,27	(49,91)	16,19
17	Dinas Ketahanan Pangan (3)		(3,57)	5,64	(24,58)	(7,50)
18	Dinas Lingkungan Hidup (3)		0,44	17,01	(11,35)	2,03
19	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (3)		91,28	(4,38)	(39,32)	15,85
20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (5)		49,38	24,79	(4,17)	23,33
21	DP3AKKB (6)		23,46	20,17	(17,07)	8,85
22	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (7)		6,95	(5,02)	(9,81)	(2,63)
23	Dinas Kesehatan (11)		22,51	(8,45)	(4,40)	3,21

Keterangan: (*) Pertumbuhan negatif

Hasil analisis persentase pertumbuhan anggaran pada OPD Kriteria C menunjukkan bahwa sebagian besar OPD mengalami pertumbuhan yang sangat berfluktuasi dengan persentase kenaikan serta penurunan yang sangat tajam (tidak linier) dari tahun ke tahunnya.

Rata-rata pertumbuhan positif tertinggi pada Dinas Kehutanan sebesar 46,74%, sedangkan rata-rata pertumbuhan negatif tertinggi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar (8,84%)



Tabel 3-62 Analisis Persentase Pertumbuhan Anggaran OPD TPB Kriteria C Tahun 2017-2020

No	Analisis OPD TPB Kriteria C	Persentase Pertumbuhan Anggaran (Tahun)				Rata-Rata
		2017	2018	2019	2020	
1	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (1)		6,95	(5,02)	(9,81)	(2,63)
2	Dinas Lingkungan Hidup (1)		0,44	17,01	(11,35)	2,03
3	Dinas Kehutanan (1)		141,45	(15,15)	13,94	46,74
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (1)		19,99	8,60	(55,15)	(8,84)
5	Dinas Sosial (2)		(6,34)	26,26	(21,94)	(0,67)
6	Dinas Kesehatan (2)		22,51	(8,45)	(4,40)	3,21
7	Biro Hukum (2)		24,99	(0,09)	0	12,45
8	DP3AKKB (3)		23,46	20,17	(17,07)	8,85
9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (5)		49,38	24,79	(4,17)	23,33
10	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (6)		91,28	(4,38)	(39,32)	15,85

Keterangan: (*) Pertumbuhan negatif



BAB-4

PROFIL PENCAPAIAN TPB

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026





BAB 4

PROFIL PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah memiliki komitmen terhadap Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 atau yang dikenal dengan nama *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang diwujudkan melalui Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (RAD TPB/SDGs)

Jumlah Indikator TPB berdasarkan Urusan dan Kewenangannya adalah 319 indikator yang dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi :

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat: 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi: 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten: 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota: 222

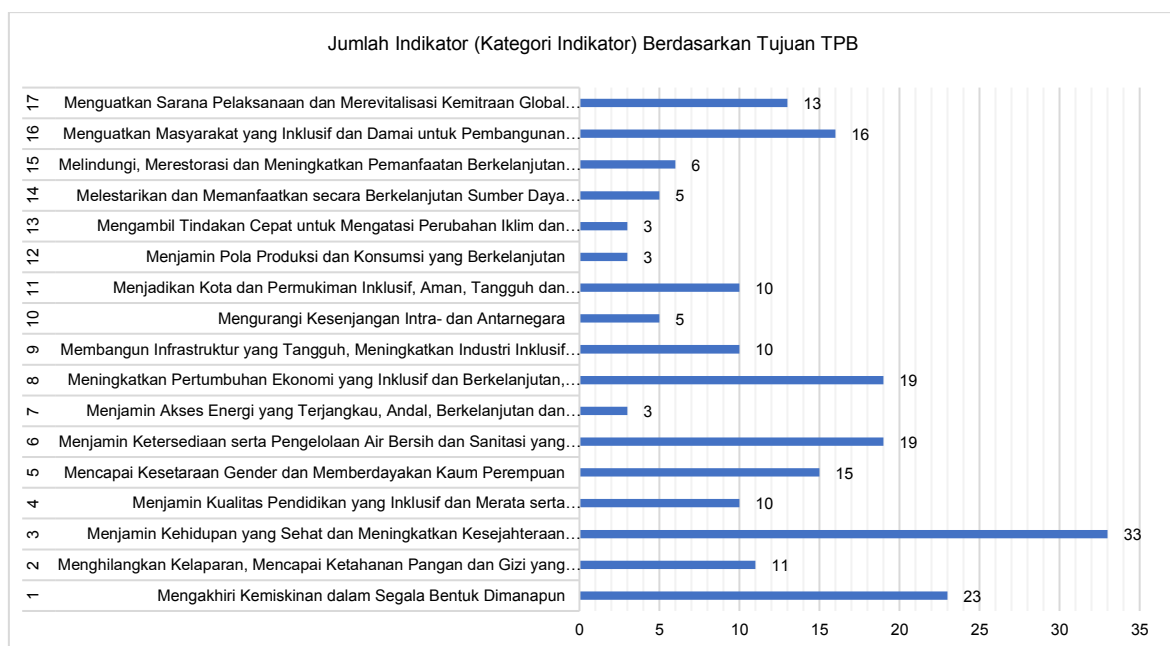
Selain kewenangan ada beberapa faktor yang menentukan jumlah Indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah kekhususan indikator, kondisi geografis dan ketentuan indikator RPJMD. Dari 235 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi, ada 204 indikator yang ada di wilayah Kalimantan Kalimantan Tengah, dan 31 indikator tidak ada di wilayah kajian antara lain, panjang pembangunan jalan tol, panjang pembangunan jalur kereta api, jumlah kawasan metropolitan dan lain-lain. Jumlah indikator TPB di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Tabel 4-1 Jumlah Indikator (Kategori Indikator) Berdasarkan Tujuan TPB Yang Relevan di Kalimantan Tengah

No. TPB	Tujuan TPB	Jumlah Indikator
1.	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	23
2.	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11
3.	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	33
4.	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	10
5.	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	15
6.	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	19
7.	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	3
8.	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan	19



No. TPB	Tujuan TPB	Jumlah Indikator
	Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	
9.	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	10
10.	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	5
11.	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	10
12.	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	3
13.	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	3
14.	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	5
15.	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	6
16.	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16
17.	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	13
	TOTAL	204



Gambar 4-1 Jumlah Indikator berdasarkan Tujuan TPB

Hasil identifikasi dan analisis capaian indikator TPB dibagi ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

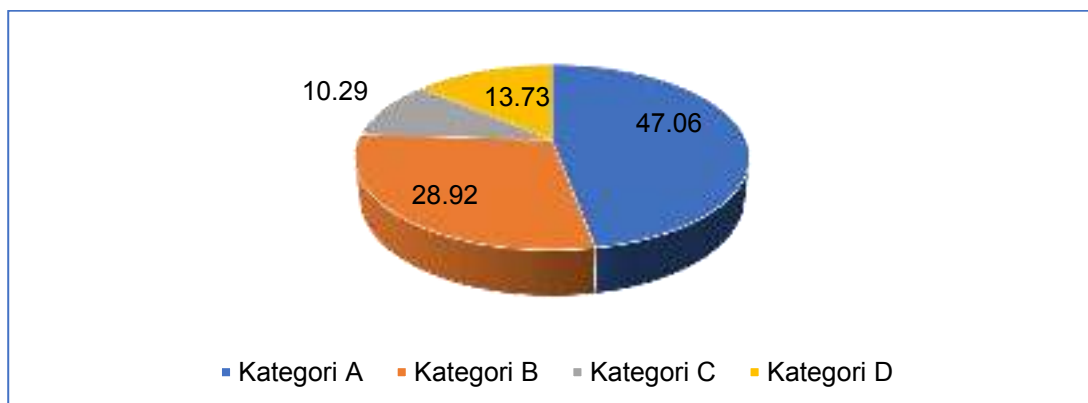
- Kategori A : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
- Kategori B : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional
- Kategori C : Indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional
- Kategori D : Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

4.1. Pelaksanaan TPB di Provinsi Kalimantan Tengah

Dari total 2014 indikator TPB yang relevan di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 95 Indikator (46,57%) sudah dilaksanakan dan telah mencapai target yang ditetapkan, 60 Indikator (29,41%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 21 Indikator (10,29%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dan sebanyak 8 indikator (13,73%) tidak ada data. Rincian pelaksanaan TPB di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4-2 Pelaksanaan TPB di Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Kriteria	Jumlah Indikator	Pencapaian (%)
1	Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target	96	47,06
2	Indikator yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target	59	28,92
3	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target	21	10,29
4	Data tidak tersedia	28	13,73
Total indikator yang menjadi urusan dan kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah		204	100,00



Gambar 4-2 Persentase Capaian TPB terhadap Target Nasional



4.2. Capaian TPB Berdasarkan Indikator

4.2.1. Capaian Indikator Kategori A Berdasarkan TPB

Indikator-indikator yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan sudah mencapai target nasional sesuai dengan RPJMD tahun 2020. Jumlah indikator tersebut dijabarkan pada gambar dan tabel berikut ini.

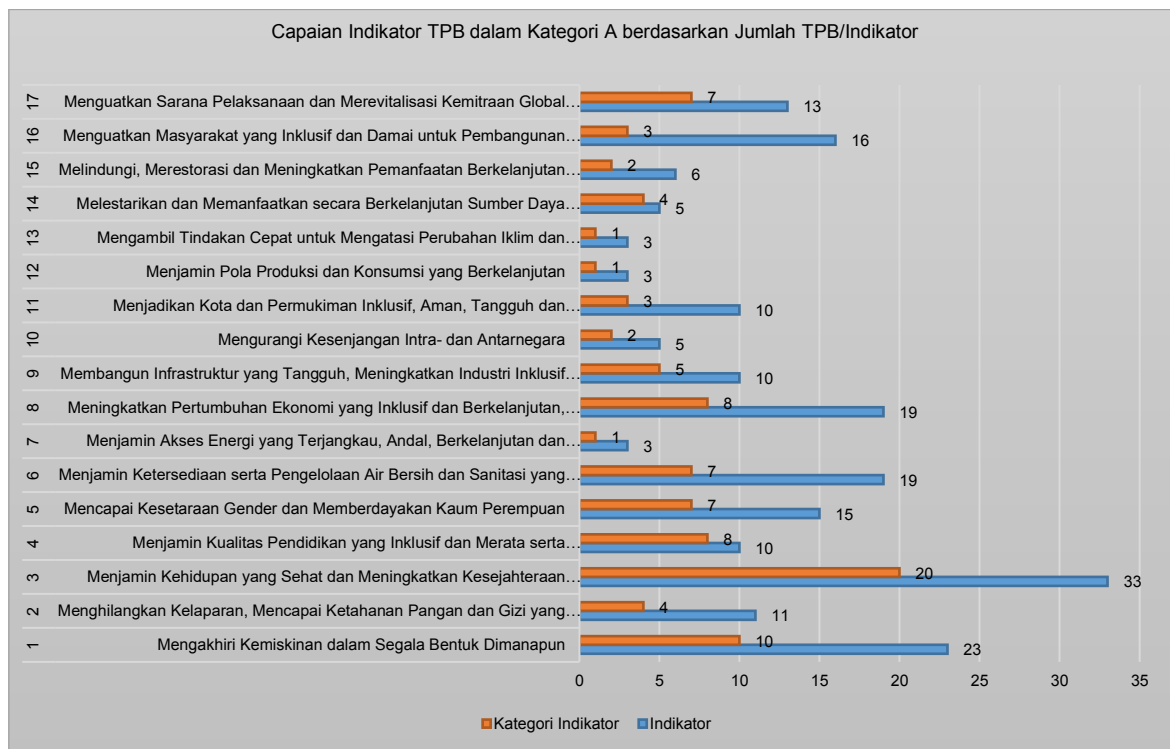
Tabel 4-3 Kategori A Berdasarkan Tujuan TPB

No. TPB	Tujuan TPB	Indikator	Kategori Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	23	10
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	4
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	33	21
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	10	8
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	15	7
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	19	7
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	3	1
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	8
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	10	5
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	5	2
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	10	3
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	3	1
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	3	1
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	5	4
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	6	2
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16	3
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	13	9



No. TPB	Tujuan TPB	Indikator	Kategori Indikator
	TOTAL		96

Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kalimantan Tengah dan sudah mencapai target nasional yaitu sebanyak 17 tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 95 (sembilan puluh lima) indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan wewenang pemerintah provinsi sebanyak 204 (dua ratus empat) indikator. Indikator- indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target tersebut harus dipertahankan agar capaiannya tetap baik bahkan bisa lebih meningkat lagi.



Gambar 4-3 Jumlah Capaian Indikator TPB dalam Kategori A

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dengan jumlah indikator paling banyak adalah “Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia”, dengan jumlah 20 indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dari 33 target indikator, sedangkan ada 3 yang merupakan tujuan dengan jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional paling sedikit yaitu 1 indikator yaitu TPB nomor 7,12, dan 13.



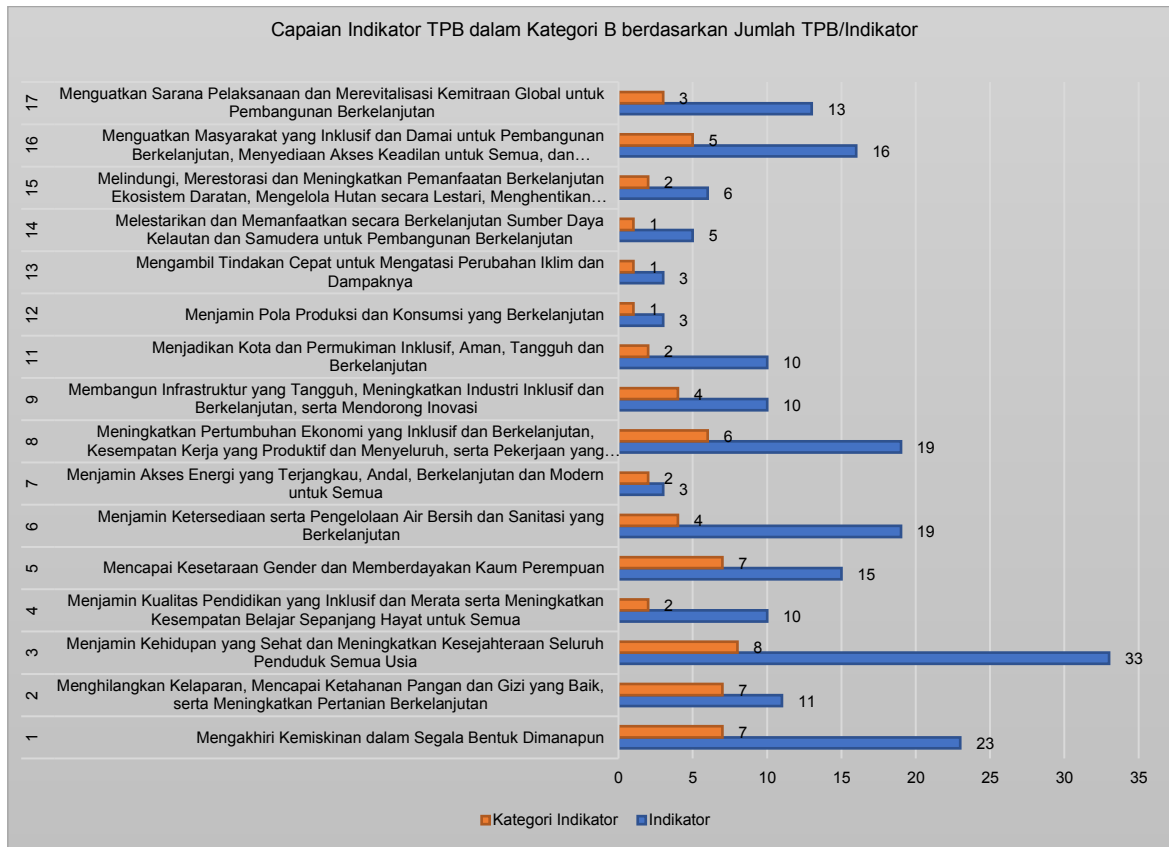
4.2.2. Capaian Indikator Kategori B Berdasarkan TPB

Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori sudah dilaksanakan namun belum mencapai target RPJMD. Indikator pada kategori ini terdapat pada hampir seluruh tujuan, dengan jumlah indikator pada setiap tujuan ditunjukkan pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 4-4 Kategori B Berdasarkan Tujuan TPB

No. TPB	Tujuan TPB	Indikator	Kategori Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	23	7
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11	7
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	33	7
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	10	2
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	15	7
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	19	4
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	3	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	6
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	10	4
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	10	2
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	3	1
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	3	1
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	5	1
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	6	2
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16	5
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	13	1
TOTAL			59

Jumlah tujuan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetapi belum mencapai target nasional yaitu sebanyak 16 (enam belas) tujuan dengan jumlah indikator sebanyak 62 (enam puluh dua) indikator dari total keseluruhan indikator yang merupakan wewenang pemerintah provinsi sebanyak 204 (dua ratus empat) indikator. Indikator- indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional akan menjadi isu strategis pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis.



Gambar 4-4 Jumlah Capaian Indikator TPB dalam Kategori B

Berdasarkan grafik di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki pekerjaan untuk menyelesaikan total 62 (enam puluh dua) indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target. Indikator yang belum mencapai target paling banyak adalah pada tujuan “Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia”. Selain karena indikatornya belum mencapai target, tujuan ini juga memiliki indikator terbanyak. Meskipun demikian, indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target RPJMD artinya di masa yang akan datang akan memerlukan upaya tambahan agar target dapat tercapai.

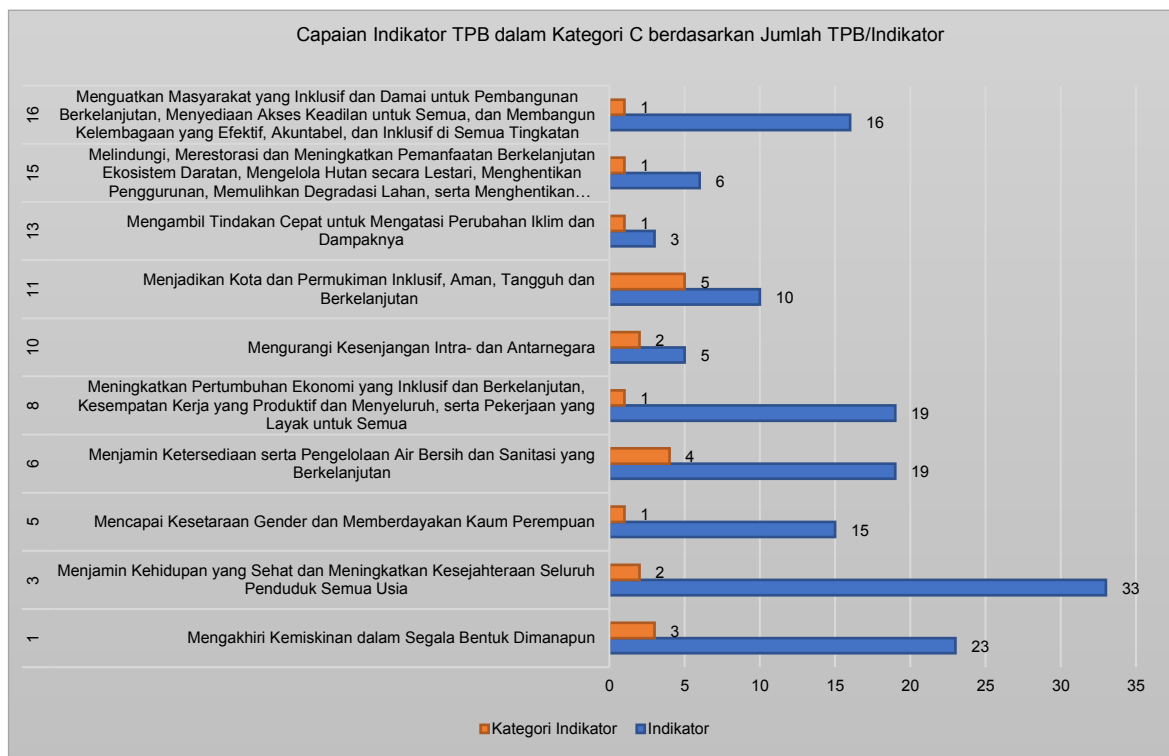
4.2.3. Capaian Indikator Kategori C Berdasarkan TPB

Indikator dengan kategori berdasarkan capaian TPB adalah indikator yang belum dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan dan belum memenuhi target.



Tabel 4-5 Kategori C Berdasarkan Tujuan TPB

No. TPB	Tujuan TPB	Indikator	Kategori Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	23	3
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	33	2
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	15	1
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	19	4
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	1
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	5	2
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	10	5
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	3	1
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	6	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16	1
TOTAL			21



Gambar 4-5 Jumlah Capaian Indikator TPB dalam Kategori C



Jumlah tujuan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah 10 (sepuluh) tujuan dengan indikator sebanyak 21 (dua puluh satu). Indikator dengan kategori C ini harus dilaksanakan indikatornya dengan implemetasinya pada program dan kegiatan yang dilaksanakan tiap OPD

Berdasarkan gambar 4-4, dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan 21 (dua puluh satu) indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target RPJMD). Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target terbanyak adalah pada indikator “Menjadikan Kota dan Pemukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan”.

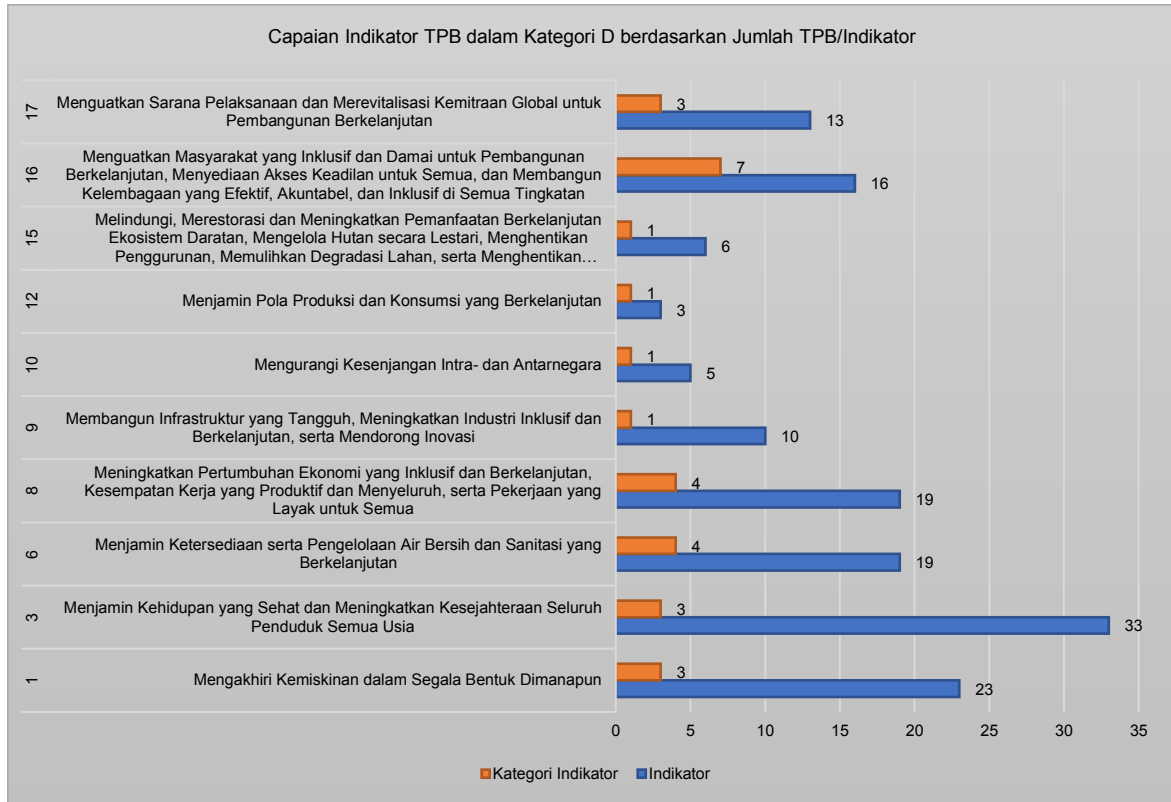
4.2.4. Capaian Indikator Kategori D Berdasarkan TPB

Kategori ini adalah indikator yang belum memiliki data. Berikut merupakan rincian dari jumlah indikator yang belum memiliki data pada setiap TPB pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 4-6 Kategori D Berdasarkan Tujuan TPB

No. TPB	Tujuan TPB	Indikator	Kategori Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	23	3
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	33	3
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	19	4
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19	4
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	10	1
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	5	1
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	3	1
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	6	1
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16	7
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	13	3
	TOTAL		28

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 28 (dua puluh delapan) indikator TPB yang belum memiliki data dari 10 (sepuluh) tujuan. Indikator dengan kategori D tersebut merupakan tanggung jawab OPD pada Provinsi Kalimantan Tengah. Ketersediaan data merupakan hal penting yang seharusnya dipenuhi OPD agar dalam pengambilan kebijakan maupun perencanaan akan sesuai dengan kondisi wilayah, tepat guna dan tepat sasaran.



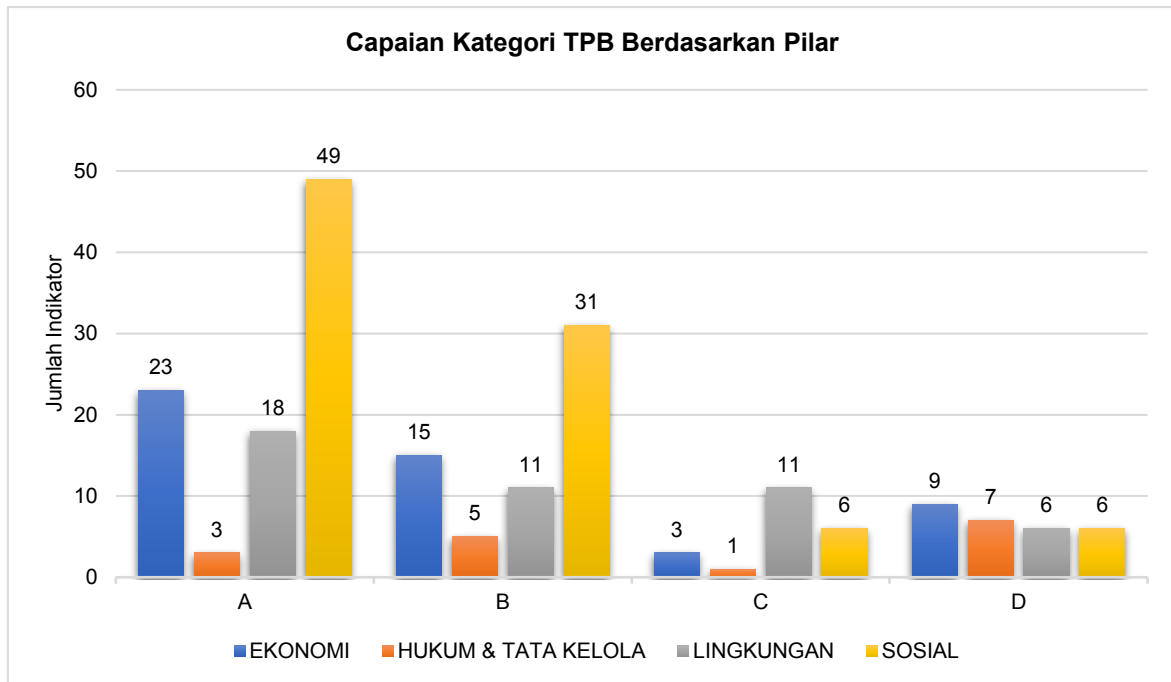
Gambar 4-6 Jumlah Capaian Indikator TPB dalam Kategori D

4.3. Capaian TPB Berdasarkan Pilar

Capaian TPB berdasarkan pilar menunjukkan bahwa Pilar Sosial merupakan TPB dengan capaian tertinggi dalam pemenuhan target yang ditetapkan (Kategori A) kemudian Pilar Ekonomi dan Pilar Lingkungan. Sedangkan TPB dengan kategori B tertinggi dicapai oleh Pilar Sosial dengan capaian sebanyak 31 Indikator. TPB dengan Indikator C tertinggi adalah Pilar Lingkungan.

Tabel 4-7 Pencapaian TPB Berdasarkan Pilar

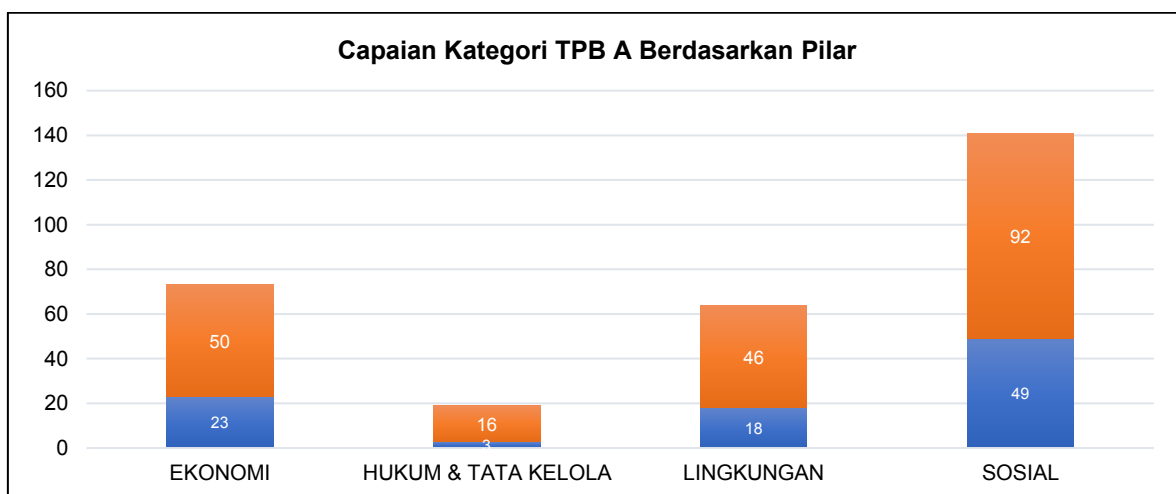
Pilar	A	B	C	D	Total Indikator
Ekonomi	23	15	3	9	50
Hukum dan Tata Kelola	3	5	1	7	16
Lingkungan	18	11	11	6	46
Sosial	49	31	6	6	92
Total Kategori	93	62	21	28	204



Gambar 4-7 Jumlah Capaian Indikator TPB Berdasarkan Pilar

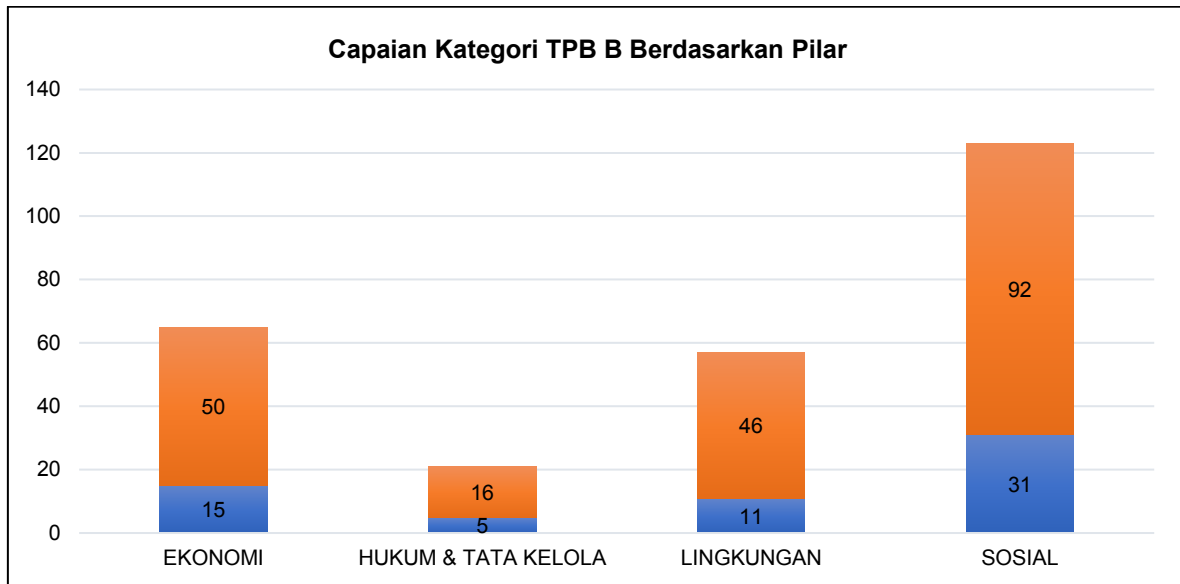
4.3.1. Capaian Indikator Kategori A Berdasarkan Pilar

Kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 93 (sembilan puluh tiga) dari total 204 (dua ratus empat) indikator. Indikator TPB terbanyak yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional yaitu pada pilar sosial sebesar 49 (empat puluh sembilan) indikator. Sedangkan indikator paling rendah yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional adalah pilar hukum dan tata kelola sebesar 3 (tiga) indikator dari target 16 (enam belas) indikator. Pilar ekonomi sebanyak 23 (dua puluh tiga) indikator dan pilar lingkungan sebanyak 18 (enam belas) indikator.



Gambar 4-8 Capaian Indikator Kategori A Berdasarkan Pilar

4.3.2. Capaian Indikator Kategori B Berdasarkan Pilar

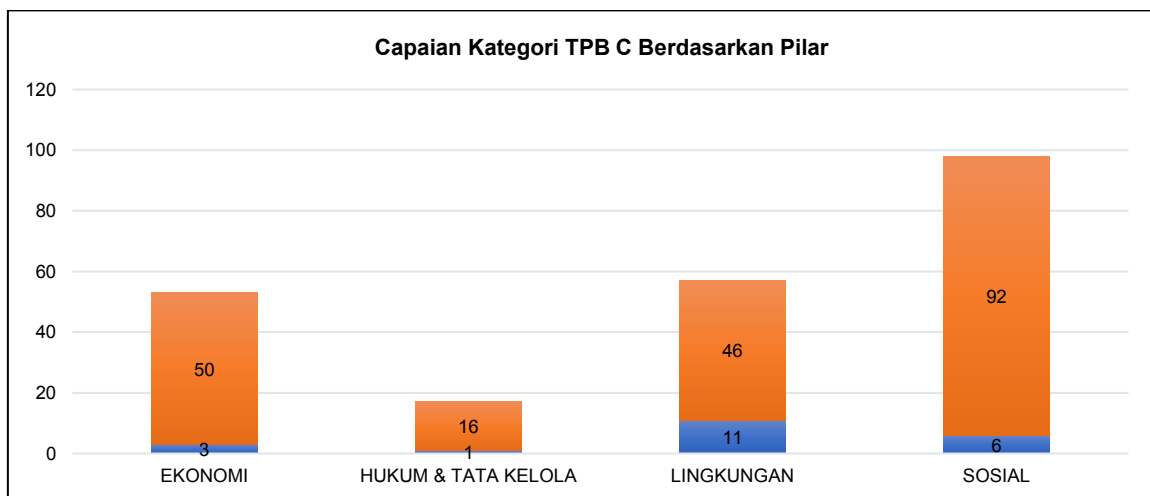


Gambar 4-9 Capaian Indikator Kategori B Berdasarkan Pilar

Kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) indikator dari total 204 (dua ratus empat) indikator. Indikator TPB terbanyak kategori B adalah pada pilar sosial sejumlah 31 (tiga puluh satu) dari total 92 (sembilan puluh dua) indikator. Yang terendah yaitu pilar hukum dan tata kelola sebanyak 5 (lima) indikator dari total 16 (enam belas) indikator.

4.3.3. Capaian Indikator Kategori C Berdasarkan Pilar

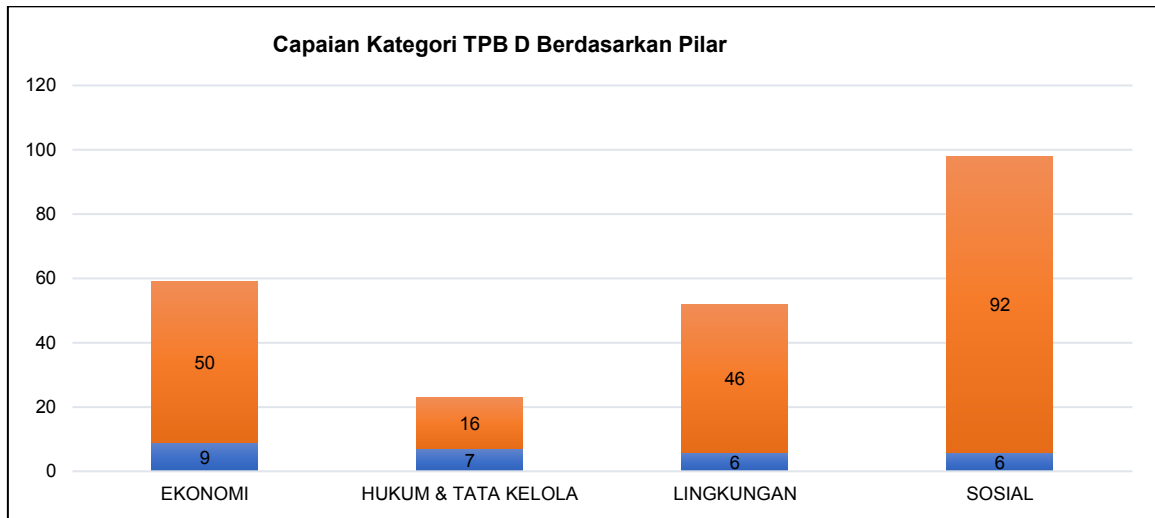
Kategori indikator yang belum dilaksanakan dan juga belum mencapai target nasional adalah 21 (dua puluh satu) indikator dari jumlah total 204 (dua ratus empat) indikator. Indikator TPB terbanyak yang masuk kategori C adalah pilar lingkungan yaitu 11 (sebelas) indikator dan yang paling sedikit pada pilar hukum dan tata kelola sebanyak 1 indikator. Capaian indikator kategori C berdasarkan pilar dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4-10 Capaian Indikator Kategori C Berdasarkan Pilar

4.3.4. Capaian Indikator Kategori D Berdasarkan Pilar

Capaian indikator kategori D berdasarkan pilar dapat dilihat pada gambar berikut:

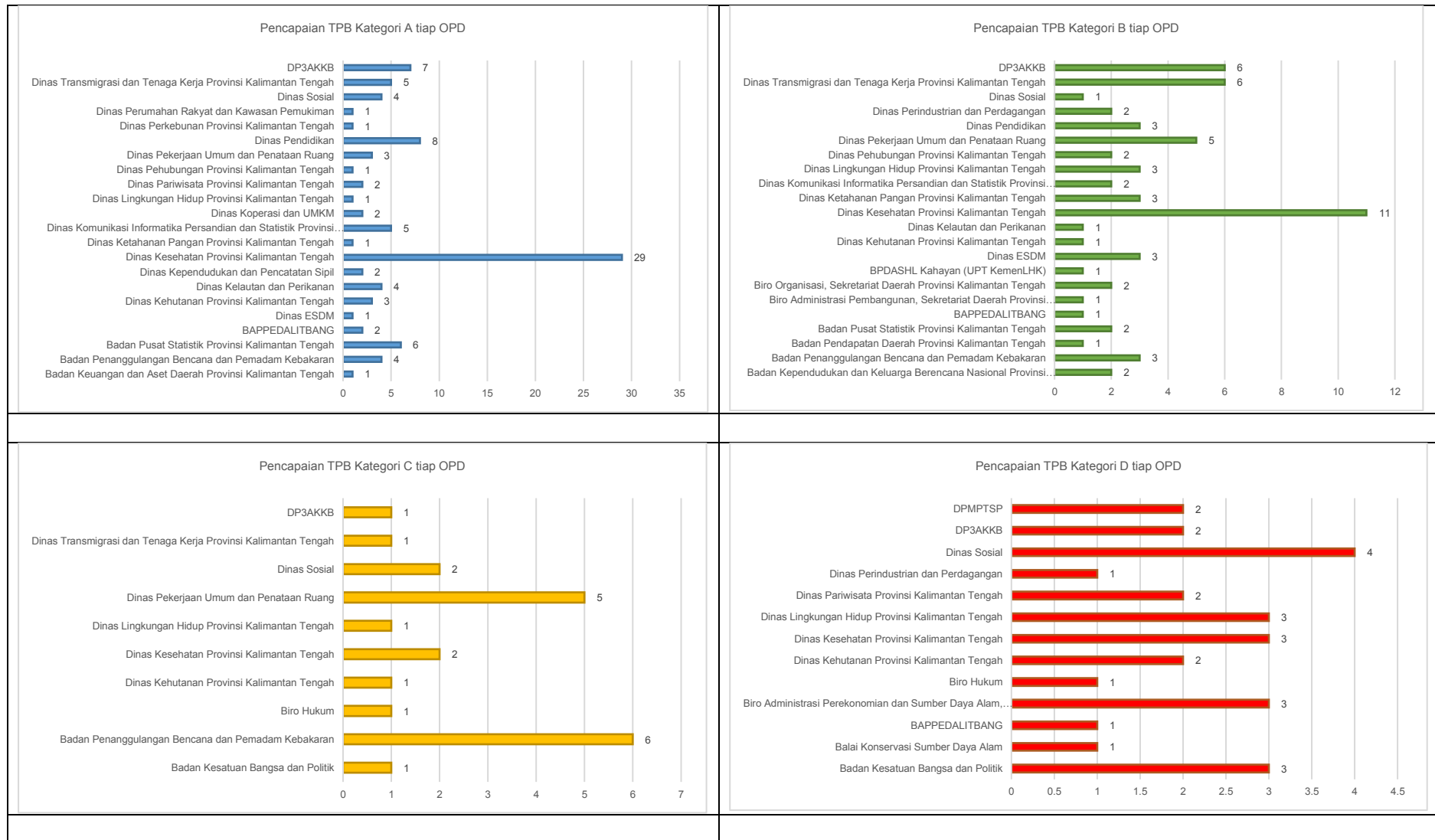


Gambar 4-11 Capaian Indikator Kategori D Berdasarkan Pilar

Kategori TPB D adalah indikator yang belum memiliki data yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator dari total 204 (dua ratus empat) indikator. Indikator terbanyak yang belum ada data adalah pada pilar ekonomi yaitu 9 (sembilan) dari total 50 (lima puluh) indikator. Indikator yang paling sedikit mengalami ketiadaan data adalah pilar sosial yaitu 6 (enam) indikator dari total 92 (sembilan puluh dua) indikator.

4.4. Capaian TPB Berdasarkan Perangkat Daerah

Bagian menjelaskan mengenai kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap OPD. Kondisi capaian indikator TPB yang ditangani oleh setiap OPD berfokus kepada jumlah indikator TPB yang menjadi kewenangan OPD. Dari jumlah indikator tersebut, diidentifikasi jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional, jumlah indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional, jumlah indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dan jumlah indikator yang tidak/belum memiliki data. Hasil dari kondisi capaian dan analisis yang sudah dijelaskan sebelumnya, menjadi bahan dalam mengidentifikasi isu strategis Provinsi Kalimantan Tengah yang berkaitan dengan urusan yang ditangani oleh masing-masing OPD dan menjadi fokus utama yang harus dilaksanakan oleh setiap OPD. Berikut ini merupakan ringkasan capaian per organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Tengah yang dibagi berdasarkan beberapa kategori yaitu:



Gambar 4-12 Capaian Indikator TPB Tiap OPD



Capaian Indikator tiap Perangkat Daerah dalam dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4-8 Pencapaian TPB Tiap OPD

No	Perangkat Daerah	A	B	C	D	Isu Strategis
1	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional		2			Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil reuiu dari konferensi-konferensi tersebut.
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			1	3	-
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1				-
4	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	4	3	6		<p>Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.</p> <p>Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.</p> <p>Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.</p>
5	Badan Pendapatan Daerah		1			Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.



No	Perangkat Daerah	A	B	C	D	Isu Strategis
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan	2	1		1	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
7	Badan Pusat Statistik	6	2			Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang. Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
8	Balai Konservasi Sumber Daya Alam				1	-
9	Biro Administrasi Pembangunan		1			Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
10	Biro Administrasi Perekonomian dan SDA				3	-
11	Biro Hukum			1	1	-
12	Biro Organisasi		2			Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
13	BPDASHL Kahayan		1			Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.



No	Perangkat Daerah	A	B	C	D	Isu Strategis
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1	3			<p>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p> <p>Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.</p>
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	2			2	-
16	Dinas Kehutanan	3	1	1	2	<p>Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.</p>
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	4	1			<p>Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.</p>
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2				
19	Dinas Kesehatan	29	11	2	3	<p>Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p>



No	Perangkat Daerah	A	B	C	D	Isu Strategis
						<p>Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.</p> <p>Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.</p> <p>Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.</p> <p>Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.</p> <p>Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.</p> <p>Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.</p>
20	Dinas Ketahanan Pangan	1	3			<p>Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.</p> <p>Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.</p>



No	Perangkat Daerah	A	B	C	D	Isu Strategis
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	5	2			Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2				
23	Dinas Lingkungan Hidup	1	3	1	3	<p>Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.</p> <p>Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.</p> <p>Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.</p>
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	5	5		<p>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p> <p>Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.</p>



No	Perangkat Daerah	A	B	C	D	Isu Strategis
						Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	7	6	1	2	<p>Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.</p> <p>Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.</p> <p>Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.</p> <p>Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.</p>
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				2	-
27	Dinas Pendidikan	8	3			<p>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.</p> <p>Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.</p>



No	Perangkat Daerah	A	B	C	D	Isu Strategis
						Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.
28	Dinas Perdagangan dan Perindustrian		2		1	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
29	Dinas Perhubungan	1	2			Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
30	Dinas Perkebunan	1				-
31	Dinas Perumahan, Kawasan dan Pertanahan	1				-
32	Dinas Sosial	4	1	2	4	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
33	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5	6	1		Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.



No	Perangkat Daerah	A	B	C	D	Isu Strategis
						<p>Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.</p> <p>Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</p> <p>Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.</p>



4.4.1. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana (KB). BKKBN memiliki 2 (dua) indikator yang menjadi kewenangannya yang merupakan indikator dari tujuan TPB nomor 5. Dari 2 (dua) indikator yang ditangani oleh BKKBN, semuanya sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional.

4.4.2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah merupakan organisasi perangkat daerah di Provinsi Kalimantan Tengah yang menangani urusan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang ideologi dan kewaspadaan, wawasan, kebangsaan, politik, politik dalam negeri, ketahanan seni, budaya, agama, dan ekonomi. Kesbangpol memiliki 4 (empat) indikator yang menjadi kewenangannya. Indikator tersebut merupakan indikator dari tujuan TPB nomor 16.

Dari total indikator yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol di Provinsi Kalimantan Tengah, dari total 4 (empat) jumlah indikator yaitu jumlah indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional adalah sebanyak 1 indikator, dan indikator yang belum tersedia adalah sebanyak 3 indikator.

4.4.3. Badan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota. Badan Keuangan dan Aset Daerah menjalankan 1 indikator sebagai kewenangannya yaitu dari tujuan TPB nomor 16.

Indikator yang telah dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional.

4.4.4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan, menangani, mencegah, menyusun, menanggulangi, mengantisipasi, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran. Badan ini melaksanakan 13 (tiga belas) indikator sesuai kewenangannya yang merupakan indikator dari tujuan TPB nomor 1, 11 dan 13.

Dari total indikator yang telah dilaksanakan oleh BPBD di Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 4 indikator, jumlah indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional sebanyak 3 indikator, jumlah indikator yang



belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional adalah sebanyak 6 indikator.

4.4.5. Badan Pendapatan Daerah

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pendapatan Daerah, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kewenangannya tersebut, Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan tujuan TPB nomor 17 dengan 1 indikator.

Dari total indikator yang telah dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah, indikator sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional.

4.4.6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Dalam wewenangnya, Bappelitbang telah melaksanakan 4 (empat) indikator yang merupakan indikator dari tujuan TPB nomor 1, 9, 13 dan 17.

Dari total indikator yang telah dilaksanakan oleh Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 2 (dua) indikator, jumlah indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional sebanyak 1 indikator, dan jumlah indikator yang belum ada data 1 indikator.

4.4.7. Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah

Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah bertugas untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari departemen atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. Tujuan TPB yang dilaksanakan oleh BPS adalah tujuan nomor 8,16 dan 17 dengan 8 (delapan) indikator.

Dari total indikator yang telah dilaksanakan oleh BPS Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 6 (enam) indikator dan jumlah indikator yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional sebanyak 2 (dua) indikator.

4.4.8. Balai Konservasi Sumber Daya Alam

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Tengah merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam



dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, yaitu melaksanakan perlindungan dan pengamanan, pengawetan keanekaragaman hayati (tumbuhan dan satwa liar) beserta ekosistemnya dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang wilayah kerjanya meliputi Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari total indikator yang telah dilaksanakan oleh BKSDA Provinsi Kalimantan Tengah, menjalankan tujuan TPB nomor 15 dengan 1 indikator yang belum ada data, sehingga masuk dalam kategori D.

4.4.9. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang pembangunan daerah, perencanaan strategis bidang pembangunan daerah, penyusunan rencana strategis Sekretariat Daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan program, pengendalian pembangunan, pelaporan, analisis dan pengkajian pembangunan. Terkait dengan TPB, tugas dan fungsi tersebut di atas terdapat pada tujuan TPB nomor 6 (enam) dengan 1 indikator.

Tujuan TPB nomor 6 dengan indikator “Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan”, sudah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan namun belum mencapai target.

4.4.10. Biro Administrasi Perekonomian dan SDA

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas menyediakan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, pembinaan, koordinasi dan fasilitasi, penyusunan pedoman dan petunjuk di bidang perekonomian dan sumber daya alam serta memantau perkembangannya, pelaporan bidang bina promosi, investasi dan pengendalian, bina sarana perekonomian, bina pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta bina produksi dan budidaya.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam telah melaksanakan tujuan TPB nomor 16 dan 17 dengan 3 (tiga) indikator. Ketiga indikator yang telah dilaksanakan dalam kategori D atau belum ada data.

4.4.11. Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi, mengoordinasikan penyusunan, pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah Provinsi, pengundangan produk hukum daerah Provinsi, dokumentasi dan informasi hukum, publikasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan daerah, bantuan hukum, koordinasi pemenuhan hak asasi manusia, pembinaan dan pengawasan produk hukum daerah Kabupaten/Kota.



Terdapat 2 (dua) tujuan TPB yang telah dilaksanakan oleh Biro Hukum yang masing-masing tujuan tersebut terdiri atas 1 indikator.

4.4.12. Biro Organisasi

Biro Organisasi bertugas menyusun bahan kebijakan pemerintah daerah bidang organisasi, perencanaan strategis bidang organisasi, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi, koordinasi dan informasi, penyelenggaraan sistem dan prosedur, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, standar pelayanan minimal dan pengembangan aparatur pemerintah daerah, tatakelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan tata usaha dan rumah tangga biro.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut di atas, Biro Organisasi telah melaksanakan tujuan TPB nomor 16 dengan 2 (dua) indikator. Indikator tersebut telah dilaksanakan namun belum memenuhi target.

4.4.13. BPDASHL Kahayan

Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kahayan bertugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan serta konservasi tanah dan air, pengembangan kelembagaan, pengendalian kerusakan perairan darat, dan evaluasi pengelolaan daerah aliran sungai dan hutan lindung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut merupakan tujuan TPB nomor 15.

Dalam menjalankan tugas terkait tujuan TPB nomor 15, ada 1 indikator yang telah dilaksanakan oleh BPDASHL Kahayan. Indikator yang telah dilaksanakan oleh BPDASHL Kahayan terkait TPB nomor 5 dengan 1 indikator masuk dalam kategori B. Yang artinya telah dilaksanakan tetapi belum mencapai target. Hal ini sebaiknya menjadi perhatian BPDASHL Kahayan agar dapat melakukan upaya tambahan sehingga yang seharusnya menjadi target dapat tercapai.

4.4.14. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam tugasnya tersebut, Dinas ESDM telah melaksanakan tujuan TPB nomor 1 dan 7.

Sehubungan dengan tujuan TPB nomor 1 dan 7 tersebut, Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan 4 indikator. Pelaksanaan indikator TPB oleh Dinas ESDM dengan indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target sebesar 25% dan indikator yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target sebesar 75%. Hal ini menunjukkan perlunya upaya tambahan untuk target yang belum tercapai.



4.4.15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan tujuan TPB nomor 8 dengan 4 indikator. Indikator yang telah dilaksanakan dan memenuhi target nasional sebesar 50% dan indikator yang datanya belum tersedia sebesar 50%. Akan diperlukan upaya lebih besar untuk memastikan separuh dari indikator yang telah dilaksanakan oleh OPD yang datanya masih belum tersedia. Indikator yang belum diketahui ketercapaiannya menjadi pekerjaan rumah bagi Disbudpar untuk melengkapi kekurangan data.

4.4.16. Dinas Kehutanan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kehutanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas ini merupakan tujuan TPB nomor 6 dan 15.

Tujuan TPB yang menjadi tugas dan wewenang Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah adalah nomor 6 dan 15 dengan 7 indikator. Indikator yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan terkait dengan tugas dan wewenangnya berjumlah 7 (tujuh) indikator. Persentase untuk indikator yang telah dilaksanakan dan memenuhi target nasional sebesar 43%, indikator yang telah dilaksanakan namun belum memenuhi target sebesar 14%, indikator yang belum dilaksanakan sebesar 14% dan indikator yang belum tersedia datanya sebesar 29%.

4.4.17. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah bertugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan tujuan TPB, berdasarkan tugasnya tersebut di atas, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tujuan TPB nomor 14 dengan 5 indikator. Berdasarkan ketercapaiannya yang ditunjukkan oleh grafik di atas, persentasenya adalah 80% atau 4 indikator yang telah dilaksanakan dan telah mencapai target dan 20% atau 1 indikator yang telah dilaksanakan namun belum memenuhi target.

4.4.18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas untuk membantu Gubernur dalam koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyajian data



kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Terdapat 2 indikator dari 2 tujuan TPB yang telah dilaksanakan oleh Disdukcapil sesuai dengan tugas tersebut di atas.

4.4.19. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur untuk perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan, pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, serta sumber daya kesehatan, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan, pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesehatan dan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.

Berdasarkan tugas dan kewenangannya, Dinas Kesehatan telah melaksanakan tujuan TPB nomor 1,2, dan 6. Dari seluruh OPD lain, Dinas Kesehatan dalam kaitannya dengan tujuan TPB telah melaksanakan 45 (empat puluh lima) indikator

Indikator yang telah dilaksanakan dengan persentase tertinggi 65% merupakan indikator yang telah dilaksanakan dan memenuhi target, 24% untuk indikator yang telah dilaksanakan namun belum memenuhi target, 4% untuk indikator yang belum dilaksanakan dan 7% untuk indikator yang datanya belum tersedia.

4.4.20. Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah bertugas membantu Gubernur dalam bidang ketahanan pangan termasuk ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan serta melaksanakan tugas pembantuan lainnya.

Terkait dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Ketahanan Pangan telah melaksanakan tujuan TPB nomor 2 dengan 4 (empat) indikator. Persentase indikator yang telah dilaksanakan dan memenuhi target sebesar 25% dan indikator yang telah dilaksanakan namun belum memenuhi target sebesar 75%.

4.4.21. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan



kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat 7 (tujuh) indikator yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik. Indikator ini merupakan indikator dari tujuan TPB nomor 5,9, dan 7. Sebanyak 71% indikator telah dilaksanakan dan mencapai target nasional dan sebanyak 29% sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional.

4.4.22. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dari 2 (dua) indikator yang dilaksanakan merupakan indikator dari tujuan TPB nomor 8. Indikator ini telah dilaksanakan dan telah memenuhi target nasional.

4.4.23. Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penataan Hukum Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup telah melaksanakan tugasnya yang terkait dengan tujuan TPB nomor 6 dan 12. Indikator yang ditangani berjumlah 8 (delapan) dengan persentase 12% indikator yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi target nasional, 38% indikator yang telah dilaksanakan namun belum memenuhi target, 12 % indikator yang belum dilaksanakan dan 38% indikator yang datanya belum tersedia. Hal ini agar diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk upaya tambahan bagi indikator yang belum mencapai target dan belum dilaksanakan serta meningkatkan ketersediaan data.

4.4.24. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas dan wewenangnya, Dinas PUPR telah melaksanakan tujuan TPB nomor 1, 6 dan 11 dengan 13 (tiga belas) indikator. Persentase indikator yang telah dilaksanakan dan memenuhi target nasional sebesar 23%, indikator yang telah dilaksanakan namun belum memenuhi target sebesar 39% dan indikator yang belum dilaksanakan sebesar 38%. Hal ini bisa dapat



mengindikasikan bahwa perlu dipersiapkan upaya tambahan agar implementasi indikator TPB dapat dilaksanakan dan memenuhi target.

4.4.25. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Tugas Dinas P3AKKB Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, maka tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Tujuan TPB nomor 5 dan 16 dengan total 16 (enam belas) indikator telah dilaksanakan sesuai dengan uraian tugas di atas. Indikator yang telah dilaksanakan dan telah memenuhi target nasional berjumlah 7 (tujuh) indikator atau 44% dari total indikator. Indikator yang telah dilaksanakan namun belum memenuhi target berjumlah 6 (enam) indikator atau 38% dari total indikator. Indikator yang belum dilaksanakan berjumlah 1 indikator atau 6% dari total indikator dan 2 (dua) indikator atau 12% dari total indikator yang memerlukan perhatian khusus untuk dapat didata karena data belum tersedia.

4.4.26. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas mengkoordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam kaitannya dengan TPB, tugas DPMPTSP merupakan indikator dari tujuan TPB nomor 8. Indikator yang telah dilaksanakan berjumlah 2 (dua) dan dalam hal ini data belum tersedia. Hal ini akan menjadi catatan bagi OPD untuk dapat menyediakan data di masa yang akan datang sehingga ketercapaian TPB dapat terukur serta dapat diketahui indikator mana yang memerlukan upaya tambahan.

4.4.27. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah menjalankan fungsinya untuk merumuskan kebijakan teknis di bidang pendidikan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembinaan pendidikan dasar pembinaan pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa, pembinaan pendidikan non formal dan informal, pembinaan pengembangan standar nasional pendidikan, dan pembinaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan, serta penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.



Dari total 11 (sebelas) indikator yang telah dilaksanakan, 8 (delapan) indikator atau 73% telah memenuhi target nasional dan 3 (tiga) indikator atau 27% belum memenuhi target. 11 (sebelas) indikator ini merupakan indikator dari tujuan TPB nomor 4 dan 5. Hal ini memberikan gambaran bahwa, di masa yang akan datang, Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah perlu melakukan upaya tambahan untuk 3 (tiga) indikator yang belum memenuhi target.

4.4.28. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas tersebut terkait dengan perizinan dan pengawasan perdagangan, peredaran barang, pengembangan industri, pengujian mutu barang, pasar dan urusan kesekretariatan dinas.

Tujuan TPB yang telah dilaksanakan oleh Disperindag merupakan tujuan TPB nomor 9 dengan 3 (tiga) indikator pelaksanaan. 2 (indikator) atau 67% telah dilaksanakan namun belum memenuhi target dan 1 indikator atau 33% belum ada data. Di masa yang akan datang, diperlukan upaya tambahan agar indikator yang belum mencapai target akan dapat memenuhi target serta upaya optimalisasi pendataan untuk mendapatkan gambaran upaya pencapaian TPB yang telah dilaksanakan terkait tugas dan kewenangan OPD.

4.4.29. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perhubungan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini terkait dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan daerah.

Terkait dengan kewenangan tersebut di atas, Dinas Perhubungan telah melaksanakan tujuan TPB nomor 9 dan 11 dengan 3 (tiga) indikator. Pencapaiannya adalah telah dilaksanakan dan telah memenuhi target nasional sebanyak 2 (dua) indikator sedangkan 1 indikator telah dilaksanakan juga namun belum memenuhi target.

4.4.30. Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang perkebunan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugasnya antara lain terkait dengan penganggaran dan penyelenggaraan perkebunan daerah, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.



Tujuan TPB yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan adalah nomor 12 dengan 1 indikator. Indikator ini telah dilaksanakan dan memenuhi target nasional.

4.4.31. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Dinas Perkimtan telah melaksanakan tujuan TPB nomor 1 yang telah memenuhi target nasional.

4.4.32. Dinas Sosial

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur dengan berkontribusi dalam penanganan fakir miskin, meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS dan meningkatkan partisipasi sumber-sumber pelayanan kesejahteraan sosial.

Dinas Sosial dalam tugas dan wewenangnya telah melaksanakan tujuan TPB nomor 1 dan 10 dengan 11 (sebelas) indikator. Telah dilaksanakan dan memenuhi target nasional 29%, telah dilaksanakan namun belum memenuhi target 7%, belum dilaksanakan 2% dan belum ada data 4%

4.4.33. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah bertugas membantu Gubernur dengan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi. Fungsi Disnakertrans adalah merumuskan kebijakan perencanaan, monitoring, evaluasi dan dan pelaporan serta pengendalian teknis di bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan

Disnakertrans sesuai dengan tugas dan fungsinya telah melaksanakan tujuan TPB nomor 2, 4, 8 dan 9. Dari total 12 (dua belas) indikator dari 4 tujuan TPB tersebut 42% telah dilaksanakan dan telah memenuhi target nasional, 50% telah dilaksanakan namun belum memenuhi target dan 8% yang belum dilaksanakan.

Seluruh capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 4-9 Indikator TPB Yang Sudah di Laksanakan dan Mencapai Target (Kategori A)

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Capaian Provinsi
1.	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Meningkat menjadi 18,6 juta	Dinas Sosial	4,81
2.	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 77,4%.	Dinas Kesehatan	95
3.	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 39 daerah	Dinas Kesehatan	70
4.	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Menurun menjadi 118,6	Dinas Kesehatan	63
5.	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat	Dinas Kesehatan	66
6.	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkat menjadi 18,6 juta	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	15,46
7.	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	80,8
8.	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	3
9.	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	99,69
10.	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	Dinas Sosial	319
11.	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	Dinas Ketahanan Pangan	4,98
12.	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	Dinas Kesehatan	8,20
13.	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	Dinas Kesehatan	28
14.	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang	Meningkat menjadi	Dinas Kesehatan	50



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Capaian Provinsi
		mendapatkan ASI eksklusif.	50%		
15.	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	Dinas Kesehatan	156
16.	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	Dinas Kesehatan	85
17.	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	Dinas Kesehatan	8
18.	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	Dinas Kesehatan	6
19.	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	Dinas Kesehatan	7
20.	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	Dinas Kesehatan	0,01
21.	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	Dinas Kesehatan	0,15
22.	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	Dinas Kesehatan	7
23.	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	Dinas Kesehatan	43 Juta Orang (Filariasis) 92 Orang (Kusta)
24.	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	Dinas Kesehatan	1
25.	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.	Dinas Kesehatan	8
26.	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	Dinas Kesehatan	23,4
27.	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	Dinas Kesehatan	69,40
28.	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	Dinas Kesehatan	66
29.	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	Dinas Kesehatan	23,5
30.	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	Dinas Kesehatan	38



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Capaian Provinsi
31.	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	Dinas Kesehatan	2,28
32.	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	Dinas Kesehatan	6,84
33.	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	Dinas Kesehatan	1.908.718
34.	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	Dinas Kesehatan	90
35.	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	Dinas Kesehatan	0,416
36.	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkat menjadi 91,63%	Dinas Pendidikan	92,67
37.	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Dinas Pendidikan	9,00
38.	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkat menjadi 91,63 %	Dinas Pendidikan	92,67
39.	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	54,54
40.	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	Dinas Pendidikan	49,75
41.	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	Dinas Pendidikan	98,90
42.	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	Dinas Pendidikan	98,90
43.	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	Dinas Pendidikan	40
44.	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	DP3AKKB	3
45.	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	DP3AKKB	11,18
46.	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	DP3AKKB	1 : 8
47.	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	DP3AKKB	100



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Capaian Provinsi
48.	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Meningkat menjadi 91,63%	Dinas Pendidikan	92,67
49.	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	DP3AKKB	0,3556
50.	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	70
51.	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	Dinas Kesehatan	1.323
52.	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	Dinas Kesehatan	330
53.	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11
54.	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,31
55.	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9
56.	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	Dinas Lingkungan Hidup	5
57.	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	5,5 juta ha (skala nasional)	Dinas Kehutanan	1384,07
58.	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Meningkat	Dinas ESDM	45,288,26
59.	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Badan Pusat Statistik	59,1
60.	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	25%	Dinas Koperasi dan UMKM	38,18
61.	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	17.924
62.	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	4,10
63.	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Menurun	Dinas Transmigrasi dan	6,13



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Capaian Provinsi
				Tenaga Kerja	
64.	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Dinas Pariwisata	66.436
65.	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	Dinas Pariwisata	700.195
66.	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	Dinas Koperasi dan UMKM	32.526.961
67.	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	6,00
68.	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	Menurun menjadi mendekati 26%	BAPPEDALITBANG	6,4
69.	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	90
70.	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	70
71.	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	47
72.	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	Dinas Sosial	0,336
73.	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	Dinas Sosial	4,81
74.	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat menjadi 32%	Dinas Pehubungan	178% (486.271)
75.	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	132,52
76.	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	2
77.	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	Dinas Perkebunan	20



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Capaian Provinsi
78.	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	ada	BAPPEDALITBANG	1
79.	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	11 WPP	Dinas Kelautan dan Perikanan	1
80.	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	ada	Dinas Kelautan dan Perikanan	9
81.	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	7
82.	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Meningkat	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.702
83.	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Meningkat menjadi 500.000 ha (skala nasional)	Dinas Kehutanan	164.728,77
84.	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Meningkat	Dinas Kehutanan	33
85.	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	DP3AKKB	0,00023
86.	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Badan Keuangan dan Aset Daerah	WTP
87.	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	DP3AKKB	35,56
88.	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	90%
89.	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps)	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	82



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Capaian Provinsi
			49% rumah tangga dan 6% populasi		
90.	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	90%
91.	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah	97,66
92.	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah	100
93.	17.18.1.(c)	Jumlah metadada kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah	35
94.	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	863.885 (Kelahiran) 26.033 (Kematian)
95.	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah	46.849
96.	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah	98,27



Tabel 4-10 Indikator TPB Yang Sudah di Laksanakan dan Belum Mencapai Target (Kategori B)

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Capaian Provinsi
1.	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	Dinas Sosial	44.075
2.	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82,16%
3.	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64,79%
4.	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Meningkat menjadi 91,63%	Dinas Pendidikan	77,58%
5.	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	Dinas ESDM	1,62
6.	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	84.296/100.000
7.	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	BAPPEDALITBANG	36,95%
8.	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	11,09%
9.	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	11,09%
10.	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	TAD (Pendek) 11,8% (sangat pendek)
11.	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	9,8%
12.	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	54,90%
13.	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan	83,2



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Capaian Provinsi
		konsumsi ikan.	konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Tengah	
14.	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	54.584.793,77
15.	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	78,15%
16.	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	79
17.	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	58
18.	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Menurun	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	16,4
19.	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkat menjadi 280	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	11
20.	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	71,4
21.	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.	Menurun	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	TAD
22.	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,6%	Dinas Pendidikan	75%
23.	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Meningkat	Dinas Pendidikan	45
24.	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	DP3AKKB	1 : 8
25.	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15	Menurun	DP3AKKB	20,16



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Capaian Provinsi
		tahun dan sebelum umur 18 tahun.			
26.	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	DP3AKKB	20,80
27.	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	DP3AKKB	83
28.	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	DP3AKKB	10,88
29.	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	12%
30.	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	77,10%
31.	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	82,16%
32.	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49,81%
33.	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64,79%
34.	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	56,8
35.	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Meningkat menjadi 96,6%	Dinas ESDM	85,72
36.	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Meningkat menjadi 1.200 KWh	Dinas ESDM	1,153,520,906
37.	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Meningkat	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	6,15%
38.	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	4,79
39.	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian,	Meningkat	Dinas Transmigrasi dan	39,61



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Capaian Provinsi
		berdasarkan jenis kelamin.		Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	
40.	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	50,04
41.	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	66,84
42.	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	21,91
43.	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkat	Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan Tengah	1
44.	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	24 pelabuhan (skala nasional)	Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan Tengah	19
45.	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14,97
46.	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4,26
47.	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	84.296/100.000
48.	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	
49.	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	4966,76
50.	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	84.296/100.000
51.	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Meningkat menjadi	Dinas Kelautan dan	85%



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Capaian Provinsi
			87%	Perikanan	
52.	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	47,19%
53.	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional)	BPDASHL Kahayan (UPT KemenLHK)	100
54.	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	-
55.	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	63,05
56.	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	57,68%
57.	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	59,59 (C)
58.	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	DP3AKKB	10,88
59.	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Rp310.161.331.179



Tabel 4-11 Indikator TPB Yang Belum di Laksanakan dan Belum Mencapai Target (Kategori C)

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Keterangan
1.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	Dinas Sosial	
2.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
3.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
4.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	
5.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	
6.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	DP3AKKB	
7.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m ³ /detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
8.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
9.	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	ada	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Kasus penagekalan hukum lingkungan yang dilakukan masih fokus pada kasus lingkungan hidup
10.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Keterangan
11.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	
12.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	Dinas Sosial	
13.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Biro Hukum	
14.	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
15.	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
16.	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	
17.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
18.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Belum dilakukan update data pengurangan resiko bencana yang disusun BNPB
19.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Belum dilakukan update data pengurangan resiko bencana yang disusun BNPB
20.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Rehabilitasi lahan kritis baru direncanakan akan dimulai tahun 2022



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Keterangan
21.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	



Tabel 4-12 Indikator TPB Yang Tidak Memiliki Data (Kategori D)

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Keterangan
1.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Dinas Sosial	
2.	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Dinas Sosial	
3.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	Dinas Sosial	
4.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	Dinas Kesehatan	
5.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur \geq 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	Dinas Kesehatan	
6.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	Dinas Kesehatan	
7.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	Dinas Lingkungan Hidup	
8.	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Luas areal perhutanan sosial sesuai alokasi di masing-masing provinsi (lihat peta PIAPS KemenLHK)	Dinas Kehutanan	
9.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	Dinas Lingkungan Hidup	
10.	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	15 DAS Prioritas	Dinas Kehutanan	
11.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	Dinas Pariwisata	
12.	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	Dinas Pariwisata	
13.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	DPMPSTP	
14.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	DPMPSTP	
15.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
16.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK	Dinas Sosial	



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Keterangan
			informal 3,5 juta		
17.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	
18.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	Balai Konservasi Sumber Daya Alam	
19.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
20.	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
21.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
22.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	DP3AKKB	
23.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	DP3AKKB	
24.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam,	
25.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Biro Hukum	
26.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam,	
27.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam,	
28.	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	Bappedalitbang	



Tabel 4-13 Capaian Target Indikator TPB Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2019

No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun								
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	%	5,36	5,26	5,10	4,81	Dinas Sosial
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	%	66,50	71,80	85	95	Dinas Kesehatan
3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	-	-	-	-	Dinas Sosial
4	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.		15.127	30.402	44.529	44.075	Dinas Sosial
5	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	73,05	74,89	67,20	70	Dinas Kesehatan
6	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	%	59,5	60,7	61,8	63	Dinas Kesehatan
7	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	%	65,4	65,6	65,8	66	Dinas Kesehatan
8	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	77,14	78,75	80,13	82,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	%	19,23	50,38	62,16	64,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	%	9,57	9,78	8,88	15,46	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
11	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	%	77,52	77,54	77,56	77,58	Dinas Pendidikan
12	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	-	69,9	76,7	80,8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
13	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	%	0,30	0,33	0,31	1,62	Dinas ESDM
14	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang/ 100.000	16.079/ 100.000	249.305/ 100.000	1/ 100.000	84.296/ 100.000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
15	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Lokasi	2	0	2	3	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
16	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Orang	-	-	-	-	Dinas Sosial
17	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Orang	-	-	-	-	Dinas Sosial
18	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Daerah	-	-	-	-	Dinas Sosial
19	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Indeks	119,62	112,05	103,05	99,69	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
20	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Rupiah	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
21	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
22	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	%	193	176	358	319	Dinas Sosial
23	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai	%	-	-	-	36,95	BAPPEDALITBANG



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
		persentase dari total belanja pemerintah.						
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan								
1	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	%	5,66	5,37	5,17	4,98	Dinas Ketahanan Pangan
2	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	%	24,74	23,60	21,80	8,20	Dinas Kesehatan
3	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	%	11,17	12,95	9,14	11,09	Dinas Ketahanan Pangan
4	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	%	11,17	12,95	9,14	11,09	Dinas Ketahanan Pangan
5	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	22,91 (Pendek) 11,2% (sangat pendek)	23,6 (Pendek) 15,4% (sangat pendek)	21,32% (Pendek) 12,72% (sangat pendek)	TAD (Pendek) 11,8% (sangat pendek)	Dinas Kesehatan
6	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	%	26,1	29,6	28,8	28	Dinas Kesehatan
7	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	%	9,8% (Wasting) 6,1% (Obesitas)	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan
8	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	%	54,90	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan
9	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	%	22,80	44	47	50	Dinas Kesehatan
10	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Indeks	87,8	89,8	82,8	83,2	Dinas Ketahanan
11	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Rupiah	49.993.478,76	52.710.979,15	54.584.793,77	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia								
1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Indeks	160	160	158	156	Dinas Kesehatan
2	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	%	78,15	PM	PM	PM	Dinas Kesehatan
3	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	%	82,2	79	82	85	Dinas Kesehatan
4	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Jiwa	9	9	9	8	Dinas Kesehatan
5	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Jiwa	7	7	7	6	Dinas Kesehatan
6	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Jiwa	8	8	8	7	Dinas Kesehatan
7	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	%	75	77	78,6	79	Dinas Kesehatan
8	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.		0,011	0,011	0,011	0,01	Dinas Kesehatan
9	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Jiwa	61,96	63,66	60,88	58	Dinas Kesehatan
10	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Jiwa	0,19	0,19	0,19	0,15	Dinas Kesehatan
11	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Jumlah Kabupaten	5	6	6	7	Dinas Kesehatan
12	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Jiwa	63 Juta Orang (Filariasis) 71 Orang (Kusta)	52 Juta Orang (Filariasis) 100 Orang (Kusta)	50 Juta Orang (Filariasis) 99 Orang (Kusta)	43 Juta Orang (Filariasis) 92 Orang (Kusta)	Dinas Kesehatan
13	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Jiwa	0	0	1	1	Dinas Kesehatan
14	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Jumlah Kabupaten	5	7	7	8	Dinas Kesehatan
15	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	%	TAD	TAD	TAD	TAD	Dinas Kesehatan
16	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	%	32,4	24,2	23,8	23,4	Dinas Kesehatan
17	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	%	20,7	15,4	16	16,4	Dinas Kesehatan
18	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat	Indeks	TAD	TAD	TAD	TAD	Dinas Kesehatan



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
		bunuh diri.						
19	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah Kabupaten	7	8	10	11	Dinas Kesehatan
20	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	%	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
21	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Liter per Kapita	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
22	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Indeks	60,7	60,9	61,1	61,3	Dinas Kesehatan
23	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Indeks	65,4	65,6a	65,8	66	Dinas Kesehatan
24	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Indeks	21,19	21,7	22,3	23,5	Dinas Kesehatan
25	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Indeks	44	42	40	38	Dinas Kesehatan
26	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Indeks	2,36	2,33	2,31	2,28	Dinas Kesehatan
27	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	%	5,62%	TAD	6,76%	TAD	Dinas Kesehatan
28	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Jiwa	1.374.101	1.828.866	1.844.175	1.908.718	Dinas Kesehatan
29	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	%	53,88	70,2	69,3	71,4	Dinas Kesehatan
30	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	%	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
31	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	%	29,21%	TAD	24,34%	TAD	Dinas Kesehatan
32	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	81,57	83	86	90	Dinas Kesehatan
33	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Indeks	0,381	0,393	0,405	0,416	Dinas Kesehatan



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua								
1	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	%	77	78	73	75	Dinas Pendidikan
2	4.1.1.(f)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	%	78,44	87,91	92,38	92,67	Dinas Pendidikan
3	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	%	8,25	8,50	8,75	9,00	Dinas Pendidikan
4	4.3.1.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	%	78,44	87,91	92,38	92,67	Dinas Pendidikan
5	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	%	28,52	35,43	43,17	54,54	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah
6	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	%	47,50	48,60	49,12	49,75	Dinas Pendidikan
7	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	%	97,20	97,80	98,60	98,90	Dinas Pendidikan
8	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	%	97,20	97,80	98,60	98,90	Dinas Pendidikan
9	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	%	60	55	50	45	Dinas Pendidikan
10	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	%	25,00	30,00	35	40	Dinas Pendidikan



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan								
1	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Kebijakan	1 Kebijakan Provinsi 2 kebijakan Kab/Kota	1 Kebijakan Provinsi 2 kebijakan Kab/Kota	1 Kebijakan Provinsi 2 kebijakan Kab/Kota	1 Kebijakan Provinsi 2 kebijakan Kab/Kota	DP3AKKB
2	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Perbandingan	1 : 4	1 : 7	1 : 7	1 : 8	DP3AKKB
3	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	%	0,00019%	0,00032%	0,00028%	0,00023%	DP3AKKB
4	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Perbandingan	1 : 4	1 : 7	1 : 7	1 : 8	DP3AKKB
5	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	%	100	100	100	100	DP3AKKB
6	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	%	-	20,94	19,13	20,16	DP3AKKB
7	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Indeks	-	20,80	-	-	DP3AKKB
8	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Jiwa	-	83 per 1000	-	-	DP3AKKB
9	5.3.1.(c)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	%	78,44	87,91	92,38	92,67	Dinas Pendidikan
10	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Indeks	0,2667	0,2667	0,2667	0,3556	DP3AKKB
11	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Indeks	7,6	6,50	6,34	10,88	DP3AKKB
12	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait	%	-	99,10	-	-	DP3AKKB



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
		hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.						
13	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%	11,9	6,3	9,5	12	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Prov. Kalteng
14	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%	98,90	99,10	75,50	77,10	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Prov. Kalteng
15	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	%		66	68	70	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan								
1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	%	77,14	78,75	80,13	82,16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Indeks	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	%	-	-	-	49,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	%	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	%	19,23	50,38	62,16	64,79	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Desa/ Kelurahan	756	930	1147	1323	Dinas Kesehatan
7	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Desa/ Kelurahan	136	181	267	330	Dinas Kesehatan
8	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun		9	10	11	11	Dinas Pekerjaan



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
		infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.						Umum dan Penataan Ruang
9	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	%	0,27	0,29	0,31	0,31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Kabupaten /Kota	7	8	9	9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Indeks	82,22	62,35	61,15	56,8	Dinas Lingkungan Hidup
12	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Kegiatan	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
13	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Jumlah	5	5	5	5	Dinas Lingkungan Hidup
14	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Jumlah	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
15	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Luas	-	-	-	-	Dinas Kehutanan
16	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Jumlah	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Kegiatan	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup
18	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Luas	90	2034,5	1539,77	1384,07	Dinas Kehutanan
19	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Jumlah	-	-	-	-	Dinas Kehutanan



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua								
1	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Indeks	83,5	75,9	75,89	85,72	Dinas ESDM
2	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Indeks	1,081,748,058	1,091,346,515	1,119,556,538	1,153,520,906	Dinas ESDM
3	7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.	Indeks	25.688,88	42.254	44.155,44	45,288,26	Dinas ESDM
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua								
1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	%	9,48	9,99	7,98	6,15	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
2	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Rupiah	47,9 Juta	51,9 Juta	56 Juta	59,1 Juta	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah
3	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	%	3,49	8,95	-0,71		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	%	44,40	40,82	39,97	39,61	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
5	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	%	41,35	45,67	48,61	50,04	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	%	83,75	74,47	69,73	66,84	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
7	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	%	43.691 (145,64)	32.606 (101,89)	35.603 (104,71)	38.181 (106,06)	Dinas Koperasi dan UMKM
8	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Indeks	16.645	16.526	17.352	17.924	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
9	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Indeks	4,82	4,23	4,01	4,10	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
10	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	Indeks	8,95	9,15	7,23	6,13	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
11	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	%	22,50	21,10	22,38	21,91	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
12	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	%	-	-	-	-	Dinas Pariwisata



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
13	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Jiwa	20.496	26.159	38.610	66.436	Dinas Pariwisata
14	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Jiwa	824.130	839.915	952.389	700.195	Dinas Pariwisata
15	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Rupiah	-	-	-	-	Dinas Pariwisata
16	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Jumlah Pekerja	n/a	n/a	n/a	n/a	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
17	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Jumlah ATM	-	-	-	-	DPMPTSP
18	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Indeks	-	-	-	-	DPMPTSP
19	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Indeks	26.867.136 (107,47)	29.075.795 (107,69)	33.170.104 (114,38)	32.526.961 (104,93)	Dinas Koperasi dan UMKM
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi								
1	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Jumlah	5	3	2	1	Dinas Pehubungan
2	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Jumlah	19	19	19	19	Dinas Pehubungan
3	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	%	16,47	16,78	15,70	14,97	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Indeks	7,45	8,95	5,11	4,26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	%	4,99	4,69	5,53	6,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
6	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	%	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	9.4.1(a)	Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca.	%	7	6,83	6,60	6,4	BAPPEDALITBANG
8	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	%	-	-	-	90	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
9	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	%	-	66	68	70	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
10	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	%	-	29	36	47	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara								
1	10.1.1*	Koefisien Gini.	Indeks	0,330	0,342	0,342	0,336	Dinas Sosial
2	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional,	%	5,36	5,26	5,10	4,81	Dinas Sosial



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
		menurut jenis kelamin dan kelompok umur.						
3	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	%	-	8,17	6,17	12,56	Dinas Sosial
4	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah	-	-	-	-	Biro Hukum
5	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	%	-	-	-	-	Dinas Sosial
Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan								
1	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Jumlah					Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	%	55 (94.991)	54 (135.048)	167 (433.708)	178 (486.271)	Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan Tengah
3	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang/ 100.000	16.079/100.00 0	249.305/100.0 00	1/100.000	84.296/100.00 0	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
4	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Indeks	134,46	133,61	133	132,52	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
5	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Jumlah	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
6	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Jumlah	2	2	2	2	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
7	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Jumlah	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
8	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	%	-	-	71,30	-	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
9	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Jumlah	-	-	-	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan								
1	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah	892,67	2555,26	9447,06	4966,76	Dinas Lingkungan Hidup
2	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Jumlah					Dinas Lingkungan Hidup
3	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Jumlah	10	18	20	20	Dinas Perkebunan
Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya								
1	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen	-	-	-	-	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
2	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Orang/100.000	16.079/100.000	249.305/100.000	1/100.000	84.296/100.000	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
3	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen	1	1	1	1	BAPPEDALITBANG
Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan								
1	14.2.1.(b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Wilayah	1	1	11	1	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	%	100	78	80	85	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Jumlah	7	7	7	9	Dinas Kelautan dan Perikanan



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
4	14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan.	Jumlah	7	7	7	7	Dinas Kelautan dan Perikanan
5	14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Jumlah	5026	7543	699	3702	Dinas Kelautan dan Perikanan
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati								
1	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	%	48,92	48,16	48,01	47,19	Dinas Kehutanan
2	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Hektar	-	-	225	100	BPDASHL Kahayan (UPT KemenLHK)
3	15.2.1.(b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Luasan	164.728,77	164.728,77	164.728,77	164.728,77	Dinas Kehutanan
4	15.2.1.(d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Jumlah	33	33	33	33	Dinas Kehutanan
5	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	%	0,045	0,010	0,808	0,304	Dinas Kehutanan
6	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen	-	-	-	-	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan								
1	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Jumlah Kasus	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	orang/100.000	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	%	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	%	-	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	%	-	-	-	-	DP3AKKB
6	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	%	0,00019	0,00032	0,00028	0,00023	DP3AKKB



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
7	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	%	-	-	-	-	DP3AKKB
8	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	%	-	85,59	94,78	-	Badan Pusat Statistik
9	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	%	-	-	-	-	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
10	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	%	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan dan Aset Daerah
11	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	61,2	61,35	62,86	63,05	Biro Organisasi,
12	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	%	-	81,59	88,17	57,68	Biro Administrasi Pembangunan,
13	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	%	-	59,70 (C)	59,28 (C)	59,59 (C)	Biro Organisasi,
14	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	%	26,67	26,67	26,67	35,56	DP3AKKB
15	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	%	7,6	6,50	6,34	10,88	DP3AKKB
16	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Kebijakan	-	-	-	-	Biro Hukum
Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan								
1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut	Rupiah	1.158.303.928.014,48	1.342.330.618.184,76	1.616.749.836.378,16	310.161.331.179	Badan Pendapatan Daerah



No	No. Indikator	Indikator	Satuan	Capaian TPB				SKPD Pelaksana
				2016	2017	2018	2019	
		sumbernya.						
2	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Indeks	-	-	-	-	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
3	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	%	-	-	-	-	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam,
4	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	%	-	-	-	82	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
5	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	%	-	-	-	90	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
6	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	%	-	-	-	90	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
7	17.18.1. (a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	%	95,53	98,94	96,20	97,66	Badan Pusat Statistik
8	17.18.1. (b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	%	81,22	84,21	90,11	100	Badan Pusat Statistik
9	17.18.1. (c)	Jumlah metadada kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Jumlah	1	30	30	35	Badan Pusat Statistik
10	17.18.1. (d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	%	-	-	-	-	BAPPEDALITBANG
11	17.19.2. (b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Jiwa		727.348 (Kelahiran) 11.093 (Kematian)	763.857 (Kelahiran) 17.036 (Kematian)	863.885 (Kelahiran) 26.033 (Kematian)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
12	17.19.2. (c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Jiwa	26.833	32.799	45.624	46.849	Badan Pusat Statistik
13	17.19.2. (d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	%	92,68	99,23	95,50	98,27	Badan Pusat Statistik



BAB-5

PERUMUSAN ISU STRATEGIS, TUJUAN TPB DAN SASARAN PRIORITAS

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026





BAB 5

PERUMUSAN ISU STRATEGIS, TUJUAN TPB DAN SASARAN PRIORITAS

5.1. Proses Identifikasi dan Perumusan Isu Prioritas

Kondisi sosial politik, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola kelembagaan harus menjadi pertimbangan dalam pengkajian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB). Kondisi keempat aspek tersebut dapat dianalisis melalui data capaian pada tiap indikator TPB yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan membandingkannya terhadap target nasional untuk mengetahui pencapaian target TPB di Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan analisis capaian TPB Provinsi Kalimantan Tengah terhadap 204 indikator TPB yang relevan, menunjukkan bahwa sebanyak 46,57 % Indikator TPB telah mencapai target nasional, 29,41% indikator TPB sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 10,29% indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target dan sebanyak 13,73% tidak dapat dilakukan analisis karena tidak tersedia data.

Adanya kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dengan target TPB yang harus dicapai, menjadi salah satu dasar untuk perumusan isu prioritas. Selain memperhitungkan gap capaian TPB terhadap target nasional, perumusan isu prioritas juga mempertimbangkan isu dari kondisi muatan lingkungan hidup, isu strategis dari masukan konsultasi publik.

Berdasarkan hasil proyeksi dan kajian 6 Muatan daya dukung, maka terdapat enam belas (16) tujuan yang menjadi sasaran prioritas dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam merumuskan arah kebijakan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua



9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
10. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
11. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
12. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
13. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan
14. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati
15. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
16. Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

5.2. Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas TPB

Dari 16 tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi prioritas dalam merumuskan kebijakan dan arah pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penting untuk menelaah kembali mana dari 16 TPB tersebut yang menjadi kajian strategis yang dimana akan secara optimal dan tepat dalam merealisasikan rencana program yang telah disusun. Berikut adalah Usulan isu dan sasaran strategis RPJMD berdasarkan hasil kajian KLHS;



Tabel 5-1 Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Sosial

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak ada data	Belum diterapkannya sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.
	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Belum tercapainya target nasional menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat		
	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Belum tercapainya target nasional Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Belum terwujudnya jaminan bagi semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.
	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Belum tercapainya target nasional Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.		
	1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Belum tercapainya target nasional meningkatnya Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63%		
	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Belum tercapainya target nasional meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100%		
	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Masih meningkatnya jumlah korban meninggal akibat terkena dampak bencana	Belum terwujudnya ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.
	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Belum dilaksanakan		
	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Tidak ada data		
	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Tidak ada data		



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Belum dilaksanakan	Belum meratanya mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.	Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Belum dilaksanakan		
	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan		
Tujuan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Belum mencapai target nasional Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat setiap tahun mengalami penurunan	Belum tercapainya akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Belum mencapai target nasional proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari menurun hingga mencapai 85.%		
	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan		
	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan		
	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Belum mencapai target nasional menurun menjadi 28%		
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Belum mencapai target nasional meningkat skor pPH mencapai 92,5 dan tingkat konsumsi ikan mencapai 54,5 kg/kapita/tahun		



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Masih rendahnya produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian	Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.
Tujuan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Belum mencapai target nasional peningkatan persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 %	Masih terjadinya angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Belum mencapai target nasional meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95%	Masih terjadinya kasus kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Belum mencapai target nasional Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245	Masih adanya epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.
	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Belum dilaksanakan	Masih terjadinya sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Belum mencapai target nasional prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4%		
	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Belum dilaksanakan		
	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Belum mencapai target nasional meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280		



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Tidak ada data	Belum optimalnya pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.
	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Tidak ada data		
	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Belum mencapai target nasional Menurunnya unmet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91%	Belum tercapainya cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Belum mencapai target Nasional meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95%		
	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Tidak ada data	Masih tingginya jumlah jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah.
	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Belum mencapai target nasional Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun menurun setiap tahun	Belum maksimalnya pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.
Tujuan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Belum mencapai target nasional persentase SMA/MA berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,6%	Belum optimalnya semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.
	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Masih rendahnya fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Masih tingginya angka kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Masih terjadinya praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Belum mencapai target nasional median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun		
	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Belum mencapai target nasional menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun		
	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Belum dilaksanakan	Masih rendahnya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan <i>Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform</i> serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Belum mencapai target nasional Menurunnya unmet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9%		
	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Belum mencapai target nasional meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi		



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
			modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85%		



Tabel 5-2 Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Ekonomi

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 7 Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Belum mencapai target nasional Meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi 96,6% pada tahun 2019	Belum terwujudnya jaminan akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.
	7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Belum mencapai target nasional Meningkatnya konsumsi listrik per kapita menjadi 1.200 KWh pada tahun 2019		
Tujuan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Belum mencapai target nasional pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja setiap tahun meningkat	Belum terwujudnya produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.
	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Belum mencapai target nasional Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019		
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan		
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Belum terwujudnya pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.
	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak	Belum mencapai target nasional meningkatnya keterampilan pekerja	Belum tercapainya proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
		sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.		tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Tidak ada data	Belum terwujudnya kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Tidak ada data		
	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Belum dilaksanakan		
	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Tidak ada data	Belum optimalnya kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.
	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Tidak ada data		
	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Belum mencapai target nasional meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.		
Tujuan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Belum mencapai target nasional meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019	Belum terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Belum mencapai target nasional Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019		
	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum optimalnya industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Belum mencapai target nasional meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB		
	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Tidak ada data	Masih rendahnya akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.	Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya	Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.	Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.
	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Tidak ada data	Belum terwujudnya kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.
Tujuan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum terwujudnya sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tidak ada data		
	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Tidak ada data		
	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Belum mencapai target nasional meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Belum optimalnya kerjasama Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami peningkatan	Belum optimalnya penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.	Mengoperasionalkan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang	



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
					berkembang pada tahun 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.
	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Tidak ada data	Belum terwujudnya dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.



Tabel 5-3 Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Lingkungan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 6 Menjamin Ketersediaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Belum mencapai target nasional meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100%	Belum tercapainya akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.
	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Belum dilaksanakan		
	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Belum mencapai target nasional meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100%		
	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.
	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Belum mencapai target nasional akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100%		
	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Belum mencapai target nasional peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II	Belum tercapainya kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	Belum dilaksanakan	Belum terlaksananya efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Tidak ada data	Belum terwujudnya pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.
	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Tidak ada data		
	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Belum dilaksanakan		
	6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Tidak ada data	Belum terwujudnya perlindungan dan restorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	
	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Tidak ada data		
Tujuan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.
	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan	Masih Tingginya jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.
	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Belum dilaksanakan		
	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Belum dilaksanakan		
	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Belum mencapai target nasional cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019	Masih tingginya dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
		metropolitan dan kota sedang.		perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas	terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.
	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030	Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.
Tujuan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Belum mencapai target nasional Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019	Belum optimalnya pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Tidak ada data	Belum optimalnya pengurangan produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.
Tujuan 13 Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.
	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun mengalami penurunan		
Tujuan 14 Melestarikan dan Memanfaatkan secara	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Belum mencapai target nasional dengan target setiap tahun terkendalinya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan	Belum terwujudnya pelarangan subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan,	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan			kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2019	menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.
Tujuan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	belum mencapai target nasional meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Belum tercapainya pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
	15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	Belum mencapai target nasional Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha	Belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.
	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya penghentian penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Tidak ada data	Belum terwujudnya integrasi nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.



Tabel 5-4 Identifikasi Permasalahan, Rumusan Isu Strategis dan Sasaran Prioritas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pilar Hukum dan Tata Kelola

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
Tujuan 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Belum dilaksanakan	Belum terwujudnya pengurangan segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.
	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Tidak ada data		
	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Belum dilaksanakan		
	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Tidak ada data		
	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Tidak ada data	Masih terjadinya perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.
	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Tidak ada data		
	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Belum mencapai target nasional Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019	Belum optimalnya pengurangan korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.
	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Tidak ada data	Belum terwujudnya lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Belum mencapai target nasional Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019			



Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Nomor Indikator	Indikator TPB	Permasalahan	Isu Strategis	Sasaran Prioritas
	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Belum mencapai target nasional Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019		
	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Belum mencapai target nasional meningkatnya indeks RB menjadi Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%		
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Belum mencapai target nasional keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) meningkat	Belum terwujudnya pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.
	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Tidak ada data	Belum terwujudnya kebijakan diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.



5.3. Isu Strategis Lingkungan Hidup

Permasalahan utama lingkungan hidup selalu berkaitan dengan tiga komponen utama lingkungan hidup yakni tanah, air, dan udara. Dari hasil analisis yang telah dilakukan dan diskusi intensif dengan berbagai pihak, maka dihasilkan enam kelompok komponen lingkungan yang perlu dibahas secara seksama, yakni: (i) lahan dan hutan; (ii) air; (iii) udara; (iv) pesisir dan lautan; (v) kebencanaan dan perubahan iklim, dan (vi) pangan. Berikut ini daftar panjang isu strategis terkait dengan masing-masing komponen tersebut

5.3.1. Isu Strategis Terkait Lahan dan Hutan

Isu-isu strategis terkait dengan lahan dan hutan di Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Alih fungsi lahan gambut untuk kegiatan PSN *food estate* seluas \pm 165.000 Ha.
- b. Kebakaran hutan dan lahan.
- c. Konflik *tenurial* antara perusahaan perkebunan/pertambangan dengan masyarakat.
- d. Alih fungsi lahan untuk proyek PSN (tanaman singkong) oleh Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS), kementerian Pertahanan seluas \pm 30.000 Ha dan direncanakan akan dikembangkan hingga mencapai \pm 400.000 Ha.
- e. Masih tingginya laju *deforestasi* dan alih fungsi lahan menjadi kebun sawit.

5.3.2. Isu Strategis Terkait Air

Isu-isu strategis terkait dengan air, di Kalimantan Tengah adalah:

- a. Penurunan indeks kualitas air (IKA) sehingga berpengaruh terhadap penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Fluktuasi debit air sungai saat musim hujan dan kemarau sangat tinggi

5.3.3. Isu Strategis Terkait Udara dan Perubahan Iklim

Isu strategis terkait udara adalah terjadinya penurunan kualitas udara saat terjadi kebakaran hutan yang berdampak pada peningkatan konsentrasi PM 10 dan PM2.5, dan menyebabkan emisi carbon sehingga berdampak terhadap perubahan iklim.

5.3.4. Isu Strategis Terkait Pesisir dan Lautan

Isu terkait dengan pesisir dan lautan umumnya adalah terjadinya abrasi di pantai yang mengancam pemukiman dan sarana vital masyarakat.

5.3.5. Isu Strategis Terkait Kebencanaan

Isu terkait kebencanaan di wilayah Kalimantan Tengah sebagian besar di dominasi oleh kejadian banjir di beberapa wilayah dan terjadinya longsor.



5.4. Isu Prioritas

Permasalahan, isu strategis dan prioritas daerah salah satunya dirumuskan berdasarkan hasil kajian pencapaian indikator TPB. Asumsi ini didasarkan bahwa pencapaian indikator TPB menjadi fokus perhatian dalam konteks keberlanjutan pembangunan di suatu daerah. Indikator TPB yang telah dilaksanakan, namun belum mencapai target dijadikan sebagai baseline yang mendapatkan perhatian dalam perencanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 untuk dipenuhi target pencapaiannya. Sehingga dengan sendirinya permasalahan, isu strategis dan prioritas diterjemahkan dari indikator yang belum mencapai target tersebut, sedangkan untuk indikator TPB yang telah mencapai target, belum dilaksanakan dan belum ada data bukan berarti diabaikan namun tetap diperhatikan dalam pencapaiannya kedepan, dilaksanakan dan diupayakan pemenuhan datanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.

Berdasarkan analisis capaian TPB Provinsi Kalimantan Tengah terhadap 204 indikator TPB yang relevan, menunjukkan bahwa sebanyak 45,59% Indikator TPB telah mencapai target nasional, 30,39% indikator TPB sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target, 10,29% indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target dan sebanyak 13,73% tidak dapat dilakukan analisis karena tidak tersedia data.



Tabel 5-5 Indikator TPB Di Kalimantan Tengah yang Sudah di Laksanakan dan Belum Mencapai Target

No TPB	Tujuan TBP	No Indikator	Indikator	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	Dinas Sosial	Menurun	Masih meningkat	-
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkat menjadi 100%	82,16%	-17,84%
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkat menjadi 100%	64,79%	-35,21
		1.4.1.(i)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	Dinas Pendidikan	Meningkat Menjadi 91,63%	77,58%	-14,05
		1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Dinas ESDM	Meningkat menjadi 100%	1,62	-98,38
		1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Menurun	Fluktuatif	-
		1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BAPPEDALITBANG	Meningkat	Fluktuatif	-
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik,	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun	Fluktuatif	-



No TPB	Tujuan TBP	No Indikator	Indikator	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
	serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun menjadi 8,5 %	11,09%	+2,59
		2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun	Fluktuatif	-
		2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun	Fluktuatif	-
		2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun menjadi 28%	54,90%	+31,9%
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	83,2	-9,3
		2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Fluktuatif	-
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 95%	78,15%	-16,85
		3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 95%	79%	-16
		3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun	Fluktuatif	-



No TPB	Tujuan TBP	No Indikator	Indikator	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
		3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 280	11	-269
		3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun menjadi 9,91%	16,4%	+6,49
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi minimal 95%	71,4	-23,6
		3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun	Fluktuatif	-
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(c)	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	Meningkat menjadi 84,6%	75%	-9,6
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	Dinas Pendidikan	Meningkat	Fluktuatif	-
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3AKKB	Menurun	Meningkat	-



No TPB	Tujuan TBP	No Indikator	Indikator	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
		5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DP3AKKB	Menurun	Fluktuatif	-
		5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DP3AKKB	Meningkat menjadi 21 tahun	20,80 Tahun	-0,2
		5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DP3AKKB	Menurun menjadi 38 tahun	83	+45
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	DP3AKKB	Meningkat	Fluktuatif	-
		5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	Menurun menjadi 9,9%	12%	+2,1
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 85%	77,10	-7,9
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkat menjadi 100%	82,16%	-17,84
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkat menjadi 100%	49,81%	-50,19
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Meningkat menjadi 100%	64,79%	-35,21



No TPB	Tujuan TBP	No Indikator	Indikator	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Menurun	-
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Dinas ESDM	Meningkat menjadi 96,6%	85,72%	-10,88
		7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	Dinas ESDM	Meningkat menjadi 1.200 KWh		
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Menurun	-
		8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Fluktuatif	-
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Menurun	-
		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	51%	50,04%	-0,96
		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Menurun	-
		8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Fluktuatif	-



No TPB	Tujuan TBP	No Indikator	Indikator	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Menurun	-
		9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan Tengah	24 pelabuhan (skala nasional)	19	-5
		9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Meningkat	Fluktuatif	-
		9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Fluktuatif	-
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Menurun	Fluktuatif	-
		11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 80%	71,30%	-8,7
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Fluktuatif	-
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Menurun	Fluktuatif	-
14	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan	14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkat menjadi 87%	85%	-2%



No TPB	Tujuan TBP	No Indikator	Indikator	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
	Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan						
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Menurun	-
		.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	BPDASHL Kahayan (UPT KemenLHK)	Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional)	325	-
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah			
		16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat menjadi: Provinsi: 75%,	63,05%	-11,95
		16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Menjadi menjadi 80%	57,68%	-22,32



No TPB	Tujuan TBP	No Indikator	Indikator	SKPD Pelaksana	Target Perpres 59/2017	Kondisi Saat Ini	Gap
		16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat 60%,	59,59%	-0,41
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	Fluktuatif	-
		17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	Meningkat	90	-



Tabel 5-6 Isu Strategis Lingkungan Hidup

No	Isu Strategis Lingkungan Hidup	Isu TPB	No. Indikator
1	Isu Strategis Terkait Lahan dan Hutan	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
			15.2.1.(a) Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.
			15.3.1.(a) Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.
2	Isu Strategis Terkait Air	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
			6.1.1.(b) Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
			6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
			6.2.1.(a) Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.
			6.2.1.(b) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
			6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
			6.4.1.(a) Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.
			6.5.1.(c) Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.
6.6.1.(e) Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.			
3	Isu Strategis Terkait Udara dan Perubahan Iklim	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.2.1.(a) Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).
4	Isu Strategis Terkait Pesisir dan Lautan	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera	14.2.1.(b) Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.
			14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.



No	Isu Strategis Lingkungan Hidup	Isu TPB	No. Indikator
		untuk Pembangunan Berkelanjutan	14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan
5	Isu Strategis Terkait Kebencanaan	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.



BAB-6

PERUMUSAN SKENARIO, ALTERNATIF DAN REKOMENDASI

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026





BAB 6

PERUMUSAN SKENARIO, ALTERNATIF DAN REKOMENDASI

Perumusan skenario merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) untuk pencapaian target TPB pada tahun 2026 berdasarkan kinerja Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilakukan selama ini. Kondisi lingkungan hidup terutama terkait dengan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta jasa lingkungan di Provinsi Kalimantan Tengah. Proyeksi secara umum dilakukan dengan pendekatan linier berdasarkan tren yang terjadi saat ini serta gap terhadap indikator dalam TPB nasional dalam Perpres No. 59 tahun 2017 yang merupakan target sampai dengan tahun 2030.

6.1. Kriteria Penyusunan Alternatif Program

Penyusunan alternative program dalam upaya percepatan pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan disusun dengan berdasarkan pada beberapa kriteria yang disepakati para pihak. Kriteria yang dijadikan pertimbangan untuk disepakati para pihak dalam penyusunan alternative program tersebut adalah :

- Proyeksi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan upaya sendiri terhadap target nasional dan global
- Daya dukung dan daya tampung daerah;
- Potensi, daya saing, dan inovasi daerah
- Pertimbangan lain sesuai kebutuhan daerah.

Penyusunan alternative program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga dapat memenuhi target, baik target yang ditentukan dalam RPJMN di tahun 2019 dan target global yang telah disepakati dalam konsesi global pada tahun 2030 sesuai dengan Perpres No. 59 Tahun 2017 serta target yang ditetapkan pada masa berlaku pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan upaya tambahan dilakukan dengan mempertimbangkan kepada kondisi daya dukung daya tampung lingkungan hidup dan potensi atau peluang para pihak untuk turut berkontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

6.2. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Terkait Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDT-LH) dilakukan untuk mendapatkan gambaran indikatif potensi sumberdaya alam beserta jasa lingkungan yang terdapat dalam suatu wilayah, termasuk pembatas atas potensi sumberdaya alam dimaksud. Alternatif skenario dan rekomendasi di arahkan pada indikator yang terkait dengan Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan

Penyusunan alternative program guna mengatasi kesenjangan dalam pencapaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan yang terkait daya dukung daya tampung lingkungan hidup dijelaskan dalam matriks dibawah :



6.2.1. Indikator Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang

Tujuan:
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
Target:
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Menurun
SDG's (2030): Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana
Nomor Indikator
1.5.1*
Analisis DDDTLH dan Resiko Bencana
<p>Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana lonsor di Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 secara umum masih dalam rentang sedang 429.713,23 Ha (38%), tinggi 116.409,50 ha (19%) hingga sangat tinggi 42.109,11 Ha (29%), kecuali di beberapa wilayah masuk kategori rendah 22.527,21 Ha (11%) hingga sangat rendah 16.543,02 Ha (3%). Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan bencana longsor kategori sangat rendah dan rendah umumnya didominasi pada areal dengan tutupan lahan lahan tanah terbuka, semak belukar, pemukiman dan perkebunan serta pertambangan</p> <p>Jasa lingkungan untuk pencegahan dan perlindungan bencana dengan kategori sangat tinggi mencapai luasan 38% (5.896.083,92 Ha) dan kategori Tinggi seluas 35% (5.409.798,02 Ha), dan sedang seluas 21% (3.189.666,67 Ha). Areal dengan jasa lingkungan ini umumnya tersebar dan didominasi dengan tutupan lahan berhutan. Seluas 5% (741.594,24 Ha) dan 1% (124.000,79 Ha) wilayah di Kalimantan Tengah memiliki jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori rendah dan sangat rendah.</p> <p>Berdasarkan peta resiko bencana menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah yang memiliki resiko banjir mencapai luasan 9.594,217 Ha yang terbagi menjadi resiko tinggi seluas 748.368 Ha, sedang seluas 4.192.918 Ha dan resiko rendah seluas 4.652.931 Ha. Untuk Resiko Bencana Kebakaran hutan Seluas 4.914.754,28 Ha (38%) wilayah Kalimantan Tengah memiliki resiko tinggi dan seluas 2.127.553,36 Ha (16%) memiliki resiko sedang.</p> <p>Hasil analisis terhadap wilayah pemukiman yang berpotensi banjir dengan resiko tinggi menunjukkan bawah seluas 37.028,32 Ha wilayah permukiman memiliki resiko tinggi terhadap bencana banjir.</p>
Proyeksi Capaian Indikator TPB :
<p>Capaian indikator jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data dari Tahun 2016-2019 menunjukkan trend peningkatan sedangkan target yang harus di capai adalah semakin menurun, sehingga belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk mengetahui capaian 2021, 2025 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 sampai 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>). Hasil proyeksi menunjukkan trend peningkatan tahun 2021 90,31% Tahun 2025 96,19% Tahun 2020 116,21. Berdasarkan hasil proyeksi ini maka perlu upaya tambahan agar mencapai target diproyeksi capaian pada tahun 2030 adalah 0.</p> <p>Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap yang besar antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:</p>



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		76.93
2017		81.75
2018		82.79
2019		84.45
Proyeksi		
2019	84,45	84.45
2021	90,24	75.00
2025	98,13	60.00
2030	99,45	30.00



Isu Strategis:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat menghadapi bencana
2. Infrastruktur pencegahan dan pengendalian bencana
3. Pengurangan resiko bencana

Rekomendasi:

Sasaran :

1. Tersedianya infrastruktur perlindungan dan evakuasi bencana
2. Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk evakuasi dalam keadaan bencana
3. Berkurangnya resiko bencana banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan serta abrasi

Strategi dan Arah Kebijakan :

Peningkatan infrastruktur dan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana serta pengurangan resiko bencana alam

Program:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penanggulangan Kebakaran
3. Program Penanganan Bencana
4. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
5. Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
6. Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
7. Program Pengelolaan Hutan
8. Program Penanganan Bencana

**Kegiatan:**

1. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
2. Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran
3. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
4. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
5. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
6. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
7. Peningkatan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS)
8. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
9. Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
10. Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan
11. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Pelaksana:

1. Badan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
2. Dinas Perumahan dan Pemukiman
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Dinas Kehutanan
5. Dinas Lingkungan Hidup
6. Dinas Sosial
7. Dinas Kelautan dan Perikanan

6.2.2. Indikator Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.

Tujuan:
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
Target:
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Menurun
SDG's (2030): Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.
Nomor Indikator
2.1.2*
Analisis DDDTLH
Berdasarkan daya dukung lingkungan ketersediaan di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di beberapa kabupaten/ kota masih mampu memenuhi kebutuhan pangan di wilayahnya masing – masing, dengan total kelebihan ketersediaan kalori total mencapai 1,512,436,983,073 Kkal/tahun, Namun demikian, ketersediaan pangan di Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Barito Timur telah melampaui ketersediaannya, dengan kekurangan kalori per tahun mencapai -161.500.453.263 Kkal/tahun, -33.366.089.608 Kkal/tahun -22.715.824.546 Kkal/tahun dan -13.878.966.087 Kkal/tahun. Sebagai Ibu Kota Provinsi, Kota Palangka Raya mengalami defisit kalori per tahun terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah.
Jasa Lingkungan untuk penyediaan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah seluas 1.220.827,87 Ha (8%) memiliki jasa penyedia pangan sangat tinggi, 6.820.093,36 Ha (44%) tinggi dan 6.383.823,89 Ha (42%) masuk kategori sedang, sedangkan sisanya seluas 779.044,71 Ha (5%) rendah dan 157.353,82 Ha (1 %) masuk dalam kategori sangat rendah. Kabupaten Murung Raya dan Katingan merupakan Kabupaten yang luas dalam untuk Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan. Kabupaten yang memiliki jasa lingkungan dengan kategori sangat rendah terluas adalah



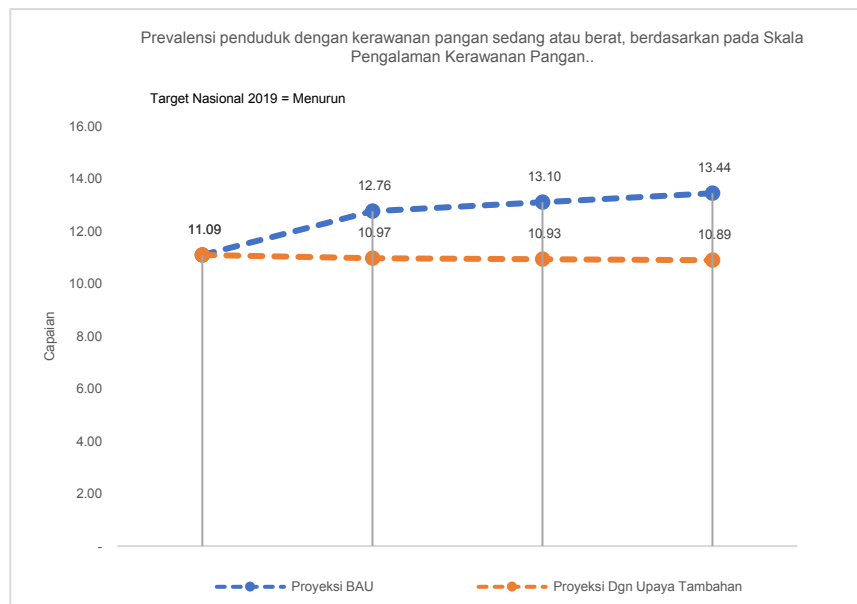
Kabupaten Pulang Pisau (50.945,46 Ha), Kabupaten Kapuas (26.651,84 Ha) dan Kabupaten Kotawaringin Timur (21.262,96 Ha). Lokasi jasa lingkungan dengan kategori rendah ini tersebar merata di bagian selatan dan tengah

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data dari Tahun 2016-2019 menunjukkan trend yang berfluktuatif, sedangkan target yang harus di capai adalah semakin menurun, sehingga indikator ini **belum mencapai target** yang ditetapkan. Untuk mengetahui capaian 2021, 2025 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2016 sampai 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*). Hasil proyeksi menunjukkan trend penurunan namun diperkirakan pada Tahun 2030 masih cukup tinggi. Hasil proyeksi Tahun 2021 sebesar 10,97%, tahun Tahun 2025 sebesar 10,39% dan Tahun 2030 sebesar 10,66% Berdasarkan hasil proyeksi ini maka **perlu upaya tambahan** agar mencapai target diproyeksi capaian pada tahun 2030 yang semakin menurun

Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		11,17
2017		12,95
2018		9,14
2019		11,09
Proyeksi		
2019	11,09	11,09
2021	12,76	10,93
2025	14,16	10,81
2030	15,72	10,50



Isu Strategis:

1. Kerawanan pangan di sejumlah daerah di kabupaten
2. Masyarakat masih bertumpu pada 1 (satu) jenis makanan dalam hal ini beras
3. Pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan asupan gizi



Rekomendasi:

Sasaran :

1. Meningkatnya produktivitas lahan pertanian
2. Harga bahan pangan yang terjangkau bagi masyarakat
3. Tercapainya pemerataan distribusi bahan pangan

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Menurunkan/ menaikkan target sesuai dengan kemampuan daerah melalui aktivitas yang dimungkinkan
2. Mengoptimalkan daya dukung sumber daya lahan dan pangan yang tersedia dengan mempertahankan fungsi lahan yang ada.

Program:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan:

1. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
3. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
5. Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
6. Pengembangan Pemanfaatan Air Untuk Pembudidayaan Ikan lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Pelaksana:

1. Dinas Ketahanan Pangan
2. Dinas Tanaman, Pangan Holtikultura dan Peternakan
3. Dinas Perikanan

6.2.3. Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan.

Tujuan:

Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan

Target:

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017:

Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100%

SDG's (2030):

Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua..

Nomor Indikator

6.1.1.(c)

Analisis DDDTLH

Persentase jasa lingkungan penyedia air kategori kelas sangat rendah mencapai 500.881 Ha (3%) rendah 5.703.175 (Ha) 27%, sedang 6.550.090 Ha (17%) dan tinggi mencapai 2.606.997 Ha (43%). Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Katingan merupakan kabupaten yang memiliki luas areal terbesar dalam untuk jasa lingkungan penyedia air yang tinggi, terutama pada bagian hulu yang memiliki tutupan hutan yang relative masuk baik.

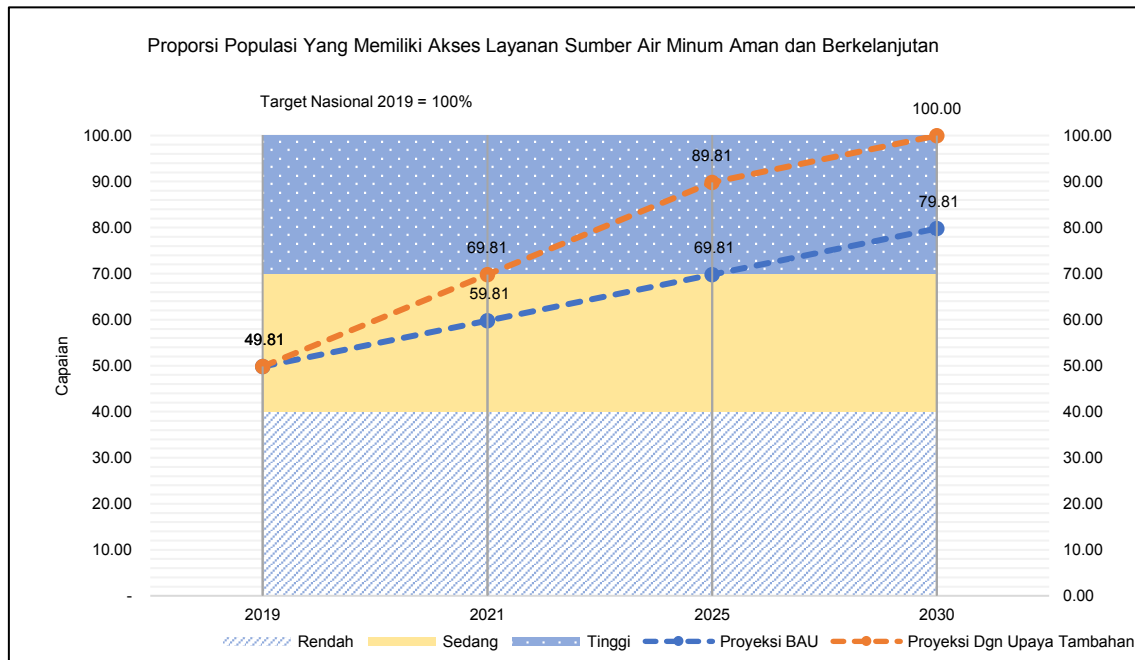


Sedangkan untuk jasa lingkungan pengaturan air di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 seluas 7% (1.101.988,33 ha) masih kategori sangat tinggi, dan 27% (4.060.962,18 ha) masuk dalam kategori Tinggi. Areal yang masih memiliki jasa pengaturan air sebagian besar berada di bagian utara, Kabupaten Murung Raya, Katingan, dan Gunung Mas.

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator Proporsi Populasi Yang Memiliki Akses Layanan Sumber Air Minum Aman dan Berkelanjutan pada tahun 2019 sebesar 49,81% sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada data. Capaian ini **belum mencapai target** yang ditetapkan didalam Perpres Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yaitu sebesar 100 %. Untuk mengetahui capaian 2021, 2025 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), mengingat tahun 2019 belum mencapai target maka perlu **perlu upaya tambahan** agar mencapai target diproyeksi capaian pada tahun 2030. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		
2017		
2018		
2019	49.81	
Proyeksi		
2019	49,81	49,81
2021	59,81	69,81
2025	69,81	89,81
2030	79,81	100,00



Isu Strategis:

1. Pemukiman penduduk yang menyebar
2. Kualitas air sungai semakin menurun

Rekomendasi:

Sasaran :

Pemenuhan pelayanan dasar air air minum berkelanjutan



Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Pengembangan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan air minum
2. Mengurangi kegiatan yang berpotensi menimbulkan cemaran air permukaan

Program:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Kegiatan:

1. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
2. Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan
3. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
4. Pembangunan Infrastruktur untuk Perlindungan dan Pemeliharaan Mata Air
5. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota
6. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

Pelaksana:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Dinas Lingkungan Hidup

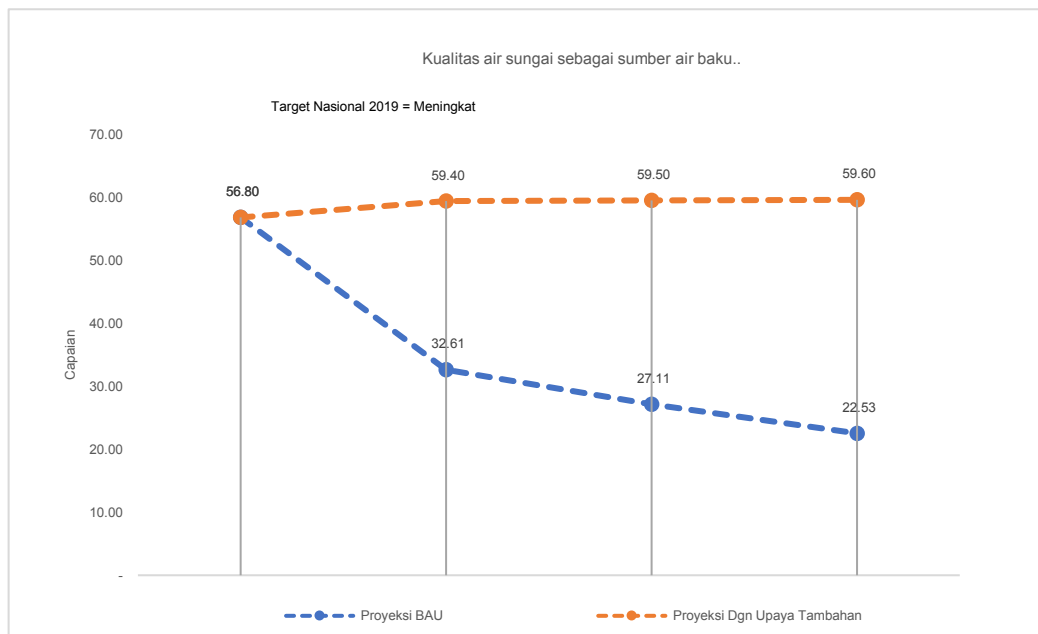
6.2.4. Indikator Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku.

Tujuan:
Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
Target:
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Meningkat
SDG's (2030): Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.
Nomor Indikator
6.3.2.(b)
Analisis DDDTLH
Persentase jasa lingkungan penyedia air kategori kelas sangat rendah mencapai 500.881 Ha (3%) rendah 5.703.175 (Ha) 27%, sedang 6.550.090 Ha (17%) dan tinggi mencapai 2.606.997 Ha (43%). Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Katingan merupakan kabupaten yang memiliki luas areal terbesar dalam untuk jasa lingkungan penyedia air yang tinggi, terutama pada bagian hulu yang memiliki tutupan hutan yang relative masuk baik.
Sedangkan untuk jasa lingkungan pengaturan air di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 seluas 7% (1.101.988,33 ha) masih kategori sangat tinggi, dan 27% (4.060.962,18 ha) masuk dalam kategori Tinggi. Areal yang masih memiliki jasa pengaturan air sebagian besar berada di bagian utara, Kabupaten Murung Raya, Katingan, dan Gunung Mas.
Nilai Indeks Kualitas Air Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 61,15 (cukup baik) dan Tahun 2019 sebesar 56,80 (kurang baik) sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 53,61 (kurang baik)
Proyeksi Capaian Indikator TPB :
Capaian indikator kualitas air sebagai sumber air baku sejak tahun 2016-2019 belum mencapai target yang ditetapkan didalam Perpres Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yaitu semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk mengetahui capaian 2021, 2025 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>), Hasil proyeksi menunjukkan trend semakin mengalami penurunan Berdasarkan hasil proyeksi ini maka perlu upaya



tambahan agar mencapai target diproyeksi capaian pada tahun 2030 yang semakin menurun . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		82,22
2017		62,35
2018		61,15
2019		56,80
Proyeksi		
2019	56,80	56,80
2021	32,61	59,40
2025	15,56	59,50
2030	7,43	59,60



Isu Strategis:

Penurunan kualitas air sungai hingga tidak memenuhi baku mutu peruntukannya dan berdampak terhadap penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Rekomendasi:

Sasaran :

Meningkatnya kualitas air permukaan mencapai kelas II Lampiran PP 22 Tahun 2021

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (RPPMA)
2. Pengendalian pencemaran air sungai dari limbah industri dan domestik
3. Pemulihan dan Rehabilitasi kawasan sempadan sungai

Program:

1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Kegiatan:

1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup



2. Penyediaan IPALD
3. Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pelaksana:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Dinas Lingkungan Hidup

6.2.5. Indikator Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan.

Tujuan:
Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati.
Target:
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Meningkat
SDG's (2030): Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
Nomor Indikator
15.1.1.(a)
Analisis DDDTLH
<p>Jasa lingkungan pengaturan iklim menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah masih masuk dalam kategori sangat tinggi 19% (2.950.366,84 ha) dan 55% (8.401.510,29 Ha) kategori Tinggi serta sedang 12 % (1.887.882,15 ha). Untuk kategori rendah hingga sangat rendah sebesar 13% (2.004.853,31 ha) dan dan sangat rendah 1% (116.531,05 ha). Sebaran jasa ekosistem pengaturan iklim kategori sangat tinggi-tinggi terutama berada di bagian utara wilayah Kalimantan Tengah dengan kondisi tutupan hutan yang relatif masih bagus sedangkan kategori rendah-sangat rendah umumnya didominasi pada areal dengan kondisi tutupan lahan tanah terbuka, pemukiman dan perkebunan.</p> <p>Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 memiliki jasa lingkungan untuk pencegahan dan perlindungan bencana dengan kategori sangat tinggi mencapai luasan 38% (5.896.083,92 Ha) dan kategori baik seluas 35% (5.409.798,02 Ha), dan sedang seluas 21% (3.189.666,67 Ha). Areal dengan jasa lingkungan ini umumnya tersebar dan didominasi dengan tutupan lahan berhutan. Seluas 5% (741.594,24 Ha) dan 1% (124.000,79 Ha) wilayah di Kalimantan Tengah memiliki jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan bencana banjir dengan kategori rendah dan sangat rendah. Daerah dengan jasa lingkungan rendah dan sangat rendah umumnya didominasi pada areal dengan tutupan lahan permukiman, tanah terbuka dan semak belukar. Lokasi yang terkena bencana banjir umumnya berada di pemukiman penduduk yang berada di pinggir sungai.</p> <p>Terkait dengan kondisi jasa lingkungan pengaturan iklim dan pencegahan dan perlindungan bencana maka areal areal dengan kondisi jasa ekosistem tinggi-sangat tinggi harus di jaga tutupan lahannya. Kegiatan-kegiatan pemanfaatan SDA di wilayah dengan jasa lingkungan tinggi dan sangat tinggi yang bersifat ekstratif dan merusak vegetasi agar dihindari. Jasa pemanfaatan hutan harus dilakukan dengan memperhatikan konsep Pengelolaan Hutan Lestari. Hasil perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan menunjukkan bahwa ada tren kecenderungan semakin tahun semakin menurun. Nilai IKTL Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sebesar 78,12 dan Tahun 2019 sebesar 76,27, sedangkan pada Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 75,11.</p> <p>Dari data di atas menunjukkan <i>trend</i> kecenderungan IKTL di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan sehingga harus dilakukan upaya untuk mencegah penurunan tutupan</p>



hutan pada areal areal yang masih memiliki tutupan hutan yang baik, serta upaya rehabilitasi lahan kritis atau lahan akses terbuka.

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator kualitas air sebagai sumber air baku sejak tahun 2016-2019 **belum mencapai target** yang ditetapkan didalam Perpres Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yaitu semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk mengetahui capaian 2021, 2025 dan 2030 maka dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), Hasil proyeksi menunjukkan trend semakin mengalami penurunan Berdasarkan hasil proyeksi ini maka **perlu upaya tambahan** agar mencapai target diproyeksi capaian pada tahun 2030 yang semakin meningkat . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		82,22
2017		62,35
2018		61,15
2019		56,80
Proyeksi		
2019	56,80	56,80
2021	32,61	61,80
2025	22,53	66,80
2030	7,43	71,80

Isu Strategis:

- Pengelolaan kawasan hutan telah berkontribusi terhadap PNBK, tetapi belum memberikan kontribusi langsung terhadap pendapatan daerah provinsi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dan Jasa Lingkungan
- Konflik tenurial dalam pengelolaan kawasan hutan, kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan serta ketimpangan pemanfaatan sumberdaya hutan antara perusahaan dan masyarakat
- Kebakaran hutan dan lahan, lahan kritis dan areal non produktif serta perambahan Kawasan hutan

Rekomendasi:

Sasaran :

Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Percepatan pembentukan TAHURA Provinsi dan mendorong penetapan Kawasan Ekosistem Esensial
2. Rehabilitasi lahan bersama masyarakat melalui Pembangunan Hutan Rakyat, Penghijauan Lingkungan dan Rehabilitasi Mangrove

Program:

1. Program Pengelolaan Hutan
2. Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Kegiatan:

1. Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
2. Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
3. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara

Pelaksana:

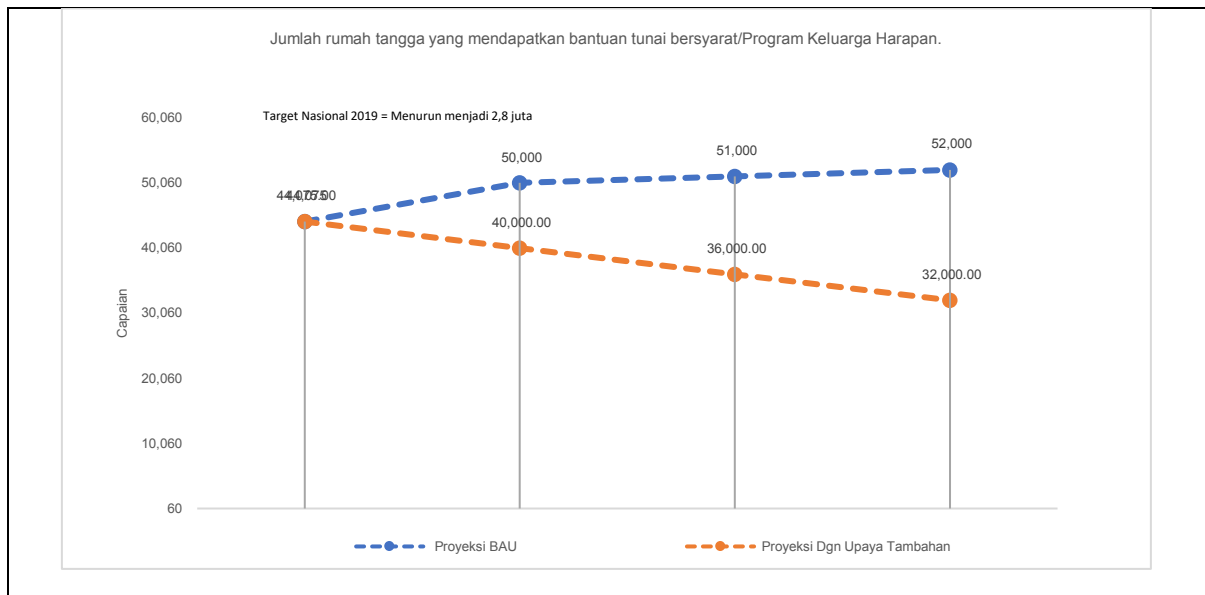
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah



6.3. Alternatif skenario dan rekomendasi dengan upaya tambahan

6.3.1. Indikator Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan.

Tujuan:																																	
Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun																																	
Target:																																	
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Menurun																																	
SDG's (2030): Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.																																	
Nomor Indikator																																	
1.3.1.(d)																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :																																	
Capaian indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan tahun 2016-2019 setiap tahun terus meningkat, hal ini berlawanan dengan target di dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yaitu semakin tahun harus menurun. Dengan adanya penurunan ini menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin yang rentan di suatu semakin sedikit, sehingga indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan. Untuk memprediksi di tahun 2021,2025 dan 2030 dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>), Hasil proyeksi menunjukkan trend semakin mengalami peningkatan Berdasarkan hasil proyeksi ini maka perlu upaya tambahan agar mencapai target diproyeksi capaian pada tahun 2030 semakin menurun . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:																																	
<table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan</th><th>Proyeksi Dengan Upaya Tambahan</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2016</td><td></td><td>15.127</td></tr><tr><td>2017</td><td></td><td>30.402</td></tr><tr><td>2018</td><td></td><td>44.529</td></tr><tr><td>2019</td><td></td><td>44.075</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>44.075</td><td>44,075</td></tr><tr><td>2021</td><td>50.000</td><td>40.000</td></tr><tr><td>2025</td><td>54.000</td><td>24.000</td></tr><tr><td>2030</td><td>56.000</td><td>15.000</td></tr></tbody></table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2016		15.127	2017		30.402	2018		44.529	2019		44.075	Proyeksi			2019	44.075	44,075	2021	50.000	40.000	2025	54.000	24.000	2030	56.000	15.000
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2016		15.127																															
2017		30.402																															
2018		44.529																															
2019		44.075																															
Proyeksi																																	
2019	44.075	44,075																															
2021	50.000	40.000																															
2025	54.000	24.000																															
2030	56.000	15.000																															



Isu Strategis:

Masih Tingginya jumlah keluarga sangat miskin di Provinsi Kalimantan Tengah yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan

Rekomendasi:

Sasaran :

1. Menurunnya kemiskinan di pedesaan dan perkotaan
2. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan keberlangsungan usaha mikro dan kecil dalam upaya menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah rentan terhadap akses (wilayah 3T : Tertinggal, Terluar, Terdalam)
3. Memperluas dan meningkatkan kualitas BUMDesa

Program:

1. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan:

1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
2. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Pelaksana:

1. Dinas Sosial
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa

6.3.2. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat.

Tujuan:

Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target:

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017:
Meningkat menjadi 91,63%

SDG's (2030):



Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro..

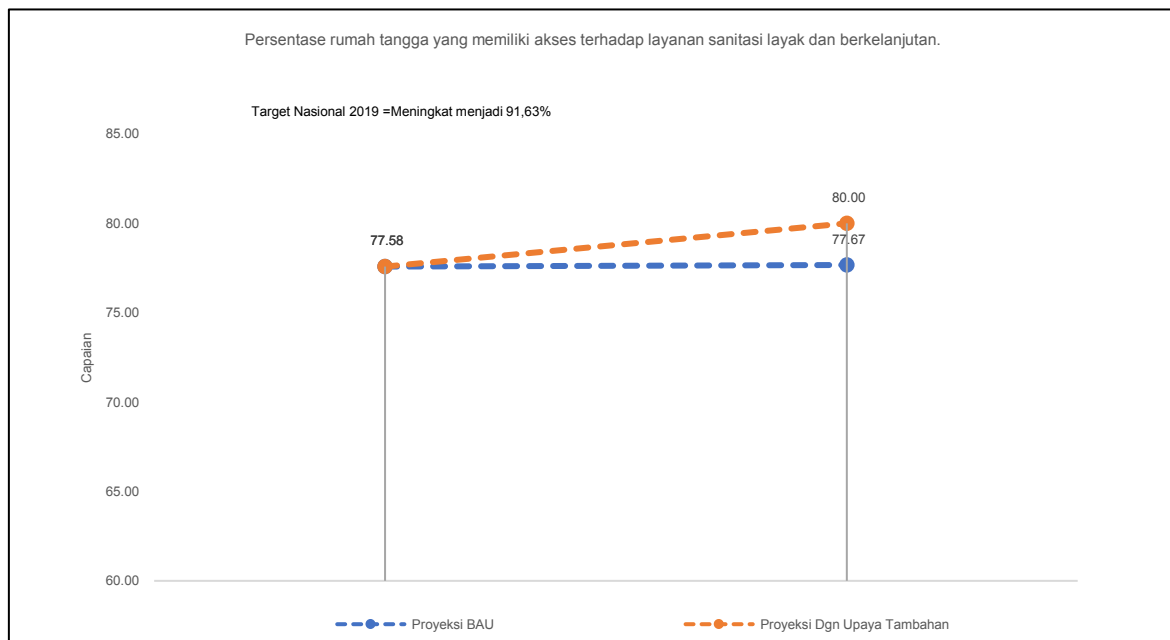
Nomor Indikator

1.4.1.(i)

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator, Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat di Provinsi Kalimantan Tengah setiap tahun mengalami peningkatan namun **belum mencapai target** yang ditetapkan sebesar 92.63 %. Capaian Tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Tengah 77,58%. Untuk memprediksi di tahun 2021,2025 dan 2030 dilakukan proyeksi capaian berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), Hasil proyeksi menunjukkan trend semakin mengalami peningkatan namun sampai dengan tahun 2030 masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 91,63% , sehingga **perlu upaya tambahan** agar mencapai target . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		77,52
2017		77,54
2018		77,56
2019		77,58
Proyeksi		
2019	77,58	77,58
2021	77,67	87,58
2025	77,73	97,58
2030	77,91	100,00



Isu Strategis:

1. Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat di Kalimantan Tengah
2. Akses penduduk ke sarana pendidikan tingkat SMA/MA/Sederajat di Kalimantan Tengah

Rekomendasi:



Sasaran :

Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/Sederajat di Kalimantan Tengah

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kesadaran masyarakat melanjutkan pendidikan ke SMA/MA/Sederajat di Kalimantan Tengah.
2. Peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan SMA/MA/Sederajat

Program:

Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan:

1. Penyediaan fasilitas asrama untuk peserta didik yang tempat tinggalnya jauh dari Ibukota Kecamatan
2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas

Pelaksana:

Dinas Pendidikan

6.3.3. Indikator Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.

Tujuan:

Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun

Target:

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017:
Meningkat menjadi 100 %

SDG's (2030):

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro..

Nomor Indikator

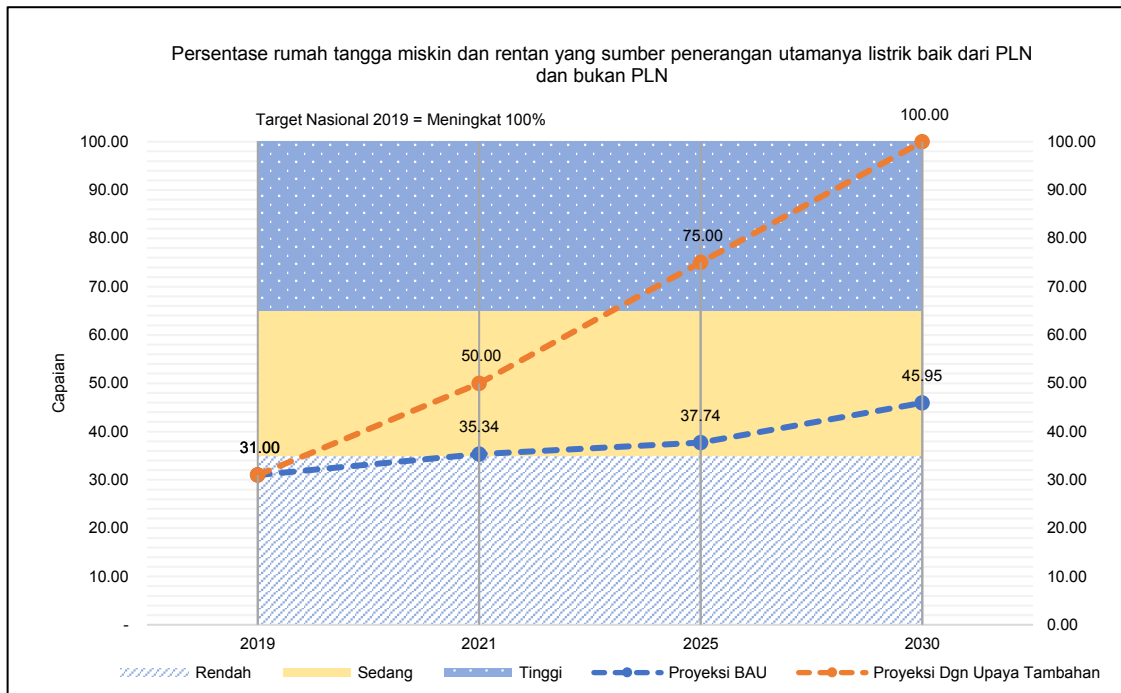
1.4.1.(k)

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator, persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN di Provinsi Kalimantan Tengah masih sangat rendah dan **belum mencapai target** yaitu meningkat hingga 100%. Capaian persentase indikator ini di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 sebesar 30%, Tahun 2017 sebesar 33% dan Tahun 2018 sebesar 31 persen, sementara pada Tahun 2019 tidak tersedia data. Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2018. Proyeksi capaian ini dilakukan **tanpa upaya tambahan** atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), Hasil proyeksi menunjukkan mengalami peningkatan namun sampai dengan tahun 2030 masih dibawah target yang ditetapkan sebesar 100% , sehingga **perlu upaya tambahan** agar mencapai target . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		30,00
2017		33,00
2018		
2019		-
Proyeksi		
2019	31,00	31,00
2021	35,34	50,00
2025	37,74	75,00
2030	45,95	100,00



Isu Strategis:

Belum tercapainya target nasional meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100%

Rekomendasi:

Sasaran :

Tersedianya akses listrik bagi rumah tangga miskin di Kalimantan Tengah

Strategi dan Arah Kebijakan :

Peningkatan perluasan akses listrik untuk rumah tangga miskin

Program:

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

Kegiatan:

1. Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
2. Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu
3. Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu

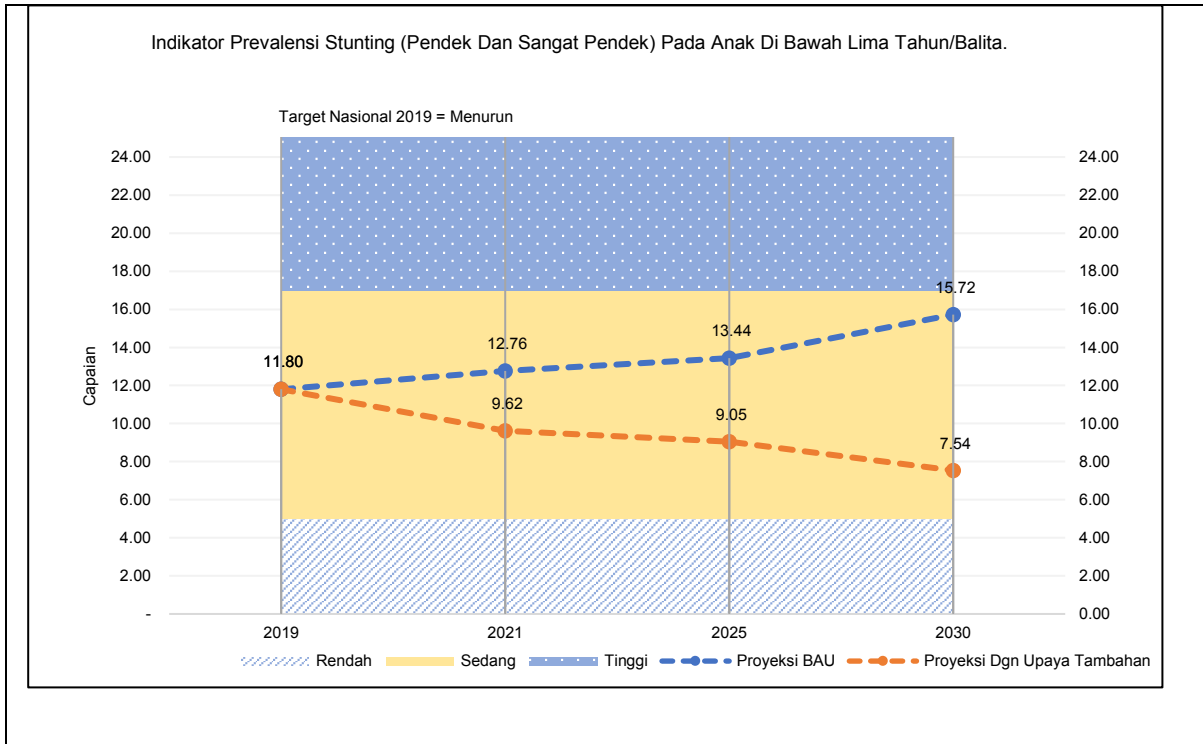
Pelaksana:

Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral



6.3.4. Indikator Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita.

Tujuan:																																	
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan																																	
Target:																																	
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Menurun																																	
SDG's (2030): Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.																																	
Nomor Indikator																																	
2.2.1*																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :																																	
Capaian indikator, Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuatif sejak Tahun 2016-2019, hal ini belum mencapai target Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yang seharusnya setiap tahun mengalami penurunan. Tahun 2016 prevalensi stunting sebesar 11,20%, tahun 2017 15,40%, tahun 2018 sebesar 12,72 % dan tahun 2019 sebesar 11,80%																																	
Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>), Hasil proyeksi menunjukkan prevalensi stunting justru mengalami peningkatan, sehingga perlu upaya tambahan agar angka prevalensi semakin menurun . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan</th> <th>Proyeksi Dengan Upaya Tambahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Baseline Data</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td>11,20</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td></td> <td>15,40</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td></td> <td>12,72</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> <td>11,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Proyeksi</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>11,80</td> <td>11,80</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>12,76</td> <td>9,62</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>13,44</td> <td>9,05</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>15,72</td> <td>7,54</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2016		11,20	2017		15,40	2018		12,72	2019		11,80	Proyeksi			2019	11,80	11,80	2021	12,76	9,62	2025	13,44	9,05	2030	15,72	7,54
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2016		11,20																															
2017		15,40																															
2018		12,72																															
2019		11,80																															
Proyeksi																																	
2019	11,80	11,80																															
2021	12,76	9,62																															
2025	13,44	9,05																															
2030	15,72	7,54																															



Isu Strategis:

Masalah stunting merupakan suatu kondisi gangguan gizi yang bersifat kronis, yang dimulai sejak ibu hamil sampai anak yang dilahirkan berusia dua tahun. Oleh karena itu penting memaksimalkan upaya penanganan stunting pada 1000 HPK (hari pertama kehidupan), yang difokuskan secara holistik sejak masa pra konsepsi sampai anak berusia dua tahun. Akan tetapi, Isu Strategis terkait masalah ini yaitu belum maksimalnya pelaksanaan program-program penanganan stunting pada anak balita. Program-program yang telah ada selama ini masih belum dilakukan secara komprehensif, yang nampak dari kurangnya koordinasi dan harmonisasi program-program terkait penanganan masalah stunting antara para pihak yang terkait

Rekomendasi:

Sasaran :

1. Tercapainya pola konsumsi pangan yang aman, merata dan berkualitas terutama pada kelompok rentan masalah gizi (ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita)
2. Terjaminnya penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi
3. Tercapainya sistem pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara merata
4. Tercapainya perbaikan status gizi pada kelompok rentan masalah gizi

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Menjaring keikutsertaan yang lebih luas dari berbagai lintas sektor, stakeholder, serta trans disiplin baik dalam tanggung jawab pelaksanaan maupun pencapaian Sasaran, melalui aktivitas yang dimungkinkan
2. Mengoptimalkan program pada 1000 hari pertama kehidupan secara terpadu
3. Penggabungan atau pengintegrasian program Kegiatan yang ada di berbagai SKPD yang difokuskan pada Tujuan yang sama, penurunan prevalensi stunting
4. Mengoptimalkan daya dukung sumber daya yang tersedia dengan memfokuskan penanganan masalah stunting pada daerah yang bermasalah

Program:

1. Peningkatan penyediaan air minum dan sanitasi
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan gizi dan kesehatan
3. Peningkatan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan dan gizi ibu dan anak
4. Peningkatan akses pangan bergizi

Kegiatan:

1. Pemantauan status gizi dan pola makan wanita pra konsepsi, ibu hamil dan ibu menyusui
2. Penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih yang terjangkau bagi semua masyarakat.



3. Peningkatan Akses kepada fasilitas kesehatan apabila anak sakit melalui edukasi penanganan infeksi yang tepat di rumah dan upaya mencari pelayanan kesehatan sedini mungkin.
4. Penguatan ketahanan pangan keluarga
5. Pemantauan pola makan bayi dan balita (pola pemberian ASI sejak lahir sampai berumur 2 tahun), melalui Kampanye pemberian ASI yang optimal sejak lahir (IMD), ASI eksklusif, dan ASI sampai dua tahun.
6. Pemantauan pola pemberian makanan pendamping ASI (sejak berumur 6 bulan sampai 2 tahun) dan pemantauan pola makan sampai pada umur 5 tahun baik kuantitas maupun kualitasnya, melalui edukasi dan pemberian MP-ASI yang berkualitas dengan sumber pangan lokal dengan frekuensi yang adequate.
7. Pemantauan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi keluarga dengan balita stunting
8. Monitoring dan evaluasi pencapaian seluruh Sasaran

Pelaksana:

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas PUPR
3. BKKBN
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Sosial

6.3.5. Indikator Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe.

Tujuan:
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
Target:
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Target Sasaran Daerah RPJMN 2015-2019 yang tertuang dalam Perpres 59/2017, menurunnya prevalensi wasting (kurus) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 9,5% (2013: 12%). Dalam ilmu gizi, Istilah malnutrisi dengan indikator berat badan menurut tinggi badan (berat badan/tinggi badan) sama dengan istilah wasting (kurus) seperti yang disebutkan dalam Perpres 59/2017, sehingga Target untuk indikator ini, mengambil dari indikator yang berasal dari Perpres 59/2017 dengan istilah wasting.
SDG's (2030): Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
Nomor Indikator
2.2.1*
Proyeksi Capaian Indikator TPB :
-
Isu Strategis:
Prevalensi Malnutrisi belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 9,5%
Rekomendasi:
Sasaran :
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pola konsumsi pangan yang aman, merata dan berkualitas terutama pada kelompok (ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita dan wilayah rentan masalah gizi (daerah dengan prevalensi tinggi masalah malnutrisi (wasting) 2. Terjaminnya penyediaan air bersih dan fasilitas sanitasi 3. Peningkatan sistem pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara merata 4. Peningkatan perbaikan status gizi pada kelompok dan wilayah rentan masalah gizi
Strategi dan Arah Kebijakan :
1. Menjaring keikutsertaan yang lebih luas dari berbagai lintas sektor, stakeholder, serta trans



<p>disiplin baik dalam tanggung jawab pelaksanaan maupun pencapaian Sasaran, melalui aktivitas yang dimungkinkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Penggabungan atau pengintegrasian program Kegiatan yang ada di berbagai SKPD yang difokuskan pada Tujuan yang sama, penurunan prevalensi wasting 3. Mengoptimalkan daya dukung sumber daya yang tersedia dengan memfokuskan penanganan masalah wasting pada daerah yang bermasalah <p>Program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perbaikan gizi dan pelayanan kesehatan 2. Peningkatan aksesibilitas pangan 3. Peningkatan ketersediaan air bersih dan fasilitas sanitasi 4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat <p>Kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan pola konsumsi (ASI Eksklusif sejak lahir sampai usia 6 bulan, ASI sampai 2 tahun, dan Makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan) dan status gizi anak balita. 2. Penguatan dan peningkatan partisipasi ibu dan keluarga dalam pemantauan status gizi dan status kesehatan anak balita 3. Penyediaan fasilitas sanitasi dan air bersih yang terjangkau bagi semua masyarakat. 4. Penguatan ketahanan pangan keluarga 5. Peningkatan kesejahteraan dan perbaikan ekonomi keluarga 6. Monitoring dan evaluasi pencapaian seluruh Sasaran <p>Pelaksana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kesehatan 2. Dinas PU 3. BKKBN 4. Dinas Pendidikan 5. Dinas Sosial

6.3.6. Indikator Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil.

Tujuan:
Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
Target:
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Menurun menjadi 28% Pada Tahun 2019
SDG's (2030): Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.
Nomor Indikator
2.2.2.(a)
Proyeksi Capaian Indikator TPB :
Capaian indikator TPB ini hanya tersedia pada tahun 2016 yaitu sebesar 54,90%, sementara target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 pada tahun 2019 telah menurun menjadi 28% atau ada gap sebesar 26,9%.
Masih adanya gak ini makan di tahun 2021-2026 perlu dilakukan upaya tambahan agar target yang ditetapkan didalam Perpres dapat tercapai. Mengingat tidak adanya daat series pencapaian pada tahun 2016-20219 maka target pencapaian tahun 2026 adalah 28%.
Isu Strategis:
Masih tingginya angka Prevalensi anemia pada ibu hamil
Rekomendasi:
Sasaran : Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil.



Strategi dan Arah Kebijakan :

Peningkatan sadar pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil serta peningkatan gizi pada ibu hamil

Program:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan:

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
2. Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat.

Pelaksana:

Dinas Kesehatan

6.3.7. Indikator Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Mencapai; dan Tingkat Konsumsi Ikan.

Tujuan:

Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Target:

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017:

Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun

SDG's (2030):

Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.

Nomor Indikator

2.2.2.(c)

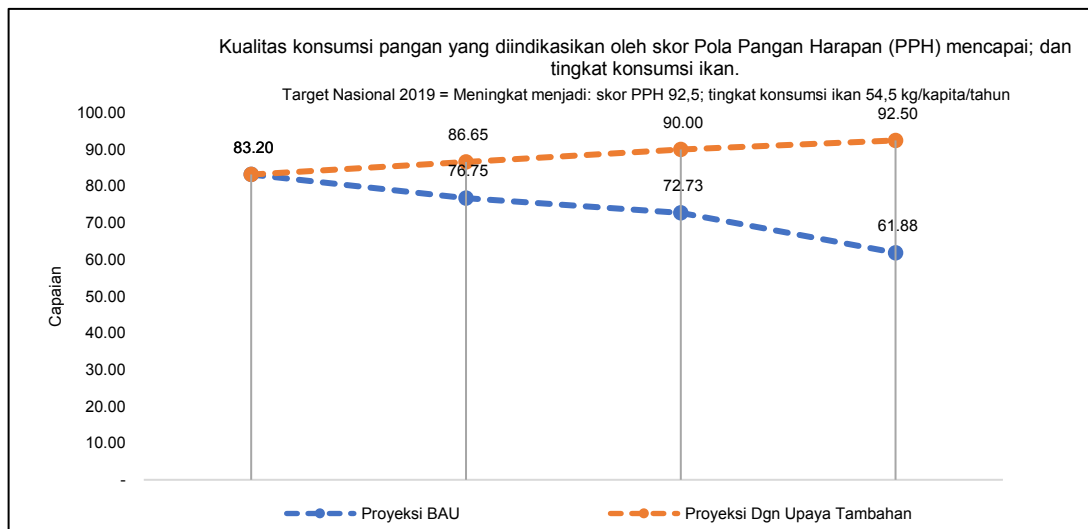
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator, Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Tingkat Konsumsi Ikan di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami fluktuatif sejak Tahun 2016-2019, hal ini **belum mencapai target** Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 sebesar 92,5 pada tahun 2019. Target ini pernah tercapai pada Tahun 2018, sebesar 92,80 namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan kembali menjadi 83.20.

Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan **tanpa upaya tambahan** atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), Hasil proyeksi menunjukkan Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan Tingkat Konsumsi Ikan justru mengalami penurunan, sehingga **perlu upaya tambahan** agar angka prevalensi semakin menurun . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		87,80
2017		89,80
2018		92,80
2019		83,20
Proyeksi		
2019	83,20	83,20
2021	76,75	86,65
2025	72,73	90,00
2030	61,88	92,50



Isu Strategis:

Tingkat konsumsi pangan masyarakat belum Beragam Bergizi Seimbang dan Aman

Rekomendasi:

Sasaran :

1. Peningkatan diversifikasi pangan
2. Meningkatnya Konsumsi Ikan

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan percepatan diversifikasi pangan
2. Pembinaan / sosialisasi diversifikasi pangan bagi ibu-ibu kelompok wanita dan PKK
3. Pembinaan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam
4. Pengadaan lomba cipta menu beragam, bergizi dan aman.

Program:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Kegiatan:

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor Sesuai Kewenangan Daerah Provinsi.
3. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut, Payau dan Tawar



Pelaksana:

1. Dinas Ketahanan Pangan
2. Dinas Kelautan dan Perikanan

6.3.8. Indikator Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.

Tujuan:

Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Target:

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017:
Meningkat menjadi 280

SDG's (2030):

Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan..

Nomor Indikator

3.4.2.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator, jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa di Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 11 unit, dan hal ini **belum mencapai target** Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 sebanyak 280 unit

Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan **tanpa upaya tambahan** atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*),

Hasil proyeksi menunjukkan prevalensi stunting justru mengalami peningkatan, sehingga **perlu upaya tambahan** agar angka prevalensi semakin menurun . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		7,00
2017		8,00
2018		10,00
2019		11,00
Proyeksi		
2019	11,00	11,00
2021	21,67	30,00
2025	34,05	120,00
2030	132,13	280,00



<p>Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.</p> <p>Target Nasional 2019 = Meningkatkan menjadi 280</p> <table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi BAU</th><th>Proyeksi Dgn Upaya Tambahan</th></tr></thead><tbody><tr><td>2019</td><td>11.00</td><td>11.00</td></tr><tr><td>2020</td><td>21.87</td><td>21.87</td></tr><tr><td>2021</td><td>34.05</td><td>34.05</td></tr><tr><td>2023</td><td>132.13</td><td>280.00</td></tr></tbody></table>	Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan	2019	11.00	11.00	2020	21.87	21.87	2021	34.05	34.05	2023	132.13	280.00
Tahun	Proyeksi BAU	Proyeksi Dgn Upaya Tambahan													
2019	11.00	11.00													
2020	21.87	21.87													
2021	34.05	34.05													
2023	132.13	280.00													
Isu Strategis:															
Belum seluruh Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.															
Rekomendasi:															
Sasaran : Terlaksananya penyelenggaraan kesehatan jiwa di Puskesmas di seluruh Kelurahan.															
Strategi dan Arah Kebijakan : Meningkatkan sarana dan prasarana Puskesmas dalam penyelenggaraan kesehatan jiwa di Puskesmas															
Program: Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat															
Kegiatan: Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)															
Pelaksana: Dinas Kesehatan															

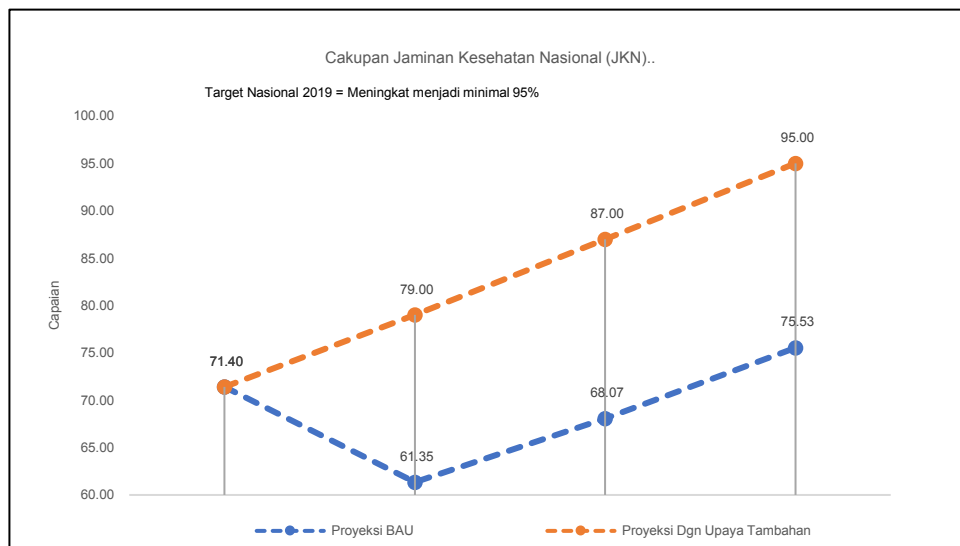
6.3.9. Indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Tujuan:
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
Target:
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Meningkat menjadi minimal 95%
SDG's (2030): Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.
Nomor Indikator
3.8.2.(a)
Proyeksi Capaian Indikator TPB :
Capaian indikator cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2019 telah mencapai angka 71,40%. Capaian ini belum mencapai target yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yaitu minimal 95%. Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian hingga tahun 2030 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>),



Hasil proyeksi menunjukkan prevalensi stunting justru mengalami peningkatan, sehingga **perlu upaya tambahan** agar angka prevalensi semakin menurun. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		53,88
2017		70,20
2018		69,30
2019		71,40
Proyeksi		
2019	71,40	71,40
2021	61,35	79,00
2025	68,07	87,00
2030	75,53	95,00



Isu Strategis:

Belum optimalnya pelaksanaan Jaminan Kesehatan

Rekomendasi:

Sasaran :

Meningkatnya perbaikan pengelolaan Jaminan Kesehatan.

Strategi dan Arah Kebijakan :

Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu

Program:

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Kegiatan:

Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

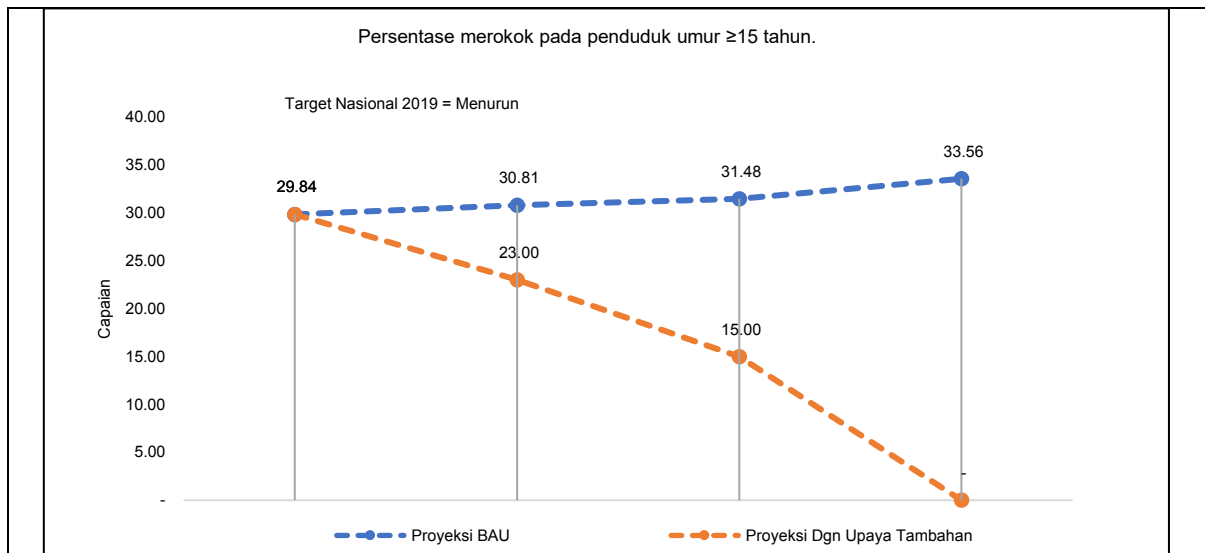
Pelaksana:

Dinas Kesehatan



6.3.10. Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.

Tujuan:																																	
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia																																	
Target:																																	
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Menurun																																	
SDG's (2030): Memperkuat pelaksanaan <i>the Framework Convention on Tobacco Control</i> WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat..																																	
Nomor Indikator																																	
3.a.1*																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :																																	
<p>Capaian indikator persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan, hal ini bertentangan dengan target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 yaitu semakin tahun semakin menurun, sehingga indikator ini belum mencapai target target yang ditetapkan.</p> <p>Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>), Hasil proyeksi menunjukkan persentase, sehingga perlu upaya tambahan agar angka persentase semakin menurun . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:</p>																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan</th> <th>Proyeksi Dengan Upaya Tambahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Baseline Data</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td>29,21</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td></td> <td>29,24</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td></td> <td>32,64</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Proyeksi</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>29,84</td> <td>29,84</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>30,81</td> <td>23,00</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>31,48</td> <td>15,00</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>33,56</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2016		29,21	2017		29,24	2018		32,64	2019		29,84	Proyeksi			2019	29,84	29,84	2021	30,81	23,00	2025	31,48	15,00	2030	33,56	-
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2016		29,21																															
2017		29,24																															
2018		32,64																															
2019		29,84																															
Proyeksi																																	
2019	29,84	29,84																															
2021	30,81	23,00																															
2025	31,48	15,00																															
2030	33,56	-																															



Isu Strategis:

Tingginya perilaku merokok

Rekomendasi:

Sasaran :

Mengurangi atau menurunkan presentase perokok pada anak usia ≥ 15 Tahun

Strategi dan Arah Kebijakan :

Meningkatkan kesadaran bahaya merokok pada pelajar usia 15 tahun ke atas.

Program:

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kegiatan:

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
Peningkatan Upaya Advokasi kesehatan, Pernerdayaan, Penggalangan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi.

Pelaksana:

Dinas Kesehatan

6.3.11. Indikator Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.

Tujuan:

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target:

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017:

Meningkat menjadi 84,6%

SDG's (2030):

Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.

Nomor Indikator

4.1.1.(c)

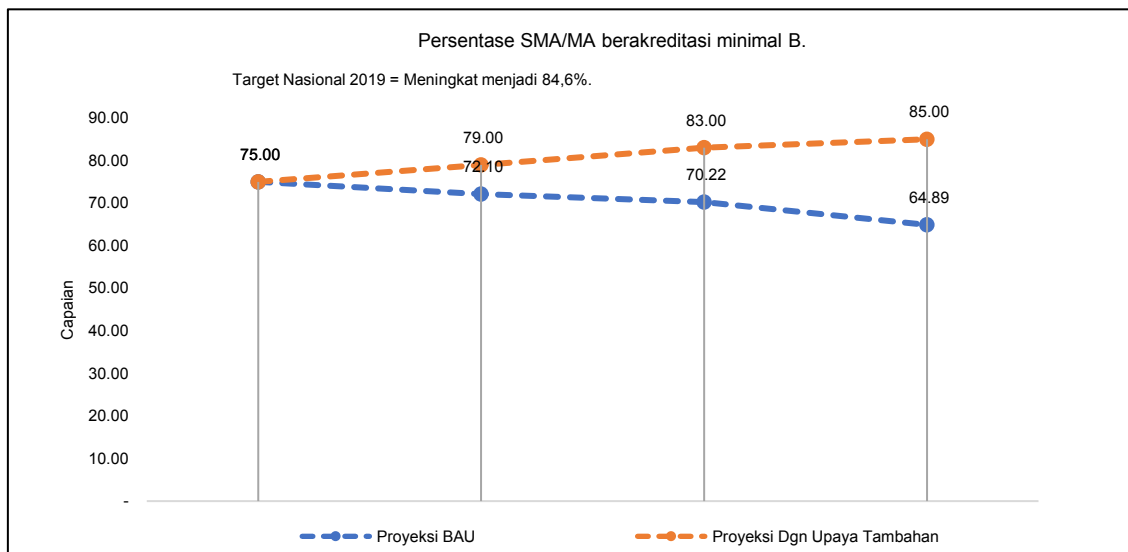
Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator persentase SMA/MA berakreditasi minimal B di Kalimantan Tengah dari Tahun 2016-2019 berfluktuatif dan **belum mencapai target** yang ditetapkan sebesar 84,6% dari total SMA/MA yang ada. Persentase capaian tahun 2019 sebesar 75%



Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan **tanpa upaya tambahan** atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), Hasil proyeksi menunjukkan persentase SMA/MA berakreditasi minimal B belum mencapai target yang ditetapkan , sehingga **perlu upaya tambahan**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		77,00
2017		78,00
2018		73,00
2019		75,00
Proyeksi		
2019	75,00	75,00
2021	72,10	79,00
2025	70,22	83,00
2030	64,89	85,00



Isu Strategis:

Kurang optimalnya kualitas manajemen Satuan Pendidikan SMA/SMK dan PK

Rekomendasi:

Sasaran :

Meningkatkan Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.

Strategi dan Arah Kebijakan :

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta manajemen satuan pendidikan SMA/SMK sehingga dapat memperoleh akreditasi Minimal B.

Program:

Program Pengelolaan Pendidikan



Kegiatan:

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Pelaksana:

Dinas Pendidikan

6.3.12. Indikator Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).

Tujuan:

Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Target:

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017:
Meningkat

SDG's (2030):

Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua..

Nomor Indikator

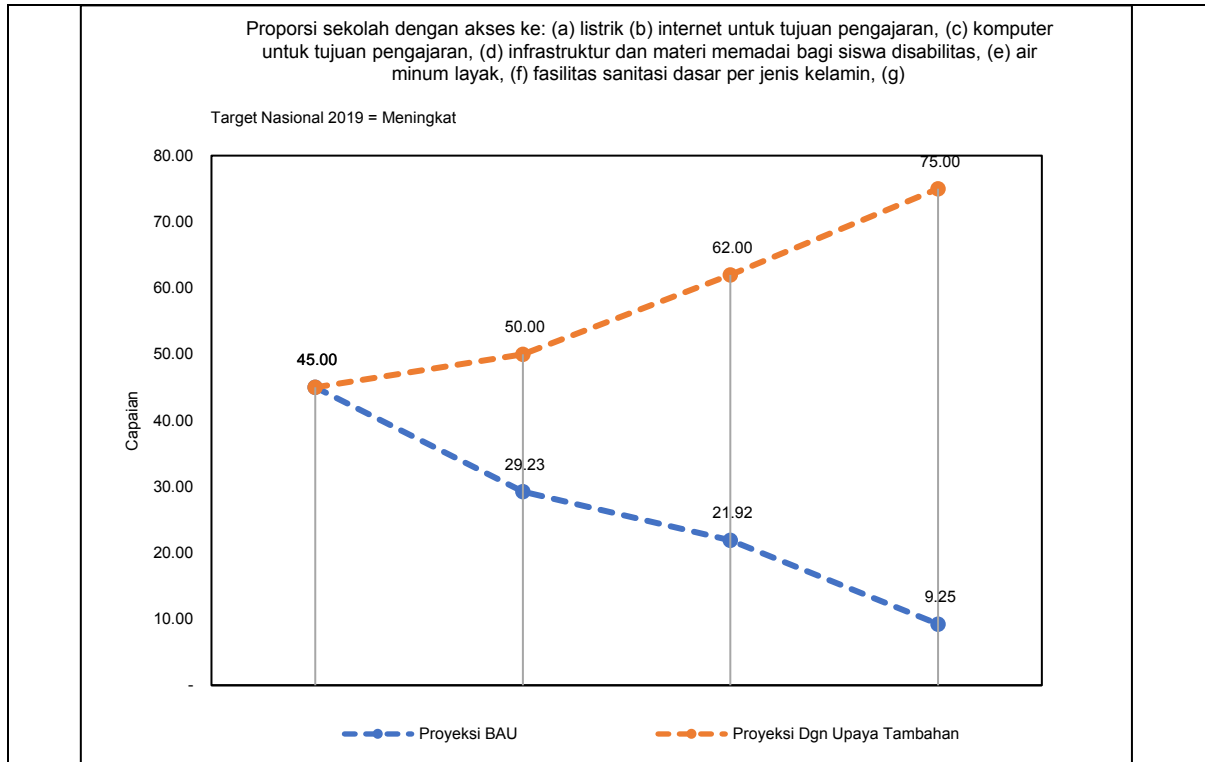
4.a.1*

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH) di Kalimantan Tengah dilihat dari trend kecenderungan tahun 2016 hingga 2019 justru semakin menurun sehingga **belum mencapai target** yang ditetapkan.

Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan **tanpa upaya tambahan** atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), Hasil proyeksi menunjukkan proporsi semakin menurun, sehingga **perlu upaya tambahan**. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		60,00
2017		55,00
2018		50,00
2019		45,00
Proyeksi		
2019	45,00	45,00
2021	29,23	50,00
2025	21,92	62,00
2030	9,25	75,00



Isu Strategis:

Rendahnya proporsi sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai (listrik, internet, komputer, sarana penyandang disabilitas, air minum layak dan fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin)

Rekomendasi:

Sasaran :

Meningkatkan sarana dan prasarana sekolah yang belum memiliki akses listrik, internet, komputer, penyandang disabilitas, air minum layak dan fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin

Strategi dan Arah Kebijakan :

Peningkatan sarana dan prasarana sekolah melalui program pemerintah dan CSR pelaku usaha dan atau kegiatan terutama di desa-desa binaan perusahaan.

Program:

Program Pengelolaan Pendidikan

Kegiatan:

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Pelaksana:

1. Dinas Pendidikan
2. CSR Perusahaan.

6.3.13. Indikator *Unmet* need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).

Tujuan:

Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Target:

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017:
Menurun menjadi 9,9%



SDG's (2030):

Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.

Nomor Indikator

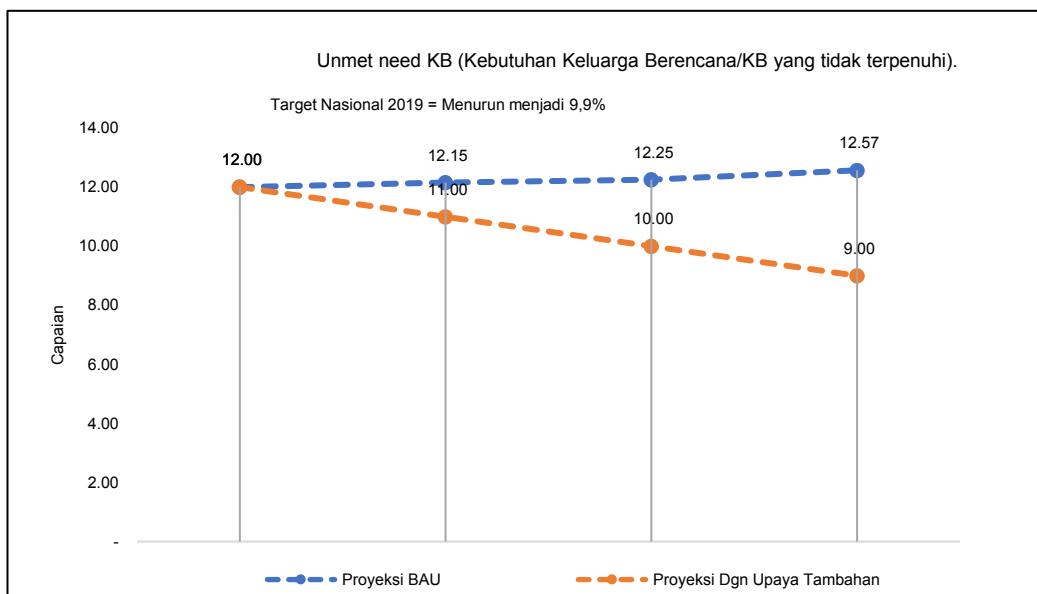
5.6.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator Unmet need KB dari tahun 2016-2019 sempat mencapai target nasional tahun 2017 dan 2018 namun meningkat kembali di tahun 2019 sehingga **belum mencapai target** penurunan sebesar 9,9%.

Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan **tanpa upaya tambahan** atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), Hasil proyeksi menunjukkan indikator Unmet need KB justru semakin meningkat sehingga sehingga **perlu upaya tambahan** . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		11,90
2017		6,30
2018		9,50
2019		12,00
Proyeksi		
2019	12,00	12,00
2021	12,15	11,00
2025	12,25	10,00
2030	12,57	9,00



Isu Strategis:

1. Rendahnya pemenuhan Kebutuhan Keluarga Berencana
2. menurunnya rasio pemakaian kontrasepsi.



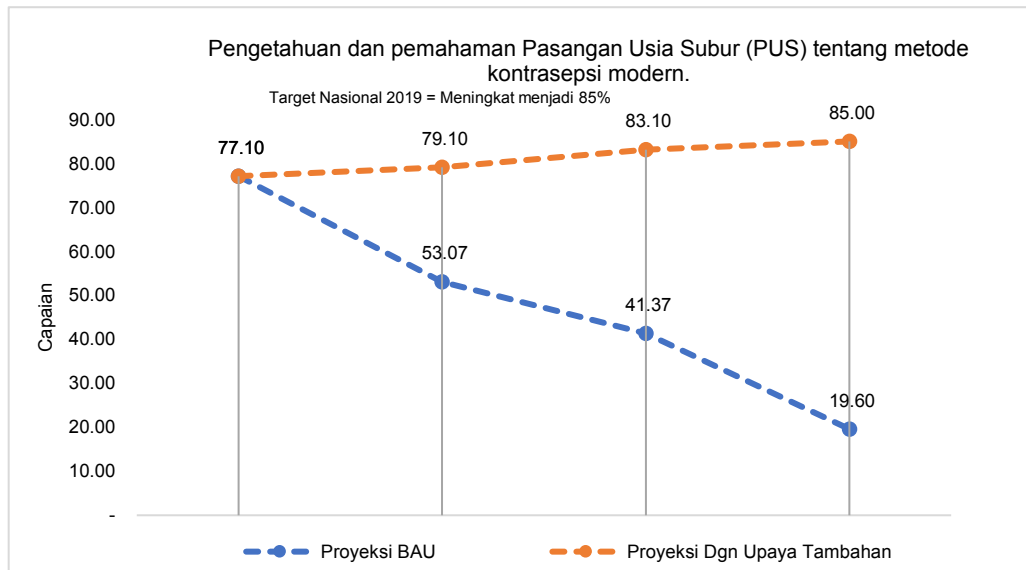
Rekomendasi:
Sasaran : Menurunnya prosentase Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
Strategi: Peningkatan kesehatan ibu, anak KB, dan kesehatan reproduksi Meningkatkan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Arah Kebijakan : Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Program: Program Perlindungan Perempuan dan Anak Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana
Kegiatan: Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Pelaksana: 1. BKKBN Kalimantan tengah 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

6.3.14. Indikator Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.

Tujuan:
Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
Target:
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Meningkat menjadi 85%
SDG's (2030): Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
Nomor Indikator
5.6.1.(b)
Proyeksi Capaian Indikator TPB :
Capaian indikator Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern pada tahun 2016 dan 2017 sempat mencapai target nasional, namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan. Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>), Hasil proyeksi menunjukkan indikator pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern justru semakin menurun sehingga perlu upaya tambahan . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		98,90
2017		98,10
2018		75,50
2019		77,10
Proyeksi		
2019	77,10	77,10
2021	53,07	79,10
2025	41,37	83,10
2030	19,60	85,00



Isu Strategis:

Masih Rendahnya Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern

Rekomendasi:

Sasaran :

1. Perluasan cakupan KB dan kesehatan reproduksiber kualitas sesuai karakteristik wilayah melalui penguatan kemitraan dengan pemerintah
2. Penguatan jejaring dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pelaksanaan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program Kependudukan Keluarga dan pembangunan keluarga

Program:

Program Perlindungan perempuan dan anak

Kegiatan:

Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Pelaksana:

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



6.3.15. Indikator Laju pertumbuhan PDB per kapita.

Tujuan:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target:

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017:
Meningkat

SDG's (2030):

Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya..

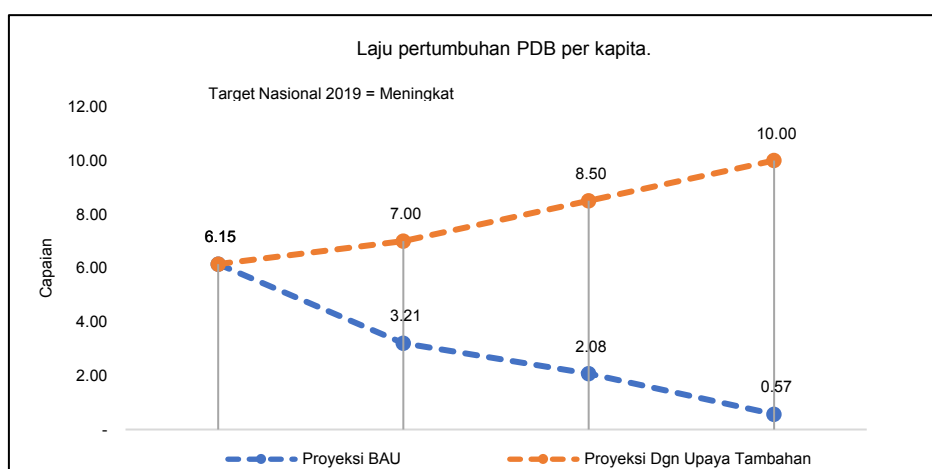
Nomor Indikator

8.1.1*

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator Laju pertumbuhan PDB per kapita di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **belum mencapai target** yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun. Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan **tanpa upaya tambahan** atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), Hasil proyeksi menunjukkan indikator Laju pertumbuhan PDB per kapita justru semakin menurun sehingga **perlu upaya tambahan** . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		9,48
2017		9,99
2018		7,98
2019		6,15
Proyeksi		
2019	6,15	6,15
2021	3,21	7,00
2025	2,08	8,50
2030	0,57	10,00



Isu Strategis:

Menurunnya laju pertumbuhan PDB perkapita di Kalimantan Tengah



<p>Rekomendasi:</p> <p>Sasaran : Mempertahankan Pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi Daerah dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang</p> <p>Strategi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menciptakan iklim usaha yang kondusif; • Mendorong aktifitas ekonomi di berbagai sektor; • Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja. <p>Arah Kebijakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan berbagai kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha; • Mengembangkan sentra-sentra industri kecil dan mikro di berbagai wilayah; • Mengintegrasikan industri kecil dan mikro dengan pasar modern; • Mengembangkan lembaga-lembaga pembinaan ketenagakerjaan • Pertumbuhan Ekonomi Makro • Penciptaan Lapangan Kerja yang Layak dan Produktif • Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) • Peningkatan Promosi Pariwisata Berkelanjutan • Penguatan Kapasitas Lembaga Keuangan <p>Program dan Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program penataan pelayanan dan perizinan usaha; • Program pembangunan sarana dan prasarana pendukung perekonomian daerah; • Program pemberdayaan industri; • Program pengembangan kemitraan usaha; • Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; • Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan; <p>Pelaksana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan Pendapatan Daerah • Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • Bapedalitbang
--

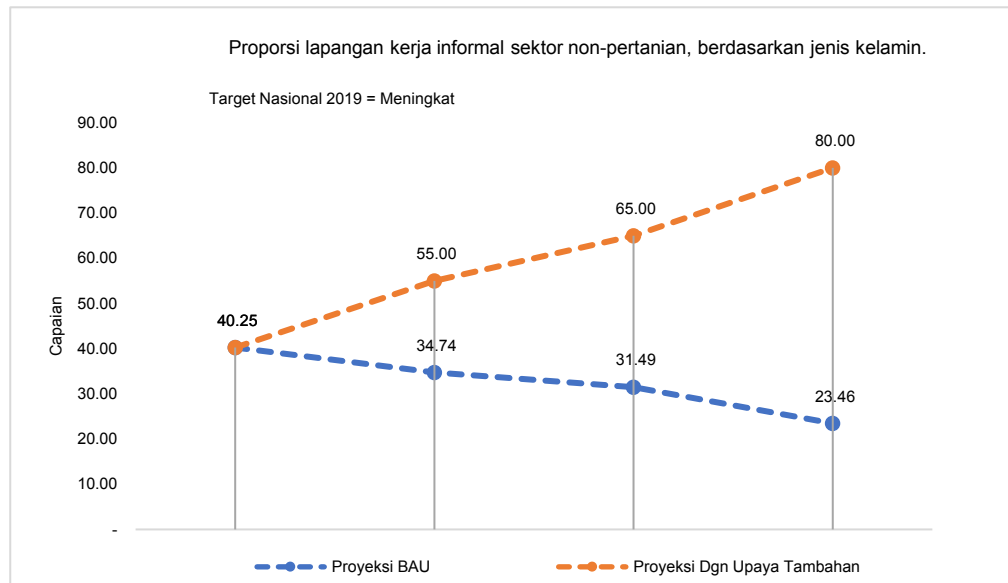
6.3.16. Indikator Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.

<p>Tujuan: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p>
<p>Target: Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Meningkat</p> <p>SDG's (2030): Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.</p>
<p>Nomor Indikator 8.3.1*</p>
<p>Proyeksi Capaian Indikator TPB : Capaian indikator Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun yaitu semakin tahun semakin meningkat. Dari capaian ini kemudian</p>



dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan **tanpa upaya tambahan** atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), Hasil proyeksi menunjukkan indikator Laju pertumbuhan PDB per kapita justru semakin menurun sehingga **perlu upaya tambahan** . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		44,40
2017		40,82
2018		40,45
2019		40,25
Proyeksi		
2019	40,25	40,25
2021	34,74	55,00
2025	31,49	65,00
2030	23,46	80,00



Isu Strategis:

Masih Rendahnya Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.

Rekomendasi:

Sasaran :

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kualitas Koperas
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM
3. Meningkatnya Pertumbuhan kewirausahaan serta kualitas skala Usaha Kecil dan Menengah

Strategi dan Arah Kebijakan :

1. Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Daya Saing Koperasi
2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas SDM Koperasi dan UMKM
3. Pengembangan dan Peremberdayaan Kewirausahaan serta Kualitas Skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah



Program:

1. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Kegiatan:

1. Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
2. Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
3. Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan

Pelaksana:

Dinas Koperasi dan UMKM

6.3.17. Indikator Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian.

Tujuan:

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua

Target:

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017:
Meningkat

SDG's (2030):

Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

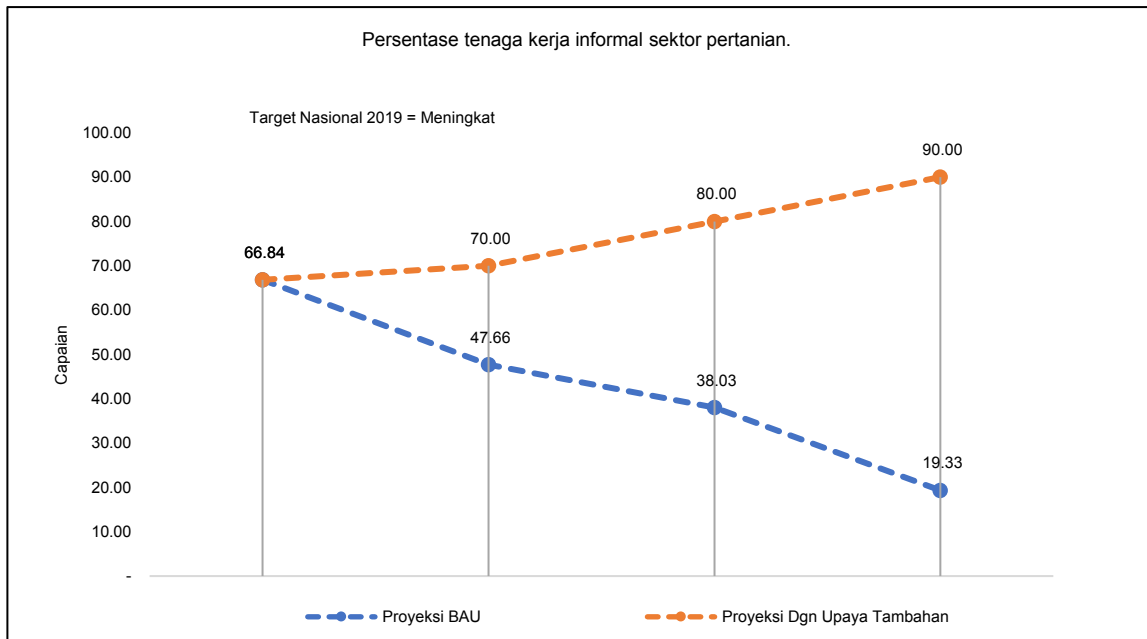
Nomor Indikator

8.3.1.(b)

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian, di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **belum mencapai target** yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun yaitu semakin tahun semakin meningkat. Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan **tanpa upaya tambahan** atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), Hasil proyeksi menunjukkan indikator Persentase Tenaga Kerja Informal Sektor Pertanian justru semakin menurun sehingga **perlu upaya tambahan** . Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		83,75
2017		74,47
2018		69,73
2019		66,84
Proyeksi		
2019	66,84	66,84
2021	47,66	70,00
2025	38,03	80,00
2030	19,33	90,00



Isu Strategis:

Masih rendahnya persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.

Rekomendasi:

Sasaran :

Mengalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung Kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan..

Strategi

- Menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- Mendorong aktifitas ekonomi di berbagai sektor;
- Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja.

Kebijakan:

- Menyediakan berbagai kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha;
- Mengembangkan sentra-sentra industri kecil dan mikro di berbagai wilayah;
- Mengintegrasikan industri kecil dan mikro dengan pasar modern;
- Mengembangkan lembaga-lembaga pembinaan ketenagakerjaan

Program/Kegiatan:

- Program penataan pelayanan dan perizinan usaha;
- Program pembangunan sarana dan prasarana pendukung perekonomian daerah;
- Program pemberdayaan industri;
- Program pengembangan kemitraan usaha;
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;
- Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;

Pelaksana:

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- Dinas Sosial
- Dinas Ketahanan Pangan



6.3.18. Indikator Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).

Tujuan:																																	
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua																																	
Target:																																	
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Meningkat																																	
SDG's (2030): Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.																																	
Nomor Indikator																																	
8.6.1*																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :																																	
Capaian indikator Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET) di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun yaitu semakin tahun semakin meningkat. Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>), Hasil proyeksi menunjukkan indikator ini justru semakin menurun sehingga perlu upaya tambahan , agar mencapai target yang ditetapkan. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan</th> <th>Proyeksi Dengan Upaya Tambahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Baseline Data</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">22,50</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">21,10</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">22,38</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">21,91</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Proyeksi</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td style="text-align: center;">21,91</td> <td style="text-align: center;">21,91</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td style="text-align: center;">21,06</td> <td style="text-align: center;">25,00</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td style="text-align: center;">20,50</td> <td style="text-align: center;">30,00</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td style="text-align: center;">18,93</td> <td style="text-align: center;">35,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2016	22,50		2017	21,10		2018	22,38		2019	21,91		Proyeksi			2019	21,91	21,91	2021	21,06	25,00	2025	20,50	30,00	2030	18,93	35,00
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2016	22,50																																
2017	21,10																																
2018	22,38																																
2019	21,91																																
Proyeksi																																	
2019	21,91	21,91																															
2021	21,06	25,00																															
2025	20,50	30,00																															
2030	18,93	35,00																															



Isu Strategis:
Belum tercapainya proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
Rekomendasi:
Sasaran : Mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
Strategi: <ul style="list-style-type: none">• Menciptakan iklim usaha yang kondusif;• Mendorong aktifitas ekonomi di berbagai sektor;• Meningkatkan kualitas SDM tenaga kerja.
Kebijakan : <ul style="list-style-type: none">• Menyediakan berbagai kemudahan dalam berinvestasi dan berusaha;• Mengembangkan sentra-sentra industri kecil dan mikro di berbagai wilayah;• Mengintegrasikan industri kecil dan mikro dengan pasar modern;• Mengembangkan lembaga-lembaga pembinaan ketenagakerjaan
Program dan Kegiatan <ul style="list-style-type: none">• Program penataan pelayanan dan perizinan usaha;• Program pembangunan sarana dan prasarana pendukung perekonomian daerah;• Program pemberdayaan industri;• Program pengembangan kemitraan usaha;• Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja;• Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan;
Pelaksana: <ul style="list-style-type: none">• Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu• Dinas Perindustrian dan Perdagangan• Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi• Bapedalitbang

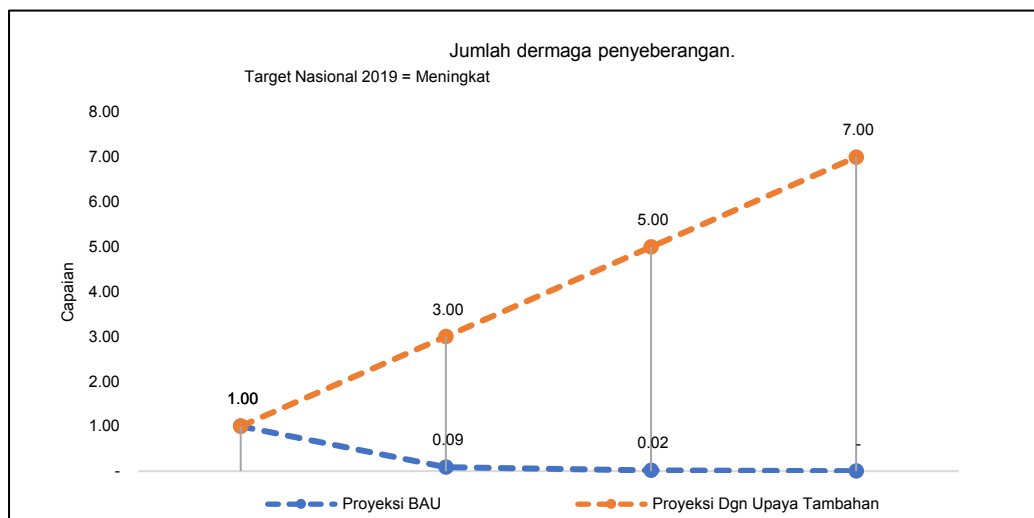
6.3.19. Indikator Jumlah Dermaga Penyeberangan.

Tujuan:
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
Target:
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Meningkat
SDG's (2030): Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.
Nomor Indikator
9.1.2.(b)
Proyeksi Capaian Indikator TPB :
Capaian indikator Jumlah Dermaga Penyeberangan di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2016 hingga 2019 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun yaitu semakin tahun semakin meningkat. Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>), Hasil proyeksi menunjukkan indikator ini justru semakin menurun sehingga perlu upaya tambahan , agar mencapai target yang ditetapkan. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar



dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		5,00
2017		3,00
2018		2,00
2019		1,00
Proyeksi		
2019	1,00	1,00
2021	0,09	3,00
2025	0,02	5,00
2030	-	7,00



Isu Strategis:

Belum optimalnya pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.

Rekomendasi:

Sasaran :

Mengotimalkan dan legalisasi dermaga penyeberangan yang dikelola oleh masyarakat di beberapa ruas sungai yang ada di Kalimantan Tengah

Strategi dan Arah Kebijakan :

- Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda yang andal;
- Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri Daerah untuk mendukung Sistem Logistik Daerah dan penguatan konektivitas Daerah ;
- Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi Daerah dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;
- Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah nonkoridor ekonomi;
- Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;
- Meningkatkan pelayanan yang berorientasi pada pelanggan secara adil dan profesional, aman dan nyaman;

Program:

Program Pengelolaan Pelayaran



Kegiatan:

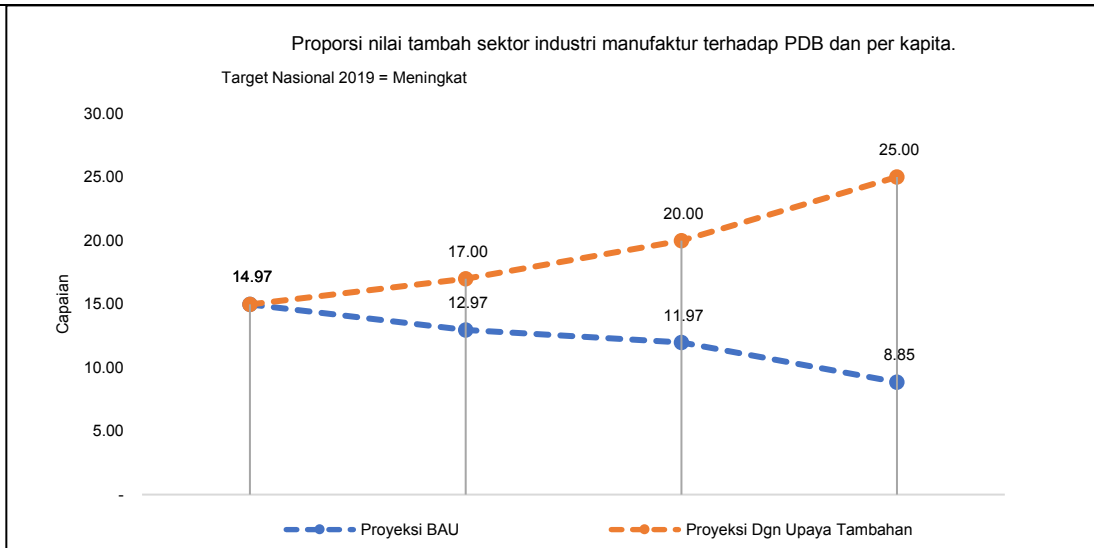
- Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
- Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pelaksana:

Dinas Perhubungan

6.3.20. Indikator Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB Dan Per Kapita.

Tujuan:			
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi			
Target:			
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Meningkat			
SDG's (2030): Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.			
Nomor Indikator			
9.2.1*			
Proyeksi Capaian Indikator TPB :			
Capaian indikator Proporsi Nilai Tambah Sektor Industri Manufaktur Terhadap PDB Dan Per Kapita di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2016 hingga 2019 berfluktuatif namun cenderung pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa indikator ini belum mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun yaitu semakin tahun semakin meningkat. Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>), Hasil proyeksi menunjukkan indikator ini justru semakin menurun sehingga perlu upaya tambahan , agar mencapai target yang ditetapkan. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:			
	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
	Baseline Data		
	2016	16,47	
	2017	16,78	
	2018	15,70	
	2019	14,97	
	Proyeksi		
	2019	14,97	14,97
	2021	12,97	17,00
	2025	11,97	20,00
	2030	8,85	25,00



Isu Strategis:

- Belum optimalnya pengembangan industri berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri
- Belum Optimalnya nilai tambah sektor industri manufaktur Terhadap PDB Per Kapita

Rekomendasi:

Sasaran :

Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Strategi:

- Meningkatkan implementasi industri 4.0 untuk peningkatan daya saing sektor industri
- Menumbuhkan industri baru yang bertumpu pada sumber daya lokal

Arah Kebijakan:

- Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri pengolahan
- Peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri
- Peningkatan produk bahan baku / penolong domestik sebagai bahan baku pengganti / substitusi impor

Program:

- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan:

- Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
- Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
- Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri

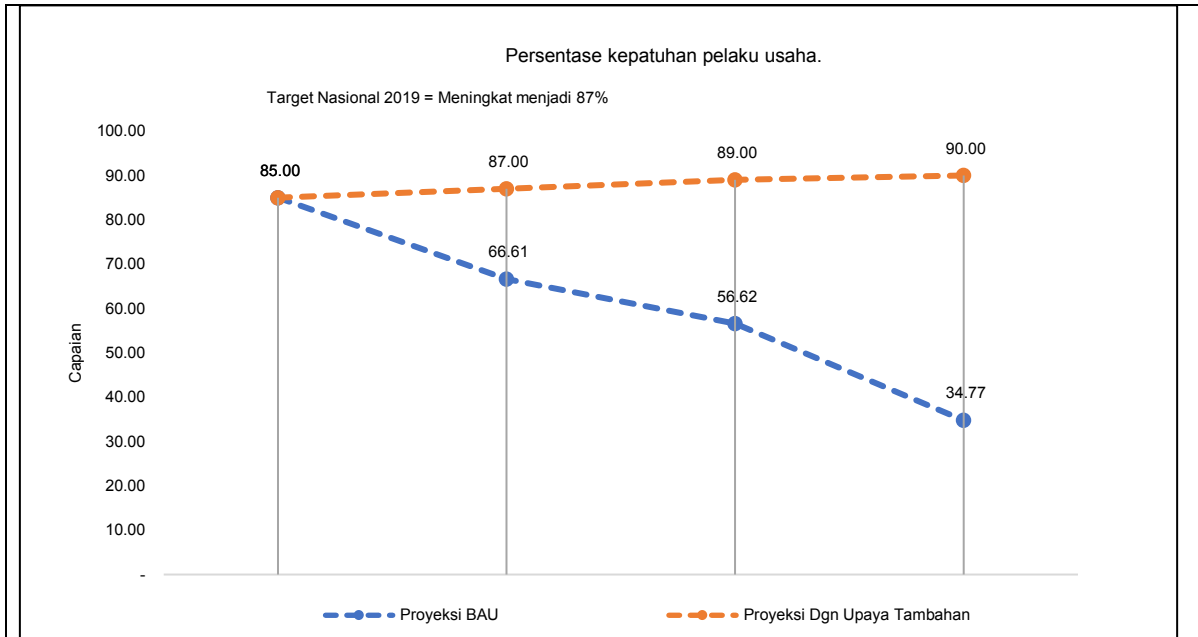
Pelaksana:

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



6.3.21. Indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha.

Tujuan:																																	
Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan																																	
Target:																																	
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Meningkat menjadi 87%																																	
SDG's (2030): Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.																																	
Nomor Indikator																																	
14.6.1.(a)																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :																																	
Capaian indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2016 mencapai target yang ditetapkan namun pada tahun-tahun berikutnya berfluktuatif dan masih di belum mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun yaitu semakin tahun semakin meningkat. Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>), Hasil proyeksi menunjukkan indikator ini justru semakin menurun sehingga perlu upaya tambahan , agar mencapai target yang ditetapkan. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:																																	
<table border="1"><thead><tr><th>Tahun</th><th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan</th><th>Proyeksi Dengan Upaya Tambahan</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3">Baseline Data</td></tr><tr><td>2016</td><td></td><td>100,00</td></tr><tr><td>2017</td><td></td><td>78,00</td></tr><tr><td>2018</td><td></td><td>80,00</td></tr><tr><td>2019</td><td></td><td>85,00</td></tr><tr><td colspan="3">Proyeksi</td></tr><tr><td>2019</td><td>85,00</td><td>85,00</td></tr><tr><td>2021</td><td>66,61</td><td>87,00</td></tr><tr><td>2025</td><td>56,62</td><td>89,00</td></tr><tr><td>2030</td><td>34,77</td><td>90,00</td></tr></tbody></table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2016		100,00	2017		78,00	2018		80,00	2019		85,00	Proyeksi			2019	85,00	85,00	2021	66,61	87,00	2025	56,62	89,00	2030	34,77	90,00
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2016		100,00																															
2017		78,00																															
2018		80,00																															
2019		85,00																															
Proyeksi																																	
2019	85,00	85,00																															
2021	66,61	87,00																															
2025	56,62	89,00																															
2030	34,77	90,00																															



Isu Strategis:

Masih rendahnya persentase kepatuhan dalam memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

Rekomendasi:

Sasaran :

Meningkatnya kepatuhan berusaha dalam memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan

Strategi dan Arah Kebijakan :

Meningkatkan pengawasan pelaku usaha dan nelayan dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan

Program:

Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Kegiatan:

- Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
- Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Pelaksana:

Dinas Kelautan dan Perikanan

6.3.22. Indikator Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur.

Tujuan:

Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi

Target:

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017:
Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB

SDG's (2030):

Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan



kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.

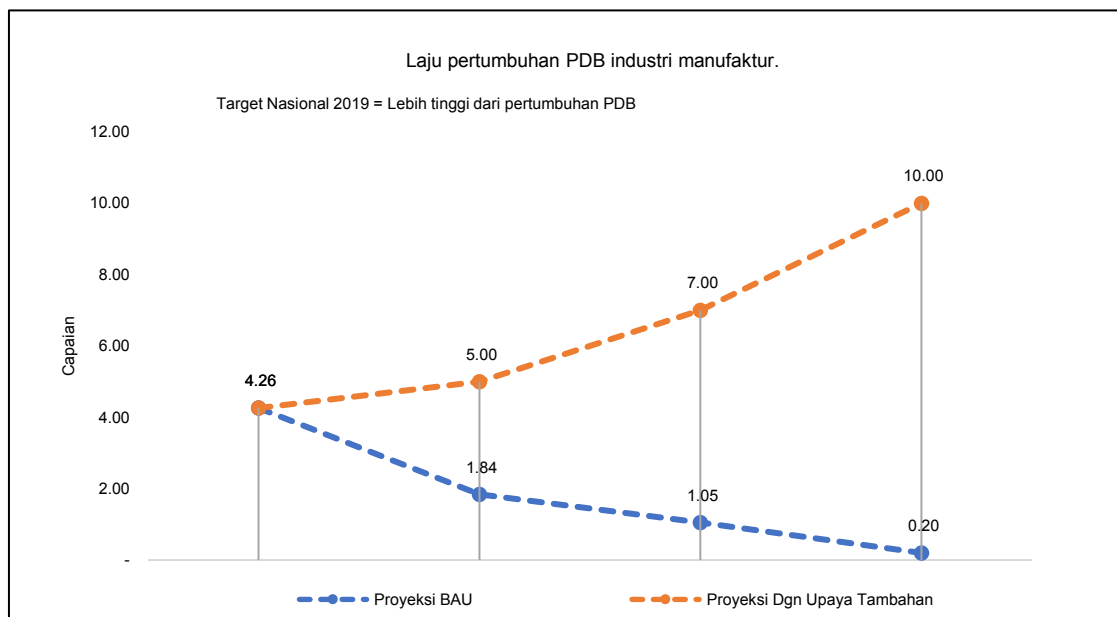
Nomor Indikator

9.2.1.(a)

Proyeksi Capaian Indikator TPB :

Capaian indikator Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur di Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2016 hingga 2019 berfluktuatif namun cenderung pada tahun 2017-2019 mengalami penurunan, hal ini menunjukkan bahwa indikator ini **belum mencapai target** yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun yaitu semakin tahun semakin meningkat. Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021,2025 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan **tanpa upaya tambahan** atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), Hasil proyeksi menunjukkan indikator ini justru semakin menurun sehingga **perlu upaya tambahan**, agar mencapai target yang ditetapkan. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		7,45
2017		8,95
2018		5,11
2019		4,26
Proyeksi		
2019	4,26	4,26
2021	1,84	5,00
2025	1,05	7,00
2030	0,20	10,00



Isu Strategis:

- Belum optimalnya pengembangan industri berwawasan lingkungan dalam meningkatkan investasi industri
- Laju Pertumbuhan PDB Industri Manufaktur lebih rendah dari laju pertumbuhan PDB

Rekomendasi:

Sasaran :

Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya



lokal yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan

Strategi:

- Meningkatkan implementasi industri 4.0 untuk peningkatan daya saing sektor industri
- Menumbuhkan industri baru yang bertumpu pada sumber daya lokal

Arah Kebijakan:

- Peningkatan daya saing melalui fasilitasi pengembangan industri pengolahan
- Peningkatan daya saing melalui penataan struktur industri
- Peningkatan produk bahan baku / penolong domestik sebagai bahan baku pengganti / substitusi impor

Program:

- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
- Program Pengendalian Izin Usaha Industri
- Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Kegiatan:

- Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
- Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
- Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri

Pelaksana:

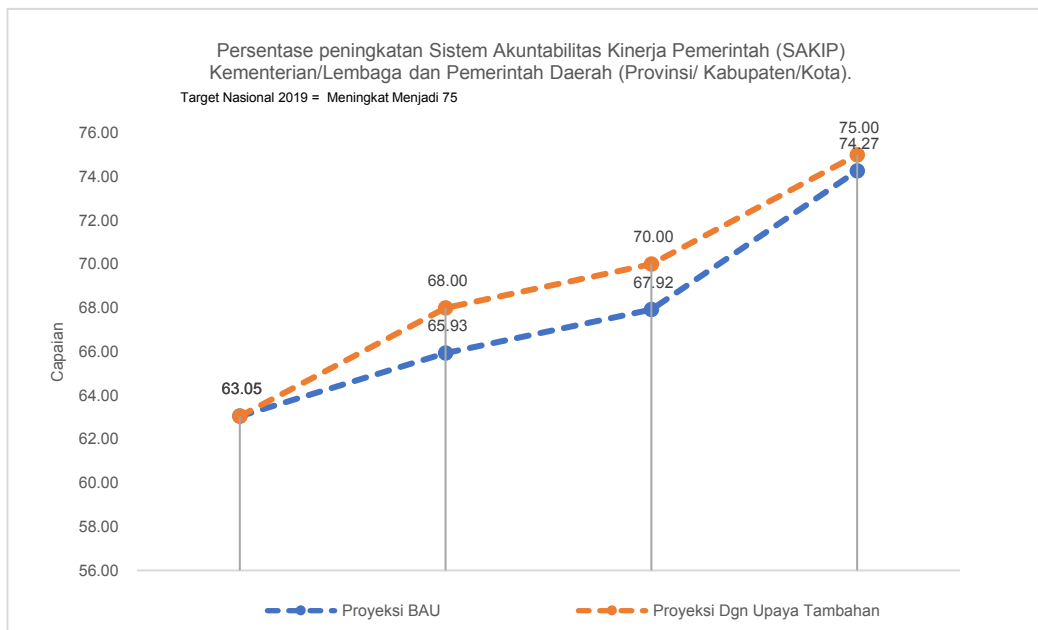
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

6.3.23. Indikator Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

Tujuan:
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
Target:
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Meningkat Menjadi 75%
SDG's (2030): Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
Nomor Indikator
16.6.1.(b)
Proyeksi Capaian Indikator TPB :
Capaian indikator Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), di Provinsi Kalimantan Tengah dari Tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan namun masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017. Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021 hingga 2030 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>), Hasil proyeksi menunjukkan indikator ini Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2030 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75%, sehingga perlu upaya tambahan , agar mencapai target yang ditetapkan. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:



Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		61,20
2017		61,35
2018		62,86
2019		63,05
Proyeksi		
2019	63,05	63,05
2021	65,93	68,00
2025	67,92	70,00
2030	74,27	75,00



Isu Strategis:

Masih rendahnya Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

Rekomendasi:

Sasaran :

Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) pada SKPD dengan capaian rendah.

Strategi dan Arah Kebijakan :

Meningkatkan ASN dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan

Program:

Program Penataan Organisasi

Kegiatan:

- Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
- Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pelaksana:

Biro Organisasi



6.3.24. Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.

Tujuan:																																	
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan																																	
Target:																																	
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Meningkat Menjadi 80%																																	
SDG's (2030): Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.																																	
Nomor Indikator																																	
16.6.1.(b)																																	
Proyeksi Capaian Indikator TPB :																																	
Capaian indikator persentase penggunaan E-Procurement di Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2017 dan 2018 sempat mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 yaitu di atas 80 %, namun pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 57,68%. Dari capaian ini kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021 hingga 2030 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan tanpa upaya tambahan atau dalam kondisi BAU (<i>Bisnis Analysis Usualy</i>), Hasil proyeksi menunjukkan indikator persentase penggunaan E-Procurement di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2030 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 80%, sehingga perlu upaya tambahan , agar mencapai target yang ditetapkan. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan</th> <th>Proyeksi Dengan Upaya Tambahan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Baseline Data</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td></td> <td>56,80</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td></td> <td>81,59</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td></td> <td>88,17</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td></td> <td>57,68</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">Proyeksi</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>57,68</td> <td>57,68</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>59,03</td> <td>63,45</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>59,94</td> <td>71,50</td> </tr> <tr> <td>2030</td> <td>62,77</td> <td>80,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan	Baseline Data			2016		56,80	2017		81,59	2018		88,17	2019		57,68	Proyeksi			2019	57,68	57,68	2021	59,03	63,45	2025	59,94	71,50	2030	62,77	80,00
Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan																															
Baseline Data																																	
2016		56,80																															
2017		81,59																															
2018		88,17																															
2019		57,68																															
Proyeksi																																	
2019	57,68	57,68																															
2021	59,03	63,45																															
2025	59,94	71,50																															
2030	62,77	80,00																															



Isu Strategis:
1. Kurangnya sumber daya manusia pengelola PBJ dalam pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa 2. Masih rendahnya presentase penggunaan E-Procurement di Provinsi Kalimantan Tengah
Rekomendasi:
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pengadaan Barang/Jasa
Strategi: 1. Mendorong terciptanya strategi dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang mendukung efisiensi dan efektifitas 2. Meningkatkan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik untuk transparansi pengadaan barang dan jasa 3. Meningkatkan profesionalitas SDM dan tata kelola organisasi UKPBJ yang transparan dan akuntabel
Arah Kebijakan : 1. Meningkatkan kualitas rumusan strategi pengadaan barang dan jasa. 2. Meningkatkan Pelayanan pengadaan barang dan jasa 3. Meningkatkan pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa Secara Elektronik. 5. Meningkatkan kemampuan sistem informasi untuk mendukung seluruh proses pengadaan barang dan jasa 6. Meningkatkan transparansi informasi pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat
Program: Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan: Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pembinaan Sumberdaya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa
Pelaksana: Biro Pengadaan Barang dan Jasa

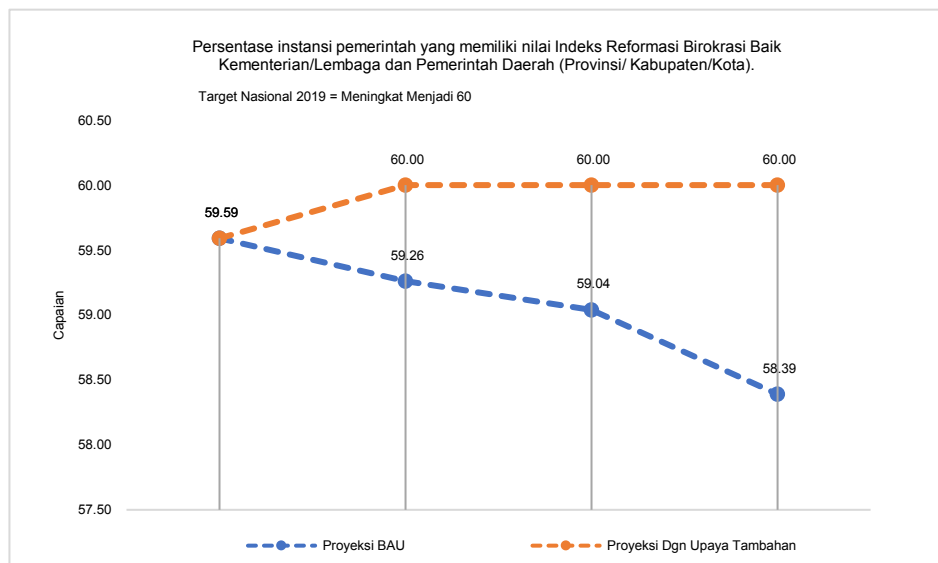
6.3.25. Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).

Tujuan:
Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
Target:
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017: Meningkat Menjadi 60%
SDG's (2030): Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.
Nomor Indikator
16.6.1.(b)
Proyeksi Capaian Indikator TPB :
Capaian indikator Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik berfluktuatif, pada tahun 2017 mencapai angka 59,70 kemudian di Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 59,28 dan pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 59,59. Dari capaian ini



kemudian dilakukan prediksi capaian tahun 2021 hingga 2030 dan berdasarkan baseline data tahun 2019. Proyeksi capaian ini dilakukan **tanpa upaya tambahan** atau dalam kondisi BAU (*Bisnis Analysis Usualy*), Hasil proyeksi menunjukkan indikator Persentase Instansi Pemerintah Yang Memiliki Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik di Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2030 belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 60 %, sehingga **perlu upaya tambahan**, agar mencapai target yang ditetapkan. Untuk mencapai target sesuai proyeksi dengan upaya tambahan diperlukan upaya-upaya skenario yang lebih pada tahun-tahun yang akan datang dikarenakan adanya Gap antara proyeksi BAU dan Proyeksi dengan Upaya Tambahan. Proyeksi capaian indikator ditunjukkan pada tabel dan gambar dibawah ini:

Tahun	Proyeksi Tanpa Upaya Tambahan	Proyeksi Dengan Upaya Tambahan
Baseline Data		
2016		58,00
2017		59,70
2018		59,28
2019		59,59
Proyeksi		
2019	59,59	59,59
2021	59,26	60,00
2025	59,04	60,00
2030	58,39	60,00



Isu Strategis:

Nilai RB dan SAKIP belum mencapai target

Rekomendasi:

Sasaran :

Meningkatnya nilai komponen reformasi birokrasi bidang organisasi

Strategi:

1. Peningkatan Tatakelola pemerintahan yang baik
2. Optimalisasi pelayanan publik dan pengembangan standarisasi
3. Peningkatan pelayanan laporan kinerja perangkat daerah

Arah Kebijakan :

1. Melaksanakan perumusan kebijakan kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah
2. Mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan pengaduan masyarakat untuk meningkatkan mutu pelayanan publik
3. Mewujudkan laporan kinerja perangkat daerah yang baik



Program:

Program Penataan Organisasi

Kegiatan:

1. Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2. Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
3. Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
4. Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan

Pelaksana:

Biro Organisasi

6.4. Alternatif Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan

Alternatif skenario dan rekomendasi untuk kegiatan yang belum mencapai target nasional namun berdasarkan proyeksi capaian dari data capaian sebelumnya dapat tercapai tanpa upaya tambahan, maka direkomendasikan untuk tetap harus dilaksanakan dengan melakukan target capaian minimal sebagaimana tabel sebagaimana tabel 6-1.

6.5. Alternatif Skenario Dan Rekomendasi Indikator TPB Belum dilaksanakan dan Tidak Ada Data

Alternatif skenario dan rekomendasi untuk indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target walaupun sudah direncanakan didalam RPJMD sebelumnya, namun dikarenakan keterbatasan anggaran/dana sehingga tidak dapat dilaksanakan, maka direkomendasikan untuk dilaksanakan pada tahun 2021-2026 dengan beberapa arahan rekomendasi sebagaimana tabel 6-2, sedangkan untuk indikator TPB yang tidak ada data maka direkomendasikan di tahun 2021-2026 dapat dilengkapi data-datanya melalui koordinasi dengan berbagai sektor sebagaimana tabel 6-3.

Rekapitulasi target dan indikator serta usulan program dan kegiatan untuk pencapaian Indikator TPB dengan Upaya Tambahan dan tanpa upaya tambahan dapat dilihat pada tabel 6-4 dan tabel 6-5



Tabel 6-1 Rekomendasi Indikator TPB Tanpa Upaya Tambahan

No Indikator	Indikator	Target Prepres	Target Pencapaian Minimal yang Harus dipenuhi						Instansi Pelaksana	Rekomendasi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	90,31	92,50	95,28	96,00	98,00	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam penyediaan sumber air minum layak agar memperhatikan potensi bencana banjir dan sinkronisasi program CSR pemegang konsesi/perusahaan
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	90,31	92,20	94,19	96,27	98,45	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperhatikan jasa lingkungan pemurnian air dan pengolahan air limbah
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	57,81	65,91	75,15	85,68	97,69	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan capaian indikator dapat dilakukan dengan sinkronisasi program CSR pemegang konsesi/perusahaan
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	37,05	37,10	37,30	37,50	37,70	37,90	Bapedalitbang	-
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	10,97	10,93	10,89	10,85	10,81	10,78	Dinas Ketahanan Pangan	Optimalisasi pertanian pada areal jasa lingkungan penyediaan pangan tinggi, namun dalam pelaksanaannya harus memperhatikan potensi bencana kekeringan
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	6,71	5,99	5,36	4,78	4,27	3,82	Dinas Ketahanan Pangan	-
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	6,71	5,99	5,36	4,78	4,27	3,82	Dinas Kesehatan	-
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	78,694,208	79,694,208	80,694,208	81,694,208	82,694,208	83,127,630	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Optimalisasi pertanian pada areal jasa lingkungan penyediaan pangan tinggi, namun dalam pelaksanaannya



No Indikator	Indikator	Target Prepres	Target Pencapaian Minimal yang Harus dipenuhi						Instansi Pelaksana	Rekomendasi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
										harus memperhatikan potensi bencana kekeringan
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkannya terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	91,00	92,00	93,00	95,00	95,00	96,00	Dinas Kesehatan	-
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	85,40	87,65	89,96	92,33	94,76	97,25	Dinas Kesehatan	-
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	52,53	50,82	49,17	47,57	46,03	44,53	Dinas Kesehatan	-
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	11,57	10,29	9,16	8,16	7,26	6,46	Dinas Kesehatan	-
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	74,00	78,00	82,00	87,00	91,00	95,00	Dinas Kesehatan	-
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	DP3AKKB	-
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	18,95	18,56	18,18	17,81	17,45	17,09	DP3AKKB	-
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	DP3AKKB	-
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	7,81	7,71	7,62	7,53	7,44	7,35	DP3AKKB	-
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	19,01	22,90	27,58	33,21	40,01	48,18	DP3AKKB	-



No Indikator	Indikator	Target Prepres	Target Pencapaian Minimal yang Harus dipenuhi						Instansi Pelaksana	Rekomendasi
			2021	2022	2023	2024	2025	2026		
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	90,31	92,20	94,19	96,27	98,45	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dalam penyediaan sumber air minum layak agar memperhatikan potensi bencana banjir dan sinkronisasi program CSR pemegang konsesi/perusahaan
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	69	72	76	80	85	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Memperhatikan jasa lingkungan pemurnian air dan pengolahan air limbah
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.	Meningkat menjadi 96,6%	89,16	90,34	91,53	92,74	95,97	97,21	Dinas ESDM	-
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	51%	50,50	51,00	51,50	52,00	52,50	53,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang dikelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	5.300,00	5.600,00	5.900,00	6.200,00	6.500,00	6.800,00	Dinas Lingkungan Hidup	Optimalisasi pengawasan pada penanggung jawab usaha penghasil limbah B3 melalui aplikasi siraja limbah
15.2.1.(a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisinya.	Meningkat menjadi 100.000 ha (skala nasional)	110	120	130	140	150	160	BPDASHL Kahayan dan BPDASHL Barito	Optimalisasi kewajiban rehabilitasi DAS bagi pemegang IPPHK.
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	3,70	3,87	3,93	3,99	4,00	4,00	Inspektorat	-
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	15,00	20,00	25,00	30,00	35,00	40,00	DP3AKKB	-
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	1,51	1,61	1,75	1,80	2,00	2,17	2,50	-



Tabel 6-2 Rekomendasi Indikator TPB Yang Belum di Laksanakan dan Belum Tercapai

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Rekomendasi
1.	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	Dinas Sosial	Kebutuhan dasar korban bencana di sinkronkan dengan tingkat resiko bencana yang ada di Kalimantan Tengah yaitu, banjir, kebakaran hutan dan lahan, abrasi dan gelombang pasang, serta bencana longsor
2.	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Untuk mengurangi kerugian ekonomi direkomendasikan upaya mitigasi dan adaptasi pada daerah-daerah/desa rawan bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, abrasi dan gelombang pasang, serta bencana longsor
3.	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Melakukan penyusunan dokumen strategi pengurangan resiko bencana tingkat provinsi dengan mengacu pada pedoman BNPB
4.	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	-
5.	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	-
6.	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	DP3AKKB	-
7.	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengembangan SPAM dengan memperhatikan potensi resiko banjir dan jasa lingkungan penyediaan air
8.	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
9.	6.4.1.(a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah.	ada	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Kasus penagekalan hukum lingkungan yang dilakukan masih fokus pada kasus lingkungan hidup
10.	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Difokuskan pada Danau yang diusulkan menjadi prioritas Nasional yaitu Danau Sembuluh
11.	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Tengah	-
12.	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	Menurun	Dinas Sosial	-



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Rekomendasi
13.	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Biro Hukum	-
14.	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-
15.	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkat	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Pembentukan difokuskan pada daerah resiko bencana, banjir, kebakaran hutan dan lahan, abrasi dan gelombang pasang, serta bencana longsor
16.	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Meningkat/ada	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
17.	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Belum dilakukan update data pengurangan resiko bencana yang disusun BNPB
18.	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	Belum dilakukan update data pengurangan resiko bencana yang disusun BNPB
19.	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Rehabilitasi lahan kritis baru direncanakan akan dimulai tahun 2022
20.	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Data dapat berkoordinasi dengan kepolisian



Tabel 6-3 Rekomendasi Indikator TPB Yang Belum Ada Data

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Rekomendasi
1.	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Dinas Sosial	Koordinasi dan sinkronisasi program dengan Dinas Tenaga Kerja dan Jamsostek Ketenagakerjaan
2.	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Dinas Sosial	Optimalisasi personil TAGANA dalam sebagai pendamping, dengan sasaran daerah resiko tinggi bencana banjir, tanah longsor, abrasi dan gelombang tinggi serta kebakaran hutan dan lahan
3.	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	Dinas Sosial	Koordinasi program muatan lokal dengan dinas pendidikan pada daerah resiko tinggi bencana banjir, tanah longsor, abrasi dan gelombang tinggi serta kebakaran hutan dan lahan
4.	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	Dinas Kesehatan	Data dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kalimantan Tengah
5.	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur \geq 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	Dinas Kesehatan	Pencatatan data melalui kerjasama dengan BPS Kalimantan Tengah
6.	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	Dinas Kesehatan	Data kasus dapat berkoordinasi dengan Kepolisian
7.	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	Dinas Lingkungan Hidup	Pembentukan di prioritaskan pada
8.	6.5.1.(e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Luas areal perhutanan sosial sesuai alokasi di masing-masing provinsi (lihat peta PIAPS KemenLHK)	Dinas Kehutanan	Peningkatan luasan areal PIAPS dengan tetap memperhatikan kondisi Jasa Lingkungan
9.	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	Dinas Lingkungan Hidup	Kerjasama penyusunan kelembagaan dengan BWS
10.	6.6.1.(e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	15 DAS Prioritas	Dinas Kehutanan	Diprioritaskan pada status DAS Kahayan yang statusnya dipulihkan melalui program rehab DAS
11.	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	Dinas Pariwisata	Pencatatan data kerjasama dengan BPS
12.	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	Dinas Pariwisata	Pencatatan data kerjasama dengan BPS
13.	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	DPMPSTP	Penyediaan data dan pemetaan lokasi ATM dengan perbankan



No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target (Perpres 59/2017) Ringkasan	Skpd /Instansi Pelaksana	Rekomendasi
14.	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	DPMPTSP	Penyediaan data dan pemetaan lokasi ATM dengan perbankan
15.	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	Meningkat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
16.	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Dinas Sosial	Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam pendataan
17.	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Pencatatan volume sampah di daur ulang yang dikelola oleh Kabupaten
18.	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	Balai Konservasi Sumber Daya Alam	Penyusunan dokumen Pemanfaatan Kehati
19.	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinasi data dengan Kepolisian
20.	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinasi data dengan Kepolisian
21.	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Koordinasi data dengan Kepolisian
22.	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	Menurun	DP3AKKB	Pencatatan data kerjasama dengan BPS
23.	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	DP3AKKB	Pencatatan data kerjasama dengan BPS dan Kepolisian
24.	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam,	Data berkoordinasi dengan Biro Keuangan Daerah
25.	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	Biro Hukum	Melakukan kajian kebijakan daerah yan telah ada.
26.	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam,	Koordinasi data dengan kantor pajak
27.	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam,	Koordinasi data dengan kantor pajak
28.	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	Bappedalitbang	Capaian target TPB dievaluasi setiap tahun



Tabel 6-4 Target dan Indikator (Tabel D1)

Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar 2019	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun									
Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	44,075	40.000	36.000	32.000	28.000	24.000	20.000	Dinas Sosial
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	82,16	90,31	92,20	94,19	96,27	98,45	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	64,79	69,00	72,00	76,00	80,00	85,00	90,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.	77,58	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50	Dinas Pendidikan
	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	39,00	57,81	65,91	75,15	85,68	95,69	100,00	Dinas ESDM
Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	84,30	75,00	60,00	45,00	30,00	15,00	5,00	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	36,95	37,05	37,10	37,30	37,50	37,70	37,90	Bepedalitbang
2. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun									
Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	11,09	10,97	10,93	10,89	10,85	10,81	10,78	Dinas Ketahanan Pangan
	Proporsi penduduk dengan	9,41	6,71	5,99	5,36	4,78	4,27	3,82	Dinas Ketahanan



Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar 2019	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
sepanjang tahun.	asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.								Pangan
Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	11,80	11,70	11,20	10,70	10,20	9,70	9,50	Dinas Kesehatan
	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	7,95	7,50	7,00	6,50	6,00	5,50	5,00	Dinas Kesehatan
	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	54,90	50,00	45,00	40,00	35,00	30,00	25,00	Dinas Kesehatan
	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	83,20	85,00	86,80	88,60	90,40	92,20	94,00	Dinas Ketahanan Pangan
Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	77.694.208	78.694.208	79.694.208	80.694.208	81.694.208	82.694.208	83.127,630	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun									
Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	90,42	91,00	92,00	93,00	95,00	95,00	96,00	Dinas Kesehatan
Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	79,00	85,40	87,65	89,96	92,33	94,76	97,25	Dinas Kesehatan



Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar 2019	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000.									
Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	58,00	52,53	50,82	49,17	47,57	46,03	44,53	Dinas Kesehatan
Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	16,40	11,57	10,29	9,16	8,16	7,26	6,46	Dinas Kesehatan
	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	11,00	22,00	28,00	35,00	43,00	54,00	68,00	Dinas Kesehatan
Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	71,40	74,00	78,00	82,00	87,00	91,00	95,00	Dinas Kesehatan
Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	29,84	27,00	25,00	23,00	21,00	19,00	17,00	Dinas Kesehatan
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua									
Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	Dinas Pendidikan
Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c)	45,00	51,00	57,00	63,00	69,00	75,00	81,00	Dinas Pendidikan



Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar 2019	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.	komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).								
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan									
Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0,13	0,04	0,03	0,02	0,02	0,01	0,01	DP3AKKB
Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	20,16	18,95	18,56	18,18	17,81	17,45	17,09	DP3AKKB
	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	20,80	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	DP3AKKB
	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	8,30	7,81	7,71	7,62	7,53	7,44	7,35	DP3AKKB
Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	10,88	19,01	22,90	27,58	33,21	40,01	48,18	DP3AKKB
Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	12,00	11,50	11,00	10,50	10,00	9,50	9,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah



Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar 2019	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	77,10	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	89,00	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah
6. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan									
Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	82,16	90,31	92,20	94,19	96,27	98,45	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	49,81	51,00	60,00	70,00	80,00	90,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	64,79	69	72	76	80	85	90	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	56,80	59,40	59,50	59,60	59,70	59,80	59,90	Dinas Lingkungan Hidup
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua									
Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	Rasio elektrifikasi.	85,72	89,16	90,34	91,53	92,74	95,97	97,21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	Konsumsi listrik per kapita.	1.153,52	1.160,00	1.170,00	1.180,00	1.190,00	1.200,00	1.210,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua									



Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar 2019	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	6,15	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	9,50	Badan Pusat Statistik
Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	4,79	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	40,25	41,00	43,00	45,00	47,00	49,00	51,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Persentase tenaga kerja formal.	50,04	50,50	51,00	51,50	52,00	52,50	53,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	66,84	67,00	67,50	68,00	68,50	69,00	69,50	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	21,91	22,00	22,10	22,40	22,70	23,00	23,30	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi									
Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.	Jumlah dermaga penyeberangan.	1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00	Dinas Perhubungan
	Jumlah pelabuhan strategis.	19,00	19,00	20,00	20,00	21,00	21,00	22,00	Dinas Perhubungan
Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	14,97	15,00	15,20	15,40	15,60	15,80	16,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	4,26	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian



Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar 2019	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.									
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan									
Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	84,30	80,00	75,00	70,00	65,00	60,00	55,00	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran
Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	71.30	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00	82,00	Dinas Lingkungan Hidup
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan									
Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	4966,76	5300,00	5600,00	5900,00	6200,00	6500,00	6800,00	Dinas Lingkungan Hidup
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya									
Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	84,30	80,00	75,00	70,00	65,00	60,00	55,00	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam



Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar 2019	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
semua negara.									Kebakaran
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan									
Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	85,00	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayatinjutan									
Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	47,19	49,00	51,00	53,00	55,00	57,00	59,00	Dinas Kehutanan
Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya.	100	110	120	130	140	150	160	BPDASHL Kahayan



Target TPB	Indikator TPB	Tahun Dasar 2019	Target Pencapaian						Instansi Pelaksana
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan									
Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	3,70	3,87	3,93	3,99	4,00	4,00	4,00	Inspektorat
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	63,05	65,93	66,92	67,92	68,94	69,98	71,03	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	57,68	59,03	59,48	59,94	60,40	60,87	61,34	Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah
Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	59,59	60,00	62,50	65,00	67,50	70,00	72,50	Biro Organisasi, Sekretariat Daerah
Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	10,88	11,00	11,20	11,70	12,00	12,30	12,60	DP3AKKB
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan									
Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya. (%)	1,51	1,61	1,75	1,80	2,00	2,17	2,50	Bapenda



Tabel 6-5 Program Dan Kegiatan Serta Indikatif Pendanaan (Tabel D2)

Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
INDIKATOR 1.3.1.(d) Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan.										
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial										
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Orang	40.000	36.000	32.000	28.000	24.000	20.000	254.975.426.729	APBD dan APBN	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan , Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat										
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Orang/ Lembaga	250	300	340	350	390	410	20.348.288.558	APBD	DPMDes
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Desa	120	150	160	180	200	240	13.973.141.598	APBD	DPMDes
INDIKATOR 1.4.1.(d) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak Dan Berkelanjutan.										
INDIKATOR 6.1.1. (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.										
INDIKATOR 6.1.1. (c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.										
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum										
Pengelolaan dan pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Persentase	90,31	92,50	95,28	96,00	98,00	100	389.890.396	APBD dan APBN	Dinas PUPR
INDIKATOR 1.4.1.(e) Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak dan Berkelanjutan.										
INDIKATOR 6.2.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.										
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah										
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Persentase	90,31	92,20	94,19	96,27	98,45	100,00	136.077.694.693	APBD dan APBN	Dinas PUPR
INDIKATOR 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.										
Program Pengelolaan Pendidikan										



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50	5.719.683.934.405	APBD dan APBN	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase	80,00	82,50	85,00	87,50	90,00	92,50	1.484.340.183.000	APBD dan APBN	Dinas Pendidikan
INDIKATOR 1.4.1.(k) Persentase Rumah Tangga Miskin Dan Rentan Yang Sumber Penerangan Utamanya Listrik Baik Dari PLN dan Bukan PLN.										
Program Pengelolaan Ketenagalistrikan										
Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Persentase	57,81	65,91	75,15	85,68	95,69	100,00	22.277.396.644	APBD	Dinas ESDM
INDIKATOR 1.5.1 Jumlah Korban Meninggal, Hilang, Dan Terkena Dampak Bencana Per 100.000 orang.										
Program Penanggulangan Bencana										
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Lokasi	14	14	14	14	14	14	6,493,601,700	APBD	BPBPK
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Lokasi	14	14	14	14	14	14	21,500,039,500	APBD	BPBPK
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Lokasi	14	14	14	14	14	14	18,348,157,200	APBD	BPBPK
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase										
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Meter	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	167.451.310.475	APBD	PUPR
Program Rehabilitasi Sosial										
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi	Orang	100	1.000	1.100	1.200	1.250	1.500	127.617.146.271	APBD	Dinas Sosial
INDIKATOR 1.a.2 Pengeluaran Layanan Pokok (Pendidikan, Kesehatan Dan Perlindungan Sosial) Sebagai Persentase Dari Total Belanja Pemerintah.										
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah										
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	3	3	3	3	3	3.072.700.000	APBD	Bapedalitbang
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen	8	8	8	8	8	8	1.549.148.000	APBD	Bapedalitbang



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)										
INDIKATOR 2.1.2 Prevalensi Penduduk Dengan Kerawanan Pangan Sedang Atau Berat, Berdasarkan Pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.										
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Ton	47,5	50,5	60,5	70,5	80,5	90,5	268.891.042.791	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase	10,97	10,93	10,89	10,85	10,81	10,78	741.740.920.214	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
INDIKATOR 2.1.2 (a) Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 kkal/kapita/hari.										
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase	85,5	88,3	90,4	91	91,5	92	354.936.176.482	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
INDIKATOR 2.2.1 Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Anak Di Bawah Lima Tahun/Balita.										
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	75.469.944.792	APBD	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan										
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	452.155.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR 2.2.2. Prevalensi Malnutrisi (Berat Badan/Tinggi Badan) Anak Pada Usia Kurang Dari 5 Tahun, Berdasarkan Tipe.										
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	75.469.944.792	APBD	Dinas Kesehatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan										
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	452.155.000.000	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR 2.2.2. (a) Prevalensi Anemia Pada Ibu Hamil.										
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	14.156.920.510	APBD	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	904.310.000	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR 2.2.2.(c) Kualitas Konsumsi Pangan Yang Diindikasikan Oleh Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.										
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan										
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	824.183.360	APBD	Dinas Perikanan dan Kelautan
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi)	85,00	86,80	88,60	90,40	92,20	94,00	161.334.625.674	APBD	Dinas Ketahanan Pangan
INDIKATOR 2.3.1 Nilai Tambah Pertanian Dibagi Jumlah Tenaga Kerja Di Sektor Pertanian (Rupiah Per Tenaga Kerja).										
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian										
Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Kegiatan	12	12	12	12	12	12	55.000.000.000	APBD dan APN	Dinas TPHP
INDIKATOR 3.1.2 Proporsi Perempuan Pernah Kawin Umur 15-49 Tahun Yang Proses Melahirkan Terakhirnya Ditolong Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih.										
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase	85,40	87,65	89,96	92,33	94,76	97,25	14.156.920.510	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR 3.2.2 (b) Persentase Kabupaten/Kota Yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi.										
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase	85,40	87,65	89,96	92,33	94,76	97,25	14.156.920.510	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR 3.3.2 (a) Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 Penduduk										
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat										



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	904.310.000	APBD	Dinas Kesehatan
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	24.542.329.079	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR 3.4.1 (c) Prevalensi Obesitas Pada Penduduk Umur ≥18 tahun.										
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan										
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	452.155.000	APBD	Dinas Kesehatan
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	452.155.000	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR 3.4.2 (a) Jumlah Kabupaten/Kota Yang Memiliki Puskesmas Yang Menyelenggarakan Upaya Kesehatan Jiwa.										
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan										
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Layanan	22,00	28,00	35,00	43,00	54,00	68,00	904,310,000	APBD	Dinas Kesehatan
INDIKATOR 3.8.2 (a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan										
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Persentase	74,00	78,00	82,00	87,00	91,00	95,00	126.991.218.036	APBD dan APBN	Dinas Kesehatan
INDIKATOR 3.a.1 Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.										
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan										
Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	452.155.000	APBD	Dinas Kesehatan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Tingkat Daerah Provinsi										
INDIKATOR 4.1.1 (c) Persentase SMA/MA Berakreditasi Minimal B.										
INDIKATOR 4.a.1 Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).										
Program Pengelolaan Pendidikan										
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Persentase Capaian Akreditasi Minimal B	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	5.719.683.934.405	APBD dan APBN	Dinas Pendidikan
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Persentase Capaian Akreditasi Minimal B	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	1.484.340.183.000	APBD dan APBN	Dinas Pendidikan
INDIKATOR 5.2.1 Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
Program Perlindungan Perempuan										
Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	62,32	52	47	42	37	32	10.158.012.300	APBD	DP3APPKB
Pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak Kekerasan dan perdagangan orang	Cakupan Perempuan Korban Kekerasan	-	76	76	76	76	76	3.381.334.966	APBD	DP3APPKB
INDIKATOR 5.3.1 Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.										
INDIKATOR 5.3.1 (a) Median Usia Kawin Pertama Perempuan Pernah Kawin Umur 25-49 Tahun.										
INDIKATOR 5.3.1 (b) Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).										
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)										
Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah Kegiatan	14	14	14	14	14	14	500.000.000	APBD	DP3APPKB
Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan Kie Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan	14	14	14	14	14	14	500.000.000	APBD	DP3APPKB
Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian	Unit	50	50	50	50	50	50	750.000.000	APBD	DP3APPKB



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal										
INDIKATOR 5.5.2 Proporsi Perempuan yang Berada di Posisi Manajerial.										
INDIKATOR 16.7.1. (b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).										
Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan										
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Kegiatan	14	14	14	14	14	14	500.000.000	APBD	DP3APPKB
INDIKATOR 5.6.1 (a) Unmet Need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).										
INDIKATOR 5.6.1 (b) Pengetahuan Dan Pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) Tentang Metode Kontrasepsi Modern.										
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)										
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang	-	400	440	480	520	560	4.124.337.034	APBD	DP3APPKB
Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan	14	14	14	14	14	14	500.000.000	APBD	DP3APPKB
INDIKATOR 6.3.2. (b) Kualitas Air Sungai Sebagai Sumber Air Baku.										
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup										
Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	-	59,40	59,50	59,60	59,70	59,80	3.812.720.00	APBD	DLH Kalteng
Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	-	59,40	59,50	59,60	59,70	59,80	597.360.000	APBD	DLH Kalteng
Pemulihan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	-	59,40	59,50	59,60	59,70	59,80	506.000.000	APBD	DLH Kalteng
INDIKATOR 7.1.1 Rasio Elektrifikasi.										
INDIKATOR 7.1.1 (a) Konsumsi listrik per kapita										
PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN										
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil	Persentase	-	94,35	95,34	96,29	96,90	97,40	12.000.000.000	APBD	DLH Kalteng



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
dan Perdesaan										
Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Kegiatan	14	14	14	14	14	14	540.000.000	APBD	DLH Kalteng
INDIKATOR 8.1.1 Laju pertumbuhan PDB per kapita. INDIKATOR 8.2.1 Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun. INDIKATOR 9.2.1 Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita. INDIKATOR 9.2.1 (a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur. INDIKATOR 17.1.1 Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.										
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal										
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan	14	14	14	14	14	14	4.000.000.000	APBD	DPMPPTSP
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen	4	4	5	5	5	5	600.000.000	APBD	DPMPPTSP
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan	8	8	8	8	8	8	18.000.000.000	APBD	DPMPPTSP
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri										
Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi	Dokumen	3	2	2	2	2	2	12.050.000.000	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi		-	-	4	5	6	7	232.050.000	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Pengembangan Ekspor										
Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu)	Jumlah dokumen promosi dagang produk ekspor unggulan	3	3	3	3	3	3	1.574.805.000	APBD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
daerah kabupaten/kota	daerah									
INDIKATOR 8.3.1 Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.										
INDIKATOR 8.3.1. (a) Persentase tenaga kerja formal.										
INDIKATOR 8.3.1. (b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian										
INDIKATOR 8.6.1 Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).										
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja										
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi	30	62	80	100	120	140	3.724.000.000	APBD	Disnakertrans
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Peserta Pelatihan Pemagangan Tenaga Kerja	-	300	400	500	600	700	9.423.887.500	APBD	Disnakertrans
Program Penempatan Tenaga Kerja										
Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja Mandiri yang dilatih	10	30	40	50	60	70	2.600.000.000	APBD	Disnakertrans
Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Kegiatan	14	14	14	14	14	14	375.000.000	APBD	Disnakertrans
INDIKATOR 9.1.2 (b) Jumlah dermaga penyeberangan										
INDIKATOR 9.1.2 (c) Jumlah pelabuhan strategis.										
Program Pengelolaan Pelayaran										
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	4,00		APBD	Dinas Perhubungan
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1		APBD	Dinas Perhubungan
Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Unit	1	1	1	1	1	1		APBD	Dinas Perhubungan
INDIKATOR 11.6.1. (a) Persentase Sampah Perkotaan Yang Tertangani.										
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan										



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Regional										
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampaha	Unit	1	2	3	4	5	6		APBD	Dinas PUPR
Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kelompok	10	10	10	10	10	10		APBD	Dinas PUPR
Program Pengelolaan Persampahan										
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus	Jumlah Kegiatan	-	1	1	0	0	0		APBD	DLH
INDIKATOR 12.4.2. (a) Jumlah Limbah B3 Yang Terkelola Dan Proporsi Limbah B3 Yang Diolah Sesuai Peraturan Perundangan (Sektor Industri).										
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)										
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Kegiatan	-	1	1	1	1	1	100.000.000	APBD	DLH
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)										
Pengawasan usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Prosentase Ketaatan	-	80	90	100	100	100	2.500.000.000	APBD	DLH
INDIKATOR 14.6.1. (a) Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha.										
Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan										
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah kegiatan untuk Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	3	3	3	3	3	3	9.093.635.200	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan



Program/Kegiatan/Indikator Kegiatan	Satuan	Target Tahunan						Indikatif Alokasi Anggaran 5 Tahun	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah kegiatan untuk Pengawasan Sumber Daya Perikanan Perairan Umum Daratan	-	-	1	1	1	1	546.000.000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
INDIKATOR 15.1.1. (a) Proporsi Tutupan Hutan Terhadap Luas Lahan Keseluruhan										
INDIKATOR 15.2.1. (a) Luas Kawasan Konservasi Terdegradasi Yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya										
Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya										
Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi	Luas (Ha)	58.341	58.341	58.341	58.341	58.341	58.341	3.257.500.000	APBD	Dinas Kehutanan
Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam	Luas (Ha)	-	200	200	200	200	200	904.600.000	APBD	Dinas Kehutanan
Program Pengelolaan Hutan										
Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas (Ha)	448	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	93.094.880.000	APBN dan APBD	Dinas Kehutanan
INDIKATOR 16.5.1. (a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)										
Program Penyelenggaraan Pengawasan										
Audit Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1.800.000.000	APBD	Inspektorat
Review Kinerja dan Keuangan	Jumlah Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1.800.000.000	APBD	Inspektorat
INDIKATOR 16.6.1. (b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).										
INDIKATOR 16.6.1. (d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).										
Program Penataan Organisasi										
Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase	65,93	66,92	67,92	68,94	69,98	71,03	4.508.798.300	APBD	Biro Organisasi
INDIKATOR 16.6.1. (c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.										
Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa										
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan	4	4	4	4	4	4	1.830.000.000	APBD	Biro PBJ
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Kegiatan	12	12	12	12	12	12	2.225.000.000	APBD	Biro PBJ



BAB-7

KESIMPULAN

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026





BAB 7

KESIMPULAN

1. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah masih memiliki kebutuhan air yang belum melampaui ketersediaan air di wilayah tersebut (area berwarna hijau). Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten yang memiliki area dengan ketersediaan air yang telah terlampaui. Adapun beberapa kabupaten dengan luas wilayah yang ketersediaannya telah terlampaui yaitu Kabupaten Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Raya, dengan persentase luas area berturut-turut seluas 0,1%, 0,19%, 0,02%, 8,29%, 0,92%, 0,11%, 0,70%, 0,06%, 5,65% dan 0,03% dari luas masing-masing kabupaten.
2. Secara keseluruhan kebutuhan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah belum melampaui ketersediaannya. Namun demikian, terdapat area yang kebutuhan pangannya telah melampaui ketersediaannya. Kabupaten/ kota dengan persentase luas wilayah yang telah melampaui ketersediaan pangan cukup besar adalah Kabupaten Barito Timur dan Kota Palangka Raya, Adapun persentase luas per- kabupaten/ kota tersebut secara berturut – turut mencapai 58,11% dan 57,80% dari luas masing – masing kabupaten/ kota. Jika diamati penggunaan lahannya, area yang kebutuhan pangannya telah melampaui ketersediaan pangan cenderung terletak di area permukiman yang padat penduduk. Semakin tinggi kepadatan penduduk di suatu wilayah, kebutuhan pangan akan semakin besar, sehingga cenderung memiliki kebutuhan pangan yang melampaui ketersediaan pangannya.
3. Berdasarkan data dari BNPB, bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah Banjir, Kekeringan, Cuaca Ekstrem, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem dan Abrasi Pantai, Kebakaran Hutan dan Lahan.
4. Bahwa 64% Desa di Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tingkat kerentanan Sedang, sebanyak 2% Desa memiliki tingkat kerentanan Tinggi, serta sebanyak 13% memiliki tingkat kerentanan sangat tinggi. Cukup banyaknya desa yang memiliki tingkat kerentanan perubahan iklim yang tinggi dan sangat tinggi, maka diperlukan perhatian khusus dalam upaya mitigasi dan adaptasi, sehingga dampak dari perubahan iklim tidak akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, salah satunya melalui program kampung iklim.
5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan sejak Tahun 2018. Pada tahun 2018 IKLH sebesar 75,71 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar 72,47. Penyumbang turunnya IKLH adalah dari rendahnya nilai Indeks Kualitas Air (IKA) yang semakin menurun akibat meningkatkan pencemaran sungai. Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan akibat deforestasi dan alih fungsi kawasan sehingga berdampak terhadap perubahan tutupan lahan.



6. Deforestasi di Kalimantan Tengah dari data KLHK selama kurun periode 5 tahun, luas total deforestasi mencapai 328.857,20 Ha. Laju deforestasi tertinggi terjadi pada Tahun 2015-2016 mencapai luas 116.085,87 Ha sedangkan pada tahun 2016-2017 mencapai luas 112.868.45 Ha. Pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan deforestasi yaitu hanya sebesar 6/926,10 Ha. Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Serutan merupakan Kabupaten yang cukup tinggi luasan deforestasi.
7. Realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat ditahun 2016-2019, akan tetapi mengalami penurunan dalam tahun 2020 dikarenakan terdampak oleh pandemi covid 19. Adapun rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2016-2020 ialah sebesar 8% dengan kontribusi rata-rata pertumbuhan yang paling besar dari Hasil Retribusi Daerah yaitu sebesar 46%. Adapun pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan juga sama halnya dengan realisasi pendapatan daerah. Dimana cenderung meningkat ditahun 2016-2019, akan tetapi mengalami penurunan dalam tahun 2020 dikarenakan terdampak oleh pandemi covid 19 yang rata-rata pertumbuhannya sebesar 14% pada tahun 2016-2020, dimana tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 38% dan Dana Alokasi Khusus sebesar 56%.
8. Pertumbuhan Bagi Hasil Bukan Pajak yang paling signifikan pada tahun 2018 yaitu terjadi kenaikan sebesar Rp191.446.336.575 dari tahun 2017, komponen yang mengalami peningkatan tersebut diantaranya Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, dan Iuran Eksploitasi (royalti). Untuk Dana Alokasi Khusus terjadi peningkatan sebesar 56% atau sebesar Rp 1.078425.745.186 dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar Rp 241.247.658.125 hal tersebut dikarenakan adanya peningkatan kegiatan kesehatan, reboisasi hutan dan lahan, pendidikan dan infrastuktur daerah.
9. Rata-rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 terbesar berasal dari dana perimbangan yaitu sebesar 62%. Hal ini dengan proporsi PAD sebesar 34% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 4% dari seluruh total pendapatan. Rincian dari Pendapatan Asli Daerah
10. Dari 235 indikator TPB yang menjadi kewenangan Provinsi, ada 204 indikator yang ada di wilayah Kalimantan Kalimantan Tengah, dan 31 indikator tidak ada di wilayah kajian antara lain, panjang pembangunan jalan tol, panjang pembangunan jalur kereta api, jumlah kawasan metropolitan dan lain-lain.
11. Dari total 2014 indikator TPB yang relevan di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 95 Indikator (46,57%) sudah dilaksanakan dan telah mencapai target yang ditetapkan, 60 Indikator (29,41%) sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional, 21 Indikator (10,29%) belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional dan sebanyak 8 indikator (13,73%) tidak ada data.
12. Kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sejumlah 93 (sembilan



puluh tiga) dari total 204 (dua ratus empat) indikator. Indikator TPB terbanyak yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional yaitu pada pilar sosial sebesar 49 (empat puluh sembilan) indikator. Sedangkan indikator paling rendah yang sudah dilaksanakan dan telah mencapai target nasional adalah pilar hukum dan tata kelola sebesar 3 (tiga) indikator dari target 16 (enam belas) indikator. Pilar ekonomi sebanyak 23 (dua puluh tiga) indikator dan pilar lingkungan sebanyak 18 (enam belas) indikator.

13. Kategori indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebanyak 62 (enam puluh dua) indikator dari total 204 (dua ratus empat) indikator. Indikator TPB terbanyak kategori B adalah pada pilar sosial sejumlah 31 (tiga puluh satu) dari total 92 (sembilan puluh dua) indikator. Yang terendah yaitu pilar hukum dan tata kelola sebanyak 5 (lima) indikator dari total 16 (enam belas) indikator.
14. Kategori indikator yang belum dilaksanakan dan juga belum mencapai target nasional adalah 21 (dua puluh satu) indikator dari jumlah total 204 (dua ratus empat) indikator. Indikator TPB terbanyak yang masuk kategori C adalah pilar lingkungan yaitu 11 (sebelas) indikator dan yang paling sedikit pada pilar hukum dan tata kelola sebanyak 1 indikator.
15. Kategori TPB D adalah indikator yang belum memiliki data yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator dari total 204 (dua ratus empat) indikator. Indikator terbanyak yang belum ada data adalah pada pilar ekonomi yaitu 9 (sembilan) dari total 50 (lima puluh) indikator. Indikator yang paling sedikit mengalami ketiadaan data adalah pilar sosial yaitu 6 (enam) indikator dari total 92 (sembilan puluh dua) indikator.
16. Isu-isu strategis terkait dengan lingkungan hidup adalah:
 - a. Alih fungsi lahan gambut untuk kegiatan PSN *food estate* seluas \pm 165.000 Ha.
 - b. Kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Konflik *tenurial* antara perusahaan perkebunan/pertambangan dengan masyarakat.
 - d. Alih fungsi lahan untuk proyek PSN (tanaman singkong) oleh Badan Cadangan Logistik Strategis (BCLS), kementerian Pertahanan seluas \pm 30.000 Ha dan direncanakan akan dikembangkan hingga mencapai hingga mencapai \pm 400.000 Ha.
 - e. Masih tingginya laju *deforestasi* dan alih fungsi lahan menjadi kebun sawit.
 - f. Penurunan indeks kualitas air (IKA) sehingga berpengaruh terhadap penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
 - g. Fluktuasi debit air sungai saat musim hujan dan kemarau sangat tinggi
 - h. penurunan kualitas udara saat terjadi kebakaran hutan yang berdampak pada peningkatan konsentrasi PM 10 dan PM2.5, dan menyebabkan emisi carbon sehingga berdampak terhadap perubahan iklim.
 - i. Isu terkait dengan dengan pesisir dan lautan umumnya adalah terjadinya abrasi di pantai yang mengancam pemukiman dan sarana vital masyarakat.
 - j. Isu terkait kebencanaan di wilayah Kalimantan Tengah sebagian besar di dominasi oleh kejadian banjir di beberapa wilayah dan terjadinya longsor.



17. Berdasarkan proyeksi capaian TPB sebanyak 33 indikator TPB perlu dilakukan upaya tambahan agar dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, Indikator tersebut adalah :
- 1.3.1.(d) Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.
 - 1.4.1.(i) Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat.
 - 1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
 - 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.
 - 2.2.2.(a) Prevalensi anemia pada ibu hamil.
 - 2.2.2.(c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.
 - 3.4.2.(a) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
 - 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - 3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ≥ 15 tahun.
 - 4.1.1.(c) Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B.
 - 4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).
 - 5.6.1.(a) Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).
 - 5.6.1.(b) Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.
 - 6.1.1.(c) Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.
 - 6.3.2.(b) Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.
 - 7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.
 - 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.
 - 8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.
 - 8.3.1.(b) Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.
 - 8.6.1* Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).
 - 9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan.
 - 9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.
 - 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.
 - 9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
 - 11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.
 - 11.6.1.(a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani.
 - 13.1.2* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.



- 14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha.
 - 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.
 - 16.6.1.(b) Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
 - 16.6.1.(c) Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.
 - 16.6.1.(d) Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).
18. Alternatif skenario dan rekomendasi untuk kegiatan yang belum mencapai target nasional namun berdasarkan proyeksi capaian dari data capaian sebelumnya dapat tercapai tanpa upaya tambahan, maka direkomendasikan untuk tetap harus dilaksanakan dengan melakukan target capaian minimal. Sebanyak 29 indikator TPB dapat mencapai target yang ditetapkan dalam Perpres tanpa upaya tambahan.
19. Alternatif skenario dan rekomendasi untuk indikator TPB yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target walaupun sudah direncanakan didalam RPJMD sebelumnya, namun dikarenakan keterbatasan anggaran/dana sehingga tidak dapat dilaksanakan maka direkomendasikan untuk dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa rekomendasi sesuai dengan kondisi DDDTLH dan Jasa Lingkungan serta resiko bencana.
20. Untuk indikator TPB yang tidak ada data maka direkomendasikan di tahun 2021-2026 dapat dilengkapi data-datanya melalui koordinasi dengan berbagai sektor.



DAFTAR PUSTAKA





DAFTAR PUSTAKA

- Anonim 2020, Kalimantan Tengah Dalam Angka Tahun 2020, Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah.
- Anonim 2020, Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2020, Biro Administrasi Pembangunan, Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
- Anonim 2018, Petujuk Teknis Penyusunan KLHS RPJMD, Kementerian Dalam Negeri.
- Anonim, 2014, Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, Deputi Bidang Tata Lingkungan-KLH.
- Muta'Ali, Lutfi. 2019. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Untuk Perencanaan Lingkungan Hidup. Badan Penerbit Fakultas Geografis (BPFGE), Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Pemerintah Indonesia. (2016). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2017). Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet RI.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup Dalam Penataan Ruang Wilayah. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan. KLHK. 2015. Deskripsi Peta Daya Dukung Ekoregion Kalimantan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD
- Wibisono, I.T.C., Labueni S dan I N.N. Suryadiputra. 2004. Rehabilitasi Hutan/Lahan Rawa Gambut Bekas Terbakar, Leaflet Seri Pengelolaan Hutan dan Lahan Gambut. Kerjasama antara Wetlands International, Wildlife Habitat Canada, Habitat Funnique Canada, dan Ditjen PHKA.



LAMPIRAN



**BERITA ACARA
PENJAMINAN KUALITAS KLHS RPJMD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk menjamin kualitas KLHS diperlukan adanya pengawasan secara internal maupun eksternal.

Pengawasan internal dilakukan sendiri oleh Pemerintah Provinsi untuk menjamin mutu pelaksanaan KLHS sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku, sedangkan pengawasan eksternal mengikuti proses pengawasan dalam pelaksanaan penyusunan KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

Dalam pelaksanaan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah ini, penjaminan kualitas KLHS dilakukan oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) di Provinsi Kalimantan Tengah. Secara umum proses KLHS sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hasil penjaminan kualitas KLHS dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel Penjaminan Kualitas
KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah**

Penjaminan kualitas KLHS dilakukan dengan penilaian mandiri yang kriteria pokoknya adalah sebagai berikut :

Nama KLHS	KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 – 2026
Nama Kebijakan, Rencana, atau Program	RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
K/L Penanggung Jawab	Gubernur Kalimantan Tengah
Tahun Pelaksanaan	Tahun 2021-2026

Penilaian : Desain proses KLHS		
Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah KLHS dilakukan sebagai satu kesatuan proses perencanaan KRP? <ul style="list-style-type: none"> - Bila "Ya" lanjutkan ke c - Bila "Tidak" lanjutkan ke a, lalu b dan c 	Ya	Penyusunan KLHS dilaksanakan dengan Rancangan Awal
a. Apakah ada mekanisme komunikasi antara tim perencana dengan kelompok kerja KLHS?	Ya	Komunikasi dan koordinasi telah dilakukan antara Tim penyusun rancangan awal RPJMD dan Tim penyusun KLHS melalui zoom meeting
b. Apakah rekomendasi yang diusulkan KLHS didiskusikan dengan pembuat KRP?	Ya	Rekomendasi KLHS yang disusun oleh Tim telah didiskusikan dengan pembuat KRP pada tanggal 7 Januari 2021
c. Apakah disampaikan secara jelas siapa penyusun KLHS? (SDM internal institusi pembuat KRP, SDM institusi yang ditunjuk sebagai penyusun KLHS, tenaga ahli eksternal, perusahaan konsultan, Pokja yang dibentuk oleh SK, pegawai	Ya	Tim Ahli penyusun KLHS sebanyak 3 (tiga) orang dari Universitas Palangka Raya terdiri dari Tenaga Ahli Lingkungan, Tenaga Ahli Kehutanan Tenaga Ahli Keuangan Daerah
Ringkasan kesimpulan:		
Proses penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah telah disusun sesuai dengan ketentuan dan kaidah ilmiah, seluruh rekomendasi KLHS RPJMD telah dikomunikasikan dengan pembuat KRP		

Penilaian : Laporan KLHS		
Kriteria Validasi	Penilaian	Keterangan
Laporan KLHS memuat informasi tentang :		
1. Dasar pertimbangan KRP sehingga perlu dilengkapi KLHS	Ya	Tertuang dalam bagian latar belakang penyusunan KLHS RPJMD
2. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil pengkajian pengaruh KRP terhadap kondisi lingkungan hidup	Ada	Tertuang dalam BAB II laporan KLHS RPJMD
3. Metode, teknik, rangkaian langkah-langkah dan hasil perumusan alternatif muatan KRP	Ada	Tertuang dalam BAB II laporan KLHS RPJMD
4. Perimbangan, muatan dan konsekuensi rekomendasi perbaikan untuk pengambilan	Ada	Tertuang dalam BAB VI laporan KLHS RPJMD

Penilaian : Laporan KLHS			
Kriteria Validasi		Penilaian	Keterangan
	keputusan KRP yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan		
5.	Gambaran pengintegrasian hasil KLHS dalam KRP	Aada	Tertuang pada BAB VII laporan KLHS RPJMD
6.	Pelaksanaan partisipasi masyarakat dan keterbukaan informasi KLHS	Ada	Telah dilaksanakan 2 kali konsultasi publik (offline dan online) yang dihadiri OPD, perguruan tinggi, LSM se-Kalimantan Tengah
7.	Hasil penjaminan kualitas KLHS	Ada	
8.	Ringkasan eksekutif yang menuangkan rekomendasi-rekomendasi KLHS untuk pengambil keputusan secara jelas	Ada	Ringkasan Eksekutif KLHS RPJMD

Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan			
Kriteria Validasi		Penilaian	Keterangan
Apakah isu-isu pembangunan berkelanjutan paling strategis sudah disepakati oleh pemangku kepentingan sebagai akar masalah dan telah disampaikan dengan jelas?		Ya	Tertuang pada BAB VI Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan tabel VI-4
Apakah hasil identifikasi isu strategis telah sedikitnya mempertimbangkan :			
1.	Krakteristik wilayah	Ya	Identifikasi isu strategis telah mempertimbangkan muatan KLHS berdasarkan penilaian menggunakan kriteria pada BAB VI Tabel IV-5
2.	Tingkat pentingnya potensi dampak	Ya	
3.	Keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan	Ya	
4.	Keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program	Ya	
5.	Muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup / RPPLH	Ya	
6.	Hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/atau relevansi langsung	Ya	

Penilaian : Isu Pembangunan Berkelanjutan

Kriteria Validasi		Penilaian	Keterangan
Apakah rumusan prioritas juga sudah memperhatikan aspek-aspek berikut:			
1.	Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan	Ya	Tertuang pada BAB VI
2.	Perkiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup	Ya	
3.	Kinerja layanan jasa ekosistem	Ya	
4.	Intensitas dan cakupan wilayah bencana alam	Ya	
5.	Status mutu dan ketersediaan sumber daya alam	Ya	
6.	Ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Ya	
7.	Kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Ya	
8.	Tingkat dan jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat	Ya	
9.	Resiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat	Ya	
10.	Ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.	Ya	
Lingkup geografis disampaikan dengan jelas		Ya	Tertuang pada BAB VI tabel VI-20
Jika Ya, apakah melingkupi wilayah di luar cakupan KRP?		Ya	Tertuang pada BAB VI tabel VI-20
Apakah lingkup pihak terkena dampak/berisiko dan berkepentingan disampaikan dengan jelas?		Ya	Tertuang pada BAB VI tabel VI-25

Penilaian : Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Kriteria Validasi		Penilaian	Keterangan
Apakah kondisi terkini dan pemetaan masalah dari isu prioritas dideskripsikan dengan jelas?		Ya	Tertuang pada BAB VI. Angka 6.3 Isu Lingkungan Hidup, Isu Strategis Pembangunan, dan Simulasi Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah
Apakah tersedia informasi yang menjelaskan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terkini dan/atau kecenderungannya?		Ya	Tertuang dalam BAB III Angka 3.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah

Penilaian : Analisis KRP dan Isu Pembangunan Berkelanjutan

Kriteria Validasi	Penilaian	Keterangan
Apakah telah dilakukan analisis semua dampak KRP terhadap isu prioritas?	Ya	Tertuang dalam BAB IV
Apakah hasil analisis diatas dideskripsikan dengan jelas?	Ya	Tertuang dalam BAB IV
Apakah hasil analisis diatas dijelaskan secara spasial?	Ya	
Jika "Ya", apakah dibedakan tingkat kerinciannya? Contoh : isu skala nasional, skala pulau, atau skala lokasi	Ya	Isu skala dibedakan antara nasional dan lokal

Penilaian : Pengkajian

Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah Pengkajian Memuat		
1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan	Ya	Tertuang pada BAB III laporan akhir KLHS RPJMD
2. Perkiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup	Ya	Tertuang dalam pengkajian TPB pada BAV III dan BAB IV
3. Kinerja layanan jasa ekosistem	Ya	Tertuang dalam pengkajian TPB pada BAV III dan BAB IV
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam	Ya	Tertuang dalam pengkajian TPB pada BAV III dan BAB IV
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim	Ya	Tertuang dalam pengkajian TPB pada BAV III dan BAB IV
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati	Ya	Tertuang dalam pengkajian TPB pada BAV III dan BAB IV
Apakah pengkajian yang bersifat kuantitatif dilengkapi dengan perhitungan yang akuntabel?	Ya	Tertuang dalam pengkajian peran para pihak pada BAB III
Apakah pengkajian menyebutkan landasan pedoman, acuan/referensi, standar, jaminan akuntabilitas dari ahli yang jelas?	Ya	Tertuang dalam pengkajian TPB pada BAV III dan BAB IV
Apakah pengkajian dilakukan dengan pendekatan spasial?	Ya	Tertuang dalam pengkajian TPB pada BAV III dan BAB IV
Apakah dijelaskan pada tahap penyusunan KRP yang mana, proses telaahan KLHS dilaksanakan?	Ya	Tertuang dalam pengkajian TPB pada BAV III dan BAB IV
Apakah semua dampak dan risiko terhadap isu prioritas telah dianalisis?	Ya	Tertuang dalam pengkajian TPB pada BAV III dan BAB IV
Apakah perkiraan dampak lanjutan dan dampak kumulatif sudah dianalisis?	Ya	Tertuang dalam pengkajian TPB pada BAV III dan BAB IV
Apakah perkiraan dampak dan risiko dilakukan secara kuantitatif?	Ya	Tertuang dalam pengkajian TPB pada BAV III dan BAB IV

Penilaian : Pengkajian

Kriteria	Penilaian	Keterangan
Apakah dilakukan simulasi berbasis skenario untuk perkiraan dampak dan risiko?	Ya	Tertuang dalam BAB V
Apakah perkiraan dampak dan risiko dituangkan secara spasial?	Ya	Tertuang dalam BAB V
Apakah ada penjelasan antara hasil telaahan dengan pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup?	Ya	Tertuang dalam BAB V

Penilaian : Alternatif dan Rekomendasi

	Kriteria Validasi	Penilaian	Keterangan
1.	Perubahan tujuan atau target	Ya	Tertuang dalam perumusan skenario/rekomendasi laporan akhir KLHS RPJMD BAB VII
2.	Perubahan strategi pencapaian target	Ya	
3.	Perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan	Ya	
4.	Perubahan atau penyesuaian proses, metode dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan	Ya	
5.	Penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan	Ya	
6.	Pemberian arahan atau rambu – rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem: dan/ atau	Ya	
7.	Pemberian arahan atau rambu – rambu mitigasi dampak dan resiko Lingkungan Hidup	Ya	
	Apakah dijelaskan bagaimana cara menyusun dan memutuskan alternatif KRP serta rekomendasi KLHS?	Ya	Tertuang di penjelasan BAB VI
	Apakah langkah-langkah untuk pencegahan dan pengurangan dampak dan risiko dari KRP telah diidentifikasi dengan jelas?	Ya	Pembahasan mengenai dampak resiko dijabarkan pada BAB III dan BAB IV
	Apakah langkah-langkah mitigasi mencantumkan apa perkiraan dampak/risiko tambahan/sisa dampak/risiko yang mungkin/masih akan muncul?	Ya	Pembahasan mengenai dampak resiko dijabarkan pada BAB III dan BAB IV

Penilaian : Alternatif dan Rekomendasi

	Kriteria Validasi	Penilaian	Keterangan
	Adakah rekomendasi KLHS terkait hasil kajian terutama pengaruhnya pada daya dukung dan daya tampung LH diidentifikasi dengan jelas?	Ya	Pembahasan mengenai dampak resiko dijabarkan pada BAB III dan BAB IV
	Apakah hasil rekomendasi konsisten dan relevan sebagai hasil dari rangkaian proses penetapan isu prioritas, pengkajian, dan penyusunan alternatif?	Ya	Pembahasan mengenai dampak resiko dijabarkan pada BAB III dan BAB IV
	Apakah disusun rekomendasi tindak lanjut tambahan sebagai konsekuensi implementasi KLHS untuk KRP?	Ya	Pembahasan mengenai dampak resiko dijabarkan pada BAB VI

Penilaian : Dokumentasi Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS

	Kriteria Validasi	Penilaian	Keterangan
1.	Data dukung proses FGD (foto, absen, berita acara)	Ada	Ada pada lampiran
2.	Data dukung proses konsultasi publik (foto, absen, berita acara)	Ada	Ada pada lampiran
3.	Dokumen KRP sebelum dan sesudah KRP diperbaiki dan/atau matriks yang menjelaskan perubahan sebelum dan sesudah	Ada	Ada pada lampiran
4.	Dokumen penjaminan kualitas Penyusun KRP	Ada	Ada pada lampiran
5.	Bukti pemenuhan kompetensi penyusun KLHS		Ada pada lampiran
6.	SK Pokja KLHS	Ada	Ada pada lampiran

Penilaian : Integrasi Hasil KLHS / Pengambilan Keputusan

	Kriteria Validasi	Penilaian	Keterangan
1.	Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis / dimasukan materi teknis KRP	Ya	Tertuang dalam perumusan skenario/rekomendasi laporan induk KLHS RPJMD
2.	Rekomendasi yang dihasilkan KLHS ditulis/dijadikan ketentuan pengaturan KRP	Ya	Tertuang dalam perumusan skenario/rekomendasi laporan induk KLHS RPJMD
3.	Rekomendasi yang dihasilkan KLHS dijembatani/ diinterpretasikan kembali penulisannya dalam bahasa peraturan pada KRP	Ya	Tertuang dalam perumusan skenario/rekomendasi laporan induk KLHS RPJMD
4.	Rekomendasi KLHS diatur tersendiri dalam ketentuan KRP (tidak ditulis kembali)	Ya	Tertuang dalam perumusan skenario/rekomendasi laporan induk KLHS RPJMD

Penilaian : Integrasi Hasil KLHS / Pengambilan Keputusan

	Kriteria Validasi	Penilaian	Keterangan
5	Penjelasan tentang KRP lainnya yang juga harus mempertimbangkan rekomendasi KLHS ini?	Ya	Tertuang dalam perumusan skenario/rekomendasi laporan induk KLHS RPJMD
6.	Rekomendasi khusus untuk penyusunan KLHS bagi KRP turunannya	Ya	Tertuang dalam perumusan skenario/rekomendasi laporan induk KLHS RPJMD
7.	Rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL/UPL sebagai tindak lanjut KRP ini	Ya	Tertuang dalam perumusan skenario/rekomendasi laporan induk KLHS RPJMD

Penilaian : Partisipasi Pemangku Kepentingan

	Kriteria Validasi	Penilaian	Keterangan
	Apakah dijelaskan pada tahapan mana saja dilakukan konsultasi publik?	Ya	Tahap konsultasi publik dilakukan beberap kali sesuai dengan undangan KP terlampir
	Apakah pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KLHS disebutkan dengan jelas?	Ya	Pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam KP KLHS tercantum dalam daftar undangan KP
	Apakah semua pemangku kepentingan yang dilibatkan memiliki kesempatan untuk memberikan masukan selama proses KLHS? Jika tidak, pemangku kepentingan yang mana yang tidak dilibatkan?	Ya	Semua pemangku kepentingan telah dilibatkan memberi masukan selama proses penyusunan melalui beberapa kali KP secara online.
	Apakah semua dokumen terkait KLHS dapat diakses oleh publik selama dan setelah proses KLHS?	Ya	Semua dokumen selama proses konsultasi publik dapat di akses melalui link google drive yang di informasikan selama proses konsultasi publik

Palangka Raya, Oktober 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN



**DOKUMENTASI
PROSES PENYUSUNAN
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021 - 2026**



DAFTAR ISI

1. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 - 2026
 2. SK TIM PENYUSUN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 - 2026
 3. RAPAT - RAPAT PENYUSUNAN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 - 2026
 - KICK OFF MEETING PERSIAPAN PENYUSUNAN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 - RAPAT MEKANISME PENYELESAIAN (TIME LINE) PENYUSUNAN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 - RAPAT DATA CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 - RAPAT TEKNIS PEMBAHASAN DATA CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 - RAPAT PERSIAPAN KONSULTASI PUBLIK I KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 – 2026
 - RAPAT KONSULTASI PUBLIK I KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 – 2026
 - RAPAT PERSIAPAN KONSULTASI PUBLIK II KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 – 2026
 - RAPAT KONSULTASI PUBLIK II KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 – 2026
 4. SURAT PERMINTAAN DATA CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)
-



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 - 2026

Term of Reference (TOR) Kerangka Acuan Kerja

Organisasi SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Unit Organisasi : Bidang Tata Lingkungan

Program : Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup

Sasaran Program : Tersedianya Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Status Lingkungan Hidup Daerah

I. LATAR BELAKANG

Gubernur terpilih periode 2021-2016 wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Berdasarkan PermenLHK Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Bentuk kegiatan ini adalah penyusunan KLHS RPJMD.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tengah pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 15, sebagai berikut : "Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program". Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah cq. Dinas Lingkungan Hidup mengemban tugas untuk melakukan kajian lingkungan hidup strategis atas kebijakan, rencana dan program (KRP) tersebut. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan dokumen IKPLHD Tahun 2019 oleh tim penyusun yang melibatkan perguruan tinggi, LSM dan perangkat daerah terkait, menginput data dari kabupaten/kota, dilanjutkan dengan analisis data serta rapat-rapat/FGD.



V. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilakukan di Palangka Raya, dengan melakukan FGD di 3 lokasi/kabupaten/kota selama 3 bulan dan penyusunan dokumen akan dilakukan oleh pihak ketiga.

VI. PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Pelaksana adalah bidang Tata Lingkungan yang dibantu pihak ketiga dengan Tim Teknis Penyusun.

VII. BIAYA

Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
2	3	4	5	6 = (3x5)
				100.000.000,00
Honorarium PHS				
Honorarium tm pengadaan barang/jasa				3.300.000,00
Pejabat Pengadaan barang/jasa	1	Orb	1.500.000	1.500.000,00
Pejabat Penema Hasil Hasil Pekerjaan	3	Orb x Ok	600.000	1.800.000,00
Belanja Jasa				
Belanja Jasa Pihak Ketiga dalam Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD	1,00	Dok	93.200.000,00	93.200.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor				
				3.500.000,00
- Kertas HVS 70 gr Folio	10,00	Rim	40.000,00	400.000,00
- Kertas HVS 70 gr Kwarta	10,00	Rim	50.000,00	500.000,00
- Catridge Hitam	3,00	Buah	250.000,00	750.000,00
- Catridge Warna	5,00	Buah	300.000,00	1.500.000,00

Kepala Bidang Tata Lingkungan,

ADIYAKSA PRASIDAPATI, ST
Pembina
NIP. 197307131998031 006



SK TIM PENYUSUN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 – 2026



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/ 65 /2020

TENTANG

**TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menyebutkan "Pembuatan KLHS RPJMD dilakukan dengan mekanisme pembentukan tim pembuat KLHS RPJMD. Pemerintah Daerah membentuk Tim Pembuat KLHS RPJMD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah".
 - c. bahwa dalam rangka mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan konsep pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Tahun 2021-2026.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
-



- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



- 3 -

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.



- 4 -

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri.
Up. Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Up. Direktorat Jenderal Planologi dan Tata Lingkungan.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 65 /2020
TANGGAL 10 MARET 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 – 2026

No.	Nama Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1.	Gubernur Kalimantan Tengah	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Pengarah
3.	Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Pengarah
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
5.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
7.	Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan		
1.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
4.	Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
5.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
6.	Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
8.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
9.	Kepala Bidang Energi dan Ketenegalistrikan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Geologi dan Airtanah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota



- 2 -

11.	Kepala Bidang Mineral dan Batubara, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Airtanah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
13.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
14.	Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
15.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
16.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
17.	Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
18.	Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
19.	Kepala Seksi Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
20.	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
22.	Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
23.	Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
24.	Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM, dan Penanaman Modal, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
25.	Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
26.	Kepala Sub Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah	Anggota
27.	Global Green Growth Institute (GGGI)	Anggota
28.	Yayasan Inovasi Bumi (Inobu)	Anggota
29.	USAID - LESTARI	Anggota
30.	AMAN Kalimantan Tengah	Anggota
31.	Lusia Widiastuti, SP, M.Si	Anggota
32.	Fathkurokhman	Anggota



- 3 -

Sekretariat		
1.	Kepala Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua
2.	Mayapitha Vidyadevi, S.Si	Sekretaris
3.	Robby Roberttus, SH	Anggota
4.	Hendra Saputra, S.Kom	Anggota





LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 65 /2020
TANGGAL 10 MAREK 2020

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
TIM PENYUSUN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(KLHS RPJMD)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 - 2026

1. Melaksanakan tahapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dengan cara saling bertukar informasi dan memberikan masukan terhadap proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan kelompok kerja lain dibawah koordinasi Ketua Tim Penyusun RPJMD.
2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja yang merupakan pedoman kerja bagi pelaksanaan KLHS dalam penyusunan KLHS RPJMD sejak tahap analisis gambaran umum kondisi daerah sampai dengan penyusunan akhir;
3. Melaksanakan tahapan pra pelingkupan, yang meliputi :
 - a. mengidentifikasi isu-isu lingkungan, sosial budaya, dan isu-isu ekonomi melalui diskusi internal Pokja PL;
 - b. mengumpulkan data dan informasi terkait dengan isu-isu terkait sebagaimana terkait dalam huruf a, seperti gambaran umum kondisi daerah, hasil kajian-kajian, dan publikasi yang ada;
 - c. mengidentifikasi jenis dan sumber data yang masih diperlukan namun belum tersedia, dan
 - d. menginventarisasi pemangku kepentingan yang akan dikutsertakan dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan daftar isu pembangunan.
4. Melakukan pengkajian pengaruh indikasi program prioritas dalam rancangan RPJMD;
5. Melakukan perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program melalui tahap identifikasi langkah-langkah mitigasi/adaptasi;
6. Menyusun alternatif rumusan;
7. Merumuskan rekomendasi KLHS untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan berdasarkan hasil perumusan mitigasi/adaptasi;
8. Menyelaraskan program prioritas dan kebutuhan rencana pendanaan.


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUOLANTO SABRAN



KICK OFF MEETING PERSIAPAN PENYUSUNAN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- **UNDANGAN**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon / Fax. (0536) 3221716 email tusekdaprovkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 11 Februari 2020

Kepada

Nomor : 660/138/TL/A.1/DLH/2020 Yth. Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)
Sifat : Penting di -
Lampiran : - TEMPAT
Hal : Undangan

Dengan ini disampaikan bahwa sesuai amanat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Hal diatas selaras dengan bahwa rangka mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dan konsep pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, maka perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Dalam rangka untuk mempersiapkan dan memastikan penyusunan KLHS RPJMD Provinsi KalimantanTengah agar sesuai dengan konsep dan filosofi KLHS sebagai instrumen lingkungan, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada :

Hari/tanggal : Senin/17 Februari 2020
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Swiss-Belhotel Danum
Jl. Tjilik Riwut Km. 5 No. 9, Palangka Raya
Acara : Kick off Meeting Persiapan Penyusunan KLHS
RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah



Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.



FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.
Pembina Utama Madya
NIP. 196912121996031003

Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Tengah



Nomor : 660/138/TL/A.1/DLH/2020
Tanggal : 11 Februari 2020

Daftar Undangan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
4. Kepala Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayah an, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
9. Kepala Bidang Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah
10. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
11. Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
12. Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
13. Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah
14. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
15. Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
16. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Penyusunan Program, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
17. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
18. Kepala Sub Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
19. Kepala Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi UKM dan Penanaman Modal, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
20. Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
21. Kepala Sub Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
22. Yayasan INOBU
23. Global Green Growth Institute (GGGI)
24. USAID-LESTARI
25. Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Tengah
26. AMAN Kalimantan Tengah
27. WALHI
28. Sekretariat Tim Penyusun KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah



• NOTULENSI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem AS No. 8 Palangka Raya 73111 – Kalimantan Tengah

Telp / Fax : (0536) 3223756

Website : <http://dlh.kalteng.go.id> E-mail : dlh@kalteng.go.id

NOTULENSI

KICK OFF MEETING KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari / Tanggal : Senin / 17 Februari 2020
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Swiss - Belhotel Danum Palangka Raya

AMAN Kalteng

Peran masyarakat adat dalam penyusunan KLHS RPJMD?

Tanggapan Pak Erick (Direktur PDLKWS)

inti KLHS adalah konsultasi publik termasuk di dalamnya adalah masyarakat adat. Saat konsultasi publik, wajib untuk menyampaikan data, informasi dan concern yang harus disertakan dengan data. Masyarakat adat dilibatkan secara konstruktif.

Fajrudin Mahmud (DLH Provinsi Kalteng)

pengelolaan dampak lingkungan hidup ada 3 aspek. Bagaimana dengan kegiatan yang sdh berjalan terkait dengan Amdal? Bagaimana mengintegrasikan Amdal dengan KLHS? bagaimana dengan akan ditetapkannya dengan cipta karya?

Tanggapan Pak Erick (Direktur PDLKWS)

posisi KLHS dan Amdal, KLHS adalah safeguard di level landscape. Amdal dalam scope yang lebih kecil. Tantangannta adalah me-link-kan sustainability di level tapak dan landscape. KLHS sebaiknya punya data informasi lengkap yang detail misalnya data spasial sehingga dapat menjadi acuan bagi perencanaan di tapak proyek di dalam lingkungan KLHS tersebut. Khusus untuk kegiatan yang sdh berjalan dan tidak sesuai dengan KLHS, KLHS bisa menjadi rekomendasi bagi pejabat pengawas bisa mengeluarkan sanksi untuk perubahan ijin lingkungan.



Wuryanto (Bappeda Provinsi Kalteng)

Bagaimana apabila data terbatas? dinas ESDM dan pertanian sebaiknya dilibatkan.

Tanggapan Pak Erick (Direktur PDLKWS)

Data KLHS adalah data yang resmi milik pemerintah, jadi data tersebut valid yang jelas sumbernya

Tanggapan Pak Kumar

Data pasti ada hanya mungkin belum diolah dan terintegrasi.

AMAN Kalteng

1. apakah bisa masyarakat adat mendapatkan perlindungan dan pengakuan dalam KLHS RPJMD?
2. Bagaimana ijin bisa dikeluarkan pada kawasan yang seharusnya tidak memperoleh ijin konsesi?

Tanggapan Pak Erick (Direktur PDLKWS)

Bisa disampaikan dalam FGD asal disertai dengan datanya

Uria Wulan (Dinas PUPR Provinsi Kalteng)

1. RPJMD mengacu kepada SDG's berbeda dengan RTRW
 2. Basis data harus kuat mengingat indikatornya yang sangat kuat sedangkan di PUPR sendiri masih lemah
-



• **DAFTAR HADIR**



DAFTAR HADIR



Acara: Kick off Meeting Periapan Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah
Hari/Tanggal: Senin/17 Februari 2020
Waktu : 08.00 - Selesai
Tempat : Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya

No.	NAMA	P/L	NIP	INSTANSI	EMAIL	NO TELEPON/HP	TANDA TANGAN
1	Erik Tjemp	L	19691201199603001	PKT	erik.tjemp@gmail.com	03128199000	
2	ADY Kurnia	L	1973031519981006	SKH		03128199000	
3	Kristina Kumara	L	197808201991001	Kantor PKTZ	Kumara7809@gmail.com	0819579709	
4	Fasau	L					
5	Nurriswika	P	19751110200801200	Kelembagaan		081540016107	
6	Sekar Anggrahati	P	19690520199601200	Banjar		081201194946	
7	Amalia	P	-	GGGI	Amalia.marsula@gmail.com	08211324357	



No.	NAMA	P/L	NIP	INSTANSI	EMAIL	NO TELEPON/HP	TANDA TANGAN
8	Arif, S.	L	1979062801000	Bappedalitbang		081250960511	
9	Ferdi Kuriyanto.	L		AMNAT KALITENE.		081250960511	
10	Tripta T	P.	198111282003200	BKJ Prov.			
11	ANUSMAN	L	197706211993001	DISTRIK KRASAK			
12	DODI PRASEPTO	L	1960063020001001	DISTRIK PAROV		08242150855	
13	Milo Ellimar L	L		DAP Prof Katesy		0813748424	
14	Fitriasi S.	P	197709152009012002	Bappedalitbang Prov.		08515333555	
15	IAN F. EV SR	L	1990062820041001	Rektorat			
16	SPTAN HS.	L	197606282003001002	DCH			
17	F. WAMUD	L	19870915200421001	DCH Prov.			
18	Hendrick L.	L		BGS		0811524424	
19	WIKHYANTO	L		Bappedalitbang		0813748424	



No.	NAMA	P/L	NIP	INSTANSI	EMAIL	NO TELEPON/HP	TANDA TANGAN
20	Ririn	P	19990242007412009	WCH Prov		0813-4841-4973	
21	Kenwa	L	-	DLH Prov		0852-4924444	
22	Ayustina Erani	P	-	DLH Prov		081452117208	
23	Fauzy - F	L	44080	WOSU		0812-32807972	
24	Tarin Muli	L	-	GGGI Sekret		08521153925	
25	SARIVA MARYA SOVA	P	198102252015032004	DEURP Prov		081349025906	
26	Zaidus Anwarini	P	08125946650	DLH Prov		08125946650	
27	Ulia Ulihan	P	196905141904032008	DLH Prov. Kalteng		081250828045	
28							
29							
30							
31							



No.	NAMA	P/L	NIP	INSTANSI	EMAIL	NO TELPON/HP	TANDA TANGAN
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39	Leuwana			Dit. Kehutanan			
40	Hendri Torsino			Dit. Kehutanan			

Sertifikaat dari pemerintah
Government of Indonesia's confirmation



tanggal
date



• DOKUMENTASI





RAPAT MEKANISME PENYELESAIAN (TIME LINE) PENYUSUNAN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- **UNDANGAN**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Willem A. Saragat No. 01 Palangka Raya 73113
Telp/Fax 0536-3223199 www.dlh.kalteng.go.id email dlh@kalteng.go.id

Palangka Raya, 13 April 2020

Kepada

Nomor : 680/2020/L.1/DLH/2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Undangan

Yth. **Daftar terlampir**
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 800/29/IV/I/BKD tanggal 18 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, serta dalam rangka optimalisasi Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah maka akan diadakan rapat yang dilaksanakan secara online (teleconference) dan atau video conference) pada:

Hari/tanggal : Rabu/15 April 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Secara online
Agenda : Mekanisme Penyelesaian (Time Line) Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah sehubungan dengan pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PIL. KEPALA DINAS,

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
ESAU, S.Si., M.Kes.
Pangkatina Tingkat I
MOR 197110241998031009



Lampiran
Nomor : 660/2020/11/DLH/2020
Tanggal : 13 April 2020

Daftar Undangan :

1. Kepala Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
2. INOBU
3. Global Green Growth Institute (GGGI)



• DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

RAPAT MEKANISME PENYELESAIAN (*TIME LINE*) PENYUSUNAN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal : Rabu / 15 April 2020
Pukul : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Aula DLH Provinsi Kalimantan Tengah (Secara *Online*)

NO	NAMA	INSTANSI / JABATAN	TANDA TANGAN
1	Arjatsa P.	Kabid Tata Lingkungan	
2	Feryah	Kuri Inventarisasi, RERH dan KLHS	
3	Maryattha Vidgendawi	DLH Prov Kalteng	
4	Hertha Suputra	DLH Provinsi Kalteng	
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			



• DOKUMENTASI





RAPAT DATA CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

• UNDANGAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor. 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221538 - 3223756 Fax. (0536) 3221634 - 3223756

Palangka Raya, 16 Juni 2020

Kepada

Nomor : 680/3CS/TL/1.1/DLH/2020 Yth. Daftar Terlampir
Sifat : Penting
Lampiran : +
Hal : Data Capaian Tujuan di -
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Tempat

Dalam rangka penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, akan dilakukan penumusan skenario yang merupakan alternatif proyeksi terhadap kondisi lingkungan hidup dan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) untuk pencapaian target TPB pada tahun 2025 berdasarkan kinerja Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dilakukan selama ini. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara dapat mengisi capaian pelaksanaan Indikator TPB termasuk kendala yang dihadapi. Format capaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat didownload <https://bit.ly/2YA7D4z>.

Data yang telah diisi dapat disampaikan kepada kami Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah cq. Bidang Tata Lingkungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy melalui email dih@kalteng.go.id atau tatalingkunganprov.klhs@gmail.com paling lambat tanggal 25 Juni 2020. Untuk pengisian data tersebut, Saudara dapat menugaskan staf yang menangani data dan program untuk hadir pada pertemuan secara online melalui aplikasi zoom meeting:

Hari/Tanggal : Jumat/19 Juni 2020
Pukul : 08.00-10.30 WIB
Room ID : 810 3416 3417
Password : 123456

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.
Pembina Utama Madya
NIP. 196912121996031003

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah



Lampiran I

Nomor : 660/346/TL/I.1/DLH/2020

Tanggal : 16 Juni 2020

Daftar Undangan

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,
2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah,
4. Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah,
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah,
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah,
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah,
8. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah,
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah,
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah,
11. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah,
12. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,
13. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah,
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah,
15. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah,
16. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah,
17. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,
18. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah,
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah,
20. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah,
22. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah,
23. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah,
24. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
25. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,
26. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah,
27. Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
28. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
29. Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
30. Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
31. Yayasan Inobu,
32. Global Green Growth Institute (GGI),
33. Lusla Widastuti, SP., M.Si,
34. Fathkhurokman.





• NOTULENSI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem AS No. 8 Palangka Raya 73111 – Kalimantan Tengah

Telp / Fax : (0536) 3223756

Website : <http://dlh.kalteng.go.id> E-mail : dlh@kalteng.go.id

NOTULENSI

RAPAT DATA CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Hari / Tanggal : Jumat / 19 Juni 2020
Tempat : Ruang Kepala Bidang Tata Lingkungan (Secara Online Zoom)
Room ID : 810 3416 3417
Password : 123456

1. Ibu Halizah Ulfah (Dinas Sosial Prov. Kalteng)

- Mengenai matriks kode indikator 1.3.1(b) target/indicator proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan itu tidak ada ditempat kami ?
- Apa yang dimaksud kategori SDGs serta dasar perhitungan dari kode 1.a.2 target/indicator pengeluaran untuk layanan pokok (Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial) sebagai presentasi dari total belanja pemerintah dan bagaimana cara perhitungannya ?

Tanggapan :

- Indikator 1.3.1 ini memang berada pada urusan Sosial, akan tetapi berdasarkan pengalaman data berada pada Dinas Ketenagakerjaan, untuk Dinas Sosial tidak mengisi tidak apa-apa dan untuk sekretariat untuk mengirimkan data tersebut pada Dinas Ketenagakerjaan.
- Untuk perhitungannya ada pada Meta Indikator SDGs yang akan saya bagikan Filenya.

2. Bapak Esau, S.Si., M.Kes (Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kalteng)

- Apakah setiap OPD harus mengerti target SDGs masing-masing ?
-



Jawaban

- apabila target SDGs sebelumnya sudah ada maka diinput, apabila tidak ada maka dikosongkan

3. Bapak Heru Setiawan (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalteng)

- Ada beberapa target indikator tidak ada pada OPD kami yang terdahulu sehingga target Pencapaian dan realisasi pencapaian yang kosong, dan untuk Indikator Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak ada?

Tanggapan :

- Untuk Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Data nya bisa sinkron Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi pada indikator RPJMD
- Apabila data nya tidak ada, tidak apa – apa tidak diinput sementara, nanti tim sekretariat yang akan evauluasi.

4. DPMPTSP Prov. Kalteng

- Untuk data yang diminta pada matriks pencapaian indicator Tujuan Pembangunan berkelanjutan tidak tersedia pada OPD kami ?

Tanggapan :

- ada beberapa kemungkinan data tersebut tidak tersedia, pertama mungkin data ada dikumpulkan tapi datanya hilang tidak terdokumentasi, kedua data itu memang tidak pernah kita kumpulkan 5 tahun yang lalu karena belum menjadi indikator kerja pada OPD, Ketiga indikator itu seharusnya kita kumpulkan datanya tapi selama ini tidak kita kumpulkan karena tidak program/kegiatan yang mendukung, keempat indikator itu memang bukan ada pada OPD kita, tetapi pada OPD lain, kelima indikator tersebut datanya diukur oleh instansi lain atau instansi vertikal tetapi data itu harus menjadi rujukan pada OPD kita.
-



5. Bapak Adiyaksa Prasidapati, ST (Dinas LH Prov. Kalteng)

- Apakah kita bisa meminta data vertical ?

Tanggapan : Bisa, instansi vertikal seperti BPS, Balai dan lainnya

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Prov. Kalteng

- Indikator yang diminta pada OPD kami ada 18 indikator sesuai dengan Renstra dan RPJMD ada beberapa yang tidak ada datanya, contohnya tentang median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun, mohon penjelasannya?

Tanggapan :

- Pengumpulan data indikator SDGs ini bukan sekedar mengumpulkan data dari OPD, tetapi sekaligus proses mengidentifikasi indikator TPB yang ada pada OPD kita masing-masing.
- Indikator TPB yang sudah dibagikan oleh Kementerian Dalam Negeri per urusan dan tugas kita di OPD adalah memastikan bahwa apakah benar indikator TPB ini memang ada pada urusan OPD atau ada pada tugas Pokok atau fungsi kita, bukan hanya memastikan ada datanya pada OPD. Bisa jadi dalam 5 tahun yang belum ada datanya karena kita belum memperhatikan SDGs
- Hasil identifikasi kita nanti dengan sendirinya akan terintegrasi dengan dalam dokumen Renstra selanjutnya.

7. Bapak Wawan Gunawan, ST., M.Eng (Dinas Perkimtan Prov. Kalteng)

- Sesuai penjelasan dari bapak bahwa target dan indicator capaian adalah berdasarkan kriteria SDGs, dapat kami sampaikan bahwa data yang ada dengan kami masih berdasarkan kriteria MDGs, mohon penjelasannya?

Tanggapan :

- Disinkronkan saja indikator dan datanya sama, karna kita sudah tidak menggunakan MDGs



8. Bapak Ansar, S.Hut., M.Si (Dinas Kehutanan Prov. Kalteng)

- Bagaimana jika proporsi variabel ukuran luas lahan kritis yang antara 2016-2018 mengalami perubahan, dalam RPJMD luas lahan kritis awal 3 juta sesuai dengan luas lahan kritis yang ditetapkan oleh pemerintah saat itu, dan pada tahun 2018 berubah menjadi 861.000, artinya ukuran variabel yang digunakan untuk capaian luas lahan kritis yang 3 juta atau menggunakan luas lahan yang 861.000. Untuk tahun di atas 2018 kami sudah menggunakan yang 861.000 mohon penjelasannya terkait cara pengisiannya ?

Tanggapan :

- Luas lahan kritis menghitung proporsi berarti berapa persen lahan kritis yang direhabilitasi, jadi kita masukkan saja data yang terakhir yang menjadi target pada tahun terakhir.

9. Bapak Wuryanto (Bappeda Prov. Kalteng)

- Kondisi umum 6 muatan KLHS, secara spasial berkaitan peta SIDIK tentang indeks kerentanan, mohon penjelasannya menjadi tugas siapa untuk peta SIDIK ?

Tanggapan :

- Untuk 6 muatan harus spasial semua, untuk kerentanan sudah ada lingkup analisisnya berdasarkan PermenLHK No 7 Tahun 2018 tentang Kajian Kerentanan Resiko dan Dampak Perubahan Iklim pada Tingkat Meso (Provinsi), apakah Kalimantan Tengah sudah membuat, kalau belum maka kita akan buat terlebih dahulu. Untuk tim sekretariat untuk identifikasi terkait 6 muatan sudah cukup data nya apa belum.

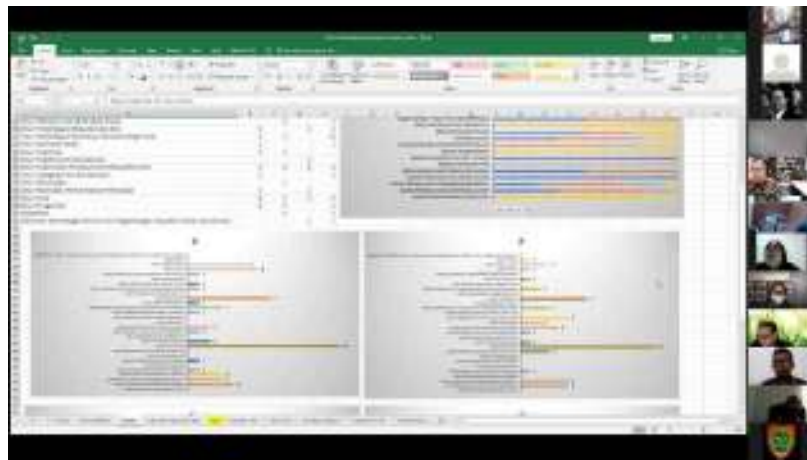
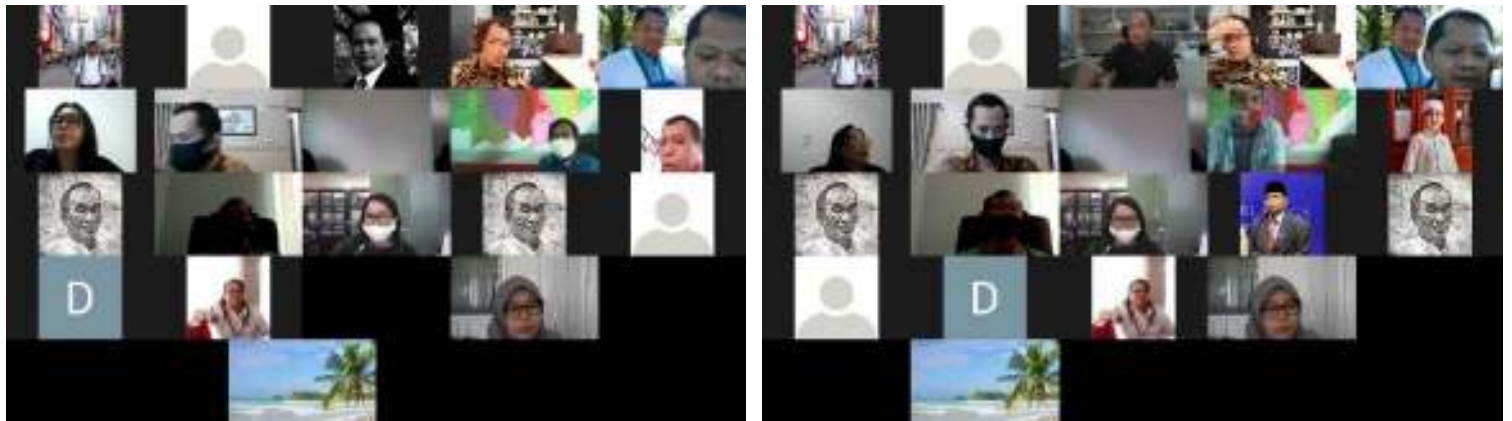


● **DAFTAR HADIR**

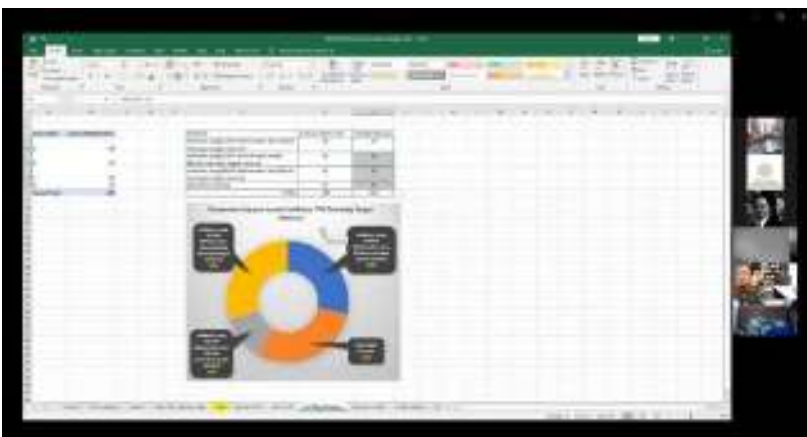
Timestamp	Email address	Nama Lengkap	Jabatan	Instansi	No Hand Phone
6/19/2020 7:53:20	lhnyoy2@gmail.com	hendra Saputra	Pelaksana	DLH Prov. Kalteng	081360535139
6/19/2020 7:57:41	yupajanes@gmail.com	Yupa Fatmawati, S.H	Staf/ Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Biro Organisasi SETDA	081349200888
6/19/2020 7:58:47	umunpbokkalteng@gmail.com	Elbrian Ernest, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Muda	(Subbag Umum dan Kepegawaian)Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Prov. Kalt	08525111409
6/19/2020 8:02:08	perencanaan bktkrkalteng@gmail.com	Lenny Christine	analisis program dan anggaran	BKKBN Provinsi Kalteng	0815598055
6/19/2020 8:02:19	lizah.setyawan@gmail.com	Halizah ulah	Penyusun Anggaran dan Pelaporan	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah	085707622223
6/19/2020 8:05:57	hidayathb84@gmail.com	Sn Hidayat	Fungsional Perencana Muda	DPLH Prov Subsel	085255929708
6/19/2020 8:12:17	mhanis@rps.go.id	Mokhammad Hanis	Kepala Seksi Statistik Kesejahteraan Rakyat	BPS Provinsi Kalimantan Tengah	081253920930
6/19/2020 8:12:37	hendrik.segah@gggg.org	Hendrik Segah, S.Hut., M.Si., Ph.D	GGGI Provincial Representative - Kalteng	GGGI	081251412612
6/19/2020 8:14:04	eko.setiabad@gggg.org	Eko Pranandhita Setiabad	Senior Assistant	Global Green Growth Institute	081218338820
6/19/2020 8:14:30	nma75@yahoo.co.id	Noetima	Kasubid Peternakan, Kelautan dan Perikanan	Bappedalitbang Prov.Kalteng	081349016207
6/19/2020 8:15:09	lusiaa.widastuti@gmail.com	Lusia Widastuti, SP, MP	Anggota	Universitas Palangka Raya	081263924387
6/19/2020 8:15:11	penyusunanprogram.bpmu@yahoo.co.id	Nani Triastuti	Calon Prakom	Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Kalteng	085349701663
6/19/2020 8:15:51	shwatasudatullah@gmail.com	shwata sudatullah	Anggota Umum	Dinas Esdm Provinsi Kalimantan Tengah	085348938832
6/19/2020 8:26:30	Perencanaanbunkalteng@gmail.com	Ika Tarafina Dewi	Kasubag penyusunan program	Dinas Perkebunan Provinsi Kalteng	081328337777
6/19/2020 8:26:59	fakhurrahman@gmail.com	Fakhurrahman	Policy and Advocacy	Indepdident Consultant	08115211252
6/19/2020 8:27:49	fensyah777@gmail.com	Fansyah, S.Hut	Kasi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS	DLH Provinsi Kalimantan Tengah	085249147778
6/19/2020 8:35:20	mpanobhop@gmail.com	Marin Panobhop	PTT	Biro Hukum	085349159999
6/19/2020 8:40:04	amalia.marisea@gggg.org	Amalia Dwi Marisea	Sr-Associate Environmental Economist	Global Green Growth Institute	082112347576
6/19/2020 8:41:03	shwatasudatullah@gmail.com	shwata sudatullah	Anggota umum	Dinas Energi dan Sumberdaya mineral Prov. Kalteng	085348938832
6/19/2020 8:41:05	yulianwiratno@yahoo.co.id	yulian wiratno	kasubag penyusunan program	DPHPTSP PROV. KALTENG	085350211234
6/19/2020 8:44:27	nutami@inbu.org	Nada Putri Utami	Researcher Inbu	Yayasan Inbu	081388758768
6/19/2020 8:46:06	esauambang@gmail.com	ESAU	Plt. Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	081351030371
6/19/2020 8:47:03	taswinmunier@gmail.com	Taswin Munier	Environmental policy officer	GGGI	085211557725
6/19/2020 8:51:45	w.pambud@gmail.com	Lutfi Ayu Pambudi	Staf Perencanaan Teknis	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	082140080650
6/19/2020 8:52:32	bundanaubypratama@gmail.com	Sufila Susilawati, S.Hut	Kasi Ketahanan Masyarakat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Prov. Kalteng	081349007777
6/19/2020 8:54:36	umamv@inbu.org	Utami	Program Manager	Inbu	085274817693
6/19/2020 8:55:07	dshub@kalteng.go.id	Andreas Palembang Santosa, ST., MT	Kabid LJJ Dishub Prov. Kalteng	Dishub Prov. Kalteng	085228073453
6/19/2020 8:57:16	aberlianda@inbu.org	Anesia Berlianda	Program Officer	Yayasan Inbu	081267051733
6/19/2020 9:01:21	heru.setiawan@gmail.com	HERU SETIAWAN	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	081348083571
6/19/2020 9:01:52	hapenda.kalteng2@gmail.com	Sufila Agustina S.	Pelaksana	BAPENDA KALTENG	087835005553
6/19/2020 9:04:13	budpar.kalteng@yahoo.com	Theresia/Anda	Staf Subbag Penyusunan Program	Dishub Prov. Kalteng	081311395465
6/19/2020 9:18:58	program.dshubkalteng2019@gmail.com	ANSAR, S.Hut., M.Si	Kasubag Penyusunan Program	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	082196720178
6/19/2020 10:12:12	wah140@gmail.com	Wawan Gunawan, ST., M.Eng	Kepala Seksi Perencanaan Teknis	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	081314920520



• DOKUMENTASI



Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6
Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	Row 1	Row 1
Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	Row 2	Row 2
Row 3	Row 3	Row 3	Row 3	Row 3	Row 3
Row 4	Row 4	Row 4	Row 4	Row 4	Row 4
Row 5	Row 5	Row 5	Row 5	Row 5	Row 5





RAPAT TEKNIS PEMBAHASAN DATA CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

- UNDANGAN

	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jalan Wilem A.S. Nomor 8 Palangka Raya Telpun / Faksimile (0536) 3223756 Email : dlh@kalteng.go.id
	Palangka Raya, 24 Agustus 2020
Nomor : 680/ 477 /TL/L.1/DLH/2020	Kepada
Sifat : Penting	Yth. Daftar Terlampir
Lampiran : 1 (satu)	di-
Hal : Undangan Rapat Teknis	tempat
<p>Menindaklanjuti hasil rapat teknis sebelumnya untuk penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2026, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk bergabung dalam rapat lanjutan yang akan dilaksanakan pada :</p>	
Hari/tanggal : Selasa/25 Agustus 2020	
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai	
Media : Virtual Zoom meeting	
ID : 885 5048 1221	
Password : 123456	
<p>Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	
	 ESAU S. SI., M.Kes Pembina Tingkat I NIP. 197110241998031009
Tembusan : Gubernur Kalimantan Tengah	



Lampiran I

Nomor : 660/ 444 /TL/L 1/DLH/2020

Tanggal : 24 Agustus 2020

Daftar Undangan :

1. Global Green Growth Institute (GGGI)
2. Yayasan Inobu
3. Bapak Sri Hidayat, S.Si., M.Si (Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan)



• NOTULENSI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem AS No. 8 Palangka Raya 73111 – Kalimantan Tengah
Telp / Fax : (0536) 3223756
Website : <http://dlh.kalteng.go.id> E-mail : dlh@kalteng.go.id

NOTULENSI

**RAPAT TEKNIS DATA CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(TPB)**

Hari / Tanggal : Selasa, 25 Agustus 2020
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Secara Daring (Virtual Zoom Meeting)

Update progres dari DLH

- Bappeda mengalami kesulitan dalam perhitungan analisis capaian/realisasi anggaran, dan proyeksi kemampuan anggaran
- Permintaan data dan proses analisis capaian TPB di tiap sektor/OPD masih berjalan, jika nantinya selesai maka akan menjadi bahan diskusi dalam konsultasi publik 1
- INOBU telah membantu menyusun DDDTLH, DLH akan mencoba analisis keanekaragaman hayati berbasis spasial

Catatan Diskusi

Pak Sri Hidayat

- Dari 236 indikator yang ada dalam matriks capaian TPB, indikator yang tidak sesuai dengan kondisi Kalimantan Tengah sebaiknya dikeluarkan saja sehingga tidak mempengaruhi persentase contoh: indikator rel kereta api, kota metropolitan, proporsi riset, dan pelabuhan strategis, Kawasan pemukiman kumuh, dll
 - Fokus untuk mencari data yang ada (telah diberi arsiran kuning di file excel / master data capaian TPB Prov Kalteng)
 - Beberapa data yang terdapat di instansi lain, misalnya data kriminalitas dan konflik: Mapolda Prov Kalteng, data pengguna jaringan internet dan layanan telepon genggam: telkom, PDRB dari sektor wisata: BPS, yang kemungkinan hanya sebagai pengompilasi data, bukan wali data, sebaiknya dipindahkan ke instansi yang bertanggung jawab terhadap pencapaian/update data tsb
 - Mis. untuk kontribusi pariwisata terhadap PDRB, BPS hanya sebagai kompilator dan penyedia data sementara OPD yang terkait langsung sebagai wali data dan kinerjanya diukur dengan data tersebut adalah Dinas Pariwisata
-



- Capaian indikator TPB juga akan digunakan untuk penyusunan Renstra OPD dan juga RKPD. Adapun tanggung jawab OPD terdiri dari IKK, SPM, dan juga capaian TPB
- Tujuan pengumpulan dan identifikasi data TPB adalah memetakan OPD pelaksana dan penanggung jawab agar dapat mengukur kinerja per masing2 OPD
- Cara perhitungan indikator sudah terdapat di dokumen meta data TPB
- Capaian indikator TPB harus diketahui oleh setiap OPD, untuk memetakan dan mengukur tanggung jawab dan kinerja
- Jika tidak ada data yang spesifik (mis. berdasarkan usia dan jenis kelamin) maka dapat digunakan data umum yang ada
- Sekretariat Pokja KLHS RPJMD harus menentukan deadline pengumpulan data sehingga dapat menentukan waktu untuk langkah selanjutnya, agar timeline/target waktu di tiap tahapan penyusunan KLHS RPJMD dapat dipenuhi
- Pengalaman di Prov Sulsel, diadakan rapat dengan mengundang kepala daerah di level provinsi dan kab/kota sehingga OPD lebih dipaksa untuk mengumpulkan data. Hal ini perlu diupayakan karena jika capaian TPB terlalu rendah maka secara tidak langsung merefleksikan bahwa terdapat banyak program pemda yang tidak berjalan, atau ada banyak masalah di daerah tersebut

Pak Taswin

- Selama proses penyusunan KLHS RPJMD ini, GGGI akan memastikan pelibatan Pak Sri Hidayat di keseluruhan proses. Namun peran beliau hanya sebatas sebagai pendamping, untuk mereview hasil analisis TPB, analisis spasial, maupun analisis lainnya, serta penulisan draft dokumen KLHS. Untuk itu harus ada tim tenaga ahli lokal (2 orang tenaga junior dari kampus) yang bertugas melakukan pendokumentasian data, analisis, penulisan dan lainnya, yang akan dibantu oleh tim dari DLH Prov Kalteng
- Perlu dipikirkan rencana percepatan proses penyusunan KLHS RPJMD ini, dengan tetap berpegang pada tahapan yang ditetapkan oleh aturan yang berlaku, dan memastikan bahwa kualitas proses dan dokumen KLHS tidak dikorbankan
- Usul agar pertemuan membahas TPB dan data spasial dilakukan terpisah (baik dari segi tenaga ahli maupun audiens nya), agar lebih fokus
- Draft Bab 1-2 laporan KLHS RPJMD yang sudah ditulis, belum mewakili kondisi real di Kalteng karena belum ditulis berdasarkan hasil analisis capaian TPB dan kegiatan pembangunan
- Perlu TA junior untuk sektor lingkungan dan keuangan
- Tanggal 27 terlalu mepet, disarankan untuk pra konsultasi dulu baru 1-2 minggu setelahnya konsultasi publik

Pak Sri Hidayat

- Identifikasi isu pembangunan berkelanjutan tidak harus selesai dalam 1 kali pertemuan daring, tapi bisa menggunakan kuisioner melalui google form, yang dapat diisi oleh peserta Uji Publik sebelum dan sesudah kegiatan tersebut
-



- Isu strategis dan prioritas dalam KLHS RPJMD pada dasarnya adalah indikator TPB yang tidak tercapai dan akan menjadi isu daerah serta program prioritas dalam RPJMD yang akan datang
- Penyusunan rancangan teknokratik digunakan untuk merumuskan visi misi kepala daerah, namun yang dikhawatirkan adalah apabila isu ekonomi dan sosial yang dikedepankan, melebihi isu Lingkungan/ekologi
- Penting untuk menjelaskan kebutuhan daerah terhadap KLHS pada latar belakang dokumen. Apa alasannya, sektor apa yang mendorong perekonomian, isu apa yang muncul dari sektor tersebut, lalu tentukan kebutuhan KLHS untuk pembangunan daerah di masa yang akan datang
- Bab 3 membahas kajian 6 muatan
- Tidak ada sistematika baku, Pak Sri akan share format penjaminan mutu RPJMD
- Sesuaikan dengan teori dan metode yang dipakai
- Sepakati outline dan sistematika yang dipakai agar syarat validasi dapat terpenuhi
- Buat 1 versi dokumen yang dapat mengakomodir 2 kementerian tersebut, disarankan untuk validasi ke Bangda terlebih dahulu
- Perlu orang untuk menulis laporan karena tidak akan mudah
- TPB perlu diperkuat
- Sektor keuangan bisa meminta Bappeda bidang perekonomian untuk menganalisis, semua data ada di laporan LKPJ, analisis dilakukan untuk melihat keterkaitan antara anggaran dan capaian TPB
- Yang harus dihitung untuk proyeksi kemampuan keuangan daerah adalah kemandirian keuangan dan analisis fiskal
- Konsultasi publik 1 silakan dilaksanakan, yang perlu disampaikan adalah data capaian TPB, isu PB sudah terkumpul dan akan diolah, persiapkan administrasi (berita acara, kesepakatan, absensi, catatan rapat, undangan)
- Isu strategis TPB diambil dari tujuan TPB yang capaiannya kurang dari 50%

Pak Heri P3E

- Setuju Dengan usulan pak Hidayat, jika survey dengan google form bisa disebar ke para pihak sehingga isu menjadi lebih kuat dan mewakili
- Jika Pemda sudah mempunyai RAD TPB, bisakah datanya digunakan untuk mengisi matriks capaian indikator TPB?
Jawaban Pak Sri: Bisa saja namun terdapat perbedaan format karena penyusunan RAD TPB pada hakikatnya hanyalah *tagging* indikator program yang terkait, dalam bentuk target saja (yang akan dicapai di 2019 sesuai amanat Perpres 59/2017), dan tidak/belum melihat persentase capaian

Pak Adiyaksa

- Indikator RAD TPB Kalteng hanya memiliki satuan dokumen, DLH tidak pernah diminta realisasi SDG

LANGKAH SELANJUTNYA :

DLH akan mengadakan rapat koordinasi dengan mengundang OPD terkait terutama OPD yang data capaian indikator TPB nya belum terkumpul



• **DAFTAR HADIR**

Timeslamp	Nama, Email	Nama Lengkap	Instansi	Jabatan	Nama HP/Watsapp
8/25/2020 13:08:46	amelia.marissa@gmail.com	Amelia Dwi Marissa	GGCI	Associate Environmental Economist	08212947578
8/25/2020 13:09:00	abernanda@incbu.org	Abesta Bernanda	Yayasan Incbu	Program Assistant	091267051733
8/25/2020 13:08:06	frederic801@gmail.com	Hen Susanto	P3E Kalimantan	Kasubid PE/PK Bidang Perencanaan Pengelolaan SDA/ULH	085651008877
8/25/2020 13:08:26	msardana@incbu.org	Muhammad Faridah	Yayasan Incbu	Program Assistant	08078817567
8/25/2020 13:12:49	tanzyah77@gmail.com	Tanzyah	Umas LIH Prov. Kalimantan Tengah	Kas Invenarisasi, RPHLI dan KLHS	09524914779
8/25/2020 13:13:05	tanzyah77@gmail.com	Hendia Saputra	DLH Provinsi Kalimantan Tengah	Pengelola Data	001381635139
8/25/2020 13:28:46	umama@incbu.org	Umri Putri Marni	Incbu	Program Manager	085274817683
8/25/2020 14:17:19	nadi.subarudi@yahoo.co.id	Nadi Subarudi	Incbu	Peminta	091394302080
8/25/2020 14:22:54	beswin.marissa@gmail.com	Beswin Marisa	GGCI	Environmental Policy Officer	085211557725
8/25/2020 14:28:20	hidayatihs84@gmail.com	Hidayati, S. El. M. S.	DPH Sukal	Functional Planning	085255229708



- DOKUMENTASI

The image shows a Zoom meeting interface. At the top, there are five video thumbnails: three are active, showing participants, and two are greyed out. Below the thumbnails is a presentation slide with a table of contents or index. The slide content is as follows:

No	Isi	Halaman
1	Daftar Isi	1
2	Pendahuluan	2
3	Visi dan Misi	3
4	Struktur Organisasi	4
5	Daftar Isi	5
6	Pendahuluan	6
7	Visi dan Misi	7
8	Struktur Organisasi	8
9	Daftar Isi	9
10	Pendahuluan	10
11	Visi dan Misi	11
12	Struktur Organisasi	12
13	Daftar Isi	13
14	Pendahuluan	14
15	Visi dan Misi	15
16	Struktur Organisasi	16
17	Daftar Isi	17
18	Pendahuluan	18
19	Visi dan Misi	19
20	Struktur Organisasi	20
21	Daftar Isi	21
22	Pendahuluan	22
23	Visi dan Misi	23
24	Struktur Organisasi	24
25	Daftar Isi	25
26	Pendahuluan	26
27	Visi dan Misi	27
28	Struktur Organisasi	28
29	Daftar Isi	29
30	Pendahuluan	30
31	Visi dan Misi	31
32	Struktur Organisasi	32
33	Daftar Isi	33
34	Pendahuluan	34
35	Visi dan Misi	35
36	Struktur Organisasi	36
37	Daftar Isi	37
38	Pendahuluan	38
39	Visi dan Misi	39
40	Struktur Organisasi	40
41	Daftar Isi	41
42	Pendahuluan	42
43	Visi dan Misi	43
44	Struktur Organisasi	44
45	Daftar Isi	45
46	Pendahuluan	46
47	Visi dan Misi	47
48	Struktur Organisasi	48
49	Daftar Isi	49
50	Pendahuluan	50
51	Visi dan Misi	51
52	Struktur Organisasi	52
53	Daftar Isi	53
54	Pendahuluan	54
55	Visi dan Misi	55
56	Struktur Organisasi	56
57	Daftar Isi	57
58	Pendahuluan	58
59	Visi dan Misi	59
60	Struktur Organisasi	60
61	Daftar Isi	61
62	Pendahuluan	62
63	Visi dan Misi	63
64	Struktur Organisasi	64
65	Daftar Isi	65
66	Pendahuluan	66
67	Visi dan Misi	67
68	Struktur Organisasi	68
69	Daftar Isi	69
70	Pendahuluan	70
71	Visi dan Misi	71
72	Struktur Organisasi	72
73	Daftar Isi	73
74	Pendahuluan	74
75	Visi dan Misi	75
76	Struktur Organisasi	76
77	Daftar Isi	77
78	Pendahuluan	78
79	Visi dan Misi	79
80	Struktur Organisasi	80
81	Daftar Isi	81
82	Pendahuluan	82
83	Visi dan Misi	83
84	Struktur Organisasi	84
85	Daftar Isi	85
86	Pendahuluan	86
87	Visi dan Misi	87
88	Struktur Organisasi	88
89	Daftar Isi	89
90	Pendahuluan	90
91	Visi dan Misi	91
92	Struktur Organisasi	92
93	Daftar Isi	93
94	Pendahuluan	94
95	Visi dan Misi	95
96	Struktur Organisasi	96
97	Daftar Isi	97
98	Pendahuluan	98
99	Visi dan Misi	99
100	Struktur Organisasi	100

Below the presentation slide is a Microsoft Excel spreadsheet. The spreadsheet has a table with the following data:

No	Isi	Jumlah/Nilai	Persentase (%)
1	...	12	40%
2	...	18	60%
3	...	15	50%
4	...	20	67%
5	...	10	33%

Below the table is a pie chart titled "Persentase (%)" showing the distribution of the data. The chart has four segments: a yellow segment (40%), a blue segment (60%), an orange segment (50%), and a red segment (67%).



RAPAT PERSIAPAN KONSULTASI PUBLIK I KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 – 2026

• UNDANGAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem A.S Nomor 6 Palangka Raya Telpn / Faksimile (0536) 3223756
Email : dlh@kalleng.go.id

Palangka Raya, 10 September 2020

Kepada

Nomor : 660/ ~~559~~ /TL/I.1/DLH/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Undangan Rapat Persiapan
Konsultasi Publik I KLHS RPJMD

Yth. Bapak/Ibu Tim Penyusun
KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan
Tengah (Daftar Terlampir)
di-
tempat

Sehubungan akan diadakannya Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (KLHS RPJMD) dan membahas pembaharuan Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) juga menindaklanjuti hasil analisis Tim Ahli untuk penyusunan Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2020 - 2025, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk bergabung dalam rapat persiapan Konsultasi Publik yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Jumat/11 September 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Media : Zoom Cloud Meeting
ID : 839 5491 6674 Password : 123456

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PIL. KEPALA DINAS,

ESAU, S. Si., M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197110241998031009

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah



Lampiran I
Nomor : 660/ ~~599~~ /TL/I.1/DLH/2020
Tanggal : 10 September 2020

Daftar Undangan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah,
2. Global Green Growth Institute (GGGI),
3. Yayasan Inobu,
4. Ir. Bismart Ferry Ibie, M.Si,
5. Yusuf Aguswan, S.Hut., M.Sc,
6. Dr. Fitria Husnatarina.



• NOTULENSI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem AS No. 8 Palangka Raya 73111 – Kalimantan Tengah
Telp / Fax : (0536) 3223756
Website : <http://dlh.kalteng.go.id> E-mail : dlh@kalteng.go.id

NOTULENSI

RAPAT TEKNIS PERSIAPAN KP I PENYUSUNAN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari / Tanggal : Jumat / 11 September 2020
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Secara *Online* di Aula DLH Provinsi Kalimantan Tengah

Update progres dari DLH

- Undangan untuk KP sudah dishare dan melibatkan pemerintah Kabupaten/ Kota
- Untuk keperluan berita acara DLH sudah menyiapkan draftnya, dan akan menyiapkan google form dengan barcode
- Kegiatan Konsultasi Publik I direncanakan tanggal 14 September 2020
- Beberapa analisis spasial telah dilakukan dan sedang menunggu data kehati terkait sebaran orang utan dari WWF
- Beberapa data menggunakan data dari BPS, Satu Data Kalteng.go.id
- Data terkait kualitas air danau menggunakan data dari perusahaan yang ada di sekitar danau sembuluh
- Surat ke-empat dari Sekda terkait permintaan data TPB
- Ada beberapa OPD sudah mengupdate data dan masih banyak OPD yang belum merespon permintaan data
- Indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target nasional sekitar 38%
- Indikator yang tidak ada data 31%

Catatan Diskusi

Pak Taswin

- Rencana teknis untuk konsultasi publik 1, 3 TA presentasi lalu jika ada pertanyaan teknis dari narasumber KLHK dan Kemendagri maka akan dibantu oleh Pak Hidayat
- KLHS Kalteng perlu dikawal agar menghasilkan dokumen berkualitas

Pak Sri Hidayat



- Yang harus dipresentasikan saat konsultasi publik 1 adalah laporan perjalanan pokja, kegiatan apa yang dilakukan, tahap apa saja yang sudah dilaksanakan.
- Sampaikan tujuan dan sasaran konsultasi publik 1 diwakili oleh Kadis LH
- Sampaikan hasil pekerjaan: identifikasi TPB untuk melihat kinerja pembangunan daerah.
- Capaian TPB diukur untuk melihat seberapa besar capaian indikator untuk masing-masing tujuan TPB
- Identifikasi OPD mana yang berkontribusi pada pencapaian TPB, berapa OPD yang bertanggung jawab terhadap setiap indikator TPB, dan berapa capaiannya
- Identifikasi juga seberapa besar kontribusi alokasi anggaran terhadap capaian TPB untuk melihat struktur anggaran dari pusat dan anggaran daerah sendiri
- Indikator yang sudah teridentifikasi sudah dipisah perkategori, tindak lanjutnya yang disarankan tentu berbeda
 - a. menjadi ukuran tingkat capaian provinsi, harus dipertahankan
 - b. rekomendasi untuk didorong pencapaiannya
 - c. upayakan untuk dilaksanakan dalam 5 tahun ke depan
 - d. sinergi dengan instansi dari pusat
- Yang menjadi fokus adalah indikator yang belum mencapai target, diskusikan
- Isu-isu pembangunan berkelanjutan perlu dieksplor, mana yang perlu mendapat pertimbangan dalam perencanaan pembangunan, misalnya potensi bencana, isu lingkungan hidup, isu sosial ekonomi, perlu dijustifikasi saat konsultasi publik
- Selain itu keanekaragaman hayati juga perlu dieksplor

Pak Ferry

- Usulan: ada introduksi singkat, paparkan bab 1-3 yang sudah disusun secara singkat, paparkan DDDTLH, anggaran dan analisis mitra tunjukan posisinya saat ini dimana, lalu lanjut paparan data TPB oleh DLH
- Pak Yusuf menjelaskan DDDTLH dan data apa saja yang ada dan belum ada

Pak Yusuf

- Sudah melakukan identifikasi data dari DLH dan sudah dirapikan
- Saat ini sedang merekap data-data spasial yang sudah didapat
- DDDT sudah ada, akan membuat penjelasan singkat terkait proses data berdasarkan petunjuk teknis yang ada

Bu Fitria

- Data yang ada tidak dapat komprehensif karena harus data timeseries, sehingga akan melihat pada data eksisting

Pak Taswin

- Terdapat format baku untuk konsultasi publik yang diatur dalam permendagri 7/2018
-



- Ikuti permendagri 7/2018 untuk teknis konsultasi publik, jika ada pertanyaan terkait DDDTLH maka datanya disampaikan

Pak Hidayat

- Substansi KLHS RJMD adalah indikator TPB yang teridentifikasi, peran para pihak (OPD, swasta, pemerintah pusat, NGO) yang teridentifikasi dan lainnya
- Samapaikan dulu data yang ada, akumulasi dari indikator yang tidak tercapai akan menjadi isu pembangunan berkelanjutan, misalnya jika indikator kemiskinan tidak tercapai akan menjadi persoalan, perlu justifikasi publik apakah hal tersebut sesuai fakta? setelah itu dilakukan kajian secara terfokus
- Untuk indikator kategori B, dibuat proyeksi sederhana apakah cukup dengan business as usual (BAU) atau perlu upaya tambahan
- Isu Pembangunan Berkelanjutan diperoleh dari capaian TPB, DDDTLH, resiko bencana, isu yang diperoleh dari konsultasi publik dan juga program nasional. Kemudian dianalisis sehingga mendapatkan isu strategis, kaitkan lagi dengan indikator TPB sehingga mendapat 3 kategori capaian dan menghasilkan rekomendasi KRP dengan merujuk pada Permendagri 90/2019 sehingga dapat terintegrasi dengan rencana strategis
- Untuk isu-isu yang tidak dapat direkomendasikan TPB perlu diberi rekomendasi khusus, misalnya dengan pengembangan wilayah, kebijakan nasional, dokumen lain, dan alternative mitigasi
- Konsultasi publik 2 membahas mengenai proyeksi dan alternative

Pak Taswin

- Terdapat gap antara standar dan persiapan untuk konsultasi publik 1
- Filter matriks capaian sesuai dengan kebutuhan, ada data per OPD yang berdasarkan capaian, berikan Analisa
Kategori A: tidak ada masalah
Kategori B: potensi masalah (kinerja atau anggaran)
Kategori C: ditanya ke OPD masing-masing
Kategori D: konfirmasi mengapa datanya tidak ada
- Konsultasi publik 1 bertujuan untuk menemukenali kondisi daerah berdasar TPB dengan input dari peserta dan konfirmasi hasil analisa yang dilakukan dengan kondisi yang ada di lapang (dikonfirmasi kepada OPD dan pemerintah daerah)
- Peta-peta yang disyaratkan perlu ditampilkan dan dikonfirmasi dengan data yang ada

Pak Hidayat

- Tampilkan data tingkat capaian TPB yang ada
- Eksplor tiap pilar dan tiap OPD sehingga OPD dapat melihat
- Tampilkan hasil survey dan bandingkan dengan capaian TPB
- Olah dan tampilkan data yang ada dan bisa jadi pertimbangan para pihak



- Siapkan berita acara dan dibacakan di akhir acara
- Tanda tangan berita acara cukup ketua dan anggota pokja saja namun karena membutuhkan legitimasi para pihak sehingga akan baik sekali jika perwakilan kab/kota menandatangani, hal tersebut menjadi justifikasi pelibatan public
- Format berita acara: apa yang disepakati dan dilampirkan notulensi hasil rapat untuk menjadi pertimbangan pokja
- Analisis keuangan daerah yang perlu dilakukan adalah rasio kemandirian keuangan dan fiskal yang dimiliki daerah, akan sangat baik jika ada tren data yang bisa dilihat
- Periodisasi KLHS mengikuti RPJMD 2021-2026 meskipun kepala daerah hanya menjabat 4 tahun
- Pada paparan awal akan ada info singkat mengenai KLHS dan menyampaikan tahapan yang sudah dilakukan dan hasilnya akan ditampilkan
- Info yang sudah dihasilkan akan menjadi baseline perencanaan pembangunan, apa yang akan dilakukan 5 tahun ke depan

Pak Adiyaksa

- Tim sekretariat sudah menyiapkan form masukan di google form untuk memudahkan rekap data
- Paparan TPB akan disampaikan oleh Pak Ferry, dan DDDTLH akan disampaikan oleh Pak Yusuf
- Setelah diidentifikasi terdapat 203 indikator TPB yang relevan di Kalimantan Tengah dengan indikator kategori A sebesar 42.36%
- Hasil survey isu-isu pembangunan berkelanjutan akan dishare saat konsultasi publik 1

Pak Subar

- Setuju dengan saran Pak Hidayat, berita acara bisa diwakili

Mayapihya

- Setuju untuk paparan DLH ditambahkan 4-5 slide penjelasan singkat mengenai KLHS untuk memberi pemahaman pada peserta
- Data di instansi PUPR indikatornya ada tapi tidak melakukan pengumpulan data, dan datanya ada di Kabupaten, bagaimana?

Pak Hidayat

- Perlu dipahami bahwa TPB adalah indikator nasional untuk pembangunan berkelanjutan, OPD harus mengetahui pentingnya data TPB yang menjadi tanggung jawabnya karena saat ini terdapat 3 indikator yaitu IKK, SPM dan TPB yang merupakan satu kesatuan di dalam dokumen perencanaan daerah
- Seluruh indikator TPB terkait dengan permendagri 9/2019 sehingga Identifikasi TPB sangat penting bagi OPD agar program dan kegiatannya dapat terpetakan

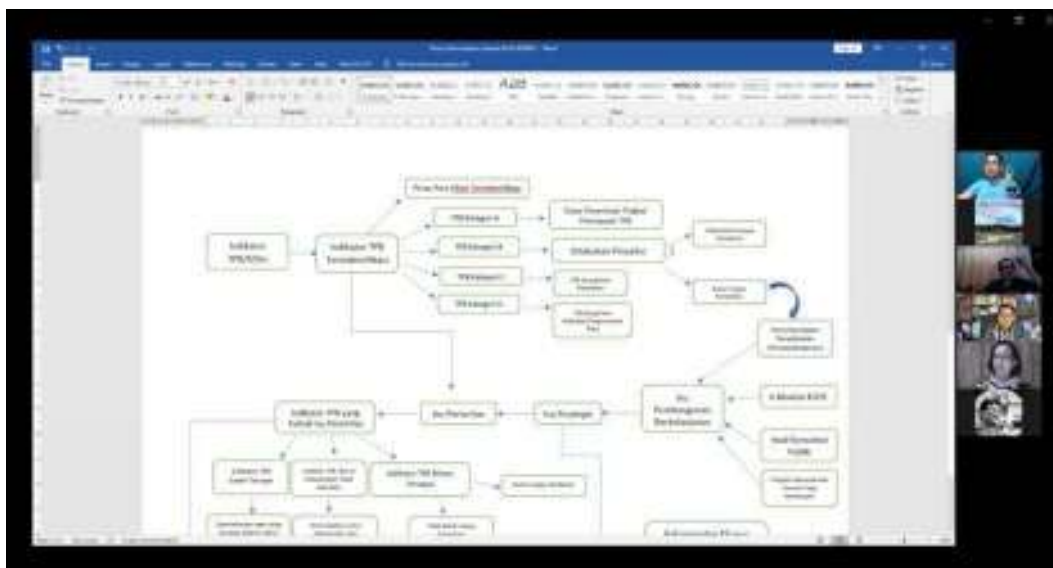
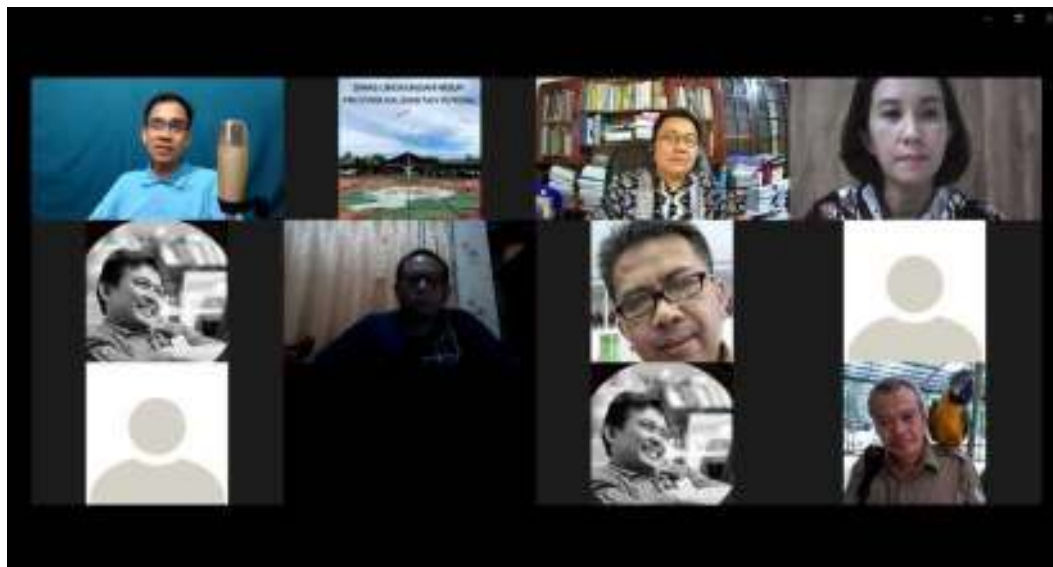
LANGKAH SELANJUTNYA :

- Pak Adiyaksa akan perbaiki grafik dan share ke Pak Ferry
 - Konsultasi publik 1 pada 17 September 2020
 - Paparan akan disampaikan oleh TA
-



● **DOKUMENTASI**

No	Uraian Kegiatan	Penanggung Jawab	Penyelia	Penyakit
1	Studi Kelayakan Awal (SKA) dan Studi Kelayakan Lingkungan (SKL) untuk Pembangunan Jalan Tol	[Nama]	[Nama]	[Nama]
2	Penelitian dan Pengumpulan Data Awal	[Nama]	[Nama]	[Nama]
3	Penelitian dan Pengumpulan Data Lanjutan	[Nama]	[Nama]	[Nama]
4	Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan	[Nama]	[Nama]	[Nama]
5	Penyusunan Dokumen SKA dan SKL	[Nama]	[Nama]	[Nama]
6	Penyusunan Dokumen RAB	[Nama]	[Nama]	[Nama]
7	Penyusunan Dokumen RUP	[Nama]	[Nama]	[Nama]
8	Penyusunan Dokumen RTR	[Nama]	[Nama]	[Nama]
9	Penyusunan Dokumen RRS	[Nama]	[Nama]	[Nama]
10	Penyusunan Dokumen RRD	[Nama]	[Nama]	[Nama]
11	Penyusunan Dokumen RRM	[Nama]	[Nama]	[Nama]
12	Penyusunan Dokumen RRS	[Nama]	[Nama]	[Nama]
13	Penyusunan Dokumen RRD	[Nama]	[Nama]	[Nama]
14	Penyusunan Dokumen RRM	[Nama]	[Nama]	[Nama]
15	Penyusunan Dokumen RRS	[Nama]	[Nama]	[Nama]
16	Penyusunan Dokumen RRD	[Nama]	[Nama]	[Nama]
17	Penyusunan Dokumen RRM	[Nama]	[Nama]	[Nama]
18	Penyusunan Dokumen RRS	[Nama]	[Nama]	[Nama]
19	Penyusunan Dokumen RRD	[Nama]	[Nama]	[Nama]
20	Penyusunan Dokumen RRM	[Nama]	[Nama]	[Nama]





RAPAT KONSULTASI PUBLIK I KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 – 2026

• UNDANGAN

 **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan RTA. Milono Nomor : 1 Palangka Raya 73111
Telepon / Fax, (0536) 3221716 - 3223756 email : tusekdaprovkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 14 September 2020
Kepada :

Nomor : 660/ SYI /TLA.1/DLH/2020 Yth: Bapak/Ibu (Daftar Terlampir)
Sifat : Penting di-
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Tempat.
Perihal : Undangan Konsultasi Publik I
Rancangan Dokumen Kajian
Lingkungan Strategis Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021-
2026

Mandat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 adalah mewajibkan Pemerintah Daerah melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan, rencana dan/atau program (KRP). Dalam rangkaian kegiatan penyusunan dokumen ini perlu dilakukan kegiatan Konsultasi Publik dengan tujuan untuk mendapatkan masukan penting dalam rangka penyempurnaan dokumen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu (sdr/i) untuk bergabung dalam Konsultasi Publik I yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis/17 September 2020
Pukul : 13.00 WIB s/d selesai.
Media : Zoom Cloud Meeting
(ID Meeting : 899 5560 4025 Password : 123456)
(diharapkan saat Log in menyertakan Nama dan Instansi, Contoh : DLH Prov_Hendra)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


SEKRETARIS DAERAH,
FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.
Pembina Utama Madya
NIP. 196912121996031003

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah



Lampiran I : Undangan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD)
Tahun 2021 - 2026
Nomor : 680/ 571 /TLA.1/DLH/2020
Tanggal : 14 September 2020

Daftar Undangan Konsultasi Publik KLHS RPJMD:

1. Direktur Jenderal Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,
3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah,
5. Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah,
6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah,
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah,
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah,
9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah,
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah,
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah,
12. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah,
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah,
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah,
16. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah,
17. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,
18. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah,
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah,
20. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
21. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah,
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah,
23. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah,
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah,
25. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
26. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,
27. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah,
28. Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
29. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
30. Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
31. Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
32. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan se - Kalimantan Tengah,
33. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Palangka Raya,
34. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Muhammadiyah Palangka Raya,
35. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Kristen Palangka Raya,
36. Yayasan Inobu,
37. Global Green Growth Institute (GGGI),
38. World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia,
39. Fairventure World Wide,
40. AMAN Kalimantan Tengah,



41. GAPKI,
42. WALHI,
43. APHI
44. Ir. Bismart Ferry Ibie, M.Si
45. Yusuf Aguswan, S.Hut., M.Sc
46. Dr. Fitria Husnatarina, SE., M.Si., Ak., CA

Harap Mengisi Kuisisioner "SURVEI ISU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"
Dapat di akses pada link : https://bit.ly/survey_TPB_Kalteng





-
- **BERITA ACARA**

BERITA ACARA
UJI PUBLIK I PENYUSUNAN KLHS RPJMD
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 - 2025

Pada hari ini Kamis, 17 September 2020, telah dilaksanakan Uji Publik - I Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 -2026 dalam rangka menyepakati isu utama, tantangan, dan kondisi pencapaian TPB dalam penyusunan KLHS RPJMD dengan hasil sebagai berikut:

I. Tim Pembahas

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Esau, S.Si., M. Kes	Pit Kepala Dinas	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Luqman Alhakim, SP., M.Si	Kepala Bidang Perencanaan	Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
3.	Dr. Suyuti Samsul, MPPM	Kepala Dinas	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Ir. Bismart Ferry Ible, M.Si	Dosen	Universitas Palangka Raya

II. Hasil Kesepakatan

Diskusi dalam rangka menyepakati isu utama, tantangan, dan kondisi pencapaian TPB memperoleh hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Bencana (Karhutla, Banjir, Kekeringan, Erosi, Abrasi)
2. Kemiskinan dan Pengangguran yang diperparah Pandemi COVID - 19
3. Keterbatasan Akses Air Bersih
4. Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan Masih Terbatas
5. Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
6. Alih Fungsi Lahan

III. Rencana Tindak Lanjut Hasil Pembahasan

Hasil kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan:

1. Penyusunan KLHS dengan mempertimbangkan masukan para pihak.
2. Kuisioner isu TPB akan diolah setelah terkumpul.
3. Ditindaklanjuti dengan Uji Publik - II pada bulan Desember 2020.

Demikian berita acara pelaksanaan Uji Publik - I Penyusunan KLHS RPJMD ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan dari:

MENYETUJUI	
 Esau, S.Si M.Kes	 Luqman Alhakim, SP., M.Si
MENGETAHUI	
 Dr. Suyuti Samsul, MPPM	 Ir. Bismart Ferry Ible, M.Si



• NOTULENSI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem AS No. 8 Palangka Raya 73111 – Kalimantan Tengah
Telp / Fax : (0536) 3223756
Website : <http://dlh.kalteng.go.id> E-mail : dlh@kalteng.go.id

NOTULENSI

KONSULTASI PUBLIK I PENYUSUNAN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari / Tanggal : Kamis / 17 September 2020
Pukul : 09.00 WIB s/d selesai
Tempat : Secara *Online* di Aula DLH Provinsi Kalimantan Tengah

Sambutan Sekda (Fahrizal Fitri, S.hut, MP)

- KLHS adalah dokumen wajib daerah yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah,
- Diharapkan penyusunannya dapat selesai sebelum pilkada sehingga dapat menjadi acuan kepala daerah dalam menyusun visi misinya

Paparan TA (Bismart Ferry Ibie)

- Tujuan Konsultasi publik 1 adalah untuk mendapatkan masukan dari para pihak terkait data capaian TPB
- Hasil analisis yang dilakukan sekretariat, terdapat 42,16% indikator dengan kategori A
- Indikator Kesehatan adalah indikator paling banyak dilaksanakan dan mencapai target
- OPD di Kalimantan Tengah perlu memahami TPB agar pembangunan di Kalimantan Tengah menjadi lebih baik

Paparan TA (Yusuf Aguswan)

- Data-data spasial sudah didapatkan dari KLHK, P3E Kalimantan, PUPR
- Ketersediaan pangan di Kalimantan Tengah secara umum sedang
- Ketersediaan air tinggi di Murung Raya dan Bagian atas Katingan
- Ketersediaan udara bersih cukup tinggi di Bagian Utara Kalimantan Tengah
- Saat ini baru data 12 ekosistem yang ada

Paparan Ditjen Bangda (Dedi Junaldi)

- KLHS RPJMD harus mengikuti Permendagri 7/2018



- Pelaksanaan KLHS diharapkan selesai sebelum pelantikan sehingga dapat terintegrasi ke dalam rancangan awal RPJMD
- Pembangunan berkelanjutan adalah sinergi antara sektor sosial, ekonomi, dan lingkungan
- Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mendukung pembangunan nasional
- KLHS diamanatkan disusun untuk RPJMD
- Bangda mengapresiasi pelibatan OPD secara umum 76% sudah melaksanakan TPB meskipun baru 42% yang tercapai
- DDDT LH perlu diperhatikan, data mengenai penyedia air dan pangan harus disediakan
- Isu RPJMD berjalan dan pandemic covid-19 dapat dipertimbangkan untuk menjadi isu pembangunan berkelanjutan

Paparan Dit PDLKWS (Dr Fatma Djuwita)

- Apresiasi kepada tim yang sudah mengumpulkan data dan mempresentasikan
- Berdasarkan permendagri 7/2018, untuk KLHS RPJMD analisis TPB dilakukan terlebih dahulu
- KLHS harus selesai sebelum calon kampanye agar hasil KLHS lebih bermakna dan dimanfaatkan oleh kandidat
- timeline penyusunan harus tertuang di dalam KAK
- Langkah selanjutnya harus segera diselesaikan
- KLHS wajib bagi RPJMD, menjadi acuan untuk pembangunan 5 tahun yang akan datang
- Terkait mekanisme pelaporan, bab 3 mengenai kondisi umum daerah mengikuti permendagri 7/2018 pasal 6 berisi DDDT LH, geografi, demografi, keuangan, kontribusi pemerintah, kontribusi pemerintah daerah, ormas, filantropi, dunia usaha, akademisi
- Analisis 6 muatan KLHS digunakan untuk melengkapi karakteristik wilayah. Kondisi TPB Kalimantan Tengah pada tahun 2020 harus ditampilkan dan dibandingkan dengan kondisi awal
- Excel yang ada jangan dihilangkan
- Kondisi keuangan daerah harus disampaikan, mengacu pada PP12/2019. Keuangan daerah harus dianalisis dan dilihat dengan target yang ada, apakah keuangannya tercukupi
- Daftar TPB yang tercapai harus ditampilkan berikut nomor indikatornya, lalu cek ke publik apakah sudah tepat atau belum
- Jika TPB tidak tercapai, maka bagaimana solusinya? bagaimana peran masyarakat? perlu persamaan persepsi masyarakat
- Pokja perlu mendiskusikan indikator yang sudah tercapai, kegiatannya seperti apa? target provinsi seperti apa? anggarannya cukup atau tidak? kemudian buat matriksnya yang bentuknya tidak berbeda jauh dengan matriks renstra



Paparan DPLH Sulawesi Selatan (Sri Hidayat, S.Si, M.Si)

- Yang perlu diperhatikan dan menjadi sangat penting: tidak hanya fokus menyelesaikan KLHS namun apa yang kita harapkan setelah KLHS selesai, bagaimana memanfaatkannya?
- Indikator TPB yang sudah teridentifikasi dapat memetakan para pihak
- Calon kepala daerah bisa mengetahui TPB apa yang harus diprioritaskan
- Tahap selanjutnya adalah melakukan proyeksi, bagaimana jika dilaksanakan dengan BAU (business as usual) serta dengan upaya tambahan (perlu effort lebih untuk mendorong capaian)
- Isu prioritas harus diintegrasikan ke permendagri 90/2019
- Yang perlu dipahami KLHS tidak hanya dimanfaatkan oleh DLH tetapi oleh semua OPD sehingga 5 tahun ke depan Kalimantan Tengah memiliki arahan pembangunan yang jelas dan berkelanjutan

DISKUSI :

Sekda

- Program Strategis Nasional di Kalimantan Tengah: Food estate yang merupakan program cadangan pangan nasional dan mungkin global, lokasinya direncanakan di Kapuas dan Pulang Pisau seluas 30.000 ha di area existing (20.000 ha di Kapuas dan 10.000 ha di Pulang Pisau) dengan cara intensifikasi dan meningkatkan pola tanam
- Kementerian pertahanan juga membangun 33.000 ha untuk hortikultura, secara skala besar membutuhkan 1.4 juta ha di Kalimantan Tengah dengan lokasi yang disiapkan di Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, dan Gunung Mas
- Selain itu Kalteng juga mengusulkan program industry hilir (B100) karena memiliki potensi sebagai penghasil CPO sebanyak 5 juta ton/ tahun
- Isu-isu tersebut perlu di analisis agar dampaknya dapat teridentifikasi di awal

PPLH UPR (Lusia)

- Perlu pertajam permasalahan dan rencana kegiatan apakah KRP yang ada akan memperburuk atau memperbaiki?

Dinas ESDM (Saripudin)

- Terdapat 305 izin batu bara dengan luasan 1.096.000 ha, data akan disampaikan ke DLH

Dinas Kehutanan (Ansar)

- Ada 3 data yang belum, Dishut sedang mengumpulkan agregat dari 2 UPT BPDAS Kahayan dan BPDAS Barito, setelah selesai nanti akan disampaikan ke DLH.

DinasP3PPKB



- Dari 5 indikator hanya 3 yang diisi karena tidak sama dengan indikator kinerja Dinas dan indikatornya tidak ada

Dinas Kesehatan (dr Suyuti)

- Data masih ada yang perlu ditingkatkan
- Terkait jamban sehat, berpengaruh dengan Kab/ Kota karena ditargetkan 5 Kab/Kota, di tahun 2019 hanya Kotawaringin Barat yang masuk dan mendapat penghargaan

DPMPTSP

- Data yang diminta memang tidak ada di DPMPTSP

Kesbangpol

- Data baru didapatkan dari polda dan akan dikirim ke DLH
- Beberapa data memang tidak ada di Kesbangpol

BPS (Yomin)

- Perlu kehati-hatian dalam data yang dipengaruhi arus perpindahan penduduk misalnya data tenaga kerja dan data kemiskinan
- data jumlah kebijakan diskriminatif dapat di cek di indeks demokrasi yang sudah dikeluarkan BPS

Pak Taswin

- Sudah terdapat banyak perbaikan dalam pengumpulan data
- TA lokal diharapkan mendapat exercise lanjutan karena harus mempersiapkan TA sesuai amanat peraturan
- Yang menjadi PR saat ini adalah menentukan isu prioritas berdasarkan capaian TPB, SPM dan target RPJMD. Kinerja OPD berdasarkan realisasi versus capaian indikator yang ada
- Tidak ada shortlist dan longlist isu di dalam KLHS RPJMD, isu dikerucutkan dari TPB
- Untuk 6 muatan perlu kehati-hatian berkaitan dengan Program Strategis Nasional
- Data dari dokumen yang ada RPPLH, RPPEG, PK RTRW harus dikaji untuk menganalisis TPB berdasarkan profil LH daerah
- Dengan format Permendagri 7/2018 tim KLHS dan teknokratik harus saling mengisi gap

Pak Sri Hidayat

- Mengingatkan bahwa kajian KLHS akan mudah jika persoalan yang ada terintegrasi
- Nanti akan ditemukan isu-isu penting yang harus diprioritaskan 5 tahun ke depan
- Isu-isu diharapkan dapat tergabung ke dalam beberapa tema isu
- Jika dieksplor lebih jauh, data TPB bisa menunjukkan masalah yang ada di daerah
- Seringkali terdapat gap antara persepsi publik dan capaian yang ada

LANGKAH SELANJUTNYA :

- Tim sekretariat akan melanjutkan proses penyusunan KLHS dengan mempertimbangkan masukan para pihak
 - Kuisisioner isu TPB akan diolah setelah terkumpul
-



• DOKUMENTASI





RAPAT PERSIAPAN KONSULTASI PUBLIK II KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 – 2026

- **UNDANGAN**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem A.S Nomor 8 Palangka Raya Telpn / Faksimile (0536) 3223756
Email : dlh@kalteng.go.id

Palangka Raya, 7 Desember 2020

Nomor : 660/ 319 /TLI.1/DLH/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Undangan Rapat Persiapan
Konsultasi Publik II KLHS RPJMD

Kepada
Yth. Bapak/Ibu Tim Penyusun
KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan
Tengah (Daftar Terlampir)
di-
tempat

Sehubungan akan diadakannya Konsultasi Publik II Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) dan membahas draft Dokumen KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 - 2026, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk bergabung dalam rapat persiapan Konsultasi Publik II yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Selasa/8 Desember 2020
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Media : Zoom Cloud Meeting
ID : 881 3798 2736 Password : 123456

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PH. KEPALA DINAS,



ESAH, S. Si., M.Kes

Pembina Tingkat I

NIP. 197110241998031009

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah



Lampiran I
Nomor : 660/ 75 /TLA.1/DLH/2020
Tanggal : 7 Desember 2020

Daftar Undangan :

- 0/10
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah,
2. Global Green Growth Institute (GGGI),
3. Yayasan Inobu,
4. Ir. Biarmart Ferry Ibie, M.Si,
5. Yusuf Aguswan, S.Hut., M.Sc,
6. Dr. Fitria Husnatarina, SE., M.Si., Ak., CA





• NOTULENSI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem AS No. 8 Palangka Raya 73111 – Kalimantan Tengah
Telp / Fax : (0536) 3223756
Website : <http://dlh.kalteng.go.id> E-mail : dlh@kalteng.go.id

NOTULENSI

RAPAT PERSIAPAN KP II PENYUSUNAN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari / Tanggal : Selasa / 8 Desember 2020
Pukul : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Secara Daring (Virtual Zoom Meeting)
di Aula DLH Provinsi Kalimantan Tengah

Update dari tim sekretariat dan TA

1. Perlu dipikirkan strategi untuk penyelesaian laporan dan kerangka laporan perlu disepakati
2. Pak Ferry sedang menuliskan beberapa update, sudah melakukan analisis scorecard dan mencoba klasifikasi program berdasar permendagri 90/2019
3. Pak Yusuf sudah mengumpulkan data KSN dan KSP, namun data tidak sesuai antara perda dan data spasialnya
4. Bu Futria akan mencoba membuat linkage untuk data-data keuangan

Bappedalitbang

1. Dokumen rancangan teknokratik sedang berproses, namun perlu banyak perbaikan
2. Food estate harus dimasukkan di dalam PK RTRW dan dijadikan prioritas

Pak Taswin Munier

1. Perlu banyak tenaga untuk penyelesaian KLHS
2. Bappeda memerlukan KLHS secepatnya, minimal hingga bab 4, Kajian 6 muatan dan isu strategis (TPB, DDDTLH, dan anggaran) sudah ada
3. Cara berfikir jangan terlalu normative dan teoritis
4. Apabila ingin lebih mudah, maka arahan KLHK adalah dengan overlay peta yang detail, jika tidak ada maka gunakan peta yang ada
5. Kajian mengacu pada capaian indikator, seperti apa capaiannya



6. Tim KLHS perlu draft rancangan teknokratis, walaupun belum memuat DDDTLH dan proyeksi
7. Jangan terjebak pada penyelesaian laporan, tapi fokus pada kajian, baru menuangkannya ke dalam tulisan
8. Untuk data TPB kategori D perlu hati-hati karena bisa jadi datanya ada di OPD lain
9. Fokus di data TPB kategori B dan C di OPD
10. Isu perlu dikroscek melalui online survey dan Konsultasi publik
11. Harus memiliki hasil overlay DDDTLH, pangan dan air
12. Untuk konsultasi publik 2, harus sudah ada kajian dan capaian OPD
13. Potensi konflik sosbud dari food estate perlu diantisipasi

Pak Subarudi INOBU

1. Perlu coretan atau komentar langsung Pak Taswin di dalam dokumen
2. analisis anggaran cukup yang terkait TPB saja

Tanggapan Tenaga Ahli

1. Semua masukan akan diakomodir dan draft akan dikoreksi
2. TA memiliki waktu yang terbatas untuk menulis laporan dan menyelesaikannya
3. Untuk food estate tidak perlu detail
4. KSP dan KSN akan dibuat peta DDDTLH nya

Saran Pak Taswin

1. Data-data terkait food estate bisa diminta DLH ke KLHK
2. DLH harus fasilitasi kebutuhan TA

LANGKAH SELANJUTNYA :

1. Konsultasi publik 2 akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2020
 2. Tim sekretariat akan mengumpulkan data, memperbaiki draft di bagian pendahuluan dan bab 2 sesuai masukan dari Pak taswin
-



• DAFTAR HADIR

Rapat Persiapan KP II KLHS RPJMD Report


Form: Rapat Persiapan KP II KLHS RPJMD

Nama Lengkap	Taswin Munier
Instansi/Akademisi/Lembaga	GGGI
Jabatan	Environmental Policy Advisor
Email	taswin.muhammad@gggi.org
No. Handphone	085211557725
Tanda Tangan	
Added Time	08-12-2020 14:38:55
Referrer Name	
Task Owner	tatalingkunganprov.klhs@gmail.com

Nama Lengkap	Yusuf Aguswan, S.Hut., M.Sc.
Instansi/Akademisi/Lembaga	Universitas Palangka Raya
Jabatan	Staf Pengajar Jurusan Kehutanan - UPR
Email	yusuf.aguswan@gmail.com
No. Handphone	081251546010
Tanda Tangan	
Added Time	08-12-2020 14:35:59
Referrer Name	
Task Owner	tatalingkunganprov.klhs@gmail.com



Nama Lengkap	Hendrik Segah, S.Hut., M.Si., Ph.D
Instansi/Akademisi/Lembaga	GGGI
Jabatan	GGGI Provincial Representative
Email	hendrik.segah@gggi.org
No. Handphone	081251412612
Tanda Tangan	
Added Time	08-12-2020 14:24:57
Referrer Name	
Task Owner	tatalingkunganprov.klhs@gmail.com

Nama Lengkap	BISMART FERRY IBIE
Instansi/Akademisi/Lembaga	UPR
Jabatan	STAF PENGAJAR JURUSAN KEHUTANAN-FAPERTA-UPR
Email	bismartferryibie@yahoo.com
No. Handphone	0811529104
Tanda Tangan	
Added Time	08-12-2020 14:18:50
Referrer Name	
Task Owner	tatalingkunganprov.klhs@gmail.com



Nama Lengkap	Subarudi
Instansi/Akademisi/Lembaga	Inobu
Jabatan	Peneliti
Email	rudi.subarudi@yahoo.co.id
No. Handphone	081384332868
Tanda Tangan	
Added Time	08-12-2020 14:15:21
Referrer Name	
Task Owner	tatalingkunganprov.klhs@gmail.com

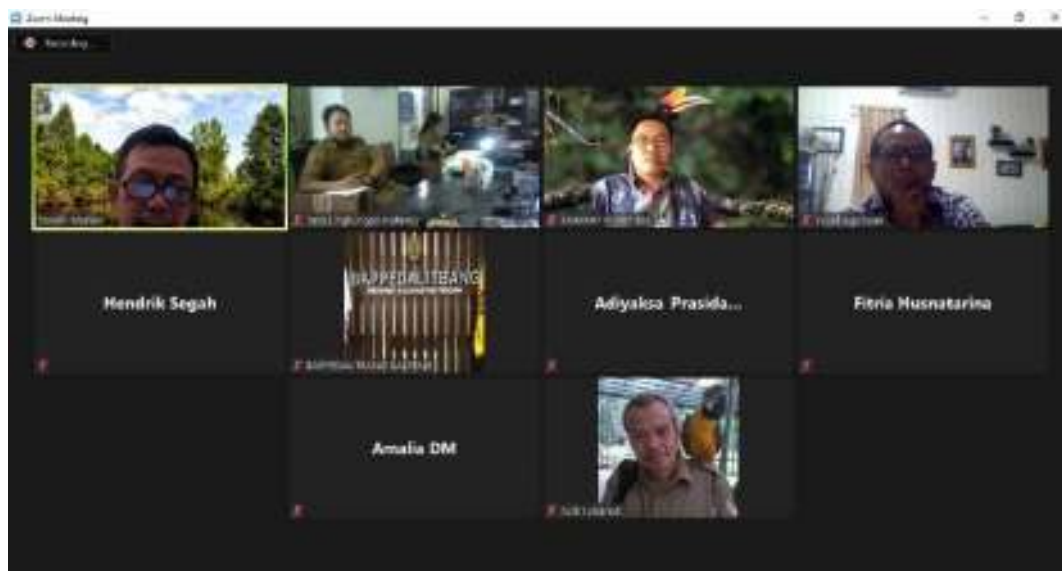
Nama Lengkap	Dr. Fitria Husnatarina, SE., M.Si., Ak., CA
Instansi/Akademisi/Lembaga	Universitas Palangka Raya
Jabatan	TA
Email	fitria.husnatarina@feb.upr.ac.id
No. Handphone	081251359779
Tanda Tangan	
Added Time	08-12-2020 14:14:45
Referrer Name	
Task Owner	tatalingkunganprov.klhs@gmail.com



Nama Lengkap	Amalia Dwi Marseva
Instansi/Akademisi/Lembaga	GGGI
Jabatan	Associate Environmental Economist
Email	amalia.marseva@gggi.org
No. Handphone	082112347576
Tanda Tangan	
Added Time	08-12-2020 14:14:43
Referrer Name	
Task Owner	tatalingkunganprov.klhs@gmail.com



- **DOKUMENTASI**





RAPAT KONSULTASI PUBLIK II KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 – 2026

• UNDANGAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor : 1 Palangka Raya 73111
Telepon / Fax. (0536) 3221716 - 3223756 email : sekda@kalteng.go.id

Palangka Raya, 14 Desember 2020

Kepada :

Nomor : 660/ 721 /TLJ.1/DLH/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Undangan Konsultasi Publik II

Yth (Daftar Terlampir)

di-
Tempat.

Sehubungan telah selesainya penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini diminta kehadiran Saudara pada kegiatan konsultasi publik yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis 17 Desember 2020
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai.
Media : Zoom Cloud Meeting
(ID Meeting : 846 9449 7604 Password : KLHSRPJMD)
(diharapkan saat Log in menyertakan Nama dan Instansi, Contoh : DLH Prov_Hendra)
Link Dokumen : https://bit.ly/KLHSRPJMD_KALTENG

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.
Pembina Utama Madya
NIP. 198912121996031003

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah



Lampiran I : Undangan Konsultasi Publik II
Nomor : 660/701/TLA.1/DLH/2020
Tanggal : 14 Desember 2020

Daftar Undangan Konsultasi Publik KLHS RPJMD:

1. Direktur Jenderal Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,
3. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah,
5. Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah,
6. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah,
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah,
8. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah,
9. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah,
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah,
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah,
12. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah,
13. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,
14. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah,
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah,
16. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah,
17. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,
18. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah,
19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah,
20. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
21. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah,
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah,
23. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah,
24. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah,
25. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
26. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,
27. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah,
28. Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
29. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
30. Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
31. Biro Organisasi, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
32. Kepala Bidang Tata Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah,
33. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah,
34. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah,
35. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah,
36. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan se-Kalimantan Tengah,
37. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Palangka Raya,
38. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Muhammadiyah Palangka Raya,
39. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Universitas Kristen Palangka Raya,
40. Yayasan Inobu,



41. Global Green Growth Institute (GGGI),
 42. World Wildlife Fund for Nature (WWF) Indonesia,
 43. Fairventure World Wide,
 44. AMAN Kalimantan Tengah,
 45. CIMTROP,
 46. Borneo Nature Foundation (BNF),
 47. GAPKI,
 48. WALHI,
 49. APhi
 50. Ir. Bismart Ferry Ible, M.Si
 51. Yusuf Aguswan, S.Hut., M.Sc
 52. Dr. Filtria Husnatarina, SE., M.Si., Ak., CA
-



• BERITA ACARA

BERITA ACARA UJI PUBLIK II PENYUSUNAN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021 - 2026

Pada hari ini Kamis, 17 Desember 2020, telah dilaksanakan Uji Publik - II Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 -2026 dalam rangka menyepakati rekomendasi pencapaian TPB dalam penyusunan KLHS RPJMD dengan hasil sebagai berikut:

I. Tim Pembahas

No.	Nama	Jabatan	Instansi
1.	Adiyaksa Prasidapati, ST	Kepala Bidang	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Ir. Wuryanto	Kepala Bidang	Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
3.	dr. Fery Iriawan, MPH	Kepala Bidang	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
4.	Ir. Bismart Ferry Ibie, M.Si	Staf Pengajar	Universitas Palangka Raya

II. Hasil Kesepakatan

Diskusi dalam rangka menyepakati rekomendasi pencapaian TPB dalam penyusunan KLHS RPJMD memperoleh hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Menyepakati Isu Strategis, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan untuk Indikator TPB yang perlu upaya tambahan;
2. Menyepakati program dan kegiatan pada masing-masing indikator;

III. Rencana Tindak Lanjut Hasil Pembahasan

Hasil kesepakatan akan ditindaklanjuti dengan:

1. Pembuatan Laporan KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Perbaikan Dokumen KLHS RPJMD sesuai masukan Narasumber.
3. Tim KLHS akan mengadakan pertemuan dengan Tim RPJMD untuk sinkronisasi antara KLHS dan RPJMD

Demikian berita acara pelaksanaan Uji Publik - I Penyusunan KLHS RPJMD ini dibuat dan ditandatangani oleh perwakilan dari:

MENYETUJUI	
 Adiyaksa Prasidapati, ST	 Ir. Wuryanto
MENGETAHUI	
 dr. Fery Iriawan, MPH	 Ir. Bismart Ferry Ibie, M.Si



• NOTULENSI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem AS No. 8 Palangka Raya 73111 – Kalimantan Tengah
Telp / Fax : (0536) 3223756
Website : <http://dlh.kalteng.go.id> E-mail : dlh@kalteng.go.id

NOTULENSI

KONSULTASI PUBLIK II PENYUSUNAN KLHS RPJMD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari / Tanggal : Kamis / 17 Desember 2020
Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
Tempat : Secara Daring (Virtual Zoom Meeting)
di Aula DLH Provinsi Kalimantan Tengah

Sambutan Sekda diwakili oleh Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik (Dr. Endang Kusriatun, MM)

- KLHS adalah dokumen wajib daerah yang harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah,
- Diharapkan penyusunannya dapat selesai sebelum pilkada sehingga dapat menjadi acuan kepala daerah dalam menyusun visi misinya

Paparan TA (Bismart Ferry Ibie)

- Kegiatan penyusunan dokumen KLHS RPJMD sudah melakukan analisis scorecard
- Proses penyusunan dokumen masih berjalan

Paparan TA (Yusuf Aguswan)

- Tim melakukan kajian Provinsi Kalimantan Tengah secara spasial, termasuk kerentanan terhadap perubahan iklim
- Peta Jasa Ekosistem di peroleh dari P3E Kalimantan
- Food Estate juga dianalisis

Paparan TA (Fitria Husantari)

- Anggaran Pendapatan Kalimantan Tengah Mayoritas Dari Dana Perimbangan, Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat



Masukan Dit PDLKWS (Dr Fatma Djuwita)

- Dokumen agar lebih sinkron dengan KLHS
- Ikuti permendagri 7/2018
- Kata pengantar perlu diperbaiki sesuai aturan
- Dasar hukum dibuat hirarki dan tahun, cek peraturan yang sudah tidak berlaku dan tambahkan aturan lain yang baru
- Perhatikan typo, usahakan tidak ada typo karena KLHS adalah dokumen publik yang dibaca banyak orang
- Semua TPB harus masuk ke dalam KLHS, tidak ada indikator yang terlewatkan
- Apakah batasan provinsi di darat dan laut sudah tepat, penting untuk dimuat
- Perlu ada analisis dari angka kemiskinan dan pengangguran, kaitkan dengan tata ruang
- Terdapat selisih 115 dari 319 indikator provinsi, perlu penjelasan posisinya seperti apa
- Tabel 4.4 adalah posisi akhir, proyeksi sangat penting, buat proyeksi sesuai ketersediaan anggaran
- Intervensi belum terlihat
- Gambar V.I lebih baik ditampilkan di kesimpulan
- Pastikan tidak meyalahi aturan
- Sinkronkan dengan tata ruang, agar tujuan SDGs tercapai

Masukan DPLH Sulawesi Selatan (Sri Hidayat, S.Si, M.Si)

- Tambahkan info demografi di bab 3
- Terdapat beberapa gambar dan tabel yang perlu penjelasan
- DDDT di laporan belum ada presentase secara umum (Gambarkan ketersediaan air dan pangan)
- Analisis keuangan yang perlu dilakukan (kemandirian keuangan dan ruang fiskal)
- Peran para pihak dalam pencapaian TPB perlu dijelaskan
 - Pemerintah pusat: dilihat dari DAK, dana TP
 - OPD: Belanja langsung TPB
 - Swasta: Dokumen Kerjasama pemerintah dan swasta, dapat dilihat pada dokumen LKPJ
- Perlu konsistensi dan keterkaitan antar bab
- Persepsi publik dari hasil survey perlu dipisah dari analisis capaian TPB
- Daftar OPD harus dicek karena ada yang belum masuk
- Satuan pada grafik (jumlah/persentase) perlu diperjelas
- Tabel scorecard perlu diperbaiki, jumlah indikator perlu dicek lagi datanya
- Hasil analisis lain tidak perlu dimasukkan
- Tabel KRP masuk banyak yang kosong proyeksinya
- Perlu penjelasan analisis di bab sebelumnya dengan skenario dan rekomendasi



- Buat model yang bisa running, pakai causal loop, perlu narasi untuk menjabarkan gambar dan tabel
- Apa yang menjadi skenario?
- Perlu ada penjelasan keterkaitan matriks dan indikator TPB

Masukan dari pak Taswin Munier

- Tim TA harus lebih banyak diskusi dan koordinasi
- Perlu diskusi dengan tim RPJMD untuk sinkronisasi KLHS dan RPJMD
- Data yang tidak ada bisa jadi ada di instansi lain
- Harus ada konsistensi dalam tabel (format, isi, dan bahasan)

Masukan dari pak Wuryanto (Bappedalitbang)

- Dasar hukum harus dicek Kembali
- File harus dishare ke Bappeda

LANGKAH SELANJUTNYA :

- Tim sekretariat akan memperbaiki dokumen sesuai masukan narasumber
 - Tim KLHS akan mengadakan pertemuan dengan tim RPJMD untuk sinkronisasi antara KLHS dan RPJMD
-



• DAFTAR HADIR

Konsultasi Publik II KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Revisi Versi 01/2022, Publik II (02/12/2022) Provinsi Kalimantan Tengah	
Nama Lengkap	ZACHY KHOZAMAH ST
Institusi/Lembaga/Lainnya	DPUPH PROV. KALIMANTAN TENGAH
Jabatan	PLANSIAYA
No. Handphone/Whatsapp	08123366880
Email	ghoekagut_pjmd@kalteng.go.id
Tanda Tangan	
Added Time	17-12-2022 18:15:03
Referrer Name	
Text Owner	kalimantangan.dh.pjmdkalteng@gmail.com
Nama Lengkap	REMMY VALINIA FREDICOTER, ST, MA
Institusi/Lembaga/Lainnya	DISKOMINFO PROV. KALTENG
Jabatan	HC. SMMKORAB
No. Handphone/Whatsapp	08131441333
Email	remmykate72@gmail.com
Tanda Tangan	
Added Time	17-12-2022 08:31:14
Referrer Name	
Text Owner	kalimantangan.dh.pjmdkalteng@gmail.com
Nama Lengkap	DEKUSUMADJAH FARMY
Institusi/Lembaga/Lainnya	LEWAL PERUMAHAN KAWILAH PERUMUDAAN DAN PERTANAHAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jabatan	KEPALA UPTD PERUMAHAN (KAWILAH) DAN PERTANAHAN PERUMUDAAN
No. Handphone/Whatsapp	08125285144
Email	
Tanda Tangan	
Added Time	17-12-2022 08:36:00
Referrer Name	
Text Owner	kalimantangan.dh.pjmdkalteng@gmail.com
Nama Lengkap	FANDYNN
Institusi/Lembaga/Lainnya	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jabatan	KADINVENTARISASI, RENCANA DAN KLHS
No. Handphone/Whatsapp	081243147778
Email	FANDYNN78@GMAIL.COM
Tanda Tangan	
Added Time	17-12-2022 08:17:52
Referrer Name	
Text Owner	kalimantangan.dh.pjmdkalteng@gmail.com

Nama Lengkap	Dr. Perry Hewan, MPM
Institusi/Lembaga/Lainnya	Disdik Kesehatan Prov. Kalteng
Jabatan	Reputi Bidang Kesehatan Masyarakat
No. Handphone/Whatsapp	085345253363
Email	skryhewan7@gmail.com
Tanda Tangan	
Added Time	17-12-2022 09:39:56
Referrer Name	
Text Owner	kalimantangan.dh.pjmdkalteng@gmail.com
Nama Lengkap	Tika Juli Putri
Institusi/Lembaga/Lainnya	Biro Administrasi Pembangunan
Jabatan	Koordinator Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan A/PON
No. Handphone/Whatsapp	081343683751
Email	gellorina@gmail.com
Tanda Tangan	
Added Time	17-12-2022 09:09:14
Referrer Name	
Text Owner	kalimantangan.dh.pjmdkalteng@gmail.com
Nama Lengkap	M. Yakin Muzli
Institusi/Lembaga/Lainnya	GGGI
Jabatan	Environmental Policy Advisor
No. Handphone/Whatsapp	08211357725
Email	msm@yakinmuzli@gmail.com
Tanda Tangan	
Added Time	17-12-2022 09:38:45
Referrer Name	
Text Owner	kalimantangan.dh.pjmdkalteng@gmail.com
Nama Lengkap	ADITYA PUTRI
Institusi/Lembaga/Lainnya	Disdik Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Jabatan	PK/Kepala Dinas
No. Handphone/Whatsapp	00132324486
Email	aditya14@yahoo.com
Tanda Tangan	
Added Time	17-12-2022 09:02:53
Referrer Name	
Text Owner	kalimantangan.dh.pjmdkalteng@gmail.com



Nama Lengkap	AMELIA PRADITA, S.Pd	Nama Lengkap	Heidi Sigit
Instansi/Lembaga/Lainnya	SRD PERBICARAAN	Instansi/Lembaga/Lainnya	SDG
Jabatan	KELOMPOK KERJA PERTAMAHANGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Jabatan	Proyek Rekonstruksi GGD
No. Handphone/Whatsapp	081348134342	No. Handphone/Whatsapp	08131412312
Email		Email	heidi.sigit@sdg.org
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Added Time	17:12:00 08:04:11	Added Time	17:12:00 08:04:08
Referensi Nama		Referensi Nama	
Task Owner	kealingungan@prov.kalteng@gmail.com	Task Owner	kealingungan@prov.kalteng@gmail.com

Nama Lengkap	SARAH MAFI NAWA, ST	Nama Lengkap	MARINA
Instansi/Lembaga/Lainnya	DEKOPRODV. KAL.TENG	Instansi/Lembaga/Lainnya	DFPH/PPH/Proteksi
Jabatan	PELAKSANA	Jabatan	GAJAH
No. Handphone/Whatsapp	08134933708	No. Handphone/Whatsapp	0813211638
Email	sarahmafi@gmail.com	Email	
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Added Time	17:12:00 08:04:12	Added Time	17:12:00 08:04:12
Referensi Nama		Referensi Nama	
Task Owner	kealingungan@prov.kalteng@gmail.com	Task Owner	kealingungan@prov.kalteng@gmail.com

Nama Lengkap	WRE SUPRIYANDI, S. HkD	Nama Lengkap	Rina Fofia
Instansi/Lembaga/Lainnya	BAWEGAJARANAN PROK. KAL.TENG	Instansi/Lembaga/Lainnya	Dinas Koperasi dan UKM Prov. Kalteng
Jabatan	KOR. LUK DAN ISOM	Jabatan	Koordinator
No. Handphone/Whatsapp	08119827998	No. Handphone/Whatsapp	08120271734
Email	wre.supriyadi@gmail.com	Email	rinafofia1@gmail.com
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Added Time	17:12:00 08:04:08	Added Time	17:12:00 08:04:55
Referensi Nama		Referensi Nama	
Task Owner	kealingungan@prov.kalteng@gmail.com	Task Owner	kealingungan@prov.kalteng@gmail.com

Nama Lengkap	Tri Hani	Nama Lengkap	Laila Mubandari
Instansi/Lembaga/Lainnya	DH Prok. Kalteng	Instansi/Lembaga/Lainnya	UPK
Jabatan	Koordinator Pempusutan Program	Jabatan	Yoga Air
No. Handphone/Whatsapp	081249176288	No. Handphone/Whatsapp	08136344387
Email	tri.hani@prov.kalteng@gmail.com	Email	laila.mubandari@upk.com
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Added Time	17:12:00 08:05:05	Added Time	17:12:00 08:05:57
Referensi Nama		Referensi Nama	
Task Owner	kealingungan@prov.kalteng@gmail.com	Task Owner	kealingungan@prov.kalteng@gmail.com



Nama Lengkap	I. WURNATI
Institusi/Lembaga/Lainnya	BAHROKULIBAHU PRODI KALITENG
Jabatan	ASST. FSEKONOMIAN/DR. DAN PENYAGAMA
No. Handphone/Whatsapp	8818418107
Email	wurnati04@yahoo.com
Tanda Tangan	
Added Time	17/12/2020 08:58:52
Referensi Nama	
Tipe Doser	wal.kalngun.dh.prv.kaleng@gmail.com

Nama Lengkap	RI Hidayat
Institusi/Lembaga/Lainnya	DRUK Subul
Jabatan	Pengawal Perikanan
No. Handphone/Whatsapp	8815102158
Email	riharam0@gmail.com
Tanda Tangan	
Added Time	17/12/2020 08:52:15
Referensi Nama	
Tipe Doser	wal.kalngun.dh.prv.kaleng@gmail.com

Nama Lengkap	MARINDA, DR. M.Si
Institusi/Lembaga/Lainnya	BAHROK Pro. kaleng
Jabatan	Staf ahli HRD Mada
No. Handphone/Whatsapp	8812320888
Email	marinda2004ahrag@gmail.com
Tanda Tangan	
Added Time	17/12/2020 08:19:48
Referensi Nama	
Tipe Doser	wal.kalngun.dh.prv.kaleng@gmail.com

Nama Lengkap	BEMAUZ TERMI BE TERMI
Institusi/Lembaga/Lainnya	URH
Jabatan	Staf Pengajar Jurusan Kehutanan-FAPETEK, URH
No. Handphone/Whatsapp	881529166
Email	termi04@gmail.com
Tanda Tangan	
Added Time	17/12/2020 08:18:56
Referensi Nama	
Tipe Doser	wal.kalngun.dh.prv.kaleng@gmail.com

Nama Lengkap	Dr Dina Purmanawati
Institusi/Lembaga/Lainnya	DRAS Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah
Jabatan	Inspektur Suku BUDAS
No. Handphone/Whatsapp	88125281112
Email	dinapurmanawati@gmail.com
Tanda Tangan	
Added Time	17/12/2020 08:18:43
Referensi Nama	
Tipe Doser	wal.kalngun.dh.prv.kaleng@gmail.com

Nama Lengkap	AWHANI SUWARDI
Institusi/Lembaga/Lainnya	DIPYUNYAN/DR. WIKI SALSAN/TA/TEGAS
Jabatan	SEPAJA BINAAN KAWASIR Hutan LAMAS
No. Handphone/Whatsapp	88151696754
Email	awhani_jid@outlook.com
Tanda Tangan	
Added Time	17/12/2020 08:18:04
Referensi Nama	
Tipe Doser	wal.kalngun.dh.prv.kaleng@gmail.com

Nama Lengkap	Yusuf Agwan, S.Pd., M.Si
Institusi/Lembaga/Lainnya	Universitas Palangkaraya
Jabatan	Tim. Kelembagaan BUDAS
No. Handphone/Whatsapp	88125194073
Email	yusufagwan@gmail.com
Tanda Tangan	
Added Time	17/12/2020 08:18:58
Referensi Nama	
Tipe Doser	wal.kalngun.dh.prv.kaleng@gmail.com

Nama Lengkap	Devy Katerina
Institusi/Lembaga/Lainnya	Shes Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
Jabatan	Perencana Perikanan
No. Handphone/Whatsapp	88153172714
Email	katerina.devy@gmail.com
Tanda Tangan	
Added Time	17/12/2020 08:17:58
Referensi Nama	
Tipe Doser	wal.kalngun.dh.prv.kaleng@gmail.com



Nama Lengkap	Dr. Lilia Widiastuti, SP.MP	Nama Lengkap	Suhardi
Institusi/Instansi/Lembaga	PMH Universitas Pabangga Raya	Institusi/Instansi/Lembaga	Tijuan Triku
Jabatan	Terang, 001 PHS-078	Jabatan	Revisi
No. Handphone/Whatsapp	99122004267	No. Handphone/Whatsapp	08134132004
Email	lilia.widiastuti@pabangga.ac.id	Email	hik.suhardi@pabangga.ac.id
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Added Time	11/12/2020 08:17:27	Added Time	11/12/2020 08:14:28
Referensi Nama		Referensi Nama	
Task Owner	kalitengah@p.jember.kalim@gmail.com	Task Owner	kalitengah@p.jember.kalim@gmail.com

Nama Lengkap	RIJAN WINDA	Nama Lengkap	Fitri Nur Hafidha
Institusi/Instansi/Lembaga	DIKEMAS PROVINSI KALIMANTAN	Institusi/Instansi/Lembaga	Universitas Muhammadiyah
Jabatan	KADIBIDANG PENUNJANG PROGRAM	Jabatan	Asisten Kurikulum
No. Handphone/Whatsapp	99908011234	No. Handphone/Whatsapp	08225140380
Email	rijan.winda@dikemaskalteng.go.id	Email	fitri.nurhafidha@umh.ac.id
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Added Time	11/12/2020 08:18:54	Added Time	11/12/2020 08:04:58
Referensi Nama		Referensi Nama	
Task Owner	kalitengah@p.jember.kalim@gmail.com	Task Owner	kalitengah@p.jember.kalim@gmail.com

Nama Lengkap	YENI AMBER MEDRA	Nama Lengkap	Ahalla Dini Marsela
Institusi/Instansi/Lembaga	BPS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	Institusi/Instansi/Lembaga	SDS
Jabatan	DEPALA BERSI VIA BINA ESTIMASI NEGARA	Jabatan	Revisi dan Koordinasi (Layanan)
No. Handphone/Whatsapp	991118211267	No. Handphone/Whatsapp	082112341576
Email	yeni@bps.go.id	Email	ahalla.marsela@pspp.org
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Added Time	11/12/2020 08:02:32	Added Time	11/12/2020 08:00:04
Referensi Nama		Referensi Nama	
Task Owner	kalitengah@p.jember.kalim@gmail.com	Task Owner	kalitengah@p.jember.kalim@gmail.com

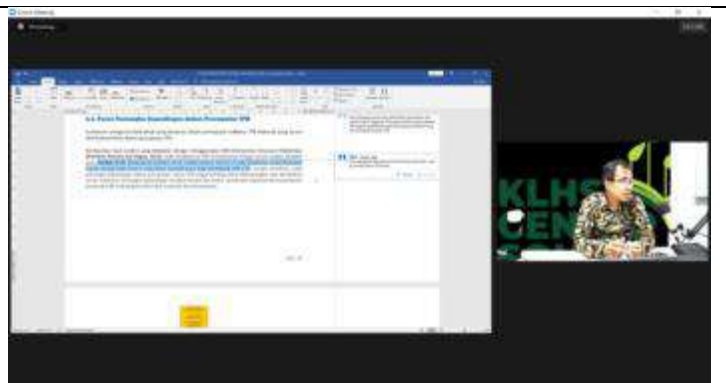
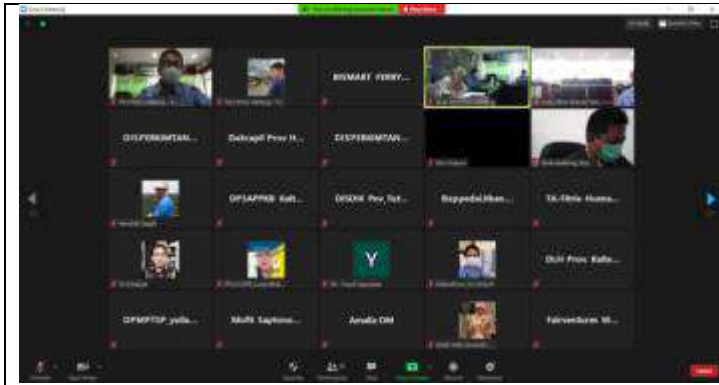
Nama Lengkap	Dr. Rita Huskarna, M., M.Si., M., CA	Nama Lengkap	Dr. Yasminda Dewi
Institusi/Instansi/Lembaga	Universitas Pabangga Raya	Institusi/Instansi/Lembaga	Deus, Perencanaan dan Strategi Kalimantan Tengah
Jabatan	IA	Jabatan	Kelembagaan dan Pengembangan Program
No. Handphone/Whatsapp	99125125779	No. Handphone/Whatsapp	08125125777
Email	Rita.huskarna@pabangga.ac.id	Email	yasminda@deus.kalim@gmail.com
Tanda Tangan		Tanda Tangan	
Added Time	11/12/2020 08:02:21	Added Time	11/12/2020 08:07:57
Referensi Nama		Referensi Nama	
Task Owner	kalitengah@p.jember.kalim@gmail.com	Task Owner	kalitengah@p.jember.kalim@gmail.com



Nama Lengkap :	Anestia Berlianda
Instansi/Lembaga/Lainnya :	Yayasan Inobu
Jabatan :	Program Assistant
No. Handphone/Whatsapp :	081267051733
Email :	aberlianda@inobu.org
Tanda Tangan :	
Added Time :	17-12-2020 08:01:36
Referrer Name :	
Task Owner :	sacalingkungan.dlh.provkaliteng@gmail.com



• DOKUMENTASI





SURAT PERMINTAAN DATA CAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milone Nomor. 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221538 - 3223756 Fax. (0536) 3221534 - 3223756

Palangka Raya, 29 Juni 2020

Kepada

Nomor	: 660/385/TL/I.1/DLH/2020	Yth.	Organisasi Perangkat Daerah
Sifat	: Penting		Provinsi Kalimantan Tengah
Lampiran	: -		
Hal	: Data Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	di -	Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 660/388/TL/I.1/DLH/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Data Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dengan ini diminta kepada Saudara untuk mengisi capaian pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan termasuk kendala yang dihadapi.

Format capaian untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat didownload https://bit.ly/Data_IndikatorTPB Data yang telah diisi, dimohon agar segera dapat disampaikan kepada kami Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Bidang Tata Lingkungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy melalui email tatalingkunganprov.klhs@gmail.com paling lambat tanggal 3 Juli 2020.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.
Peribina Utama Madya
NIP. 196912121996031003

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah



Lampiran I

Nomor : 660/399/TL/I.1/DLH/2020

Tanggal : 29 Juni 2020

Daftar Undangan

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,
2. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah,
4. Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah,
5. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah,
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah,
7. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah,
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah,
9. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah,
10. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,
11. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah,
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah,
13. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah,
14. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah,
15. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,
16. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah,
17. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah,
18. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah,
20. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah,
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah,
22. Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
23. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah,
24. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah,
25. Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
26. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
27. Biro Administrasi Pembangunan, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA, Milono Nomor. 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221538 - 3223756 Fax. (0536) 3221534 - 3223756

Palangka Raya, 20 Juli 2020

Kepada

Nomor : 660/44/TL/1.1/DLH/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Data Capaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Yth. Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah

di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 660/368/TL/1.1/DLH/2020 tanggal 16 Juni 2020 tentang Data Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), masih ada OPD yang belum menyampaikan data dan ada beberapa data tambahan yang sangat diperlukan untuk penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini diminta kepada Saudara untuk mengisi capaian pelaksanaan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan termasuk kendala yang dihadapi.

Format capaian untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat didownload <https://bit.ly/DataIndikatorTPB>. Data yang telah diisi, dimohon agar segera dapat disampaikan kepada kami Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Cq. Bidang Tata Lingkungan dalam bentuk hardcopy dan softcopy melalui email tatalingkungangprov.klhs@gmail.com paling lambat tanggal 23 Juli 2020.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.
Kepala Utama Madya
NIP. 196912121996031003

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah



Lampiran I

Nomor : 660/434/TL/I.1/DLH/2020

Tanggal : 20 Juli 2020

Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang belum terkumpul

1. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah,
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah,
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah,
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah,
5. Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,

Tambahan Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

1. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah,
2. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,
3. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah,
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah,



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA.Milono Nomor. 1 Palangka Raya 73111
Telp. (0536) 3221538 - 3223756 Fax. (0536) 3221534 - 3223756

Palangka Raya, 8 September 2020

Kepada

Nomor : 660/SS1/TL/I.1/DLH/2020 Yth. Daftar Terlampir
Sifat : Penting
Lampiran : - di -
Hal : Data Capaian Tujuan Tempat
Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)

Sehubungan belum lengkapnya data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dari Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah yang akan digunakan untuk penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020, Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara dapat mengisi capaian pelaksanaan Indikator TPB termasuk kendala yang dihadapi. Format capaian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat didownload https://bit.ly/DATATPB_KALTENG

Data yang telah diisi dapat disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah cq. Bidang Tata Lingkungan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* melalui email tatalingkunganprov.klhs@gmail.com atau Whatsapp (081360535139) paling lambat tanggal 11 September 2020.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.
Pembina Utama Madya
NIP. 196912121996031003

Tembusan :
Gubernur Kalimantan Tengah



Lampiran I

Nomor : 660/551/TLA.1/DLH/2020

Tanggal : 8 September 2020

Daftar Undangan.

1. Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah,
2. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah,
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah,
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah,
6. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah,
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah,
8. Dinas kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah,
9. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah,
10. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah,
11. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah,
12. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah,
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah,
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah,
15. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Tengah,
16. Biro Hukum, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
17. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah,
18. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Kalimantan Tengah.



CURRICULUM VITAE

I. IDENTITAS PRIBADI:

NO.	KETERANGAN	IDENTITAS
1.	N A M A	Ir. BISMART FERRY IBIE, M.Si
2.	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	Banjarmasin, 16 Maret 1964
3.	ALAMAT:	
	a. Kantor	Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Palangka Raya. Jl. H. Timang - Kampus UNPAR Tunjung Nyaho PALANGKA RAYA-73112 KALIMANTAN TENGAH - INDONESIA
	b. Rumah	Jl. Bukit Keminting XA No. 04 RT 06 RW XVIII PALANGKARAYA-73112 KALIMANTANTENGAH – INDONESIA Telp. (0536) 3241026; 0811529104
	c. Email	bismartferryibie@yahoo.com
4.	JENIS KELAMIN	Laki-laki
5.	STATUS PERKAWINAN	Kawin
6.	SUKU/KEBANGSAAN	Dayak Ngaju/Indonesia
7.	PEKERJAAN	Pegawai Negeri Sipil (Dosen)
	a. Unit Kerja	Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian-Universitas Palangka Raya
	b. NIP	19640316 198903 1 002
	c. Pangkat/Golongan	Penata Tk.I/III-d
	d. Jabatan	Lektor Madya

II. PENDIDIKAN :

NO.	TAHUN	JENJANG
1.	1994- 1997	S2, Ilmu Pengetahuan Kehutanan, Program Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor-INDONESIA.
2.	1982-1988	S1, Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru-INDONESIA.
3.	1999	Peneliti Tamu pada Hokkaido University, Jepang.

III. PENGALAMAN KERJA:

NO.	PERIODE	PEKERJAAN
	Maret 1988 - Sekarang	Staf Pengajar pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian UNPAR.
	September 1998 - Februari 1999	Peneliti Tamu pada Laboratorium Iklim Mikro, Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Bumi, Universitas Hokkaido-Jepang.
	April 2000 - Desember 2001	Asisten Peneliti pada Laboratorium Iklim Mikro, Fakultas Pasca Sarjana Ilmu Lingkungan Bumi, Universitas Hokkaido-Jepang.
	Februari 2014 - Sekarang	Ketua Pengelola PILAR (Palangka Raya Institut for Landuse and Agricultural Research) UNPAR.

IV. KURSUS-KURSUS DAN PELATIHAN:

NO.	PERIODE	JENIS KURSUS/PELATIHAN
	Agustus 2016	Peserta Pelatihan Pemodelan Dinamika Penutupan Lahan
	November 2014	Peserta Pelatihan Sistem Dinamik dengan Menggunakan Perangkat Lunak Vensim.
	Oktober 2014	Peserta Pelatihan Building Geodatabase di ESRI Indonesia. Jakarta.

V. SEMINAR, SIMPOSIUM, LOKAKARYA, WORKSHOP, KONSULTASI PUBLIK, dll:

NO.	PERIODE	SEMINAR, SIMPOSIUM, LOKAKARYA, WORKSHOP, KONSULTASI PUBLIK, dll
	7 September 2020	Penyaji pada Konsultasi Publik KLHS RPJMD Prov Kalteng Tahun 2021-2026
	3 September 2020	Penyaji pada Seminar Pengelolaan DAS Terpadu KLHK
	2 Agustus 2020	Penyaji pada Worksop DIKPLHD Kab Katingan Tahun 2019

VI. PENGALAMAN PENELITIAN:

NO.	PERIODE/TAHUN	PENELITIAN
	2020	Ketua Tim Peneliti DIKPLHD Kab Katingan Tahun 2019
	2019	Ketua Tim Peneliti Pemetaan DDDT-LH Kab Katingan
	2018	Ketua Tim Peneliti Efektivitas Sekat Kanal di KHG Kahayan-Sebangau
	2017	Ketua Tim Peneliti Penentuan Kriteria Standar Sekat Kanal
	2016	Koordinator dan Ketua Tim Pakar Penyusunan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang KPHP Unit XVII dan Unit XXXI Kalimantan Tengah.
	2016	Sekretaris Tim Penyusunan Naskah Akademis KARLAHUT Kalteng 2016.
	2016	Ketua Tim Teknis Inventarisasi GRK Kalteng 2016.
	2015	Ketua Tim Penyusun Rencana Aksi Konservasi Katingan untuk Borneo dan Kasongan kota Hijau.
	2015	Koordinator Tim Teknis Inventarisasi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalteng
	2015	Ketua Tim Penyusunan Dokumen Miniatur TN Bukit Baka Bukit Raya (TN BBR).
	2015	Ketua Tim Penyusunan Dokumen Miniatur TN Sebangau (TN S).

NO.	PERIODE/TAHUN	PENELITIAN
	2014	Ketua Tim Peneliti HCVA Kalteng.

VII. PENGALAMAN ORGANISASI:

NO.	PERIODE	NAMA ORGANISASI
	2018 - 2023	Sekretaris Faorum DAS Kalteng
	2014 - 2019	Anggota Tim Pakar Kabupaten Katingan sebagai Kabupaten Konservasi dan Kota Hijau.
	2013 - 2018	Anggota Dewan Riset Daerah Kalimantan Tengah, Bidang Lingkungan Hidup.
	2013 - 2015	Anggota Pokja REDD+ PP kalteng.
	2013-2018	Penatua Majelis Jemaat GKE Tunjung Nyaho, Resort GKE Palangka Raya Tengah.
	2013-2018	Wakil Sekretaris Badan Pekerja Harian, Majelis Jemaat GKE Tunjung Nyaho, Resort GKE Palangka Raya Tengah.
	2012 - 2017	Anggota Komisi Daerah Keanekaragaman Hayati Kalimantan Tengah.
	2011 - Sekarang	Anggota KOMDA REDD+ Kalteng
	1994 - Sekarang	Anggota Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia.

VIII. KOMPETENSI TEKNIS:

NO.	PERANGKAT LUNAK DAN BAHASA	KEGUNAAN
1.	MathCad, Matlab, SPSS, Minitab, Curva Expert, Excell, Microsoft Project, XMind, Vensim, STELLA, Vensim, AnyLogyc, AMOS, LISREL, PLS, dan Expert Choice, R, SeXL-FS,.	Program Aplikasi Matematika dan Statistika Komputer, Penjadualan Kerja, serta Modelling.
2.	ArcView, ArcGIS, QGIS, Global Mapper, GPS, Avenza Map, HEC-RAS, dan Theodolith	Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan.

3. AutoCad, SketcUp, dan Menggambar 2 dan 3 Dimensi.
Microsoft Visio, serta CorelDraw
 4. Bahasa Inggris Aktif dan Bahasa Komunikasi Lisan dan Tertulis.
Jepang Pasif serta Bahasa
Daerah Dayak Ngaju Aktif
-

IX. HOBBY:

Membaca, Bermain Gitar dan Piano.

Demikian CURRICULUM VITAE ini saya buat sesuai fakta sebenarnya.

Palangka Raya, Oktober 2020



Ir. BISMART FERY IBIE, M.Si.

CURRICULUM VITAE

I. Keterangan Pribadi

1. Nama : **YUSUF AGUSWAN, S.Hut., M.Sc.**
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Palangka Raya, 3 Agustus 1977
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Kristen Protestan
5. Status : Kawin
6. Alamat : Jln. Pangrango No. 001 Palangka Raya
(0536) 3225714

II. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN Pahandut – 3 Palangka Raya
Tahun 1983 - 1989
2. SLTP : SLTPN – 4 Palangka Raya
Tahun 1989 - 1992
3. SMU : SMAN – I Palangka Raya Jurusan Ilmu-ilmu
Biologi (A2) Tahun 1992 - 1995
4. Perguruan Tinggi :
 - a. Strata - 1 : Jurusan/Program Studi Manajemen Hutan
Fakultas Pertanian
Universitas Palangka Raya
Tahun 1995 - 2000
 - b. Strata - 2 : Program S-2 Penginderaan Jauh
Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada
Tahun 2006 - 2008

III. Riwayat Pekerjaan (Tahun 2020 – 2010)

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2021	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2018 - 2023	Tim Validator
2021	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kabupaten Seruyan Tahun 2018 - 2023	Tim Validator
2021	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah	Tim Validator

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
	(RPJMD) Perubahan Kabupaten Katingan Tahun 2018 - 2023	
2021	Survei, Investigasi dan Desain (SID) Ekstensifikasi Lahan Sawah di Lokasi Food Estate Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas, Kalimantan Tengah	Tenaga Ahli
2021	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah Tahun 2021 - 2026	Tenaga Ahli
2020	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut di Empat KHG di Kabupaten Kotawaringin Timur Seruyan, Kalimantan Tengah kerjasama antara Fakultas Pertanian – UPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tenaga Ahli
2020	Survei Investigasi dan DED Sekat Kanal di Areal Eks – PLG Kalimantan Tengah kerjasama antara Fakultas Pertanian – UPR dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan – Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tenaga Ahli
2020	Kajian Areal Konservasi Kelola Masyarakat (AKKM) di Desa Tanjung Sangalang dan Penda Barania Kabupaten Pulang Pisau, POKKER SHK	Tenaga Ahli
2020	Penaksiran Areal Terbakar dan Kerugian Pasca Karhutla Tahun 2019 di Kabupaten Katingan Kerjasama Fakultas Pertanian UPR dan BPBD - Katingan	Tenaga Ahli
2020	Tim Penyusun Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kabupaten Katingan Kerjasama Fakultas Pertanian UPR dan Dinas Lingkungan Hidup Katingan	Tenaga Ahli
2020	Tim Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Pelepasan Kawasan Hutan PT. Katingan Sawit Bersama, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah	Anggota Tim

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2019	Penyusunan Early Warning System (EWS) Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Kerjasama UPT. LLG CIMTROP, PPLH-PI UNKRIP DAN KONPHALINDO	Tenaga Ahli
2019	Perhitungan Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Teknis
2019	Studi Pemetaan Potensi Resolusi Konflik Terhadap Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Jasa Lingkungan Ekowisata di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Katingan Hulu unit XVII Kerjasama UPT. LLG CIMTROP dan WWF Kalimantan Tengah	Tenaga Ahli
2019	Penyusunan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Program Kampung Iklim, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Tenaga Ahli
2019	Pemetaan Wilayah Potensi Konflik Di Areal Kerja KPHP Unit XVII Katingan Hulu dengan Menggunakan Aplikasi Avenza Map Dan Smartphone Kerjasama UPT. LLG CIMTROP dan WWF Kalimantan Tengah	Tenaga Ahli
2019	Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Lahan Gambut Kerjasama UPT. LLG CIMTROP, PPLH-PI UNKRIP DAN KONPHALINDO	Tenaga Ahli
2018	Kajian Pengelolaan Wilayah, Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu dan Ancaman terhadap Wilayah Kelola Masyarakat Dusun Tanjung Pusaka Desa Tanjung Taruna Kabupaten Pulang Pisau, Kerjasama UPT. Laboratorium Lahan Gambut (CIMTROP) dengan POKKER SHK.	Tenaga Ahli
2018	Tim Terpadu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Pelepasan Kawasan Hutan PT. Tanjung Sawit Abadi, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah	Tim Teknis
2018	Perhitungan Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Teknis
2018	Study Efektivitas Sekat Kanal Kerjasama Antara Badan Restorasi Gambut, CIMTROP Universitas Palangka Raya	Tim Ahli

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2017	Pengembangan Kawasan Padi Organik dan Peternakan di Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Ahli
2017	Perhitungan Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Teknis
2017	Penyusunan Kriteria Sekat Kanal Kerjasama Antara Badan Restorasi Gambut, CIMTROP Universitas Palangka Raya	Tim Ahli
2017	Penyusunan Dokumen Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) di Hutan Desa Rangan Hiran Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah	Tim Ahli
2017	Survei Investigasi Calon Petani Calon Lokasi Perluasan Sawah Tahun 2017 Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Ahli
2016	Survei Investigasi Calon Petani Calon Lokasi Perluasan Sawah Tahun 2016 Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Ahli
2016	Penyusunan Masterplan Perkebunan berbasis Komoditas Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Ahli
2016	Pemetaan Mangrove di Kawasan Sungai Bakau dan Sungai Undang Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah	Tim Ahli
2016	Penyusunan Dokumen Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV) di Hutan Adat Desa Tumbang Bahanei Kalimantan Tengah	Tim Ahli
2016	Penyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Ahli
2016	Studi Reklamasi di Lokasi Pengeboran Conoco Philips Co. Ltd.; Petcon Borneo kerja sama Kerjasama Lembaga Penelitian UPR dan Conoco Philips Co. Ltd	Tim Ahli
2016	Perhitungan Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Ahli
2016	Studi Pemetaan Wilayah Adat di Jalur Seismik Blok Kuala Kurun Conoco Philips Co. Ltd. kerja sama Kerjasama Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Conoco Philips Co. Ltd	Tim Ahli

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2015	Pembuatan Konservasi Katingan untuk Borneo, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Katingan	Tim Ahli
2015	Pembuatan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang dan Tata Hutan KPHP XIV Barito Timur, Balai Pemantapan Kawasan Hutan XXI	Tim Ahli
2015	Pembuatan Miniatur Kawasan Konservasi Taman Nasional Sebangau, Kerjasama Fakultas Pertanian dan BLH Kabupaten Katingan	Tim Ahli
2015	Pembuatan Miniatur Kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, Kerjasama Fakultas Pertanian dan BLH Kabupaten Katingan	Tim Ahli
2015	Perhitungan Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Teknis
2015	Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Instruktur
2015	Pemetaan Mangrove, Kerusakan dan Distribusinya di Kabupaten Pulang Pisau, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Ketua Tim
2015	Pemetaan Wilayah Adat di Wilayah Kerja Eksplorasi Migas Conoco Philips Co. Ltd Blok Palangka Raya di Desa Bahu Palawa, Kerja sama Kerjasama Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Conoco Philips Co. Ltd.	Anggota Tim
2014	Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Dasar, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangka Raya	Instruktur
2014	Perhitungan Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan Tengah, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Teknis
2014	Penyusunan Dokumen Ancaman Terhadap Kawasan Hutan Desa di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kerjasama antara Pokker SHK, USAID IFACS dan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Tenaga Ahli
2014	Penyusunan Dokumen Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi/HCV di Wilayah Hutan Desa Kecamatan Kahayan Hilir Kab.Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kerjasama antara Pokker	Tenaga Ahli

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
	SHK, USAID IFACS dan Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	
2014	Pembuatan Masterplan Pertanian dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kalimantan Tengah dan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Tenaga Ahli
2014	Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Analis/Lanjutan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	Instruktur
2014	Pemetaan Wilayah Adat di Wilayah Kerja Eksplorasi Migas Conoco Philips Co. Ltd Blok Palangka Raya, Kerja sama Kerjasama Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian dan Conoco Philips Co. Ltd	Tenaga Ahli
2014	Konsultan Bidang Penginderaan Jauh dan SIG untuk <i>Earth Innovation Institute</i> (EII) – Institut Penelitian Nusantara (IPN) - International Program, Wilayah Kalimantan Tengah dan Papua Barat	Tenaga Ahli
2013	Konsultan Bidang Penginderaan Jauh dan SIG untuk IPAM - International Program Wilayah Kalimantan Tengah	Tenaga Ahli
2013	Pembuatan Rencana Pengelolaan KPHP Model Lamandau di Kalimantan Tengah, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V	Tenaga Ahli
2013	Penghitungan Emisi Berbasis Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2009 – 2011, Kerjasama antara Satgas REDD+, Pemprov Kalimantan Tengah dan Universitas Palangka Raya	Tenaga Ahli
2013	Pengayaan STRADA REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah, Kerjasama Provinsi Kalimantan Tengah dan Tim Khusus REDD+ Republik Indonesia.	Tenaga Ahli
2013	Penyusunan Taman Hutan Rakyat (Tahura) di Kecamatan Kahayan Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah	Tenaga Ahli
2012	Pembuatan Rencana Pengelolaan KPHL Model Kapuas di Kalimantan Tengah, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah V Banjarbaru	Tenaga Ahli

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2012	Peyusunan Kerangka Monitoring Standar Sosial dan Lingkungan REDD+ Kerjasama Fakultas Pertanian dan Lembaga Ekolabel Indonesia	Tenaga Ahli
2012	Pelatihan SIG Tingkat Dasar di Program S-2 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSAL) menggunakan <i>Open Source Quantum GIS</i> , Kerjasama antara Helsinki University, GISMOOD Finlandia dan Program Pasca Sarjana Universitas Palangka Raya	Instruktur Pendamping
2012	Penyusunan Reference Emmission Level (REL) REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2000-2009	Tenaga Ahli
2012	Pembuatan Masterplan Perkebunan Kalimantan Tengah, Kerjasama antara Dinas Perkebunan dan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Tenaga Ahli
2011	Uji Coba Reforestasi di Hutan Rawa Gambut dengan Menggunakan Metode <i>Aerial Seeding</i> di Kalimantan Tengah Kerjasama antara PT. Hutan Amanah Lestari (Kalla Group), Universitas Palangka Raya dan Universitas Hasanuddin	Tenaga Ahli
2011	Pelatihan Penginderaan Jauh dan SIG Tingkat Dasar di Program S-2 Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (PSAL) Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Instruktur
2011	Survei Tanah dan Evaluasi Kesesuaian Lahan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Fortuna Utama Globalindo, Kab. Barito Selatan di Kalimantan Tengah	Tenaga Ahli
2011	Pelatihan Penginderaan Jauh untuk Pengembangan Tingkat Emisi Referensi untuk SKPD di Kabupaten Kapuas, kerjasama antara Pemkab Kapuas dengan <i>Kalimantan Forest and Climate Partnership</i> (KFCP)	Instruktur
2010	Survei Dampak Sosial Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit PT. SMART di Kalimantan Tengah	Tenaga Ahli
2010	Formulasi Kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Kalimantan Tengah	Tenaga Ahli
2010	<i>Silviculture Research & Field Monitoring</i> kerjasama antara Jurusan Kehutanan dengan <i>Kalimantan Forest and Climate Change Partnership</i> (KFCP)	Tenaga Ahli

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2002-sekarang	Staf Pengajar pada Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Dosen Tetap

IV. Seminar, Lokakarya dan Workshop :

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2017	Workshop Teknik Reklamasi di Areal Bekas Tambang, Palangka Raya	Peserta
2016	Governor Climate and Forests Fund Indonesia Project, Jakarta	Tim GCF Kalteng
2015	Project Kick Off Meeting Forest Carbon Measurement, Monitoring and Reporting, Pontianak	Tim GCF Kalteng
2014	Workshop Penelitian Kebakaran Hutan Rawa Gambut, BOS Mawas, NASA dan Pemprov Kalimantan Tengah	Peserta
2011	Workshop Reforestasi di Hutan Rawa Gambut dengan Menggunakan Metode Aerial Seeding di Kalimantan Tengah, PT. Hutan Amanah Lestari (<i>Kalla Group</i>), Universitas Palangka Raya dan Universitas Hasanuddin, Palangka Raya	Peserta
2010	Workshop Publikasi Ilmiah	Peserta
2010	Lokakarya Bimbingan Teknis Pengembangan Kurikulum dan Silabus	Peserta
2009	Workshop Metodologi Penelitian	Peserta
2005	Seminar " <i>Behavioural Ecology and Conservation Biology (Single Species and Community Studies)</i> ", Universitas Nasional Jakarta & Universitas Palangka Raya	Peserta
2003	<i>Alternative Approaches to Sustainable Development of Peatland in Central Kalimantan and Formulation of an action Plan for Implementation</i>	Peserta
2003	Lokakarya Peningkatan Mutu Pembelajaran (PEKERTI II)	Peserta
2003	Lokakarya Peningkatan Kinerja Staf Dosen	Peserta

V. Kursus-kursus dan Pelatihan :

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2017	Pelatihan Structural Equation Modelling (SEM) dengan AMOS, PLS dan LISREL kerjasama antara Faperta UPR dan Yayasan PILAR, Palangka Raya	Peserta
2015	Pelatihan Forest Carbon Inventory Accounting (FCIT) Toolbox, Diselenggarakan oleh GCF Indonesia dan Michigan State University (MSU), Pontianak	Peserta
2014	Pelatihan <i>Pemodelan Sistem Dynamic</i> , Diselenggarakan oleh UKP4, Bappenas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Peserta
2013	Pelatihan Metodologi Penelitian, Lembaga Penelitian Universitas Palangka Raya	Peserta
2013	<i>Training of Trainer</i> Pengelolaan Hutan Lestari, Kerjasama antara WWF Kalimantan Tengah Program <i>Global Forest and Trade Network</i> (GFTN) dengan Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia (APHI)	Peserta
2012	Pelatihan Pembuatan <i>Project Design Document (PDD)</i> REDD+, Kerjasama antara Faperta Unpar, Clinton Foundation dan Winrock International	Peserta
2012	Pelatihan <i>Land Cover Modelling</i> (LCM) menggunakan Idrisi Selva, kerjasama antara Pemprov Kalimantan Tengah, Pemkab Kapuas dengan AusAID, Bappenas, Kementerian Kehutanan, Palangka Raya	Peserta
2011	Pelatihan Sistem Informasi Akademik Terintegrasi Berbasis <i>Information and Comunication Technology</i> (ICT), PUSKOM Universitas Palangka Raya	Peserta
2010	Pelatihan Sistem Informasi Geografis (SIG) Tingkat Analis di PUSPICS Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta	Peserta
2004	Peserta Pelatihan GIS dan Hotspot, <i>South Central Kalimantan Production Forest Project</i> , Palangka Raya, Kalimantan Tengah	Peserta
2003	<i>Short Courses on Management of Peatland Reseource in Central Kalimantan as part of The Establishment of Master Programme and Short Courses on Natural Resources Management and Sustainable Development</i>	Peserta

VI. Pengalaman Organisasi :

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2015 - Sekarang	Anggota Tim Governor Climate and Forests Fund (GCF) Indonesia	Peserta
2014 - sekarang	Anggota Forum Image of Central Kalimantan	Peserta
2019 - sekarang	Anggota Masyarakat Penginderaan Jauh (MAPIN) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah	Peserta

VII. Pengalaman Fasilitator :

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2017	Sarasehan Tahunan Pengelola Handeel ; Pembelajaran Bersama dalam Pengelolaan Wilayah Handeel dan Restorasi Gambut di Kabupaten Pulang Pisau	Moderator
2017	Percepatan Restorasi Gambut dalam Skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Pulang Pisau - Kalimantan Tengah	Moderator
2012	Sosialisasi Strada REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah kerjasama Satgas REDD+ dan Pemprov Kalimantan Tengah	Fasilitator
2012	Sosialisasi Bidang <i>Monitoring, Reporting dan Verification</i> (MRV)	Fasilitator
2012	Kegiatan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Sistem Pemetaan Dan Pengelolaan Data Terintegrasi Dalam Rangka Penyiapan Data Dan Peta Dasar REDD+ di Kabupaten Gunung Mas Kerjasama Pemkab Gunung Mas dan PT. Serasi Kelola Alam (PT. Sekala)	Fasilitator
2012	Lokakarya Sistem Pemetaan Dan Pengelolaan Data Terintegrasi Dalam Rangka Penyiapan Data Dan Peta Dasar REDD+ Kalimantan Tengah Kerjasama Antara Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+, Komisi Daerah REDD+ Kalimantan Tengah Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah dan PT. Serasi Kelola Alam (PT. Sekala)	Fasilitator
2012	Kegiatan Ujicoba Standar Sosial dan Lingkungan (SSL) REDD+, Desa Petak Puti Kabupaten Kapuas Prov. Kalimantan Tengah Kerjasama Antara Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Clinton Foundation	Fasilitator

Tahun	Nama Kegiatan	Keterangan
2011	Lokakarya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Terpadu Kahayan, Mentaya dan Kapuas Kalimantan Tengah Kerjasama Antara Balai Pengelolaan DAS Kahayan dan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Fasilitator
2011	Lokakarya Kerentanan dan Adaptasi Perubahan Iklim Kerjasama Antara Pemprov Kalimantan Tengah dengan USAID – IFACS	Fasilitator
2011	Kegiatan Pertemuan Antara Pemkab Pulang Pisau, <i>United States Departement of Agriculture Forest Service</i> (USDA – Forest Service) dan USAID – IFACS (<i>Indonesia Forestry and Climate Support</i>)	Fasilitator
2010	Kegiatan Pembangunan Kawasan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kalimantan Tengah Kerjasama Antara Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya	Fasilitator

VIII. Penelitian :

Tahun	Judul Penelitian	Keterangan
2020	Peat Lost by Fire in Kalampangan Area, Central Kalimantan, Indonesia	Anggota Tim Peneliti
2019	Pola Degradasi Dan Deforestasi Di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 - 2017	Peneliti Utama
2019	Pola Sebaran Titik Panas (hotspot) Di Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 - 2017	Peneliti Utama
2017	Perhitungan Degradasi dan Deforestasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2017	Peneliti Utama
2016	Perhitungan Degradasi dan Deforestasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2016	Peneliti Utama
2015	Perhitungan Degradasi dan Deforestasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011-2012	Peneliti Utama
2014	Penghitungan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2014	Tim Peneliti
2013	Penghitungan Emisi Berbasis Lahan Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2009 – 2011	Tim Peneliti

Tahun	Judul Penelitian	Keterangan
2012	Perhitungan Reference Emmission Level (REL) REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah	Tim Peneliti
2012	Sidik Cepat Kesesuaian Lahan Hutan Tanaman Industri Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) di Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah	Peneliti Utama
2011	Monitoring Perubahan Lahan Hutan Rawa Gambut Tropika dengan Menggunakan Data Digital Landsat TM/ETM	Peneliti Utama
2011	Reforestasi di Hutan Rawa Gambut dengan Menggunakan Metode Aerial Seeding di Kalimantan Tengah, PT. Hutan Amanah Lestari (<i>Kalla Group</i>), Universitas Palangka Raya dan Universitas Hasanuddin, Palangka Raya	Tim Peneliti
2010	Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah	Peneliti Utama
2010	Penentuan Zonasi Kerawanan <i>Illegal Logging</i> Di Hutan Rawa Gambut Tropika Dengan Metode Kuantitatif Berjenjang Tertimbang	Peneliti Utama
2009	Pemetaan Struktur Tegakan Hutan Rawa Gambut Tropika Kalimantan Tengah dengan Menggunakan <i>Forest Canopy Density Mapper 1.0</i> dan Data Digital Landsat 7 ETM ⁺	Peneliti Utama
2008	Terapan Transformasi Indeks Vegetasi dan Klasifikasi Unsupervised untuk Menduga Volume Tegakan Hutan Rawa Gambut Tropika Kalimantan Tengah	Peneliti Utama
2008	Pemanfaatan Citra Landsat 7 ETM ⁺ Untuk Menduga Volume Tegakan Hutan Rawa Gambut Tropika Kalimantan Tengah	Peneliti Utama

IX. Keterampilan :

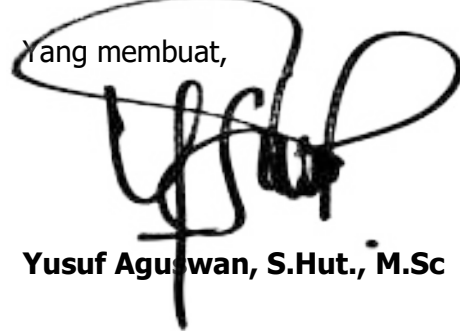
No.	Penguasaan Keterampilan	Keterangan
1	Menguasai Penggunaan Perangkat Lunak Penginderaan Jauh : ENVI 5.1, Forest Canopy Density Mapper 2.0, dan Global Mapper 18	Mahir
2	Menguasai Penggunaan Perangkat Lunak Sistem Informasi Geografis ArcView 3.3 dan Arc GIS 10.5	Mahir
3	Menguasai Penggunaan Perangkat Lunak Drawing AutoCAD Map untuk Perpetaan	Mahir

No.	Penguasaan Keterampilan	Keterangan
4	Menguasai Terapan Global Positioning System (GPS) untuk Pemetaan dan Perangkat Lunak <i>MapSorce</i> , <i>DNR GPS</i> dan <i>OzieExplorer</i>	Mahir
5	Menguasai Perangkat Lunak Perhitungan Karbon Hutan, Forest Carbon Inventory Toolbox dari Michigan State University	Intermediate

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, Juni 2021

Yang membuat,



Yusuf Aguswan, S.Hut., M.Sc



UNIVERSITAS GADJAH MADA
I J A Z A H

Telah memenuhi persyaratan dan mempertahankan tesis di hadapan Dewan Penguji
dalam Program Studi Penginderaan Jauh di Fakultas Geografi

Yusuf Aguswan

NRM: 24030/I-6/257/06

Lahir di Palangkaraya pada tanggal 3 Agustus 1977
Sehingga kepadanya diberikan gelar Master of Science (M.Sc.)
beserta hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut

Diberikan di Yogyakarta pada tanggal 29 Oktober 2008

Dekan

Prof. Dr. Suratman, M.Sc.



Rektor

Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D.

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Fitria Husnatarina, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS., CSRA., ACPA
2	Tempat dan Tanggal Lahir	Pulang Pisau, 01 Maret 1979
3	Jenis Kelamin	Perempuan
4	Pekerjaan	Dosen Akuntansi FEB Universitas Palangka Raya
5	Pendidikan Terakhir	S3 Akuntansi
6	E-mail	fitria.husnatarina@feb.upr.ac.id
7	Hp	081251359779
8	Alamat Rumah	Jl. Nyai Rendem II No. 44A Palangka Raya

B. Riwayat Pendidikan

1. S1 : Sarjana Ekonomi (SE.) Jurusan Akuntansi Universitas Merdeka Malang. Tahun 2000.
2. S2 : Magister Sains (M.Si.) Jurusan Akuntansi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tahun 2003.
3. Profesi Akuntan (Ak) di PPAK Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
4. S3 : Doktor (Dr.) Jurusan Akuntansi Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Tahun 2015.
5. *Chartered Accountant (CA)*. Ikatan Akuntan Indonesia. Tahun 2014.
6. *Certified Sustainability Reporting Specialist (CSRS)*. Universitas Brawijaya. Tahun 2017
7. *Certified Sustainability Reporting Assurer (CSRA)*. Universitas Brawijaya. Tahun 2018
8. *Associate Certified Public Accountant (ACPA)*. IAPI. Tahun 2020.

C. Pengalaman Kerja

No	Tahun	Pekerjaan
1.	2005 - Sekarang	Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya.
2.	2018 - Sekarang	Wakil Ketua Bidang Akademik STIE YBPK Palangka Raya
3.	2019 - 2023	Sekretaris Satuan Pengawas Internal Universitas Palangka Raya
4.	2019 - Sekarang	Anggota Dewan Riset Daerah (DRD) Prov. Kalimantan Tengah
5.	2019 - Sekarang	Ketua Tim Promosi Universitas Palangka Raya
6.	2021 - Sekarang	Pembina Unit Kegiatan Koperasi Mahasiswa Universitas Palangka Raya

D. Pengalaman Organisasi Profesi

No	Tahun	Organisasi
1.	2016 - 2020	Ketua Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Kalimantan Tengah
2.	2016 - Sekarang	Direktur Galeri Investasi (GIBEI) Universitas Palangka Raya
3.	2019 - 2022	Anggota Pengurus Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Palangka Raya
4.	2018 - 2022	Koordinator Bid. Pendidikan Forum Bundes Indonesia Wil. Kalimantan Tengah
5.	2020 - 2024	Dewan Konsultatif Institut Pemeriksa Keuangan Negara Wil. Kalimantan Tengah
6.	2021 - 2024	Dewan Penasehat Generasi Digital Indonesia (Gradasi) Provinsi Kalimantan Tengah
7.	2021 - 2024	Koordinator Pengembangan Pendidikan dan Kepemimpinan Kagama Kalimantan Tengah

E. Pengalaman Narasumber/Peserta Pelatihan/Workshop/Seminar

No	Tahun	Nama Pelatihan/Workshop	Keterangan	
			Tanggal	Penyelenggara
1.	2016	Seminar Nasional Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah	14 Mei 2016	IAI Wilayah Kalimantan Selatan
2.	2016	Akuntansi Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah	3 Juni 2016	IAI Wilayah Kalimantan Tengah
3.	2017	Workshop Pengelolaan Dana Desa	21 Desember 2017	Program Star BPKP MM Pascasarjana UPR
4.	2017	Workshop Peningkatan Keuangan Daerah	22 Desember 2017	Program Star BPKP MM Pascasarjana UPR
5.	2019	Kuliah Umum APBN 2019 dengan tema Adil, Sehat dan Mandiri	30 Januari 2019	Kerjasama FEB UPR dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Tengah
6.	2019	Seminar Nasional Pembangunan Infrastruktur Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Regional	15 Juli 2019	Kerjasama ISEI, Bank Indonesia dan FEB Universitas Palangka Raya
7.	2019	Higher Education Management Program (Visiting International Professional Program)	5 – 13 Oktober 2019	Michigan State University, USA

Demikian *Curriculum Vitae* ini dibuat dengan sesungguhnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, Januari 2021

Yang membuat,



(Fitria Husnatarina)

A-UB4-1707-002

The National Center for Sustainability Reporting

Proclaims that

Dr. Fitria Husnatarina

Has earned the designation
Certified Sustainability Reporting Assurer
With all its privileges and obligations

Jakarta, 7 July 2017



Ali Darwin, Ak., M.Sc.
Chairman Board of Director



Dewi Fitriarani Ph.D., CSRA., CMA
Chairman Board of Examiners



No. 0016367



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN

PIAGAM
REGISTER NEGARA AKUNTAN

diberikan kepada

FITRIA HUSNATARINA

NOMOR: RNA 16122

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1954 nama tersebut di atas terdaftar dalam Register Negara Akuntan serta berhak untuk menyandang gelar dan bertindak sebagai Akuntan (Ak.) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Februari 2017
a.n. Menteri Keuangan
Kepala Pusat





PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Mayapitha Vidyadevi, S.Si.

telah mengikuti

PELATIHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Gelombang 12 pada tanggal 8 - 12 Juni 2020 (40 JPL)
dan kepadanya diberikan sertifikat dengan nomor KLHS-122020011/I1.B04.1.1/LL/2020

Bandung, 15 Juni 2020

Kepala PSLH ITB



Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D., IPU.

NIP. 195609061982111001



Nama : Mayapitha Vidyadevi, S.Si.
Tempat, Tanggal Lahir : Palangka Raya, 17 Desember 1985

Tanda tangan,

**Sertifikat ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan PSLH-ITB
Nomor : 018/I1.B04.1.1/LL/2020 tentang Kelulusan Peserta
Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Gelombang 12
Tanggal 8 - 12 Juni 2020**

**Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Gelombang 12, 8 - 12 Juni 2020 (40 JPL)**

Materi yang diberikan :

No	Mata Ajaran	Jumlah JPL
1	Peran KLHS dalam Pembangunan Berkelanjutan	2
2	Peran KLHS untuk Mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam RPJMD	2
3	Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	2
4	Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dan prioritas serta KRP	2
5	Uji Silang Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan KRP Berdampak Lingkungan Hidup	2
6	Analisis Enam Muatan KLHS Kehati	2
7	Analisis Enam Muatan KLHS Jasa Ekosistem dan Daya Dukung dan Daya Tampung	2
8	Analisis Enam Muatan KLHS Efisiensi SDA dan Analisis Risiko	2
9	Analisis Enam Muatan KLHS Risiko Perubahan Iklim	2
10	Rekomendasi KLHS RTRW dan RDTR	2
11	KLHS RZWPJK	2
12	KLHS RPJMD (Identifikasi Isu dan Analisis 17 TPB/SDGs)	3
13	KLHS RPJMD (Analisis 6 Muatan KLHS)	2
14	Rekomendasi KLHS RPJMD	2
15	Pengintegrasian KLHS ke dalam Dokumen KLHS RPJMD	3
16	Wawasan Pengelolaan Lingkungan	2
17	Daya Dukung dan Daya Tampung	2
18	Kebencanaan dan Perubahan Iklim	2
19	Isu Lingkungan di Perkotaan	2
Jumlah		40



PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Hendra Saputra, S.Kom.

telah mengikuti

PELATIHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Gelombang 12 pada tanggal 8 - 12 Juni 2020 (40 JPL)
dan kepadanya diberikan sertifikat dengan nomor KLHS-122020010/I1.B04.1.1/LL/2020

Bandung, 15 Juni 2020

Kepala PSLH ITB



Tjandra
Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D., IPU.

NIP. 195609061982111001



Nama : Hendra Saputra, S.Kom.

Tempat, Tanggal Lahir : Sampit, 17 Mei 1991

Tanda tangan,

**Sertifikat ini diberikan berdasarkan Surat Keputusan PSLH-ITB
Nomor : 018/I1.B04.1.1/LL/2020 tentang Kelulusan Peserta
Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Gelombang 12
Tanggal 8 - 12 Juni 2020**

**Pelatihan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Gelombang 12, 8 - 12 Juni 2020 (40 JPL)**

Materi yang diberikan :

No	Mata Ajaran	Jumlah JPL
1	Peran KLHS dalam Pembangunan Berkelanjutan	2
2	Peran KLHS untuk Mengintegrasikan Sustainable Development Goals (SDGs) ke dalam RPJMD	2
3	Tata Cara Penyelenggaraan KLHS dan Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	2
4	Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis dan prioritas serta KRP	2
5	Uji Silang Isu Pembangunan Berkelanjutan dengan KRP Berdampak Lingkungan Hidup	2
6	Analisis Enam Muatan KLHS Kehati	2
7	Analisis Enam Muatan KLHS Jasa Ekosistem dan Daya Dukung dan Daya Tampung	2
8	Analisis Enam Muatan KLHS Efisiensi SDA dan Analisis Risiko	2
9	Analisis Enam Muatan KLHS Risiko Perubahan Iklim	2
10	Rekomendasi KLHS RTRW dan RDTR	2
11	KLHS RZWP3K	2
12	KLHS RPJMD (Identifikasi Isu dan Analisis 17 TPB/SDGs)	3
13	KLHS RPJMD (Analisis 6 Muatan KLHS)	2
14	Rekomendasi KLHS RPJMD	2
15	Pengintegrasian KLHS Kedalam Dokumen KLHS RPJMD	3
16	Wawasan Pengelolaan Lingkungan	2
17	Daya Dukung dan Daya Tampung	2
18	Kebencanaan dan Perubahan Iklim	2
19	Isu Lingkungan di Perkotaan	2
Jumlah		40



PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Fansyah, S.Hut.

telah mengikuti

PELATIHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Gelombang 12 pada tanggal 8 - 12 Juni 2020 (40 JPL)
dan kepadanya diberikan sertifikat dengan nomor KLHS-122020014/11.B04.1.1/LL/2020

Bandung, 15 Juni 2020

Kepala PSLH ITB



Prof. Tjandra Setiadi, Ph.D., IPU.

NIP. 195609061982111001



PUSAT STUDI LINGKUNGAN HIDUP
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

SERTIFIKAT

DIBERIKAN KEPADA

Adiyaksa Prasadapati, S.T.

telah mengikuti

PELATIHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Gelombang 12 pada tanggal 8 - 12 Juni 2020 (40 JPL)
dan kepadanya diberikan sertifikat dengan nomor KLHS-122020030/11.B04.1.1/LL/2020

Bandung, 15 Juni 2020

Kepala PSLH ITB



[Signature]
Prof. Djandra Setiadi, Ph.D., IPU.

NIP. 195609061982111001